

DISERTASI

KAITAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN RI. NOMOR X TANGGAL 16 OKTOBER 1945 DENGAN PERJANJIAN LINGGARJATI DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1945–1947

**(Suatu studi tentang Interaksi Konteks Ekonomi – Politik
Domestik dan Internasional dengan Diplomasi untuk
Mendapatkan Pengakuan Dunia Internasional)**



Soepardi Sariohartono

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

**KAITAN ANTARA
MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN RI.
NOMOR X TANGGAL 16 OKTOBER 1945
DENGAN PERJANJIAN LINGGARJATI
DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA
TAHUN 1945–1947**

**(Suatu studi tentang Interaksi Konteks Ekonomi – Politik
Domestik dan Internasional dengan Diplomasi untuk
Mendapatkan Pengakuan Dunia Internasional)**

DISERTASI

Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
di bawah pimpinan Rektor Universitas Airlangga

Prof. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr.

telah dipertahankan di hadapan
Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga

Pada hari : Selasa

Tanggal : 29 April 1997

Jam : 10.00 (BBWI)

Oleh:

SOEPARDI SARIOHARTONO, Drs

NIM. 099311466 D

Promotor : Prof. Dr. Idris Andrian Kesuma

Ko-Promotor : Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.

Lambaran Pengesahan

Disertasi ini telah disetujui

Tanggal 17 Mei 1997

Oleh :

Promotor



Prof. Dr. IDRIS ANDRIAN KESUMA

Ko-Promotor



Drs. RAMLAN SURBAKTI, M.A., Ph.D.

Telah diuji pada ujian tahap I (tertutup)

Tanggal 28 Februari 1997

Panitia Penguji Disertasi

Ketua : Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A.

- Anggota :**
- 1. Prof. Dr. Idris Andrian Kesuma**
 - 2. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, S.H., LL.M.**
 - 3. Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.**
 - 4. Dr. Suyatno Kartodirdjo**
 - 5. Dr. Budi Winarno**
 - 6. Dr. Abdurrahchman**

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 1465/J03/PP/1997
Tanggal 12 Maret 1997**

Manusia dilahirkan untuk belajar dan beramal

*Hai manusia, ketahuilah segala sesuatu di dunia ini
dapat berlangsung hidup karena kecintaan.*

*Manusia bisa selamat dalam kehidupannya karena dicintai oleh Tuhan.
Binatang-binatang seperti, kucing, anjing, dan yang lain bisa berlangsung
kehidupannya karena dicintai oleh manusia.*

*Hai manusia cintailah bangsamu, tanah airmu, agamamu, orang tuamu, saudaramu,
semua makhluk, budi luhur, kautaman dan kejujuran*

*Hai manusia barang siapa menanam padi akan memetik buah padi,
dan barang siapa menanam rawe, akan menerima, gatal-gatalnya.*

*Makanlah semua makanan yang memang milikmu sendiri
jangan makan makanan milik orang lain secara tidak sah.*

*Ingatlah hukum buatan manusia bisa direkayasa
tetapi hukum Tuhan akan berjalan sesuai kehendak-Nya.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan segala rahmat dan kurniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-3 dan penelitian disertasi ini. Dengan selesainya disertasi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Rektor Universitas Airlangga, **Prof. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr.** dan mantan Rektor Universitas Airlangga **Prof. H. Soedarso Djojonegoro, dr.** atas kesempatan, fasilitas dan dorongan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga **Prof. Dr. H. Soedijono, dr** dan staf dan mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga **Prof. Dr. Soetarjadi, Apt.** yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A., Dr, Widodo Jatim Pujirahardjo, MS., MPH., Dr.PH., dr, dan Dr. Dede Oetomo dan Dr. Zainoedin, Apt. sebagai dosen penulis pada Program Pascasarjana Unair.

Prof. Dr. Idris Andrian Kesuma selaku promotor utama yang dengan kesabarannya dalam membimbing penulis dan selalu memberikan wawasan yang berguna bagi penyelesaian disertasi ini.

Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D. selaku promotor pembantu yang dengan tekun dan kesabarannya memberi petunjuk kepada penulis cara-cara penyelesaian disertasi ini.

Ketua Umum Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya **I.B. Alit, S.H.** yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Dan telah memberi fasilitas-fasilitas yang penulis perlukan, antara lain, penggunaan gedung dan sarananya untuk keperluan seminar, fasilitas mess yang cukup baik untuk promotor dan dosen penguji yang dari Yogyakarta, Solo, Bandung dan Jakarta kalau kebetulan berada di Surabaya.

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, **Prof. Dra. Ny. Saulina Pandjaitan** yang telah memberi dorongan kepada penulis di dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Mantan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Drs. R. Soeparman Hadipranoto** (almarhum) yang selalu mendorong penulis untuk meneruskan studi di S-3.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Drs. Djarot Syaiful Hidayat, M.S.** yang selalu membantu fasilitas-fasilitas yang penulis perlukan dan memberikan pengurangan jam memberi kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Bapak **Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani**, Bapak **Soebadio Sastrosatomo**, Bapak **Dr. A.H. Nasution**, Bapak **Manai Saphiaan**, Ibu **Soepeni**, Bapak **Prof. Dr. I. Nyoman Dekker** yang telah membantu penulis di dalam mengadakan penelitian dengan wawancara khusus sekitar bulan Januari 1996 sampai April 1996.

Tim Penguji, **Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A.** sebagai ketua tim dan para anggotanya **Prof. Dr. Idris Andrian Kesuma**, **Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.**, **Drs. Ramlan Surbakti, M.A. Ph.D.**, **Dr. Budi Winarno**, **Dr. Suyatno Kartodirjo**, dan **Dr. Abdurrachman** yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang telah berkenan datang ke Surabaya untuk kepentingan penulis.

Drs. Margono Agus Santoso, **Hardi Julianto** dan saudara-saudaranya, yang telah banyak membantu penulis dari proses pengetikan disertasi ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada isteri tercinta **Ny. Soetarti** yang selalu mendorong dan memberi semangat serta mengingatkan kalau penulis belajar terlalu banyak atau terlalu malam. Serta keempat permata hatiku, anak-anakku, **Ir. Adi Poerwanto**, **Ir. Adi Soelistijo, M.Sc. (Eng)**, **dr. Adi Djokosasono, Sp.T.H.T.**, **Ir. Adi Hendrarto Sambodo** yang selalu turut mendorong dan mendoakan ayahnya agar tetap sehat dan tetap bersemangat.

Semoga budi baik dan amalan-amalan mereka segera mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Amin.

RINGKASAN

Penelitian ini meneliti “kaitan antara maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Oktober 1945 dengan Perjanjian Linggarjati dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1947” (suatu studi tentang interaksi konteks ekonomi-politik domestik dan internasional dengan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional).

Bangsa Indonesia telah lama mencita-citakan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Pasca Perang Dunia II situasi nasional dan internasional memungkinkan bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita itu. Dengan memanfaatkan Atlantic Charter dan adanya *vacuum of power* di Indonesia, Soekarno-Hatta mengatasnamakan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan selamat. Rakyat mendukung peristiwa penting itu, mendukung Soekarno-Hatta dalam upaya mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia, rakyat bertekad mempertahankan negara proklamasi manakala ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Namun pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu berada di Australia mengadakan reaksi, menyatakan bahwa proklamasi itu tidak sah, tidak mengakui keberadaan negara RI dan bermaksud akan menghancurkannya melalui kekuatan militer, melalui peperangan.

Persengketaan Indonesia-Belanda tidak bisa dihindarkan. Cara penyelesaiannya, pihak Belanda menempuh jalan peperangan.

Soekarno-Hatta yang didukung rakyat ingin menyelesaikannya melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB.

Pihak Belanda memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, menuduh negara RI adalah fasis. Belanda tidak mau berunding dengan Indonesia. Guna menangkai hambatan perundingan ini Soekarno-Hatta mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya.

Pihak Inggris dan Amerika Serikat terus mendesak Belanda supaya berunding dengan Indonesia. Belanda pada akhirnya memperhatikan desakan itu. Terjadilah Perundingan Linggarjati yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati tanggal 25-3-1947.

Pada tanggal 21-7-1947 Belanda tidak mengakui lagi Persetujuan Linggarjati dan mengadakan Agresi I menyerbu wilayah Republik Indonesia. Di dalam situasi demikian DK PBB menilai bahwa pertempuran di Indonesia itu membahayakan perdamaian dunia, mulai saat itu penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda ditangani oleh Dewan Keamanan PBB, dibentuk Komisi Tiga Negara untuk mengawasi perundingan Indonesia-Belanda (Perundingan Renville).

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengadakan Agresi II, menyerbu wilayah Indonesia lalu menduduki Yogyakarta. Presiden, Wakil Presiden beberapa Menteri ditawan oleh Belanda.

Dewan Keamanan PBB memerintah Indonesia-Belanda mengadakan perundingan di bawah pengawasan UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*). Perundingan itu disebut "Konferensi Meja Bundar" (KMB) dilaksanakan di negeri Belanda, antara bulan Oktober-November 1949.

Hasil penting dari KMB, Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS ini pada tanggal 15 Agustus 1950 dilebur menjadi negara Republik Indonesia (negara Proklamasi).

Simpulan: "negara Republik Indonesia berhasil ditegakkan eksistensinya berdasar kekuatan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat".

ABSTRACT

- Key words :**
- Rational actor
 - Domestic and international politic-economical context
 - Political decree
 - Diplomacy
 - Recognition

The Independence of Indonesia had been dreamt for a long time by the people of Indonesia. After the World War II the international and national situation brought the possibility for nation to make the dream come true.

By using the third principle of Atlantic Charter and the vacuum of power in Indonesia, Soekarno-Hatta as the representative of the Indonesian people proclaimed the independence of the nation on August 17, 1945.

The people of Indonesia supported this action. They agreed to support Soekarno-Hatta to defend the existence of the nation from interference not only internal but also external.

But on the other hand, the Dutch government denied the proclamation. The conflict couldn't be avoided and, as the result, the Dutch was ready to attack Indonesia. Soekarno-Hatta, in this case, tried to finish this conflict by negotiating with the Dutch under the surveillance of the UN's Security Council dealing with the United Nations Charter paragraph 2 article 3.

The Dutch government itself by using the fourth paragraph of *Aturan Peralihan UUD '45* claimed the Republic of Indonesia as a fascist by negotiating with the Indonesian government. Therefore, Soekarno-Hatta finally changed the fourth paragraph of *Aturan Peralihan*, in order not to interfere the road to negotiation, to become the Declaration of the Vice Presiden of the Republic of Indonesia No. X on October 16, 1945.

England and United States of America, in this case, kept on forcing the Dutch

to finish the conflict by negotiating with the government of Indonesia. The Dutch finally could accept this idea and in the moment, the Linggarjati Treaty was finally signed on March 25, 1947.

But on July 21, 1947 the Dutch denied the treaty and made a military action on Indonesia which was famous as the First Agression. The great war arose.

In this situation, the United Nations Security Council claimed that the war shouldn't be happening for it could interfere the world peace. So, from that moment, the UN Security Council would handle any actions dealing with the finishing of the conflict.

In this case, the Commission of the Three Nations or *Komisi Tiga Negara* was formed to supervise the Renville Treaty.

On December 19, 1948 the Dutch again made a second military action, known as the Second Agression, to attack Indonesia. Yogyakarta was conquered and the President, Vice President and several ministers were put on prison.

The United Nation Security Council again forced the negotiation between Indonesia-Dutch under the supervision of UNCI (United nations Commission for Indonesia). The negotiation was famous as the Round Table Conference (*Konferensi Meja Bundar*) which was held in Holland in October-November 1949.

The important point of the *KMB* itself was that the Dutch government finally recognized the sovereignty of the *RIS* on December 27, 1949. The *Republik Indonesia Serikat* itself, later on, was reformed to become the integrity of the Republic of Indonesia which, in the other words, is the Republic of Indonesia.

Conclusion:

The existence of the Republic of Indonesia was successfully being defended based on the diplomacy and was backed up by the Military power and the people of Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	iii
Nama Panitia Penguji Disertasi	v
Ucapan Terima Kasih	vii
Ringkasan	x
Abstract	xii
Daftar Isi	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Kajian Pustaka yang berhubungan dengan tulisan ini	6
Alasan pemilihan dan keaslian (originalitas) judul	15
Rumusan Masalah	16
Tujuan Penelitian	17
Kerangka Dasar Pemikiran	18
- Kerangka dasar pemikiran tentang filsafat sejarah	19
- Kerangka dasar pemikiran tentang hak menentukan nasib sendiri (self determination)	23
- Kerangka dasar pemikiran tentang perimbangan kekuasaan (balance of power)	24
- Kerangka dasar pemikiran tentang diplomasi	26

- Kerangka dasar pemikiran tentang pengakuan (recognition) terhadap negara baru	29
Metode Penelitian	33
BAB II	42
MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN RI NO. X TANGGAL 16-10-1945 BESERTA KONTEKS EKONOMI-POLITIK DAN PERAN TOKOH PERUMUSANNYA	42
Pengantar	42
Konteks ekonomi-politik domestik yang mendorong ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945	55
Perjuangan Kemerdekaan Indonesia	55
Proses lahirnya kemerdekaan Indonesia	61
- Persepsi bangsa Indonesia dan bangsa peristiwa penyerahan Jepang kepada sekutu tanggal 15-8-1945	62
- Persepsi Pemerintah dan bangsa Belanda terhadap Indonesia kaitannya dengan penyerahan Jepang kepada sekutu tanggal 15-8-1945	63
Konteks ekonomi-politik internasional yang mendorong ditetapkannya Maklumat Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945	68
Berakhirnya Perang Dunia II dan terjadinya Perang Dingin	69
Lahirnya the Atlantic Charter dan proses berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) The Untited Nation Organization	71
Terjadinya Perang Dingin	76
Di dalam mempertahankan eksistensi negara Proklamasi Pemerintah RI memanfaatkan peluang yang terdapat pada Perang Dingin	80
Latar Belakang pribadi para tokoh pemarkasa dan yang berperan dalam proses ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan Perjanjian Linggarjati	85
Soekarno	86

Pelaksanaan Perjanjian Linggarjati dan prospek pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda	195
Signifikasi Perjanjian Linggarjati terhadap pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda	204
BAB IV	215
SIMPULAN DAN IMPLIKASINYA	215
Pengantar	215
Simpulan	215
Implikasi teoritiknya	224
Keterbatas Studi	242
Implikasi Praktis	244
Masalah lain yang perlu diteliti	250
DAFTAR PUSTAKA	252
LAMPIRAN I : Hasil Penelitian Studi Dokumen dengan Content Analisis	
LAMPIRAN II : Hasil Penelitian Penelitian dengan Wawancara Khusus	
LAMPIRAN III : Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam Penelitian Studi Dokumen	
LAMPIRAN IV : Bagan Disertasi	

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rencana penelitian tentang "*Kaitan antara Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dengan Perjanjian Linggarjati dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1947*" didasari sekurang-kurangnya enam faktor seperti berikut ini:

Pertama, Keinginan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945 sewaktu Soekarno-Hatta, dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, negara baru ini belum diakui oleh dunia internasional, utamanya pemerintah Belanda. Malahan, pemerintah Belanda berupaya mengembalikan penjajahan di Indonesia.

Kedua, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya sebagai realisasi konsepsi diplomasi, untuk mengubah bentuk pemerintahan demokrasi presidensial, sesuai dengan UUD 1945 menjadi bentuk pemerintahan demokrasi parlementer. Semuanya ini dilakukan untuk membuka kemungkinan diadakannya perundingan antara Indonesia-Belanda, dalam rangka menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu. Selain itu, maklumat tersebut juga difungsikan sebagai upaya Pemerintah dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan keberadaan negara proklamasi Negara Republik Indonesia. Maklumat politik yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut:

- Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 yang intinya "mengubah" isi pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang semula berbunyi, Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk berdasarkan UUD ini, kekuasaannya dipegang oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat, menjadi, Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk berdasarkan UUD ini, maka KNIP disertai kekuasaan legislatif dan turut serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Karena gentingnya keadaan pekerjaan KNIP sehari-hari dilakukan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat

(BPKNIP) yang bertanggungjawab kepada KNIP.¹⁾ Sebagai “maklumat politik pelaksanaan” dari Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 ditetapkanlah maklumat-maklumat politik berikut ini.

- Maklumat Politik Pemerintah RI tanggal 1-11-1945²⁾ yang isi intinya adalah, sikap politik pemerintah RI ke luar dan ke dalam negeri. Ke luar, karena masyarakat internasional waktu itu mulai melihat dan memperhatikan negara dan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, pemerintah Indonesia merasa perlu menyatakan sikap negara dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak membenci orang asing, juga tidak membenci orang Belanda, hanya berkehendak untuk dibiarkan merdeka mengatur rumah tangga sendiri. Bangsa Indonesia tidak ingin menggunakan kekerasan; kalau di Indonesia ada kekerasan, semata-mata kekerasan tersebut berasal dari orang-orang Belanda yang akan mengembalikan kekuasaan penjajahan di Indonesia. Kalau dibiarkan merdeka, kekayaan yang melimpah di negara Indonesia masih mungkin dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Belanda. Tetapi semuanya itu hanya akan dapat dimulai jikalau pertentangan antara Belanda dan Indonesia dapat diselesaikan dengan pengakuan terhadap hak Indonesia untuk menentukan nasib sendiri, yakni pengakuan terhadap negara dan pemerintah RI yang telah di pilih. Dengan pengakuan kemerdekaan itu, Indonesia akan menanggung segala apa yang patut ditanggung menurut kedudukan Indonesia. Segala hutang Hindia Belanda sebelum penyerahan Jepang dan patut menjadi tanggungan Indonesia, diakui sebagai hutang Indonesia. Segala milik bangsa asing selain yang diperlukan oleh negara RI untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan kepada yang berhak, serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugian dengan seadil-adilnya.

Negara Indonesia akan mengusahakan persahabatan dengan negara tetangga dan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia juga akan menjadi suatu anggota *United*

¹⁾ Pringgodigdo AG, *Perubahan Kabinet Presidensiil Menjadi Kabinet Parlementer*, Penerbit, Yayasan Fonds Universitas Negeri Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 25. Lihat juga Koesnodiprodo, *Himpunan Undang-Undang Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Penerbit, S.K. SENO, Jakarta, tahun 1951, halaman 58.

²⁾ Koesnodiprodo, *Himpunan Undang-Undang Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Penerbit, S.K. SENO, Jakarta, tahun 1951, halaman 70.

Nations, dan benar-benar menyetujui maksud dari Piagam PBB. Ke dalam, di dalam negeri, Indonesia akan melaksanakan sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Direncanakan beberapa bulan kemudian, yakni (Januari 1946) akan diadakan pemilihan umum, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia melaksanakan cita-cita demokrasi dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman masyarakat negara Republik Indonesia.

- Maklumat Pemerintah RI tanggal 3-11-1945³⁾, yang intinya berisikan bahwa pemerintah RI menyetujui didirikannya partai-partai politik. Adanya partai-partai politik itu dapat dipimpin ke arah yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah terbentuk sebelum dilangsungkannya pemilihan umum bulan Januari 1946. Sesudah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3-11-1945 itu, berdirilah banyak partai-partai politik di Indonesia.

- Pengumuman BPKNIP No. 5 tanggal 11-11-1945⁴⁾ yang menyatakan bahwa dalam UUD 1945 tidak ada pasal yang mewajibkan ataupun melarang adanya menteri bertanggung jawab. Pertanggungjawaban menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat itu adalah suatu jalan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat. Atas dasar itulah, BPKNIP mengusulkan kepada pemerintah (Presiden) agar mempertimbangkan adanya pertanggungjawaban menteri. Usul itu disetujui presiden. Maka, berdasarkan aturan tersebut sejak tanggal 11-11-1945 para menteri bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan, dalam hal ini kepada KNIP. Sistem Pemerintah RI berubah dari sistem demokrasi Presidensial menjadi Demokrasi Parlementer, dengan sistem multi partai.

Pertanyaan yang timbul adalah mengapa pemerintah RI mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dan ketiga maklumat politik pelaksanaannya itu, padahal yang hakikatnya bertentangan dengan UUD yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia? Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 bertentangan dengan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Maklumat Politik Pemerintah RI tanggal 1-11-1945

³⁾ Koesnodiprodjo, *Himpunan . . .*, halaman 76. Lihat juga Berita RI tahun I no 1 halaman 3

⁴⁾ Koesnodiprodjo, 1951, *Himpunan . . .*, halaman 139. Lihat juga Berita RI tahun I no 1 halaman 4.

isinya tidak bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi secara formal apa yang diatur dalam Maklumat Politik tanggal 1-11-1945 itu semestinya diatur di dalam undang-undang, sebab semenjak tanggal 16-10-1945 KNIP sudah berstatus sebagai badan legislatif, yang berhak dan dimungkinkan untuk membuat undang-undang. Sedangkan, Maklumat tanggal 3-11-1945 bertentangan dengan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945⁵⁾, tentang pembentukan partai nasional Indonesia, di mana pada tanggal 22-8-1945 itu PPKI menginstruksikan agar rakyat Indonesia mendirikan partai nasional Indonesia.

Pada tanggal 31-8-1945⁶⁾ ditetapkan Maklumat Pemerintah, yang isinya berupa penangguhan pelaksanaan gerakan dan persiapan pembentukan Partai Nasional Indonesia tersebut.

Pengumuman BPKNIP no. 5 Tanggal 11-11-1945⁷⁾ bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945⁸⁾ yang menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD.

Kedua, pasca perang Dunia II timbul Perang Dingin antara dua blok, blok pertama dipimpin oleh Amerika Serikat berdasarkan sistem demokrasi, dan blok kedua, kubu Uni Soviet berdasarkan sistem komunisme totaliter. Dalam era pasca Perang Dunia II, Uni Soviet berhasil menduduki Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Korea Utara; yang di dalam geopolitik hal ini berarti Uni Soviet menguasai Heartland. Sementara itu Amerika Serikat memimpin daerah Eropa Barat, Timur Tengah, daerah pantai Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara; dalam geopolitik hal ini disebut Rimland. Terjadilah konflik antara kedua blok ini (Heartland dan Rimland). Kedua blok ini berusaha menarik negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam blok mereka masing-masing.

⁵⁾ Koesnodiprojo tahun 1951, *Himpunan . . .*, hal. 117

⁶⁾ Koesnodiprojo tahun 1951, *Himpunan . . .*, hal. 46

⁷⁾ Koesnodiprojo tahun 1951, *Himpunan . . .*, halaman 139. Lihat pula Berita Republik Indonesia tahun I no. 1 halaman 4

⁸⁾ Koesnodiprojo tahun 1951, *Himpunan . . .*, halaman 3. Lihat pula Berita Republik Indonesia tahun I no. 7 halaman 46

Ketiga, Belanda menggunakan slogan anti fasisme dan mendukung kebijakan umum negara-negara kapitalis, negara-negara Barat, untuk membenarkan tindakannya akan kembali menjajah Indonesia. Semula Belanda tidak mau berunding dengan Indonesia, dalam hal ini dengan Soekarno-Hatta, dengan menuduh bahwa negara RI buatan Jepang. Belanda juga menuduh bahwa Negara RI adalah fasis karena seluruh kekuasaan negara terpusat ditangan Presiden Soekarno (pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945), dan pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI memerintahkan berdirinya satu partai yakni Partai Nasional Indonesia. Dengan alasan yang kamu-flatis ini Pemerintah Belanda merasa berkewajiban menghancurkan adanya fasisme di wilayah kerajaan Belanda, dalam hal ini negara Republik Indonesia dengan kekuatan militer.

Keempat, Perundingan Linggarjati diselenggarakan an-tara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia. Perundingan pendahuluan diadakan di Jakarta. Kemudian, timbul permasalahan baru. Para anggota komisi jenderal tidak mau mengadakan perundingan di Yogyakarta, sedangkan Bung Karno tidak mau berunding di daerah pendudukan Belanda. Maka perlu ditetapkan tempat yang kedua belah pihak tidak berkeberatan hadir. Tempat itu di Linggarjati, dekat Cirebon. Perundingan itu melibatkan Komisi Jendral (Schermerhorn, M. van Poll, F. de Boer, dan van Mook) mewakili pemerintah Belanda dan delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan Dr. A.K. Gani. Persetujuan Linggarjati diparaf pada tanggal 15 November 1946 di Jakarta.

Kelima, Perundingan Linggarjati tidak lepas dari latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh yang berprakarsa dan berperan. Soekarno, Hatta, Sjahrir pada pihak Indonesia, Schermerhorn, M. van Poll, F. de Boer dan van Mook dari pihak Belanda. Tokoh-tokoh dari pihak Indonesia, utamanya Soekarno, Hatta dan Sjahrir memiliki keberanian mengambil langkah politik yang tidak didukung oleh seluruh elite politik pada waktu itu.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 itu ditetapkan dan apa makna Politik Maklumat No. X itu terhadap Perundingan Linggarjati?

Kajian Pustaka yang Berhubungan dengan tulisan ini

Tidak banyak penulis yang menyoroti Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Oktober 1945 kaitannya dengan perundingan Linggarjati. Ada sekelompok penulis, dapat disebut kelompok pertama, yang secara formal tidak menyebut Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 di dalam bukunya, walaupun secara materil tidak menentang adanya Perundingan Linggarjati itu. Namun, kelompok penulis ini tidak membahas Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945 ini dan kaitannya dengan perundingan Linggarjati.

Yang termasuk kelompok pertama ini antara lain, Mochammad Roem, Manai Sophiaan, KML Tobing, C. Smit, PRS Mani, Koestiniyati Mochtar, Robert Bridson Cribb, Ben Anderson, Ide Anak Agung Gde Agung dan Rosihan Anwar. Mohammad Roem⁹⁾ di dalam bukunya itu tidak membahas Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 dan kaitannya dengan perjanjian Linggarjati. Malahan Roem juga tidak menyebut adanya Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 itu. Padahal Roem adalah pelaku dalam proses perundingan Indonesia-Belanda itu. Roem menjelaskan proses diplomasi Indonesia mulai tahun 1945-1949. Manai Sophiaan,¹⁰⁾ di dalam bukunya juga tidak menyebut adanya Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 itu, walaupun di bagian depan dari bukunya itu menyoroti perjuangan para pemuda di Makassar dan Indonesia Timur, lalu bagian belakang menyoroti proses penandatanganan Persetujuan Linggarjati, utamanya adanya Sidang KNIP di Malang. Manai Sophiaan tidak membahas kaitannya antara Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 dengan Persetujuan Linggarjati tersebut. Demikian pulalah KML Tobing.¹¹⁾ di dalam bukunya tidak menyebut Maklumat No. X tanggal 16-10-1945, padahal menguraikan proses perundingan Indonesia-Belanda secara kronologis, mulai tahun 1945-1947, tetapi tidak membahas Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan persetujuan Linggarjati.

⁹⁾ Mohchamad Roem, *Diplomasi : Ujung Tombak Perjuangan RI*, Penerbit, P.T. Gramedia Jakarta, 1989, halaman 3-17

¹⁰⁾ Manai Sophiaan, *Apa yang Masih Ingat*, Penerbit Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Jakarta, 1991, halaman 65, 83, dan 153.

¹¹⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Penerbit Gunung Agung, A986, halaman 24-34.

Begitu pula, Smit¹²⁾ di dalam bukunya tidak menyebut Maklumat No. X tanggal 16-10-1945. Padahal Smit membahas perundingan Indonesia-Belanda mulai tahun 1945-1947, tetapi tidak mengupas Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 dan kaitannya dengan Perjanjian Linggarjati. Begitu juga PRS Mani¹³⁾ secara formal tidak menyebutkan Maklumat No. X tanggal 16-10-1945, tapi Mani menguraikan proses revolusi Indonesia, jalannya perundingan Indonesia-Belanda, peran para pemimpin revolusi, Soekarno, Hatta, Sjahrir, sebagai motor perundingan Indonesia-Belanda pada tahun 1945-1947. Tetapi tidak membahas Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 dan kaitannya dengan perundingan Linggarjati. Juga Koestiniyati Mochtar (penyunting)¹⁴⁾ tidak secara formal menyebut Maklumat No. X tanggal 16-10-1945. Dalam bagian yang mengupas peran pejuang wartawan antara Sumatra-Singapura, Koestiniyati menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan tidak hanya dengan senjata, tetapi juga oleh para wartawan dan para juru runding yang bersenjata pena. Koestiniyati juga menyoroti hasil Perjanjian Linggarjati, yang ditandatangani tanggal 25-3-1947, tetapi tidak membahas Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 dan kaitannya dengan persetujuan Linggarjati. Juga Robert Bridson Cribb¹⁵⁾ tidak menyebut Maklumat No. X tanggal 16-10-1945, tetapi ia menyoroti perkembangan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan KNIP Daerah.

¹²⁾ Smit, *De Dekolonisatie van Indonesie*, Penerbit, H.D. Tjeenk Willink N.V. 1976, Terjemahan Redaksi PA., Dekolonisasi Indonesia, Dicitak oleh Daya Sarana, Jakarta, 1986, halaman 11-55.

¹³⁾ PRS Mani, *The Story of Indonesian Revolution 1945-1950*. Terjemahan Lany Kristitono, Penerbit, Pustaka Utama Grafiti, tahun 1989, halaman 13-56, 90-97. (PRS Mani adalah seorang wartawan militer India, yang mengikuti tentara India di dalam pasukan SEAC, AFNEI ke Indonesia. Mani menaruh simpati kepada perjuangan bangsa Indonesia. Ke luar dari dinas militer, dan kembali ke Indonesia sebagai wartawan suatu surat kabar).

¹⁴⁾ Koestiniyati Mochtar (penyunting), *Memoar Pejuang Republik Indonesia Seputar Jaman Singapura, 1945-1950*, Penerbit: P.T. Gramedia Pustaka Utama, tahun 1992 halaman 18.

¹⁵⁾ Cribb Robert Bridson, *Jakarta in The Revolution 1945-1949*, Terjemahan Hasan Basri, *Gejala Revolusi di Jakarta, 1944-1945*, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, 1990, halaman 40-55

Juga menyoroti Heiho dan Peta di dalam revolusi Indonesia. Cribb tidak membahas Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 dan kaitannya dengan persetujuan Linggarjati.

Kelompok kedua adalah para penulis yang secara eksplisit menyebutkan adanya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, tetapi mereka mengaitkannya dengan sudut pandang ketatanegaraan negara Republik Indonesia waktu itu. Misalnya A. Halim¹⁶⁾ menyatakan bahwa sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 kekuasaan negara memusat di tangan presiden. Sebab, berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk berdasarkan UUD ini, segala kekuasaannya dipegang oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kalau mula-mula banyak keragu-raguan mengenai pengertian “bantuan” dalam kalimat di atas, pada tanggal 29 Agustus 1945 waktu pelantikan KNIP di Gedung Komidi Jakarta, hilang lenyaplah keragu-raguan itu oleh pidato Mr. Kasman Singodimedjo, ketua pertama KNIP, yang menyatakan kepada presiden bahwa beliau siap sedia menjalankan perintah presiden. Ditambah pula pidato Presiden, yang menyatakan bahwa di dalam masa peralihan sebelum ada MPR, kekuasaannya di tangan presiden. Jelaslah bahwa kedaulatan rakyat waktu itu di tangan presiden, semata-mata dibantu oleh KNIP. Menanggapi hal yang demikian, beberapa anggota KNIP mengambil suatu inisiatif mengajukan “petisi” kepada Presiden untuk mengubah sifat pemerintahan yang dipegang oleh seorang itu. Petisi itu dibicarakan di dalam sidang KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Ditambahkan pula usul baru supaya pekerjaan KNIP sehari-hari, berhubung gentingnya keadaan, dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP, BPKNIP. Sidang dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta. Maka lahirlah Maklumat Wakil Presiden RI No. X Tanggal 16-10-1945. Demikian pernyataan A. Halim. Di dalam pernyataannya itu Halim tidak membahas Maklumat Wakil Presiden RI No. X Tanggal 16-10-1945 itu dan kaitannya dengan Persetujuan Linggarjati, tetapi mengaitkannya dengan sistem ketatanegaraan waktu itu.

¹⁶⁾ Pringgodigdo A.G., *Perubahan . . .*, halaman 25-27.

Juga Mr. Asaat¹⁷⁾ di dalam bukunya menyatakan bahwa kekuasaan Maklumat No. X itu sama dengan undang-undang. Akan tetapi, di dalam pidatonya pada ulang tahun IV BPKNIP tanggal 16-10-1949, selaku ketua BPKNIP waktu itu, Assat menyatakan bahwa “Maklumat No. X adalah piagam penyerahan kekuasaan oleh Presiden RI kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)”. Soal yang diatur di dalam Maklumat No. X adalah soal yang seharusnya diatur di dalam UUD. Maka dari itu, derajat Maklumat No. X sama dengan pasal-pasal UUD. Demikian Asaat menyoroti Maklumat No. X dari sudut pandang ketatanegaraan. Beliau tidak mengkaitkan maklumat itu dengan Persetujuan Linggarjati. Demikian pula A.G. Pringgodigdo¹⁸⁾ yang berpendapat bahwa derajat Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu sama tinggi dengan pasal-pasal UUD. A.G. Pringgodigdo menyatakan secara eksplisit adanya maklumat itu tidak membahas kaitannya dengan Persetujuan Linggarjati. Pringgodigdo membahas Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 dari sudut pandang hukum ketatanegaraan Republik Indonesia waktu itu.

Kelompok ketiga ialah para penulis yang secara eksplisit tidak menyebut Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945, tetapi hanya menyebutkan adanya peristiwa penting tanggal 16-10-1945 (Kahin), ada yang menyebut adanya Proklamasi X (Ben Anderson), tetapi secara material para penulis ini membicarakan proses perundingan antara Indonesia-Belanda. Seperti George Mc.Turnan Kahin¹⁹⁾ tidak menyebut secara eksplisit Maklumat No. X, tetapi menyoroti peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 1945, yakni terjadinya perubahan status KNIP dari badan pembantu presiden menjadi badan legislatif. Bahkan, Kahin menyebutkan bahwa perubahan pemerintahan di Indonesia tersebut diharapkan memperkuat posisi negara Republik Indonesia di dunia internasional dan membuka kemungkinan diadakannya perundingan antara Indonesia-Belanda.

¹⁷⁾ Pringgodigdo A.G., *Perubahan . . .*, halaman 34, 35, Mr. Asaat, Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan, halaman 33-36.

¹⁸⁾ Pringgodigdo, *Perubahan . . .*, halaman 34.

¹⁹⁾ Kahin George Mc.Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Penerbit Cornell University Press, 1963, halaman 150.

Selanjutnya Kahin menjelaskan bahwa pada tanggal 7 Oktober 1945, 50 orang dari 150 orang anggota KNIP menandatangani petisi (peneliti juga menyebutnya Petisi), dan petisi itu dibicarakan pada rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945.

“On October 16, 1945 after discussion and approval of the proposal in the KNIP, Hatta on behalf of Soekarno and himself issued a ‘decree’, where by the KNIP was vested with full legislative power jointly with the President”.²⁰⁾

Yang dimaksud dengan istilah “*decree*” oleh Kahin sebenarnya adalah Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945. Mulai hari ini KNIP dari badan pembantu pre-siden berubah status menjadi Badan Legislatif.

Ucapan yang penting dari Kahin ialah bahwa :

Principally these governmental changes were a means to that political end. An important, though distinctly secondary, consideration behind this policy was “the desire to remove as much as possible of the collaborationist taint from the government, in the belief that this would give it a stronger position internationally from with to negotiate with the Dutch.”²¹⁾

Dari keterangan ini, Kahin tidak menyebut adanya Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16-10-1945, yang disebutnya dengan istilah “*decree*”, tapi jelas mengemukakan bahwa perubahan pemerintahan waktu itu dimaksudkan untuk membuka kemungkinan atau memudahkan Pemerintah RI mengadakan perundingan dengan Pemerintah Belanda. Akan tetapi, Kahin juga tidak membahas Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 dan kaitannya dengan persetujuan Linggarjati.

Demikian juga Ben Anderson²²⁾ tidak menyebut adanya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, tapi menyebutnya dengan istilah “Proklamasi X tanggal 16-10-1945”, dan Anderson menyatakan bahwa penetapan Proklamasi X itu dimaksudkan

²⁰⁾ Kahin George McTurnan, *National and Revolution in Indonesia ...*, halaman 152

²¹⁾ Kahin George McTurnan, *National and Revolution in Indonesia ...*, halaman 153

²²⁾ Anderson Ben, *Java in a time of Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946*, Penerbit Cornell University, 1972, (terjemahan Jiman Bimbo tahun 1989) halaman 200-207.

untuk membuka lebar-lebar upaya Indonesia berdiplomasi di dunia internasional. Di dalam bukunya itu, Anderson menyatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 1945 Sutan Sjahrir membuat pergerakan terbukanya yang pertama, pada hari itu lima puluh anggota KNIP menandatangani suatu petisi (peneliti juga menggunakan istilah “petisi”), yang ditujukan kepada Soekarno-Hatta, mendesak supaya kata-kata kunci *dengan bantuan* secara eksplisit ditafsirkan sebagai “memberikan kepada KNIP status MPR, badan konstitusional tetap yang tertinggi”. Soekarno dan kabinetnya sukar menolak usul itu. Menurut Anderson banyak orang merasa bahwa dengan tidak adanya badan parlementer, dalam membuat undang-undang di Republik Indonesia, akan terbuka munculnya fitnahan yang dilancarkan oleh Belanda, walaupun UUD itu sebenarnya sama sekali tidak mengikuti garis Jepang. Menurut Anderson, Sjahrirpun yakin bahwa sebagian besar anggota KNIP akan mendukung suatu tindakan yang akan memperluas kekuasaan dan wibawa mereka sendiri. Kemudian, di dalam rapat KNIP tanggal 16-10-1945 Hatta maju dengan membacakan keputusannya, yang kemudian ternyata mendapatkan kemashuran sebagai Proklamasi X. Walaupun membahas Proklamasi X, Anderson tidak membahas kaitannya dengan persetujuan Linggarjati. Anderson hanya menyatakan bahwa pada tanggal 3-11-1945 Wakil Presiden Hatta menandatangani dekrit resmi Pemerintah, yang mengizinkan partai-partai untuk bekerja dan menjanjikan mengadakan pemilihan umum bulan Januari 1946. Pada 7-11-1945 Masyumi diubah menjadi Partai Masyumi. Dan pada tanggal 21-11-1945 Partai Komunis Indonesia (PKI), dihidupkan kembali (Anderson). Ide Anak Agung Gde Agung²³⁾ secara formal tidak menyebut adanya Maklumat No. X, tetapi hampir seluruh isi bukunya mengupas secara kronologis tahapan permulaan dan proses perundingan Indonesia Belanda sampai tercapainya persetujuan Linggarjati pada tanggal 25-3-1947. Kalau diamati secara cermat, tidak terlihat uraiannya yang menunjukkan, apa sebab bisa terjadi perundingan Indonesia Belanda. Agung menyoroti revolusi Indonesia tahun 1945-1947 itu dari perspektif Indonesia Timur, dan kurang menggunakan perspektif keadaan Republik Indonesia pada waktu itu. Agung juga

²³⁾ Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggarjati, Prolog dan Epilog*, Penerbit, Yayasan Pustaka Nusantara, Sebelas Maret University Press, tahun 1995, halaman 8-53, 146-208

menyoroti peran dari SEAC dan AFNEI, peran negara Inggris dan Amerika Serikat yang mendorong agar Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Proses Perundingan Linggarjati dilaporkannya dengan sangat teliti, misalnya di mana menginapnya delegasi Belanda waktu itu. Akan tetapi, dalam analisisnya tidak terlihat, mengapa Belanda terpaksa harus berunding dengan Indonesia. Diuraikan situasi Indonesia Timur waktu itu, tetapi Agung tidak menyebut adanya Maklumat No. X tanggal 16-10-1945, apalagi membahas kaitannya dengan Persetujuan Linggarjati. Di dalam bukunya, Rosihan Anwar,²⁴⁾ peneliti tidak melihat isi buku itu sebagai karya Rosihan Anwar, tapi lebih melihatnya sebagai pengalaman Soebadio Sastrosatomo sebagai pelaku revolusi Indonesia waktu itu. Maka dari itu, sorotan ini tidak ditujukan pada Rosihan Anwar, tapi pada Soebadio Sastrosatomo. Soebadio Sastrosatomo menjelaskan menjelang ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden No. X, mengaku menjadi juru bicara Sutan Sjahrir. Kalau ada tokoh yang menanyakan segala sesuatu yang penting, Sjahrir selalu menjawab, "Bicara saja dengan Soebadio".

Di dalam buku itu disebutkan secara jelas adanya "Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945", tetapi tidak dikaitkannya dengan Perundingan Linggarjati. Juga dibahas Perundingan Linggarjati, tapi tidak dikaitkan secara eksplisit dengan Maklumat Wakil Presiden No. X termaksud. Keseluruhan isi buku itu, yang berupa uraian mengenai pengalaman Soebadio Sastrosatomo tidak terlihat analisisnya, hanya merupakan uraian secara historis dan deskriptif perjuangan Indonesia tahun 1945, PRRI, Permesta sampai Peristiwa Malari 1974, saat-saat Soebadio Sastrosatomo terkait dalam peristiwa-peristiwa itu.

Soebadio Sastrosatomo menyatakan bahwa para mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum, *Rechts Hoge School* pada akhir September 1945 berkeinginan mengangkat Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri. Akan tetapi niat ini terhalang oleh pasal-pasal UUD 1945, karena sistem kenegaraan UUD 1945 adalah sistem demokrasi presidensial; jabatan perdana menteri hanya dikenal dalam sistem Demokrasi Parleментар. Satu-satunya jalan

²⁴⁾ Rosihan Anwar, *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*, Penerbit: Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, halaman 87.

ialah mengubah pasal-pasal UUD 1945. Akan tetapi MPR belum ada, padahal yang berwenang mengubah UUD adalah MPR. Timbul pikiran waktu itu untuk mentransformasikan KNIP menjadi Badan Legislatif.

Untuk keperluan itu tanggal 7 Oktober 1945, Soepeno, Sakirman, dan Mangoensarkoro berinisiatif mengajukan petisi yang ditandatangani oleh 50 anggota KNIP, ditujukan kepada Soekarno-Hatta agar segera diadakan sidang KNIP untuk membahas petisi itu.

Pada tanggal 16 Oktober 1946 berlangsung sidang KNIP di Balai Muslimin (sekarang Gita Bahari) jalan Kramat Raya Jakarta. KNIP menyetujui badan ini menjadi badan legislatif, dan atas usul Amir Syarifudin, dibentuk Badan Pekerja KNIP (BPKNIP). Hal ini dituangkan dalam Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Selanjutnya Soebadio Sastrosatomo ditugaskan Sjahrir menemui Bung Karno dengan maksud supaya Bung Karno bersedia hadir dalam Perundingan Linggarjati.²⁵⁾

Demikianlah sekilas laporan Soebadio Sastrosatomo dalam buku Rosihan Anwar 1945, sekitar ditetapkannya Maklumat No. X dan Perundingan Linggarjati. Diuraikan secara teliti dan detail peristiwa-peristiwa sekitar ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan adanya Perundingan Linggarjati. Akan tetapi untuk apa ditetapkan Maklumat No. X dan apa hubungan antara Maklumat No. X dengan Perundingan Linggarjati, tidak ada analisisnya. Pernyataan Soebadio Sastrosatomo ini memang berisi data-data lengkap mengenai peristiwa-peristiwa kenegaraan antara 1945-1947, namun peneliti tidak terlihat analisisnya. Mengapa Belanda akhirnya mau berunding dengan Indonesia, padahal sebelumnya tidak mau berunding, dalam buku itu tidak dijelaskan alasan-alasannya.

Pendapat para penulis perjuangan bangsa Indonesia antara tahun 1945-1947 dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pendapat yang secara formal tidak menyebut adanya Maklumat No. X tanggal 16-10-1945, tetapi membicarakan adanya perundingan antara

²⁵⁾ Rosihan Anwar, *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*, . . . , halaman 108.

Indonesia-Belanda, pendapat yang secara formal menyebut adanya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, tetapi membahasnya melalui sudut pandang hukum ketatanegaraan waktu itu, dan tidak membahas kaitan Maklumat itu dengan Persetujuan Linggarjati. Dan para penulis yang secara formal tidak menyebut adanya Maklumat No. X tanggal 16-10-1945, kadang-kadang menyebutnya dengan istilah “decree”, dengan istilah proklamasi X, membahas masalah perundingan Indonesia-Belanda, tetapi tidak membahas Maklumat No. X dan kaitannya dengan Persetujuan Linggarjati. Kesemuanya itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- = Walaupun ada sejumlah penulis yang menyebut fakta adanya Maklumat Wakil Presiden No. X 16-10-1945, dengan sebutan yang berbeda-beda, tidak ada yang mengkaji kaitan antara Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 itu dengan Perundingan Linggarjati secara eksplisit sebagai fokus kajian.
- = Walaupun ada sejumlah penulis yang telah menyebut peran sejumlah tokoh dalam proses perumusan Maklumat Wakil Presiden No X, dan peran dalam perjanjian Linggarjati, tidak ada yang mengkaji secara khusus adanya pengaruh dan latar belakang pribadi tokoh-tokoh tersebut terhadap keberadaan Maklumat Wakil Presiden RI No. X, dan kaitannya dengan Perundingan Linggarjati.

Di sini peneliti akan mengkaji kaitan antara Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dengan Perundingan Linggarjati secara eksplisit sebagai fokus kajian dan mengkaji secara khusus pengaruh latar belakang pribadi tokoh-tokoh yang memprakarsai dan berperan terhadap keberadaan Maklumat Wakil Presiden RI No X Tanggal 16-10-1945 dan kaitannya dengan Perundingan Linggarjati yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati, yang secara faktual merupakan tahap awal yang sangat penting terhadap proses pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949.

Alasan Pemilihan dan Keaslian (*Originalitas*) Judul

Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam pertumbuhan negara RI. Pada hakikatnya maklumat tersebut mengubah isi pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, dan mengubah status KNIP dari badan pembantu presiden menjadi badan legislatif dan turut serta menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Penetapan maklumat no. X tersebut dan ketiga maklumat politik pelaksanaannya itu, secara formal bertentangan dengan UUD 1945 yang menjadi dasar hukum pemerintahan, negara Republik Indonesia. Akan tetapi Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 itu membuka jalan dimungkinkannya perundingan-perundingan sampai tercapainya persetujuan Linggarjati. Persetujuan Linggarjati itu secara faktual merupakan tahap awal yang sangat penting terhadap proses pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yakni pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tanggal 15-8-1950 dengan perubahan ketata negaraan di dalam negeri, negara RIS dilebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui, strategi Pemerintah Republik Indonesia di dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda adalah tetap melalui perundingan. Langkah ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa persengketaan yang timbul di antara negara anggota PBB diselesaikan dengan jalan perundingan.

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 dan Maklumat Politik tanggal 1-11-1945 memberi kontribusi yang besar di dalam hubungan internasional bagi negara Republik Indonesia. Dengan Maklumat Wakil Presiden tersebut, bangsa Indonesia dapat membuka jalan perundingan dengan Belanda dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia yang masih baru itu. Para pemimpin Indonesia, utamanya Soekarno, Hatta, yakin bahwa eksistensi negara RI, negara Proklamasi hanya dapat dipertahankan melalui diplomasi di dunia internasional. Mereka yakin bahwa negara Proklamasi hanya dapat dipertahankan eksistensinya dengan kekuatan diplomasi yang ditunjang kekuatan militer di dalam negeri dan didukung oleh rakyat Indonesia.

Memperhatikan uraian itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti hal ini. Pertanyaan yang timbul adalah “Mengapa Pemerintah RI menetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 dan ketiga maklumat pelaksanaannya, yang hakikatnya bertentangan dengan UUD 1945?” “Faktor apa yang mendorong dikeluarkannya maklumat itu?” “Latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik yang bagaimana yang mendorong para pelaku menetapkan maklumat itu?”. Peneliti mengetahui bahwa para penulis menyebut adanya Maklumat No. X dengan nama yang berbeda-beda, tapi belum ada di antara penulis itu yang mengkaji kaitan antara Maklumat No. X itu dengan Perundingan Linggarjati secara eksplisit, sebagai fokus kajian. Juga belum ada yang mengkaji secara khusus adanya pengaruh latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Juga belum ada tesis atau disertasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang mengupas kaitan Maklumat No. X itu dengan Perundingan Linggarjati. Dengan demikian tulisan ini masih asli; originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Peneliti memilih periode 1945-1947, karena pada kurun waktu tersebut terjadi dua kejadian penting, yakni ditetapkannya Maklumat No. X dan ditandatanganinya Persetujuan Linggarjati. Sebagaimana diketahui, Maklumat No. X merupakan pembuka jalan perundingan yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25-3-1947. Berpangkal dari Persetujuan Linggarjati para pemimpin dan bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat internasional sampai sekarang.

Rumusan Masalah

Dengan berangkat dari asumsi bahwa Perjanjian Linggarjati merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, peneliti berpendapat bahwa sangat penting untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong ditetapkannya Maklumat No. X dan kaitannya dengan Perjanjian Linggarjati. Berdasarkan semua fakta yang disajikan di dalam latar belakang masalah dan kesimpulan dari studi pustaka, masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- pertama : Faktor-faktor apa yang mendorong kemunculan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945?
Konkritnya ialah:
- a. Konteks politik-ekonomi domestik dan internasional macam apa yang mendorong kemunculan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945?
 - b. Latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh macam apa yang memprakarsai dan berperan di dalam proses perumusan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 itu?
- Kedua : Apa makna politik Maklumat No X dan tiga Maklumat Politik pelaksanaannya terhadap Perjanjian Linggarjati yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati itu?
- Ketiga : Apa makna Perjanjian Linggarjati terhadap prospek pengakuan Belanda terhadap negara Indonesia?

Tujuan Penelitian

- Tujuan penelitian ini adalah :
- a. mendeskripsikan konteks politik domestik dan internasional yang melatarbelakangi proses penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X beserta tiga Maklumat Politik pelaksanaannya;
 - b. mendeskripsikan konteks ekonomi domestik dan internasional yang melatarbelakangi proses penetapan Maklumat No. X tersebut;
 - c. memahami latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh yang berperan di dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden No. X beserta ketiga Maklumat Politik pelaksanaannya;
 - d. memahami makna politik (*meaning*) Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga Maklumat Politik pelaksanaannya terhadap Perundingan Linggarjati yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati itu.

Kerangka dasar pemikiran

Penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan, yaitu mengapa ditetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, dan apa makna Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu terhadap Perundingan Linggarjati. Untuk menjawab pertanyaan pertama, peneliti berangkat dari suatu kerangka dasar pemikiran yang menyatakan bahwa suatu peristiwa, seperti penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu merupakan interaksi antara konteks dan prakarsa dan peran tokoh tertentu. Konteks yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah konteks politik domestik dan internasional dan konteks ekonomi domestik dan internasional. Tokoh-tokoh yang dimaksud ialah latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh yang memprakarsai dan berperan dalam panggung politik. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yang berkaitan dengan makna politik Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 terhadap perjanjian Linggarjati, peneliti berangkat dari kerangka dasar pemikiran yang menyatakan bahwa kemunculan suatu peristiwa, seperti penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu, dapat dipahami dari maksud dan tujuan atau makna peristiwa tersebut. Di dalam hal ini maksud dan tujuan yang hendak dilihat ialah kaitan antara maksud dan tujuan peristiwa itu dengan Perjanjian Linggarjati. Artinya, apakah perundingan dan persetujuan Linggarjati itu merupakan tujuan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu; apakah ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu bertujuan agar dapat diselenggarakan Perjanjian Linggarjati? Jawab dari pertanyaan ini diuraikan di Bab III.

Selain apa yang disebut di atas, peneliti memandang perlu menjelaskan sifat penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif, dan historis. Maka dari itu guna memberi gambaran yang lebih luas, dipandang perlu dipaparkan uraian sepintas mengenai kerangka dasar epistemologi sejarah.

Selain yang disebutkan di atas, kiranya perlu dijelaskan bahwa bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945 memanfaatkan peluang yang ada pada prinsip III Atlantic Charter 14-8-1941, yakni mengenai prinsip hak menentukan nasib sendiri, *self-determination*. Maka dari itu perlu diuraikan singkat kerangka

dasar pemikiran *self-determination* tersebut.

Pada waktu mempertahankan eksistensi negara RI pada tahun 1945-1947, para pemimpin Indonesia memanfaatkan peluang yang ada dalam Perang Dingin. Para pemimpin Indonesia memanfaatkan peluang berupa kemudahan-kemudahan dari negara-negara Rimland. Sebagaimana diketahui, dalam perang dingin itu, situasi politik internasional diwarnai perimbangan kekuatan antara negara-negara Heartland dan negara-negara Rimland. Oleh karena itu dipandang perlu diuraikan singkat kerangka dasar pemikiran perimbangan kekuatan, kerangka berfikir *balance of power*.

Tujuan pokok strategi perjuangan Negara RI dengan mengadakan diplomasi yang didukung kekuatan tritunggal, (Pemerintah, militer dan seluruh rakyat) ialah untuk memperoleh pengakuan, *recognition*, dari negara-negara lain, utamanya pemerintah Belanda, atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka, perlu diuraikan sekilas mengenai kerangka dasar pemikiran diplomasi dan kerangka dasar pemikiran pengakuan, *recognition*.

Guna mendasari penelitian yang bersifat historis dan upaya Pemerintah RI mengadakan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, utamanya Belanda dengan memanfaatkan peluang yang ada di negara-negara Rimland dalam rangka Perang Dingin, akan disajikan kerangka dasar pemikiran, epistemologi sejarah, *self-determination*, *balance of power*, diplomasi, dan pengakuan, (*recognition*).

FILSAFAT SEJARAH

Pada bagian berikut akan diuraikan sepintas mengenai filsafat sejarah sebagai upaya memahami penelitian yang bersifat historis itu. Peneliti memandang perlu menguraikan secara singkat filsafat sejarah seperti berikut ini:

Carl G. Hempel²⁶⁾ seorang ahli filsafat sejarah menyatakan bahwa penjelasan peristiwa sejarah melibatkan hukum umum yang memberikan jaminan mengenai kesimpulan

²⁶⁾ Scott Gordon, *The history and philosophy of sosial science*, 1991, Routledge, Chapman and Hall Inc., New York, halaman 416.

bahwa ada hubungan antar fenomena-fenomena empirik. Hempel menawarkan apa yang disebut *Hukum yang mencakup* yang terdiri dari tiga komponen:

- suatu peristiwa yang akan dijelaskan;
- peristiwa lain (seperangkat peristiwa lain);
- hukum umum (seperangkat hukum umum yang menggambarkan hubungan yang penting antara jenis-jenis peristiwa selanjutnya; hipotesa atau hukum yang universal di-nyatakan di dalam bentuk probabilistik).

Menurut Hempel, penjelasan sejarah harus menunjuk mengapa suatu peristiwa terjadi. Ini bisa dijelaskan dengan mendemonstrasikan contoh khusus dari hukum umum yang berlaku bagi semua peristiwa yang sejenis.

Namun pengertian *hukum yang mencakup* ini mendapat tentangan dari ahli sejarah yang lain yang menyatakan bahwa *hukum yang mencakup* Hempel bukan suatu preskripsi penelitian melainkan hanya saran belaka. Menurut para penentanginya Hempel menjelaskan sejarah sama dengan ilmu alam.

Aristoteles menjelaskan sejarah secara non kausal bahwa suatu peristiwa ditentukan oleh penyebab terakhir yang merupakan maksud akhir dari suatu peristiwa. Paham teleologis Aristoteles ini masih berpengaruh hingga jaman modern ini.

Namun semenjak David Hume menegaskan bahwa penyebab suatu peristiwa merupakan sesuatu yang *antedesent*, maka dapat dikemukakan bahwa sejarawan juga melakukan penjelasan kausal, meskipun bisa juga tidak. Semua penjelasan kausal menuntut pernyataan yang mengikuti urutan waktu, tetapi tidak semua penjelasan menuntut demikian.

Carl Popper²⁷⁾ berpendapat lain; Popper menyatakan bahwa pemahaman secara logis dalam pemahaman sejarah tidak dapat dipertahankan karena *masa depan* tidak dapat diprediksikan, bahwa masa depan bisa berpaham demikian.

Sarjana lain, yang memandang penjelasan sejarah secara metaphisis seperti halnya G.W.F. Hegel,²⁸⁾ menyatakan bahwa sejarah merupakan proses oleh mana *Geist* atau

²⁷⁾ Scott Gordon, *The history . . .*, halaman 400

²⁸⁾ Scott Gordon, *The history . . .*, halaman 321

geest atau *jiwa* secara progresif menampakkan diri. Hegel menolak pandangan romantisme karena walaupun manusia itu bebas bertindak, hasrat-hasrat yang mendorongnya merupakan bagian dari rencana *kosmos*, *kebebasan*, dan *kebutuhan*, sedangkan rencana *kosmos*, *kebutuhan*, dan *kebebasan* itu adalah *satu*. Menurut Hegel *sejarah empirik* telah gagal memberikan perhatian kepada para ahli filsafat, yang nampak dari ketidakpeduliannya terhadap hukum-hukum yang ditemukan oleh ahli filsafat.

Juga, John Stuart Mill²⁹⁾ menyatakan bahwa sejarah manusia merupakan sesuatu yang ditentukan oleh hukum-hukum umum yang mungkin dideteksi oleh filsafat.

Juga Grambattista Vico³⁰⁾ menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa sejarah mencerminkan karya perkembangan rencana kosmos, sebagaimana Tuhan menciptakan dunia, hanya Tuhanlah yang mengetahui sejarah secara totalitasnya, karena *Dialah* yang membuat sejarah. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa khusus sejarah dapat dipahami melalui daya intelek manusia, karena sejarah dibuat melalui tindakan-tindakan manusia. Vico memandang sejarah sebagai seni, dan penjelasan sejarah juga dipandang sebagai seni.

J.G. von Herder³¹⁾ menyatakan bahwa sejarah merupakan seni pemahaman budaya dengan menekankan konsepsi keragaman budaya, dan menekankan pentingnya penelitian sejarah. Di dalam pemikiran Herder ini, ditemukan gabungan kemajemukan kultur, holisme sosial, dan individualisme ekspresionistik yang menjadi karakteristik Romantisme. Menurut Herder, individu *hanya* dapat mengembangkan kemampuannya dan mewujudkan potensinya melalui keanggotaannya dalam masyarakat.

Benedetto Croce dan R.C. Coolingwood³²⁾ sangat se-tuju atas konsep sejarah dari Herder ini. Sejarah harus mengetahui faktanya tetapi yang lebih penting sejarahwan harus memahami mentalitas mereka yang bertindak menciptakan sejarah. Hal ini bisa dicapai

²⁹⁾ Scott Gordon, *The history . . .*, halaman 403

³⁰⁾ Scott Gordon, *The history . . .*, halaman 404

³¹⁾ Scott Gordon, *The history . . .*, halaman 280

³²⁾ Scott Gordon, *The history . . .*, halaman 406

manakala sejarawan dapat mentransformasikan dirinya ke dalam alam pikiran para pelaku sejarah.

Inilah beberapa pendapat dari para ahli filsafat sejarah. Ternyata di antara para ahli itu tidak ada kesamaan pendapat mengenai analisa terhadap sejarah. Aristoteles menganalisa sejarah secara non-kausal; Carl Popper tidak setuju terhadap pemahaman sejarah secara logis karena peristiwa yang akan datang tidak bisa diprediksikan; sebaliknya, para ahli filsafat yang memahami sejarah secara metafisis seperti G.W.F. Hegel, menyatakan bahwa sejarah merupakan *Geist* yang secara progresif menampakkan diri, hasrat-hasrat manusia yang mendorong manusia itu bertindak merupakan bagian dari rencana kosmos dan kebutuhan, sedangkan rencana kosmos, kebutuhan dan kebebasan adalah "satu".

Mengingat semua itu, timbul pertanyaan, mengapa kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17-8-1945. Mengapa tidak terjadi pada tahun-tahun yang lain? Mengapa pada tahun itu Indonesia mengalami *vacuum of power*, sehingga proklamasi dapat dilaksanakan dengan lancar? Mengapa berkali-kali bangsa Indonesia mencoba berjuang melawan imperalisme Belanda, tapi selalu gagal? Mengapa dalam upaya mempertahankan eksistensi RI antara tahun 1945-1947, tokoh-tokoh Indonesia Soekarno, Hatta, Sjahrir, memilih jalan diplomasi di bawah pengawasan PBB? Siapa yang mendorong kehendak para tokoh itu berkeyakinan demikian? Apa kehendak sendiri? Mengapa pada tanggal 18 Agustus 1941 Roosevelt dan Churchill, menciptakan The Atlantic Charter, sehingga dapat dimanfaatkan para pemimpin Indonesia di dalam mengadakan proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945? Mengapa di dalam PD II negara-negara Sekutu juga mempersiapkan pembentukan PBB serta merumuskan dan menetapkan Piagam PBB, Charter of U.N. yang berisikan rambu-rambu Hukum Internasional, utamanya Pasal 1 ayat 2 prinsip self-determination dan Atlantic Charter; pasal 2 ayat 3, persengketaan yang timbul antara negara-negara harus diselesaikan melalui perundingan; pasal 2 ayat 4 hubungan negara satu dengan yang lain tidak boleh menggunakan kekerasan militer; yang rambu-rambu ini dipergunakan oleh bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan eksistensi negara proklamasi waktu itu dan berhasil dengan gemilang? Siapa yang mendorong terjadinya semua itu?

Mengapa pada tahun 1945-1947 Inggris diperintah oleh Partai Buruh (*Labour Party*)? Mengapa Australia waktu itu juga diperintah oleh Partai Buruh? Sehingga Inggris (AFNEI) simpati pada perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan kapal-kapal Belanda diboikot oleh buruh Australia, dibiarkan saja oleh pemerintahnya? Apakah benar bahwa tindakan proklamasi oleh Soekarno-Hatta merupakan bagian dari rencana kosmos? Inilah perlunya diuraikan singkat filsafat sejarah. Sebagai bahan perenungan lebih dalam, untuk memahami sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 itu.

Hak menentukan nasib sendiri (*Self-Determination*)

Perang Dunia II meletus tahun 1939. Situasi dunia semakin tidak menentu. Di dalam situasi yang demikian itu, Presiden Amerika Serikat Roosevelt, dan P.M. Inggris Churchill mencetuskan suatu teori baru, yang akan disumbangkan kepada dunia, agar dapat diupayakan situasi yang lebih teratur dan selaras. Dengan demikian, rakyat di dunia ini bisa hidup di dalam suasana yang lebih baik. Gagasan mulia dari kedua kepala pemerintahan negara besar di dunia itu dituangkan di dalam suatu perjanjian internasional pada tanggal 14 Agustus 1941 terkenal dengan nama *The Atlantic Charter*.³³⁾ Di dalam *Atlantic Charter* itu, dinyatakan bahwa Roosevelt dan Churchill beranggapan bahwa, merupakan hak dari tiap-tiap negara dan bangsa untuk mendapatkan suasana yang lebih baik di dunia pada masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan yang mulia itu, kedua tokoh itu mengetengahkan *the General principles* yakni “the principle of *Atlantic Charter*” yang terperinci di dalam delapan prinsip. Dari delapan itu, yang terpenting adalah prinsip ketiga yang menyatakan:

“They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live ; and they wish to see sovereign rights and self-govern-ment restored to those who have been forcibly deprived of them”.

³³⁾ Telders, *United Nations Textbook*, halaman 11, Penerbit: Universitaire Pers Leiden, tahun 1951

Prinsip ke-3 ini kemudian dimasukkan ke dalam article 1 ayat 2 Piagam PBB:

“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace”.

Prinsip ke-3 Atlantic Charter ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara jajahan yang memperjuangkan kemerdekaan mereka, termasuk Indonesia. Rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara RI juga memanfaatkan peluang prinsip ke-3 Atlantic Charter tersebut.

Perimbangan kekuasaan (*Balance of Power*)

Kerangka dasar pemikiran tentang perimbangan kekuatan (*balance of powers*) ini, berkaitan dengan teori revolusi komunisme dari Trotsky.³⁴⁾ Trotsky menyatakan bahwa musuh komunisme Rusia adalah kapitalisme, tetapi bukanlah hanya kapitalisme yang ada di Rusia saja. Musuh komunisme Rusia adalah kapitalisme internasional. Rusia telah berhasil mengadakan revolusi, tetapi komunisme Rusia tidak mungkin bisa mendirikan masyarakat sosialis komunis di Rusia secara baik apabila tidak pula menumbangkan kapitalisme di lain-lain negara (demikian Trotsky). Trotsky menghendaki agar revolusi yang diadakan di Rusia itu diteruskan di negara-negara lain, sehingga menjadi revolusi internasional. Malahan, menurut Trotsky, upaya menumbangkan sistem kapitalisme itu tidak hanya bersifat internasional, bukan revolusi sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tetapi revolusi itu terus-menerus merupakan revolusi yang permanen. Perebutan kekuasaan dari tangan kaum kapitalis tidak hanya di Rusia, tetapi di seluruh muka bumi ini. Revolusi ajaran Trotsky disebut *permanente-revolutie*. Teori ini sangat berpengaruh di negara-negara komunis di seluruh dunia.

³⁴⁾ Soekarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara Jakarta tanggal 26-5-1958, 5 Juni, 16 Juni, 22 Juni dan 3 September 1958 dan Kuliah Umum pada Seminar Pancasila tanggal 21 Pebruari 1959), halaman 70 dan 71. Penerbit: Departemen Penerangan RI, Penerbitan Khusus No. 167, tahun 1959.

Konsep Trotsky ternyata dilaksanakan oleh Uni Soviet pada pasca Perang Dunia II. Cita-cita komunisme internasional, yang ingin menumbangkan sistem kapitalisme, ternyata bukan omong kosong. Pada Perang Dunia II itu Uni Soviet mengadakan aliansi dengan negara-negara Barat. Semenjak Konferensi Yalta tanggal 11 Pebruari 1945 Uni Soviet berusaha menduduki anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada waktu perang akan berakhir, tentara Uni Soviet menyerbu ke Eropa Tengah dan Eropa Timur, sampai Polandia. Pasca Perang Dunia II Uni Soviet menguasai negara-negara Eropa Timur sampai Jerman Timur. Di front Balkan Uni Soviet menguasai sampai Rumania, Bulgaria dan sekitarnya. Di front Asia Pasifik Uni Soviet mempengaruhi negara-negara Timur sampai Korca Utara. Pasca Perang Dunia kedua Uni Soviet menguasai/mempengaruhi negara-negara Heartland. Berpangkal dari Heartland ini Uni Soviet berupaya menumbangkan negara-negara kapitalis di dunia, sesuai dengan teori Trotsky dan Stalin.

Disisi lain, negara-negara Barat berbuat yang sama. Mereka ingin menguasai negara-negara pantai, di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, sampai Asia Timur. Negara-negara blok Barat secara geopolitis menguasai Rimland. Lahirlah Perang Dingin mulai 1946 sampai dengan ± tahun 1990-an. Berlangsunglah *balance of power* antara negara Heartland dengan negara-negara Rimland.

Uni Soviet kemudian membentuk persekutuan raksasa yang disebut negara-negara Pakta Warsawa, yang terdiri atas negara-negara Eropa Timur dan Balkan. Pakta Warsawa ini sebagai kekuatan Heartland dalam menghadapi Rimland. Negara-negara Rimland pimpinan Amerika Serikat membentuk persekutuan raksasa juga, yakni Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization, NATO*) yang terdiri atas negara-negara Eropa Barat, Turki, Yunani, dan negara-negara yang lain. Berhadapanlah Pakta Warsawa dengan NATO di Eropa di dalam penyelenggaraan *balance of power* antara blok Heartland dan blok Rimland. Demikian juga di kawasan Asia Pasifik.

Hal seperti inilah yang dihadapi oleh para pemimpin Indonesia dalam masa-masa krisis menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda pada tahun 1945-1947. Di dalam situasi demikian itu Soekarno Hatta memilih penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan. Soekarno-Hatta menyelesaikan persengketaan Indonesia-

Belanda dengan konteks politik internasional, sesuai dengan pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 3, pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dan berdasarkan Pembukaan UUD 1945. Langkah Indonesia demikian itu mendapat simpati dari dunia internasional, utamanya Amerika Serikat, Inggris, dan DK PBB. Langkah Indonesia tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki SEAC (AFNEI) waktu itu. Sebaliknya, jalan yang ditempuh oleh Belanda, dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda, tidak mendapat simpati dari DK PBB karena Belanda selalu menghendaki penyelesaian melalui peperangan. Hal ini bertentangan dengan kebijakan umum SEAC (AFNEI) waktu itu. Mula-mula Belanda selalu menolak untuk berunding dengan Indonesia.

Setelah para pemimpin Indonesia, utamanya Soekarno-Hatta memahami tata cara mempertahankan eksistensi negara baru Indonesia, persengketaan Indonesia-Belanda diselesaikan melalui jalan diplomasi. Dan mengkaitkan diplomasi itu dengan campur tangan DK PBB.

Diplomasi

Dalam melaksanakan politik internasional, dan untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara memerlukan alat-alat atau instrumen-instrumen, yakni : diplomasi, propaganda, *political warfare*, ekonomi, imperialisme, kolonialisme, dan perang.³⁵⁾ Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya diplomasi itu? Hakikat diplomasi terdiri atas teknik-teknik dan prosedur pelaksanaan hubungan antar negara. Sebenarnya diplomasi itu merupakan alat yang normal dalam hubungan internasional. Sebagai alat atau instrumen diplomasi bersifat netral, terlepas dari nilai-nilai moral atau immoral. Pelaksanaan diplomasi dan nilainya, bergantung pada maksud, tujuan, kemampuan, kecakapan, kepintaran dari mereka yang melaksanakan diplomasi itu.

³⁵⁾ Suwardi Wiriatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Penerbit: Pustaka Tinta Mas, Surabaya,, 1988, halaman 162-227.

Diplomasi bekerja melalui departemen-departemen luar negeri, konsulat-konsulat, dan misi-misi khusus di seluruh dunia dan biasanya bersifat bilateral. Namun sebagai akibat makin pentingnya, konferensi-konferensi internasional, organisasi-organisasi internasional, organisasi regional, serta tindakan untuk keamanan bersama, penyelenggaraan kepentingan bersama dari berbagai negara maka sifat multilateralnya semakin menonjol. Diplomasi dapat meliputi berbagai kepentingan, mulai soal-soal yang sangat sederhana dalam hubungan dua negara sampai masalah-masalah vital, seperti perang dan perdamaian yang meliputi hubungan banyak sekali negara-negara. Apabila diplomasi itu putus atau gagal, maka bahaya perang menggantinya. Dengan kata lain, kalau mulut diplomat berhenti bicara, mulut meriamlah yang berbicara. Di sini dapat dilihat betapa penting dan prinsipialnya “arti” dan “makna” dari suatu upaya diplomasi.³⁶⁾ Banyak definisi diplomasi, tetapi tidak ada yang jelas dan memuaskan. Tiap-tiap sarjana mendefinisikannya secara tidak jelas dan menyeluruh. Hans J. Morgenthau³⁷⁾ memberi definisi “Diplomasi dalam arti luas, dalam lingkup semua tingkat, *foreign policy*, mengandung empat tugas :

- = Diplomacy must determine its objectives in the light of power actually and potentially available for the pursuits of these objectives.
- = Diplomacy must assess the objectives of other nations and the power actually and potentially available for the pursuits of these objectives.
- = Diplomacy must determine to what extent these different objectives are compatible with each other.
- = Diplomacy must employ the means suited to the pursuits of its objectives.

Menurut Hornby A.S.³⁸⁾, Diplomacy is a management of country's affairs by this agent abroad (ambassadors and ministers), and their direction by the ministry of

³⁶⁾ Suwardi Wiriatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Penerbit: Pustaka Tinta Mas, Surabaya,, 1988, halaman 162

³⁷⁾ Morgenthau, Hans J., *Politics among Nations*, Penerbit: Alfred A Knopf, New York 1964, halaman 539

³⁸⁾ Hornby AS, *Oxford Advanced Learner 's Dictionary of Current English*, Penerbit: Oxford University Press, 1963, halaman 243

Foreign Affairs at home; skill in this two art of, skill in dealing with people so that business is done smoothly.

Sedangkan menurut Merriam Webster³⁹⁾, Diplomacy is art and practice of conducting negotiations between nations as in arranging treaties, or skill in conducting affairs with other without arousing hostility; tact.

Sebenarnya masih banyak definisi semacam itu, namun penulis dapat menyimpulkan bahwa diplomasi adalah alat untuk melaksanakan politik luar negeri yaitu untuk melindungi dan menjamin keamanan dan kepentingan suatu negara. Diplomasi itu dapat dilakukan dengan cara damai, tetapi dapat juga dapat memberikan bantuan kepada operasi militer manakala perang tidak bisa dihindarkan lagi. Diplomasi tidak berhenti bekerja dalam waktu perang, walaupun fungsinya agak lain.

Tugas seorang diplomat adalah melaksanakan politik dan kebijakan dari negerinya sendiri, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya, memberikan informasi, dan laporan kepada pemerintahnya tentang perkembangan yang penting di dunia ini. Para diplomat harus memandang pentas politik itu dari sudut pandang bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa harus bersedia kompromi terhadap setiap isu yang dapat dianggap tidak vital bagi mereka, agar setiap cara yang dilaksanakan itu mampu memberi keuntungan yang realistik.

Demikian pulalah diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin Indonesia waktu itu, juga mempunyai tujuan pokok yang sangat penting, yakni melakukan penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda tahun 1945-1947 melalui diplomasi dibawah pengawasan DK PBB untuk mencapai suatu tujuan pokok bagi negara RI, yakni "pengakuan" dari dunia internasional utamanya dari Belanda. Pengakuan eksistensi dan kedaulatan negara baru yang telah diproklamasikan itu adalah sangat penting. Karena pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda, terkandung arti bahwa Belanda telah melepaskan Indonesia sebagai tanah jajahannya, melepaskan kaitan Indonesia dengan artikel 1 Grondwet Belanda.

³⁹⁾ A Merriam-Webster, *Webster 's New Practical Dictionary*, Penerbit: G & C Merriam Co. Publishers Springfield, Mass, USA, tahun 1951, halaman 189

Pengakuan terhadap Negara Baru

Sebagaimana dijelaskan dimuka tujuan pokok strategi Soekarno-Hatta, menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan DK PBB adalah agar Pemerintah Belanda mengakui atau memulihkan kedaulatan Negara Indonesia. Oleh karena itu diuraikan kerangka dasar pemikiran tentang pengakuan, *recognition*.

Di dalam masyarakat internasional dikenal dua kategori pengakuan, *recognition*, yaitu, pengakuan dengan tiga tingkat dan pengakuan dua tingkat. Keduanya dijelaskan pada bahasan berikut:

Pertama, konsep pengakuan yang mengemukakan adanya tiga tingkat pengakuan terhadap negara baru.

= Pengakuan kenyataan *de facto* pemerintah, *erkenning als feitelijkte regering*.

Pengakuan terhadap adanya kenyataan (*facticitas*) pemerintah suatu negara baru, bergantung pada faktor apakah pemerintah itu masih dapat secara nyata melaksanakan kekuasaannya. Disini terkandung maksud bahwa pemerintah yang diakui itu mampu melaksanakan kekuasaannya secara nyata di dalam masyarakat internasional. Apabila di dalam kenyataannya kemudian pemerintah yang diakui itu tidak mampu melaksanakan kekuasaan pemerintahnya, pengakuan itu menjadi hapus karena hukum.

= Pengakuan *de facto* (*de facto erkenning*)

Pengakuan *de facto* adalah pernyataan dari pemerintah suatu negara bahwa pemerintahnya berkehendak mempersiapkan dan mengadakan hubungan diplomatik dengan suatu negara baru itu untuk sementara, dalam bentuk konsulair.

= Pengakuan *de iure* (*de iure erkenning*)

Pengakuan *de iure* adalah pernyataan dari suatu negara, bahwa pemerintahnya berkehendak mengadakan hubungan diplomatik secara normal timbal balik. Di dalam pengakuan ini terkandung maksud bahwa negara yang mengakui itu percaya bahwa negara yang diakui itu akan stabil, baik negaranya maupun pemerintahnya.

Pengakuan tiga tingkat ini dikemukakan oleh Mr. J.P.A. François⁴⁰⁾. François menjelaskan macam-macam bentuk pengakuan, *recognition*, terhadap negara baru. Di dalam masyarakat internasional ada semacam adat kebiasaan internasional (*customary rules*), bahwa keberadaan negara-negara itu diakui oleh suatu negara satu sama lain. Lebih-lebih kalau negara itu negara baru, pengakuan dari negara lain sangat penting.

Pengakuan adalah suatu tanda bahwa negara itu telah diakui sebagai anggota baru di dalam masyarakat internasional. Di samping pengakuan terhadap negara (*Staat*), ada pula pengakuan terhadap kekuasaan *de facto* suatu pemerintah (*regering*). Pengakuan terhadap kekuasaan *de facto* suatu "pemerintah" (*regering*) sudah terkandung maksud pengakuan terhadap negara yang bersangkutan (*de erkenning van een regering impliceert die van de staat*).

Adalah tidak mungkin suatu pemerintah diakui, tetapi negara yang mempunyai organ "pemerintah" itu tidak diakui. François dalam hal ini menegaskan:

Het zou onmagelijk zijn de regering te erkennen, maar de staat, waarvan de regering het orgaan is niet.⁴¹⁾

Juga tidak mungkin suatu pemerintah diakui, selama negara dalam arti hukum internasional (*Staats-volk, en een Staatsgebieds*), kekuasaan pemerintah yang seharusnya dilaksanakan, belum terwujud. Suatu pemerintah dapat diakui kalau organ negara (pemerintah) yang mempunyai rakyat, wilayah, sehingga kekuasaan pemerintah dapat diwujudkan. Mungkin ada dua negara yang mengadakan persekutuan (uni) guna kepentingan dua negara di masa datang, akan tetapi pengakuan terhadap negara tetap pada negara masing-masing. Di sisi lain mungkin ada suatu negara mengakui eksistensi negara lain, tanpa mengakui pemerintah negara itu. François di dalam bukunya itu menyatakan :

Bijde erkenning van een Regering valt namelijk te onderscheiden tussum : erkenning als feitelijke regering (de facto regering), de facto erkenning en de iure erkenning. Met de erkenning als feitelijke regering word toegegeven, dat het zich als regering

⁴⁰⁾ François J.P.A., *Grondlijnen van het Volkenrecht*, Penerbit: N.V. Uitgevers-Maatschappij, W.E.J. Tjeenk Wilink, Zwolle 1954, halaman 107

⁴¹⁾ François J.P.A., *Grondlijnen....*, halaman 107

aandienend-gezag inderdaad als zodanig is te beschouwen, met andere woorden, de facticiteit-in de literatuur wordt gewoonlijk van “effectiviteit” gesproken-van het uitgeoefende gezag wordt erkend. De *facto* erkenning; met de *facto* erkenning, ener regering verklaart men zich daarenboven, bereid voorlopig met die regering een, zij het ook beperkt diplomatiek of consulaire verkeer te onderhouden. De *de iure* erkenning ten slotte houdt in definitief bereid verklaring tot normale diplomatieke betrekkingen.⁴²⁾

Pengakuan *de facto* dan *de iure* menunjukkan adanya perbuatan hukum timbal balik, adanya persetujuan, di mana hubungan dalam hukum internasional antara kedua negara dilaksanakan.

Pengakuan terhadap “*facticitas*” pemerintah suatu negara (*erkenning als feitelijkte regering*) bergantung pada faktor, apakah pemerintah itu masih bisa secara nyata melaksanakan kekuasaannya, kalau di dalam kenyataan kemudian, pemerintah yang diakui itu tidak mampu melaksanakan kekuasaan pemerintahannya, pengakuan itu menjadi hapus karena hukum. Namun, kewajiban dalam hukum internasional adalah sama antara pengakuan *feitelijkte regering* (*de facto regering*) dengan pengakuan *de facto* negara. Dalam pengakuan *de iure* terkandung suatu kepercayaan bahwa negara yang diakui itu adalah stabil, baik keadaan negara maupun keadaan pemerintahannya.

Kedua, konsep pengakuan terhadap negara baru dengan dua tingkat, pengakuan *de facto* dan *de iure*. Konsep ini dikemukakan oleh J.G.Starke.⁴³⁾ Menurut Starke, international communion terdiri atas berbagai negara. Namun keadaan negara-negara itu berubah-ubah dari waktu ke waktu; kadang-kadang ada dua atau tiga negara bergabung menjadi satu negara baru; kadang-kadang ada satu negara terpecah menjadi tiga negara yang masing-masing merupakan negara baru. Ada suatu negara perwalian (*trusteeship*) berubah menjadi suatu negara baru yang berdiri sendiri. Kadang-kadang ada suatu revolusi yang kemudian mendirikan suatu negara baru. Timbulnya negara-negara baru ini menyulitkan negara-negara lain dalam mengadakan hubungan internasional (*international intercourse*)

⁴²⁾ Starke J.G., *An Introduction to International Law*, Penerbit: London-Butterworth & Co. (Publishers) Ltd., tahun 1954, halaman 120

yang satu dengan yang lain. Kesulitan mengadakan hubungan dengan negara baru ini diatasi dengan jalan mengadakan pengakuan, *recognition*, terhadap negara baru tersebut.

Ada dua bentuk pengakuan, *recognition*, yakni pengakuan *de facto* dan pengakuan *de iure*. *The practice of states draws a distinction between recognition "de facto" and "de iure"*. Menurut J.G. Starke⁴⁴⁾ ada dua tingkat pengakuan, yakni *de facto* dan *de iure*. Sedangkan François mengemukakan adanya tiga tingkat pengakuan, yakni *erkenning als feitelijke regering*, *de facto erkenning* dan *de iure erkenning*. Mengenai pengakuan ini, Starke menyatakan sebagai berikut :

Recognition de facto means that in the opinion of recognising state, provisionally and temporary and with all due reservation for the future, the state or the government recognised fulfils the above requirement in fact (de facto). Recognition de iure, means that according to the recognising state, the state or government recognised formally fulfils the requirement laid down by international law for effective participation in the international community.⁴⁵⁾

Di dalam hukum internasional lazim dianut adanya dua bentuk atau dua tingkat pengakuan negara-negara baru, yakni pengakuan *de facto* dan pengakuan *de iure*, sesuai dengan ajaran Starke.

Di dalam menafsirkan perjanjian Linggarjati waktu itu, ternyata Pemerintah Belanda menggunakan teori François, yakni pengakuan tiga tingkat, sebaliknya Republik Indonesia, menggunakan teori pengakuan dua tingkat. Hal demikian menyebabkan terjadinya Agresi militer I, 21-7-1947.

⁴⁴⁾ Starke J.G., *An Introduction ...*, halaman 120

⁴⁵⁾ Starke J.G., *An Introduction ...*, halaman 120

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan historis. Mengapa didekati secara kualitatif, deskriptif dan historis, karena peneliti akan mencari makna *meaning* dari pada fenomena yang dikaji. Di dalam penelitian ini yang dikaji adalah peristiwa-peristiwa masa lalu, yakni peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 sampai dengan 1947-an.

Sehingga tidak mungkin si peneliti mengadakan observasi secara langsung terhadap fenomena yang diteliti, hanya dapat dipahami dengan melihat dan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Dengan demikian penelitian ini merupakan studi dokumen.⁴⁶⁾ Dan untuk meningkatkan ketajaman kesimpulan-kesimpulan penelitian ini dilakukan wawancara khusus dengan tokoh-tokoh yang sekarang ini masih ada, yakni tokoh-tokoh yang menurut pengamatan peneliti mengetahui dengan baik kejadian-kejadian yang diteliti itu. Dalam hal ini DR. H. Roeslan Abdoelgani, Soebadio Sastrosatomo, Manai Saphiaan, DR. (Jendral purnawirawan) A.H. Nasution (peneliti disuruh membaca buku beliau), Ibu Soepeni dan Prof. DR. I. Nyoman Dekker. Juga dijelaskan bagaimana cara menganalisa data-data yang diperoleh dari penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini akan menyajikan tiga hal seperti di bawah ini :

- = Mengupayakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- = Teknik analisa dokumen (dengan mengadakan seleksi dokumen, mencari makna dokumen, seleksi *coding* dan *coaxial coding*).
- = Peneliti melakukan wawancara khusus dengan para tokoh yang sekarang ini masih ada.

⁴⁶⁾ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, Penerbit: The Free Press, A Division of Macmilan Inc., New York, tahun 1987, halaman 289

Mengupayakan dokumen-dokumen yang berguna dalam penelitian ini

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dikemukakan hal-hal seperti di bawah ini:

Penelitian ini bersifat historis, mengkaji peristiwa-peristiwa masa lalu. Khususnya mengkaji pertumbuhan kenegaraan Republik Indonesia kurun waktu 1945-1947 mengapa yang dikaji peristiwa-peristiwa antara tahun 1945-1947?

Pada kurun waktu itu terjadi dua peristiwa yang penting, yakni:

Pertama, ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No X tanggal 16-10-1945 beserta tiga Maklumat Politik pelaksanaannya. Semua itu merupakan penetapan politik domestik yang sangat penting ditinjau dari perkembangan serta ke-langsungan keberadaan negara Republik Indonesia waktu itu. Sebagai Maklumat Politik pelaksanaannya, pada tanggal 1 November 1945 ditetapkan Maklumat Politik RI sebagai per-nyataan Politik RI ke luar dan ke dalam negeri. Agar dunia internasional utamanya PBB dapat mengenal dan mempelajari negara dan masyarakat Indonesia. Siapa sebenarnya dan apa yang dikehendaki, dan bagaimana tanggapan negara RI dan masyarakat Indonesia itu terhadap situasi politik dan ekonomi internasional waktu itu.

Kedua, kurun waktu itu, 1945-1947, diadakan perundingan antara Indonesia Belanda yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947. Persetujuan Linggarjati itu merupakan modal awal untuk mengadakan perundingan lebih lanjut di dalam rangka mengupayakan agar Pemerintah Belanda bersedia mengakui Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Pengakuan demikian terkandung arti bahwa Belanda bersedia melepaskan Indonesia sebagai tanah jajahan Kerajaan Belanda. Melepaskan Indonesia kaitannya dengan artikel 1 Grondwet Belanda.

Pertanyaan yang timbul, penelitian ini bersifat historis, faktor sejarah macam apa saja yang dicari dan mengapa demikian? Yang akan dipahami oleh peneliti ialah:

- = Konteks politik domestik dan internasional waktu itu.
- = Konteks ekonomi domestik dan internasional waktu itu.
- = Latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dan terkait dengan perundingan Linggarjati, yang menghasilkan persetujuan Linggarjati waktu itu.
- = Pemahaman terhadap makna, *meaning* daripada Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati.

Pertanyaan yang timbul adalah, darimana faktor sejarah itu akan diperoleh dan mengapa? Fakta-fakta sejarah diperoleh dari dokumen-dokumen resmi baik dari negara Republik Indonesia maupun beberapa dari Negeri Belanda. Juga dokumen-dokumen otentik dari badan-badan nasional dan internasional utamanya *Atlantic Charter* dan Piagam PBB. Dari buku-buku ilmu pengetahuan, surat-surat kabar, majalah-majalah dan dokumen dalam arti luas. Sudah barang tentu semuanya itu dicari yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kenegaraan RI tahun 1945 sampai dengan 1947 itu.

Pertanyaan yang timbul berikutnya adalah bagaimana cara untuk memperoleh fakta sejarah yang akurat, komprehensif dan obyektif, dan mengapa? Studi dokumen memang ada kendalanya.

Ada sementara penulis yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dari tulisan itu. Ada penulis lain yang hanya menuruti kehendak dari penguasa dari suatu saat, walaupun yang ditulis itu tidak benar dan tidak obyektif. Mungkin suatu buku ilmu pengetahuan yang ditolak oleh penguasa pada suatu waktu, justru buku demikian itu adalah yang benar. Ada pula seorang penulis yang mengungkap tujuan tertentu tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Di sisi lain ada seorang menulis suatu masalah, padahal orang itu tidak mengetahui banyak mengenai masalah itu.

Peneliti menyadari adanya kendala-kendala seperti diuraikan di atas. Oleh karena itu harus dengan teliti memilih data yang relevan dan akurat. Kendala itu ditinjau dari berbagai sudut : apakah data itu berdasarkan sumber informasinya, merupakan data primer atau data sekunder, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya.

Dengan perkataan lain, bagaimana status penulis dan penerbit itu, apakah oleh perorangan, apakah suatu organisasi atau oleh suatu lembaga resmi pemerintah. Bagaimana Struktur dari dokumen tersebut. Kalau kita mengadakan pemahaman suatu buku misalnya, harus hati-hati, buku itu ditulis untuk tujuan apa. Ada buku yang ditulis untuk konsumsi publik, ada yang untuk konsumsi masyarakat ilmiah. Harus jeli, dan dalam memilih dokumen, apakah untuk masyarakat ilmiah ataukah untuk keperluan populer. Juga harus hati-hati, apakah penulis itu berwenang atau tidak. Sebab kadang-kadang seorang menulis undang-undang misalnya, padahal orang itu tidak mengetahui banyak masalah hukum.

Dengan mengadakan seleksi dokumen demikian, maka kendala-kendala termaksud dapat dikurangkan, walaupun tidak mungkin menghilangkan sama sekali.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana cara meningkatkan, mempertajam kesimpulan-kesimpulan, setelah data-data dikumpulkan dan dianalisa? Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti mengadakan wawancara khusus dengan tokoh-tokoh yang sekarang masih ada, yang diperkirakan mengetahui dengan baik peristiwa-peristiwa yang diteliti.

Teknik analisa dokumen

Teknik analisa dokumen ini meliputi beberapa tahap, yakni dengan mengadakan seleksi dokumen, mencari makna (*meaning*) dari dokumen, dan mengadakan seleksi coding atau coaxial coding.

Karena penelitian ini merupakan studi dokumen, maka peneliti mengikuti prinsip-prinsip studi dokumen itu yang tahapannya seperti di bawah ini:

Pertama, mengkaji dokumen dengan kriteria-kriteria tertentu.

Dokumen primer atau dokumen sekunder. Pengarangnya apakah orang-orang yang mengetahui secara baik terhadap peristiwa itu. Maksud penulisan itu apa. Apakah untuk konsumsi masyarakat populer, apakah konsumsi masyarakat ilmiah. Status penulis bagaimana. Apakah perorangan, ataukah organisasi dagang. Apakah lembaga-lembaga pemerintahan. Strukturnya bagaimana. Apakah buku-buku populer, ataukah buku-buku ilmiah. Alasannya kalau penulis itu berwenang, apakah kalau dokumen itu sebagai sampling bias atau tidak, harus diteliti dengan baik.

Kedua, mengadakan seleksi dokumen.

Untuk mencari validitas dari dokumen-dokumen itu, diadakan seleksi dokumen, kalau data sudah masuk untuk validitasnya telah ditentukan, dilakukan analisis, yang mempergunakan analisis isi atau *content-analists*.⁴⁷⁾

Kemudian dokumen-dokumen itu dipahami berdasarkan paradigma ilmu yang sesuai, dari segi makna, atau *meaning*, apa makna yang tersirat di dalam dokumen itu, juga perilaku orang yang terkait dengan dokumen itu. Juga dokumen-dokumen itu dipahami berdasar paradigma ilmu yang sesuai, dari segi "role"⁴⁸⁾ atau peran. Siapa yang berperan di dalam peristiwa itu, apa peran mereka itu. Apakah pengaruh peran itu terhadap level kajian yakni penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda tahun 1945-1949, (yang dikaji 1945-1947), dalam rangka mempertahankan eksistensi negara RI Kemudian dokumen-dokumen itu dipahami berdasarkan paradigma ilmu yang sesuai, dari segi "struktur" yakni struktur internal dan struktur eksternal.

- Struktur internal mengenai persengketaan Indonesia Belanda tahun 1945-1949 (1945-1947) itu, di dalam masyarakat Indonesia, apakah ada pola-pola penyelesaian tertentu, mungkin ada tokoh-tokoh yang menghendaki penyelesaian itu melalui diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh kekuatan rakyat. Mungkin ada yang menghendaki penyelesaian itu melalui perang, mengandalkan kekuatan militer saja. Mungkin ada kelompok lain yang menuduh bahwa Belanda adalah agresor, sehingga harus dilawan melalui peperangan, dengan kekuatan militer.

- Struktur eksternal, apakah ada, di dalam struktur dunia internasional yang berperan di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda tahun 1945-1949 (1945-1947) itu.

Sebagaimana diketahui di dunia internasional terdapat pola-pola tertentu mengenai penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda tahun 1945-1949 (1945-1947) itu. Dewan

⁴⁷⁾ Michael Quinn Patton, *Qualitative evaluation and research methods*, Penerbit: Sage Publications Inc., California 1990, halaman 371-426

⁴⁸⁾ John Lofland H. *Lofland, a Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Penerbit: Wadworth Publishing Company, California, 1984, halaman 131-137

Keamanan PBB (DK PBB), *South East Asia Command (SEAC)*, *Allied Force for Netherland East India (AFNEI)* mempunyai pola penyelesaian agar pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah mereka melalui meja perundingan. Dengan argumentasi bahwa DK PBB, SEAC dan AFNEI bertugas menyelenggarakan perdamaian dunia termasuk Indonesia, sedangkan di Indonesia terus ada pertempuran, tugas itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Periode waktu analisis, dalam pemilihan dokumen selain dicari, sumber-sumber dokumen itu dari mana, bahwa dokumen yang dipergunakan tidak dibatasi oleh periode waktu. Sebagaimana Kenneth D. Bailey⁴⁹⁾ menyatakan, bahwa di dalam studi dokumen tidak terbatas periode waktunya. Dan peneliti sependapat dengan pernyataan Kenneth D. Bailey tersebut.

Ketiga, mencari makna (*meaning*) dokumen.

Untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian ini perlu diuraikan analisis isi atau *content-analysis* yang lebih mendalam, yakni setelah dokumen-dokumen itu diseleksi, dikaji berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga validitas dokumen-dokumen itu bisa diketahui. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah valid itu dipahami berdasarkan paradigma ilmu yang sesuai, dari segi makna (*meaning*). Apa makna atau *meaning* yang tersirat di dalam dokumen-dokumen itu. Kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

Keempat, mengadakan selektif coding dan coaxial coding.

Setelah dokumen-dokumen itu dipahami dari segi makna atau *meaning*, kemudian dipahami berdasarkan paradigma ilmu yang sesuai dari segi "role" atau peran. Siapa yang berperan di dalam peristiwa itu. Atau peristiwa apa merupakan "role" dalam peristiwa lainnya.

Di dalam hubungan ini peneliti perlu menggunakan selektif coding dan coaxial coding.⁵⁰⁾

⁴⁹⁾ Kenneth D. Bailey. *Methods of social research* . . . , halaman 289

⁵⁰⁾ Strauss Anelm L., *Basic of Qualitative Research*. Penerbit : Sage Publication Inc., London, 1990, halaman 61-150

Di dalam selektif coding, difahami, apa makna dan arti data itu, difahami berdasar paradigma ilmu yang sesuai. Misalnya mengenai Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945. Apa maknanya? Tetapi karena Maklumat Wakil Presiden No. X itu sudah lampau, yang bisa dilihat hanya dokumen-dokumen. Karenanya content-analysist adalah satu-satunya untuk bisa menjawab permasalahan di dalam penelitian ini secara tepat.

Yang disebut dengan selektif coding adalah, setelah membaca serangkai catatan itu, konsep-konsep apa yang selalu muncul di dalam catatan itu, diberi kode tertentu, misalnya *meaning* dengan kode (Mn), Atlantic Charter dengan kode (AC). Demikian juga dengan kumpulan dokumen-dokumen yang lain. Kejadian-kejadian apa yang muncul diberi kode tersendiri. Selektif Coding ini guna menghasilkan kriteria-kriteria, atau kategori-kategori, skala klasifikasi dari variabel-variabel, di dalam penelitian itu.

Coaxial coding atau axial coding ialah, membaca dan melihat matrik yang dibuat yang menghubungkan dua properti atau dua variabel.

Dengan membaca matrik itu, disana didapati crossing antara dua variabel, misalnya variabel "meaning" dan "role". Crossing ini dapat menghasilkan proposi-proposisi.

Peneliti melakukan wawancara khusus dengan para tokoh yang sekarang masih ada

Untuk meningkatkan, mempertajam kesimpulan-kesimpulan di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara khusus dengan tokoh-tokoh yang mengetahui dengan baik kejadian-kejadian yang diteliti.

Peneliti mengadakan wawancara khusus dengan Dr. H. Ruslan Abdulgani, Soebadio Sastrosatomo, Manai Sophiaan, Ibu Soepeni, Dr. (Jendral Purn.) A.H. Nasution. Karena peneliti mengetahui bahwa tokoh-tokoh tersebut mengetahui banyak bahkan sebagai pelaku dari peristiwa-peristiwa yang diteliti. Selain para pelaku sejarah tersebut di atas, peneliti mengadakan wawancara khusus dengan tokoh yang bukan pelaku sejarah, yakni dengan Prof. Dr. I Nyoman Dekker.

Metode penelitian kualitatif di dalam operasionalnya

Sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini (uraian tersebut di atas), maka peneliti pada tahap pertama mengupayakan sejumlah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang relevan di dalam penelitian ini.

Dokumen-dokumen termaksud seperti di bawah ini:

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, Penerbit: Boekh. v.h. Gebr. Belinfante N.V.'s-Gravenhage tahun 1922. Dokumen-dokumen yang diambil dari buku, United Nations Textbook, Compiled by the "Professor Telders" Study Group for International Law at Leyden University, Penerbit: Universitare Press Leyden tahun 1950 ialah : Declaration of Principle Known as the Atlantic Charter 14 Agustus tahun 1941, Declaration by United Nations tahun 1942, Yalta Conference tahun 1945, The San Francisco Conference tahun 1945, (tentang pembentukan PBB *the United Nations Organitations* dan penetapan Piagam PBB, *Charter of United Nations*), Moscow Declaration General Security tanggal 30-10-1943, Teheran Declaration tanggal 1-12-1943, Dumbarton Oaks Conference tanggal 21-8-1944. Dokumen-dokumen yang diambil dari buku "Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1945", yang dihimpun oleh Koesnadiprodo. Penerbit: S.K. Seno, Jakarta tahun 1951 ialah: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945, Pembukaan UUD 45, Penetapan PPKI tanggal 22-8-1945 tentang pembentukan Partai Nasional Indonesia, Maklumat Pemerintah tanggal 30-8-1945 tentang penundaan gerakan persiapan pembentukan P.N.I, Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, tentang (Perubahan KNIP dari badan pembantu Presiden menjadi badan legislatif dan turut menetapkan GBHN dan Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BPKNIP), Maklumat Pemerintah RI tanggal 1-11-1945 tentang haluan Pemerintah Republik Indonesia yang telah disetujui oleh BPKNIP, Pengumuman BPKNIP No. 3 tanggal 30-10-1945 tentang usul BPKNIP kepada Presiden agar rakyat diijinkan mendirikan Partai Politik, Maklumat Pemerintah RI tanggal 3-11-1945 tentang Pembentukan Partai Politik, pengumuman

BPKNIP No. 5 tanggal 11-11-1945 tentang pertanggungjawaban para menteri kepada Badan legislatif dalam hal ini KNIP, Maklumat Pemerintah RI tanggal 13-11-1945 tentang Peristiwa Surabaya tanggal 10 November 1945, Maklumat Pemerintah RI tanggal 28-12-1945 tentang kewajiban Tentara Inggris di Indonesia. Dokumen dari buku *International Organization*, tulisan Donald C. Blaisdell. Penerbit The Ronal Press Company, New York, 1966. Harian *Kompas* tanggal 11 Desember 1996 tentang pendapat Presiden Soeharto bahwa perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 selain mengandalkan kekuatan militer juga tidak kalah pentingnya perjuangan melalui diplomasi.

Dari keseluruhan dokumen-dokumen tersebut setelah diadakan seleksi dokumen berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, ada 20 (dua puluh) dokumen yang valid. Setelah validitas ke-20 dokumen diketahui, peneliti mencari makna (*meaning*) dari masing-masing dokumen itu. Kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Peneliti juga mengadakan selektif *coding* dan *coaxial coding* yang bisa menghasilkan proporsi-proporsi untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

Mengenai upaya seleksi dokumen, mencari makna dokumen, selektif *coding* dan *coaxial coding* yang lengkap dijelaskan pada lampiran I Disertasi ini.

BAB II

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN RI

NO. X TANGGAL 16-10-1945 BESERTA KONTEKS

EKONOMI-POLITIK DAN PERAN TOKOH PERUMUSNYA

BAB II
MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN RI
NO. X TANGGAL 16-10-1945 BESERTA KONTEKS
EKONOMI-POLITIK DAN PERAN TOKOH PERUMUSNYA

Pengantar

Secara ontologis tesis yang hendak dijelaskan di dalam Bab II ini ialah bahwa Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, dan tiga maklumat politik pelaksanaannya itu adalah sebagai keputusan politik strategis Pemerintah RI. Keputusan itu merupakan hasil interaksi tokoh-tokoh pemrakarsa dengan konteks ekonomi-politik domestik dan internasional yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan dari dunia Internasional.

Selanjutnya, peneliti akan menjawab permasalahan a, dan b sebagai berikut:

Permasalahan a; “konteks politik-ekonomi domestik dan internasional macam apa yang mendorong kemunculan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 itu?”

Permasalahan b; latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik para tokoh macam apa yang memprakarsai dan berperan di dalam proses berperan di dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu kaitannya dengan proses Perjanjian Linggarjati?”

Berkaitan dengan permasalahan a, dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sejak puluhan tahun lamanya.

Mulai tahun 1908 sejak berdirinya Budi Utomo sampai terjadinya Perang Dunia II, cita-cita tersebut belum berhasil diwujudkan. Hal ini dapat dilihat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang menyatakan, “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Makna yang tersirat di dalam alinea kedua ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia telah lama mencita-citakan Indonesia merdeka, namun sampai dengan Perang Dunia II cita-cita itu belum terlaksana. Para perintis

kemerdekaan berulang kali mencoba berjuang untuk kemerdekaan itu, tetapi selalu mengalami kegagalan. Hal demikian itu disebabkan oleh: pertama, karena perjuangan demi perjuangan itu dilakukan bersifat kedaerahan. Pada waktu Imam Bonjol bergerak di Sumatera, daerah lain misalnya Jawa Sulawesi, Ambon tidak berjuang. Pada waktu Diponegoro berjuang di Jawa, daerah lain tidak berjuang.

Kedua, pada saat melawan Belanda, bangsa Indonesia secara langsung dan mandiri menghadapi Belanda. Saat itu belum ada badan internasional atau negara lain yang dapat dimanfaatkan sebagai wasit.

Situasi nasional dan internasional pasca Perang Dunia II sangat lain dibandingkan dengan situasi sebelumnya. *Situasi nasional*: dekat dengan meletusnya Perang Dunia II, Soekarno berhasil memobilisasi rakyat Indonesia. Beliau berhasil mengarahkan gerakan rakyat kecil Indonesia melawan Belanda memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno mengajarkan bahwa imperialisme Belanda dapat ditumbangkan dengan perlawanan secara nasional. Pada tahun 1927 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang berasaskan, sosionasionalisme dan sosio-demokrasi yang bertaqwa kepada Tuhan Y.M.E.. Asas ini nantinya disebut Pancasila. Melalui asas ini si miskin Indonesia dapat dipersatukan, digerakkan guna menumbangkan imperialisme Belanda. Dengan ketetapan PPKI tanggal 22-8-1945⁵¹⁾ dijelaskan tujuan dan program ekonomi dari Partai Nasional Indonesia itu seperti di bawah ini: bahwa tujuan PNI ialah memperjuangkan negara Republik Indonesia yang berdaulat adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Untuk mencapai tujuan mulia itu diupayakan hal-hal seperti berikut:

- = memperkuat persatuan bangsa
- = memperbesar rasa cinta, setia dan bakti kepada tanah air.
- = mengikhtikarkan program ekonomi dan sosial seperti di bawah ini:
 - Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas gotong royong (prinsip ini nantinya masuk pasal 33 ayat 1 UUD 1945, asas gotong royong diganti dengan asas kekeluargaan).

⁵¹⁾ Koesnodiprodjo, *Himpunan . . .*, halaman 117

- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (ini nantinya masuk pasal 33 ayat 2 UUD 1945).
- Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ini nantinya masuk pasal 33 ayat 3 UUD 1945)
- Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (ini nantinya masuk pasal 34 UUD 1945).
- Hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (ini nantinya masuk pasal 27 ayat 2 UUD 1945).⁵²⁾

Dengan rangsangan masa depan yang demikian itu rakyat kecil Indonesia berhasil dihimpun oleh Soekarno, merupakan kekuatan nasional di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Situasi internasional: Negara-negara Barat sambil menyelesaikan peperangan berhasil membentuk Badan Dunia ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB (United Nations Organization). Mereka berhasil menetapkan norma-norma Hukum Internasional yang dapat dijadikan pedoman bagi negara-negara jajahan seperti Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Norma-norma yang dimaksud antara lain yang penting ialah, *The Atlantic Charter* yaitu suatu norma universal yang menyatakan bahwa setiap bangsa di dunia berhak menentukan nasib sendiri, memilih bentuk negara dan pemerintahan yang mereka kehendaki atau prinsip “self determination”, pasal 1 ayat 2 Piagam PBB bahwa hubungan di antara negara-negara berdasarkan prinsip persamaan hak dan prinsip self-determination tersebut di atas, pasal 2 ayat 3 bahwa apabila terjadi persengketaan antara bangsa-bangsa harus diselesaikan dengan jalan damai melalui perundingan, pasal 2 ayat 4 bahwa tiap-tiap bangsa di dalam hubungan internasional tidak menggunakan kekerasan senjata. Ketentuan-ketentuan di atas merupakan rambu-rambu hukum internasional yang harus ditaati oleh semua bangsa guna menjamin perdamaian dunia. Situasi nasional dan internasional macam inilah yang

⁵²⁾ Lampiran I. *Hasil penelitian Studi Dokumen*, (angka 10) ..., halaman 31.

dihadapi bangsa Indonesia pada waktu akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945. Dengan memanfaatkan peluang pada Atlantic Charter dan situasi vacuum of power di Indonesia waktu itu, maka Soekarno Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan selamat pada tanggal 17-8-1945 itu.

Teks Proklamasi itu juga mengandung rambu-rambu hukum nasional-internasional yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia waktu itu.

Teks Proklamasi seperti di bawah ini;

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17-8-1945
atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta

Makna dari teks proklamasi;⁵³⁾

= ***Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia:***

Hal ini mengandung arti bahwa mulai hari itu Bangsa Indonesia tidak mengakui kekuasaan negara asing manapun atas Indonesia termasuk tidak diakuinya kekuasaan Belanda atas Indonesia. Mulai saat itu negara RI berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

= ***Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan:***

Pemindahan kekuasaan yang dimaksud adalah pemindahan kekuasaan kantor-kantor, jawatan-jawatan dan lain-lain yang waktu itu dikuasai oleh Jepang, dipindah ke kekuasaan Indonesia.

⁵³⁾ Lampiran I, *Hasil Penelitian Studi Dokumen* (angka 7) . . . , halaman 25

= *dan lain-lain:*

Yang dimaksud dalam hal ini adalah Penetapan UUD negara, pembentukan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan segala alat perlengkapan dan sebagainya.

= *dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya*

- *dengan cara seksama:*

Maksudnya pemindahan kekuasaan dan sebagainya itu akan dilaksanakan dengan cara damai. Tidak akan benturan dengan tentara Jepang yang waktu itu masih ada di Indonesia.

- *dalam tempo sesingkat-singkatnya:*

Maksudnya, mengenai penetapan UUD, pembentukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan segala alat perlengkapannya itu, akan dilaksanakan secepat-cepatnya, sebelum tentara Sekutu, tentara Inggris datang di Indonesia. Maka dari itu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (membentuk Pemerintah RI) dan membentuk KNIP. Dengan ditetapkannya UUD 1945 dapat diketahui bahwa negara Proklamasi adalah Negara Republik Indonesia Kesatuan dan ada pembagian kekuasaan negara, MPR, DPR dan presiden.

- *mengapa pembentukan Pemerintahan Negara RI harus dilakukan dengan cepat?*

Sebelum tentara Inggris (AFNEI) berangkat ke Indonesia, Belanda telah mengadakan perjanjian dengan Inggris yang terkenal dengan nama "Perjanjian Chacquer". Isi perjanjian itu ialah selama bertugas di Indonesia Inggris hanya akan mengakui kekuasaan Belanda atas Indonesia.

Soekarno-Hatta tanggap atas situasi saat itu sehingga diupayakan agar sebelum tentara Sekutu (tentara Inggris) datang di Indonesia, telah berdiri negara Republik Indonesia dengan segala alat perlengkapannya. Itulah sebabnya pada tanggal 18-8-1945 PPKI menetapkan UUD 1945 mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (pemerintah pusat), membentuk KNIP dan diteruskan pembentukan

pemerintah daerah.⁵⁴⁾

Sikap Soekarno-Hatta ini sangat tepat dan sangat menguntungkan Indonesia, karena pada saat AFNEI mendarat di Indonesia, Jendral Christison Komandan AFNEI waktu di Singapura, mengakui keberadaan atau eksistensi pemerintah RI secara de facto. Hal ini disambut baik oleh Pemerintah Indonesia pusat dan daerah.

Dari uraian di atas terbukti bahwa tokoh-tokoh Soekarno-Hatta ternyata bukan saja aktor yang hanya mampu mereproduksi struktur, tetapi merupakan agen yang mampu memproduksi struktur baru, tokoh-tokoh yang mempunyai pandangan jauh ke depan, para tokoh yang mampu melihat peluang-peluang yang ada, dan berani memanfaatkan peluang-peluang itu dalam rangka mempertahankan eksistensi negara proklamasi. Soekarno-Hatta melihat konteks ekonomi domestik cenderung lemah dan melihat konteks politik ekonomi internasional ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mempertahankan eksistensi negara proklamasi, maka meletakkan strategi dasar tentang penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB.

Namun, tidak berapa lama negara RI berdiri, pemerintah Belanda ingin menghancurkan negara RI. Hal itu dapat diketahui dibuktikan dengan berdirinya pemerintahan sementara Hindia Belanda yang berada di Samarinda diberi nama Netherland Indie Civil Administration (NICA) dengan kekuatannya langsung memusuhi Republik Indonesia.

Di lain pihak bangsa Indonesia yang telah berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945 berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Hal itu ditegaskan dalam *Atlantic Charter*. Bangsa Indonesia merasa berhak atas kemerdekaan bangsanya. Oleh karena itu seluruh bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta bertekad akan mempertahankan eksistensi negara proklamasi, apabila ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri, termasuk dari pihak Belanda dengan NICA-nya.

⁵⁴⁾ Koesnodiprodjo, *Himpunan . . .*, halaman 113

Pemerintah Belanda ingin menguasai seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda. Menurutny hal itu berdasarkan pasal 1 Grondwet Belanda yang menyatakan, "Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grongebied van, Nederland, Nederland-Indie, Suriname en Curaçao. Oleh karena itu pemerintah Belanda tidak mengakui keberadaan negara RI dan akan menghancurkannya dengan kekuatan militer. Maka persengketaan Indonesia-Belanda tidak dapat dielakkan. Pemerintah Belanda dalam menangani persengketaan itu menggunakan strategi perang, sedangkan Indonesia menggunakan strategi perundingan. Strategi perundingan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Sebagaimana dijelaskan pada Bab I bahwa pasca Perang Dunia II telah terbentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah ada rambu-rambu hukum internasional yang tersirat di dalam pasal-pasal Piagam PBB, yang harus ditaati bangsa-bangsa didunia agar tercapai Perdamaian Dunia.

Akan tetapi di sisi lain, pasca Perang Dunia II terjadi perang dingin antara Heartland pimpinan Uni Soviet versus Rimland pimpinan Amerika Serikat dan Inggris.

Di dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda, Soekarno-Hatta menetapkan strategi dasar, melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB atau melalui diplomasi didunia internasional.

Di dalam operasionalnya, Soekarno-Hatta memanfaatkan peluang-peluang yang ada di negara-negara Rimland, utamanya Amerika Serikat dan Inggris. Mengapa demikian? Pada waktu itu Amerika Serikat dan Inggris mempunyai pengaruh yang besar di dalam DK PBB. Selain itu, Amerika Serikat sangat dominan terhadap Kerajaan Belanda. Situasi keuangan Kerajaan Belanda pasca Perang Dunia II sangat lemah, sehingga sangat membutuhkan bantuan keuangan dari Amerika Serikat.

Maksud Soekarno-Hatta memanfaatkan kedua negara Besar (negara Rimland) itu, agar mendesak Belanda untuk bersedia berunding dengan Soekarno-Hatta. Selain itu menggunakan pengaruhnya di DK PBB dan diharapkan agar DK PBB bersedia membantu menangani penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda bertindak sebagai wasit, dan

tujuan akhir agar DK PBB mendesak Pemerintah Belanda untuk bersedia mengakui kedaulatan negara Indonesia.

Soekarno-Hatta mengupayakan semua itu dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Proklamasi, negara Republik Indonesia. Upaya mempertahankan eksistensi negara proklamasi belum tuntas selama Pemerintah Belanda belum mengakui kedaulatan negara Indonesia. Sebab pengakuan demikian terkandung arti, Belanda bersedia mengubah isi pasal 1 grondwet Belanda yang semula berbunyi: *Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van, Nederland, Nederland-Indie (Indonesia), Suriname en Curaçao*, menjadi berbunyi: *Het koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Suriname en Curaçao*.

Sebagaimana dijelaskan di muka, Belanda semula tetap berpegang teguh pada *status quo antebellum*, (keadaan Indonesia pada sebelum perang keadaan sebelum Jepang menyerbu Indonesia pada Maret 1942). Dengan demikian, Belanda berpegang teguh bahwa seluruh Indonesia adalah wilayah Kerajaan Belanda berdasarkan pasal 1 grondwet.

Untuk menyelamatkan eksistensi negara Proklamasi perlu mengupayakan dengan segala cara agar Belanda bersedia mengakui kedaulatan negara Indonesia, yang berarti melepaskan ikatan Indonesia dengan pasal 1 grondwet. Upaya demikian ini tidak mungkin berhasil hanya dengan mengandalkan kekuatan militer saja, tetapi harus pula mengandalkan kekuatan diplomasi.⁵⁵⁾ Oleh karena itu Soekarno-Hatta di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda dengan pengawasan DK PBB. Mula-mula Belanda tidak bersedia berunding dengan Soekarno-Hatta. Belanda memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, menuduh negara RI adalah negara fasis. Berdasarkan hal itulah Belanda tidak bersedia berunding dengan Soekarno-Hatta. Hal ini merupakan hambatan strategi Soekarno-Hatta. Oleh karena itu Soekarno-Hatta bermaksud mengubah isi pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 itu. Untuk itu diambil kebijakan dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, yaitu dengan mengubah bentuk Pemerintah RI menjadi Demokrasi Parleментар Multi Partai sistem.

⁵⁵⁾ Lampiran I. *Hasil Penelitian Studi Dokumen* (angka 1) . . . , halaman 17

Setelah bentuk Pemerintah berubah, tuduhan Belanda tidak relevan lagi. Di sisi lain, AFNEI dan Amerika Serikat terus mendesak Belanda untuk bersedia berunding dengan RI maka terjadilah perundingan Indonesia-Belanda Linggarjati.

Amerika Serikat dan Inggris menghendaki agar Indonesia tetap di bawah pengaruh negara-negara Rimland. Hal itu berguna untuk menjaga agar Indonesia tidak dipengaruhi oleh Heartland (komunisme).

Jadi, kemunculan Maklumat No. X karena keinginan Soekarno-Hatta untuk mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, dan untuk membuka kemungkinan mengadakan perundingan dengan Belanda. Selain itu juga mencari pengakuan dari dunia internasional utamanya PBB dan dari Pemerintah Belanda.

Berkaitan dengan permasalahan b dalam penelitian ini, yakni “latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh macam apa yang memprakarsai dan yang berperan di dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden RI no. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan Perjanjian Linggarjati?”

Peneliti ingin mengemukakan bahwa tokoh-tokoh yang memprakarsai dan berperan di dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden No. X kaitannya dengan Perjanjian Linggarjati itu bukanlah tokoh-tokoh yang sembarangan. Tetapi merupakan tokoh yang berwawasan jauh kedepan. Tokoh-tokoh yang mampu melihat peluang-peluang yang ada, dan berani bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan mulia dengan memanfaatkan peluang-peluang itu. Tokoh-tokoh seperti itu bukan sekedar aktor yang hanya mampu mereproduksi struktur atau tokoh yang hanya mampu mengulangi perbuatan-perbuatan yang biasa diperbuat oleh orang-orang sebelumnya, atau tokoh yang rajin mengikuti norma-norma yang sudah ada di dalam masyarakat, akan tetapi adalah agen yang mampu memproduksi struktur baru atau tokoh yang mampu menciptakan norma-norma baru atau ide-ide yang baru bagi masa depan bangsanya. Hal ini perlu dikaji, sebab memprakarsai proses penetapan Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan perjanjian Linggarjati itu tidak lepas dari latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh termaksud. Lagi pula memprakarsai penetapan Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan perjanjian Linggarjati waktu itu bukan merupakan tindakan-tindakan yang populer, karena

pelaksanaan dari dua hal itu mendapat perlawanan dari berbagai pihak di dalam masyarakat waktu itu. Tentang penandatanganan persetujuan Linggarjati itu saja, ditentang oleh Badan Perwakilan Rakyat Indonesia di dalam hal ini KNIP. Tetapi pemrakarsa tetap berupaya agar persetujuan Linggarjati diterima, dan upaya itu berhasil. Akhirnya KNIP sebagai badan perwakilan rakyat waktu itu menerima persetujuan Linggarjati dan menyetujui maksud pemerintah RI waktu itu untuk meneruskan perundingan dengan Belanda.

Untuk menyakinkan kebenaran ungkapan di atas peneliti mengkaji latar belakang tokoh-tokoh Soekarno, Hatta dan Sjahrir.

SOEKARNO

Sewaktu di HBS (*Holland Burger School*) di Surabaya Soekarno sudah sering membaca buku-buku dari tokoh-tokoh politik dunia. Jadi secara mental Soekarno sudah bergaul dengan Tahunomas Jefferson dengan *Declaration Independence*-nya, dengan Gladstone dari Britania, Sidney dan Beatrix Webb dari Inggris, dengan Mazzini dan Cavour dari Italia, dengan Auto Bouer dari Austria, dengan Karl Marx, Fredrich Engels, Lenin dari Rusia, dengan Jean Jacques Rousseau dari Perancis dan dengan yang lainnya.

Waktu menjadi mahasiswa di Bandung, Soekarno sudah aktif di bidang politik. Pada tahun 1922 ada rapat "Radical Concentration" di lapangan terbuka di Bandung. Soekarno hadir sebagai perorangan, kemudian minta untuk berpidato dan diijinkan. Dalam mimbar itu Soekarno menyatakan "untuk apa kita berkumpul di sini kalau hanya, membuat petisi, mohon ini, mohon itu kepada pemerintah?. Itu namanyakan politik berlutut. Ayo, kita berhenti berpolitik mengemis, Ayo kita berteriak "Tuan-Tuan Imperialis inilah yang kami tuntutan". Sampai di sini Soekarno ditarik oleh Heyne kepala polisi Belanda dan rapat dibubarkan.⁵⁶⁾ Soekarno dipanggil Profesor Klopper, Presiden Universitas T.H. Bandung, mendapat peringatan. Tahun 1925 Soekarno lulus bergelar Ir. pada bulan Desember 1928

⁵⁶⁾ Cindy Adams, *Soekarno an autobiography as told to Cindy Adams*. Penerbit the Bobbs Merrill Company Inc. New York 1965. Alih Bahasa oleh Mayor Abdul Bar Salim, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta, tahun 1966, halaman 32.

Soekarno mempersatukan partai-partai yang berhaluan kebangsaan yakni PPPKI. Bulan Desember 1928 dirapat PNI di Madiun Soekarno mengatakan “semenjak dunia berkembang kita mengetahui bahwa, “hanya dalam persatuanlah ada kekuatan”, marilah kita bersatu di dalam PPPKI yang mempunyai tujuan pokok “menggulingkan” pemerintah kolonial”, stop-stop! Kepala polisi Madiun membubarkan rapat dan menarik Soekarno ke belakang mimbar.

Pada tanggal 28 Desember 1929 Soekarno berpidato dirapat PNI di Solo, menyatakan “Imperialis, perhatikanlah! apabila dalam tempo yang tidak lama lagi timbul perang Pasifik yang menggeledek, dan menyambar-nyambar, membelah angkasa, apabila tidak lama lagi, samudra Pasifik menjadi merah oleh darah, dan bumi sekelilingnya menggelegar ledakan bom dan dinamit, maka disaat itulah rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka.⁵⁷⁾ Selesai rapat Soekarno istirahat di rumah Soejoedi di Yogyakarta, pagi-pagi jam 5.00 ditangkap oleh polisi Belanda. Kemudian dibawa ke Bandung dimasukkan rumah tahanan Bantjeuj. Kemudian, setelah diadili, dimasukkan rumah tahanan Sukamiskin.

Pada tahun 1932 Soekarno dibuang ke Ende, pada bulan Pebruari 1938 dipindah ke Bengkulu, pada tahun 1942 Soekarno menenteramkan rakyat di sana. Di mana-mana Soekarno disukai oleh rakyat. Beberapa hari kemudian Soekarno didatangi Sakaguci opsir tentara Jepang, memberitahukan bahwa Fujiyama Komandan tentara Jepang di Bukit Tinggi ingin bertemu dengan Soekarno.

Soekarno mengadakan pertemuan dengan Fujiyama di Bukit Tinggi.⁵⁸⁾ Pertemuan ini sangat penting, dan tidak banyak diketahui orang; suatu pertemuan yang menentukan strategi Soekarno selanjutnya selama peperangan. Fujiyama mengajak bekerja sama dengan Soekarno. Soekarno mau kerja sama tetapi dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Fujiyama setuju. Selanjutnya Soekarno menyatakan: “dapatkah tuan menjamin, bahwa selama saya

⁵⁷⁾ *Cindy Adams, Soekarno an autobiography as told to Cindy Adams* halaman 123 .

⁵⁸⁾ *Cindy Adams, Soekarno an autobiography as told to Cindy Adams* halaman 215.

bekerja untuk kepentingan tuan, saya juga diberikan kebebasan bekerja untuk rakyat saya, dengan pengertian bahwa perjuangan saya terakhir adalah membebaskan rakyat dari kekuasaan Belanda . . . maupun . . . kekuasaan Jepang?" Demikian Soekarno memberi kata-kata kunci.

Fujiyama: "Kami jamin, pemerintah tidak akan menghalang-halangi tuan".

Di Jakarta Jendral Imamura, mengajak para pimpinan Indonesia untuk membentuk pemerintah sipil, tetapi semua pimpinan menyatakan; "Kami tidak akan duduk dalam badan apapun tanpa Bung Karno".

Untuk keperluan itu Soekarno dipindah ke Jakarta. Bertemu dengan Hatta dan Sjahrir. Beliau bertiga menentukan strategi perjuangan selama pendudukan Jepang. Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Jepang sedangkan Sjahrir memimpin pergerakan di bawah tanah. Ketiganya saling tukar informasi. Dalam jaman Jepang Soekarno memprakarsai mengusulkan kepada Jepang agar dibentuknya pasukan PETA (Pembela Tanah Air), usul ini disetujui. Maksud Soekarno PETA akan dijadikan salah satu unsur Tentara Nasional Indonesia dikemudian hari.

Demikianlah latar belakang pribadi Soekarno semenjak usia muda hati Soekarno selalu ada dorongan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia, di dalam situasi apapun jeleknya bagi dirinya Soekarno dapat menghimpun seluruh rakyat digerakkan untuk melawan penjajahan.

HATTA

Hatta adalah pejuang kemerdekaan Indonesia sejak usia muda. Pada tahun 1930'an Hatta bersama-sama Sjahrir adalah anggota PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Pada waktu Soekarno ditahan di Sukamiskin dan PNI dibubarkan oleh Belanda, Hatta membentuk PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) dikenal juga PNI (pendidikan). Hatta dan Sjahrir dibuang ke Tanah Merah (Irian), kemudian dipindah ke Banda Neira. Waktu itu Soekarno di Ende. Sewaktu Soekarno pindah ke Jakarta atas permintaan Imamura, Hatta bekerja bersama-sama dengan Soekarno dan Sjahrir di dalam menentukan strategi untuk menghadapi jaman pendudukan Jepang. Pada

masa Kemerdekaan Hatta menjabat Wakil Presiden RI. Dalam bulan Oktober-November 1945 Hatta merupakan tokoh sentral dalam upaya mengubah bentuk pemerintahan RI menjadi demokrasi parlementer menganut multi partai sistem. Hattalah yang menetapkan Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 yang sangat penting itu. Hal itu juga atas persetujuan Soekarno. Pada tanggal 1-11-1945 Hatta menetapkan Maklumat Politik tanggal 1-11-1945. Yang menyusun Maklumat tanggal 1-11-1945 ini adalah Soekarno.⁵⁹⁾

SJAHRIR

Sjahrir adalah tokoh pejuang kemerdekaan semenjak usia muda. Pada tahun 1930'an bersama-sama Hatta dan Soekarno adalah anggota PPPKI. Sjahrir dibuang ke Tanah Merah, kemudian dipindah ke Banda. Pada jaman Jepang Sjahrir memimpin gerakan di bawah tanah atas persetujuan Soekarno-Hatta. Antara Oktober, November, Desember 1945 Sjahrir merupakan tokoh penting yang menangani perundingan dengan Belanda waktu itu.

Hasil kajian di atas menyakinkan peneliti, bahwa tokoh-tokoh Soekarno, Hatta dan Sjahrir yang memprakarsai dan berperan di dalam proses penetapan maklumat Wakil Presiden RI no. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan Perjanjian Linggarjati itu ternyata bukan tokoh-tokoh yang sembarangan. Tokoh-tokoh Soekarno, Hatta dan Sjahrir mempunyai wawasan jauh ke depan utamanya Soekarno-Hatta mampu melihat peluang-peluang yang ada dan berani bertindak untuk mencapai tujuan yang mulia yakni terwujudnya Indonesia merdeka, dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada itu. Tokoh yang mampu memproduksi struktur baru, yang mampu menciptakan norma-norma baru dan ide-ide baru bagi masa depan bangsa Indonesia. Sebagai contohnya: strategi dasar Soekarno-Hatta di dalam mempertahankan eksistensi negara proklamasi berhasil gemilang, kemerdekaan itu membahagiakan bangsa Indonesia sampai sekarang, Soekarno memberi norma-norma baru yakni Pancasila dan UUD 1945 yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia sampai sekarang, Sjahrir berhasil memelopori pelaksanaan perundingan Linggarjati bersama

⁵⁹⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Dr. H. Roeslan Abdoelgani tanggal 15-1-1996 ... halaman 77

Soekarno-Hatta, yang menghasilkan persetujuan Linggarjati yang merupakan modal awal pencapaian pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda. Tokoh-tokoh macam itulah yang memprakarsai dan berperan di dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan perjanjian Linggarjati. Inilah sekedar pengantar Bab II, uraian secara detail mengenai hal ini akan dibahas di dalam subbab di bawah ini:

Konteks politik-ekonomi domestik yang mendorong ditetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945.

Konteks politik-ekonomi internasional yang mendorong ditetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945.

Latar belakang pribadi para mengenai pengalaman politik tokoh pemrakarsa dan yang berperan dalam proses ditetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan perjanjian Linggarjati.

Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945.

Kaitan antara konteks ekonomi-politik, peran para tokoh dan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945.

Konteks Ekonomi-Politik Domestik yang mendorong ditetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945

Untuk mengetahui konteks ekonomi-politik domestik hubungannya dengan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 perlu disajikan sekilas sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dimulai pada tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo. Inti perjuangan kemerdekaan itu bisa dibaca di dalam alinea ke-2 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat

sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia". Dari kalimat itu dapat dimengerti bahwa keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka melepaskan diri dari imperialisme Belanda telah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya. Sejarah Indonesia telah mencatat pahlawan-pahlawan pejuang yang gugur, seperti Sultan Agung Anjroko Koesoema, Imam Bondjol, Pangeran Diponegoro, Pattimura, Hasannuddin, dan masih banyak lagi. Ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia berkeinginan keras untuk merdeka. Sampai pecah perang dunia II cita-cita mulia itu belum berhasil. Pada jaman Jepang perjuangan kemerdekaan Indonesia terus diupayakan oleh para pemimpin Indonesia utamanya Soekarno-Hatta, walaupun caranya agak berbeda dengan perjuangan pada jaman Belanda.

Pada 7 Desember 1941 Jepang menyerbu Pearl Harbor Honolulu. Pada tahun 1942 Jepang menyerbu Tiongkok, Indo China, Malaya, Singapura, Indonesia, terus kepulauan Pasifik. Pada 8 Maret 1942 tentara Belanda di Indonesia di bawah pimpinan Jendral ter Poorten menyerah kepada Komandan tentara Jepang, tentara Belanda lari ke Australia. Tanggal 9 Maret 1942 (2602) *Gubernur Jendral "Tjarda van Starkenborg"* menyerahkan segala kekuasaan Hindia Belanda kepada tentara Jepang.

Sistem pemerintahan pada jaman Jepang adalah militerisme, fascistis. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 dan 4 UU No. 1 tanggal 7 Maret 2602 (1942) dan UU No. 3 tanggal 20 Maret 1942 (2602). Kedua UU ini ditetapkan oleh Pemerintah Militer Jepang.⁶⁰⁾

- *Pasal 2 UU Nomor 1/2602 (1942):*

Pembesar bala tentara Nippon memegang kekuasaan militer yang tertinggi juga kekuasaan yang dulu pada Gubernur Jendral.

- *Pasal 4 UU Nomor 1/2602 (1942):*

Pemerintah militer Nippon menghormati kedudukan, kekuasaan pegawai "yang setia" kepada Jepang begitu pula "jiwa", "harta benda" dan "agamanya".

Ketentuan ini mengandung arti bagi yang tidak setia, waktu itu orang bisa dibunuh sesukanya oleh Jepang.

⁶⁰⁾ *De Jong*, (Arifin Bey, Dr.), tahun 1947 halaman 7.

- UU No. 3 tanggal 20 Maret 1942 (2602):

“Melarang segala macam pembicaraan, perbincangan, pergerakan, propaganda-propaganda, anjuran-anjuran, perihal peraturan serta susunan negara buat sementara waktu”.

Ketentuan ini mengandung arti bahwa semua pergerakan politik dilarang. Pemerintah militer Jepang ternyata sangat kejam, barang siapa diduga olehnya, bahwa orang-orang itu tidak setia pada Jepang, mereka dibunuh dengan kejam. Itulah sebabnya para pimpinan pergerakan Indonesia, Soekarno-Hatta dan lain-lainnya, mereka mengambil kebijaksanaan bekerja sama dengan Jepang, sebab kalau tidak demikian, pasti mereka dibunuh, dan kalau terjadi demikian siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia, di dalam meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, di dalam situasi yang kritis itu.

Pada tahun 1943, 1944 Jepang menderita kekalahan di dalam perang Asia Pasifik. Maka dari itu pada tanggal 7-9-1944 (2604) Perdana Menteri Kaiso mengeluarkan janji, yang dibacakan oleh Saikoosikikan di Jakarta, “*bahwa Tho Hindo*” (Indonesia) akan dimerdekakan manakala kemenangan akhir sudah tercapai. Pada tanggal 8-9-1944 (2604), bendera Merah Putih boleh berkibar di sebelah kiri bendera Hinomaru, Indonesia Raya boleh dinyanyikan.⁶¹⁾

Pada tahun 2605 (1945) kekalahan Jepang sudah bisa dipastikan. Maka dari itu pada tanggal 29 April 1945 pada hari “*Tentyoo-Setzu*” (hari lahir Raja Jepang), pemerintah Jepang mengulangi janjinya bahwa Indonesia akan dimerdekakan, dinyatakan dalam maklumat Gunseikan No. 25 tahun 1945.⁶²⁾ Janji pemberian kemerdekaan sekarang ini, tidak ada kata-kata “*Kalau kemenangan akhir telah tercapai*”, seperti janji tahun 1944 (2604).

Sebagai tindak lanjut dari janji ini dibentuklah suatu badan kenegaraan dengan nama “*Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*” (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

⁶¹⁾ *Kan Po* (Majalah Pemerintah Jepang waktu itu). Penerbit Zendenbu (Kalau sekarang Departemen Penerangan), tahun 1944 no. 51.

⁶²⁾ *Kan Po*, . . . , tahun 1945 (2605) no. 66.

Indonesia) dan “Dokuritzu Zyunbi linkai” (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI).

Dokuritzu Zyubi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini disingkat “Badan Penyelidik”.⁶³⁾ Badan ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian kantor dan bagian persidangan. Sebagai kepala kantor (Kyokutyoo) adalah R. Pandji Soeroso. Sebagai sekretaris (Sikyo) adalah Mr.AG. Pringgodigdo. Ketua persidangan (Kaityoo) adalah dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat (mantan anggota volks-raad), wakil ketua (Huku Kaityoo) adalah R. Pandji Soeroso.

Anggota Badan Penyelidik ini berjumlah 61 orang. Badan penyelidik ini bersidang dua kali, yakni yang pertama tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945, kedua tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang pertama tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945. Pada sidang pertama tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan kepada sidang, apa yang menjadi dasar dari negara yang akan didirikan itu. Sebelum mendirikan suatu negara baru, Badan Penyelidik harus mufakat dahulu apa yang menjadi dasar negara itu. Kalau sudah mufakat bulat, barulah didirikan negara Indonesia merdeka di atas dasar yang sudah disepakati itu. Soekarno mengadakan usul ini memenuhi permintaan Ketua Badan Penyelidik; Soekarno mengusulkan dasar negara itu terdiri dari 5 (lima) prinsip, yang oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Usul Soekarno ini kemudian dibahas di dalam sidang Badan Penyelidik, dan Badan Penyelidik menerima usul tentang dasar negara dari Soekarno itu secara aklamasi. Keputusan sidang pertama yang penting ialah:

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara, dibentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta Wakil Ketua dan beberapa anggota. Tugas Panitia Kecil ini mengumpulkan usul-usul dari masyarakat tentang soal-soal kenegaraan yang nantinya disampaikan kepada sidang kedua Badan Penyelidik.

Kegiatan Panitia Kecil, pada tanggal 22 Juni 1945 mengadakan sidang di Jakarta, dengan golongan agama, golongan nasionalis dan tokoh-tokoh masyarakat se-Indonesia.

⁶²⁾ *Kan Po*, . . ., tahun 1945 (2605) no. 66.

Sidang yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta ini membahas soal Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, yakni meletakkan dasar, mengapa bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan, apa tujuannya, apa tugas pemerintah Indonesia, bagaimana sikap negara dan bangsa Indonesia terhadap dunia internasional, dan apa dasar negara Indonesia itu. Selesai sidang, dibentuk panitia perumus, yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Anggota panitia perumus itu 9 (sembilan) orang, maka disebut pula "*Panitia Sembilan*". Panitia Sembilan bersidang merumuskan usul-usul dari sidang yang lalu. Hasil rumusan Panitia Sembilan itu berupa "*Piagam Jakarta*", disebut pula "*Jakarta Charter*". Di dalam Piagam Jakarta, dasar negara adalah Pancasila yang dihalusi susunannya, sehingga berbunyi seperti di Pembukaan UUD 1945 yang sekarang itu. Pancasila diusulkan oleh Soekarno, dihaluskan oleh Panitia Sembilan pimpinan Soekarno. Walaupun kata-katanya dihalusi tetapi sama sekali tidak mengubah isinya. Piagam Jakarta ini nantinya menjadi Pembukaan UUD 1945. Sidang kedua Badan Penyelidik tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945.

Di dalam sidang kedua ini, Susunan Panitia Kecil disempurnakan seperti di bawah ini:

Sub Panitia Kecil, Hukum Dasar, Ketua Ir. Soekarno, anggota Prof. Dr. Soepomo dan Moch. Yamin.

Sub Panitia Kecil, Ekonomi, Ketua Drs. Moch. Hatta

Sub Panitia Kecil, Pertahanan, Ketua Abdul Kadir bekas PETA Jawa Barat.

Sub Panitia Kecil Hukum dasar inilah yang merumuskan draft UUD 1945. Yang menyusun draft UUD 1945 adalah Ir. Soekarno, Prof. Dr. Soepomo dan Moch. Yamin, diperkirakan bahwa peran Prof. Dr. Soepomo dan Moch. Yamin adalah di bidang Hukum, sedang mengenai substansi UUD, yang paling berperan adalah Soekarno. Pada tanggal 13-7-1945 Sub panitia kecil Hukum Dasar ini sudah melaporkan kepada sidang Badan Penyelidik mengenai draft rancangan UUD itu. Draft ini berisikan pasal 1 sampai 37, pasal I, II, III, IV Aturan Peralihan UUD dan pasal Aturan Tambahan UUD 45. Dalam sidang berikutnya ada usul agar draft rancangan UUD ini diberi "*pembukaan*" Piagam Jakarta. Pada tanggal 16 Juli 1945 Badan Penyelidik menetapkan rancangan UUD 1945, yang terdiri dari Pembukaan UUD yakni Piagam Jakarta, Batang Tubuh, pasal

1 - 37 dan pasal I, II, III, IV Aturan Peralihan beserta Aturan Tambahan UUD 1945.

Dokuritzu zyunbi iinkai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini disingkat PPKI). Pada pertengahan dan akhir bulan Juli 1945 keadaan Jepang benar-benar kritis. Jepang sudah tidak mampu melawan serang tentara Sekutu. Kekalahan Jepang sudah dapat dipastikan. Pemerintah Jepang menginstruksikan kepada Panglima Perang untuk Asia Tenggara, (Nanpoo Gunsei Saikoosikikan) di Saigon supaya selekasnya mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 (2605) Nanpoo Gunsei Saikoosikikan Jendral Terauci, memberi pengumuman yang isinya menyetujui berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritzu Zyunbi Iinkai).⁶⁴⁾ Kemudian pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Moch. Hatta dan KRT Radjiman Widjodiningrat diundang oleh Jendral Terauci ke Saigon. Sepulang dari Saigon, Soekarno, membawa 3 (tiga) cap.

Cap pertama : Soekarno Ketua PPKI

Cap kedua : Moch. Hatta Wakil Ketua PPKI

Cap ketiga : KRT Radjiman Widjodiningrat anggota, ditambah 18 orang lainnya.

Jadi anggota PPKI (Dokuritzu Zyunbi Iinkai) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Menurut rencana Jepang, Indonesia akan dimerdekan tanggal 24 Agustus 1945. Namun sebelum tanggal 24 Agustus 1945, Jepang di bom atom oleh Sekutu, (Amerika Serikat). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu (*the United Nations*). Pemerintah Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Garis komando dari Jepang, Saigon, Indonesia putus karenanya. Nanpoo Gunsei Saikoosikan di Saigon sudah tidak bisa berbuat apa-apa, demikian juga Panglima Militer Jepang di Jawa (Saikoosikikan) sudah tidak ada semangat berperang dan persoalan PPKI (Dokuritzu Zyunbi Iinkai) oleh Saikookikan diserahkan kepada Soekarno mengenai penanganannya lebih lanjut.

⁶⁴⁾ *Kan Po* . . . , No. 72 tahun 1945 halaman 11.

Proses Lahirnya Kemerdekaan Indonesia

Susunan kekuasaan pada jaman Jepang adalah sebagai berikut: kekuasaan tertinggi dipegang Jendral Togo, Panglima perang di Tokyo Jepang, mengatas namakan Raja Jepang. Di bawahnya adalah Nanpoo-gunsei-Saikoosikikan Jendral Terauci di Saigon, (Panglima Militer Asia Tenggara), Jendral Terauci membawahi Panglima militer untuk Sumatra di Bukit Tinggi, Panglima militer Indonesia Timur di Makasar (Ujung Pandang) dan Panglima militer untuk Jawa-Madura adalah Saikoosikikan di Jakarta.

Ketiga wilayah ini masing-masing diperintah langsung oleh Jendral Terauci dari Saigon, (menganut sistem *autarchie*). Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 15-8-1945 garis komando dari Jepang putus karenanya. Jepang sudah menyerah, Nanpoo-gunsei-Saikoosikikan Jendral Terauci tidak mempunyai kekuasaan *power* lagi, demikian pula Saikoosikikan di Jakarta, tidak ada *power* lagi. Walaupun persenjataan mereka masih kuat, tetapi tidak ada semangat untuk berperang.

Komandan tentara Sekutu yang akan bertugas ke Indonesia untuk mengurus tentara Jepang di Indonesia belum datang. Semula direncanakan tentara Amerika Serikat yang di Australia di bawah pimpinan Douglas MacArtahunur akan bertugas menangani militer Jepang di Indonesia, sudah barang tentu tentara Belanda memboncengnya dalam upaya mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Tetapi karena pada 8 Agustus 1945, tentara Uni Soviet menyerbu Korea dan hendak menduduki Jepang, maka tentara Amerika Serikat membatalkan rencananya ke Indonesia, dan menyerahkan penanganan Jepang di Indonesia kepada Inggris, kepada Jendral Mountbatten yang waktu itu ada di India. Sudah barang tentu Mountbatten tidak dapat segera mengirim tentara ke Indonesia, untuk keperluan ini diperlukan persiapan yang cukup lama. Mountbatten adalah Komandan SEAC (*South East Asia Command*) yakni tentara Inggris yang bertugas di wilayah Asia Selatan. Sedangkan Amerika Serikat rencana semula bertugas di Indonesia dan Filipina. Kemudian Amerika Serikat membatalkannya dan bergerak ke Korea bertemu dengan tentara Uni Soviet di Panmunjom. Untuk menangani tentara Jepang di Indonesia Mountbatten membentuk satuan militer di bawah SEAC yakni *Allied Force for Netherland East Indie* (AFNEI) tetapi terlambat datang di Indonesia.

Di Indonesia terjadi *vacuum of power*. Tentara Jepang di Indonesia sudah tidak mempunyai semangat berperang, tidak bisa berbuat apa-apa. Tentara sekutu belum sampai di Indonesia. Terjadilah *vacuum of power* di Indonesia. Menghadapi situasi demikian para pemimpin Indonesia utamanya Soekarno Hatta, bertindak cepat dan tepat. Dengan memanfaatkan peluang dalam ketentuan The Atlantic Charter prinsip ke-3 dan article 1 ayat 2 Piagam PBB,⁶⁵⁾ dan ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 (09.30 WIB) Soekarno-Hatta mengatasnamakan seluruh bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Negara baru itu berbentuk Republik Kesatuan. Hal ini sesuai dengan rancangan UUD 1945 yang dirumuskan di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 16-7-1945, yang rancangan UUD itu, dalam sidang PPKI tanggal 18-8-1945 ditetapkan sebagai UUD Negara RI.⁶⁶⁾

Persepsi Bangsa Indonesia terhadap Peristiwa Penyerahan Jepang Kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945

Bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta, menghadapi peristiwa penyerahan Jepang kepada Sekutu (*the United Nations*) pada tanggal 15 Agustus 1945 mempunyai persepsi seperti di bawah ini:

Pada tanggal 8 Maret 1942 (2602) Jendral ter Poorten pimpinan militer Belanda di Indonesia telah menyerah kepada Jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942 (2602) Gubernur Jendral (*Gouverneur Generaal*) Tjarda van Starckenborg telah menyerahkan seluruh wilayah Indonesia kepada pimpinan tentara Jepang di Kalijati dekat Cirebon. Dengan demikian menurut pandangan bangsa Indonesia, sejak tanggal 9 Maret 1942 (2602) itu Belanda tidak berhak lagi untuk menguasai wilayah Indonesia sebagai tanah jajahan. *Historis-recht* Kerajaan Belanda atas Indonesia telah hilang, telah hapus. Belanda telah menyerahkan bangsa Indonesia kepada fasisme Jepang tanpa perlindungan sedikitpun. Bangsa Indonesia

⁶⁵⁾ Telders, *United Nation Textbook* . . ., halaman 11.

⁶⁶⁾ Koesnodiprodo, *Himpunan* . . ., halaman 113.

jatuh ketangan Jepang yang sangat kejam, Belanda lari ke Australia tanpa melindungi Bangsa Indonesia. Menurut versi Bangsa Indonesia, mulai tanggal 15 Agustus 1945 di Indonesia telah terjadi situasi kekosongan kekuasaan, telah terjadi *vacuum of power*. Tentara Sekutu yang bakal melucuti dan memulangkan tentara Jepang, waktu itu belum datang di Indonesia. Jepang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi, Bangsa Indonesia yang mencita-citakan kemerdekaan berpuluh-puluh tahun lamanya, dengan memanfaatkan *vacuum of power* dan memanfaatkan pula prinsip III Atlantic Charter, berhak untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu Bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian sejak tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak ada satu kekuasaan negara asing manapun diakui oleh bangsa Indonesia. Juga Kekuasaan Belanda tidak lagi diakui oleh Bangsa Indonesia. Sejak hari itu 17-8-1945 Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang merdeka, berdiri sejajar dengan Bangsa-bangsa di seluruh Dunia. Sejak hari itu (17-8-1945) seluruh bangsa Indonesia, bersatu padu di bawah pimpinan Soekarno-Hatta siap mempertahankan Negara Proklamasi, menghadapi apabila ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Demikian pula kalau Belanda bermaksud menguasai Indonesia lagi, pasti dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Persepsi Pemerintah dan Bangsa Belanda terhadap Indonesia kaitannya dengan Penyerahan Jepang Kepada Sekutu tanggal 15-8-1945

Pada waktu Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 itu, pemerintah Hindia Belanda berada dalam pengasingan di Australia. Melalui van Mook dan van der Plas pemerintah Hindia Belanda yang di Australia itu menyatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta di Indonesia tidak sah. Menurut Belanda pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Pemerintah Hindia Belanda, masih eksis, walaupun waktu itu berkedudukan di Australia. pemerintah Hindia Belanda di dalam pengasingan itu menyatakan bahwa Belanda tidak pernah menyerahkan Indonesia kepada Jepang, sewaktu Jepang mendarat di Jawa pada bulan Maret 1942. Waktu itu pemerintah Hindia Belanda ke Australia. Semenjak Maret 1942 sampai 15 Agustus 1945 pemerintah Hindia

Belanda masih ada, hanya saja berkedudukan di Australia. Menurutnya setelah Jepang menyerah kepada tentara Sekutu tanggal 15 Agustus 1945, kedudukan Hindia Belanda kembali seperti keadaan sebelum Jepang menyerang Pulau Jawa tanggal 9 Maret 1942. Dengan kata lain, pemerintah Hindia Belanda selalu berpegang prinsip *status quo antebellum*. Pada tanggal 15-8-1945 itu pemerintah Hindia Belanda eksis atas wilayah Indonesia. Indonesia adalah wilayah Kerajaan Belanda berdasarkan Artikel 1 Grondwet yang menyatakan, Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederland Indie (Indonesia), Suriname en Curaçao. Dengan demikian sesudah tanggal 15-8-1945 itu, seluruh Indonesia adalah wilayah kerajaan Belanda. Pemerintahnya masih ada, yakni pemerintah Hindia Belanda yang di Australia. Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan di wilayah Hindia Belanda itu tidak sah. Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Belanda akan segera bertindak untuk mempertahankan wilayah Kerajaan Belanda dengan menghancurkan negara Proklamasi negara RI itu. Bila perlu dengan kekuatan militer, (demikian persepsi Belanda atas Indonesia).

Memperhatikan perbedaan persepsi antara Indonesia-Belanda, mengenai status Indonesia sesudah penyerahan Jepang kepada Sekutu, maka pasti terjadi persengketaan Indonesia-Belanda.

Bangsa Indonesia sejak proklamasi tanggal 17-8-1945 tidak lagi mengakui kekuasaan asing manapun atas Indonesia, termasuk tidak mengakui kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia. Pemerintah serta Bangsa Indonesia bertekad bulat akan mempertahankan eksistensi Negara Proklamasi, Negara Republik Indonesia, manakala ada gangguan baik gangguan itu dari dalam maupun dari luar negeri. Seluruh Rakyat Indonesia bersedia mengorbankan apa saja guna keselamatan Negara Proklamasi, negara Republik Indonesia.

Di sisi lain pemerintah Belanda juga merasa berhak atas Indonesia, karena berdasarkan Artikel 1 Grondwet Belanda, wilayah Indonesia adalah wilayah kerajaan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda masih ada, walaupun waktu itu berada di Australia. Pemerintah Belanda bertekad akan mempertahankan wilayah Kerajaan Belanda yakni Indonesia. Bila perlu dengan kekuatan militer. Pemerintah Belanda tidak mengakui keberadaan negara

Proklamasi, Republik Indonesia dan bertekad akan menghancurkan Negara RI melalui kekuatan militer.

Dengan sikap kedua Bangsa yang antagonistis itu, menyebabkan, persengketaan Indonesia-Belanda tidak bisa dielakkan. Pasti terjadi persengketaan antara kedua Bangsa itu. Memang di dalam kenyataannya, semenjak Negara RI diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 langsung berhadapan dengan musuh. Yakni pemerintah Belanda yang bermaksud melanjutkan menjajah Indonesia. Pertanyaan yang timbul, bagaimana cara penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda itu?

Penyelesaian Persengketaan Indonesia-Belanda menurut Pemerintah Belanda. Pada dasarnya pemerintah Belanda berkeinginan tetap menjajah Indonesia, untuk itu Belanda memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Misalnya memanfaatkan sikap anti fasisme, seperti sikap negara-negara Barat waktu itu, mengembangkan sistem demokrasi. Memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD dan Penetapan PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Belanda melancarkan propaganda di dunia internasional, bahwa pada pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 terdapat adanya sentralisasi kekuasaan negara ditangan Presiden, juga dengan Ketetapan PPKI tanggal 22-8-1945, Presiden Soekarno membentuk *satu* partai, jelas bahwa Negara RI adalah negara fasis. (menurut Belanda), maka oleh karena itu Belanda tidak mau mengakui keberadaan Negara RI. Belanda merasa mempunyai tugas untuk menghancurkan fasisme di wilayah Kerajaan Belanda. Yakni adanya negara RI. Makna dari sikap Belanda terhadap keberadaan negara RI yang demikian itu, bahwa Belanda ingin mengembalikan tanah jajahannya, yakni Indonesia.

Menurut strategi Belanda, penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui kekuatan militer. Belanda juga memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, yakni prinsip *domestic jurisdiction*, Belanda menyatakan di dunia internasional bahwa persoalan Indonesia-Belanda adalah persoalan dalam negeri Kerajaan Belanda, persoalan Indonesia termasuk *domestic jurisdiction* Kerajaan Belanda, DK PBB tidak perlu mencampurinya.

Penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda menurut Pemerintah Republik Indonesia. Para pemimpin Indonesia utamanya Soekarno-Hatta melihat konteks ekonomi-politik domestik cenderung lemah. Bangsa Indonesia dijajah Belanda dalam waktu lama.

Dan baru saja dijajah oleh Jepang, kehidupan bangsa Indonesia waktu itu relatif dalam tingkat yang rendah. Pendidikan masih sangat kurang, kepandaian berperang masih sangat kurang, persenjataan militer masih sangat lemah. Di sisi lain Soekarno-Hatta melihat adanya peluang di dunia Internasional, yakni adanya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang bisa dimanfaatkan di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda. Oleh karena itu Soekarno-Hatta meletakkan strategi dasar di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu, melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Akan tetapi upaya berunding ini ada hambatan, sebab Belanda memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, melihat adanya sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden, menuduh Negara RI adalah fasis. Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, tidak mau berunding dengan Republik Indonesia. Belanda tetap menggunakan strategi militer di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu.

Di dalam menghadapi hambatan itu Soekarno-Hatta memanfaatkan kekuatan Inggris dan Amerika Serikat pimpinan negara-negara Rimland, Indonesia termasuk lingkup negara Rimland waktu itu. Kebetulan sekali tentara Sekutu yang menangani tentara Jepang di Indonesia, AFNEI adalah tentara Inggris. Orang-orang Inggris tidak kenal bentuk pemerintahan Indonesia yang waktu itu menganut demokrasi presidential. Di Indonesia tidak ada Perdana Menteri seperti di Inggris. Orang-orang Inggris menduga bahwa bentuk Pemerintahan Indonesia ini bentukan Jepang.⁶⁷⁾ Sutan Sjahrir, tokoh non kolaborator dengan Jepang. Sjahrir mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Inggris dan juga orang-orang Belanda. Sjahrir didesak oleh orang-orang Inggris agar bentuk pemerintahan Indonesia diubah, supaya ada Perdana Menteri seperti Inggris. Atas desakan itu Sjahrir mengadakan "petisi" di KNIP yang ditandatangani oleh 50 (lima puluh) anggota KNIP, mendesak agar sebelum MPR, DPR dibentuk berdasarkan UUD 1945, maka KNIP diberi kedudukan legislatif. Dan waktu itu Sjahrir juga ingin menjadi Perdana Menteri. Di sisi lain Soekarno-Hatta memang menghendaki akan mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yang selalu dimanfaatkan oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara fasis. Maka

⁶⁷⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan DR. H. Roeslan Abdoelgani . . ., halaman 67.

dari itu untuk memungkinkan bisa membuka perundingan dengan Belanda, Soekarno-Hatta menghendaki akan mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 itu. Waktu membicarakan “petisi” dari KNIP, Hatta yang diminta oleh Soekarno untuk memimpin sidang. Sidang KNIP diselenggarakan tanggal 16 Oktober 1945 untuk membahas petisi Sjahrir. Di dalam sidang itu Hatta langsung menyetujui petisi termaksud, dengan mengambil kebijakan, menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Yakni, sebelum dibentuk MPR dan DPR, maka Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberi kekuasaan legislatif dan turut serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kebijakan yang diambil oleh Soekarno-Hatta, mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu didorong oleh keinginan Soekarno-Hatta untuk bisa membuka kemungkinan untuk berunding dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Soekarno-Hatta mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 itu untuk kepentingan yang lebih besar lagi bagi keselamatan Negara dan Bangsa Indonesia waktu itu. Yakni untuk membuka jalan dimungkinkannya bisa mengadakan perundingan dengan Belanda, dalam rangka mempertahankan keberadaan, eksistensi Negara Proklamasi Negara Republik Indonesia. Keinginan Sutan Sjahrir untuk menjadi Perdana Menteri dikabulkan oleh Soekarno-Hatta. Pada tanggal 14-11-1945 Pemerintah RI diganti menjadi sistem demokrasi parlementair menganut multi partai sistem. Sjahrir menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia.

Maksud Soekarno-Hatta, Perdana Menteri Sjahrir itu nantinya bakal ditugasi melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Karena Sjahrir non-kolaborator dan mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Inggris dan juga orang-orang Belanda.

Dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dan tiga Maklumat politik pelaksanaannya maka berubahlah bentuk Pemerintahan RI menjadi sistem demokrasi parlementair dengan multi-partai sistem. Dengan demikian, tuduhan Belanda bahwa negara RI adalah fasis, menjadi tidak relevan lagi.

Di sisi lain Inggris dan Amerika Serikat terus mendesak Belanda agar berunding dengan Indonesia. Dengan mengetahui sekilas sejarah perjuangan bangsa Indonesia seperti

diuraikan di atas, dapatlah dijawab permasalahan a di atas, yakni konteks politik domestik dan internasional macam apa yang mendorong kemunculan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945? Ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 karena didorong oleh keinginan Soekarno-Hatta sebagai Pemimpin rakyat Indonesia dan sebagai Presiden Republik Indonesia, agar terbuka kemungkinan untuk berunding dengan Belanda, upaya ini dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Proklamasi.

Setelah pemerintah RI dirubah menjadi demokrasi parlementair, multi partai sistem, tuduhan Belanda tidak relevan. Kemudian Belanda terpaksa menuruti desakan Inggris dan Amerika Serikat untuk berunding dengan pihak Indonesia. Terjadilah perundingan antara Indonesia dengan Belanda, yakni perundingan Linggarjati, yang menghasilkan persetujuan Linggarjati.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Proklamasi. Setelah bentuk pemerintah RI diubah menjadi bentuk pemerintahan demokrasi parlementair dengan menganut multi partai sistem, maka tuduhan Belanda tidak relevan. Pada akhirnya Pemerintah Belanda terpaksa menuruti desakan Inggris dan Amerika Serikat untuk berunding dengan pihak Indonesia. Terjadilah perundingan Indonesia-Belanda, yakni perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati.

**Konteks Politik-Ekonomi Internasional
yang mendorong ditetapkannya
Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945**

Soekarno-Hatta dalam melaksanakan diplomasi didunia internasional waktu itu, di bawah pengaruh perang dingin. Amerika Serikat dan Inggris sebagai pimpinan negara Rimland mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam DK PBB, maka dari itu Soekarno-Hatta waktu itu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di negara-negara Rimland, memanfaatkan kekuatan Inggris dan Amerika Serikat.

Agar mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai Perang Dingin ini perlu diuraikan peristiwa-peristiwa penting di Dunia ini pasca Perang Dunia II seperti di bawah ini:

Berakhirnya Perang Dunia II dan terjadinya Perang Dingin

Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah berakhir Perang Dunia II. Upaya mempertahankan eksistensi negara RI antara tahun 1945-1947 sangat dipengaruhi oleh perang dingin. Maka dari itu perlu dibahas sekilas mengenai hal tersebut. Kiranya perlu dicatat bahwa dunia ini mengalami tiga kali perang besar (*General War*). General War pertama adalah perang antara Koalisi negara-negara Eropa melawan Napoleon Bonaparte, peperangan ini diakhiri di dalam Winner Congress 1815. General War kedua adalah Perang Dunia I yakni perang antara The Principal Allied Powers bersama The Associated Power melawan Central Powers. Termasuk The Principal Allied Powers ialah, Inggris, Perancis, Italia, dan Jepang, sedangkan Associated Power adalah Amerika Serikat, sedangkan Central Powers ialah Jerman, Austria, Hongaria, Bulgaria dan Turki. The Principal Allied Powers dan Associated Power merupakan aliansi negara-negara kapitalis, persatuan itu sangat kompak, karena yang beralliansi adalah negara-negara kapitalis, mempunyai sistem politik yang sama. General War ketiga adalah Perang Dunia II. Ini adalah perang antara Tripartite Pact melawan The United Nations atau sekutu. Termasuk Tripartite Pact ialah Jerman, Italia dan Jepang, negara-negara ini lazim disebut negara fasis. Termasuk negara-negara The United Nations atau sekutu adalah negara-negara selain Tripartite Pact, utamanya, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis, Belanda dan lain-lain. Berbeda dengan aliansi dalam Perang Dunia I yang terdiri atas negara-negara kapitalis maka sekutu pada Perang Dunia II ini terdiri dari negara-negara kapitalis dan negara komunis, sehingga aliansi, sekutu ini, adalah suatu persekutuan yang tidak kompak, suatu aliansi semu atau quasi-alliansi. Persatuan demikian inilah yang menyebabkan

terjadinya Perang Dingin seusai Perang Dunia II.⁶⁸⁾ Sebab pokok timbulnya Perang Dunia II adalah karena adanya beberapa negara kapitalis yang tidak cukup ruang gerak, seperti Jerman dan Italia. Kedua negara kapitalis ini, dikelilingi oleh negara-negara kapitalis raksasa, Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, sehingga tidak mempunyai ruang gerak yang cukup. Untuk mencari tanah jajahan ke Afrika dan Timur Tengah, tidak mungkin, karena daerah-daerah ini sudah dikuasai oleh Perancis, Inggris, Belgia dan negara Barat yang lain. Utamanya Jerman, sehabis kalah di dalam Perang Dunia I sangat menderita. Di dalam situasi demikian Adolf Hitler tampil ke depan mencoba memberi diagnosa penyakit bangsa Jerman yang sangat parah ini. Menurut Hitler tujuan mencapai Jerman Raya itu bisa dicapai, bangsa Jerman adalah bangsa Aria yang di dalamnya terkandung “Das Deutsche Urkraft” tapi Deutsche Urkraft itu sekarang sedang dibelenggu kekuasaan asing, adanya bangsa Yahudi yang mengotori ras Aria, Perjanjian Perancis (Versailles) tahun 1919, perjanjian Locarno 1925, adanya komunisme di Jerman. Maka dari itu Jerman harus melepaskan diri dari belenggu itu.⁶⁹⁾ Pada tahun 1923 Hitler mengubah nama partai yang ia dirikan pada tahun 1919, Deutsche Partai Arbeiter menjadi “*National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei*” (NSDP). Pada tahun 1932 NSDP menang dalam Pemilu untuk memilih Reichstag (DPR). Tahun 1933. Presiden Hindenburg mengangkat Hitler menjadi Reichskanzler (Perdana Menteri). Setelah Hindenburg meninggal, Hitler mengangkat dirinya menjadi Führer atau pemimpin bangsa Jerman.

Hitler dalam tempo singkat dapat membangun negara Jerman yang kuat. Bangsa Jerman adalah bangsa yang besar tapi hidup dalam ruang yang sempit (negara Jerman). Bangsa Jerman memerlukan ruang hidup “*lebens-raum*”, guna kebesaran bangsa Jerman. Jerman ingin mengadakan ekspansi ke negara-negara sekitar Jerman (demikian Hitler).

⁶⁸⁾ Blaisdell Donald C., *International Organization*. Penerbit: The Ronald Press Company, New York 1966, halaman 8.

(during his service with the Department of State, Blaisdell associated with the planning and organization the United Nations. Principal officer of the U.S. delegation to U.N. General Assembly)

⁶⁹⁾ Soebantardjo, *Sari Sejarah se-Dunia*. Penerbit: Bopkri, 1954, Yogyakarta, halaman 180.

Pada tahun 1938 Jerman menyerang Austria dan kemudian didudukinya.⁷⁰⁾ Langkah kedua, Jerman menuntut agar Sudeten wilayah Cechoslovakia yang berpenduduk bangsa Jerman dimasukkan wilayah Jerman. Tindakan ini sangat berbahaya, karena kemerdekaan Czechoslovakia dijamin oleh Inggris dan Perancis. Menyerang Czechoslovakia, berarti perang melawan Inggris dan Perancis. Di dalam “de vrede van Munchen” 29 September 1938 di mana Inggris diwakili oleh Neville Chamberlain, Perancis oleh Daladier, Italia oleh Benito Mussolini, ditetapkan bahwa Sudeten diberikan kepada Jerman asal Jerman berjanji tidak akan menuntut yang lain lagi.

Chamberlain bangga, sesampainya di London menyatakan, Inggris berhasil menggalang perdamaian dunia. Tapi pada tahun 1939 seluruh Czechoslovakia diduduki Jerman, Hitler menuntut Danzig dan Polandia agar dimasukkan Jerman. Maka Perang Dunia II pecah pada tahun 1939.

*Lahirnya The Atlantic Charter dan Proses berdirinya
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
(The United Nations Organization)*

Dengan meletusnya Perang Dunia II tahun 1939 maka masyarakat Dunia menjadi sadar, bahwa cita-cita umat manusia untuk hidup dengan damai, terancam kehancuran.

Dalam situasi yang demikian itu pada 14 Agustus 1941 Presiden Amerika Serikat Roosevelt dan Perdana Menteri Churchill atas nama pemerintah Inggris mengadakan pertemuan. Keduanya menyatakan bahwa merupakan hak dari tiap-tiap bangsa dan tiap-tiap negara untuk mendapatkan suasana yang lebih baik, mengenai keadaan dunia pada masa yang akan datang. Untuk mencapai cita-cita luhur itu keduanya mengadakan suatu perjanjian internasional dengan menyetujui prinsip-prinsip dasar, the General Principle, yang terkenal dengan “The Principle of Atlantic Charter”. Atlantic Charter ini terdiri dari delapan prinsip, yang terpenting ialah:

⁷⁰⁾ Commissaris Aug. C.J., *Beknopt Leerboek der algemene Geschiedenis* twede deel bladzij 290. Penerbit: L.C.G. Malmberg-'S-Hertogenbosch, 1948.

- First : Their countries seek no aggrandizement, territorial or other.
- Second : They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.
- Their : They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign right and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them.

Ketiga prinsip inilah yang sangat penting bagi perkembangan dunia masa mendatang. Di antara ketiganya yang paling penting adalah prinsip ke III di mana prinsip ini menjadi dasar yang fundamental dan merupakan peluang bagi bangsa-bangsa seluruh dunia di dalam upaya menegakkan kemerdekaan negara mereka. Principle right of self-determination ini nantinya merupakan peluang bagi negara-negara jajahan yang memperjuangkan kemerdekaan, seperti halnya bangsa Indonesia.⁷¹⁾

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1942 di Washington DC diadakan Konferensi Internasional, yang menghasilkan suatu perjanjian internasional terkenal dengan nama Declaration by United Nations, 1 Januari 1942. Para peserta konferensi internasional itu sebelum menandatangani Declaration by United Nations itu, terlebih dahulu mengakui dan menyetujui The Atlantic Charter yang terdiri dari 8 (delapan) prinsip itu. Dengan demikian prinsip-prinsip Atlantic Charter telah menjwai ketentuan-ketentuan Declaration by United Nations itu. Persetujuan ini ditandatangani oleh 26 negara, utamanya Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, China dan lain-lain negara. Sampai dengan tanggal 1 Maret 1945 sudah 47 negara yang menjadi peserta daripada Declaration by United Nations ini. Negara-negara inilah yang nantinya mengadakan konferensi internasional di San Fransisco dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nations Organization.⁷²⁾

Konferensi Internasional berikutnya diadakan di Moscow dihadiri oleh wakil-wakil, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan China. Di dalam konferensi ini dihasilkan suatu perjanjian terkenal dengan nama: Moscow Declaration on General Security tanggal 30 Oktober 1943. Isi pokok dari declaration itu adalah, dengan menjunjung tinggi isi

⁷¹⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . ., halaman 11.

⁷²⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . ., halaman 12.

dari pada Declaration by United Nation tanggal 1 Januari 1942 maka para peserta menghendaki perlunya dibentuk suatu organisasi Internasional dalam tempo singkat. Perjanjian ini ditandatangani oleh Molotov dari USSR, Antahunony Eden dari Inggris, Cordell Hull dari Amerika Serikat dan Foo Ping Sheung dari China.⁷³⁾

Konferensi Internasional berikutnya diadakan di Teheran pada 1 Desember 1943, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet. Konferensi ini menghasilkan suatu perjanjian internasional terkenal dengan nama Teheran Declaration 1 Desember 1943. Isi pokok dari Teheran Declaration ini, bahwa para peserta secara bersama-sama antara negara besar dan negara kecil, akan mengadakan survei mengenai masa depan dunia ini, masa depan keluarga dunia yang demokratis ini, (*Our World Family Democratic Nattons*).⁷⁴⁾

Pembicaraan secara teknis mengenai rencana pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa diselenggarakan di dalam informal conversation terkenal dengan nama Dumbarton Oaks Proposal. Dumbarton Oaks Conference ini, tanggal 21 Agustus 1944 sampai dengan 28 September 1944 adalah pembicaraan antara wakil-wakil dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Antara tanggal 29 September 1944 sampai tanggal 7 Oktober 1944 wakil-wakil dari China, Inggris, Amerika Serikat. Para wakil ini menyetujui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa "The International Organization." Juga disepakati bahwa pembentukan PBB direncanakan di San Fransisco dalam bulan April 1945. Pada tanggal 11 Februari 1945 diadakan konferensi internasional berikutnya di Yalta, yang menghasilkan Yalta Conference 11 Februari 1945. Yalta Conference ini diikuti oleh negara-negara yang menghadiri informal Conversation di Dumbarton Oaks, yakni wakil-wakil Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan China. Isi Pokok dari Yalta Conference, bahwa negara-negara peserta sepakat untuk mendirikan organisasi Internasional (*General International Organization*), guna menjamin perdamaian dan keamanan dunia. Juga para peserta

⁷³⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . . , halaman 13.

⁷⁴⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . . , halaman 14.

menyetujui akan diadakan konferensi internasional di San Francisco tanggal 25 April 1945 di dalam rangka membentuk PBB (*General International Organization*).

Negara-negara yang akan diundang di dalam konferensi internasional San Fransisco itu adalah negara-negara yang telah masuk menjadi peserta Declaration by United Nations, sampai tanggal 28 Februari 1945.⁷⁵⁾ Juga disepakati, bahwa di dalam San Fransisco Conference nanti, delegasi Inggris dan Amerika Serikat akan menyetujui gagasan bahwa Uni Soviet dimasukkan dalam Original Members dari pada PBB, (*World Organization*) tersebut. Di sini dapat dilihat, masuknya peran penting Uni Soviet di dalam percaturan politik internasional dikemudian hari.

Di dalam Yalta Conference juga disetujui bahwa 5 (lima) Negara Original Members dari world Organization itu, yakni Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan China dan Prancis akan menduduki anggota tetap dari pada Dewan Keamanan PBB. Juga disepakati apabila membicarakan masalah negara perwalian (*Trusteeship*), maka kelima negara itu akan berkonsultasi yang satu dengan yang lain. Masuknya Uni Soviet dalam anggota tetap Dewan Keamanan ini, dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan bagi PBB di dalam menjaga perdamaian dunia, karena keputusan Dewan Keamanan PBB selalu di veto oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet.

Konferensi internasional berikutnya adalah konferensi San Fransisco tanggal 25 April 1945 sampai tanggal 26 Juni 1945. Peserta San Francisco Conference sebanyak 50 negara, yakni negara-negara yang menjadi peserta dari Declaration by United Nations sampai 26 Juni 1945 itu. Keputusan penting San Francisco Conference adalah ditetapkannya Piagam PBB (*the Charter of United Nations*).

Keputusan San Francisco Conference yang penting adalah:

the Charter United Nations Organization.

the Statute of world court

the Agreement establishing the preparatory commission of the United Nations.⁷⁶⁾

Pada tanggal 26 Juni 1945 Piagam PBB ditandatangani oleh para peserta

⁷⁵⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . . , halaman 15.

⁷⁶⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . . , halaman 17.

konferensi. Sedangkan Piagam PBB (*Charter of United Nations*) mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945. Berdirilah sebuah organisasi dunia yang berwenang memelihara perdamaian dan keamanan dunia dengan nama Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations Organization*). Badan dunia ini didirikan guna menjamin keamanan dan perdamaian dunia. Untuk mendorong terlaksananya keamanan dan perdamaian dunia, dan bagaimana negara-negara anggota PBB itu berbuat, agar tidak mengganggu perdamaian dunia, maka ditetapkanlah norma-norma pokok, tercantum di dalam Piagam PBB atau Charter of United Nations, diantaranya yang penting adalah:

article 1 ayat 2

To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal Right and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace. (pasal ini berasal dari principe ke III dari Atlantic Charter)

article 2 ayat 3

All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice are not endangered.

article 2 ayat 4

All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nations.

article 2 ayat 7

Nothing contained in the present charter, shall outorize the United Nations to intervence in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII, (article 39).⁷⁷⁾

article 39

⁷⁷⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . ., halaman 23.

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with articles 41 and 42 to maintain or restore international peace and security.⁷⁸⁾

Inilah rambu-rambu di dalam hukum internasional yang seharusnya diperhatikan oleh semua negara di dunia sesuai Perang Dunia II.

Para pemimpin Indonesia sewaktu menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda tahun 1945-1949 selalu mentaati rambu-rambu tersebut di atas, dan akhirnya berhasil mempertahankan eksistensi negara RI di dalam waktu yang relatif singkat dan efisien.

Terjadinya Perang Dingin

Untuk mengetahui apa perang dingin itu dan bagaimana terjadinya perlu diketahui beberapa teori komunisme dari beberapa tokoh seperti di bawah ini:

Strategi perjuangan komunisme menurut Trotsky.

Menurut Trotsky musuh Komunisme adalah Kapitalisme. Trotsky menyatakan: "Musuh Komunisme Rusia adalah Kapitalisme, tetapi bukan hanya Kapitalisme yang ada di Rusia, melainkan Kapitalisme internasional, kita telah berhasil mengadakan revolusi di Rusia, tetapi kita tidak mungkin bisa mendirikan masyarakat sosialis komunis di Rusia yang sempurna kalau kita tidak pula menumbangkan Kapitalisme di lain-lain negara". Maka dari itu revolusi yang diadakan di Rusia, yang telah berhasil mendirikan Negara Uni Soviet ini harus diteruskan di negara-negara lain, diadakan revolusi internasional. Upaya menumbangkan sistem Kapitalisme bukanlah revolusi sehari, dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun tetapi revolusi itu dilakukan terus-menerus. Revolusi menumbangkan Kapitalisme adalah revolusi yang permanen, "permanente revolutive".

⁷⁸⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . ., halaman 101.

Demikian ajaran Trotsky.⁷⁹⁾

Teori Stalin tentang strategi perjuangan Komunisme

Menurut Stalin, “Kalau *permanente revolutie* itu dilaksanakan, tidak akan bisa mencapai masyarakat sosialisme Komunisme dalam jangka waktu beberapa generasi. Adalah sebaiknya mula-mula disusun benteng proletariat. Benteng itu sudah di tangan kita ialah negara Uni Soviet. Sekarang ini pergunakanlah Uni Soviet ini sebagai benteng, sebagai citadel perjuangan kaum proletar sedunia. Berpangkal dari citadel ini kita akan menyusun masyarakat Sosialis Komunis sedunia. Tetapi perkuatlah lebih dulu benteng ini, tidak perlu memikirkan revolusi di negara lain. Agar menjadi benteng yang kuat, bangunlah Uni Soviet ini sehebat-hebatnya”.⁸⁰⁾

Strategi perjuangan komunisme di Dunia Internasional dalam Perang Dunia II. Cita-cita perjuangan komunisme yang akan menumbangkan sistem kapitalisme seluruh dunia itu bukanlah cita-cita yang kosong. Uni Soviet ternyata meneruskan strategi perjuangan mereka sewaktu terjadi perang dunia II tahun 1939 - 1945. Pada perang dunia II antara negara-negara komunis bertemu taktis dengan negara-negara kapitalis, keduanya mempunyai musuh yang sama ialah The Tripartite Pact, Jerman, Italia dan Jepang. Waktu itu antara negara komunis dan negara-negara kapitalis mengadakan persekutuan atau mengadakan aliansi. Tetapi karena yang beralliansi adalah antara negara-negara kapitalis dan negara komunis, maka aliansi itu bersifat semu, merupakan quasi-alliansi. Tindakan operasional mengenai strategi Uni Soviet dimulai sejak adanya Declaration by United Nations 1 Januari 1942, Moscow Declaration 30-10-1943, Teheran Declaration 1-12-1943, Dumbarton Oaks Conference bulan Agustus-September 1944, Yalta Conference 11-2-1945, San Francisco Conference April-Juni 1945, yang nantinya diteruskan di dalam Dewan Keamanan PBB.⁸¹⁾

⁷⁹⁾ Soekarno, *Pancasila sebagai Dasar Negara*, Penerbit: Departemen Penerangan RI, tahun 1959, halaman 30.

⁸⁰⁾ Soekarno, *Pancasila sebagai Dasar Negara*, Penerbit: Departemen Penerangan RI, tahun 1959, halaman 72

Di dalam Yalta Conference atas usaha Uni Soviet, disepakati oleh delegasi Amerika Serikat dan Inggris suatu gagasan bahwa Uni Soviet akan dimasukkan dalam original membership dari pada PBB (World Organization) yang akan dibentuk. Juga akan duduk pada anggota tetap DK PBB. Hal ini merupakan embrio perang dingin. Juga sewaktu membicarakan masalah territorial *trusteeship*, (atas usaha keras dari Uni Soviet), disepakati pula, bahwa di dalam membicarakan masalah *trusteeship* semua negara Big Five (Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Perancis) harus dilibatkan. Usaha Uni Soviet lebih lanjut, bahwa yang termasuk negara *trusteeship* antara lain, adalah negara yang waktu itu masih terpecah-pecah. Yang dimaksud Uni Soviet adalah Polandia. Negara ini waktu itu masih terpecah, ada negara Polandia tapi sebagian wilayahnya masih dikuasai Jerman, negara demikian adalah *trusteeship*, harus dibicarakan oleh Big Five, dan ternyata walaupun Polandia tidak ikut San Francisco Conference negara ini dijadikan original member dari PBB. Maksudnya agar Polandia menjadi negara yang kuat dan dipengaruhi oleh Uni Soviet, untuk dijadikan bumper di dalam menghadapi negara Barat, negara kapitalis.

Kalau diamati jalannya perang, juga sangat kelihatan upaya Uni Soviet mempersiapkan diri, manakala di kemudian hari ada perang antara negara komunis dan negara kapitalis. Sewaktu Jerman sudah mendekati kalah perang, Jendral Zhukov mengadakan long-march, sampai ke Berlin dan Polandia, di front selatan sampai negara-negara Balkan. Sayang tentara-tentara negara Barat yang dipimpin oleh Jendral Eisenhower agak terlambat masuk Eropa.

Maksud Uni Soviet akan menerobos masuk Eropa sampai Polandia. Di front selatan sampai negara Balkan, Rumania, Bulgaria dan lain-lain negara. Maksudnya pasca perang, Uni Soviet sudah bisa mempengaruhi negara-negara Eropa Timur, perlunya kalau terjadi perang antara negara kapitalis dan negara Uni Soviet di kemudian hari perang itu terjadi di luar Uni Soviet yakni di Eropa Timur. Juga di front Pasifik, begitu Jepang sudah dipastikan kalah, maka pada tanggal 8-8-1945 Uni Soviet memproklamasikan perang dengan Korea dan akan terus memasuki Jepang. Sehingga tentara Amerika Serikat yang

⁸¹⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . . , halaman 15.

waktu itu di Australia, yang mula-mula direncanakan menangan tentara Jepang di Indonesia dan Philipina, terpaksa long-march menuju Korea, dan menyerahkan masalah Indonesia kepada Jendral Mountbatten yang di India. Sedangkan tentara Amerika Serikat bertemu dengan tentara Uni Soviet di Panmunjom, Korea, sampai sekarang Korea terbagi dua bagian, Utara dan Selatan. Upaya Uni Soviet menerobos ke Korea itu dengan maksud agar besuk kalau terjadi perang antara Blok Barat dan Uni Soviet, dimaksudkan Uni Soviet sudah berada di pantai Timur Asia, bisa langsung berhadapan dengan Amerika Serikat. Pasca perang dunia II Uni Soviet mempengaruhi negara-negara Eropa Timur, Korea Utara, dan Vietnam Utara. Juga mempengaruhi Eropa Timur membujur ke Timur sampai Korea Utara, menguasai jantung Benua Eropa dan Benua Asia. Secara geopolitik Uni Soviet menguasai Heartland. Uni Soviet sebagai pimpinan negara komunis dunia tidak pernah melepaskan strategi perjuangan komunisme yang ingin menghancurkan sistem kapitalisme di dunia ini. Pasca perang dunia II, Uni Soviet berpangkal dari Heartland ingin mengkomuniskan negara-negara di dunia.

Negara-negara kapitalis di bawah pimpinan Amerika Serikat begitu selesai perang dunia II menghimpun negara-negara pantai, Rimland, guna memobilisir negara-negara itu untuk membendung gerakan komunis itu. Yang dijaga paling dahulu adalah Selat Dardanella, sebab kalau Uni Soviet bisa masuk selat Dardanella ke Laut Tengah akan segera memasuki Afrika, Arab dan negara-negara Timur Tengah. Oleh Blok Barat orang-orang Yahudi dipulangkan ke Israel. Blok Barat sudah memperhitungkan bahwa bangsa Arab, Mesir dan negara-negara Arab yang lain, pasti menentanginya, di dalam situasi demikian, negara-negara Barat ada alasan untuk campur tangan di Timur Tengah. Meletuslah persengketaan Timur Tengah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Tujuan pokok dari negara-negara Barat kecuali menjaga Selat Dardanella, juga ingin memperoleh manfaat minyak bumi, agar mendapatkan fasilitas memperoleh minyak bumi yang mereka perlukan. Di dalam menghadapi situasi demikian Uni Soviet mengadakan persekutuan dengan negara-negara Eropa Timur, Polandia, Jerman Timur, Rumania, Czechoslovakia, Bulgaria, dalam bentuk aliansi pertahanan bersama yang terkenal dengan nama negara-negara "Pacta Warsawa", sebagai benteng negara komunis di dalam menghadapi negara-negara Barat.

Negara-negara Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat berbuat sama, yakni membentuk aliansi yang lebih besar terkenal dengan nama Persekutuan Negara-negara Atlantik, (NATO). Negara Turki dan Yunani diupayakan masuk NATO karena kedua negara ini sebagai penjaga pertahanan terdepan menghadapi Selat Dardanella.

Akhirnya berhadapan kekuatan raksasa Uni Soviet dengan Pacta Warsawnya dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis dengan NATO-nya, maka terjadilah perang dingin mulai tahun 1946 sampai dengan tahun 1990-an.

Di dalam mempertahankan eksistensi negara Proklamasi Pemerintah RI memanfaatkan Peluang yang terdapat dalam Perang Dingin

Di dalam upaya penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu para pemimpin Indonesia Soekarno-Hatta mengkaitkannya dengan konteks politik internasional, melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Konteks politik internasional waktu itu diwarnai adanya Perang Dingin. Pertentangan antara negara-negara Heartland terhadap negara-negara Rimland. Kedua kubu itu masing-masing ingin menarik Indonesia dalam pengaruhnya.

Negara Republik Indonesia tahun 1945-1947 itu berada ditengah-tengah lingkup pengaruh Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Perancis di Vietnam. Para pemimpin Indonesia dalam upaya mempertahankan eksistensi negara proklamasi mengkaitkannya dengan negara-negara Rimland, khususnya Inggris dan Amerika Serikat. Inggris (AFNEI) sebagai tentara sekutu menangani tentara Jepang di Indonesia. Tentara sekutu (tentara Inggris) yang bertugas menangani tentara Jepang di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah South East Asia Command (SEAC) pimpinan Louis Mountbatten yang berkedudukan di India. Untuk menangani tentara Jepang di Indonesia, SEAC waktu itu membentuk satuan khusus yakni Allied Forces for Netherland East Indie (AFNEI). AFNEI ini bertanggung jawab kepada SEAC. AFNEI datang di Indonesia 29 September 1945. AFNEI tidak memberi kemudahan-kemudahan bagi Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Kiranya perlu diketahui bahwa berkaitan dengan penyusunan kekuatan Sekutu di wilayah Pasific, pada tahun 1942, oleh Sekutu dibentuk ABCD front, yang bakal

menanggulangi serangan negara-negara fasis, khususnya dari Jepang. A = adalah America, B = adalah British, C = adalah China dan D = adalah Dutch (Belanda).

Tetapi dalam kenyataannya, D ini, yakni tentara Belanda, sewaktu Jepang mendarat di Jawa, tidak mampu melawan, mereka terus lari ke Australia, tanpa mengadakan peperangan. Sudah barang tentu reputasinya di mata tentara Inggris menjadi kurang baik. Kebetulan yang menangani tentara Jepang di Indonesia dari negara Rimland, yakni Inggris. Belanda juga termasuk negara Rimland, tetapi karena hal-hal tersebut di atas, SEAC yang bertugas di Indonesia tidak memberi kemudahan-kemudahan kepada Tentara Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Dan secara kebetulan waktu itu Inggris diperintah oleh Partai Buruh, mereka secara tidak langsung bersimpati kepada negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaannya, termasuk Indonesia.

Sewaktu SEAC (AFNEI) mendarat di Indonesia tanggal 29 September 1945, Belanda tidak boleh mendarat di muka, tapi Belanda mendarat setelah SEAC (AFNEI) mendarat dan mengatur sesuatunya lebih dulu. Marinir Belanda yang akan mendarat bulan Nopember 1945, disuruh kembali ke Malaka baru tahun 1946 mereka bisa mendarat di Jakarta.

Waktu itu SEAC (AFNEI) selalu mendesak pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia, untuk berunding menyelesaikan persengketaan mereka. Karena waktu itu pertempuran meluas di semua front. Serangan-serangan tentara Belanda dilawan oleh TKR dan laskar rakyat, bersama rakyat yang bahu-membahu melawan setiap serangan dari Belanda. Waktu itu pemerintah RI, militer (TKR) dan rakyat bersatu padu menghadapi serangan-serangan dari Belanda. Belanda menghadapi kekuasaan "tritunggal" (pemerintah, TKR, dan rakyat), di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Hal ini mengakibatkan wilayah kekuasaan SEAC tidak stabil. SEAC (AFNEI) tidak berhasil melaksanakan perdamaian di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hal demikian dkuatirkan masuknya Komunisme dari Heartland ke wilayah Indonesia, yang akan mengganggu pengaruh negara Barat di Asia Tenggara. Mengganggu stabilitas kawasan Rimland.

Jendral Christison, komandan AFNEI, sewaktu masih di Singapura mengakui

kenyataan de facto Pemerintah RI, malahan menghimbau pembesar-pembesar RI agar membantu AFNEI di dalam menjalankan tugas di Indonesia. SEAC (AFNEI) belum mengakui eksistensi negara RI tapi yang diakui adalah kenyataan de facto kekuasaan pemerintah RI. Para pemimpin di Indonesia memanfaatkan dengan baik peluang ini, dengan sungguh-sungguh membantu AFNEI di dalam menjalankan tugas di Indonesia.

Inggris dan Amerika Serikat terus menerus mendesak Pemerintah Belanda supaya segera menyelesaikan persengketaan mereka melalui perundingan. Belanda mula-mula tidak mau berunding dengan pihak Indonesia, dengan memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menuduh negara RI adalah fasis, dan tidak bersedia berunding dengan negara fasis. Belanda ingin terus menjajah Indonesia. Karena itu Belanda tidak mau mengakui keberadaan negara Proklamasi, tidak bersedia berunding dengan RI, karena dengan berunding sudah mengandung arti, Belanda mengakui eksistensi Negara RI. Inilah sebabnya mula-mula Belanda tidak mau berunding dengan RI. Sikap Belanda yang demikian itu merupakan hambatan terhadap strategi dasar Soekarno-Hatta yang menghendaki untuk berunding dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Pemerintah RI berupaya menghilangkan hambatan perundingan. Para pemimpin Indonesia tetap pada strategi dasar semula, bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda ditempuh dengan jalan perundingan, sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.

Untuk menghilangkan hambatan perundingan tersebut maka pemerintah RI mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan ditetapkannya Maklumat No. X tanggal 16-10-1945, disusul Maklumat Politik tanggal 1-11-1945 tentang sikap bangsa Indonesia kedalam dan keluar negeri, kemudian Maklumat tanggal 3 Nopember 1945 tentang pembentukan partai politik, terakhir dengan pengumuman BPKNIP No. 5 tanggal 11-11-1945 tentang bertanggung-jawabnya para menteri kepada badan perwakilan, dalam hal ini KNIP. Berubahlah bentuk pemerintah RI dari sistem Demokrasi Presidensial menjadi sistem Demokrasi Parlemerter dengan multi partai sistem, bukan lagi negara fasis seperti dituduhkan oleh Belanda.

Bertolak dari Maklumat No.X itu, maka dimungkinkan untuk diadakan perundingan

antara Indonesia-Belanda. Pertanyaan yang timbul, mengapa pemerintah Republik Indonesia menetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 itu, yang hakikatnya bertentangan dengan UUD yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia?

Para pemimpin Indonesia utamanya Soekarno-Hatta berkeyakinan bahwa eksistensi negara RI hanya bisa dipertahankan dalam tempo relatif singkat dan efisien melalui jalan perundingan, melalui diplomasi di dunia internasional utamanya di PBB, yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh rakyat. Inilah rupanya pembelian yang sangat mahal dengan mengorbankan pelaksanaan UUD 1945 agar dapat dibuka kemungkinan mengadakan perundingan dengan Belanda. Para pemimpin Indonesia berkeyakinan bahwa dengan berunding berarti negara baru negara RI itu eksis di dalam masyarakat internasional. Sebaliknya bagi pemerintah Belanda berunding dengan RI berarti Belanda mengakui eksistensi negara RI. Tetapi karena ditekan oleh Inggris, AFNEI, dan Amerika Serikat, negara Rimland, sedangkan apa yang di dituduhkan bahwa negara RI adalah fasis sudah tidak relevan lagi, maka akhirnya pemerintah Belanda terpaksa menuruti tekanan dari negara-negara Rimland, utamanya Inggris dan Amerika Serikat. Belanda menyadari bahwa simpati masyarakat internasional kepada negara RI begitu luas, karena RI melakukan diplomasi sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB.

Belanda khawatir apabila pemerintahnya terus menggunakan strategi peperangan, nantinya kapal-kapal Belanda diboikot di Australia, Amerika, Inggris, dan negara-negara lain, maka pemerintah Belanda akhirnya bersedia menandatangani persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947.

Pemerintah Republik Indonesia memanfaatkan peluang yang berada di negara-negara Rimland, para pemimpin Indonesia waktu itu, ternyata menghitung secara cermat dan tepat, kekuatan mana di antara kedua kekuatan itu yang diambil peluangnya untuk dimanfaatkan agar perjuangan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara RI dapat berhasil dengan baik. Sebab kalau salah memilih akibatnya akan menghambat perkembangan negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya para pemimpin Indonesia berkeinginan agar pemerintah Belanda bersedia mengakui kedaulatan negara Indonesia, yang berarti Belanda bersedia melepaskan Indonesia dari ikatan, artikel 1 Grondwet Belanda.⁸²⁾ Agar usaha

itu berhasil para pemimpin Indonesia memanfaatkan peluang yang ada pada Rimland. Dengan harapan agar Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya terhadap Belanda, untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan Indonesia. Amerika Serikat ingin menarik negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam pengaruh negara-negara Rimland. Menjauhkannya dari pengaruh negara-negara Heartland. Inilah sebabnya para pemimpin Indonesia waktu itu mengkaitkan perjuangan bangsa Indonesia dengan konteks politik internasional dengan memanfaatkan peluang yang ada pada negara-negara Rimland. Dari uraian konteks politik internasional ini dapat diketahui bahwa yang mendorong ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu, adalah keinginan para Pemimpin Indonesia Soekarno-Hatta untuk menghapuskan hambatan perundingan. Dengan maksud untuk memungkinkan terlaksananya strategi Soekarno-Hatta di dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda, melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Strategi demikian itu dalam upaya mempertahankan eksistensi Negara RI waktu itu, juga mengupayakan agar Belanda mengakui Kedaulatan Negara Indonesia.

Selain ditetapkannya Maklumat No. X tgl 16-10-1945 yang menyebabkan Belanda terpaksa bersedia berunding dengan Indonesia adalah konteks ekonomi internasional waktu itu. Di dalam konteks ekonomi internasional terlihat ketergantungan ekonomi Kerajaan Belanda kepada Amerika Serikat. Perekonomian Belanda waktu itu sangat lemah. Kerajaan Belanda diduduki Jerman Pemerintah Belanda terpaksa mengungsi di Inggris. Tanah jajahannya Indonesia diduduki Jepang. Belanda mengharapkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Di dalam menghadapi persengketaan Indonesia-Belanda 1945-1947 tidak cukup dana, Kerajaan Belanda menggantungkannya dari bantuan Amerika Serikat.

Amerika Serikat sebagai pimpinan negara-negara Rimland menghendaki agar situasi Asia Tenggara termasuk Indonesia tetap aman tentram, namun dalam kenyataannya di

⁸²⁾ *De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*, Penerbit: Boekh, vh. Gebr. Belinfante NV, S-Gravenhage 1922, artikel 1, Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het Grondgebied van, Nederland, Nederland-Indie (Indonesia), Suriname en Curacao

Indonesia dilanda pertempuran yang meluas, karena militer dan rakyat Indonesia melawan serangan-serangan dari tentara Belanda. Kekuatan bangsa Indonesia waktu itu adalah adanya rakyat yang bersatu padu di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Rakyat Indonesia bersama militer bertekad secara bersama-sama mempertahankan keberadaan negara Proklamasi di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Para pimpinan Indonesia utamanya Soekarno-Hatta berkeyakinan bahwa eksistensi negara RI dapat ditegakkan melalui diplomasi di dunia internasional yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh rakyat. Kekuatan ini harus dijaga jangan sampai melemah. Hal yang demikian itu dapat diupayakan, manakala penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan secara efisien. Hal demikian ini bisa dicapai manakala penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda ditempuh melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB.

Dengan sikap bangsa Indonesia yang demikian itu Belanda mengalami kesulitan dalam upaya menghancurkan negara RI dalam tempo singkat. Ditambah lagi adanya kesulitan ekonomi kerajaan Belanda yang sangat melemah waktu itu. Amerika Serikat dan Inggris demi terlaksananya ketertiban dan keamanan wilayah Rimland (Asia Tenggara termasuk Indonesia) terus mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Pada akhirnya Belanda terpaksa menuruti desakan itu, dan terjadilah perundingan Indonesia-Belanda Linggarjati yang menghasilkan “Persetujuan Linggarjati”.

***Latar Belakang Pribadi mengenai pengalaman politik
para tokoh pemrakarsa dan yang berperan dalam proses ditetapkannya
Maklumat Wakil Presiden RI No. X kaitannya dengan perjanjian Linggarjati***

Di dalam membahas permasalahan penelitian ini, yakni “latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik para tokoh macam apa yang memprakarsai dan berperan dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tgl 16-10-1945 kaitannya dengan proses Perjanjian Linggarjati”. Peneliti menyajikan data mengenai latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik para tokoh yang memprakarsai dan yang berperan di dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden No. X kaitannya dengan perjanjian

Linggarjati di bawah ini:

Dari pihak Indonesia; Soekarno, Hatta, Sjahrir.

Dari pihak Belanda; Schermerhorn, van Poll, F.X. de Boer dan van Mook.

SOEKARNO

Soekarno lahir tahun 1901, ayahnya seorang guru sekolah dasar. Gajinya kecil. Tinggal di daerah yang melarat, Soekarno lahir di masyarakat yang miskin. Waktu kecil tidak mempunyai sepatu, tidak kenal senduk, tidak kenal garpu sebagai alat makan. Pergaulan waktu kecilnya selalu bersama-sama anak-anak rakyat kecil, pada masyarakat yang melarat itu.

Ayahnya mendidiknya cukup keras, mendidik Soekarno supaya menjadi orang disiplin dan mencintai sesama makhluk hidup. Pada suatu hari Soekarno memanjat pohon, mengambil sarang burung, kemudian dicampakkan ke tanah. Ayahnya datang memarahinya. Soekarno pucat karena ketakutan. Ayahnya mengatakan: "Kalau tidak salah aku sudah mengatakan padamu, supaya menyayangi binatang". Soekarno dengan takut menjawab: "Ya Pak! Engkau dapat menerangkan arti kata "Tat Twam Asi, Tat Twam Asi" yang berarti dia adalah aku dan aku adalah dia". Apakah tidak aku ajarkan kepadamu, bahwa ini mempunyai arti yang penting?". "Ya Pak Tuhan berada di dalam kita semua", jawab Soekarno. "Bukankah kau telah kuajari untuk melindungi makhluk Tuhan? Apa arti burung dan telurnya itu?". "Ya Pak, itu semua ciptaan Tuhan".⁸³⁾

Ayah Soekarno mencita-citakan agar putranya dapat masuk sekolah Belanda, waktu umur 14 tahun Soekarno masuk H.B.S (*Hogere-Burger-School*) di Surabaya. Di Surabaya ikut H.O.S Tjokroaminoto, Pimpinan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Pada tahun 1917 ayah pindah ke Blitar, Soekarno sangat patuh kepada orang tuanya. Sewaktu sekolah di HBS Soekarno gemar membaca buku-buku ilmu politik. Soekarno pandai bahasa Belanda, Inggris, Perancis dan juga Jerman. Pada waktu di HBS, Soekarno sudah bergaul secara mental dengan para tokoh politik di Dunia, seperti Thomas Jefferson yang terkenal

⁸³⁾ Cindy Adams, "Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams" . . . , halaman 32.

dengan Declaration of Independencenya. Suatu Ideologi Politik yang menjadi dasar sistem politik liberalisme kapitalisme di Negara-negara Barat. Di dalam dunia pemikiran Soekarno berinteraksi dengan Gladstone dari Britannia, Sidney dan Beatric Webb yang mendirikan Gerakan Buruh di Inggris, dengan Mazzini, Cavour dan Garibaldi dari Italia. Dengan Otto Bauer, Adler dari Austria. Karl Marx, Fredrich Engles dan Lenin dari Rusia. Juga dengan Jean Jacques Rousseau, Aristide Briand dan Jean Juarez ahli berpidato terbesar di dalam sejarah Perancis. Soekarno membayangkan para pemikir yang sedang marah selagi berpidato dan meneriakkan semboyan-semboyan seperti "*Persetan dengan Penindasan*", "*Hidup Kemerdekaan*". Hati Soekarno terbakar, menyala-nyala. Demikian itulah Soekarno sewaktu membaca buku-buku itu. Kemudian ia masuk kamar, di dalam ruang gelap ia berpidato keras-keras, yang didorong oleh getaran jiwanya. Kadang-kadang didatangi tetangga dikira Soekarno sakit dan berteriak-teriak. Soekarno sejak mudanya tertarik sekali kalau ada pemimpin yang suka berpidato. Sewaktu makan malam bersama keluarga Pak Tjokro, Soekarno mendengarkan pembicaraan keluarga Pak Tjokro mengenai politik. Soekarno tidak digubris karena dianggap masih kanak-kanak. Pak Tjokro menceritakan bahwa "De Vereenigde Oost Indische Compagnie" (VOC) menyedot atau mencuri ± 1.800 Gulden dari Indonesia setiap tahunnya, untuk memberi makan Den Haag. (Negeri Belanda). Soekarno bertanya kepada Pak Tjokro: "Apa yang tinggal di negeri kita?". Jawab Pak Tjokro: "Rakyat tani kita yang mencucurkan keringat mati kelaparan, dengan makan segobang sehari, kita menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli diantara bangsa-bangsa". PSII bekerja untuk memperbaiki hal ini dengan mengajukan mosi-mosi "kepada Pemerintah Belanda".

Soekarno bertanya lagi: "Apakah baik kita membenci orang lain walaupun ia orang Belanda?", jawab Pak Tjokro "Anak ini sangat ingin tahu", lalu dijawab pertanyaan Soekarno, "Kita tidak membenci rakyatnya, tetapi kita membenci sistem pemerintahan kolonial". Soekarno bertanya lagi: "Mengapa nasib rakyat Indonesia tidak berubah, padahal kita sudah berjuang melawan sistem itu bertahun-tahun lamanya?". "Karena Pahlawan-pahlawan Indonesia berjuang secara sendiri-sendiri" jawab Pak Tjokro. Soekarno: "O, mereka kalah karena tidak bersatu ya Pak Tjokro?". Soekarno sejak muda selalu ada

dorongan dalam hatinya, keinginan untuk memerdekakan bangsanya. Pada waktu Soekarno membaca buku mengenai ahli pikir India, Swami Vivekananda yang menyatakan: “Janganlah membikin kepalamu menjadi perpustakaan, tetapi pakailah pengetahuanmu itu untuk diamalkan!” Soekarno sangat tertarik pendapat Swami Vivekananda ini, mulailah menerapkan apa-apa yang dibaca, apa-apa yang didengar. Mulailah Soekarno memperbandingkan dalam pikirannya antara peradaban yang megah dengan keadaan tanah air Indonesia sendiri yang sudah bobrok.⁸⁴⁾

Pada Minggu terakhir bulan Juni 1921, Soekarno memasuki kota Bandung. Soekarno memakai peci hitam yang dianggapnya sebagai lambang kebangsaan Indonesia. Mengapa Soekarno memandang *peci* sebagai lambang kebangsaan Indonesia?, karena sebelum berangkat ke Bandung, Soekarno menghadiri rapat Jong Java di Surabaya. Di sana Soekarno melihat sekelompok intelligentsia Indonesia yang memandang rendah orang-orang Indonesia yang berpakaian sarung dan *blangkon*. Soekarno tidak setuju sikap segolongan intelligentsia Indonesia demikian. Menurut Soekarno mereka itu bodoh. Menurutnya, seseorang tidak akan dapat memimpin rakyat banyak manakala tidak menyatukan dirinya dengan mereka. Soekarno berpendirian akan mempertalikan dirinya dengan sengaja kepada rakyat jelata.

Dalam pertemuan berikutnya Soekarno akan memakai *peci*. Di dalam hati Soekarno mulai berkata-kata: untuk memulai gerakan yang jantan seperti ini memang memerlukan keberanian. Pertemuan berikutnya Soekarno memakai *peci*. Ia berdiri di tempat yang gelap menunggu teman seperjuangannya yang menyebut dirinya intelligentsia Indonesia, berlagak seperti orang-orang kulit putih. Soekarno ragu-ragu, bersoal dalam pikirannya sendiri, bertanya kepada dirinya sendiri, “Jadi pengikutkah engkau”. Hatinya bicara sendiri. “Aku akan jadi pemimpin”. Kalau begitu buktikanlah, hayo maju dengan “peci”mu itu, dan Soekarno pakai *peci* sendirian. Menurut Soekarno janganlah dilupakan demi tujuan kita “*bahwa para pemimpin berasal dari rakyat, bukan berada di atas rakyat*”. *Peci* adalah asli kepunyaan rakyat Indonesia, biasa dipakai pekerja-pekerja bangsa Melayu dan

⁸⁴⁾ Cindy Adams, "Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams" . . . , halaman 55.

lain-lainnya. Maka dari itu Soekarno menganjurkan teman-temannya, "Ayolah saudara-saudara, mari kita angkat kepala kita tinggi-tinggi dan memakai *peci* sebagai lambang kemerdekaan Indonesia". Inilah anjuran Soekarno, sewaktu memasuki *Techniek Hoge School* di Bandung tahun 1921. Soekarno juga berumur 21 tahun waktu itu.

Waktu itu pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan oleh perkembangan nasionalisme Indonesia yang tumbuh dengan pesat. Mulai tahun 1908 dengan semboyan-semboyan politik tanpa kekerasan, waktu itu telah menjadi besar dan mengandung racun ketidakpuasan dengan gigitannya yang mematikan. Para pekerja di organisir, mereka menuntut hak, menuntut jam kerja yang lebih pendek dari pada 18 jam. Menuntut upah yang pantas, dan menuntut untuk bekerja tanpa *exploitation de l'homme par l'homme*. Sudah lahir Persatuan Buruh Gula, Pekerja Rumah Gadai dan lain-lain. Dalam upaya mematikan sifat *radikal* dari para buruh, waktu itu ditetapkan undang-undang baru, terkenal dengan nama artikel 161.⁸⁵⁾ Isi dari artikel 161 itu adalah *melarang pemogokkan*. Barang siapa menghasut orang-orang untuk melakukan pemogokkan diancam hukuman enam tahun penjara. Hal ini sangat menusuk pribadi Soekarno waktu itu. Karena waktu itu ada pemogokkan di Garut yang digerakkan oleh Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Berkaitan dengan pemogokan itu, HOS Tjokroaminoto ditahan. Keluarga Pak Tjokro dalam keadaan kesulitan. Bagaimana Soekarno? Apakah memikirkan kepentingan diri sendiri ataukah mundur sementara membela keluarga Pak Tjokro". Keputusan Soekarno, meninggalkan Bandung untuk sementara dan ke Surabaya, melindungi keluarga Pak Tjokro untuk berapa lama? Tidak tahu sampai kapan. Soekarno menjadi klerk di stasiun kereta api agar bisa menghidupi keluarga Pak Tjokro.

Bulan April 1922 Pak Tjokro dibebaskan. Bulan Juli 1922 Soekarno kembali ke Bandung meneruskan studinya di T.H. (*Techniek-Hoge-School*) Bandung. Pada tahun 1923 Soekarno duduk di tingkat II di T.H. Bandung. Soekarno dengan didampingi Inggit melangkah maju memenuhi amanat menuju cita-cita. Setelah berumur 20 tahun Soekarno mempunyai suatu ilham politik yang kuat, yang menjadi landasan tempat pergerakan dimana

⁸⁵⁾ Cindy Adams, "Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams" . . . , halaman 73.

Ia berdiri. Soekarno telah mendalami ideologi politik ajaran Tahunomas Jefferson yang tertuang di dalam Declaration of Independence dari Konstitusi Amerika Serikat. Ideologi politik itu terdiri dari tiga prinsip “kemerdekaan, kesamaan, dan tiap-tiap orang dapat mengejar kebahagiaan”, *liberty, equality, dan personal happiness*. Di dalam operasionalnya ideologi politik Tahunomas Jefferson ini melahirkan bentuk masyarakat kapitalistis, melahirkan sistem politik individualisme, kapitalisme. Di dalam sistem politik kapitalisme itu ada sekelompok orang, menyuruh kelompok orang-orang lainnya untuk bekerja kepadanya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok yang memberi pekerjaan itu. Dengan perkataan lain ada sekelompok orang-orang yang mengeksploitasi sekelompok orang-orang yang lain. Dengan kata lain di dalam masyarakat kapitalisme dimungkinkan adanya *exploitation de l'homme par l'homme*. Kaum kapitalis mengeksploiteer kaum buruh. Kaum kapitalis makin kaya kaum buruh makin miskin. Menurut istilah Soekarno, kapitalisme tumbuh dengan pesat hingga Ia mengkejangkan lapangan eksploitasi di dalam masyarakat mereka sendiri. Barang-barang yang semula diimport dari Timur, kemudian di ekspor ke Timur. Dengan perkataan lain, kaum kapitalis makin kaya, terjadilah revolusi industri di Eropa. Industri berkembang pesat, hasil industri melimpah ruah, sehingga tidak habis dikonsumsi oleh masyarakat Barat. Terjadilah over-produksi, kelebihan hasil industri, hal demikian merupakan masalah bagi kaum kapitalis waktu itu. Akan dijual kemana barang-barang itu? Timbulah gagasan baru dari kelompok kapitalis, untuk mencari daerah baru guna dijadikan pasar, untuk menjual kelebihan hasil produksi (over-produksi) itu.

Negara-negara Barat menaklukkan negara-negara yang lemah, di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Lahirlah sistem penjajahan, Negara-negara Timur dijajah, dieksploiteer, dikuasai, dijadikan pasar hasil industri Barat. Lahirlah sistem imperialisme oleh negara-negara kapitalis terhadap negara-negara Asia-Afrika dan Amerika Latin. Lahirlah eksploitasi oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, lahirlah *exploitation nation par nation*. Bangsa-bangsa Barat mengeksploiteer bangsa-bangsa Timur, untuk dijadikan pasar hasil industri negara Kapitalis. Sekaligus mendapat bahan mentah dari tanah jajahan untuk kepentingan industri negara induk. Terjadilah, “*exploitation nation par nation*”. Dengan perkataan

lain imperialisme adalah tingkat terakhir dari kapitalisme. Di dalam sistem politik kapitalisme tidak saja dimungkinkan adanya: “*exploitation de l’homme par l’homme*” tetapi juga “*exploitation nation par nation*”. Eksploitasi oleh satu bangsa terhadap bangsa lain. Soekarno hidup pada masa dimana Indonesia sedang diamuk oleh kekejaman imperialisme kapitalisme itu, ialah imperialisme Kerajaan Belanda.

Soekarno juga telah mendalami ajaran Karl Marx, *historis materialisme* yang mengajarkan kepada buruh seluruh dunia untuk bersatu padu bergerak serentak menghancurkan kapitalisme di dunia ini. Filsafat *Historis Materialisme* ini melahirkan sistem politik komunisme di dunia. Mereka mengajarkan diadakannya pemerintahan kediktatoran oleh kaum buruh, mengajarkan adanya diktatur proletariat di dalam pemerintahan komunis untuk menghilangkan mental kapitalisme, yang masih tinggal pada orang-orang di dalam masyarakat. Menurut Soekarno, baik sistem kapitalis maupun sistem komunis tidak cocok guna mengatur jagat raya ini pada masa mendatang. Karena, sistem kapitalisme memungkinkan terjadinya eksploitasi oleh sekelompok orang terhadap kelompok yang lain. Memungkinkan terjadinya *exploitation de l’homme par l’homme* menurut Soekarno hal demikian bertentangan dengan tuntutan budi nurani tiap-tiap orang, bertentangan dengan *het geweten van de mens*, bertentangan dengan *conscience* tiap orang. Sistem kapitalisme juga memungkinkan terjadinya eksploitasi oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, yakni bangsa Barat, sipenjajah mengeksploitasi bangsa Asia-Afrika yang dijajah. Dimungkinkan terjadinya *exploititon nation par nation* hal demikian bertentangan dengan tuntutan budi nurani manusia, bertentangan dengan *the social consciuosness of the men*. Demikian juga sistem politik komunisme, di sana dibangun sistem pemerintahan kediktatoran dan anti keagamaan. Menurut Soekarno ideologi politik komunisme tidak cocok guna mengatur jagat raya ini pada masa mendatang. Sebab sistem kediktatoran dan anti agama bertentangan dengan *het geweten van de mens, the conscience of the men*.

Soekarno merumuskan ideologi politik baru yang berdasarkan pada tuntutan budi nurani manusia, berdasarkan *het geweten van de mens*.⁸⁶⁾ Menurut Soekarno tuntutan budi nurani manusia, *the conscience of man, het geweten van de mens*, menghendaki

⁸⁶⁾ Soekarno, *Lahirnya Pancasila*, Penerbit: Usaha Penerbitan Guntur, Yogyakarta, tahun 1949, halaman 23-49.

kehidupan berbangsa-bangsa, persatuan bangsa, nasionalisme. Ideologi komunisme menghendaki perpecahan bangsa, pertentangan para buruh dengan kelompok kapitalisme. Menurut Soekarno, *the social conscieousness of men* menuntut adanya persatuan bangsa. Menurut Soekarno, kesadaran masyarakat *the social conscieousness of men* menghendaki kehidupan kebangsaan yang bebas, menghendaki nasionalisme yang bebas, tidak ada *exploitation nation par nation, exploitation de l'homme par l'homme*. Kebangsaan yang bebas hidup bersamaan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nasionalisme dan internasionalisme yang diilhami dengan perikemanusiaan. Kebangsaan yang memandang bangsa lain sebagai kawan, teman, socius, jadi menghendaki *socio-nationalisme*. Juga *the social conscieousness of men*, menghendaki masing-masing orang dalam masyarakat yang satu memandang yang lain sama derajat, konsekuensinya semua persoalan di dalam masyarakat diselesaikan bersama melalui musyawarah mufakat, berdasarkan demokrasi mufakat. Karena tiap-tiap orang adalah sama derajat, maka di bidang ekonomi pun harus ada demokrasi ekonomi, di bidang ekonomi-pun setiap orang memandang yang lain sebagai *socius* teman, kawan, jadi dikehendaki prinsip *sosio-demokrasi*. Demokrasi yang berdasar keadilan sosial. Inilah ajaran Soekarno, Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi. Prinsip Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi ini guna mengatur kehidupan manusia bidang duniawi. Namun menurut Soekarno, tuntutan kehidupan duniawi demikian tidak berhasil sempurna, kalau manusia tidak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian ideologi politik ajaran Soekarno selengkapny adalah, Sosio-Nasionalisme, Socio-Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah ideologi politik yang dirumuskan oleh Soekarno. Ideologi politik yang baru ini sesuai dengan tuntutan budi nurani setiap orang. Sesuai dengan *het geweten van de mens*, sesuai dengan *the social conscieousness of men*. Ideologi politik yang baru ini menurut Soekarno adalah setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan ideologi politik kapitalisme dan juga ideologi politik komunisme.

Ideologi baru ini akan diajarkan kepada bangsa Indonesia yang waktu itu hampir semuanya melarat. Dengan diajarkannya ideologi baru ini dimaksudkan agar si-melarat Indonesia tumbuh kesadaran sebagai bangsa, untuk kemudian secara bersama-sama berupaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Membebaskan Indonesia dari

cengkeraman imperialisme, kapitalisme Belanda, menghilangkan eksploitasi oleh Belanda. Di sini dapat dilihat Soekarno benar-benar mencintai rakyat Indonesia, si-melarat Indonesia, dan berupaya akan membebaskan mereka dari cengkeraman kapitalisme imperialisme Belanda.

Soekarno waktu itu berumur 20 tahun sudah mulai memperhatikan bangsanya yang melarat itu. Di pulau-pulau Indonesia ini terdapat pekerja-pekerja yang bahkan lebih miskin dari tikus-tikus gereja dan di dalam segi keuangan terlalu menyedihkan untuk bisa bangkit di bidang sosial, politik dan ekonomi. Sungguhpun demikian mereka itu masing-masing menjadi majikannya sendiri. Mereka tidak terikat kepada siapapun. Dia menjadi sopir gerobag kudanya, dia menjadi pemilik kuda dan gerobag itu, dan dia tidak mempekerjakan buruh lain. Juga terdapat nelayan-nelayan yang bekerja sendiri dengan alat-alatnya seperti tongkang, pancing dan perahu kepunyaan sendiri. Juga terdapat para petani yang menjadi milik tunggal dari sawahnya dan pemakai tunggal dari hasilnya. Orang-orang semacam ini meliputi bagian terbanyak dari rakyat Indonesia. Semua adalah pemilik dari alat produksi mereka sendiri, mereka bukanlah rakyat proletar. Mereka punya sifat khas tersendiri. Mereka tidak masuk dalam salah satu bentuk penggolongan. Semua, mereka itu melarat. Soekarno bertanya pada diri sendiri, apakah mereka itu sesungguhnya?⁸⁷⁾ Hal ini menjadi renungan Soekarno sehari-hari, bermalam-malam, berbulan-bulan lamanya. Siapakah sesungguhnya saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang melarat itu. Apakah ini termasuk "*Penderita minimum*" seperti ahli ekonomi memberinya nama. Ini nama yang tidak tepat, tapi apa? Tapi apa nama si melarat ini kaum proletar? Bukan, kaum proletar menurut pengertian politik adalah orang-orang yang tidak mempunyai alat produksi, datang kepada orang-orang yang mempunyai alat produksi untuk bekerja dan mendapat upah. Ini proletar. Tetapi bangsa Indonesia melarat ini, mempunyai alat produksi, tidak bekerja kepada orang lain, dan tidak mendapat upah dari siapapun. Kaum proletar melarat. Bangsa Indonesia jenis ini juga melarat. Tapi apa namanya?

⁸⁷⁾ Cindy Adams, "*Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams*" . . . , halaman 82.

Pada suatu hari Soekarno tidak mengikuti kuliah, otaknya sudah penuh dengan soal-soal politik, tidak bisa konsentrasi mengikuti kuliah. Soekarno berjalan-jalan ke Bandung Selatan, suatu daerah pertanian yang petaninya juga melarat-melarat. Di dalam perjalanannya itu secara kebetulan di sana ada seorang petani sedang mencangkul sawahnya. Soekarno memperhatikannya, kemudian mendekatinya dan mengajukan pertanyaan kepada orang itu seperti di bawah ini:

- = Siapa yang mempunyai tanah yang Bapak kerjakan ini?
- Jawabnya: Saya sendiri yang punya, Juragan.
- = Sekop kecil ini, apa juga kepunyaan Bapak?
- Ya, Gan (Juragan).
- = Bajak (Luku) itu siapa punya?
- Saya punya, Gan (Juragan). = Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan, hasilnya?
- Bagaimana cukup, Gan (Juragan). Untuk seorang istri dan empat orang anak.
- = Bapak mempekerjakan orang lain?
- Tidak, Gan (Juragan). Saya tidak dapat membayarnya.
- = Bapak pernah bekerja sebagai buruh?
- Tidak, Gan (Juragan).
- = Soekarno menunjuk sebuah pondok kecil dan bertanya, Siapa punya rumah itu?
- Itu gubug saya, Gan (Juragan).
- = Jadi kalau begitu, semua ini Bapak yang mempunyai?
- Ya, Gan (juragan).
- = Soekarno menanyakan nama orang itu. Nama Bapak siapa?
- Nami abdi "*Marhaen*", Gan (Juragan).

Soekarno seperti mendapatkan ilham, lalu berpikir: Oo, kalau begitu si melarat Indonesia ini akan saya beri nama *Kaum Marhaen*. *Marhaen* adalah nama yang biasa seperti ada orang bernama, Abdullah, Kasan, Smit, Jones dan sebagainya. Pada saat itu sinar ilham menggenangi otak Soekarno, seraya bicara, saya akan memakai nama itu untuk memberi nama semua orang Indonesia bernasib malang seperti itu. Semenjak itu

Soekarno memberi nama rakyat Indonesia yang melarat itu dengan nama *Kaum Marhaen*. Rakyat petani mengerjakan tanahnya yang kecil, ini adalah korban dari sistem feodalisme. Petani yang pertama diperas oleh bangsawan yang pertama dan seterusnya sampai ke anak cucunya selama berabad-abad lamanya. Rakyat yang bukan petanipun menjadi korban imperialisme Belanda, karena nenek moyangnya dipaksa hanya bergerak di bidang usaha yang kecil. Sebelum orang-orang Belanda datang di Indonesia, orang Indonesia mempunyai macam-macam usaha. Imperialis Belanda sengaja mematikan semua usaha bangsa Indonesia yang bersifat produktif. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi konsumen hasil industri negeri Belanda, Indonesia dijadikan pasar. Sampai anak cucu bangsa Indonesia menjadi melarat, menjadi *Kaum Marhaen*, akibat eksploitasi oleh kaum feodal dan diteruskan imperialisme Belanda.

Tahun 1922 ada rapat besar di suatu lapangan di Bandung. Ini adalah rapat, *Radicale concentratie* suatu rapat raksasa yang diorganisir oleh seluruh organisasi kebangsaan sehingga wakil-wakil dari setiap partai hadir berkumpul disitu. Di dalam rapat raksasa itu banyak pemimpin berpidato. Soekarno hadir di situ tidak mewakili organisasi tetapi perorangan, Soekarno mendengarkan pidato itu. Menurut Soekarno, pidato para pemimpin itu omong kosong. Soekarno ingin bicara, minta waktu kepada panitia dan diizinkan. Soekarno mulai berpidato di situ.

Soekarno menyatakan dalam pidatonya itu sebagai berikut:

“Apa gunanya kita berkumpul di sini, kalau hanya menghasilkan “petisi”, mengapa kita selalu merendah, mohon ini, mohon itu kepada Pemerintah. Itu namanya adalah “politik berlutut”. Bukankah politik demikian itu memohon dengan mendatangi yang Dipertuan Gubernur Jendral dengan membungkuk-bungkuk, dan menyerahkan pertimbangannya, suatu petisi? Merendahkan diri, memohon pengurangan pajak.

Mengapa politik kita selalu memohon, . . . memohon, . . . memohon, . . . memohon . . ., inilah kata-kata yang selalu dipakai oleh pemimpin-pemimpin selama ini. Hayo, kita berhenti mengemis. Sebaliknya, ayo kita berteriak “Tuan Imperialis inilah yang kami “Tuntut””.

Sampai di sini pidato Soekarno. Karena Heyne Kepala Polisi kota Bandung, marah, naik ke mimbar dan membubarkan rapat. Baru pertama kali Soekarno membuka suara langsung berhadapan dengan polisi. Maka menjalarlah dari mulut ke mulut: "Di Techniek Hoge School ada seorang mahasiswa pengacau, awasi dia".⁸⁸⁾ Beberapa hari kemudian Soekarno dipanggil oleh Presiden Universitas, Professor Klopper dan mengingatkan Soekarno: "Engkau harus tekun pada studimu". Soekarno menerangkan secara jujur persoalan dirinya: "Professor, apa yang akan saya janjikan ialah bahwa saya tidak akan melalaikan pelajaran-pelajaran yang tuan berikan di dalam kuliah". Dan janji ini dipegang teguh oleh Soekarno. Dorongan untuk berpidato, terus timbul dalam dirinya, tetapi Soekarno tidak lagi pidato di alun-alun. Kalau pidato di tengah malam, di tengah-tengah temannya belajar, yang mondok makan di rumah Inggit. Di suatu malam Soekarno berpidato: "Engkau tahu apakah Indonesia?, Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah ini. Indonesia adalah langit yang biru dan terang ini. Saudara-saudaraku yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul di pantai di cahaya senja, adalah jiwa Indonesia yang bergerak di gemuruhnya gelombang samudra. Bila kita dengar anak-anak tertawa, kita mendengar Indonesia. Bila kita menghirup bunga-bunga, kita menghirup Indonesia. Inilah arti "tanah air". Demikian Soekarno. Di sini dapat diketahui bahwa pada diri Soekarno terdapat dorongan yang kuat untuk mencintai tanah air Indonesia, mencintai bangsa Indonesia. Jiwanya selalu bergelora ingin memerdekakan bangsanya dan getaran jiwanya itu tidak pernah padam sedikitpun, di dalam situasi bagaimanapun. Pada tanggal 25 Mei 1926, Soekarno lulus dari T.H. (*Techniek Hoge School*) Bandung. Soekarno adalah spesialis jalan raya dan pengairan. Di dalam ijazahnya tertulis nama "Ir. Raden Soekarno". Sewaktu menyerahkan ijazah, Presiden Universitas, Professor Klopper berpesan: Ir. Soekarno, ijazah ini dapat robek dan hancur menjadi abu disuatu saat. Ia tidak kekal. Ingatlah bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa hidup terus dan kekal adalah karakter dari seseorang. Ia akan hidup di dalam hati rakyat sekalipun sesudah mati". Pesan Professor Klopper ini tidak pernah dilupakan oleh Ir. Raden Soekarno selama hidupnya.

⁸⁸⁾ Cindy Adams, "Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams" . . . , halaman 87.

Pada ± tahun 1927 Soekarno berpikir bahwa sudah waktunya mengorganisir kaum “*Marhaen*” se-Indonesia di dalam suatu organisasi politik yang teratur, sehingga merupakan kenyataan adanya suatu kekuatan massa Indonesia yang mampu memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia.

Situasi Kerajaan Belanda pada bagian pertama abad XX dapat dikemukakan seperti di bawah ini:

Di dalam Perang Dunia I (1914-1918) keadaan negeri Belanda melemah. Pada 1917 dinasti Hohenzollern di Jerman terpecah-pecah. Frans Josef jatuh, Czar Alexander goyah, serpihan-serpihan mahkota-mahkota dari dunia yang telah dibinasakan itu melayang-layang melalui telinga Ratu Wilhelmina dan gelora revolusi yang berdekatan menggulung-gulung melalui pekarangan rumah-rumah di negeri Belanda. Pada tahun 1917 terjadi pemberontakan kaum Bolsjewick pimpinan Lenin, melahirkan negara komunis pertama di Dunia, Uni Soviet. Kun memberontak di Hongaria. Para buruh Jerman mendirikan Republik Weimar. Sehingga sebelah kiri dan kanan negeri Belanda menganga jurang kekacauan. Sedangkan Belanda sendiri setelah mengalami perang selama tiga tahun lamanya mengalami hancurnya di segi material dan spiritual. Situasi keuangan Kerajaan Belanda kacau, politik lumpuh, ditambah lagi seorang sosialis Belanda DR. Pieter Jelles Troelstra mengadakan gerakan revolusioner proletariat. Kerajaan Belanda lebih lemah lagi.

Di dalam situasi demikian lahirlah apa yang disebut “November belofter”, atau janji bulan November yang sangat terkenal itu. Yakni pada bulan November 1918 Gubernur Jendral Graaf van Limburg Stirum, menjanjikan kepada bangsa Indonesia, akan diberi hak-hak politik yang lebih luas, kebebasan yang lebih besar, kemerdekaan untuk mengadakan rapat-rapat umum, hak suara di dalam Dewan Rakyat (*Volks-raad*).

Tetapi setahun kemudian datanglah Gubernur Jendral Dirk Fock yang sangat reaksioner. Ia bertindak keras, kalau ada orang yang mencela Kerajaan Belanda, langsung dimasukkan ke dalam penjara. Dikeluarkanlah Undang-undang yang memberi kekuasaan besar kepada Gubernur Jendral untuk menginternir atau mengeksternir orang-orang Bumi Putera, banyak putera-putera Indonesia dipenjara, diasingkan tanpa diadili terlebih dahulu.

Demikianlah situasinya, maka menurut Ir. Soekarno sudah waktunya mendesakkan nasionalisme. Tetapi bagai mana? Di Indonesia belum ada partai yang kuat. PSII-nya Pak Tjokro tetap lemah. Malahan sebagian anggotanya memisahkan dari PSII dan membentuk *Serikat Rakyat*. Dan dengan dalih adanya perselisihan, Komunisme menyusup ke dalam Serikat Rakyat ini. Pada tahun 1926 Serikat Rakyat ini merencanakan akan mengadakan revolusi fisik yang besar untuk Kemerdekaan dan Komunisme. Tetapi rencana itu mengalami kegagalan yang menyedihkan.⁸⁹⁾ Belanda mengetahui dan menindasnya dengan serta merta. Serikat Rakyat dilarang. Mereka yang ikut Serikat Rakyat tidak punya apa-apa. Tjokro pun tidak punya apa-apa. Tidak ada lagi inti gerakan nasional yang kuat di Indonesia.

Di dalam situasi demikian itu, Soekarno sudah menemukan pegangan di bidang politik. Soekarno mengetahui bahwa warung-warung kopi, di mana orang berkumpul, disitulah nama Ir. Soekarno disebut-sebut. Soekarno menjadi buah mulut orang di waktu itu. Kebencian rakyat terhadap penjajah Belanda dan kepopuleran Ir. Soekarno memperoleh tempat yang berdampingan di dalam setiap tutur orang-orang.

- Di dalam situasi yang demikian itu, maka pada tanggal 4 Juli 1927 dengan dukungan enam orang temannya dari *Algemeene Studie Club*, Ir. Soekarno mendirikan suatu partai politik baru yang diberi nama *Partai Nasional Indonesia* atau P.N.I.

Rakyat sudah siap, Soekarno sudah siap, sekarang tidak ada yang menghalang-halangi Soekarno, kecuali Belanda.

Tujuan dari P.N.I. adalah *Kemerdekaan sepenuhnya*, sekarang (waktu itu). Semboyan P.N.I. *Indonesia Merdeka Sekarang*. Partai baru ini dilandasi suatu ideologi politik "Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Pada tanggal 28 Oktober 1928 Soekarno dengan resmi mengikrarkan sumpah khidmat "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa" sebagai mana hari itu juga di Jakarta diadakan Sumpah Pemuda secara terbuka. Ikrar itu dicetuskan di dalam masyarakat, terkenal dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta.

⁸⁹⁾ Cindy Adams, "*Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams*" . . . , halaman 106.

Pada bulan Desember 1928, Soekarno mempersatukan Partai-partai yang berhaluan kebangsaan. Pada hari itu Partai Nasional Indonesia mengadakan federasi dengan partai-partai lain yang berhaluan kebangsaan dengan nama: Permuafakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI.

Mulailah Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pengawasan yang tidak kenal ampun terhadap PNI dan PPPKI. Karena pengaruh dari ucapan-ucapan Ir. Soekarno, sanggup menggerakkan rakyat banyak. Hal ini merupakan ancaman yang nyata bagi Belanda. Kalau Soekarno berpidato tentu rakyat berkumpul seperti semut.

Pada suatu hari bulan Desember 1928 ada rapat PNI di Madiun. Soekarno menggoda Ali Sastroamidjojo yang baru saja keluar dari penjara, maka disuruhnya berpidato. Ali keluar keringat dingin, karena disitu ada polisi Belanda, tetapi Soekarno mengerti, lalu menyuruh Ali turun dan Soekarno berpidato. Seperti di dalam rapat-rapat PNI di tempat lain, Soekarno, di dalam rapat itu menjelaskan: "senjata yang paling jahat dari imperialisme adalah politik *Devide et Impera*". Belanda telah memecah bangsa Indonesia menjadi kelompok-kelompok yang terpisah satu dengan yang lain. Kita harus mampu mengatasi prasangka kesukuan dan prasangka kedaerahan dengan menempatkan satu keyakinan bahwa suatu bangsa itu tidak ditentukan oleh persamaan warna kulit ataupun agama. Lihat saja di negara Swiss, bangsa Swiss, rakyat Swiss terdiri dari orang-orang Jerman, orang-orang Perancis dan orang-orang Italia, tetapi semuanya adalah bangsa Swiss. Lihat bangsa Amerika terdiri dari orang-orang berkulit hitam, putih, merah dan kuning. Demikian pula bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku, tetapi semuanya adalah Bangsa Indonesia. Semenjak dunia ini berkembang kita mengetahui bahwa "*hanya dalam persatuanlah ada kekuatan*", maka dari itu marilah kita bersatu, marilah ikuti jejak badan baru, yakni "PPPKI", yang meliputi seluruh tanah air. Hanyolah kita bergabung menjadi keluarga yang besar dengan satu tujuan yang besar, yakni "*menggulingkan Pemerintah Kolonial*", dengan melawannya ... bangkit bersama-sama", dan stop ... stop ... stop, Inspektur polisi membubarkan rapat dan menarik Soekarno ke belakang mimbar, kemudian dibawa ke kantor polisi. Mendapat peringatan keras, kemudian Soekarno dibebaskan. Untuk sekian kalinya, Soekarno mempunyai getaran jiwa yang sangat mencintai tanah airnya,

mencintai bangsanya. Getaran ini selalu ingin keluar dari mulutnya, berupa pidato-pidato yang patriotik. Menghadapi hal ini setiap saat senantiasa melekat di fikiran Soekarno, bahwa suatu hari pasti dipenjara. Beliau tidak takut. Soekarno mengerti pada suatu saat Belanda pasti menangkapnya. Soekarno sudah siap mental. "Seseorang hendaknya jangan melibatkan dirinya ke dalam perjuangan mati-matian, kalau sebelumnya ia tidak insyaf akan akibatnya. Kemenangan Indonesia adalah suatu keharusan sejarah, tidak dapat dielakkan. Demikian keyakinan Soekarno waktu itu.

Pemimpin revolusi Perancis Danton, sewaktu dinaikkan gerobag sampah menuju ketiang gantungan, berkata pada dirinya sendiri: "*Audace, Danton. Toujours de l'audace*", ia terus mengulangi kaata-kata itu. Beranikan dirimu Danton, jangan kau takut, karena perbuatanmu akan dilukis dalam sejarah dan tantangan terhadapnyapun merupakan saat yang bersejarah. Demikianlah Soekarno menggambarkan.

Pada tanggal 28 Desember 1929 Soekarno mengadakan rapat di Solo dekat Yogyakarta. Di situ Soekarno mengungkapkan akan terjadi Perang Pasific. (Kita masih ingat, Perang Pasific baru meletus pada tahun 1941-1942-an). Soekarno berpidato: "Imperialis, perhatikanlah!, Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Perang Pasific menggeledek dan menyambar-nyambar membelah angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samodra Pasific menjadi merah oleh darah dan bumi sekelilingnya menggelegar oleh ledakkan-ledakkan bom dan dinamit, maka disaat itulah rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi Bangsa yang Merdeka."⁹⁰

Pada tahun itu banyak orang-orang yang mengira bahwa Soekarno sudah gila. Karena ungkapan itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin (menurut tafsiran orang-orang waktu itu). Soekarno meneruskan pidatonya: "Ucapan saya ini bukan ramalan tukang tenung, dan bukan harapan berdasarkan keinginan belaka. Aku melihat Jepang selalu agresif, ramalan ini adalah hasil dari perhitungan politik berdasarkan situasi revolusioner pada waktu yang akan datang. Rapat ini bubar tengah malam. Soekarno beristirahat di rumah Soejoedi di Yogyakarta. Kira-kira pukul 05.00 pagi, Soekarno dikejutkan oleh orang yang menggedor

⁹⁰ Cindy Adams, "*Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams*" . . . , halaman 123.

pintu. Ia adalah Inspektur Polisi Belanda. Rumah Soejoedi sudah dikepung. Inspektur Polisi sudah berhadap-hadapan langsung dengan Soekarno dan membuka pembicaraan: *“Atas nama Sri Ratu saya menahan tuan, kenakan pakaian tuan!”*.

Dua hari kemudian Soekarno di bawa ke Bandung dengan kereta api. Soekarno diturunkan di Cicalengka 30 km sebelum Bandung, kemudian diangkut ke Bandung dengan kendaraan bermotor. Soekarno dimasukkan ke dalam sebuah gedung yang bertuliskan “Rumah Tahanan Bantjeuj”. Soekarno dimasukkan ke dalam sel F no. 5. Tidur di pelbed, situasi kotor.

Bersamaan dengan itu, Belanda mengadakan pembersihan di seluruh Jawa. Ribuan orang telah ditahan, termasuk 40 orang PNI. Para penjaga lama-lama memihak kepada Soekarno. Sarikolah yang pertama-tama memberi rokok kepada Soekarno, juga buku-buku dan membawa berita bahwa Iskaq, Bendahara Soekarno juga ditahan.

Di suatu pagi Sarilokah membisiki Soekarno, “Bung kalau hendak menyampaikan pesan ke luar atau ke dalam saya bertindak sebagai perantara”.

Malahan ada petugas orang Belanda yang merasa, bahwa Soekarno tidak patut dipersalahkan melakukan kejahatan. Ketika Soekarno berhadapan dengan orang Belanda yang baik itu menerangkan: “Saudara, saya bekerja untuk rakyatku. Itulah satu-satunya kejahatan saya”. Soekarno ternyata dimana-mana disukai oleh orang banyak, utamanya oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 16 Juni 1930 berita surat kabar, memuat pidato Gubernur Jendral di muka Dewan Rakyat (*Volks-raad*) yang menyatakan bahwa Soekarno segera diadili, dihadapkan pada pengadilan. Pembela Soekarno adalah Soejoedi S.H., Sartono S.H. dan Sastromoeljono S.H., Soekarno sendiri akan mengadakan pembelaan di bidang politik.

Pada tanggal 18 Agustus 1930 Soekarno dihadapkan di muka pengadilan. Keputusan pengadilan, Soekarno dihukum empat tahun kurungan. Malam sebelum hukuman diputuskan enam orang kawan-kawan Soekarno mendatangi rumah dr. Sosrokartono, seorang ahli kebatinan yang sangat dihormati masyarakat Bandung waktu itu. Dr. Sosrokartono tidak bicara banyak, hanya sebuah kalimat: “Soekarno adalah seorang Satria. Pejuang seperti satria boleh saja jatuh, akan tetapi ia akan bangkit kembali.

Waktunya tidak lama lagi". Inilah ucapan dr. Sosrokartono. Soekarno dimasukkan ke dalam sel berukuran 1½ X 2¼ meter. Tidak ada sinar matahari. Tapi delapan bulan kemudian Soekarno dipindah di penjara Sukamiskin Bandung. Pada waktu Soekarno di Sukamiskin, Partai Nasional Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Pemerintah Belanda. Para aktivis partai bercerai-berai, sebagian para aktivis, mendirikan partai baru diberi nama *Partai Indonesia* atau *Partindo*. Sedangkan Sutan Sjahrir dan Moch. Hatta mendirikan partai barunya, ialah *Pendidikan Nasional Indonesia*. Sjahrir tidak sejalan dengan cara-cara bergerak teman seperjuangannya yang mendirikan Partindo itu.

Pada hari pembebasan Soekarno dari Sukamiskin, diupayakan agar jangan sampai ada penyambutan banyak orang. Jalan sekeliling rumah Inggit dikosongkan, namun sesudah itu banyak sekali sahabat Soekarno menjenguknya.

Yang dihadapi Soekarno setelah ke luar dari penjara adalah adanya pertentangan aktivis PNI, yang sebagian mendirikan Partindo, Sjahrir, Hatta mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia.

Aktivis Partindo minta agar Soekarno masuk Partindo. Soekarno menolaknya. Soekarno tidak suka ada perpecahan. Soekarno ingin mempersatukan keduanya, Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia itu. Hatta adalah sarjana ekonomi lulusan Fakultas Ekonomi di Rotterdam, cara berpikirkannya masih saja menurut buku-buku (*Text-book-Thinking*). Padahal, revolusi memerlukan kekuatan rakyat. Sjahrir dan Hatta tidak pernah membangun kekuatan massa rakyat. Apa yang mereka lakukan hanyalah bicara-bicara dalam partai kader. Padahal politik itu menurut Soekarno adalah *machtsvorming* dan *machtsaanwending*, pembentukan kekuatan dan pemakaian kekuatan itu. Dengan tenaga yang terhimpun kita dapat mendesak musuh ke pojok bila perlu menerjangnya. Pendekatan terhadap Sjahrir dan Hatta tidak berhasil, maka dari itu pada tanggal 28 Juli 1932 Soekarno masuk Partindo dan terpilih sebagai ketua.

Sebagai catatan bahwa Partindo ini didukung oleh bekas kader PNI yang dibubarkan Belanda, sekitar tahun 1931. Di dalam Indonesia Merdeka nantinya lahir juga Partindo ini, akan tetapi bukan kader-kader PNI, tetapi kader PKI. Partindo yang didukung oleh kader-kader PNI hanya Partindo jaman Belanda termaksud.

Pada suatu hari Soekarno mengadakan rapat di Gersik, Soekarno berpidato memberi informasi kepada rakyat tentang terjadinya pemberontakan di kapal Belanda, "Zeven Provincien". Soekarno kemudian menulis brosur yang bernama "Mencapai Indonesia Merdeka". Brosur tersebut dianggap menghasut oleh Pemerintah Belanda. Karenanya brosur tersebut dilarang beredar.

Tanggal 1 Agustus 1932 Soekarno mengadakan pertemuan pimpinan di rumah Tahunamrin di Jakarta. Rapat itu selesai sampai larut malam. Waktu Soekarno ke luar dari rumah dan menuju jalan besar, sudah ada seorang Komisaris Polisi yang menunggu di depan rumah Tahunamrin. Komisaris mengucapkan kata-kata: "Tuan Soekarno, atas nama Sri Ratu saya menangkap Tuan". Soekarno ditahan di Hopbiro Polisi di Jakarta. Di suatu hari, pukul 05.30 Ir. Soekarno dimasukkan cepat-cepat ke dalam Kereta Api Expres, dalam kamar yang kecil salah satu gerbong. Sampai di Surabaya keluarga Soekarno dipisah. Soekarno di sel. Soekarno dibuang ke Ende, Flores. Inggit tidak pernah mengeluh mengikuti suami dalam pembuangan. Soekarno bercerita kepada Inggit, disuatu hari, "Inggit, di Digul ada 2600 putera-putera Indonesia yang di buang di sana". Mendengar itu Inggit tetap tenang saja.

Pada bulan Februari 1938, Darham tukang jahit, tiba-tiba masuk ke kamar Soekarno, mengatakan bahwa dia baru saja mendengarkan radio di toko, "De Leeuw" di Ende, bahwa Soekarno akan dipindah ke tempat lain, dalam tempo singkat; tersiar kabar bahwa Soekarno akan pindah ke Bengkulu. Banyak orang-orang Ende yang melepas keberangkatan Soekarno.

Di Surabaya disiarkan bahwa Soekarno akan mendarat pukul 04.00 sore. Padahal pagi hari Soekarno sudah mendarat. Terus dilarikan dengan kereta api ke Jakarta, sehingga banyak orang-orang yang menjemput di Surabaya tidak dapat bertemu dengan Soekarno. Soekarno dilarikan ke Merak, dinaikkan kapal menuju ke Bengkulu. Pada bulan Juli 1941 Soekarno menulis dalam "Harian Pemandangan", seperti di bawah ini:

"Patriotisme tidak boleh disandarkan pada Nasionalisme dalam pengertian kebangsaan yang sempit, seperti Italia dan Jerman (waktu itu Perang Dunia II telah pecah di Europa, Jepang belum memulainya). Pemboman rumah-rumah, pembunuhan terhadap perempuan

dan anak-anak, penyerangan terhadap negeri-negeri yang lemah, penangkapan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, penyembelihan jutaan orang Jahudi itu adalah *isme* yang hendak berkuasa sendiri. Itu adalah fasisme, fasisme adalah usaha terakhir untuk menyelamatkan kapitalisme. Oleh karena itu seluruh manusia harus membenci Hitler. Hitler dan Mussolini-Mussolini yang ada di permukaan bumi ini harus ditentang, panjinya cita-cita Indonesia haruslah anti Nazisme dan anti fasisme. Hari ini saya mengangkat pena saya, guna memuntahkan saya punya kebencian terhadap penyakit ini yang mau tidak mau menyeret kita ke dalam peperangan dan bencana besar. Jepang adalah *naga* pembawa bencana, yang tidak lama lagi akan terjun di dalam peperangan yang membahayakan Perdamaian Dunia dan keselamatan bangsa-bangsa Asia. Saudara-saudara, waktunya sudah dekat, disaat mana air biru di Samudra Pasifik akan menelan korban berdarah yang tidak ada tandingannya di dalam sejarah Dunia.

Demikianlah tulisan Soekarno, memberikan peringatan kepada bangsanya agar siap-siap menghadapi datangnya perang Pasific. Soekarno benci sekali terhadap fasisme sebagai tahap terakhir dalam menyelamatkan kapitalisme.

Di Bengkulu ini Soekarno bertemu dengan Fatmawati, yang dikemudian hari menjadi istri Soekarno. Pada tanggal 12 Febuari 1942 Jepang menyerbu Sumatera Selatan. Belanda tidak mau meninggalkan Soekarno dalam keadaan bebas, khawatir dimanfaatkan oleh Jepang untuk melawan Belanda. Belanda mengetahui rakyat di Jawa, Sumatera sangat mencintai Soekarno. Popularitas Soekarno begitu kuat seolah-olah rakyat tidak pernah bisa dipisahkan dengan Soekarno.

Pukul 11.00 malam ada berita Jepang sudah di Lubuk Linggau, kota penghubung Kereta Api Palembang-Bengkulu. Ir. Soekarno dipindahkan ke kota Padang. Waktu itu kota Padang dalam keadaan chaos, suasana bingung dan ragu. Hanya satu hal yang rakyat tidak bingung bahwa Belanda penakluk yang perkasa itu sedang dalam keadaan panik. Persoalan bagi Belanda, bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Mereka seperti pengecut. Mereka lari pontang-panting. Belanda membiarkan kepulauan dan rakyat Indonesia menjadi umpan tentara Jepang tanpa pembelaan sedikitpun, tanpa pertahanan apapun. Tidak ada yang mempertahankannya, kecuali Soekarno. Negeri Belanda membiarkan Soekarno tinggal

dengan bebas di Indonesia, ini kesalahan Belanda sendiri. Soekarno sampai di hotel menyampaikan kepada Inggit: “Kau, Riwu dan Soekarti tinggal dulu di sini, saya mau menolong rakyat kita yang kebingungan itu”.

Di mana-mana orang berlari dan membuat persiapan terburu-buru, pada detik-detik terakhir. Soekarno mendatangi temannya, Waworuntu, yang tinggal di kota Padang. Waworuntu menyambut Soekarno dengan haru dan memeluknya. “Soekarno, saudaraku”, dia berteriak, air mata membasahi pipinya. Soekarno diberi tempat tinggal di rumah yang cukup bagus. Bawalah keluarga Bung Karno kemari, katanya.

Ini terjadi beberapa hari sebelum Jepang menyerbu Padang. Ketika Soekarno berjalan-jalan menyadari bahwa saudara-saudaranya bangsa Indonesia di Padang terlantar, lemah, patuh, tidak mendapat perlindungan dari siapapun, kecuali dari Soekarno. Segera mengambil oper pimpinan masyarakat Padang waktu itu Soekarno membentuk Komando Rakyat yang bertugas sebagai Pemerintah sementara, dan untuk menjaga ketertiban. Dengan bantuan Waworuntu, Soekarno mengumpulkan rakyat untuk diberi penjelasan, Soekarno pidato disitu, setelah sembilan tahun tutup mulut.

“Saudara-saudara saya minta saudara-saudara mematuhi tentara yang bakal datang di kota ini”, geledak pidato Soekarno, “Jepang mempunyai senjata yang kuat, sebaliknya kita sangat lemah. Tugas saudara-saudara bukan melawan mereka. Ingatlah kita tidak mempunyai senjata. Kita tidak terlatih untuk perang. Kita pasti dihancurkan kalau mencoba melawan Jepang.

Tetapi saudara-saudara, sekalipun semua tentara dari seluruh negara-negara di Dunia ini digabung menjadi satu, tidak akan mampu untuk membelenggu jiwa yang tunggal, karena ia telah bertekad untuk tetap merdeka. Siapa yang mampu membelenggu rakyat jikalau semangat rakyat itu tidak mau dibelenggu. Kita harus mencari kemenangan sebesar-besarnya dari musuh ini. Maka dari itu harus diperingatkan rakyat jangan mengadakan perlawanan”. Rapat itu diakhiri dengan do’a yang khusus.

Esok harinya Jepang datang di Padang. Disetiap jalan Jepang disambut oleh rakyat yang sorak sorai kemenangan, mengapa? Karena rakyat sangat benci kepada Belanda.

Soekarno tidak mengadakan gerakan apa-apa, hanya menunggu perkembangan.

Sehari kemudian, tentara Jepang, Kapten Sakaguci menemui Soekarno. Dia berbicara dalam bahasa Perancis. Ia bertanya kepada Soekarno: "Est-ce vous pouvez parler Francais?". "Oui", jawab Soekarno, "Je sais Francais". "Je suis Sakaguci", jawabnya. "Bon", Soekarno berkata.

Keduanya bungkam sebentar, kemudian Sakaguci membuka pertanyaan: "Vous ête Ingenieur Soekarno, n'est-ce pas?" "Oui, vous avez raison", jawab Soekarno. Sakaguci menunjukkan tanda pengenalnya: "Saya anggota Sendenbu, Departemen Penerangan dan Propaganda", kata Sakaguci.

Soekarno ganti bertanya: "Apa yang tuan kehendaki dari saya?" "Tidak apa-apa. Saya mengetahui bahwa saya ingin berkenalan dengan Tuan, itulah maka saya kemari. Dan saya datang bukan menyampaikan perintah kepada tuan", Kata Sakaguci. Soekarno bertanya lagi: "Mengapa justru tuan datang kepada saya? Sakaguci menjawab: "Menemui Tuan Soekarno yang sudah terkenal adalah tugas saya. Kami mengetahui semua tentang Tuan. Kami tahu Tuan adalah pemimpin bangsa Indonesia dan orang yang sangat berpengaruh.

"Itulah sebabnya Tuan menemui saya di sini, dan bukan meminta saya datang di kantor Tuan?", tanya Soekarno.

"Ya, suatu kehormatan bagi kami untuk menghadap Tuan sebagai mana mestinya. Tuan Soekarno terkenal di seluruh kepulauan ini", (Sakaguci). Soekarno: "Dari mana Tuan mendapat keterangan ini?"

Sakaguci menjawab: "Tuan lupa, Tuan Soekarno sebelum perang banyak orang Jepang tinggal di sini".

"O, begitu". Soekarno menjawab.

Sakaguci meneruskan bicara: "Kami mempunyai jaringan mata-mata yang rapi. Setelah menduduki Bengkulu saya segera mencari dimana Tuan Soekarno berada".

"Dan tindakan kedua?", Soekarno meneruskan bicara.

Sakaguci: "Untuk menjaga Tuan".

Demikianlah kedatangan Sakaguci, waktu itu.

Tiga hari kemudian Sakaguci datang lagi kepada Soekarno. “Monsieur Soekarno”, kata Sakaguci, “Saya membawa pesan, Le Commandant de Bukit Tinggi memohon kehadiran Tuan”.

Soekarno heran: “Memohon”, Soekarno mengulangi lagi, “Oui, Monsieur, memohon?”

Dengan sikap merendah Sakaguci ini, Soekarno mengerti bahwa Jepang ingin bekerja sama dengannya. Komandan di Bukit Tinggi bernama Fujiyama.

Soekarno berangkat naik kereta api dari Padang ke Bukit Tinggi. Orang-orang di dalam gerbong mengetahui bahwa Soekarno ada disitu. Kemudian mereka saling memberi informasi ke gerbong lain. Waktu berhenti di Padang Panjang, orang-orang di pelataran stasiun mulai bersorak memanggil Soekarno. Gerbong Soekarno diserbu orang, sehingga Soekarno terpaksa mengeluarkan kepala lewat jendela, dan berpidato singkat kepada rakyat itu. Sakaguci melihat keheranan. Soekarno memang dicintai rakyat di seluruh Nusantara.

Soekarno mengadakan pertemuan dengan Fujiyama⁸⁹⁾ di tempat kediamannya di Bukit Tinggi. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat penting. Suatu pertemuan yang menentukan strategi Soekarno selanjutnya selama peperangan. Suatu pertemuan yang hingga kita merdeka, tidak banyak yang mengetahuinya. Suatu pertemuan yang memberi Soekarno suatu cap bahwa Soekarno “kolaborator dengan Jepang”.

Di situ Soekarno bertanya kepada Fujiyama: “Orang Jepang punya semboyan ‘Asia bebas’, apa betul Tuan?”

“Ya, Tuan Soekarno”, jawab Fujiyama, “Itu benar, dan kami selalu berpegang pada semboyan itu”.

“Apakah Tuan berpendapat, Indonesia bagian dari Asia?”, tanya Soekarno.

“Tentu, Tuan Soekarno”. jawab Fujiyama.

“Kalau begitu tujuan Tuan juga akan membebaskan Indonesia?, betulkah itu?”, tanya Soekarno.

⁸⁹⁾ Cindy Adams, *Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams*, halaman 215.

“Ya, Tuan Soekarno, tepat sekali”, Fujiyama menjawab.

Soekarno berdebar-debar, gigi dan tulang-tulanganya gemerincing, hidup atau matinya tanah airnya tergantung dari hasil pembicaraan ini. Suasana hening, keduanya tidak bicara apa-apa.

Kemudian Fujiyama memecah keheningan ini: “Di dalam pengertian inilah, kami ingin mengetahui apakah Tuan mempunyai keinginan untuk memberikan bantuan kepada tentara dari Nippon”.

“Dengan cara bagaimana?”, Soekarno menyahut.

Fujiyama: “Dalam memelihara ketenteraman”.

“Bagaimana saya seorang diri dapat memelihara ketenteraman?”, tanya Soekarno.

Fujiyama tersenyum dan berbicara: “Kami tahu, bahwa Tuan Soekarno sendirilah yang menguasai seluruh rakyat, karena itu cara yang paling baik ialah kami mendekati Tuan Soekarno”.

Suasana hening, kemudian Soekarno berkata: “Nah, sekarang saya tahu apa yang Tuan inginkan dan Tuan tahu apa yang saya inginkan”.

“Tidak Tuan Soekarno, saya tidak tahu yang Tuan inginkan. Apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh rakyat Indonesia?” (Fujiyama).

Soekarno menjawab tegas: “Rakyat kami ingin merdeka, Tuan”.

Fujiyama: “Sebagai seorang patriot yang mencintai rakyatnya dan menginginkan kemerdekaan, Tuan harus menyadari bahwa Indonesia merdeka hanya dapat dibangun dengan bekerja sama dengan Jepang. Kalau Tuan menjajikan bekerja sama dengan Jepang selama pendudukan kami, kami akan memberikan janji yang tidak bersyarat untuk membina kemerdekaan tanah air Tuan”.

Soekarno bertanya: “Dapatkah Tuan menjamin, bahwa selama saya bekerja untuk kepentingan Tuan, saya juga diberi kebebasan bekerja untuk rakyat saya, dengan pengertian, bahwa perjuangan saya yang terakhir adalah di suatu waktu ... dengan salah satu jalan ... membebaskan rakyat dari kekuasaan Belanda ... maupun kekuasaan Jepang?”. “Kami jamin. Pemerintah Jepang tidak akan menghalang-halangi Tuan”.

Soekarno berpandangan dengan Fujiyama sesaat. Soekarno membuka kesunyian: “Baiklah, kalau Tuan menjanjikan demikian, dengan pengertian disamping saya bekerja sama dengan Tuan, sayapun berusaha untuk memperoleh kemerdekaan bagi rakyat saya”.

“Setuju”, Fujiyama menjawab.

Selesai pertemuan Ir. Soekarno kembali ke Padang. Sakaguci dengan sangat menghormat menemui Soekarno, “Izinkan kami untuk menyediakan kendaraan untuk Tuan”.

Pada suatu hari Sakaguci mendatangi Soekarno dengan menyatakan: “Tuan Soekarno, kami menghadapi kesulitan, di Padang tidak ada beras, kami butuh beras”.

Soekarno meminta bantuan beras kepada para saudagar beras dan bilang: “Aku perlu sekian ton dengan segera”, beras diperoleh dengan mudah, karena yang meminta adalah Soekarno.

Begitu besarlah pengaruh Soekarno di mana-mana. Soekarno dicintai rakyat dan mencintai rakyat.

Di Jakarta, Jendral Imamura, Panglima Tertinggi pendudukan di Jakarta, mengajak para pemimpin Indonesia membentuk Badan Pemerintahan Sipil, tetapi semua pimpinan menyatakan: “Kami tidak duduk dalam badan apapun tanpa Bung Karno”.

Imamura meminta kepada Fujiyama di Bukit Tinggi agar segera mengirim Soekarno ke Jakarta. Fujiyama segera memerintahkan staf untuk segera mengantar Soekarno ke Palembang untuk kemudian naik kapal laut menuju Jakarta. Selama empat hari empat malam Soekarno terkatung-katung di tengah lautan. Sampai di pantai Jakarta tidak ada seorangpun yang menjemput Soekarno ke kapal.

Soekarno meminta tolong kepada seorang nelayan agar menghubungi Anwar Tjokroaminoto iparnya, Mr. Sartono dan Hatta.

Anwar yang pertama datang. Setengah jam kemudian Mr. Sartono dan Moch. Hatta datang, berlarian karena lama sekali tidak berjumpa. Hatta langsung berbisik kepada Soekarno: “Bagaimana pendapat Bung Karno mengenai pendudukan ini?”.

Jawab Soekarno: “Jepang tidak akan lama di sini, mereka akan kalah dalam perang Pasifik dan kita akan hancurkan mereka. Inipun kalau kita tidak menentang mereka

secara terang-terangan sekarang ini (waktu itu)".

Di Jakarta, Soekarno disediakan rumah besar oleh Jepang. Malam hari Soekarno ke rumah Hatta, mengadakan pertemuan guna memecahkan taktik Indonesia menghadapi pendudukan Jepang dan untuk masa yang akan datang.

Soekarno: "Sekarang kita menghadapi suatu tugas yang jauh lebih besar, perbedaan kita mengenai soal partai dan soal strategi masa lalu itu, sekarang tidak ada. Pada waktu sekarang kita satu. Dan kita bersatu di dalam perjuangan bersama".

"Saya setuju", Hatta menjawab.

Keduanya berjabat tangan dengan kesungguhan hati, inilah, Soekarno berjanji, "Janji kita sebagai dwi tunggal. Kita berjuang bersama sampai terjadi kemerdekaan".

Pembicaraan diteruskan, hadir dalam perencanaan taktik perjuangan adalah Sutan Sjahrir. Pembicaraan, oleh Soekarno, Hatta, Sjahrir, menyusun rencana-rencana gerakan untuk masa akan datang disusun dengan cepat.

Telah disetujui, bahwa mereka akan bekerja dengan dua cara. Pertama ada yang bekerja dengan Jepang terang-terangan. Kedua ada yang bekerja di bawah tanah, non-kolaborator dengan Jepang. Yang satu memenuhi tugas yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain.

"Untuk memperoleh konsensi-konsensi politik yang berkenan dengan pendidikan militer dan jabatan-jabatan pemerintahan untuk orang Indonesia, mereka arus memperlihatkan diri dengan cara kollaborasi", Soekarno menandakan. "Jelaslah bahwa kekuatan Bung Karno adalah menggerakkan massa rakyat", Hatta menegaskan, "Jadi Bung Karno harus bekerja sama dengan Jepang secara terang-terangan" (Hatta). "Betul, Bung Hatta membantu saya" kata Soekarno, "Karena Bung Hatta terlalu terkenal tidak bisa bekerja di bawah tanah", tegas Soekarno.

Sjahrir menyahut: "Biarlah saya yang bekerja di bawah tanah. Sambil menyadap berita-berita dari luar negeri".

Maka diputuskan bahwa Soekarno Hatta mengambil kebijakan bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Sutan Sjahrir memimpin pergerakan di bawah tanah. Di dalam pelaksanaan nantinya antara yang kolaborator dan yang non-kolaborator saling memberi

informasi secara rahasia.

Pada pertengahan akhir tahun 1943 rencana Soekarno mengupayakan *Kesiapan Rakyat* di bidang militer bisa terlaksana. Jepang menyetujui usul Soekarno agar dibentuk Tentara Sukarela dengan nama *Tentara Pembela Tanah Air* atau PETA. Pada tahun 1943 (2603) tentara Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan di beberapa wilayah pertahanan mereka. Setelah Jepang menguasai hampir seluruh pulau-pulau Asia Pasifik, maka tentaranya menyebar dan menipis. Di dalam situasi demikian tentara Sekutu pimpinan Amerika Serikat mulai menyerang balik kekuatan Jepang. Dari pulau-pulau di Samudra Pasifik terus dihalaunya ke Filipina dan mengarah ke Tokyo Jepang. Di dalam situasi demikian Jepang ingin prajuritnya mempunyai tenaga bantuan dari pemuda-pemuda Indonesia. Komando Tinggi Jepang menyetujui didirikannya PETA, sebagai tentara yang dipersiapkan untuk melawan Tentara Sekutu manakala datang menyerbu ke Indonesia. Jenderal-jenderal Jepang tentu berpendapat mereka lebih baik menumpahkan darah Bangsa Indonesia daripada mengorbankan prajurit-prajuritnya sendiri.

Sebaliknya Soekarno memandang peristiwa itu sebagai suatu kesempatan bagi rakyat yang menderita, menjadi tentara yang terlatih. Untuk pertama kali bangsa Indonesia menggunakan senapan yang nantinya PETA ini merupakan satuan-satuan dalam mempersiapkan adanya Tentara Nasional kalau kemerdekaan Indonesia telah tercapai.

Pada tahun 1943 (2603) dan 1944 (2604) Jepang menderita kekalahan di dalam perang Asia Pasifik. Maka dari itu pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Kaiso mengeluarkan janji, yang janji itu dibacakan oleh Saikoosikikan di Jakarta bahwa *The Hindo* (Indonesia) akan dimerdekakan manakala kemenangan akhir sudah tercapai. Pada tanggal 8 September 1944 (2604) bendera Merah Putih boleh berkibar di sebelah kiri bendera Hinomaru, dan Indonesia Raya boleh dinyanyikan.⁹²⁾

Pada tahun 1945 (2605) kekalahan Jepang sudah dapat dipastikan, maka dari itu pada tanggal 29 April 1945 (2605) pada hari *Tentyoo-setzu* (hari ulang tahun Raja

⁹²⁾ *Kan Po* . . . , tahun 1944 (2604), no. 51.

Jepang), pemerintah Jepang mengulangi janjinya, bahwa Indonesia akan dimerdekan. Dinyatakan di dalam Maklumat Gunseikan No. 25 tahun 1945 (2605)⁹³⁾

Janji ini tidak ada kata-kata, kalau kemenangan akhir telah tercapai, seperti janji tahun 1944 (2604).

Sebagai tindak lanjut dari janji ini dibentuklah suatu Badan Kenegaraan dengan nama: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*. Badan ini bertugas menggali soal-soal kenegaraan dari masyarakat yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada badan lain yang dibentuk kemudian, yakni "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)" atau *Dokuritzu Zyunbi Iinkai*.

Di dalam Badan Kenegaraan ini peran Ir. Soekarno dan juga Moch. Hatta sangat besar. Di dalam sidang pertama "Badan Penyelidik" tanggal 31-5-1945 s.d. 1-6-1945, Soekarno mengusulkan dasar negara ialah Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945 (2605) Soekarno-Hatta mengadakan sidang nasional dihadiri oleh golongan Nasionalis dan golongan agama dan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia. Sidang ini merumuskan "Piagam Jakarta" dimana Pancasila yang telah disetujui secara aklamasi pada 1-6-1945 (2605), dihaluskan oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Soekarno dimasukkan di dalam Piagam Jakarta itu.

Di dalam sidang kedua Badan Penyelidik tanggal 10 Juli 1945 (2605) s.d. tanggal 17 Juli 1945 (2605), Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil Hukum Dasar telah merumuskan draft rancangan UUD 1945 terdiri dari Batang Tubuh pasal 1 - 37, Pasal I, II, III, IV Aturan Peralihan UUD 1945 dan Aturan Tambahan.

Draft rancangan UUD 1945 rumusan Soekarno ini (yang dibantu oleh Prof. Soepomo dan Moch. Yamin) dibahas dalam sidang ke II Badan Penyelidik. Ada usul agar draft rancangan UUD 1945 itu diberi Pembukaan dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 16 Juli 1945 (2605) ditetapkan oleh Badan Penyelidik ini rancangan UUD 1945 dengan Pembukaan, Piagam Jakarta.

⁹³⁾ *Kan Po* . . . , tahun 1945 (2605), no. 66.

Menurut rencana Jepang, kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 1945, akan tetapi perang Asia Pasific berakhir tanggal 15 Agustus 1945.

Kira-kira akhir bulan Juli 1945 para pemuda yang bergerak di bawah tanah mendatangi Soekarno. Mereka memaksakan kehendak mereka agar Soekarno memproklamasikan kemerdekaan sebelum Jepang menyerah, agar dunia Internasional tidak menuduh bahwa negara baru itu adalah buatan Jepang. Pemuda-pemuda minta Soekarno memproklamasikan kemerdekaan dan kemudian mengadakan revolusi melawan Jepang. Soekarno tidak setuju. Para pemuda mengejek Soekarno secara kurang sopan, menuduh Soekarno penakut dan macam-macam perkataan yang tidak enak didengar.

Soekarno tidak bicara hanya mendengarkan pemuda-pemuda yang dikuasai emosi mereka itu yang mendesak dan memaksa Soekarno. Lama-lama Soekarno jengkel pula, tetapi tetap tenang. B.M. Diah, Chaerul Saleh, Soekarni sebagai pimpinan pemuda terus mendesak Soekarno, memaksakan kehendak mereka. Akhirnya Bung Karno berbicara dengan tenang: "Kalau engkau pemuda-pemuda ingin mengadakan pertumpahan darah yang sia-sia, cobalah bergerak, tanpa Soekarno. Hayolah, bergeraklah sendiri, tanpa Soekarno". B.M. Diah berteriak: "O, tidak Bung, Bung Karno-lah yang memimpin kami. Bila kami bertindak tanpa Bung Karno, kami akan diikuti sekelompok kecil orang-orang, tetapi rakyat seluruh negeri akan berdiri di belakang Bung Karno. Hanya Bung Karno yang bisa menguasai massa".

Chaerul Saleh meneruskan berbicara: "Kita tidak mungkin bergerak tanpa Bung Karno. Karena itu terus mengejar Bung Karno. Kalau kami sendiri yang bertindak, betapapun baik maksud kami, niscaya seperti anak yang sudah mati di dalam kandungan".

Pemuda yang lain menyambung bicara: "Setiap orang menggantungkan harapan kepada Bung Karno. Seluruh bangsa mengikuti Bung Karno. Bung Karno adalah orator yang besar.⁹⁴⁾

Di sini bisa dilihat berapa besar pengaruh Bung Karno terhadap rakyat Indonesia, semua mendukung policy dan pimpinan Bung Karno.

⁹⁴⁾ Cindy Adams, "*Soekarno an Autobiography as told to Cindy Adams*" . . . , halaman 308.

Pada tanggal 8 Agustus 1945 Jendral Terauchi, Panglima Tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara mengundang Soekarno dan Hatta untuk ke Saigon. Undangan itu sangat rahasia. Keluarga Soekarno sendiri tidak mengetahui dibawa kemana Bung Karno. Malahan Soekarno-Hatta sendiri tidak mengetahui apa maksud undangan itu. Soekarno dikawal ketat oleh tentara Jepang. Berangkat dari Jakarta pukul 05.00, naik pesawat tempur yang sudah brensek, sampai di Saigon pukul 18.00. Paginya di bawa ke daerah luar kota ± 100 km dari Saigon. Di sana Jendral Terauchi mengumumkan: “Sekarang terserah kepada Tuan. Pemerintah Dai Nippon menyerahkan proses dari pada kemerdekaan Rakyat Indonesia sama sekali di tangan Tuan. Yang menjadi masalah besar ialah, bagaimana sesungguhnya kelanjutan yang Tuan inginkan”.

Soekarno-Hatta waktu itu tidak mengerti ada apa sebenarnya, apa maksud pengumuman Terauchi itu. Soekarno-Hatta pulang tanpa dikawal.

Di samping itu, sepulang Soekarno-Hatta dari Saigon membawa tiga cap:

Cap pertama : Ir. Soekarno Ketua PPKI

Cap kedua : Drs. Moch. Hatta Wakil Ketua PPKI

Cap ketiga : Radjiman beserta beberapa orang adalah anggota PPKI.

Inilah pembentukan Dokutitzu Zyumbi Iinkai (PPKI) oleh Jepang. Bung Karno pulang dari Saigon tanggal 14 Agustus 1945.

Tanggal 15-8-1945 Jepang menyerah kepada Sekutu.

Pada suatu pagi sejumlah pemuda menggedor rumah Soekarno dan membawa Soekarno sekeluarga ke luar kota Jakarta, ke Rengasdengklok. Di sana ada asrama PETA. Pemuda-pemuda itu memaksa Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan, dengan mengatakan pemuda mulai bergerak di Jakarta, nanti malam di Jakarta terjadi lautan api.

Soekarno menjawab dengan tenang: “Masa, Proklamasi di sawah-sawah begini”.

Soekarno mengetahui kelompok pemuda yang emosional ini adalah anak buahnya Sjahrir. Mereka adalah pemuda yang tidak pernah hubungan dengan rakyat banyak. Soekarno yakin bahwa pemuda-pemuda itu tidak bakal membakar kota Jakarta, inilah keluh Soekarno di dalam hatinya.

Tanggal 16 Agustus 1945 siang tersiar kabar Jepang sudah menyerah. Para pemimpin yang ada di Jakarta mencari Bung Karno, tetapi tidak ada. Siangnya Achmad Soebardjo memperoleh informasi bahwa Bung Karno dibawa pemuda ke Rengasdengklok, Soebardjo kemudian kesana. Sorenya Bung Karno bersama rombongan dibawa ke Jakarta. Di tengah jalan sudah sore dan gelap, di kejauhan terlihat api berkobar. Salah seorang pemuda berbicara: "Itulah Jakarta sudah terjadi pergolakan antara pemuda melawan Jepang. Itu Jakarta sudah terbakar".

Soekarno tenang, dalam hatinya tetap yakin kelompok pemuda ini tidak akan bisa membakar Jakarta seperti kata pemuda tadi itu. Soekarno menyuruh sopirnya mendekati kobaran api. Sopir kembali dengan melapor: "Itu orang-orang tani membakar jerami", Soekarno tertawa kecil, dan mengejek.

Sampai Jakarta Soekarno mengadakan rapat PPKI di rumah Maeda. PPKI bentukan Jepang dibubarkan dan langsung membentuk PPKI sebagai Badan Nasional malam itu.

Perundingan sampai malam, mempersiapkan proklamasi esok harinya. Seluruh rakyat Indonesia sudah lama ingin merdeka, dengan memanfaatkan peluang, prinsip III Atlantic Charter dan peluang adanya Vacuum of Power waktu itu, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 09.30. Soekarno dan Moch. Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dengan selamat.

Pada tanggal 18-8-1945 Soekarno mengadakan rapat PPKI dan sebagai keputusan rapat itu adalah:

- Menetapkan UUD 1945 (materi UUD 1945 ini diambil dari rancangan UUD 1945 yang ditetapkan oleh Badan Penyelidik tanggal 16 Juli 1945).
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ir. Soekarno Presiden RI dan Drs. Moch. Hatta Wakil Presiden RI (mulai hari itu sudah berdiri Pemerintah Republik Indonesia, menurut UUD 1945 Pemerintah adalah Presiden).
- Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pembentukan KNIP bersamaan waktunya dengan penetapan UUD 1945 ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Sebelum MPR, DPR,

DPA dibentuk berdasarkan UUD 1945 ini kekuasaannya dijalankan oleh Presiden, dengan bantuan KNIP. Proklamasi kemerdekaan ini disambut gembira oleh seluruh rakyat. Seluruh rakyat mendukung Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta dan secara bulat bertekad mempertahankan Negara Proklamasi.

Di sisi lain Pemerintah Belanda berpegang pada prinsip *status quo antebellum*, berpegang pada keadaan sebelum Jepang menyerbu ke Indonesia. Berarti Belanda tetap menganggap Indonesia sebagai wilayah Kerajaan Belanda. Belanda tidak mau mengakui keberadaan eksistensi Negara RI malah akan menghancurkannya melalui peperangan.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka persengketaan Indonesia-Belanda tidak mungkin dielakkan. Masalahnya bagaimana cara penyelesaiannya?

Belanda menghendaki melalui kekuatan militer.

Soekarno setelah meneliti situasi domestik dan alasan-alasan lain secara rasional, memilih strategi penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB, sesuai pula dengan rambu-rambu hukum Internasional yang tersirat dalam Piagam PBB.

Belanda memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, menuduh Negara RI fasis dan tidak mau berunding dengan RI.

Soekarno membuka kemungkinan untuk bisa berunding dengan Belanda, dengan mengubah isi pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yakni dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945. Dengan penetapan maklumat No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat pelaksanaannya, maka berubahlah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem demokrasi parlementer dengan multi partai sistem. Presiden RI secara ketata-negaraan tidak termasuk badan eksekutif lagi. Badan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, waktu itu P.M. Sjahrir. Kalau Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta tidak ada masalah, Belanda bisa berunding dengan P.M. Sjahrir.

AFNEI (Inggris) terus mendesak Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Demikian pula Amerika Serikat mendesak juga. Akhirnya Belanda terpaksa mau berunding dengan Indonesia dalam hal ini P.M. Sjahrir.

Terlaksanalah perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati.

Namun proses penandatanganan persetujuan Linggarjati ini timbul hambatan-hambatan baik bagi Belanda maupun bagi Indonesia. Hambatan bagi Belanda datang dari Pemerintah Belanda sendiri, sebab pada dasarnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan itu, menandatangani berarti pemerintah Belanda mengakui keberadaan pemerintah Republik Indonesia.

Bagi Indonesia persetujuan Linggarjati adalah suatu yang sangat prinsipial. Indonesia berunding dengan Belanda sudah terkandung arti bahwa keberadaan, eksistensi Negara RI telah diakui oleh dunia internasional. Persetujuan Linggarjati merupakan modal awal yang sangat penting bagi Indonesia dalam upaya diplomasi, agar nantinya Belanda mengakui kedaulatan Negara Indonesia. Pengakuan demikian terkandung arti bahwa Belanda telah melepaskan Indonesia kaitannya dengan pasal 1 Grondwet Belanda, berarti melepaskan Indonesia sebagai tanah jajahan Kerajaan Belanda.

Namun tujuan Soekarno-Hatta yang sangat prinsipial itu belum difahami maknanya oleh wakil-wakil bangsa Indonesia ialah KNIP, waktu itu. KNIP menolak untuk menandatangani Persetujuan Linggarjati, yang dipelopori oleh PNI dan Masyumi yang merupakan mayoritas dalam KNIP waktu itu.

Soekarno-Hatta dan Sjahrir berupaya menambah anggota KNIP waktu itu dengan ditetapkannya PenPres No. 6/1946. PenPres 6/46 ini juga ditolak oleh KNIP.

Soekarno marah sekali waktu itu. Berunding dengan Hatta, kemudian Hatta ditugasi berbicara di muka sidang KNIP. Soekarno pulang ke Yogyakarta, Hatta sendiri yang memimpin. Dengan ketetapan hati yang teguh Hatta berpidato di muka sidang KNIP: "Sekarang terserah saudara-saudara apakah menerima PenPres 6/46 ataukah saudara-saudara memilih presiden dan wakil presiden baru yang bukan Soekarno-Hatta?"

Mendengar pidato Hatta itu seluruh anggota KNIP baik yang lama maupun yang baru berdasar PenPres 6/46 secara aklamasi menerima PenPres 6/46, menyetujui persetujuan Linggarjati dan memberi kuasa kepada pemerintah untuk meneruskan perundingan.

Untuk sekian kalinya dapat dilihat bahwa Soekarno-Hatta mempunyai pengaruh yang sangat besar atas bangsa Indonesia. Suara KNIP yang pecah itu, akhirnya bersatu padu karena pidato Hatta itu.

Ada penulis, seorang India PRS MANI⁹⁵⁾ menilai Soekarno seperti di bawah ini: Soekarno adalah orang yang berhati hangat, pesolek, agak menggemari seragam militer walaupun kurang menguasai strategi militer. Benar-benar memahami sejarah, seorang orator yang berbakat dan menarik. Agak mirip dengan satria-satria Jawa kuno seperti *Adipati Karno*. Selalu bersama-sama Hatta dalam menganalisis perkembangan situasi selama revolusi 1945-1949.

Demikianlah penilaian PRS. Mani, dan peneliti sependapat terhadap penilaian itu.

Pada jaman Jepang Soekarno mengambil kebijakan kerja sama dengan Jepang, tetapi dalam pada itu mempersiapkan segala sesuatunya guna kepentingan kemerdekaan Indonesia antara lain Soekarno minta kepada Jepang untuk membentuk kesatuan militer Heiho dan Peta (Pembela Tanah Air), kedua kesatuan bersenjata inilah yang nantinya memelopori tentara keamanan rakyat (TKR) pada tahun 1945. Selama revolusi fisik pada tahun 1945-1949 Soekarno melaksanakan diplomasi yang sangat jitu, bersama Hatta dan Sjahrir. Akhirnya dapat mempertahankan eksistensi negara RI berdiri sampai sekarang.

Dengan melihat autobiography Soekarno dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Soekarno adalah bukan tokoh sembarangan. Sejak usia muda selalu berupaya agar Indonesia merdeka merupakan kenyataan secepatnya. Soekarno mempunyai pandangan jauh ke depan yang sangat tajam. Pada dirinya selalu ada dorongan, untuk selalu berjuang menumbangkan Imperialisme Belanda, dalam kesempatan apa pun yang dihadapi. Pikiran Soekarno sangat tajam, pada tahun 1929 Soekarno telah megemukakan "bahwa kalau terjadi perang Pasifik, yang waktunya tidak lama lagi maka disaat itulah bangsa Indonesia akan merdeka", dan imperialisme akan tumbang. Pada jaman Jepang Soekarno memanfaatkan pendudukan Jepang untuk memerdekakan bangsanya. Soekarno adalah agen yang mampu memproduksi struktur baru memberikan norma-norma penting sebagai rambu-rambu hukum yang harus ditaati bangsanya, di dalam mengelola Indonesia merdeka pada masa yang akan datang. Rambu-rambu hukum nasional dan internasional itu dituangkan di dalam ideologi Pancasila, dan UUD 1945. Rambu-rambu hukum yang berupa norma-norma yang tertuang di dalam

⁹⁵⁾ PRS. MANI, *The Story* . . . , halaman 47

UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, berhasil menyelamatkan bangsa Indonesia dan negara RI sampai sekarang ini. Baik Pancasila maupun UUD 1945, walaupun Pancasila itu ditetapkan oleh Badan Penyelidik, dan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18-8-1945, tetapi kedua pusaka bangsa ini perumusan utama adalah Soekarno. Apa yang kemudian disebut Pancasila tidak lain adalah ideologi, Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi yang berketuhanan Y.M.E. yang dirumuskan Soekarno ± tahun 1918, yang pada tahun 1927 dijadikan Asas Partai Nasional Indonesia, yang dibentuk Soekarno waktu itu. Juga pasal-pasal yang mengatur bidang ekonomi dan sosial pada UUD 1945, seperti pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, pasal 34 dan pasal 27 UUD 1945, sebelum masuk di dalam UUD 1945, sudah masuk program ekonomi sosial Partai Nasional Indonesia tahun 1927 yakni partai yang didirikan oleh Bung Karno.⁹⁶⁾

Dengan uraian di atas lengkaplah kiranya untuk menjawab pertanyaan di muka, yakni, “Apakah yang melatar belakangi kemampuan dan kemauan bertindak dari pribadi Soekarno yang terlibat di dalam proses ditetapkannya Maklumat wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan perjanjian Linggarjati waktu itu?

HATTA

Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit tinggi dari keluarga Haji Mohamad Jamil dan Siti Soleha. Kakek Hatta adalah Syekh Arsyad seorang guru agama yang terkenal. Kakek dari ibunya adalah Ilyas Bagindo Marah seorang pedagang. Hatta adalah anak ke II dari keluarga Haji Mohamad Jamil. Kakaknya seorang perempuan bernama Rafi'ah. Semula kedua orang tuanya memberi nama Mohammad Atahunar, artinya harum. Sehari-hari dipanggil Atta, lama-lama namanya berubah menjadi Hatta lengkapnya Mohammad Hatta. Hatta umur 7 bulan ayahnya meninggal dunia. Hatta belum mengenal ayah kandungnya ibunya kemudian menikah lagi dengan Mas Agus Haji Ning seorang pedagang dari Palembang. Ayah tirinya itu sudah lama saling hubungan dagang dengan kakeknya

⁹⁶⁾ Lampiran I, *Hasil Penelitian Studi Dokumen*, (dokumen no. 10), halaman 31.

Ilyas Bagindo Marah. Dari perkawinan ibunya diperoleh empat anak semuanya perempuan.

Hatta kecil adalah anak yang pendiam. Semua saudaranya perempuan, maka itu ia tidak pandai bersenda gurau sesama anak-anak. Ia lebih banyak tersenyum, senyumannya yang berarti, karena ia pandai menyembunyikan perasaannya. Hatta kecil adalah anak yang serius sekali ia bicara kata-katanya selalu mempunyai arti, tidak suka bicara basa-basi, tidak suka menyinggung perasaan orang lain, karena Hatta sendiri tidak mau disinggung perasaannya oleh orang lain. Kakek dan neneknya selalu berusaha agar Hatta menjadi anak yang berhasil dikemudian hari. Hatta adalah satu-satunya cucu laki-laki dalam keluarganya.

Pada suatu hari Hatta terlambat pulang karena asyik bermain sepak bola dengan teman-temannya, neneknya menganggap hal itu sebagai suatu kesalahan. Hatta dihukum oleh neneknya disuruh berdiri di bawah sebuah pohon jambu. Kemudian tanah di bawahnya diberi garis yang melingkar, Hatta tidak boleh keluar dari lingkaran. Setelah sore hari (Magrib), pamannya datang, dan diajak pulang Hatta menolak. Ia mau pulang setelah dibebaskan oleh neneknya.⁹⁷⁾

Masa depan Hatta tidak hanya diatur oleh keluarga pihak ibunya, tapi juga kakek pihak ayahnya yang dipanggil oleh Hatta ayak Gaek, Syekh Arsyad, dan kakek Hatta dari pihak ibunya Ilyas Bagindo Marah yang dipanggil oleh Hatta Pak Gaek. Baru umur ± 5 tahun pak Gaeknya ingin memasukkan Hatta ke sekolah rakyat, tidak diterima, karena belum cukup umur. Kemudian dimasukkan sekolah swasta "Lederboer", hanya enam bulan disitu, setelah umurnya cukup lalu dimasukkan sekolah Rakyat, satu kelas dengan Rafi'ah kakaknya. Setelah disitu 3 tahun, dipindah ke sekolah Belanda Eurapese Lagere School (ELS). Hatta lulus dari ELS pada tahun 1916 di Padang ia ingin masuk HBS (*Hogere Burger School*), tapi di Sumatera Barat tidak ada HBS. Kemudian masuk MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang semenjak di MULO Padang ini Hatta mulai mengenal paham kebangsaan. Hatta mengetahui nasib bangsanya yang menderita karena dijajah Belanda, hati kecilnya berontak ingin membebaskan bangsanya dari penjajahan.

⁹⁷⁾ Sjahbuddin Mangandaralam, *Apa dan Siapa Bung Hatta*, Penerbit: PT. Rasda Jaya Putra, Jakarta, 1988, halaman 6

Pada tgl 9 Desember 1917 di Jakarta didirikan "*Jong Sumatranen Bond*" diketuai oleh Nasir Datuk Pamoncak, lulusan HBS di Jakarta. Dia pulang ke Padang mengadakan rapat dengan para pelajar MULO di Padang, Hatta ikut dalam rapat itu. Nasir Datuk Pamoncak di dalam pidatonya menyatakan: "Bahwa sekarang ini kita hidup dalam masa kebingungan Asia, yang telah digemakan oleh kemenangan Jepang terhadap Rusia, Cina menghapuskan dinasti Manchu dan mendirikan Republik, hal itu berpengaruh di Indonesia, dengan didirikannya Budi Utomo di susul berdirinya organisasi Pemuda "*Jong Java*", dan kita mendirikan "*Jong Sumatranen Bond*" demikian Nasir. Hal ini menambah wawasan Hatta terhadap paham kebangsaan.

Sebulan kemudian, datanglah Abdul Muis di Kota Padang, dengan mengadakan pertemuan dengan para pelajar MULO dan Hatta turut serta.

Abdul Muis adalah tokoh Sjarikat Islam di Jakarta. Setelah lulus dari MULO, Hatta meneruskan sekolah di Jakarta. Ia masuk *Sekolah Dagang* sesuai dengan harapan pak Gaek-nya. Ia masuk di Prius Hendrik School (PHS). Ia mondok di rumah pamannya Ayub Rais, seorang pengusaha yang berhasil. Hatta dianggap sebagai anak yang sangat cerdas. Ayub Rais sering memberinya buku-buku.

Hatta menyadari, betapa buruknya sistem pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini berkaitan dengan *Insiden Cimareme*. Waktu itu kekurangan beras, di Cimareme sebuah desa dekat Garut, seorang bernama Haji Hasan tidak mau menjual beras keluar desanya, karena di desa itu sendiri kekurangan beras. Belanda mengirim pasukan ke Desa Cimareme dan Haji Hasan ditembak mati. Peristiwa-peristiwa sosial dan politik demikian itu menimbulkan sikap hidup pada pemuda Hatta, menurut pendapatnya bahwa rakyat Indonesia selalu dirugikan oleh kaum penjajah.

Pada tahun 1921 pemuda Hatta lulus dari PHS di Jakarta. Atas anjuran gurunya De Koch, Hatta meneruskan studinya ke negeri Belanda. Ia masuk "*Handels Hoge School*" di Rotterdam. *Handels Hoge School* ini kalau sekarang adalah Sekolah Tinggi Ekonomi. Sebagai mahasiswa, Hatta memasuki organisasi *Indische Vereniging* (Perkumpulan Indonesia), diubah menjadi *Indonesische Vereniging*, Perkumpulan Indonesia. Dengan berubahnya nama organisasi ini, nama majalahnya, *Hindia Poetra* juga diubah menjadi *Indonesia*

Merdeka. Perkumpulan ini memakai dasar pergerakan non-kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Belanda, dan mendasarkan perjuangan dengan kekuatan sendiri. Pada tahun 1925 Hatta mengikuti kuliah doktoral jurusan ekonomi. Kemudian ia belajar pula pada Ilmu Hukum Konstitusi.

Perhimpunan Indonesia makin bertambah kesadarannya, bahwa masalah Kemerdekaan Nasional merupakan masalah kekuatan. Pada tahun 1926 Hatta terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Dalam pidatonya Hatta menyatakan: “bahwa pemecahan terakhir pertentangan antara kepentingan nasional dengan imperialisme Barat akan terletak di wilayah Pasifik”. Kegiatan Hatta amat banyak. Ia merupakan ketua Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang sangat produktif. Nama Hatta menjadi buah bibir di kalangan pergerakan nasional di tanah air. Pada tahun 1926 Hatta dikejutkan oleh berita dari tanah air bahwa PKI mengadakan pemberontakan, yang dapat ditumpas oleh Belanda dalam waktu satu minggu saja. Menurut Hatta, tindakan PKI itu adalah bodoh, tindakan itu hanya akan merugikan perjuangan nasional. Pada tahun 1926 itu Hatta mengusulkan agar didirikan partai baru di tanah air. Partai ini harus merupakan kembaran (copy) dari Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini akan meningkatkan kampanya politik menuju Indonesia Merdeka di luar negeri. Pada tanggal 10-15 Februari 1927 Perhimpunan Indonesia diundang ke kongres di Brussel (Belgia) bertemakan “Liga menentang imperialisme dan penindasan kolonial”. Hatta terpilih sebagai anggota Presidium, demikian juga Semaun dari “Syarikat Rakyat”. Dalam kongres itu Hatta mendapat kesempatan berkenalan dengan pemimpin-pemimpin organisasi buruh Eropa seperti Giorg Ledebour (76 tahun), Edo Fimmen, juga pemimpin Asia-Afrika seperti Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Hafiz Ramadhan Bey dari Mesir dan Senghor dari Afrika (ayah Presiden Senegal). Waktu Hatta sibuk menghadapi ujian ilmu hukum Konstitusi pada bulan September 1927, diminta oleh “Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan” untuk memberikan kuliah umum di Gland dekat Danau Geneva di Swiss. Sewaktu Hatta berbicara tentang Indonesia dan persoalan kemerdekaannya, banyak orang-orang Belanda yang mendengarkan, yang hadir disitu. Begitu sampai ke negeri Belanda pada tanggal 23 September 1927, Hatta ditangkap polisi Belanda kemudian dipenjara di Casuari-straat,

bersama Nazir Datuk Pamoncak, Ali Sastroamidjojo dan Abdul Madjid Djodoningrat.

Mr. Duys dan Mr. Mobach pengacara Belanda dan juga anggota Twede Kamer (Parleman Belanda) mendatangi Hatta, menawarkan akan menjadi pembela Hatta dan kawan-kawannya. Hatta setuju. Hatta dan kawan-kawannya ditahan 5½ bulan. Dalam tahanan, Hatta terus belajar menghadapi ujian. Hatta diadili oleh pengadilan Den Haag pada tanggal 8 Maret 1928. Sidang berikutnya adalah tanggal 9 Maret 1928. Kemudian tanggal 22 Maret 1928. Hatta dan kawan-kawan dibela oleh Mr. Duys, Mr. Mobach dan Nona Mr. Weber, semuanya membela dengan tanpa dibayar. Hatta dan kawan-kawannya diputuskan bebas. Setelah itu Hatta sibuk mendidik kader-kader Perhimpunan Indonesia yang bakal menggantikan Hatta, mereka yang dicalonkan sebagai pengganti Hatta ialah Abdullah Sjukur, Roesbandi dan Sutan Sjahrir.

Menurut Hatta, mendidik kader-kader adalah penting, karena kader pimpinan nasional kelak tidak hanya harus mampu memahami aspirasi rakyat, melainkan juga harus memiliki kepandaian diplomasi. Mereka harus melakukan hubungan internasional diantara bangsa-bangsa, yaitu dengan bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa lain, khususnya bangsa-bangsa Asia Afrika.⁹⁸⁾

Pada akhir tahun 1929 Hatta mundur sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, untuk kemudian meneruskan studinya yang terbengkalai itu. Pada bulan Juli 1932 Hatta berhasil mencapai gelar sarjana ekonomi dengan titel Drs. Waktu itu Hatta adalah satu-satunya sarjana ekonomi di Indonesia. Hatta pulang ke Indonesia. Hatta tinggal di Negeri Belanda selama 11 tahun.

Sesampainya di Indonesia Hatta masuk “Pendidikan Nasional Indonesia” atau PNI-Pendidikan pimpinan Sjahrir. Kemudian pimpinan PNI-Pendidikan diserahkan Hatta.

Walaupun Hatta adalah seorang sarjana ekonomi, tetapi tetap tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Ia konsekuen sebagai penganut sikap non-kooperator. Padahal kalau Hatta mau bekerja dalam pemerintahan akan menduduki jabatan yang penting. Pada tanggal 1 Agustus 1933 Soekarno ditangkap lagi, semua partai non-

⁹⁸⁾ Sjahbuddin Mangandaralam, *Apa dan Siapa Bung Hatta*, Penerbit: PT. Rasda Jaya Putra, Jakarta, 1988, halaman 25

kooperatif dilarang. Menghadapi larangan ini PNI-Pendidikan pimpinan Hatta menerbitkan majalah "Daulat Rakyat" sebagai sarana informasi kepada rakyat. Soekarno kemudian dibuang ke Flores. Sesudah itu Hatta dengan kawan-kawannya mendapat gilirannya. Hatta ditangkap polisi Belanda bersama dengan Sutan Sjahrir, Bondon, Maskun, Burhanuddin, Suka dan Murtowo. Mereka ditahan di penjara Glodog, Sutan Sjahrir di Cipinang. Pada permulaan Januari 1935 mereka dibuang ke Boven Digul (Tanah Merah).⁹⁹⁾ Kepala pemerintahan Hindia Belanda di sana Kapten van Langen menyatakan kepada Hatta: "Tuan tidak akan dipulangkan ke daerah asal untuk selama-lamanya kecuali tuan bersedia bekerja sama dengan pemerintah". Atas ungkapan itu Hatta menjawab: "Jika saya mau bekerja untuk pemerintah, mengapa tidak ketika saya sedang berada di Jakarta. Pasti saya menjadi orang besar dengan gaji yang besar pula, tidak perlu saya datang kemari menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari". van Langen menjawab: "Jika tuan menjadi orang buangan seperti ini, tuan akan berada di sini untuk selama-lamanya".

vanLangen kemudian diganti oleh Kapten Wiarda. Suatu hari dalam bulan Desember 1935 Wiarda menyampaikan telegram bahwa Hatta dan Sjahrir dipindah ke Banda Neira, pulau kecil sebelah selatan Ambon. Di sana Hatta dan Sjahrir mendapat tunjangan (*toelage*) seperti halnya Soekarno di Endeh.¹⁰⁰⁾

Pada tanggal 1 Februari 1942 Hatta dan Sjahrir dipindah ke Sukabumi. Jepang menyerbu Jawa. G.G. Tjarda van Starckenborg menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 di Kalijati. Pada tanggal 21 Maret 1942 Kolonel Ogura datang ke Sukabumi menemui Hatta dan Sjahrir, akan diajak kerjasama. Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta, dipertemukan dengan Mayor Jendral Harada. Oleh Harada, Hatta diminta kerjasama dengan Jepang. Hatta tidak mau, hanya bersedia menjadi penasihat saja, Harada setuju. Hatta diberi kantor sendiri sebagai penasihat Jepang.

⁹⁹⁾ Sjahbuddin Mangandaralam, *Apa dan Siapa Bung Hatta*, Penerbit: PT. Rasda Jaya Putra, Jakarta, 1988, halaman 39.

¹⁰⁰⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo . . . halaman 122.

Bulan Juli 1942 Soekarno tiba di Jakarta dari Padang. Hatta menyambutnya di pelabuhan Pasar ikan Jakarta. Hatta berbisik bertanya kepada Soekarno: “Bagaimana pendapat Bung Karno mengenai pendudukan ini?” Bung Karno menjawab berbisik: “Jepang tidak akan lama di sini. Mereka akan kalah dan kita akan hancurkan mereka, inipun kalau kita tidak menentang secara terang-terangan.”

Di Jakarta, Soekarno disediakan rumah besar oleh Jepang. Malam hari Soekarno ke rumah Hatta untuk mengadakan pertemuan membahas taktik perjuangan menghadapi pendudukan Jepang. Soekarno menyatakan kepada Hatta: “Sekarang kita menghadapi tugas yang jauh lebih besar, perbedaan kita mengenai soal-soal partai dan soal-soal strategi masa lalu, sekarang tidak ada. Pada waktu sekarang kita satu. Dan kita bersatu dalam perjuangan bersama”. Jawab Hatta: “Saya setuju”. Keduanya berjabat-tangan dan berjanji: “*Janji kita sebagai dwi-tunggal. Kita berjuang bersama-sama sampai tercapai kemerdekaan*”. Pembicaraan berikutnya diteruskan, hadir dalam pembicaraan itu Sutan Sjahrir. Akhirnya disepakati suatu strategi masa pendudukan, bahwa Hatta dan Soekarno bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Sjahrir memimpin perjuangan gerakan di bawah tanah. Di antara keduanya saling memberi informasi selama pendudukan Jepang itu secara rahasia.

Semasa pendudukan Jepang sampai proklamasi Kemerdekaan dan sesudahnya, Hatta bersama Soekarno sebagai “Dwitunggal” selalu bersama-sama berjuang, di dalam mencapai kemerdekaan dan waktu mempertahankan eksistensi negara Proklamasi. Pada tanggal 18-8-1945 Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden RI. Dalam bulan Oktober-Nopember 1945 Hatta merupakan tokoh sentral di dalam upaya menangkal hambatan perundingan, dengan mengubah bentuk pemerintahan Demokrasi Presidential dalam UUD 1945 menjadi Demokrasi Parleментар yang menganut multi partai sistem. Mengubah makna pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya. Semua itu dilakukan dengan maksud agar terbuka kemungkinan untuk mengadakan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB.

Ada penulis orang India (wartawan) PRS Mani¹⁰¹) menilai pribadi Hatta seperti di bawah ini. Hatta tidak banyak lagak, tidak pernah gelisah. Pada saat Hatta sangat

marah, hal itu tidak nampak dari luar. Ketegasan dan ketajaman otaknya membantu memberi penilaian yang tepat baik selama revolusi maupun pada waktu Republik masih bayi. Hatta-Soekarno yang dinamis merupakan tim yang ideal melengkapi satu sama lain. Diragukan apakah pemberontakan komunis September 1948 bisa ditumpas oleh pemimpin selain Hatta. Hatta benar-benar *luwes* sewaktu berurusan dengan Belanda, tapi berhasil cemerlang. Demikianlah penilaian PRS. Mani, dan peneliti sependapat dengan penilaian itu.

SJAHRIR

Sjahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di kota Gadang (Bukit Tinggi). Nama lengkapnya adalah Sutan Sjahrir. Sutan di depan namanya menunjukkan bahwa ia dari keluarga terpandang dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Namun jiwa Sjahrir tidak feodalistis bahkan ia berjiwa kerakyatan. Sebutan Bung menggambarkan bahwa ia adalah pemimpin yang akrab dengan rakyat. Ia adalah anak ke-8 dari Keluarga Mohammad Rasyad gelar Maha Raja Sutan dari Kota Gadang, terakhir menjabat hoofd djaksa (Jaksa Kepala) pada kantor Landraad (Pengadilan Negeri) di Medan. Sjahrir mula-mula sekolah di Medan di *Europene Lagere School* (ELS/Sekolah rendah Belanda), kemudian meneruskan ke MULO (SMP) juga di Medan. Tamat dari MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) Sjahrir melanjutkan sekolah di AMS (*Algemene Middelbare School*) di Bandung, Jawa Barat. Pada bulan-bulan pertama Sjahrir tidak begitu dikenal, dia mempunyai perawakan kecil, pakaian biasa-biasa saja. Namun kemudian Sjahrir menunjukkan kepandaiannya menjadi pusat perhatian guru-gurunya dan teman sekelasnya. Ia sangat senang belajar bahasa Latin, filsafat dari sejarah Yunani-Romawi yang dianggap sebagai sumber peradaban Barat. Ia menyukai sejarah sebagai modal dalam mengupas berbagai masalah, khususnya yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat internasional mengenai perkembangan kapitalisme dan kolonialisme. Pergaulan Sjahrir sangat luas tidak hanya kawan-kawan di AMS tapi juga para pemuda di luar AMS Bandung, teman akrabnya adalah Rusni Cuncun.

¹⁰¹⁾ PRS Manai, *The Story . . .*, halaman 48

Sjahrir getol mempelajari gerakan kaum buruh dari surat-surat kabar dan majalah-majalah, ia mulai cenderung ke paham sosialisme. Pada waktu senggang Sjahrir suka berjalan-jalan di sekitar kota Bandung melihat dari dekat kehidupan rakyat jelata. Ia senang membaca koran AID (*Algemene Indische Dagblad*) yang ditempel di depan kantor di jalan Braga Bandung. Sjahrir sering dipanggil gurunya untuk menterjemahkan pelajaran bahasa di depan kelas, bahasa Inggris, Jerman, Perancis maupun bahasa Latin. Ia sering bertanya di kelas tidak merasa takut atau pun rendah diri, bertanya kepada guru sejarah Dr. de Haan atau kepada guru bahasa Latin Nona Dr. Katwijk. Sebaliknya Sjahrir juga sering dipanggil oleh Dr. Bessem, kepala sekolah, karena Sjahrir terlalu banyak mengadakan kegiatan di luar sekolah melakukan kegiatan kebangsaan. Ia diberi nasihat-nasihat oleh kepala sekolah. Ia sering diundang pesta oleh pemuda-pemuda Belanda, nonik-nonik Belanda. Ia senang berdansa dan menyukai musik Barat. Ia suka main sepak bola dan main sandiwarra, perkumpulannya adalah: "Bandoeng Toneel Vereniging van Indonesische Studerender" disingkat Batovis. Perkumpulan ini sering main di gedung Concordia, sekarang gedung Merdeka. Sjahrirlah yang menyusun ceriteranya, dibantu oleh Ongko G. Ceriteranya bermaksud menggugah orang-orang Belanda mengenai nasib tanah air dan bangsa Indonesia.

Sjahrir mendirikan kelompok studi bernama "Patriae Scientiaequ" ("PSQ") yang artinya untuk tanah air dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1927 saat didirikan Perhimpunan Pemuda "Jong Java" Sjahrir aktif di dalamnya. Gerakan ini kemudian diganti nama "Pemuda Indonesia dan Putri Indonesia". Di dalam kegiatan inilah Sjahrir berkenalan dengan tokoh pergerakan yang lebih tua, Ir. Soekarno, Dr. Sanusi, Dr. Cipto, Ir. Anwari dan yang lain.

Pada tahun 1929 Sjahrir lulus dari AMS Bandung, kemudian meneruskan ke Fakultas Hukum di Amsterdam negeri Belanda.

Sesampainya di sana mencari hubungan dengan para mahasiswa Indonesia di sana. Sjahrir juga mencari hubungan dengan orang-orang sosialis di sana. Ia mengadakan perkenalan dengan pengurus: "Amsterdamse Sociaal Democratische Studenten Club". Ia adalah orang Indonesia yang mencari hubungan dengan mahasiswa sosialis di negeri Belanda.¹⁰² Di Negeri Belanda ada satu partai politik SDAP (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij*/Partai Buruh Sosial Demokrat) yang mempunyai gagasan politik mendukung

kemerdekaan Indonesia secara evolusi. SDAP ini selalu menentang praktek-praktek kolonialisme Belanda di Indonesia. Sjahrir sempat mengikuti diskusi oleh mahasiswa sosialis Belanda dan Indonesia, dalam diskusi itu mahasiswa Belanda dan Indonesia sama-sama berpendapat bahwa Hindia Belanda harus merdeka sekarang.

Sebagai mahasiswa Sjahrir berusaha merangkul kemanusiaan terutama rakyat jelata, paling tidak golongan buruh. Perasaan kerakyatan itu ditempa dalam diri pribadi Sjahrir, karena ia melihat kemiskinan rakyat di daerah Bandung utamanya di daerah pedesaan. Sistem kolonialisme dan imperialisme Belanda, menurut Sjahrir telah memerosotkan tingkat kehidupan rakyat Indonesia menjadi hanya sebenggol ($2\frac{1}{2}$ sen) sehari.¹⁰³⁾

Walaupun Sjahrir cenderung berpihak kepada kaum pekerja atau kelas buruh, ia bukan orang komunis, juga bukan seorang sosialis liberal seperti dianut orang-orang Eropa. Ide politik Sjahrir telah terbentuk berdasarkan cita-cita kemerdekaan dan kebebasan yang selalu mengupayakan pembebasan diri dari belenggu penjajahan. Sjahrir tidak setuju mencapai cita-cita kemerdekaan melalui sistem diktator proletariat.

Pada tahun 1931 Raad van justitie (semacam Mahkamah Agung) menghukum Ir. Soekarno dan tiga aktivis PNI yang lain, PNI dibubarkan. Sebagian kadernya mendirikan partai baru yakni Partai Indonesia (Partindo), yang lain mendirikan Partai Pendidikan Nasional atau PNI-Pendidikan.

Waktu itu Sjahrir pulang ke Indonesia akan membenahi PNI-Pendidikan tersebut. Pada tahun 1932 Sjahrir aktif dalam PNI-Pendidikan, membantu majalah Daulat Rakyat sebagaimana dianjurkan oleh Hatta.

Pada tahun 1932 kaum buruh Indonesia mengadakan kongres di Surabaya. Sjahrir memberi prasaran yang kemudian diterbitkan sebagai buku kecil "Serikat Rakyat" atas dasar prasaran itu Sjahrir dipilih sebagai Ketua Central Persatuan Buruh Indonesia yang berkedudukan di Surabaya.

¹⁰²⁾ Sjahbuddin Mangandaralam, *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir*, Penerbit: PT. Rasda Jaya Putra, Jakarta, 1987, halaman 14

¹⁰³⁾ Sjahbuddin Mangandaralam, *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir*, . . . , halaman 15.

Pada tahun 1933 Soekarno ditangkap lagi, kemudian dibuang ke Endeh. Pada bulan Agustus 1933 pemerintah Belanda melarang PNI-Pendidikan dan Partindo untuk mengadakan sidang-sidang. Pada tanggal 25 Februari 1934 pimpinan PNI-Pendidikan Jakarta ditangkap, antara lain Hatta, Sjahrir dan Bondan. Di Bandung yang ditangkap antara lain Wangsawijaya, Hamdani, Basri, Ahmadipura, Usman, Setiarato, Tisno, Wagiman, Karwani, Sorka, Murwoto dan Burhanuddin.

Pada tanggal 16 Nopember 1934 mereka dibuang ke Boven Digul (Tanah Merah). Sjahrir dan Hatta juga dibuang ke Boven Digul itu. Pada bulan Desember 1935 Sjahrir dan Hatta dipindah ke Banda Neira. Mulai di Banda Neira ini Sjahrir dan Hatta mendapat uang tunjangan (*toeslag*) seperti Soekarno di Endeh.¹⁰⁴⁾

Pada bulan Januari 1942 administrator Banda Neira menerima perintah telegram dari Batavia (Jakarta) yang isinya menyatakan bahwa Sjahrir dan Hatta dipindah ke Sukabumi. Pada tanggal 1 Februari 1942 kapal terbang Catalina datang menjemput Sjahrir dan Hatta dibawa ke Sukabumi. Pada 21 Maret 1942 Kolonel Jepang Ogura datang ke Sukabumi, menyatakan bahwa Jendral Harada, Pimpinan Pemerintah Militer, ingin bertemu dengan Sjahrir dan Hatta. Katanya: "Mari kita ke Jakarta besok". Sewaktu Soekarno tiba di Jakarta dari Padang, malam harinya mengadakan perundingan dengan Sjahrir dan Hatta untuk menentukan strategi perjuangan dalam masa pendudukan. Hasil pembicaraan itu bahwa Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Sjahrir memimpin gerakan di bawah tanah, namun kedua pihak akan saling memberi informasi secara rahasia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diadakan Proklamasi. Usaha proklamasi itu tidak ahanya hasil dari gerakan Sjahrir di bawah tanah saja, bukan sebagai hasil dari Soekarno-Hatta yang berjuang dengan bekerja sama dengan Jepang saja, tetapi adalah hasil keduanya.¹⁰⁵⁾

Tentara sekutu yang menangani tentara Jepang di Indonesia adalah tentara Inggris. Sjahrir mempunyai hubungan baik dengan orang-orang sosialis Inggris maupun dengan orang-orang Belanda. Orang-orang Inggris tidak mengerti bentuk pemerintahan Indonesia

¹⁰⁴⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo . . ., halaman 122.

waktu itu. Mengapa di Indonesia tidak ada Perdana Menteri seperti di Inggris. Orang-orang itu mengira bahwa pemerintahan Indonesia itu buatan Jepang. Hal ini disampaikan kepada Sjahrir. Atas teguran orang-orang Inggris itu, maka Sjahrir bermaksud mengubah bentuk pemerintahan waktu itu, dimulai dengan memprakarsai petisi KNIP yang ditujukan kepada Presiden RI bahwa sebelum dibentuk MPR, agar KNIP ini diberi kekuasaan legislatif.¹⁰⁶⁾ Kehendak Sjahrir ini sama dengan kehendak Soekarno-Hatta yang juga bermaksud akan mengubah bentuk Pemerintahan waktu itu. Sebab Belanda memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menuduh Pemerintah RI adalah fasis. Maka dari itu “petisi” Sjahrir ini langsung disetujui oleh Soekarno-Hatta, hanya saja Hatta diminta oleh Soekarno untuk memimpin Sidang KNIP tanggal 16-10-1945 itu. Sebagai hasil Sidang KNIP tanggal 16-10-1945 itu, ditetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 yang isinya, sebelum MPR dibentuk maka KNIP disertai tugas legislatif dan turut serta menetapkan GBHN, dan tugas KNIP sehari-hari dilakukan oleh BPKNIP.

Sebagai maklumat politik pelaksanaannya maka ditetapkan Maklumat Pemerintah RI tanggal 1-11-1945 tentang sikap Pemerintah RI terhadap masyarakat nasional dan internasional. Malahan Maklumat Politik ini yang menyusun adalah Soekarno.¹⁰⁷⁾ Kemudian disusul dengan ditetapkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3-11-1945 tentang pembentukan partai politik, sesudah itu pada tanggal 11-11-1945 BPKNIP mengumumkan bahwa mulai hari itu para menteri bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat dalam hal ini KNIP. Maka berubahlah bentuk pemerintah RI menjadi demokrasi parlementer yang menganut asas multi partai sistem. Dengan demikian tuduhan Belanda bahwa pemerintah RI itu fasis, menjadi tidak relevan lagi. Dengan demikian dapat dibuka kemungkinan untuk mengadakan perundingan dengan Belanda.

¹⁰⁵⁾ Sjahbuddin Mangandaralam, *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir*, . . . , halaman 40

¹⁰⁶⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Dr Roeslan Abdulgani . . . , halaman 67.

¹⁰⁷⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Dr Roeslan Abdulgani . . . , halaman 77.

Perubahan ini memang dikehendaki oleh Soekarno-Hatta, kebetulan dimotori oleh Sjahrir. Soekarno-Hatta juga menyetujui keinginan Sjahrir untuk menjadi Perdana Menteri. Pada tanggal 14 November 1945 Pemerintah RI diubah menjadi sistem demokrasi parlementer yang menganut sistem multi partai, Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Soekarno-Hatta memafaatkan Sjahrir untuk melaksanakan perundingan antara Indonesia-Belanda. Karena Sjahrir non-colaborator dan mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Inggris maupun dengan orang-orang Belanda. Pada periode akhir tahun 1946 Sjahrir aktif menangani perundingan Indonesia-Belanda, sampai terjadinya perundingan Linggarjati 25-3-1947.

Sebagaimana diketahui bahwa strategi dasar Soekarno-Hatta dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Itulah sebabnya Soekarno-Hatta mengajak Sjahrir turut aktif di dalam pemerintahan RI, sebagai Perdana Menteri. Sjahrir akan ditugasi oleh Soekarno-Hatta melaksanakan perundingan dengan Belanda. Namun demikian mengenai soal-soal penting, Sjahrir tidak bisa memutuskan sendiri, jadi mesti dengan Soekarno-Hatta pemecahannya.¹⁰⁸⁾ Jadi mulai pra-perundingan Indonesia-Belanda sampai terlaksananya perundingan Linggarjati peran Sjahrir sangat penting, sebagai petugas perundingan, hanya mengenai soal-soal prinsipal Sjahrir mesti minta pendapat Soekarno-Hatta.

Ada penulis orang India PRS Manai¹⁰⁹⁾ menilai pribadi Sjahrir seperti di bawah ini:

Sjahrir dikenal sebagai diplomat kecil yang tangguh, karena tubuhnya kecil tapi tampan. Di dalam ketegangan yang terjadi waktu itu Sjahrir pernah diculik oleh Tan Malaka, tetapi diselamatkan oleh TKR dan dikembalikan ke Yogyakarta. Sjahrir merupakan seorang yang cakap, memiliki pandangan internasional yang lebih luas. Sjahrir seorang sosialis yang tangguh tidak dogmatis tapi pragmatis. Sjahrir sangat moderat namun keras kepala. Wajah Sjahrir tidak pernah mengkerut walaupun mengalami penderitaan. Sjahrir tidak

¹⁰⁸⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Dr Roeslan Abdulgani . . . , halaman 75.

¹⁰⁹⁾ PRS Manai, *The Story* . . . , halaman 48.

menunjukkan kebencian terhadap Belanda. Sjahrir adalah tokoh besar intelektual tapi sebagai politikus Sjahrir kurang mampu menghadapi massa, dan tidak setuju kalau ada pemujaan massa yang berlebihan. Sjahrir perenung dan analis. Tidak pandai perpidato. Demikian penilaian PRS Mani, dan peneliti sependapat dengan penilaian itu. Itulah latar belakang pribadi tiga tokoh penting dari pihak Indonesia.

Penyelesaian Persengketaan Indonesia-Belanda menjadi berlarut-larut pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena latar belakang pribadi tokoh-tokoh dari pihak Belanda yang terlibat di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda itu, juga memegang peran yang penting. Maka dari itu peneliti menyajikan latar belakang pribadi tokoh-tokoh dari pihak Belanda, Schermerhorn, Max van Pall, F.X. de Boer dan van Mook di bawah ini:

SCHERMERHORN¹¹⁰⁾

Schermerhorn, sewaktu RI diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 menjabat PM Belanda sampai dengan 17 Mei 1946. Schermerhorn termasuk tokoh Belanda yang agak bersimpati dengan Partai Buruh, politik Schermerhorn agak moderat. Tetapi karena didampingi tokoh-tokoh golongan kanan, maka Schermerhorn tidak setuju adanya Indonesia merdeka. Schermerhorn didampingi oleh menteri jajahan Logeman, di Indonesia oleh Letnan G.G. van Mook. Setelah berhenti menjadi Perdana Menteri bulan Mei 1946, Schermerhorn diangkat menjadi Ketua Komisi Jendral, dan memimpin di dalam mengadakan perundingan dengan delegasi RI pada September-Oktober 1946. Pada tanggal 15 Nopember 1946 Schermerhorn turut memberi paraf persetujuan Linggarjati. Karena Komisi Jendral tidak diberi wewenang untuk menandatangani, maka persetujuan Linggarjati hanya diparaf. Demikianlah sekilas latar belakang pribadi Schermerhorn.

Max van Poll¹¹¹⁾

Max van Poll, adalah tokoh partai Kathunolik Belanda golongan kanan, semasa

¹¹⁰⁾ Smit, *De Dekolonisatie . . .*, halaman 20.

¹¹¹⁾ Smit, *De Dekolonisatie . . .*, halaman 20.

revolusi Indonesia berlangsung tahun 1945-1949. van Poll tokoh Belanda yang tidak mau mengakui eksistensi negara RI, ingin menghancurkan Republik Indonesia dengan kekuatan militer. Pada bulan Mei 1946 diangkat sebagai anggota Komisi Jendral, dari partai Katahunolik, mendampingi Schermerhorn. Politik van Poll menghendaki penghancuran negara RI dalam tempo singkat, menghendaki terus menjajah Indonesia. Tidak mau mengakui eksistensi RI. van Poll turut memberi paraf persetujuan Linggarjati pada tanggal 15-11-1946. Tokoh dari *KVP (Katahunolik Volks Partij)*, sewaktu tentara Belanda mengadakan agresi I, van Poll juga mendukung gerakan itu. Di sisi lain Partai Buruh, *Partij van de Arbeid*, tidak mendukung gerakan agresi I itu. Demikianlah sekilas latar belakang pribadi Max van Poll.

F.X. de Boer¹¹²⁾

F.X. de Boer adalah seorang pengusaha yang tangguh. Politik beliau tidak berbeda jauh dengan M. van Poll. de Boer menghendaki dilestarikannya penjajahan atas Indonesia. Menghendaki, menghancurkan RI dengan kekuatan militer. Pada bulan Mei 1946 diangkat menjadi Komisi Jendral, ikut berperan di dalam perundingan Indonesia Belanda Oktober 1946, di dalam mencapai persetujuan Linggarjati. de Boer menghendaki agar negara RI dihancurkan melalui kekuatan militer dalam tempo singkat. Meneruskan penjajahan di Indonesia. de Boer turut memberi paraf pada persetujuan Linggarjati pada tanggal 15-11-1946, bersama Schermerhorn, van Poll dan van Mook. Demikianlah sekilas latar belakang pribadi F.X. de Boer.

van Mook¹¹³⁾

van Mook, adalah tokoh yang berperan membentuk negara kecil-kecil di Indonesia. Pembentukannya dimulai dari Indonesia Timur. van Mook adalah orang yang selalu berhadapan dengan AFNEI, SEAC. Tanggal 10-10-1945 van Mook berunding dengan

¹¹²⁾ Smit, *De Dekolonisatie . . .*, halaman 20.

¹¹³⁾ Smit, *De Dekolonisatie . . .*, halaman 16.

AFNEI, hasilnya, Inggris mengakui kekuasaan Belanda atas Indonesia, tetapi dengan harapan Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. van Mook menjadi perantara antara Hindia Belanda dengan pemerintah Belanda di Nederland. Tekanan AFNEI agar Belanda berunding dengan Indonesia disampaikan kepada PM Schermerhorn tetapi selalu ditolak oleh PM Schermerhorn. van Mook mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar dibentuk Indonesia Serikat. Atas usul van Mook, maka pemerintah Belanda menyatakan, selama masa peralihan akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang bersekutu dengan kerajaan Belanda. Pernyataan demikian adalah jasa dari van Mook. Pada 10 Juli 1946 van Mook memimpin konferensi Malino, dihadiri oleh Dayak Besar, Kalimantan, Belitung dan Riau.¹¹⁴⁾ Kemudian membentuk Indonesia Timur. Karena peran van Mook inilah, maka di dalam perundingan Linggarjati, Belanda tidak mengakui keberadaan negara RI tetapi akan mengakui kedaulatan negara RIS. van Mook juga turut serta dalam Komisi Jendral, karena jabatannya. Turut serta dalam proses perundingan Linggarjati. Demikianlah sekilas latar belakang pribadi van Mook.

Demikianlah sekilas tentang latar belakang pribadi para tokoh yang memprakarsai dan berperan di dalam proses penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan proses perjanjian Linggarjati. Kalau diamati secara cermat latar belakang pribadi yang memprakarsai dan berperan dalam proses perjanjian Linggarjati, sebagaimana diuraikan di atas, khususnya dari pihak Indonesia, yakni Soekarno, Hatta dan Sjahrir, para tokoh tersebut ternyata bukan tokoh yang sembarangan, Soekarno, Hatta, Sjahrir sejak usia muda selalu berupaya agar Indonesia merdeka segera terwujud, Soekarno, Hatta, Sjahrir utamanya Soekarno mempunyai pandangan jauh kedepan yang sangat tajam. Pada diri Soekarno selalu ada dorongan untuk selalu berjuang menumbangkan imperialisme Belanda dalam kesempatan apapun yang dihadapi. Pada jaman Jepang Soekarno, Hatta, Sjahrir bekerja bersama-sama memanfaatkan situasi pendudukan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno, Hatta dan Sjahrir utamanya Soekarno adalah agen yang mampu memproduksi struktur baru, memberi norma-norma baru sebagai rambu-rambu yang harus

¹¹⁴⁾ Smit, *De Dekolonisatie . . .*, halaman 26.

selalu ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia untuk keselamatan bangsa dan negara. Sebagai contohnya Soekarno telah mewariskan ideologi Pancasila dan UUD 1945 untuk bangsa Indonesia. Di dalam masa kemerdekaan, Soekarno, Hatta, Sjahrir bekerja bersama-sama di dalam mempertahankan eksistensi Negara Proklamasi. Menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan di bawah pengawasan DK PBB. Sjahrir adalah petugas dalam perundingan yang sangat penting. Soekarno-Hatta mengetahui bahwa Sjahrir non-kolaborator dan mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Inggris dan orang-orang Belanda, maka Sjahrir diajak ikut serta dalam pemerintahan malahan menjabat Perdana Menteri pertama di Indonesia.

Di sisi lain Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, dengan memanfaatkan pasal IV aturan Peralihan UUD 1945, menuduh Negara RI sebagai negara fasis. Soekarno-Hatta yang mempunyai pandangan yang sangat tajam bermaksud akan mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD itu dan mengangkat Sjahrir sebagai P.M. yang akan ditugasi melaksanakan perundingan dengan Belanda. Hambatan perundingan di atasi dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945.

Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945

Isi Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 seperti di bawah ini:

Presiden Republik Indonesia, setelah mendengar pembicaraan Komite Nasional Indonesia Pusat tentang usul supaya sebelum MPR, DPR dibentuk, kekuasaannya yang hingga sekarang (waktu itu) dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat itu, sehari-harinya sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat;

Menimbang bahwa di dalam keadaan yang segenting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;

Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham Kedaulatan Rakyat;

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Indonesia Pusat.

Jakarta, 16 Oktober 1945

Wakil Presiden Republik Indonesia,

Mochammad Hatta¹¹⁵⁾

Sebagai Maklumat Politik pelaksanaannya ditetapkan Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1-11-1945. Maklumat tersebut disusun oleh Soekarno.¹¹⁶⁾ Hanya saja Hatta yang diminta oleh Soekarno untuk melaksanakannya. Maklumat ini agak panjang, namun isi garis besarnya seperti di bawah ini:

Maklumat Politik tanggal 1-11-1945 ini disebut Maklumat tentang *haluan dari Politik Pemerintah Republik Indonesia*. Maklumat ini berisikan sikap politik pemerintah RI ke luar dan ke dalam negeri.

Keluar negeri: karena masyarakat internasional waktu itu mulai melihat memperhatikan negara dan bangsa Indonesia yang baru saja berdiri, baru saja merdeka, maka pemerintah RI merasa perlu menyatakan sikap negara dan bangsa Indonesia ke luar, bahwa bangsa Indonesia tidak membenci orang-orang asing, tidak membenci orang-orang Belanda, hanya berkehendak untuk dibiarkan merdeka mengatur rumah tangga sendiri, bangsa Indonesia tidak ingin menggunakan kekerasan di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau di Indonesia ada kekerasan, hal itu semata-mata dari orang-orang Belanda yang akan mengembalikan kekuasaannya menjajah Indonesia. Kalau dibiarkan merdeka, kekayaan

¹¹⁵⁾ *Berita Indonesia* Th. I No. 2 halaman 10 kolom 3. Lihat pula, Koesnodiprodo, *Himpunan . . .*, halaman 58.

¹¹⁶⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Dr Roeslan Abdoelgani . . ., halaman 77.

yang melimpah di negara Indonesia masih mungkin dimanfaatkan oleh bangsa lain termasuk oleh bangsa Belanda. Tetapi semuanya itu hanya akan dapat dimulai manakala persengketaan Indonesia-Belanda diselesaikan dengan pengakuan hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri sesuai prinsip pasal II Atlantic Charter, yakni pengakuan terhadap negara dan pemerintah RI yang telah dipilih. Dengan pengakuan kemerdekaan itu Indonesia akan menanggung apa yang patut ditanggung menurut kedudukan Indonesia. Segala hutang Belanda sebelum penyerahan Jepang dan patut menjadi tanggungjawab Indonesia diakui sebagai hutang Indonesia. Segala milik bangsa asing selain yang diperlukan oleh negara RI, dikembalikan kepada yang berhak, serta yang diambil oleh negara akan diganti kerugian yang seadil-adilnya.

Negara RI akan mengusahakan persahabatan dengan negara-negara diseluruh dunia. Bangsa Indonesia akan menjadi anggota United Nations, menyetujui benar-benar Piagam PBB.

Ke dalam negeri: di dalam negeri Indonesia akan melaksanakan sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, sedikit hari lagi (waktu itu/direncanakan 1 Januari 1946) akan diadak pemilihan umum, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia, cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman masyarakat negara Republik Indonesia.

Jakarta, tanggal 1 November 1945

Wakil Presiden,

Mochammad Hatta¹¹⁷⁾

Sebagai maklumat politik berikutnya ditetapkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Partai Politik.

Berhubung dengan usul BPKNIP kepada pemerintah supaya memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan parati-partai politik, dengan pengertian bahwa partai-parati politik itu hendaknya memperkuat perjuangan mempertahankan

¹¹⁷⁾ *Berita Republik Indonesia* Th. I No. 1 halaman 2. Lihat pula, Koesnodiprodo, *Himpunan . . .*, halaman 70.

kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, maka pemerintah menegaskan pendiriannya, bahwa:

- Pemerintah mengakui berdirinya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itu dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran faham yang ada dalam masyarakat.
- Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota-anggota DPR tanggal 1 Januari 1946.

Jakarta, 3 November 1945

Wakil Presiden,

Mochammad Hatta¹⁰⁸⁾

Sebagai maklumat politik pelaksanaan yang ke III, berupaya Pengumuman BPKNIP No. 5 tanggal 11 November 1945, tentang *pertanggung jawab para menteri* sebagai berikut:

Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan Pemerintah Republik Indonesia maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang telah diubah, BPKNIP dalam rapatnya telah membicarakan pertanggung jawab para menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Komite Nasional Indonesia Pusat.

Bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat pasal-pasal baik yang mewajibkan maupun yang melarang para menteri bertanggung jawab. Pada pihak lain pertanggung jawab para menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat adalah sesuatu jalan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat. Maka berdasar alasan tersebut BPKNIP mengusulkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanya pertanggung jawab para menteri dalam susunan Pemerintah. Presiden menerima baik usul Badan Pekerja itu, sehingga dengan persetujuan itu, semenjak

¹¹⁸⁾ *Berita Republik Indonesia* Th. I No. 1 halaman 3 Lihat pula, Koesnodiprodo, *Himpunan . . .*, halaman 76.

hari itu dimulai adanya pertanggung jawab para menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 11 November 1945

Ketua BPKNIP

Sutan Sjahrir

Penulis,

Soewandi¹¹⁹⁾

Memperhatikan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya itu, bahwa:

- KNIP berubah status, dari badan pembantu Presiden menjadi Badan Legislatif dan turut serta menetapkan garis-garis besar Haluan Negara.
- Pemerintah RI diubah dari demokrasi Presidensial UUD 1945 menjadi demokrasi parlementer dengan menganut multi partai sistem.
- Dibentuk partai politik yang banyak guna menunjang agar bentuk pemerintahan demokrasi parlementer multi partai sistem dapat terlaksana.

Pertanyaan yang timbul adalah apa sasaran yang ingin dicapai Pemerintah RI dalam menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya yang isinya seperti di atas itu? Apakah ada tujuan yang lebih penting guna mempertahankan eksistensi negara RI dengan ditetapkannya maklumat politik yang demikian itu? sebagai jawab dari pertanyaan di atas dapat disajikan penjelasan di bawah ini.

Di muka telah dijelaskan bahwa persengketaan Indonesia-Belanda tidak bisa dihindarkan. Belanda ingin menyelesaikan persengketaan itu melalui peperangan. Sedangkan Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta berkehendak menyelesaikan persengketaan itu melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Pemerintah

¹¹⁹⁾ *Berita Republik Indonesia* Th. I No. 1 halaman 4. Lihat pula, Koesnodiprodo, *Himpunan . . .*, halaman 139.

Belanda terus ditekan oleh Inggris dan Amerika agar mengadakan perundingan dengan perihal Indonesia-Belanda itu. Namun Belanda mula-mula tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, dengan memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, menuduh bahwa RI adalah negara fasis, Belanda tidak mau berunding dengan negara fasis.

Maka dari itu Pemerintah RI menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya itu. Untuk mengubah bentuk pemerintahan Indonesia menjadi demokrasi parlementer dengan menganut multi partai sistem. Pada tanggal 14-11-1945 dibentuklah kabinet parlementer multi partai sistem, Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Dengan berubahnya bentuk pemerintahan demikian, maka tuduhan Belanda bahwa RI adalah negara fasis, menjadi tidak relevan lagi. Jadi sasaran ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya itu, adalah untuk menghilangkan tuduhan Belanda bahwa RI adalah negara fasis. Tujuan lebih lanjut adalah untuk membuka kemungkinan untuk berunding dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB.

*Kaitan antara konteks ekonomi politik, peran para tokoh dan
Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945*

Secara epistemologis Soekarno-Hatta sebagai pemimpin bangsa Indonesia dan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, di dalam upayanya menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu melihat konteks politik-ekonomi domestik ada kecenderungan lemah. Di sisi lain mereka melihat peluang-peluang yang terdapat pada konteks politik-ekonomi internasional yang bisa dimanfaatkan di dalam upaya menyelesaikan persengketaan itu dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Proklamasi. Dengan melihat situasi yang demikian itu Soekarno-Hatta, berkehendak menyelesaikan persengketaan itu melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB.

Di sisi lain pihak Belanda memanfaatkan pasal IV aturan peralihan UUD 1945 menuduh RI sebagai negara fasis, Soekarno-Hatta adalah kolaborator, karenanya tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta. Hal ini merupakan hambatan bagi strategi Soekarno-Hatta tersebut di atas. Soekarno-Hatta adalah tokoh yang berpandangan jauh ke depan,

tokoh yang sejak muda selalu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang mampu melihat peluang-peluang yang ada dan berani bertindak memanfaatkan peluang itu, di dalam perjuangan kearah kemerdekaan Indonesia dan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Proklamasi. Di dalam menghadapi hambatan perundingan demikian, tokoh Soekarno, Hatta dan Sjahrir mengambil tindakan tepat yakni dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dalam upayanya membuka kemungkinan untuk dapat mengadakan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Dan ternyata dengan ditetapkan Maklumat No. X itu dapat diadakan perundingan Indonesia-Belanda yakni perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati.

Dengan melihat uraian Bab II di atas itu dapat disimpulkan seperti di bawah ini:

Negara Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Negara baru ini langsung berhadapan dengan musuh. Yakni pemerintah Belanda yang berkehendak meneruskan penjajahan atas Indonesia.

Soekarno-Hatta, Proklamator negara RI berhasil menghimpun rakyat Indonesia dan mendukungnya di dalam upayanya mempertahankan eksistensi negara proklamasi, waktu itu. Semenjak umur 22 tahun Soekarno berusaha mendekati rakyat. Menurutny orang yang berhasil memimpin rakyat bukanlah dari orang yang berada di atas rakyat, melainkan orang yang bersama-sama dengan rakyat banyak. Pada tahun 1922 Soekarno pernah pidato di alun-alun Bandung, menyatakan bahwa partai politik yang berjuang secara merendah, mohon petisi mereka disetujui pemerintah, itu tidak ada gunanya. Perjuangan hendaknya dengan mempersatukan rakyat, hal ini merupakan kekuatan untuk melawan kekuatan imperialisme Belanda. Mulai saat itu nama Soekarno sangat terkenal. Rakyat kecil sangat mencintai Soekarno. Pada tahun 1927 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berasaskan Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi yang berketuhanan YME. Asas ini hakekatnya adalah Pancasila. Di dalam rapat-rapat PNI ini Soekarno sangat dikenal oleh rakyat, di Bali, Jawa, Sumatra dan Wilayah lain. Pada tahun 1928 Soekarno berhasil mengikrarkan, satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Ikrar ini dituangkan juga di dalam pernyataan kongres organisasi pemuda di Jakarta, terkenal

dengan pernyataan Sumpah Pemuda tahun 1928. Soekarno menganalisa “mengapa” perjuangan kemerdekaan selalu gagal. Menurut Soekarno, hal itu disebabkan, karena perjuangan kemerdekaan itu dilaksanakan secara kedaerahan. Soekarno akan menggerakkan rakyat Indonesia dalam rangka membentuk kekuatan (*macht-vorming*), kekuatan ini nantinya secara nasional akan dipergunakan menumbangkan kekuasaan Belanda (*macht-aanwending*). Sebelum proklamasi Soekarno sudah dicintai oleh rakyat banyak. Rakyat yang tertindas oleh imperialisme Belanda. Itulah sebabnya sewaktu melaksanakan proklamasi bersama Hatta, mendapat dukungan dari seluruh Rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan seluruh rakyat berdiri di belakang Soekarno-Hatta untuk mempertahankan negara Proklamasi. Rakyat Indonesia semula tidak berniat berselisih dengan bangsa dan negara manapun. Ingin hidup sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia secara damai. Akan tetapi segera setelah NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*). Pemerintah sementara Hindia Belanda yang berkedudukan di Samarinda, mengadakan gerakan pembunuhan terhadap orang-orang Republik di beberapa daerah sampai di Jakarta, maka rakyat Indonesia serentak mengadakan satuan bersenjata. Berdirilah Barisan Keamanan Rakyat (BKR) yang dipelopori oleh bekas PETA dan HEIHO, juga muncul laskar-laskar Rakyat dalam jumlah yang banyak.

Setelah gerakan tentara Belanda diperkuat yang kemudian membonceng tentara Inggris memusuhi Indonesia, maka Rakyat Indonesia melawannya di mana-mana. BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Seluruh rakyat, baik yang berada dalam satuan-satuan TKR maupun yang berada pada laskar-laskar rakyat, dan yang berada ditempat kerja masing-masing berdiri di belakang Soekarno-Hatta di dalam menghadapi serangan-serangan dari pihak Belanda itu. Rakyat bersatu-padu di bawah pimpinan Soekarno-Hatta bertekad untuk mempertahankan negara proklamasi dengan segala kekuatan dan persenjataan yang ada.

Di sisi lain Belanda berusaha merebut kembali wilayah jajahannya melalui kekuatan militer dengan menuduh negara RI sebagai negara fasis. Makna dari tuduhan itu, bahwa Belanda ingin mengembalikan tanah jajahannya yakni Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia bersatu padu melawan gerakan Belanda itu. Meletusnya pertempuran-pertempuran antara

TKR, laskar-laskar, didukung oleh seluruh rakyat dengan pihak Belanda, dibebarepa kota besar, yang paling menonjol adalah peristiwa Surabaya, yang memuncak pada 10 Nopember 1945. Pertempuran Surabaya ini sangat dahsyat sampai menjadi perhatian DK PBB di London waktu itu.¹²⁰⁾

Dengan demikian persengketaan Indonesia Belanda tidak mungkin dapat dihindarkan. Permasalahan yang timbul kemudian, bagaimana cara penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda itu. Dari pihak Belanda ingin menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda itu melalui kekuatan militer, melalui peperangan, Belanda memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, dengan propaganda di Dunia Internasional bahwa persoalan Indonesia adalah persoalan dalam negeri Kerajaan Belanda. Persoalan Indonesia termasuk domestik jurisdiksi Kerajaan Belanda. DK PBB tidak perlu mencampuri persoalan Indonesia-Belanda itu. Demikianlah sikap Belanda waktu itu.

Dari pihak Indonesia, Soekarno Hatta melihat konteks ekonomi dan politik domestik cenderung merupakan kendala, cenderung lemah. Di sisi lain Soekarno-Hatta melihat peluang yang ada dalam konteks ekonomi-politik internasional. Maka dari itu di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda, para pemimpin Indonesia utamanya Soekarno-Hatta memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam konteks ekonomi-politik Internasional itu. Di dalam bidang politik, pihak Indonesia memanfaatkan peluang yang ada di Negara-negara Rimland, utamanya Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara besar itu sangat berpengaruh di DK PBB dan juga sangat berpengaruh atas Kerajaan Belanda. Karena Belanda mengharapkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Para pemimpin Indonesia mengharapkan, agar persengketaan Indonesia-Belanda mendapat perhatian dari dunia internasional, Utamanya DK PBB. Tujuan berikutnya mengharapkan agar DK PBB utamanya Amerika Serikat dan Inggris mendesak Pemerintah Belanda untuk bersedia berunding dengan pihak Indonesia. Untuk kemudian agar mendesak Pemerintah Belanda untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Pengakuan demikian terkandung arti bahwa Belanda melepaskan Indonesia kaitannya dengan pasal 1 Grondwet Belanda. Soekarno-

¹²⁰⁾ Lampiran I, *Hasil Penelitian Studi Dokumen*. (dokumen no. 17), halaman 41.

Hatta memanfaatkan Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, bahwa persengketaan yang timbul antara negara-negara diselesaikan dengan jalan damai melalui perundingan. Soekarno-Hatta meletakkan strategi dasar, bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dunia Internasional utamanya DK PBB.

Namun pihak Belanda tidak mau berunding dengan pemerintah RI, dengan Soekarno Hatta. Dengan memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, menuduh Pemerintah RI adalah fasis. Pemerintah Belanda tidak bersedia berunding dengan negara fasis. Hal ini merupakan penghambat strategi Soekarno-Hatta. Untuk mengatasi hal ini, Soekarno-Hatta ingin mengubah isi pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 itu, dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945. Sebagai Maklumat pelaksanaannya ditetapkan Maklumat Politik tanggal 1-11-1945 mengenai haluan, politik bangsa dan Pemerintah Indonesia. Malahan draft dari maklumat ini disusun oleh Soekarno.¹²¹⁾ Kemudian maklumat tanggal 3-11-1945 tentang partai politik dan pengumuman BPKNIP tanggal 11-11-1945 mengenai pertanggungjawab Menteri kepada badan perwakilan dalam hal ini KNIP.

Pada tanggal 14-11-1945 dibentuk Kabinet Parlemerter dengan multi partai sistem, Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Setelah bentuk pemerintahan RI diubah dan terus ditekan oleh AFNEI (Inggris) juga Amerika Serikat akhirnya Belanda bersedia berunding dalam Perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947. Persetujuan Linggarjati ini merupakan tahap awal yang sangat penting terhadap proses pengakuan kedaulatan Negara Indonesia oleh pemerintah Belanda tanggal 27 Desember 1949, yakni pengakuan kedaulatan atas negara RIS dimana pada 15 Agustus 1950 negara RIS ini dilebur menjadi negara Republik Indonesia Kesatuan, tidak lain adalah Negara RI.

¹²¹⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara*. Wawancara dengan Dr H. Roeslan Abdoelgani tanggal 15-1-1996 . . . halaman 77.

Sebagai simpulan dapatlah dikemukakan “Bahwa eksistensi Negara Republik Indonesia berhasil dipertahankan dengan kekuatan diplomasi (perundingan) yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat”. Atau dengan perkataan lain: “Bahwa eksistensi negara RI berhasil dipertahankan dengan kekuatan diplomasi yang didukung oleh kekuatan tritunggal (Pemerintah RI, Militer dan Rakyat)”.

BAB III
PERJANJIAN LINGGARJATI SEBAGAI DIPLOMASI
UNTUK MENDAPATKAN
PENGAKUAN INTERNASIONAL

BAB III

PERJANJIAN LINGGARJATI SEBAGAI DIPLOMASI UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN INTERNASIONAL

Pengantar

Di dalam Bab III ini peneliti akan menjawab permasalahan kedua dan ketiga dalam penelitian ini.

Permasalahan kedua: “Apakah makna (*meaning*) politik Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dan ketiga politik pelaksanaannya itu terhadap perjanjian Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati itu?”

Permasalahan ketiga: “Apakah makna (*meaning*) perjanjian Linggarjati terhadap prospek pengakuan kedaulatan terhadap negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda?”

Untuk menjawab permasalahan kedua yakni apakah makna Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 dan ketiga maklumat politik pelaksanaannya itu terhadap perjanjian Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati itu, peneliti berangkat dari kerangka dasar pemikiran yang menyatakan, bahwa kemunculan suatu peristiwa, seperti kemunculan Maklumat No. X itu dapat dipahami dari maksud atau makna peristiwa termaksud. Dalam hal ini maksud dan tujuan yang hendak dilihat ialah antara maksud dan tujuan peristiwa itu dengan perjanjian Linggarjati.

Apakah perundingan dan persetujuan Linggarjati itu merupakan tujuan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu? Atau apakah dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu dengan tujuan agar dapat diselenggarakan perundingan Linggarjati yang menghasilkan perjanjian Linggarjati itu? Hal ini akan dibahas dalam uraian berikutnya.

Dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dimungkinkan terlaksananya perjanjian Linggarjati. Ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu dengan tujuan agar terbuka kemungkinan perundingan Indonesia-Belanda. Perundingan itu terjadi di Linggarjati terkenal dengan nama “Perjanjian Linggarjati”, jadi

tujuan ditetapkannya "Maklumat No. X adalah untuk dapat dilaksanakan Perjanjian Linggarjati. Maklumat Wakil Presiden RI No. X adalah pembuka perundingan Indonesia-Belanda. Perundingan Linggarjati tidak bisa terlaksana tanpa didahului oleh penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu.

Kecuali hal tersebut, "tesis" yang hendak diuraikan di dalam bab ini, ialah: Perjanjian Linggarjati bagi Pemerintah Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan (*recognition*) dari dunia internasional utamanya PBB, (termasuk pengakuan oleh Pemerintah Belanda) terhadap eksistensi Negara Republik Indonesia.

Secara axiologis untuk menjawab permasalahan ketiga penelitian ini, yakni apakah makna perjanjian Linggarjati terhadap prospek pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda, peneliti menyatakan bahwa berpangkal dari "Perjanjian Linggarjati" persengketaan Indonesia Belanda dapat diselesaikan melalui perundingan lebih lanjut, yakni perjanjian Renville kemudian disusul dengan perjanjian yang diberi nama "Konferensi Meja-Bundar" (KMB), sebagai hasil KMB ini Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949.

Berkaitan dengan permasalahan kedua dikemukakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945 tidak diakui oleh Pemerintah Belanda, menurutnya seluruh Indonesia adalah wilayah Kerajaan Belanda berdasarkan pasal 1 Grondwet Belanda. Bahkan Belanda bermaksud akan menghancurkan negara RI melalui peperangan, melalui kekuatan senjata.

Di sisi lain bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta merasa berhak menentukan nasib sendiri sesuai prinsip Atlantik Charter, dan bertekad secara bersama-sama mempertahankan eksistensi negara Proklamasi.

Persengketaan Indonesia-Belanda tidak dapat dihindarkan. Menurut pihak Belanda penyelesaian persengketaan itu akan ditempuh melalui kekerasan senjata. Sedangkan menurut Soekarno-Hatta sebagai pemimpin bangsa Indonesia, penyelesaian persengketaan itu ditempuh melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Namun upaya perundingan itu terhalang oleh sikap Belanda, yang memanfaatkan

pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, menuduh bahwa negara RI adalah fasis, Belanda tidak mau berunding dengan negara fasis. Belanda juga memanfaatkan pendapat negara-negara di dunia waktu yang anti terhadap fasisme.

Soekarno, Hatta dan Sjahrir berkehendak menghapuskan penghalang upaya perundingan tersebut, dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya, dengan maksud akan mengubah bentuk pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 14-11-1945 dibentuk kabinet parlementer yang menganut multi-partai sistem. Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Dengan demikian tuduhan Belanda bahwa negara RI adalah fasis menjadi tidak relevan lagi.

Di sisi lain AFNEI (Inggris) tidak berhasil menjaga perdamaian di Indonesia karena terjadinya pertempuran yang terus berlangsung antara tentara Belanda dan TKR bersama rakyat Indonesia. Inggris khawatir kalau pertempuran di Indonesia tidak segera di atasi, nantinya akan menjalar ke Vasteland (Malaya, India, Pakistan yang waktu itu jajahan Inggris)¹²²⁾ maka dari itu Inggris menekan Belanda agar berunding dengan pihak Indonesia. Demikian pula Amerika Serikat khawatir kalau pertempuran di Indonesia terus berlangsung dimungkinkan masuknya tentara Uni Soviet (Heartland) ke Indonesia, hal demikian akan mengganggu stabilitas negara-negara Rimland. Maka dari itu Amerika Serikat juga menekan Belanda agar bersedia berunding dengan pihak Indonesia. Menghadapi tekanan itu Belanda terpaksa menurutinya. Belanda sangat membutuhkan bantuan dana keuangan dari Amerika Serikat, sedangkan alasan untuk tidak mau berunding sudah tidak ada lagi, karena RI menganut demokrasi parlementer dengan multi partai sistem jadi bukan negara fasis seperti dituduhkan oleh Belanda.

Oleh karena itu Belanda terpaksa menuruti desakan dari Inggris dan Amerika Serikat untuk berunding dengan pihak Indonesia. Faktor yang mempengaruhi Pemerintah Belanda terpaksa bersedia dengan RI (Soekarno-Hatta) adalah adanya tekanan dari Inggris dan Amerika Serikat, tapi itu saja belum cukup Belanda terpaksa bersedia berunding karena alasan untuk menolaknya tidak ada lagi, pemerintah RI sudah berubah menjadi

¹²²⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo . . . , halaman 118.

demokrasi parlementer dengan menganut multi sistem. Jadi faktor yang mempengaruhi Pemerintah Belanda terpaksa mau berunding adalah karena tekanan dari Inggris, Amerika Serikat ditunjang oleh Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 beserta ketiga maklumat politik pelaksanaannya itu. Maklumat Wakil Presiden RI No. X adalah pembuka perundingan Indonesia-Belanda.

Terjadilah perundingan Indonesia-Belanda bertempat di Linggarjati terkenal dengan perundingan Linggarjati. Dengan demikian terbukti bahwa Maklumat Wakil Presiden RI No. X adalah pembuka jalan perundingan Indonesia-Belanda. Strategi Soekarno-Hatta untuk mengadakan perundingan dengan Belanda berhasil, dibuktikan dengan adanya Perjanjian Linggarjati itu. Perundingan Linggarjati tidak mungkin terlaksana tanpa didahului ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu.

Berkaitan dengan permasalahan ketiga dikemukakan bahwa perjanjian Linggarjati merupakan pengakuan terhadap negara RI secara *de facto* oleh Pemerintah Belanda dan dunia internasional. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 persetujuan Linggarjati¹²³⁾ bahwa Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatera, daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat dan tentara Belanda dengan berangsur-angsur dengan kerja sama antara kedua pihak dimasukan ke dalam daerah RI paling lambat harus sudah selesai tanggal 1 Januari 1949 (pasal 12). Memperhatikan pasal 1 jo 12 Persetujuan Linggarjati itu Pemerintah Belanda telah mengakui kekuasaan *de facto* Pemerintah RI meliputi seluruh wilayah Indonesia. Jadi secara implisit Pemerintah Belanda telah mengakui negara RI secara *de facto*. Pemerintah RI juga menafsirkannya bahwa dengan ditandatanganinya Persetujuan Linggarjati Pemerintah Belanda telah mengakui negara RI secara *de facto*. Juga di dalam pasal 17 dinyatakan, bahwa apabila timbul persengketaan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan oleh para delegasi, hal itu akan diserahkan kepada keputusan arbitrage, kalau masih belum bisa terselesaikan, hal itu akan diserahkan kepada keputusan

¹²³⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, PT. Gunung Agung, 1986, halaman 5.

Ketua Dewan Peradilan Internasional, yang dimaksud adalah Mahkamah Internasional atau the International Court of Justice, suatu organ pokok PBB.

Padahal menurut pasal 34 ayat 1 Statute of Court¹²⁴⁾ (piagam mahkamah internasional) dinyatakan secara tegas bahwa yang bisa dihadapkan kepada mahkamah internasional (the International Court of Justice) hanyalah "Negara". (*only states may be parties in cases before the court*). Hal ini telah disetujui oleh Pemerintah Belanda. Bahwa Pemerintah Belanda telah setuju, membawa perselisihan yang timbul dihadapan mahkamah internasional, sudah terkandung arti bahwa secara implisit Belanda telah mengakui negara RI secara *de facto*.

Dengan ditanda tangannya "Persetujuan Linggarjati" Indonesia telah dilepaskan kaitannya dengan pasal 1 Grondwet oleh Pemerintah Belanda. Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 6 Persetujuan Linggarjati: "Bahwa Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI untuk membela peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada negeri Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk persekutuan Indonesia-Belanda, yang dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda yang meliputi negeri Belanda, Hindia Belanda (Indonesia) Suriname dan CuraÇoa *ditukar sifatnya* menjadi persekutuan itu, yang terdiri dari satu pihak adalah Kerajaan Belanda yang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan CuraÇao dan pihak lainnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) (Pasal 6 ayat 1).¹²⁵⁾ Dengan demikian Indonesia telah dilepaskan kaitannya dengan pasal 1 Grondwet.

Persetujuan Linggarjati itu bagi Pemerintah RI merupakan bagian dari upaya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional utamanya PBB dan Pemerintah Belanda terhadap eksistensi negara Proklamasi.

Perjanjian Linggarjati yang menghasilkan "Persetujuan Linggarjati" itu juga merupakan pelaksanaan strategi Soekarno-Hatta yang berkehendak menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Hal demikian sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, sesuai

¹²⁴⁾ Telders, *United Nation Textbook* . . . , halaman 212.

¹²⁵⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, . . . , halaman 6.

dengan kehendak SEAC dan AFNEI (Inggris) dan Amerika Serikat waktu itu. Perjanjian Linggarjati menghasilkan “Persetujuan Linggarjati”.

Persetujuan Linggarjati merupakan modal awal terhadap prospek “Pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda”. Persetujuan Linggarjati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Dengan ditandatanganinya Persetujuan Linggarjati masalah penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda ada peraturan internasional yang mengaturnya. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara dua negara, RI dan Kerajaan Belanda dalam lingkup masyarakat internasional. Sebagaimana Soebadio Sastrosatomo menyatakan: Persetujuan Linggarjati adalah *een volkenrechtelijke overeenkomst*.¹²⁶⁾ Dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati lahirlah norma-norma hukum internasional baru, yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yakni Indonesia dan Belanda.

Penafsiran Pemerintah Belanda terhadap persetujuan Linggarjati: Pemerintah Belanda menafsirkan “pengakuan” pada pasal 1 persetujuan Linggarjati dengan menggunakan teori pengakuan tiga tingkat. Pertanyaan yang timbul, mengapa Pemerintah Belanda menafsirkannya dengan teori pengakuan tiga tingkat (sebagaimana diajarkan oleh FranÇois)?¹²⁷⁾ Pihak Belanda sejak semula pada dasarnya tidak mau berunding dengan Indonesia, perundingan Linggarjati dilakukannya karena terpaksa. Karena terus ditekan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Mengenai penandatanganan Linggarjati itupun pada hakekatnya Belanda melakukannya dengan terpaksa. Sebab berunding dengan RI sudah terkandung arti Belanda mengakui eksistensi Negara RI padahal Belanda tidak mau mengakuinya.

Dengan menafsirkan teori tiga tingkat itu, Belanda mempunyai rencana, setelah Linggarjati ditandatangani Belanda akan menjepit wilayah RI dan pembentukan negara kecil-kecil diteruskan. Belanda mengadakan Agresi I pada 27-7-1947. Pada tahun 1948

¹²⁶⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo . . . , halaman 116.

¹²⁷⁾ FranÇois JPA, *Grondlijnen van het Volkenrecht* . . . , halaman 107

PKI memberontak di Madiun. Pemberontakan PKI berhasil ditumpas, tetapi setelah itu kondisi militer dan ekonomi Indonesia sangat lemah. Peluang emas ini dimanfaatkan oleh Belanda dengan mengadakan Agresi II tanggal 19-12-1948 dan Belanda berhasil menduduki Yogyakarta.

Maksud Belanda yang terakhir ialah agar wilayah RI semua diduduki oleh Belanda. Dengan demikian pemerintah RI tidak lagi mempunyai wilayah. Pemerintah RI menjadi tidak berfungsi karenanya. Dengan demikian pengakuan Belanda adanya kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra, dalam persetujuan Linggarjati menjadi hapus karena hukum. Itulah siasat Belanda di dalam mengoperasionalkan persetujuan Linggarjati dengan menggunakan teori pengakuan tiga tingkat. Menurut FranÇois ada tiga tingkat pengakuan terhadap negara baru, yakni pengakuan kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah (*erkenning als feitelijkke regering* atau *de facto regering*), pengakuan *de facto* dan *de iure*. FranÇois menyatakan bahwa pengakuan kekuasaan *de facto* pemerintah itu, tergantung pada faktor apakah pemerintah yang diakui itu masih bisa secara nyata melaksanakan kekuasaannya, apabila dalam kenyataan kemudian, pemerintah yang diakui itu tidak mampu melaksanakan kekuasaannya, misalnya wilayah negara baru itu seluruhnya diduduki oleh musuh, pemerintah tidak berfungsi, maka pengakuan demikian menjadi hapus karena hukum. Teori pengakuan demikian inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda di dalam mengoperasionalkan persetujuan Linggarjati.

Penafsiran Pemerintah RI terhadap Persetujuan Linggarjati. Pemerintah RI, Soekarno-Hatta menafsirkan “pengakuan” pada pasal 1 persetujuan Linggarjati dengan menggunakan teori pengakuan dua tingkat, ajaran J G Starke¹²⁸⁾ yakni teori pengakuan terhadap negara baru yang lazim berlaku di dalam hukum internasional, yakni pengakuan *de facto* dan *de iure*.

Hal ini terkandung arti, bahwa pengakuan oleh Belanda adanya kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra (pasal 1) ditafsirkan

¹²⁸⁾ Starke J.G., *An introduction . . .*, halaman 120

oleh pemerintah RI bahwa Belanda telah mengakui Negara RI secara *de facto*. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah RI merasa berhak untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain di dalam masyarakat internasional. Sebagai misalnya, segera setelah Linggarjati ditandatangani, Pemerintah RI mengirimkan pejabat-pejabatnya ke negara-negara Asia dan Afrika. Pada tahun 1947 Pemerintah RI mengirim wakil-wakilnya ke Inter-Asian-Relation Conference di New Delhi. Bahkan keputusan Conference itu antara lain akan membawa masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Pada 15 Maret 1947 Mesir mengakui negara RI. Pada 1 April 1947 Negara RI mendapat pengakuan dari Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan Konsul Jendral Amerika Walter Foste ditunjuk sebagai wakil Amerika Serikat di wilayah *de facto* Republik. Pada tanggal 10 Juni 1947 Negara RI mengadakan perjanjian dagang dengan Mesir.

Strategi Soekarno-Hatta mengadakan perjanjian dengan Belanda berhasil. Hal itu dibuktikan dengan adanya perjanjian Linggarjati. Pemerintah RI telah berhasil juga menafsirkan pengakuan dalam pasal 1 Linggarjati dengan menganut teori pengakuan dua tingkat.

Strategi Soekarno-Hatta menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di-bawah penawasan Dewan Keamanan PBB adalah sangat tepat. Bahkan untuk menghilangkan hambatan perundingan itu Soekarno-Hatta ber-sedia mengubah pasal-pasal UUD 1945, yakni dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tgl 16-10-1945. Dengan demikian terlaksanalah perundingan Indonesia-Belanda yaitu yang disebut perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati tidak mungkin terjadi tanpa ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu. Persetujuan Linggarjati merupakan pengakuan *de facto* oleh Belanda dan dunia internasional terhadap eksistensi negara RI.

Pemerintah Belanda sangat marah, melihat tindakan negara RI berhubungan langsung dengan luar negeri tersebut. Hal demikian bisa dimengerti, karena siasat Belanda dalam mengoperasionalkan persetujuan Linggarjati adalah mempunyai tujuan akhir untuk membatalkannya. Belanda pada dasarnya tidak mau berunding dengan Indonesia. Tetapi ternyata strategi Belanda itu tidak dibenarkan oleh masyarakat internasional utamanya

Dewan Keamanan PBB. Belanda berupaya agar persengketaan Indonesia-Belanda tidak dicampuri oleh Dewan Keamanan PBB. Lagipula ternyata Belanda kurang cermat memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa masalah Indonesia-Belanda adalah persoalan dalam negeri Kerajaan Belanda, termasuk domestic jurisdiction negeri Belanda. Memang benar demikian isi pasal 2 ayat 7 Piagam PBB pada alenia pertama, namun pada alenia terakhir menyatakan *but this principle shall not prejudice the application of enforcement measure under chapter VII*,¹²⁹⁾ yakni pasal 39 Piagam PBB¹³⁰⁾ yang menyatakan manakala di dalam melaksanakan prinsip “domestic jurisdiction” itu terjadi penggunaan kekerasan senjata dan menurut penilaian Dewan Keamanan PBB hal itu membahayakan perdamaian dunia, hal demikian menjadi kewenangan Dewan Keamanan PBB penanganan dan penyelesaiannya.

Di sisi lain Soekarno-Hatta mengadakan siasat agar persengketaan Indonesia Belanda ditangani oleh Dewan Keamanan PBB penyelesaiannya. Dan ternyata siasat Soekarno, Hatta dibenarkan oleh masyarakat internasional utamanya Dewan Keamanan PBB. Itulah sebabnya sewaktu Belanda mengadakan Agresi I tanggal 21-7-1947, Soekarno-Hatta merasa mendapatkan peluang emas. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Belanda dilawan oleh TKR dan Laskar Rakyat yang didukung rakyat, sehingga terjadilah pertempuran di seluruh front. Dengan perlawanan yang gigih itu terkandung arti, pihak Indonesia menetapkan strategi, pemanfaatan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB oleh Belanda itu didorong ke arah pasal 39 Piagam PBB. Strategi Soekarno-Hatta berhasil gemilang.

Tidak berapa lama Agresi I dilaksanakan, Dewan Keamanan PBB bersidang dan mengeluarkan resolusi dengan memerintahkan penghentian pertempuran dan minta agar segera diadakan perundingan antara Indonesia-Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara yaitu suatu badan internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB waktu itu. Mulai saat itu penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.

¹²⁹⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . ., halaman 23.

¹³⁰⁾ Telders, *United Nations Textbook* . . ., halaman 101.

Perundingan berikutnya adalah perundingan Renville, yang menghasilkan persetujuan Renville. Dalam operasionalnya persetujuan Renville tersendat-sendat sampai tahun 1948 belum tercapai kesepakatan. Pada tahun 1948 PKI berontak di Madiun, dapat ditumpas oleh RI dalam tempo singkat, yakni permulaan Desember 1948 PKI sudah hancur. Namun kondisi ekonomi dan militer negara RI sangat lemah. Belanda memanfaatkannya dengan mengadakan Agresi II pada tanggal 19 Desember 1948. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Dengan demikian strategi Belanda memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB dan Agresi II hancur berantakan. Strategi Belanda tersebut gagal karena setelah Belanda menduduki Yogyakarta, Dewan Keamanan PBB memerintahkan kepada Belanda agar mengembalikan Pemerintah RI ke Yogyakarta. Setelah itu diperintahkan agar Belanda mengadakan perundingan dengan Indonesia di bawah pengawasan UNCI (United Nations Commission for Indonesia), suatu badan internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB waktu itu.

Perundingan berikutnya dilaksanakan di negeri Belanda yang terkenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebagai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia yang diberi nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tanggal 15-8-1950 negara RIS ini oleh Soekarno-Hatta dilebur menjadi Negara Republik Indonesia Kesatuan, tidak lain adalah negara Proklamasi, Negara Republik Indonesia. Dengan demikian upaya diplomasi Pemerintah RI yang didukung oleh kekuatan tritunggal (Pemerintah, Militer dan seluruh Rakyat) berhasil dengan gemilang. Di sini terbukti bahwa penafsiran persetujuan Linggarjati dengan memanfaatkan teori tiga tingkat ternyata tidak dibenarkan oleh masyarakat internasional utamanya oleh Dewan Keamanan PBB. Peneliti berpendapat bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda dengan menggunakan teori pengakuan tiga tingkat tidak sesuai dengan kenyataan, atau teori pengakuan tiga tingkat tesis Francois adalah salah sedangkan penggunaan teori pengakuan dua tingkat tesis Starke adalah didukung oleh fakta, atau teori pengakuan dua tingkat tesis Starke adalah benar.

Berkaitan dengan permasalahan kedua dan ketiga akan didiskripsikan tentang: Maklumat Wakil Presiden RI No. X sebagai pembuka perundingan, proses isi dan penerapan

persetujuan Linggarjati, perjanjian Linggarjati dan pengakuan, pelaksanaan persetujuan Linggarjati dan prospek diperolehnya pengakuan kedaulatan negara Indonesia dari Pemerintah Belanda dan signifikansi perjanjian Linggarjati terhadap pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda.

Demikian sekedar pengantar Bab III dalam penelitian ini, pembahasan lebih detail akan disajikan dalam uraian berikut ini.

Maklumat Wakil Presiden RI No. X Tanggal 16-10-1945 Sebagai Pembuka Perundingan

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa tidak lama setelah negara RI diproklamasikan tanggal 17-8-1945 langsung berhadapan dengan musuh yakni Pemerintah Belanda yang ingin mempertahankan jajahannya ialah Indonesia. Belanda ingin menghancurkan negara RI. Persengketaan Indonesia-Belanda tidak terelakkan lagi. Dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Proklamasi, Soekarno-Hatta di dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda, melihat konteks politik ekonomi domestik cenderung lemah, Di sisi lain konteks ekonomi politik internasional ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan di dalam perjuangan itu. Maka dari itu Soekarno-Hatta meletakkan strategi dasar penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain Pemerintah Belanda dalam upaya menghancurkan negara RI, memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menuduh Pemerintah RI adalah fasis, maka dari itu Belanda tidak mau berunding dengan RI dengan Soekarno-Hatta.

Sikap Belanda demikian itu merupakan hambatan strategi dasar dari Soekarno-Hatta, dan menghambat perundingan. Di dalam operasionalnya Soekarno-Hatta melaksanakan diplomasi dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perang dingin, dalam hal ini memanfaatkan kekuatan negara-negara Amerika Serikat dan Inggris, negara Rimland. Di dalam perang dingin baik kubu Heartland (komunisme) maupun Rimland (kapitalisme) ingin menarik Indonesia di dalam pengaruhnya. Amerika Serikat (Rimland) ingin menarik Indonesia guna memperkuat kubu Rimland. Itulah sebabnya Soekarno-

Hatta memanfaatkan kekuatan-kekuatan dari Amerika Serikat dan Inggris, dengan maksud agar negara besar itu menggunakan pengaruhnya menekan Pemerintah Belanda untuk mau berunding dengan Indonesia untuk kemudian mengakui kedaulatan negara Indonesia. Amerika Serikat dan Inggris selalu menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Namun dengan dalih bahwa negara RI adalah fasis, Belanda selalu menolak tekanan itu. Itulah sebabnya maka Pemerintah RI menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X dan ketiga maklumat politik pelaksanaannya itu dengan maksud untuk mengubah bentuk pemerintah RI menjadi demokrasi parlementer dengan multi partai sistem, dengan demikian tuduhan Belanda bahwa RI adalah fasis menjadi tidak relevan, sehingga Pemerintah Belanda tidak ada alasan lagi untuk menolak desakan Amerika Serikat dan Inggris untuk berunding Indonesia. Dengan Maklumat Wakil Presiden RI No. X saja belum mampu mempengaruhi Belanda untuk terpaksa berunding dengan Indonesia. Tekanan dari Amerika Serikat dan Inggris memang merupakan faktor utama, tetapi itu saja belum cukup. Pemerintah Belanda terpaksa mau berunding dengan Indonesia setelah didesak oleh Amerika Serikat dan Inggris dan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X dengan tiga maklumat politik pelaksanaannya itu. Yang mempengaruhi Pemerintah Belanda terpaksa bersedia berunding dengan Indonesia adalah adanya tekanan dari Amerika Serikat, Inggris dan ditunjang dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya itu.

Jadi Maklumat Wakil Presiden RI No. X adalah "*pembuka perundingan*".

Proses Isi dan Penerapan Perjanjian Linggarjati

Secara axiologis ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dan adanya tekanan dari Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat, Pemerintah Belanda terpaksa mau berunding dengan Indonesia. Terjadilah perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947.

Mengenai proses berlangsungnya perjanjian Linggarjati disajikan pembahasan di bawah ini.

Perang Asia Pasifik sebagai bagian dari Perang Dunia II berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945 yakni setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada hari itu. Tentara Jepang yang di Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada semangat untuk bertempur, Tentara Sekutu yang menangani tentara Jepang di Indonesia belum datang. Di Indonesia terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Bangsa Indonesia yang sudah lama mencita-citakan kemerdekaan, dengan memanfaatkan peluang Atlantic Charter dan vacuum of power itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17-8-1945. Bangsa Indonesia menyambut gembira proklamasi itu dan bertekad akan mempertahankan negara proklamasi itu, manakala ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Di sisi lain Pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu di Australia, menyatakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda masih eksis walaupun waktu itu berada di Australia. Belanda tidak mengakui negara proklamasi, ingin menghancurkannya melalui kekuatan militer sesingkat-singkatnya.

Oleh karenanya persengketaan Indonesia Belanda tidak mungkin dielakkan. Negara RI yang masih sangat muda itu langsung berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan Belanda yang berkehendak menghancurkan dengan kekuatan militer. Soekarno-Hatta sebagai kepala negara dan sebagai pemimpin bangsa Indonesia, berkehendak menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda melalui diplomasi, melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Soekarno-Hatta melihat konteks ekonomi politik domestik ada tendensi lemah, Di sisi lain konteks politik ekonomi internasional terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan di dalam menyelamatkan eksistensi negara Proklamasi. Konteks politik ekonomi internasional termaksud utamanya peluang-peluang yang terdapat pada Dewan Keamanan PBB. Itulah sebabnya Soekarno-Hatta di dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda waktu itu, meletakkan strategi dasar melalui perundingan dengan Belanda dengan pengawasan Dewan Keamanan PBB, dan menyesuaikan dengan rambu-rambu hukum internasional yang tersirat di dalam pasal-pasal penting Piagam PBB. Langkah apapun ditempuh guna memungkinkan terbukanya perundingan itu.

Akan tetapi strategi Soekarno itu terhambat oleh sikap Belanda, tidak mengakui keberadaan negara RI dan tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta. Bahkan ada rencana dari van der Plas waktu itu akan minta tolong Christison Komandan AFNEI (Inggris) untuk menangkap Soekarno-Hatta, karena menurutnya, Soekarno-Hatta adalah penjahat perang, keduanya kolaborator dengan Jepang (ini menurut pandangan Belanda). Rencana ini diketahui para pemimpin Indonesia waktu itu. Ada usaha-usaha bagaimana kalau hal itu benar-benar terjadi, siapa yang bakal menggantikan Soekarno-Hatta, sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Atas fikiran Achmad Soebardjo dibuatlah suatu testamen, dalam testamen itu yang bakal mengganti Soekarno-Hatta adalah Tan Malaka. Hal ini diketahui oleh Hatta. Hatta menanyakan, mengapa Tan Malaka? mengapa Sjahrir tidak dimasukan?. Kemudian Sjahrir dimasukan ke dalam testamen. Timbul pertanyaan dari Hatta, mengapa semuanya orang Minangkabau? Lalu ditambah dua orang lagi, yakni Wongsonegoro dan Iwa Koesoemasoemantri. Yang masuk dalam testamen adalah Tan Malaka, Sjahrir, Wongsonegoro dan Iwa Koesoemasoemantri. Sjahrir ragu, dan mengatakan: "Kita orang empat ini belum pernah ketemu, apa mungkin menggantikan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden" Sjahrir akhirnya menolak. Menurut Sjahrir, Soekarno adalah Republik Indonesia, dan Republik Indonesia adalah Soekarno.¹³¹⁾ Keinginan Sjahrir waktu itu ialah akan mengubah bentuk pemerintahan dalam UUD 1945 dari demokrasi Presidensial menjadi demokrasi parlementair, tetapi harus merubah UUD 1945, padahal waktu itu belum ada MPR. Sjahrir juga ingin menjadi Perdana Menteri. Kemudian timbul fikiran Sjahrir dan teman-temannya; "KNIP saja dijadikan MPR". Hal ini disetujui. Kemudian Sjahrir, Sakirman, Soebadio dan Soepeno mengadakan petisi di KNIP. Keinginan Sjahrir akan mengubah bentuk pemerintahan itu sebenarnya karena ada tekanan dari orang-orang AFNEI (Inggris), didesak agar di Indonesia ini ada perdana menteri seperti di Inggris. Orang Inggris ini menduga bahwa bentuk pemerintahan Indonesia ini buatan Jepang.¹³²⁾

¹³¹⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomotanggal 9 Maret 1946 di Jakarta, halaman 106-109.

¹³²⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak DR H. Roeslan Abdoelgani pada tanggal 15-1-1996 di Hotel Elmi Surabaya, halaman 70.

Pada tanggal 9 Oktober 1945 Sjahrir mempelopori membuat petisi KNIP yang ditandatangani oleh lima puluh anggota KNIP. Isi petisi itu ialah, mohon dipertimbangkan oleh Presiden bahwa sebelum dibentuk MPR, agar KNIP ini diberi kekuasaan Legislatif.

Sikap Belanda yang tidak mengakui negara RI dan tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, disertai upaya-upaya mengadakan propaganda di dunia Internasional, bahwa alasan mengapa Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, karena di mata Belanda Soekarno-Hatta adalah kolaborator, penjahat perang, dan negara RI itu adalah fasis. Hal ini bisa dilihat pada pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, disana terdapat adanya sentralisasi kekuasaan negara ditangan Presiden. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, satu partai. Dengan dua hal itu jelas bahwa negara yang diproklamasikan Soekarno-Hatta itu adalah fasis. Pemerintah Belanda berkewajiban menghancurkan fasisme yang timbul di wilayah Kerajaan Belanda, yakni Hindia Belanda. Demikian pendapat Pemerintah Belanda terhadap Republik Indonesia. Makna dari semua tuduhan Belanda di atas itu, ialah Belanda ingin melanjutkan penjajahan atas Indonesia. Belanda memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal ini ada kelemahannya dan dimanfaatkan oleh Belanda, menuduh negara RI adalah fasis. Hal ini merupakan hambatan strategi Soekarno-Hatta di dalam upaya menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB, dalam rangka mempertahankan eksistensi negara RI. Soekarno-Hatta merencanakan mengubah isi pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, dengan maksud agar tuduhan Belanda itu menjadi tidak relevan. Soekarno-Hatta juga akan mengubah bentuk pemerintahan RI dari demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementair yang menganut multi partai sistem.¹³³⁾ Itulah sebabnya, pada waktu Sjahrir mengajukan petisi tersebut, langsung disetujuinya. Petisi itu dibicarakan di dalam sidang KNIP tanggal 16 Oktober 1945 di Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh Wakil Presiden Moch. Hatta, tetapi Soekarno sudah menyetujui kebijakan yang akan diambil oleh Hatta.¹³⁴⁾ Di dalam

¹³³⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak DR H. Roeslan Abdoelgani . . . , halaman 67, 58.

¹³⁴⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak DR H. Roeslan Abdoelgani . . . , halaman 78.

sidang itu Hatta menyetujui petisi dari KNIP itu, untuk itu ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 yang isinya: “Bahwa sebelum dibentuk MPR berdasarkan UUD 1945, maka KNIP disertai tugas legislatif dan turut serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kegiatan KNIP sehari-hari dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP atau BPKNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP.”

Sebagai Maklumat pelaksanaannya maka pada tanggal 1 November 1945 ditetapkan Maklumat Politik Pemerintah RI, berisikan penjelasan ke dunia internasional, mengenai sikap dan tujuan negara RI bahkan draft maklumat tanggal 1-11-1945 itu disusun oleh Soekarno.¹³⁵⁾ Kemudian tanggal 3-11-1945 ditetapkan Maklumat Politik Pemerintah, tentang pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Pada tanggal 11-11-1945 dikeluarkan pengumuman BPKNIP No 5 tahun 1945 tentang pertanggung jawab para Menteri kepada badan perwakilan rakyat dalam hal ini KNIP. Maka berubahlah bentuk pemerintahan RI dari demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementair yang menganut multi-partai sistem. Dengan demikian, tuduhan Belanda bahwa negara RI adalah fasis, menjadi tidak relevan karenanya. Belanda mulai memperhatikan desakan Inggris dan Amerika Serikat agar bersedia berunding dengan Indonesia.

Presiden juga menyetujui keinginan Sjahrir untuk menjadi Perdana Menteri. Soekarno menyatakan kepada Hatta, agar Sjahrir dan orang sosialis turut serta di dalam pemerintahan. Sjahrir mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Belanda juga dengan orang-orang Inggris. Sjahrir non-kolaborator. Maksud Soekarno Sjahrir nantinya akan ditugasi melaksanakan perundingan dengan Belanda.

Fase-fase Perundingan antara Indonesia-Belanda

Di dalam rangka menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda, para pemimpin Indonesia Soekarno-Hatta meletakkan strategi dasar bahwa penyelesaian itu melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Belanda mula-

¹³⁵⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak DR H. Roeslan Abdoelgani . . . , halaman 77.

mula tidak mau berunding dengan RI dengan Soekarno-Hatta, namun terus diupayakan agar strategi dasar termaksud dapat dilaksanakan. Segala jalan yang memungkinkan terlaksananya perundingan ditempuh oleh para pemimpin Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebagai akibatnya pelaksanaan perundingan Linggarjati melalui fase-fase yang cukup panjang. Tentara Inggris yang menangani tentara Jepang di Indonesia, AFNEI, terus mendesak kepada Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Demikian pula Amerika Serikat juga mendesaknya, tetapi Belanda mula-mula tetap tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta.

Pada bulan November 1945 AFNEI (Inggris) mempertemukan van Mook dengan Menteri Penerangan RI Amir Sjarifudin di Jakarta, agar mereka mengadakan perundingan. Tetapi begitu keduanya bertemu, Inggris pergi meninggalkan mereka, van Mook dan Amir Sjarifudin tidak berbicara apa-apa, tidak berunding. Namun peristiwa tersebut diketahui oleh wartawan dan ditulis di sebuah surat kabar. Tersiar berita bahwa Belanda berunding dengan Indonesia. Waktu Pemerintah Belanda mengetahui kabar itu, sangat marah. Menamakan peristiwa itu sebagai: "de week der schande" suatu minggu yang hina, yang memalukan.¹³⁶⁾

Pada tanggal 16 November 1945 van Mook mengundang pemerintah RI untuk mengadakan perundingan tidak resmi. Hal ini diketahui oleh Logeman, pada tanggal 3 Desember 1945 Minister van Kolonien Logeman menyatakan bahwa Pemerintah Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, tetapi bersedia bertukar pikiran dengan Perdana Menteri Sutan Sjahrir¹³⁷⁾ Inilah pernyataan pertama dari Pemerintah Belanda bahwa mereka bersedia berunding dengan Republik Indonesia. Setelah bentuk pemerintah Indonesia dirubah menjadi sistem demokrasi parlementer yang menganut multi partai sistem, sehingga tuduhan Belanda bahwa negara RI adalah fasis menjadi tidak relevan, rupanya pemerintah Belanda mulai menyadari bahwa tekanan Inggris dan Amerika Serikat

¹³⁶⁾ Koenen M.J. en Endepol, *Verklarend-Hand-woordenboek der Nederlandse- taal*. Penerbit: J.B. Volters Uitgevers maatschappij, Groningen, 1942, halaman 898.

¹³⁷⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, PT. Gunung Agung, 1986, halaman 28.

perlu diperhatikan. Logeman mulai bersedia bertukar pikiran dengan Sjahrir. Pada Maret 1946 van Mook berunding dengan P.M. Sutan Sjahrir, hasil perundingan itu oleh van Mook dibawa ke P.M. Belanda Schermerhorn, tetapi beliau tidak berani memajukannya ke parlemen Belanda (Staten Generaal), karena Staten Generaal ini adalah Staten Generaal tahun 1937, baru tanggal 17 Mei 1946 Staten Generaal ini akan diperbaharui. Waktu itu Pemerintah Belanda selalu tidak mengakui, (mendesavoueer) hasil pertemuan-pertemuan van Mook dengan pihak Republik Indonesia.¹³⁸⁾ Pada tanggal 8 Maret 1946 Pemerintah Belanda mengadakan perundingan dengan RI di Negeri Belanda. Di dalam perundingan itu A. Clark Kerr dari Inggris menengahi perundingan. Delegasi Indonesia diketuai oleh Soewandi. Perundingan diadakan pada tanggal 23 April 1946 terkenal dengan nama "Konferensi Hoge Veluwe".¹³⁹⁾ Perundingan ini tidak ada hasilnya apa-apa, karena delegasi Indonesia diperlakukan sebagai utusan dari tanah jajahan, tidak diakui sebagai delegasi negara RI. Maka dari itu Soewandi terus pulang ke Indonesia tidak mau lagi diajak berunding dengan cara demikian itu.

Pada tanggal 17 Mei 1946 Staten Generaal, parlemen Belanda mulai dibenahi. Mulai hari itu Staten Generaal baru itu mulai berfungsi. Dibentuk kabinet baru di Negeri Belanda, yakni Kabinet Beel dengan Minister van Kolonien (Menteri Jajahan), Jonkman. Kabinet Beel mulai menyadari bahwa desakan Inggris dan Amerika Serikat agar Belanda berunding dengan Republik Indonesia perlu diperhatikan. Karena simpati negara-negara di masyarakat Internasional, kepada Indonesia semakin meluas. Republik Indonesia selalu mentaati pasal-pasal Piagam PBB.

Pemerintah Belanda khawatir, kalau kapal-kapal Belanda terus-menerus diboikot di Amerika Serikat, di Australia dan di lain-lain negara. Negeri Belanda sangat memerlukan bantuan keuangan dari Amerika Serikat. Maka dari itu pada bulan Juli 1946 Kabinet

¹³⁸⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo. . . , halaman 108.

¹³⁹⁾ Smit C., *De Dekolonialisatie van Indonesie*. Terjememahan Redaksi P.A., "Dekolonialisasi Indonesia". Penerbit: Daya Sarana, Jakarta, tahun 1986, halaman 16.

Beel membentuk badan kenegaraan yang disebut “Komisi Jendral” yang diketuai oleh Schermerhorn, mantan P.M. Belanda. Komisi Jendral ini akan ditugasi mengadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 14 September 1946 Komisi Jendral datang di Jakarta dan akan memulai perundingan.

Perundingan Indonesia Belanda Linggarjati

Yang mendesak agar Belanda berunding dengan Indonesia adalah Inggris, Lord Louis Mountbatten, Komandan SEAC (*South East Asia Command*) yang waktu itu berkedudukan di India.

Lord Louis Mountbatten khawatir kalau revolusi Indonesia nantinya menjalar ke *vaste land*, Malaysia, Burma, India, yang waktu itu masih menjadi jajahan Inggris. Hal demikian akan memudahkan masuknya Komunisme ke Asia Tenggara. Belanda dipaksa oleh Lord Louis Mountbatten untuk berunding dengan Indonesia. Maka dari itu ada orang yang mengatakan bahwa “*de dekolonisator voor Indonesie wordt Louis Mountbatten*”, dekolonisator untuk Indonesia adalah Lord Louis Mountbatten. Mauntbatten berpendapat, sebelum Inggris meninggalkan Indonesia, supaya sudah ada persetujuan antara Indonesia-Belanda. Belanda dipaksa untuk berunding dengan sutan Sjahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia. Belanda semula menolak berunding dengan Soekarno Hatta, tetapi Belanda bersedia berunding dengan PM Sjahrir.¹⁴⁰⁾

Amerika Serikat juga menekan Belanda untuk berunding dengan Republik Indonesia. Amerika Serikat khawatir kalau di Indonesia terus-menerus ada pertempuran, dimungkinkan masuknya, komunisme ke Indonesia, masuknya kekuatan Heartland (Uni Soviet) ke Indonesia wilayah Rimland, wilayah yang dipengaruhi Amerika Serikat.

Belanda sangat membutuhkan bantuan keuangan dari Amerika Serikat. Itulah sebabnya maka Perdana Menteri Beel bersedia membentuk “Komisi Jendral” yang bakal

¹⁴⁰⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo. . . , halaman 114, 119.

ditugasi untuk berunding dengan Republik Indonesia.

Permulaan pembicaraan antara “Komisi Jendral” dengan pihak Indonesia dilaksanakan di Jakarta, tetapi timbul kesulitan, bahwa orang-orang Belanda tidak mau datang ke Yogyakarta, sedangkan Bung Karno tidak bersedia datang ke wilayah pendudukan Belanda. Sehingga harus dicari tempat yang memungkinkan mengadakan perundingan itu. Yang mengusulkan perundingan di Linggarjati adalah Ibu Maria Ulfah, sekarang isteri Bapak Soebadio Sastrosatomo. Ibu Maria Ulfah ini adalah putri Bupati Kuningan, jadi kenal betul situasi Linggarjati itu. Dan usul ini diterima oleh Belanda dan Indonesia. Kalau orang-orang Belanda tidak mau tinggal di daerah Republik bisa tidur dikapal didekat Cirebon. Kenyataannya memang demikian, pada siang hari Belanda mengadakan perundingan di Linggarjati sore hari kembali ke laut tidur di Kapal. Yang mau tidur di Linggarjati hanya Lord Killern, penengah perundingan dari Inggris. Soal mengapa perundingan di laksanakan di Linggarjati, karena Bung Karno tidak mau ke daerah pendudukan, Belanda tidak mau ke Yogyakarta. Terjadilah perundingan di Linggarjati.¹⁴¹⁾ Di dalam perundingan ini, Lubis mendatangi Hatta membujuknya supaya bersedia ke Linggarjati. Soedarpo mendatangi Bung Karno agar bersedia hadir ke Linggarjati, keduanya ini diutus oleh Sjahrir. Maksud Sjahrir agar Soekarno-Hatta menemui orang Inggris di Linggarjati. Kalau Soekarno dan Hatta diterima baik oleh Inggris, Belanda mau berbuat apa? Walaupun semula Belanda minta tolong Inggris agar menangkap Soekarno sebagai war criminal (penjahat perang), tetapi kalau Inggris sudah mau mengakui Soekarno-Hatta. Belanda mau berbuat apa? inilah pertimbangan Sjahrir.¹⁴²⁾ Perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati itu berlangsung cukup lama “Komisi Jendral” datang di Jakarta tanggal 14 September 1946, kemudian tanggal 15 November 1946 Persetujuan Linggarjati baru di paraf.

“Komisi Jendral” tidak diberi kewenangan untuk menandatangani “Persetujuan Linggarjati, maka dari itu draft Persetujuan Linggarjati hanya di paraf saja. Diparafnya

¹⁴¹⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo. . ., halaman 109.

¹⁴²⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo. . ., halaman 120.

persetujuan Linggarjati ini sudah merupakan keuntungan bagi Pemerintah RI dengan berunding dengan Belanda yang ditengahi oleh wakil dari Inggris, telah mengandung arti bahwa keberadaan negara RI diakui oleh Belanda dan oleh dunia internasional. Dengan di parafnya “Naskah Persetujuan Linggarjati” ini secara politis merugikan Belanda. Sejak semula Belanda tidak mau mengakui keberadaan negara RI namun Belanda turut memberi paraf naskah persetujuan Linggarjati, ini sudah terkandung arti bahwa Belanda telah mengakui keberadaan negara Republik Indonesia.

Proses penandatanganan persetujuan Linggarjati:

Naskah persetujuan Linggarjati telah diparaf oleh “Komisi Jenderal” wakil negeri Belanda, dan oleh delegasi Indonesia pada tanggal 15 Nopember 1946.

Penanganan lebih lanjut, naskah persetujuan Linggarjati itu oleh pemerintah Belanda dimajukan kepada parlemen Belanda (Staten Generaal) untuk mendapatkan persetujuannya. Demikian pula Pemerintah RI juga memajukannya kepada Badan Perwakilan Indonesia di dalam hal ini KNIP untuk mendapatkan persetujuan.

Namun di dalam perkembangan lebih lanjut timbul kesulitan-kesulitan baik bagi pemerintah Belanda maupun bagi pemerintah Republik Indonesia. Ternyata proses penandatanganan Persetujuan Linggarjati tidak semudah diperkirakan sebelumnya. Pemerintah Belanda menghadapi kesulitan yang tidak mudah di atasi, demikian pula bagi Pemerintah Indonesia. Itulah sebabnya naskah persetujuan di paraf tanggal 15-11-1946 baru tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani setelah pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan dalam negerinya masing-masing. Kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Belanda. Naskah persetujuan Linggarjati yang diparaf tgl 15-11-1946 itu, diserahkan kepada pemerintah Belanda, dan untuk selanjutnya dimajukan kepada Staten Generaal untuk mendapatkan persetujuan atau mendapatkan ratifikasi. Staten Generaal, membahasnya mulai tanggal 16 Desember 1946 sampai dengan 20 Desember 1946. Hasil sementara bahasan itu bahwa Persetujuan Linggarjati yang telanjang bulat itu harus terlebih dulu diberi busana, berupa syarat-syarat yang ditentukan oleh Staten Generaal. Busana yang berupa syarat-syarat ini harus terlebih dulu disetujui oleh pihak

Indonesia. Baru setelah syarat-syarat disetujui oleh Indonesia, akan diperdebatkan antara PvdA (Party van de Arbeid, Partai Buruh) dengan KVP (Katholieke Volks Partij) Partai Katholik, yang dominan di dalam Staten Generaal waktu itu.¹⁴³⁾ Hal inilah yang menyulitkan pemerintah Belanda. Menerima Persetujuan Linggarjati berarti pengakhiran pertempuran antara Belanda-Indonesia, sebagaimana diharapkan oleh dunia Internasional, utamanya pemerintah Inggris dan Amerika Serikat negara-negara Rimland. Penolakan terhadap persetujuan Linggarjati berarti bahwa kabinet berikutnya harus bertanggung-jawab adanya pertempuran yang terus-menerus di Indonesia, karena pihak militer Indonesia yang didukung oleh rakyat bertekad membalas serangan demi serangan dari pihak Belanda. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Laskar Rakyat siap di garis depan, logistik disediakan dengan cuma-cuma oleh rakyat di seluruh front-front garis depan dalam menghadapi serangan Belanda itu. Pemerintah Indonesia tetap di dalam strateginya yakni menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui diplomasi, yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat. Atau, menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui diplomasi yang didukung oleh kekuatan tritunggal yakni Pemerintah, Militer dan Rakyat. Penolakan persetujuan oleh pihak Belanda, berarti mengecewakan sekutunya, ialah negara-negara Rimland, utamanya Amerika Serikat dan Inggris. Hal demikian akan berakibat terkucilnya pemerintah Belanda dalam jajaran kekuatan negara-negara Barat, negara-negara Rimland. Juga mempersulit untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Sementara Staten Generaal membahas Persetujuan Linggarjati yang bertele-tele itu keadaan di Indonesia makin buruk. Pelanggaran gencatan senjata oleh dua pihak sering terjadi. Di sisi lain van Mook terus melanjutkan pembentukan negara-negara boneka di Indonesia Timur, untuk mengepung Negara RI di bidang politik.

Pada tanggal 9 Januari 1947 Komisi Jendral kembali ke Jakarta menemui delegasi Indonesia, dan membawa naskah Linggarjati dengan interpretasinya sendiri itu. Tetapi delegasi RI tidak bersedia menerima interpretasi dan modulasi Pemerintah Belanda terhadap Persetujuan Linggarjati yang berupa busana syarat-syarat tertentu. Schermerhorn dihadapkan

¹⁴³⁾ Smit C., *De Dekolonisatie van Indonesie . . .*, halaman 18.

pada pilihan “menerima persetujuan” atau “tindakan militer” karena Indonesia tetap menolak interpretasi apapun terhadap Persetujuan Linggarjati oleh pihak Belanda.

Diplomasi yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengadakan Perjanjian Linggarjati, ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh rakyat, atau didukung oleh tritunggal (Pemerintah, Militer dan Rakyat). Sebagai contohnya, terjadinya peristiwa, Ambarawa, Semarang, Surabaya dan kota-kota yang lain, rakyat berjuang dengan gigih.

Keinginan Belanda akan menaklukkan negara RI melalui peperangan, tidak akan berhasil, karena militer Indonesia yang didukung oleh rakyat, siap melawan serangan demi serangan dari pihak Belanda. Di dalam situasi demikian akhirnya pemerintah Belanda berpendapat bahwa dengan tindakan militer, berarti Belanda menghadapi boikot dari masyarakat internasional. Karena banyaknya negara-negara yang menyokong strategi pemerintah Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan rambu-rambu hukum internasional yang berlaku, yakni pasal 1 ayat 2 Piagam PBB, Prinsip self-determination, pasal 2 ayat 3 Piagam PBB bahwa semua persengketaan yang timbul antar anggota PBB harus diselesaikan melalui perundingan. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB bahwa hubungan antara negara satu dengan yang lain tidak menggunakan kekerasan senjata. Kalau di Indonesia ada pertempuran, semata-mata karena Indonesia diserang pihak Belanda.

Pemerintah Belanda khawatir kalau terjadi pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda di pelabuhan Australia, Amerika Serikat dan tempat-tempat lain. Penentangan terhadap Belanda oleh masyarakat internasional akan meluas, manakala Belanda terus mengambil jalan perang.¹⁴⁴⁾ Akhirnya pemerintah Belanda memberi kuasa kepada “Komisi Jendral” untuk menandatangani Persetujuan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa Staten Generaal dan pemerintah Belanda pada dasarnya memang tidak mau menandatangani Persetujuan Linggarjati. Keengganan pihak Belanda untuk menandatangani Linggarjati, karena Belanda ingin meneruskan

¹⁴⁴⁾ Smit C., *De Dekolonisatie van Indonesie . . .*, halaman 18.

penjajahan atas Indonesia. Mereka tidak mengakui eksistensi negara RI. Namun strategi Belanda itu dihambat oleh sekutunya sendiri, ialah negara-negara Barat, negara-negara Rimland, utamanya Inggris dan Amerika Serikat. Kedua negara ini benar-benar ingin mengamankan Asia Tenggara sebagai wilayah Rimland. Karena hal inilah pemerintah Belanda terpaksa menandatangani Persetujuan Linggarjati. Alangkah benar dan tepatnya strategi para pemimpin Indonesia waktu itu, utamanya Soekarno-Hatta, menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda sesuai keinginan masyarakat internasional, menyesuaikan dengan rambu-rambu hukum internasional yang berlaku, yakni pasal-pasal Piagam PBB tersebut di atas. Secara operasional, Pemerintah RI selalu menyesuaikan dengan kepentingan negara-negara Rimland waktu itu. Nantinya pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda terpaksa melepaskan tanah jajahannya, ialah Indonesia, dengan mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat, yang kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 negara RIS ini dengan perubahan dalam negeri dirubah menjadi Negara Republik Indonesia Kesatuan. Inilah hasil diplomasi yang sangat gemilang. Suatu diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh rakyat Indonesia, suatu diplomasi yang didukung kekuatan “tritunggal” (pemerintah, militer dan rakyat).

Kesulitan pemerintah RI dalam proses penandatanganan Persetujuan Linggarjati. Sewaktu membahas penandatanganan Persetujuan Linggarjati tahun 1947. Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan multi partai sistem. Parlemen Indonesia waktu itu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Maka dari itu proses penandatanganan Persetujuan Linggarjati dibicarakan di dalam sidang KNIP tanggal 28 Pebruari 1947 bertempat di Malang.

Sejak semula di Indonesia terdapat pihak-pihak yang menyetujui penyelesaian Indonesia-Belanda melalui perundingan (Soekarno, Hatta), tetapi ada pihak lain yang menghendaki agar penyelesaian persengketaan itu melalui militer. Kelompok ini dipelopori oleh golongan Murba, dipimpin Tan Malaka dan lain-lainnya. Pada waktu KNIP bersidang di Malang, kelompok kedua ini mendominasi suara KNIP. Hampir seluruh anggota KNIP menolak untuk menandatangani Linggarjati. Soekarno-Hatta sadar benar bahwa gagalnya penandatanganan persetujuan Linggarjati berarti perang. Hal demikian akan menghambat

pelaksanaan strategi Soekarno-Hatta, yang menghendaki penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah Pengawasan Dewan Keamanan PBB. Di dalam sidang itu presiden Soekarno memajukan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1946 tentang penambahan anggota KNIP. Dimaksudkan dengan adanya anggota baru itu dapat mengimbangi suara yang menolak persetujuan Linggarjati itu. Akan tetapi Penetapan Presiden No. 6 tahun 1946 itupun ditolak oleh mayoritas anggota KNIP waktu itu. Pemerintah berkeinginan keras agar KNIP menyetujui persetujuan Linggarjati. Keinginan itu gagal karena Penetapan Presiden No. 6 tahun 1946 ditolak juga. Waktu itu, Hatta mewakili pemerintah, berbicara di muka sidang KNIP, dan memberi alternatif kepada seluruh anggota KNIP, untuk memilih, apakah KNIP menerima Penetapan Presiden No. 6 tahun 1946 ataukah *Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri*.¹⁴⁵⁾

Mendengar pidato Hatta itu para anggota KNIP sangat terkejut, seolah-olah mereka kehilangan arah dan tujuan, semua anggota memang sadar bahwa hanya Soekarno-Hatta saja yang mampu memegang pimpinan pemerintahan di dalam waktu sekritis itu. Hanya Soekarno-Hatta lah orang yang mampu memegang pemerintahan, kalau Republik Indonesia benar-benar ingin selamat. Mereka mengakui bahwa satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh adalah, menerima Penetapan Presiden No. 6 tahun 1946. Hari itu juga pihak oposisi dan BPKNIP memutuskan menarik kembali penolakan masing-masing terhadap Penetapan Presiden No. 6 tahun 1946. Pada hari itu juga KNIP menerima apa yang dimajukan pemerintah dan hari itu juga disahkan suatu keputusan KNIP, semua menyetujui penandatanganan Lingarjati.¹⁴⁶⁾

Kejutan Malang ini mampu memperbaharui kesetiakawanan bangsa. Semua partai berdiri di belakang pemerintah Soekarno-Hatta.¹⁴⁷⁾ KNIP menyetujui Persetujuan Linggarjati,

¹⁴⁵⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, PT. Gunung Agung, 1986, halaman 41.

¹⁴⁶⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak DR. H. Roeslan Abdoelgani. . ., halaman 79-86.

¹⁴⁷⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, PT. Gunung Agung, 1986, halaman 36, 46.

berkat kharisma Soekarno-Hatta waktu itu. Penandatanganan Persetujuan Linggarjati Selasa Legi tanggal 25 Maret 1947 oleh delegasi Indonesia yang terdiri dari Sutan Sjahrir, A.K. Gani, Moch. Roem, dan Komisi Jendral selaku Wakil Pemerintah Belanda, Schermerhorn, van Poll, dan van Mook, di Istana Negara Rijswijk Jakarta.¹⁴⁸⁾

Isi pokok persetujuan Linggarjati. Pemerintah Belanda di dalam hal ini diwakili oleh komisi jenderal dan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh delegasi Indonesia, didorong oleh keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk-bentuk yang baru, bagi kerja sama dengan sukarela, yang merupakan jaminan yang sebaik-baiknya bagi kemajuan, serta kerukunan, kedua negeri itu di dalam masa datang, menetapkan permufakatan seperti di bawah ini (bunyi lengkap persetujuan Linggarjati):

Pemerintah Belanda “mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia” atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Mengenai daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Serikat dan tentara Belanda, berangsur-angsur dengan kerja sama antara kedua belah pihak dimasukkan ke dalam daerah Republik Indonesia, yang demikian itu selambat-lambatnya sampai tanggal 1 Januari 1949 (pasal 1). pemerintah Belanda dan pemerintah RI bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara yang berdaulat dan demokratis, yang berdasarkan perserikatan dengan nama Negara Indonesia Serikat” (pasal 2) Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan ketentuan kalau ada suatu daerah, setelah diadakan mufakat yang demokratis, belum bersedia masuk RIS maka negara demikian diberi kedudukan khusus (istimewa) terhadap negara RIS dan terhadap negeri Belanda (pasal 3). Negara-negara yang kelak menjadi negara Indonesia Serikat adalah: Republik Indonesia, Kalimantan, dan Negara Indonesia Timur.

Undang-Undang Dasar Negara RIS ditetapkan nanti oleh “sebuah Persidangan Pembentukan Negara” oleh wakil-wakil dari negara-negara yang kelak menjadi anggota RIS yang wakil-wakil termaksud ditunjuk secara demokratis.

¹⁴⁸⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, PT. Gunung Agung, 1986, halaman 42.

Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang cara turut campurnya di dalam persidangan “Pembentukan negara” itu, oleh RI, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk kekuasaan Republik, dan oleh golongan-golongan yang tidak cukup perwakilannya, semua itu mengingat pertanggungjawaban Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing (pasal 5). Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan, kepentingan bersama dari negeri Belanda dan Indonesia bekerja-sama untuk membentuk persekutuan Indonesia-Belanda, yang dengan terbentuknya itu, kerajaan Belanda yang meliputi, Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curaçao ditukar sifatnya menjadi persekutuan itu yang terdiri dari satu pihak dari pada Kerajaan Belanda yang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curaçao dan pihak lainnya negara Indonesia Serikat (pasal 6). Persekutuan Indonesia Belanda akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri. Alat perlengkapan ini akan dibentuk kelak oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, mungkin juga oleh majelis-majelis perwakilan negara-negara itu. Yang dimaksud kepentingan bersama, ialah kerjasama dalam hal, perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan, hal-hal ekonomi dan kebudayaan (pasal 7). Puncak Persekutuan Indonesia-Belanda itu duduklah Raja Belanda (pasal 8). Keputusan-keputusan mengenai penyelenggaraan kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat perlengkapan persekutuan atas nama Baginda Raja. Guna kepentingan-kepentingan negara Indonesia Serikat dari negeri Belanda, dan kepentingan-kepentingan kerajaan Belanda di Indonesia, maka pemerintah masing-masing kelak mengangkat Komisaris Luhur (pasal 9). Peraturan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, antara lain berisikan juga ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain, jaminan-jaminan kedua belah pihak di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang satu dengan yang lain, hal kewarganegaraan, untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia di daerah lainnya. Aturan mengenai bagaimana caranya kalau alat-alat perlengkapan itu tidak tercapai permufakatan, aturan mengenai cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat-alat perlengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada negara Indonesia Serikat untuk selama masa Negara Indonesia Serikat tidak atau kurang cukup mempunyai alat-alat perlengkapan sendiri.

Pertanggung jawaban kedua pihak, persekutuan mengenai kebebasan hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan yang dimaksud dalam Piagam PBB (pasal 10). Ketentuan-ketentuan termaksud akan direncanakan kelak oleh suatu pemusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan wakil-wakil dari Negara Indonesia Serikat (pasal 11). Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia Serikat akan mengusahakan, supaya terwujudnya negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Indonesia-Belanda itu telah selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949 (pasal 12). Pemerintah Belanda akan mengadakan tindakan-tindakan agar segera setelah terbentuknya negara Indonesia Serikat diterima sebagai anggota PBB (pasal 13). Segera akan dibentuk Panitia bersama, untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian hak-hak orang-orang bukan bangsa Indonesia, barang-barang milik mereka akan dikembalikan oleh Pemerintah Indonesia Serikat, yakni yang berada di dalam kekuasaannya *de facto* (pasal 14). Untuk merubah sifat Pemerintahan Hindia Belanda, sehingga hubungan dan cara kerja sesuai dengan bentuk kenegaraan baru, pemerintah Belanda akan mengusahakan supaya segera diadakan peraturan-peraturan dan Undang-Undang agar sementara menanti terwujudnya negara Indonesia Serikat dan persekutuan Indonesia-Belanda itu, kedudukan Kerajaan Belanda di dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Bangsa-Bangsa disesuaikan dengan keadaan itu (Pasal 15). Segera setelah persetujuan ini tercapai, kedua belah pihak melakukan pengurangan angkatan bersenjata masing-masing. Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang sampai berapa dan lambat dan cepatnya melakukan pengurangan itu (pasal 16). Guna kepentingan kerja sama ini kedua pemerintah akan membentuk sebuah sekretariat bersama. Bilamana terjadi perselisihan sehubungan dengan persetujuan itu yang tidak bisa diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi, akan menyerahkannya kepada sebuah "arbitrage", dan kalau tidak bisa terselesaikan pula, maka akan menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional (pasal 17).

Tanggapan dari masyarakat Belanda dan masyarakat Indonesia tentang persetujuan Linggarjati. Tanggapan dari masyarakat Negeri Belanda yang menyetujui persetujuan Linggarjati:

Perkumpulan Nederland-Indonesia, mendesak pemerintah Belanda agar melaksanakan persetujuan Linggarjati itu secara jujur, agar dapat dicapai suatu kerja sama yang didasarkan pada segi-segi yang positif, dari hubungan historis kedua bangsa. Untuk bangsa Belanda harus mampu membuang angan-angan pada jaman lampau, yang oleh sejarah telah dihapuskan. Gerakan Buruh negeri Belanda “Nederlandsche Vak Vereniging” atas nama 300.000 anggotanya menyatakan bersedia mendesak Pemerintah Belanda supaya melaksanakan dasar-dasar persetujuan yang telah disepakati. Guru-guru Besar dari Universitas Leiden, Amsterdam, Wageningen, Utrecht, Delf dan Rotterdam, mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah Belanda dan kepada Parlemen (Staten Generaal), berisikan anjuran supaya mengesahkan dan melaksanakan persetujuan Linggarjati, yang menurut keyakinan mereka sudah merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai. Perasaan kesal karena tidak setuju dengan pasal-pasal tertentu, dapat diimbangi oleh makna yang tersirat di dalam persetujuan Linggarjati itu, yang mampu menciptakan kepastian suatu suasana kerjasama yang baru antara kedua bangsa yang sejak dulu mempunyai ikatan-ikatan tertentu.¹⁴⁹⁾

Kranenburg, ketua senat (eerte kamer) Guru Besar Universitas Leiden di dalam pidato radio tanggal 3 Desember 1946 menyatakan seperti di bawah ini:

“Ada golongan masyarakat yang berpendapat bahwa persetujuan Linggarjati merupakan perombakan terhadap Grondwet. Mereka lupa bahwa pidato Sri Ratu tanggal 7 Desember 1942 juga merupakan perombakan Grondwet lama itu”. “Ada yang menyatakan bahwa komisi jendral sebagai penggali-penggali sebuah kuburan, menurut pendapat saya (Kranenburg), mereka bukan penggali-penggali kuburan tetapi justru mereka itu adalah arsitek-arsitek pembangunan, yang mengajak kita membuat suatu sejarah baru”. “Pikiran-pikiran kuno sekarang harus dikubur dalam-dalam, hilangkan pikiran kolonial dan gantilah dengan bentuk-bentuk baru”. “Oleh karena itu yang dibunyikan oleh komisi jendral sekarang bukanlah lonceng kematian tetapi lonceng kelahiran baru”¹⁵⁰⁾

¹⁴⁹⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, PT. Gunung Agung, 1986, halaman 19.

¹⁵⁰⁾ *Keesing Historisch Archief* (KHA), Amsterdam tahun 1946 halaman 6968/1, lihat pula Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati . . .*, halaman 20.

Pendapat-pendapat di atas adalah kelompok yang menyetujui Linggarjati. Namun mereka ini adalah orang-orang di luar golongan yang menjalankan pemerintahan waktu itu. Maka dari itu pendapat-pendapat tersebut di atas dianggap tidak berbobot oleh golongan orang-orang yang memerintah. Golongan orang-orang yang tidak menyetujui persetujuan Linggarjati, mereka menyatakan menerima Linggarjati berarti melikuidasi kerajaan Belanda, menerima persetujuan Linggarjati berarti mengkhianati bangsa dan kerajaan Belanda.

Tanggapan dari Masyarakat Belanda yang anti persetujuan Linggarjati. Kelompok ini umumnya adalah kelompok orang-orang yang memerintah. Tanggapan mereka itu seperti di bawah ini:

Pada waktu persetujuan Linggarjati diparaf, masyarakat Hindia Belanda diliputi kemurungan dan kekecewaan. Pada dasarnya mereka ini tidak setuju persetujuan Linggarjati. Tetapi dipaksa oleh tentara Sekutu yakni AFNEI (Inggris). Karena rencananya tanggal 20 November 1946 Sekutu akan menarik tentaranya dari Indonesia. Sebelum ditariknya tentara Inggris dari Indonesia, harus sudah ada persetujuan antara Indonesia-Belanda. Pada bulan Desember 1946 Staten Generaal yang dikuasai mayoritas, 292 dan 256 anggotanya, dari "tweede Kamer" menolak persetujuan Linggarjati. Kolonel Abdulkadir, perwira KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger) (Tentara Hindia Belanda), pembantu utama van Mook, di dalam pidato radio di Nederland menyatakan, sebagai berikut:

"Soekarno tidak pernah setia atau loyal kepada pemerintah Hindia-Belanda. Jepang lah yang membebaskan Soekarno, Hatta dan Sjahrir dari tempat pembuangan. Maka dari itu kalau sekarang ini (waktu itu) Soekarno, Hatta, Sjahrir menyakinkan bangsanya untuk menerima "*persetujuan Linggarjati*", hal itu sama sekali tidak dapat dijadikan bukti, bahwa mereka setia kepada Belanda, Soekarno hanya setia kepada bangsanya".

Bekas menteri Welter menyatakan: "perhubungan lama dengan daerah-daerah jajahan menghendaki perubahan Grondwet (UUD), tetapi perubahan itu jangan mengubah makna yang terdapat di dalam Grondwet itu, harus sesuai dengan garis-garis politik pidato Sri Ratu pada 7 Desember 1942. Berdasarkan hal itu maka Linggarjati tidak ada faedahnya untuk Kerajaan Belanda. Gerbrandy, bekas perdana menteri sebelum Perang Dunia II

menyatakan: “Janganlah kita mau diseret ke dunia perundingan dengan amandemen-amandemennya. Kita tidak perlu mencari-cari persetujuan, jikalau kita berani berdiri tegak mempertahankan kehormatan kita”¹⁵¹⁾ “Penugasan Undang-Undang kepada komisi jendral adalah untuk “memajukan hukum baru di Hindia Belanda”, bukan untuk menentukan hukum yang baru. Persetujuan Linggarjati hanya merupakan suatu petunjuk pada suatu arah, bukan menentukan hubungan hukum yang baru”. “Berdasarkan petunjuk itu kita menawarkan kepada Indonesia, untuk bekerja sama sesuai pidato radio Sri Ratu tanggal 7 Desember 1942”.

Tanggapan Masyarakat Indonesia atas persetujuan Linggarjati. Melihat langkah-langkah, dan pendapat-pendapat masyarakat Belanda maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Belanda memang tidak berniat melaksanakan “persetujuan Linggarjati” sebagai dasar persetujuan antara dua pihak, pihak Indonesia dan pihak Belanda. Mereka hanya menganggapnya sebagai suatu “petisi” dari suatu kelompok masyarakat Hindia Belanda. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, jendral Soedirman dalam menyambut tahun baru tanggal 1 Januari 1947 menyatakan sebagai berikut: “Perjuangan harus dilangsungkan terus, kita tidak boleh ditakut-takuti oleh tentara Belanda. Kesatuan nasional harus dikonsolidasikan. Bahan makan dikirim sebanyak-banyaknya ke garis depan. Semua gerakan operasional harus dilakukan dalam formasi pasukan, bukan secara perorangan”. “Gerakan-gerakan militer Belanda sudah membahayakan kedaulatan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kita tidak boleh hanya berpegang pada perundingan-perundingan. Pemerintah Indonesia sudah cukup sabar, sudah banyak tipu dan muslihat dari pihak tentara Belanda yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia”.¹⁵²⁾ Demikianlah pernyataan Jendral Soedirman. Makna dari pidato itu, bahwa tentara dan rakyat Indonesia harus siap bertempur manakala Belanda akan menyerang wilayah Republik Indonesia. Bahwa tentara Indonesia

¹⁵¹⁾ *Keesing Historisch Archief (KHA)*, . . . , halaman 6969. Lihat juga Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* . . . , halaman 21.

¹⁵²⁾ *Keesing Historisch Archief (KHA)*, . . . , halaman 7003. Lihat juga Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* . . . , halaman 24.

dan rakyat berniat menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia, dengan segala kekuatan yang ada.

Penerapan/Pelaksanaan Persetujuan Linggarjati

Persetujuan Linggarjati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati, masalah penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda sudah ada peraturan yang mengaturnya, di dalam hukum internasional. Persetujuan Linggarjati adalah hasil perundingan antara Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda yang ditengahi oleh utusan resmi Negara Inggris, Lord Killern. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara dua negara yang eksis di dalam masyarakat internasional. Persetujuan Linggarjati adalah *een volkenrechtelijke overeenkomst*¹⁵³⁾ (perjanjian di dalam lingkup hukum internasional). Dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati lahirah norma-norma hukum internasional baru. Norma-norma baru termaksud berupa hukum internasional yang berwenang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yakni Indonesia dan Belanda. Kalau sebelumnya para pihak berpegang kepada hukum nasional mereka masing-masing, kerajaan Belanda berpegang pada state law kerajaan Belanda, Republik Indonesia berpegang pada state law negara Republik Indonesia, maka setelah persetujuan Linggarjati ditandatangani, masalah persengketaan Indonesia-Belanda diatur dengan norma-norma hukum internasional yang tersirat di dalam “persetujuan Linggarjati tersebut”. Dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati terkandung arti bahwa pemerintah Belanda telah mengakui eksistensi negara RI secara *de facto* untuk pertama kalinya. Pertanyaan yang timbul, bagaimana pelaksanaan “persetujuan Linggarjati” tersebut? Di dalam perkembangan berikutnya ternyata norma-norma hukum internasional baru itu tidak mampu mengatur penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu. Hal demikian itu disebabkan karena antara pemerintah Belanda dan pemerintah

¹⁵³⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo. . . , halaman 116.

Indonesia menafsirkan norma-norma di dalam “persetujuan Linggarjati” itu berbeda yang satu dengan yang lain. Timbul perbedaan penafsiran atau interpretasi antara Belanda dan RI terhadap “perjanjian Linggarjati” tersebut. Timbul perbedaan penafsiran antara pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia terhadap soal “pengakuan”. Pemerintah Belanda telah mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 persetujuan Linggarjati. Pengakuan demikian itu ditafsirkan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa pemerintah Belanda telah mengakui kekuasaan *de facto* negara Republik Indonesia, walaupun yang dikuasai baru Jawa, Madura dan Sumatra. Negara Republik Indonesia merasa eksis sebagai negara RI walaupun yang dikuasai baru Jawa, Madura dan Sumatra. Pemerintah RI merasa berwenang untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain di dalam masyarakat internasional.

Pemerintah Belanda menafsirkan berbeda, menurutnya pemerintah Belanda belum pernah dan tidak akan mengakui kekuasaan *de facto* negara RI, yang diakui adalah kekuasaan *de facto* pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Belanda merasa memegang kedaulatan atas seluruh Indonesia termasuk Jawa, Madura dan Sumatra, sebelum negara RIS terbentuk. Dengan penafsiran yang demikian maka keseluruhan norma-norma yang tersirat di dalam “persetujuan Linggarjati” tidak berfungsi karenanya.

Penafsiran oleh Pemerintah RI terhadap Persetujuan Linggarjati

Di dalam pasal 1 Persetujuan Linggarjati, pemerintah Belanda “mengakui” kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pemerintah Republik Indonesia menafsirkan “pengakuan” termaksud berdasarkan pengertian teori “pengakuan” yang lazim berlaku di dalam hukum internasional. Di dalam hukum internasional dikenal dua tingkat pengakuan, yakni pengakuan *de facto* dan pengakuan *de iure*, sebagaimana diajarkan oleh J.G. Starke¹⁵⁴⁾ yang menyatakan bahwa

¹⁵⁴⁾ Starke J.G., *An Introduction . . .*, halaman 120.

di dalam hukum internasional ada dua tingkat “pengakuan” terhadap negara-negara baru, yakni “pengakuan *de facto*” dan “pengakuan *de iure*”. Belanda telah mengakui kenyataan *de facto* pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera, pengakuan *de iure* memang belum ada. Pengakuan ini menurut penafsiran pemerintah Republik Indonesia, terkandung arti bahwa pemerintah Belanda telah mengakui, negara Republik Indonesia secara *de facto*. Oleh karena itu setelah “persetujuan Linggarjati” ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, pemerintah Republik Indonesia adalah eksis ditengah-tengah masyarakat internasional. Negara Republik Indonesia adalah berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia Internasional. Di dalam pasal 1 persetujuan Linggarjati dinyatakan bahwa pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat dan tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja-sama antara kedua belah pihak akan dimasukkan ke dalam wilayah Republik,¹⁵⁵⁾ hal demikian itu waktunyapun ditegaskan, bahwa upaya memasukkan daerah-daerah itu ke dalam wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949 harus sudah selesai (pasal 1). Di sini jelas bahwa dengan ditandatanganinya “persetujuan Linggarjati”, negara RI adalah eksis atas seluruh Indonesia, walaupun waktu itu hanya menguasai Jawa, Madura dan Sumatra, tetapi telah disepakati bahwa daerah-daerah lain-lainnya nantinya dalam tempo singkat (paling lambat 1-1-1949) seluruh wilayah itu sudah harus masuk dalam wilayah Republik. “Perjanjian Linggarjati” adalah een volkenrechtelijke overeenkomst, suatu perjanjian internasional. Di dalam perjanjian Linggarjati itu, Republik Indonesia “is een sovereign-Staat”. Negara RI adalah negara yang berdaulat. Hanya saja baru berkuasa atas “een deel van Indonesië”, yakni Jawa, Madura dan Sumatera, demikian pendapat Bapak Soebadio Sastrosatomo.¹⁵⁶⁾

¹⁵⁵⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, . . . , halaman 5.

¹⁵⁶⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo. . . , halaman 116-117.

Upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan dari negara-negara lain

Pemerintah Republik Indonesia berupaya agar negara proklamasi yang baru diproklamkan itu segera mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Upaya demikian itu untuk memperkuat posisi negara Proklamasi Indonesia di dalam masyarakat internasional, utamanya terhadap PBB.

Maka dari itu sesudah Linggarjati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 itu, pemerintah RI segera mengirimkan pejabat-pejabat Republik Indonesia ke luar negeri utamanya ke negara-negara Asia dan Afrika, berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas berdirinya negara baru Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1947 di New Delhi diadakan konferensi internasional terkenal dengan sebutan "*Inter-Asian-Relation Conference*", dalam hal ini Pemerintah RI juga mengirimkan wakil-wakilnya ke konferensi termaksud. Bahkan setelah konferensi selesai, salah satu keputusannya adalah mendukung berdirinya negara Republik Indonesia dan ingin membawanya ke forum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 15 Maret 1947 pemerintah RI menerima pengakuan dari Mesir dan negara Arab lainnya. Pada waktu itu pula Pemerintah RI mengangkat wakil-wakilnya di Mesir dan di Australia. Pada tanggal 1 April 1947 Republik Indonesia mendapat pengakuan dari pemerintah Inggris, dan pada tanggal 15 April 1947 dari Amerika Serikat. Bahkan Konsul Jendral Amerika Serikat Walter Foote di Jakarta ditunjuk sebagai wakil Amerika Serikat untuk wilayah *de facto* Republik Indonesia.¹⁵⁷⁾ Pada tanggal 10 Juni 1947 Negara RI mengadakan perjanjian dagang dengan Mesir. Delegasi RI dipimpin oleh H. Agus Salim. Di dalam hukum Internasional, apabila ada dua negara mengadakan perjanjian, maka negara-negara itu adalah eksis di dalam masyarakat internasional. Dengan mengadakan perjanjian dagang dengan Mesir, maka Negara RI eksis di dalam masyarakat internasional.

¹⁵⁷⁾ *Keesing Historisch Archief (KHA)*, . . . , halaman 7124/1. Lihat juga Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* . . . , halaman 53.

Sementara itu di bidang ekonomi dan keuangan pihak Indonesia dan pihak Belanda pada tanggal 14-4-1947 telah mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip kerja sama di bidang produksi dan pengaturan devisa; pemulihan perkebunan-perkebunan kepada pemilik masing-masing; mengadakan sebuah badan bahan makanan bersama; langkah-langkah untuk segera menghentikan boikot oleh buruh Australia terhadap kapal-kapal Belanda. Yang sangat menarik waktu itu Sutan Sjahrir benar-benar optimis terhadap berhasilnya persetujuan Linggarjati, dan mengatakan: "Jika semua perundingan dapat berjalan lancar dan insiden militer terus berkurang, dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruh persoalan ekonomi dan perdagangan dapat diselesaikan". Sebagai bukti kesungguhan pihak RI untuk melaksanakan persetujuan Linggarjati pada April 1947 A.K. Gani menginstruksikan kepada penguasa daerah untuk segera mengembalikan pabrik tekstil Pasuruan kepada pemiliknya. Perusahaan itu milik bersama antara Calico Printers (Inggris) dan Borsumy (Belanda).¹⁵⁸⁾ Ternyata optimisme Sjahrir itu tidak berlangsung lama. Di dalam konferensi tanggal 12 Mei 1947 Belanda mengumumkan bahwa Republik Indonesia telah menolak untuk mendirikan sebuah badan import-export yang dimiliki kedua pemerintahan. Demikian juga badan-badan devisa.

Hal ini berkaitan dari usul Republik untuk membentuk sebuah komisi bersama yang mengawasi badan impor dan ekspor dan juga devisa. Belanda menolak usul ini, ternyata pelaksanaan di bidang ekonomi yang sekecil itu sudah terjadi perbedaan faham, lebih-lebih soal politik, tentu tidak bisa diharapkan kesungguhan Belanda untuk mematuhi persetujuan Linggarjati. Hal ini akan dapat dilihat, uraian tentang interpretasi persetujuan Linggarjati oleh pemerintah Belanda di bawah ini.

Penafsiran oleh Pemerintah Belanda terhadap Persetujuan Linggarjati

Pada dasarnya pemerintah Belanda tidak bersedia menandatangani persetujuan Linggarjati, karena bagi pemerintah Belanda menandatangani persetujuan Linggarjati sudah

¹⁵⁸⁾ *Keesing Historisch Archief (KHA)*, . . . , halaman 7124/2. Lihat juga Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* . . . , halaman 54.

terkandung arti bahwa Belanda telah mengakui eksistensi Negara Republik Indonesia, Belanda bermaksud tidak mau mengakuinya, ingin meneruskan penjajahan atas Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Belanda menafsirkan, mengadakan interpretasi terhadap “pengakuan” di dalam persetujuan Linggarjati memanfaatkan teori pengakuan tiga tingkat ajaran J.P.A. François.¹⁵⁹⁾ François adalah penasehat Pemerintah Belanda pada masa Perdana Menteri Schermerhorn dan juga sesudahnya. Pada tahun 1954 François menulis buku yang juga membahas teori pengakuan terhadap negara baru, seperti di bawah ini:

Menurut François ada tiga tingkat pengakuan terhadap negara baru, pertama pengakuan “kekuasaan *de facto* pemerintah”, kedua pengakuan “*de facto* negara”, dan ketiga pengakuan “*de iure* negara”. [Erkenning als feitelijke regering, (*de facto* Regering), *de facto* erkenning en *de iure* erkenning]. Pengakuan terhadap kekuasaan *de facto* Pemerintah akan terus berlangsung selama Pemerintah yang diakui itu masih tetap berfungsi sebagai pemerintah. Masih ada kenyataan bahwa pemerintah yang diakui itu menguasai suatu wilayah dan pemerintah itu masih berfungsi. Akan tetapi kalau pada suatu saat pemerintah itu sudah tidak berfungsi, wilayah dari pemerintah yang diakui itu sudah tidak ada lagi, maka pengakuan terhadap kekuasaan *de facto* pemerintah demikian itu hapus karena hukum. Pengakuan itu menjadi hilang lenyap karena hukum (inilah teori pengakuan tiga tingkat ajaran François). Pemerintah Belanda telah mengakui pada tingkat pertama, pengakuan kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah Republik Indonesia. Di dalam operasionalnya pemerintah Belanda melihat upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia mengirim pejabat-pejabat ke luar negeri, ke India, ke Mesir dan lain-lain negara di Asia, pemerintah Belanda marah sekali dan menuduh Indonesia melanggar persetujuan Linggarjati. Menurut Belanda, pemerintahnya belum pernah mengakui *de facto* negara Republik Indonesia, yang diakui hanyalah “kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah” atas Jawa, Ma-dura dan Sumatra. Dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati, kedaulatan seluruh wilayah Indonesia masih dipegang oleh kerajaan Belanda, termasuk Jawa, Madura

¹⁵⁹⁾ François JPA, *Grondilinen van het Volkenrecht* . . . , halaman 108

dan Sumatra. Perbedaan penafsiran persetujuan Linggarjati yang demikian itu, dikemudian hari menyebabkan meletusnya pertempuran di Indonesia yang lebih hebat, yakni dengan Agresi I oleh pemerintah Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Makna mengapa pemerintah Belanda menafsirkan persetujuan Linggarjati yang demikian itu, karena Belanda tidak menghendaki adanya persetujuan Linggarjati itu, Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia melalui kekuatan militer, untuk selanjutnya berupaya meneruskan menjajah atas Indonesia. Strategi pemerintah Belanda untuk mencapai tujuan itu, dengan menafsirkan persetujuan Linggarjati, berdasarkan teori pengakuan tiga tingkat termaksud. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan *de facto* pemerintah Republik pada tingkat pertama, yakni mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Pengakuan demikian manakala pemerintah Indonesia pada suatu saat menjadi tidak berfungsi, apabila seluruh wilayah RI telah dikuasai oleh Belanda, akan hapus karena hukum. Itulah sebabnya setelah persetujuan Linggarjati ditandatangani pemerintah Belanda berupaya bagaimana caranya agar pemerintah Republik Indonesia menjadi tidak berfungsi. Belanda berupaya memperkecil wilayah Republik Indonesia dengan politik *divide et impera*, dengan mengepung negara Republik. Langkah terakhir akan menduduki Yogyakarta agar pemerintah Republik menjadi tidak berfungsi. Dengan demikian pengakuan pada pasal 1 persetujuan Linggarjati hapus karena hukum. Belanda seakan-akan tidak pernah mengakui pemerintah *de facto* Republik Indonesia. Dengan maksud terakhir ingin meneruskan penjajahannya atas Indonesia.

Upaya Pemerintah Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia

Pasca penandatanganan persetujuan Linggarjati, Belanda terus berupaya memperkecil wilayah Republik. Meneruskan pembentukan negara boneka, di dalam rangka mengepung negara Republik Indonesia. Memang penandatanganan naskah persetujuan Linggarjati di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947 itu terlaksana tanpa kesepakatan, sekedar memenuhi formalitas internasional. Pihak Belanda tidak berhasrat menandatangani, tetapi terpaksa melakukannya, karena dalam segi finansial kerajaan

Belanda tergantung kepada Amerika Serikat. Penandatanganan persetujuan dilakukan untuk memenuhi tekanan dari Amerika Serikat dan Inggris.

Di sisi lain pada waktu diadakan perundingan itu Belanda menggunakan kesempatan untuk membangun tentaranya secara besar-besaran, memperluas jaringan-jaringan subversi politik di semua daerah dengan tujuan mengepung dan merongrong kekuasaan Republik supaya kekuatan Republik menjadi lemah, dengan demikian mudah ditundukkan. Pada bulan Mei 1947 Jendral Spoor komandan tentara Hindia Belanda, mengatakan bahwa “dalam tempo 4-6 hari Spoor dapat menduduki Yogyakarta dan dalam 3-6 bulan dapat menertibkan dan menguasai seluruh wilayah Jawa dan Sumatra”.¹⁶⁰⁾

Di bidang politik Belanda menjalankan politik memecah belah. Mereka menimbulkan kebencian terhadap Republik, dengan menyebar luaskan tuduhan tentang kebiadaban kaum ekstremis, hal ini utamanya disebar luaskan pada kalangan masyarakat Ambon dan Manado. Belanda mendapat dana dari Amerika Serikat guna rehabilitasi Hindia Belanda, tetapi kenyataannya dana itu digunakan propaganda yang demikian itu, dan digunakan untuk membangun tentaranya. Sejak konferensi Malino 20 Juli 1946 Belanda mengadakan propaganda bahwa Belanda merencanakan mendirikan negara Republik Indonesia Serikat yang berdaulat dalam kerajaan Belanda, yang akan terdiri dari empat negara bagian, yakni Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur. Belanda mulai menjalankan politik lama ialah *devide et impera*, di dalam rangka mengucilkan Republik. Tanggal 27 Desember 1946, Belanda mengesahkan berdirinya Negara Indonesia Timur, pada tanggal 13 Januari 1947 Najamudin ditunjuk sebagai formatur, dan berhasil membentuk kabinet NIT. Pada tanggal 4 Mei 1947 rakyat Pasundan di bawah perlindungan tentara Belanda mengadakan rapat raksasa untuk memproklamasikan berdirinya Negara Pasundan di bawah pimpinan Surya Kartalegawa.¹⁶¹⁾ Negara Pasundan ini sebagai negara bagian negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Dari segi ini dapat dilihat bahwa Belanda memang bermaksud

¹⁶⁰⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati . . .*, halaman 45.

¹⁶¹⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati . . .*, halaman 50.

tidak akan mensukseskan “persetujuan Linggarjati”. Belanda terus berupaya mengepung dan menjepit Republik. Pada tahap terakhir akan menyerbu ke Yogyakarta, dengan maksud agar pemerintah RI tidak berfungsi. Belanda berupaya agar “pengakuan” Belanda terhadap kenyataan kekuasaan *de facto* Republik pasal 1 “persetujuan Linggarjati” menjadi hapus karena Hukum. Selanjutnya Belanda dapat meneruskan menjajah Indonesia. Pada tanggal 12 Mei 1947 van Mook menandatangani surat keputusan yang mengakui daerah Kesultanan Kalimantan Barat sebagai daerah otonom di bawah seorang Sultan. Pada 12 Mei 1947 itu pula diadakan pertemuan antara wakil-wakil empat Kesultanan Kalimantan Timur di Samarinda untuk mendirikan sebuah daerah khusus, seperti Kalimantan Barat itu. Pada tanggal 13 Mei 1947 pemerintah Hindia Belanda mengirim tiga orang utusan perkumpulan Persatuan Timur Besar, *comité Gemenebest Grote Oost*, untuk menyampaikan “petisi” kepada Sri Ratu dan Parlemen, *Staten Generaal*, supaya daerah-daerah Manado, Ambon dan Timor tetap menjadi bagian kerajaan Belanda, bukan di bawah NIT. Dari serentetan tindakan-tindakan pemerintah Belanda tersebut di atas, terbukti bahwa Belanda memang sengaja akan membubarkan persetujuan Linggarjati, tidak ada niat sedikitpun dari Belanda itu untuk mensukseskan pelaksanaan persetujuan Linggarjati. Bahkan terus mengucilkan Republik sedemikian rupa, sehingga wilayah Republik menjadi kecil. Pemerintah Belanda merencanakan pada tahap terakhir akan menyerbu Yogyakarta, sehingga dengan demikian pemerintah RI menjadi tidak mempunyai wilayah, menjadi tidak berfungsi lagi, maka “hapuslah” pengakuan kekuasaan *de facto* pemerintah RI seperti tercantum di dalam pasal 1 persetujuan Linggarjati. Untuk seterusnya Belanda tetap menjajah Indonesia.

Pada tanggal 15 Maret 1947 pemerintah RI mengangkat wakil-wakilnya di Mesir dan Australia. Pemerintah Belanda tidak menyetujui tindakan tersebut. Pada tanggal 16 April 1947 pemerintah Belanda memberi pengumuman terhadap semua perwakilan asing di Jakarta, bahwa sampai Negara Serikat disahkan oleh Sri Ratu, kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya, masih tetap berada dalam tangan Pemerintah Belanda. Penandatanganan persetujuan Linggarjati tidak boleh diartikan sebagai pengakuan Belanda terhadap kekuasaan *de facto* Negara Republik, tetapi hanya sebagai pengakuan bahwa pemerintah Republik melaksanakan kekuasaan *de facto* di wilayah-wilayah yang belum dikuasai oleh Belanda.

Pada 23 Mei 1947 para Menteri Negeri Belanda memutuskan supaya van Mook mengadakan tekanan kepada Republik untuk masih bisa kerja sama dengan pemerintah Belanda melaksanakan persetujuan Linggarjati sebaik-baiknya.¹⁶²⁾ Pada 27 Mei 1947 van Mook menyampaikan nota Komisi Jendral kepada pemerintah Belanda yang isinya mengusulkan kerja sama dengan Republik untuk membentuk pemerintahan sementara, tetapi jawab Republik tidak memuaskan. Timbul perbedaan pendapat secara fundamental sebagai berikut: RI menolak keras pendapat pemerintah Belanda bahwa meskipun persetujuan Linggarjati telah ditandatangani, kedaulatan untuk seluruh Indonesia masih ditangan Belanda. Sebaliknya RI berpendirian bahwa mengenai soal hubungan luar negeri, supaya mengadakan perwakilan terpisah antara Indonesia-Belanda. Pemerintah Belanda sangat marah karena RI terus memperluas hubungannya dengan luar negeri. Pada bulan Juni 1947, pemerintah-pemerintah, Inggris, Amerika Serikat, Australia, China, India, Mesir, Suriah dan Iran telah mengakui Republik secara *de facto*. Mesir malahan mengakui Republik secara *de iure*. Hal demikian ditentang oleh Belanda. Juga Republik sama sekali tidak tahu-menahu mengenai usul pemerintah Belanda untuk membentuk “gendarmerie”, yakni suatu badan untuk mengawasi dan memelihara ketertiban dan keamanan. Republik menganggap pemeliharaan ketertiban dan keamanan di daerah Republik semata-mata sebagai urusan Republik. Berdasarkan adanya peristiwa-peristiwa di atas, pada 20 Juni 1947 pemerintah Belanda memberi kuasa kepada van Mook untuk beralih ke aksi militer,¹⁶³⁾ pemerintah Belanda memberi instruksi kepada van Mook bahwa dalam aksi militer itu harus diselamatkan objek-objek ekonomi yang penting, termasuk perkebunan dan lapangan minyak. Berdasarkan instruksi ini pada tanggal 18 Juli 1947 van Mook diberi kuasa mutlak untuk beralih ke aksi militer.

Pada tanggal 20 Juli 1947 van Mook memberi surat kepada Republik bahwa mulai hari itu tengah malam, persetujuan Linggarjati dinyatakan tidak berlaku lagi, pada 20 Juli 1947 tengah malam Belanda mulai menyerang wilayah-wilayah Republik di Jawa dan Sumatra, meletuslah perang terbuka pada tanggal 21 Juli 1947 sebagai Agresi I.

¹⁶²⁾ Smit C., *De Dekolonisatie van Indonesie . . .*, halaman 22

¹⁶³⁾ Smit C., *De Dekolonisatie van Indonesie . . .*, halaman 23

**Pemerintah Belanda mengadakan Agresi I
pada Tanggal 21-7-1947**

Penerapan atau pelaksanaan persetujuan Linggarjati yang ditanda-tangani pada 25 Maret 1947 itu ternyata tidak semudah diperkirakan orang. Di dalam pelaksanaan persetujuan Linggarjati itu Pemerintah Belanda dengan sengaja dan dengan perencanaan yang matang, menafsirkan isi persetujuan Linggarjati itu dengan memanfaatkan teori pengakuan, tiga tingkat, ajaran François. Hal demikian itu bisa terjadi karena Belanda pada dasarnya memang tidak mau mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia. Belanda bermaksud ingin meneruskan menjajah Indonesia, tidak mengakui keberadaan negara Proklamasi. Karena, Belanda berunding dengan Soekarno-Hatta sudah terkandung arti bahwa Pemerintah Belanda mengakui eksistensi negara Proklamasi. Belanda mengadakan perundingan Linggarjati itu karena terpaksa. Karena ditekan oleh Inggris dan Amerika Serikat. Itulah sebabnya maka Pemerintah Belanda menafsirkan “pengakuan adanya kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra” dalam pasal 1 persetujuan Linggarjati, memanfaatkan teori tiga tingkat, dengan maksud sesudah ditandatangani persetujuan Linggarjati, Pemerintah Belanda bakal memperkecil wilayah Republik, melalui pembentukan negara kecil-kecil di Indonesia dan melalui penyerbuan-penyerbuan ke wilayah RI. RI akan dikepung, dijepit dan pada tingkat terakhir direncanakan menyerbu Yogyakarta. Dengan demikian wilayah RI seluruhnya diduduki oleh Belanda. Pemerintah RI menjadi tidak berfungsi, maka pengakuan oleh Belanda adanya kenyataan kekuasaan Pemerintah RI *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatra pada pasal 1 akan hapus karena hukum. Kemudian Belanda dapat meneruskan penjajahan atas Indonesia. Inilah makna mengapa Pemerintah Belanda menafsirkan persetujuan Linggarjati, memanfaatkan teori pengakuan tiga tingkat.

Sedangkan pemerintah Republik Indonesia menafsirkan persetujuan Linggarjati dengan memanfaatkan teori pengakuan yang lazim berlaku di dalam hukum internasional yakni teori pengakuan dua tingkat, pengakuan *de facto* dan *de iure*. Di dalam penafsiran demikian terkandung arti, bahwa pemerintah Belanda yang telah mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI pada pasal 1 persetujuan Linggarjati, telah mengakui

pula eksistensi negara RI secara *de facto*.

Belanda bersiasat agar dapat membatalkan pengakuannya itu. Indonesia bersiasat agar pengakuan itu berlangsung terus. Namun sangat sulit bagi Belanda untuk mengupayakan agar “pengakuan” itu hapus karena Hukum. Perundingan Linggarjati adalah perundingan dua negara dalam lingkup hukum internasional. Di dalam hukum internasional dinyatakan apabila ada dua negara mengadakan perjanjian dalam lingkup hukum internasional maka berarti masing-masing negara yang berunding itu adalah eksis secara *de facto* di dalam masyarakat internasional. Lebih lagi perundingan Linggarjati ditengahi oleh wakil resmi Inggris, Lord Killearn. Sangatlah sukar bagi Belanda untuk menghapuskan “pengakuannya terhadap kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI di dalam persetujuan Linggarjati itu. Sebagaimana Bapak Soebadio Sastrosatomo pelaku sejarah menyatakan “bahwa perjanjian Linggarjati adalah “*een vokenrechtelijke overeenkomst*”, suatu persetujuan di dalam lingkup hukum internasional”.¹⁶⁴⁾ Peneliti berpendapat bahwa pernyataan itu adalah benar, ditinjau dari hukum internasional. Pada waktu mengadakan perjanjian Linggarjati itu negara RI sudah eksis secara *de facto* di dalam masyarakat internasional. Setelah ditandatangani persetujuan Linggarjati, negara RI berwenang berbuat dan berhubungan dengan negara-negara lain di dalam masyarakat internasional. Mencari pengakuan dari negara-negara lain terhadap keberadaan negara Republik Indonesia yang masih baru itu. Itulah makna penafsiran yang berbeda terhadap persetujuan Linggarjati antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda waktu itu. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan ketegangan hubungan antara Indonesia-Belanda. Ketegangan itu berjalan berlarut-larut, sehingga kemudian menimbulkan pertentangan yang sangat serius.

Di dalam situasi demikian ini, timbul kesulitan bagi Belanda karena ekonomi Hindia Belanda juga sangat kalut. Pada waktu itu keadaan ekonomi dan keuangan Hindia Belanda sangat kacau, kas kosong. Perdana Menteri Beel dan menteri jajahan, Minister van Kolonien, Jonkman, memanggil ahli ekonomi Hirschfeld dan Abarda, untuk mencari jalan keluar mengatasi kekalutan ekonomi yang mendesak. Hirschfeld memberi nasehat,

¹⁶⁴⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo. . . , halaman 116.

walaupun semua emas di Javasche-Bank, dijual semua, tidak bisa membiayai tentara Belanda di Indonesia sampai akhir tahun 1947, karena devisa kosong. Pengeluaran untuk tentara Belanda di Indonesia menuntut biaya yang sangat tinggi, padahal perkebunan-perkebunan milik Belanda di Indonesia semua berlokasi di wilayah Republik. Kalau Belanda tidak segera menguasai seluruh wilayah Hindia-Belanda, kemampuan untuk memelihara kesatuan militer di Indonesia hanya sampai akhir tahun 1947. Belanda tidak bisa hanya berpangkal di kota-kota besar, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, melainkan harus melaju ke daerah pelosok-pelosok Indonesia, utamanya pada lokasi-lokasi di mana perusahaan-perusahaan Belanda berada.¹⁶⁵⁾ Untuk itulah Belanda merencanakan mengadakan penyerbuan ke wilayah Republik. Dalih yang dapat dipergunakan alasan penyerbuan itu adalah, menuduh RI melanggar persetujuan Linggarjati. Negara RI telah mengadakan perhubungan langsung ke luar negeri untuk mencari pengakuan dari negara-negara lain. Mengangkat duta-duta di negara lain, antara lain di Mesir dan Australia. Tindakan ini dianggap oleh Belanda melanggar perjanjian, karena menurut versi Belanda kedaulatan seluruh Indonesia masih ditangan Kerajaan Belanda sebelum negara RIS disahkan. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda, menuduh RI melanggar persetujuan Linggarjati.

Ketegangan di bidang politik antara Indonesia-Belanda makin hari makin meningkat, memang hal ini disengaja oleh Belanda agar ada alasan menyerbu wilayah Republik. Pada waktu itu Belanda terus memperbesar tentaranya, kalau pada tahun 1945 hanya 2.000 orang, pada tahun 1946=91.000 orang, maka pada tahun 1947 tentara Belanda di Indonesia berjumlah 120.000 orang.¹⁶⁶⁾

Sebagai kelanjutan ketegangan antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI itu, pada tanggal 18 Juli 1947 van Mook diberi kuasa penuh oleh Pemerintah Belanda untuk beralih kepada aksi militer, pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam tentara Belanda menyerbu ke daerah Republik, pecahlah Agresi I tanggal 21 Juli 1947. Agresi itu direncanakan akan terus ke Yogyakarta, tetapi waktu itu ada pertentangan antara KvP

¹⁶⁵⁾ Smit C., *De Dekolonisatie van Indonesie* . . . , halaman 20-26

¹⁶⁶⁾ *Keesing Historisch Archief (KHA)*, . . . , halaman 6981. Lihat juga Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* . . . , halaman 167.

dengan PvdA (Partai Buruh), PvdA Belanda tidak setuju rencana aksi militer tersebut. Untuk menjaga agar kabinet tidak jatuh, maka Agresi I itu dihentikan pada 4 Agustus 1947. Operasi militer ini dilakukan secara serentak dari semua pangkalan militer Belanda di Jawa dan Sumatra, khususnya Jawa, gerakan militer seluruhnya ditujukan ke Yogyakarta. Pada hari keempat gerakan militer Belanda agak terhenti, karena setiap serangan dilawan oleh TKR dibantu oleh seluruh rakyat. Bahan makanan di semua front dibantu oleh rakyat dengan cuma-cuma, di Jawa Barat Belanda tidak bisa menembus jalan ke Tasikmalaya, karena dihadang oleh Tentara Republik bersama rakyat. Tiga kali bergerak, tiga kali pula dipukul mundur oleh tentara Republik yang dibantu oleh rakyat. Di pinggir sungai Citanduy Belanda harus mengakui bahwa perjalanan ke Yogyakarta bukan suatu yang mudah, karena terus dilawan oleh tentara Republik yang dibantu oleh rakyat.

Belanda mengakui bahwa perhitungan Jendral Spoor yang sedemikian optimis, ternyata didasarkan perkiraan yang salah. Jalan menuju Yogyakarta tidak mudah. Di Jawa Timur, pasukan Republik menghadang pasukan Belanda di Tretes di pegunungan Kawi dan Kelut. Pertempuran berkobar di seluruh front di Jawa dan Sumatra. Pada tanggal 21 Juli 1947 pesawat terbang Belanda menembaki lapangan terbang Malang dan Solo. Di Jawa Barat di daerah Sukabumi dan Bandung, tentara Republik dibantu oleh rakyat berhasil menghambat serangan Belanda.

Pada 22 Juli 1947 tentara Republik dengan kapal terbang menyerang Semarang. Di Sukabumi terjadi pertempuran arteleri yang sengit antara tentara Republik melawan serangan Belanda. Pada tanggal 24 Juli 1947 Belanda memasukkan pasukan panser ke Pasir Putih. Pasukan Belanda mendaratkan marinirnya di Cirebon. Tentara Republik dan rakyat mengadakan perlawanan secara gigih. Di Mojokerto terjadi pertempuran antara tentara Republik bersama-sama rakyat melawan pasukan Belanda. Pada tanggal 27-29 Juli 1947 di daerah Bandung terjadi pertempuran sengit. Tentara Republik dibantu rakyat berhasil merebut Banjaran yang tadinya diduduki Belanda. Jalur Bandung-Garut dijaga ketat oleh tentara Republik bersama rakyat, sehingga Belanda tidak berhasil menerobos ke Tasikmalaya. Di Jawa Timur tentara Republik bersama rakyat berhasil menduduki Beluk, Bagirejo, Kajangri, Tosari dan Bendo. Tentara Belanda yang mendarat

di Tegal menghadapi perlawanan dari tentara Republik bersama rakyat di Linggapura sehingga Belanda mundur. Pada tanggal 30 Juli 1947 pasukan Republik bersama rakyat berhasil menguasai daerah bagian utara Mojokerto. Keadaan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Republik. Di Jawa Timur tentara Republik bersama rakyat berhasil merebut beberapa tempat strategis di sebelah barat kota Surabaya. Pada tanggal 31 Juli 1947 kapal Belanda akan mendarat di Cilacap. Pendaratan pertama digagalkan oleh tentara Republik bersama rakyat.

Sedangkan di Sumatra, pada 21 Juli 1947 pertempuran meletus di garis demarkasi Padang. Pada 23 Juli 1947 tentara Republik bersama rakyat menyerang kota Medan secara besar-besaran, berhasil menduduki pinggiran kota Medan. Pada tanggal 25 Juli 1947, serangan terhadap kota Medan diteruskan. Juga tentara Republik bersama rakyat mengadakan perlawanan sengit terhadap tentara Belanda di sebelah Barat Laut Palembang. Lapangan terbang Socony yang sebelumnya diduduki Belanda, direbut kembali oleh tentara Republik bersama rakyat. Pada 30 Juli 1947 di Palembang pasukan di bawah tanah berhasil menghancurkan berbagai bangunan militer Belanda. Pada 31 Juli 1947 di Palembang sebuah kapal terbang ditembak jatuh oleh tentara Republik, pesawat terbang di lapangan dihancurkan. Pasukan Belanda yang hendak menduduki Tebing Tinggi (Lahat) dapat dipukul mundur oleh tentara Republik bersama rakyat.¹⁶⁷⁾ Memasuki bulan Agustus 1947 Belanda sulit untuk memperoleh kemajuan dua atau tiga KM karena semua front dihadang oleh tentara Republik bersama rakyat. Dari uraian di atas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan Agresi I tanggal 21 Juli 1947, maka serangan-serangan dilawan oleh tentara Republik yang didukung oleh rakyat, hal ini terjadi hampir di seluruh front di Jawa, di Madura dan Sumatra. Dengan Agresi I tanggal 21 Juli 1947, timbul peperangan terbuka yang sangat dahsyat di seluruh front di Jawa dan Sumatra. Peristiwa itu mencuat sampai ke dunia internasional utamanya Dewan Keamanan PBB. Pertempuran yang meluas itu akhirnya mendapat perhatian Dewan Keamanan PBB, yang menilai pertempuran yang terjadi di Indonesia sudah membahayakan perdamaian dunia. Pertempuran

¹⁶⁷⁾ *Keesing Historisch Archief (KHA)*, . . . , halaman 7264. Lihat juga Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* . . . , halaman 130-136 .

yang meluas di Indonesia sudah menyentuh pasal 39 Piagam PBB. Penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda mulai saat itu tidak termasuk jurisdiction kerajaan Belanda melainkan menjadi kewenangan Dewan Keamanan PBB berdasar pasal 39 Piagam PBB. Maka dari itu Dewan Keamanan PBB segera membahas pertempuran Indonesia, kemudian memerintahkan kepada pemerintah Belanda agar menghentikan pertempuran dan mengadakan gencatan senjata dengan Republik. Lima minggu setelah mengeluarkan perintah itu, Dewan Keamanan PBB membentuk “komisi jasa-jasa baik” yang terdiri dari tiga negara, yakni Belgia, Australia dan Amerika Serikat.¹⁶⁸⁾ Tugas “Komisi Jasa-jasa Baik” ini adalah mengawasi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB memerintahkan Belanda dan Indonesia untuk mengadakan perundingan di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Tercapailah strategi Soekarno-Hatta yang menghendaki penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Di dalam Agresi I yang dilakukan oleh Belanda tanggal 21 Juli 1947, Belanda secara teritorial memperoleh keuntungan karena dapat menduduki beberapa wilayah RI di Jawa dan Sumatera, tetapi secara politis Pemerintah Belanda menderita kerugian yang sangat besar. Strategi Belanda yang menyatakan bahwa persoalan Indonesia-Belanda adalah persoalan dalam negeri Belanda, persoalan Indonesia termasuk domestic jurisdiction negeri Belanda dan tidak perlu dicampuri oleh Dewan Keamanan PBB penanganannya menjadi gagal total. Selama itu Belanda memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, agar permasalahan Indonesia-Belanda tidak dicampuri Dewan Keamanan PBB, maka lenyaplah harapan Belanda itu, karena kekeliruan yang diperbuatnya dengan mengadakan Agresi I tanggal 21 Juli 1947. Karena sejak waktu itu persengketaan Indonesia-Belanda menjadi persoalan internasional yang ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, pemerintah Republik Indonesia menderita kerugian secara teritorial karena beberapa wilayahnya diduduki oleh Belanda, tetapi RI memperoleh keuntungan yang sangat besar di bidang politik utamanya politik internasional. Strategi dasar Soekarno-Hatta yang menghendaki penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui diplomasi,

¹⁶⁸⁾ Smit C., *De Dekolonisatie van Indonesie . . .*, halaman 27.

melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB, tercapai dengan gemilang. Pemerintah Belanda yang berupaya menghancurkan negara RI tinggal merupakan harapan kosong. Belanda tidak bisa menghancurkan Republik, lebih-lebih setelah ditangani oleh Dewan Keamanan PBB. Sebaliknya Pemerintah Indonesia yang bersusah payah mempertahankan eksistensi negara Proklamasi ada harapan yang gemilang. Persengketaan Indonesia-Belanda sudah ada wasitnya, yakni Dewan Keamanan PBB.

Perjanjian Linggarjati dan Pengakuan

Di dalam pasal 1 persetujuan Linggarjati¹⁶⁹⁾ ditegaskan bahwa Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara serikat (AFNEI) atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak dimasukan pula ke dalam daerah republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu dengan segera akan dimulai dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949 pemasukan daerah-daerah tersebut sudah selesai (pasal 1 jo ps 12).

Memperhatikan makna pasal 1 jo 12 persetujuan Linggarjati tersebut, walaupun Pemerintah Belanda hanya mengakui kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura, Sumatera, namun secara implisit Belanda telah mengakui pula kekuasaan *de facto* Pemerintah RI meliputi seluruh Indonesia. Bahkan menurut teori pengakuan dua tingkat, *de facto* dan *de iure*, Pemerintah Belanda secara implisit telah mengakui negara RI secara *de facto* yang wilayahnya meliputi seluruh Indonesia. Karena walaupun dalam persetujuan Linggarjati Pemerintah Belanda hanya mengakui kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa Madura dan Sumatera, paling lambat tanggal 1 Januari 1949 seluruh wilayah Indonesia telah dikuasai oleh Pemerintah RI (pasal 12).

Selain hal tersebut, dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati, Pemerintah Belanda telah melepaskan Indonesia kaitannya dengan pasal 1 Grondwet Belanda,

¹⁶⁹⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati . . .*, halaman 5.

sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 6 persetujuan Linggarjati, bahwa Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada negeri Belanda dan Indonesia, akan bekerja sama untuk membentuk Persekutuan Kerajaan Belanda-Indonesia, yang dengan terbentuknya itu, Kerajaan Belanda yang meliputi, Negeri Belanda, Hindia Belanda (Indonesia) Suriname dan CuraÇao *ditukar sifatnya* menjadi persekutuan itu, yang terdiri dari satu pihak adalah Kerajaan Belanda, yang meliputi negeri Belanda, Suriname dan CuraÇao dan pada pihak lainnya adalah negara Indonesia Serikat (pasal 6 ayat 1).

Makna dari pasal-pasal 1 jis 12 dan pasal 6 persetujuan Linggarjati terkandung arti bahwa Pemerintah Belanda secara implisit telah mengakui negara Republik Indonesia secara *de facto*. Ungkapan ini diperkuat pula dengan pasal 17 ayat 2 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana timbul perselisihan berhubungan dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu akan menyerahkan kepada keputusan arbitrage. Jika tidak berhasil akan diserahkan kepada keputusan Ketua Dewan Pengadilan Internasional atau *the international court of justice*.

Di dalam pasal 17 persetujuan Linggarjati Belanda telah menyetujui, apabila timbul persengketaan antara dua belah pihak, dan tidak dapat diselesaikan oleh para delegasi, hal itu akan diserahkan kepada keputusan arbitrage, kalau masih belum bisa terselesaikan, hal itu diserahkan kepada keputusan Ketua Dewan Pengadilan internasional, yang dimaksud adalah mahkamah internasional atau *the international court of justice*. Padahal menurut pasal 34 piagam mahkamah internasional (*statute of the international court of justice*) itu dinyatakan secara tegas bahwa yang bisa dihadapkan kepada mahkamah internasional itu hanyalah "negara". (*Only states may be parties in cases before the court*) (pasal 34 ayat 1 *the statute of court*).¹⁷⁰⁾

Pemerintah Belanda telah menyetujui bahwa apabila keputusan arbitrage tidak berhasil, maka akan diserahkan kepada mahkamah internasional, hal ini sudah terkandung arti bahwa Pemerintah Belanda telah mengakui negara RI secara *de facto*.

¹⁷⁰⁾ Telders, *United Nations Textbook . . .*, halaman 212.

*Pelaksanaan Perjanjian Linggarjati dan Prospek Pengakuan
Kedaulatan Negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda*

Persetujuan Linggarjati telah ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Namun pelaksanaan persetujuan Linggarjati itu tidak selancar seperti diharapkan oleh masyarakat internasional waktu itu. Pelaksanaan persetujuan Linggarjati mengalami hambatan-hambatan yang tidak mudah di atasi baik oleh Belanda maupun oleh Indonesia. Hambatan-hambatan itu tidak terpecahkan bahkan menimbulkan ketegangan yang serius antara Belanda dan Indonesia. Ketegangan itu memuncak pada tanggal 20 Juli 1947 sewaktu Pemerintah Belanda menyatakan kepada Indonesia bahwa mulai saat itu Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Linggarjati. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 mengadakan Agresi I meletus pertempuran yang sengit karena Belanda menyerbu ke seluruh front di Jawa, Madura, dan Sumatera.

Ketegangan-ketegangan yang menimbulkan persengketaan itu disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap “pengakuan” yang terdapat pada persetujuan Linggarjati itu. Pemerintah Belanda menafsirkan “pengakuan” itu berdasarkan teori “pengakuan” tiga tingkat ajaran François, sedangkan Pemerintah RI menafsirkannya berdasar teori pengakuan yang lazim berlaku di dalam hukum internasional, yakni teori pengakuan dua tingkat, teori pengakuan *de facto* dan *de iure* ajaran Starke. Timbulnya perbedaan penafsiran itu disebabkan oleh adanya siasat untuk mencapai tujuan masing-masing pihak. Padahal tujuan itu berbeda yang satu dengan yang lain.

Pemerintah Belanda melaksanakan Perjanjian Linggarjati karena terpaksa. Dipaksa oleh Amerika Serikat dan Inggris untuk berunding dengan Indonesia. Belanda terpaksa menurutinya karena perekonomian Belanda bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Dalam pelaksanaan Persetujuan Linggarjati Belanda mempunyai siasat agar pengakuan kekuasaan *de facto* pemerintah RI yang diberikan oleh Belanda batal karena hukum. Belanda bertujuan untuk meneruskan penjajahan atas Indonesia ia tidak mau mengakui eksistensi negara RI. Oleh karena itu Belanda menafsirkan Persetujuan Linggarjati berdasarkan teori pengakuan tiga tingkat yakni pengakuan kenyataan *de facto* pemerintah, pengakuan *de facto* negara dan pengakuan *de iure*. Menurut pengakuan tiga tingkat

di dalam Persetujuan Linggarjati, Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pengakuan tersebut akan berlangsung terus manakala pemerintah yang diakui itu masih nyata-nyata berfungsi, tetapi kalau pada suatu saat pemerintah yang diakui itu tidak berfungsi, misalnya wilayahnya habis diduduki musuh, maka pengakuan demikian hapus karena hukum. Inilah tujuan akhir Belanda dengan menggunakan teori pengakuan tiga tingkat itu. Setelah Linggarjati ditandatangani, Belanda meneruskan mengepung wilayah Republik Indonesia, kemudian membentuk negara-negara kecil-kecil, seperti NIT, negara Banjar, negara Jawa Barat, dan lain-lain untuk menjepit wilayah Republik. Pada tanggal 21-7-1947 mengadakan Agresi I dengan tujuan untuk memperkecil wilayah Indonesia. Belanda akan menduduki Yogyakarta sebagai Ibukota RI, maksudnya agar seluruh wilayah RI habis diduduki oleh Belanda dan Pemerintah RI menjadi tidak berfungsi sehingga pengakuan Belanda atas kekuasaan *de facto* Pemerintah RI pada pasal 1 persetujuan Linggarjati hapus karena hukum. Pada dasarnya Belanda menghendaki agar Persetujuan Linggarjati itu bubar. Namun sewaktu menandatangani Persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947 itu, Belanda sebenarnya sudah terperosok oleh pasal-pasal Persetujuan Linggarjati yang mereka buat sendiri, Belanda terperosok di dalam pasal 1 jis pasal 12 dan pasal 17 Persetujuan Linggarjati. Karena Belanda telah mengakui kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Sekutu dan tentara Belanda secara berangsur-angsur oleh kedua belah pihak akan dimasukkan ke dalam wilayah Republik (pasal 1). Pemasukan wilayah ke daerah Republik itu sudah selesai paling lambat tanggal 1 Januari 1949 (pasal 12). Di dalam ketentuan pasal 1 jo pasal 12 Persetujuan Linggarjati itu, secara implisit sudah terkandung arti bahwa Pemerintah Belanda telah mengakui negara RI secara *de facto* yang meliputi wilayah seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Belanda telah menyetujui suatu prinsip, manakala kemudian timbul perselisihan antara kedua negara akan diselesaikan oleh tiap-tiap delegasi. Kalau belum terpecahkan masalah itu akan diselesaikan oleh sebuah *arbitrage*. Apabila sudah ditangani arbitrage namun masalah tersebut belum juga terselesaikan, kedua belah pihak akan mengajukannya kepada Dewan Pengadilan Internasional (*the International Court of*

Justice)¹⁷¹⁾ Padahal menurut pasal 34 Statute of Court¹⁷²⁾ hanya “negara”lah yang dapat dihadapkan kepada Mahkamah Internasional ini. Only States may be parties in cases before the court. (Article 34 Statute of Court). Dalam hal ini pemerintah Belanda secara implisit telah mengakui Negara Republik Indonesia secara *de facto*.

Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan perjanjian Linggarjati sebagai pelaksanaan strategi dasar Soekarno-Hatta, berkehendak menyelesaikan persengketaan Belanda-Indonesia melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB, Pemerintah RI ingin melaksanakan Persetujuan Linggarjati dengan sebenarnya. Pemerintah RI tidak bermaksud menggagalkan persetujuan Linggarjati, tetapi ingin mensukseskannya, dan menafsirkan Persetujuan Linggarjati berdasarkan teori pengakuan dua tingkat, yakni pengakuan *de facto* dan *de iure*. Belanda telah mengakui kekuasaan *de facto* pemerintah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera (pasal 1). Hal ini ditafsirkan oleh Pemerintah RI bahwa Pemerintah Belanda telah mengakui juga negara Republik Indonesia secara *de facto*. Oleh karena itu setelah “Persetujuan Linggarjati” ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 Pemerintah RI berupaya agar Negara Proklamasi mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Kemudian mengirimkan pejabat-pejabat Republik Indonesia ke negara-negara Asia dan Afrika. Pada tahun 1947 mengirim utusan ke *Inter-Asian-Relation Conference*. Pada 15 Maret 1947 pemerintah RI menerima pengakuan dari Mesir, dan juga mengangkat wakil-wakil RI untuk Mesir dan Australia. Pada 1 April 1947 mendapat pengakuan dari Pemerintah Inggris. Pada tanggal 15 April 1947 mendapat pengakuan dari Amerika Serikat. Pada 10 Juni 1947 pemerintah RI mengadakan perjanjian dagang dengan Mesir. Pada bulan Juni 1947 Inggris, Amerika Serikat, Australia, China, India, Mesir, Suriah, dan Iran telah mengakui Negara Republik Indonesia secara *de facto*.

Belanda sangat marah melihat tindakan Pemerintah RI itu karena Pemerintah Belanda tidak pernah mengakui negara RI secara *de facto*. Menurut Belanda dengan ditandatanganinya Persetujuan Linggarjati, kerajaan Belanda masih memegang kedaulatan

¹⁷¹⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati . . .*, halaman 5 dan 9.

¹⁷²⁾ Telders, *United Nations Textbook . . .*, halaman 212.

atas Indonesia termasuk Jawa, Madura, dan Sumatera. Hubungan Indonesia-Belanda mengalami ketegangan yang serius. Pada tanggal 20 Juni 1947 Pemerintah Belanda memberi kuasa kepada van Mook untuk beralih ke aksi militer.¹⁷³⁾ Pada hari itu juga van Mook memberi surat resmi kepada pemerintah RI bahwa mulai hari itu saat tengah malam, Persetujuan Linggarjati dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 21-7-1947 Belanda menyerbu wilayah Republik. Operasi militer dilaksanakan secara serentak dari semua pangkalan militer Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera. Serangan demi serangan itu dilawan oleh tentara RI bersama rakyat. Terjadilah peperangan yang meluas diseluruh front di Jawa, Madura, dan Sumatra.

Ditinjau dari sudut pandang strategi dasar Pemerintah Republik Indonesia, Agresi I yang dilancarkan Belanda tanggal 21-7-1947 itu merupakan tindakan yang menguntungkan Indonesia secara politis. Sebenarnya makna tindakan Belanda demikian itu karena waktu itu ekonomi Pemerintah Hindia Belanda semrawut. Pembiayaan militer untuk ditugaskan di Indonesia amat mahal. Waktu itu kas negara kosong. Penasihat keuangan pemerintah Belanda Hirschfeld menyatakan "Walaupun emas Javasche-Bank dijual semua, hal itu tidak dapat membiayai tentara Belanda di Indonesia sampai akhir tahun 1947". Devisa negara kosong, sedangkan perkebunan milik Belanda di Indonesia semua berlokasi di wilayah Republik Indonesia. Kalau Belanda tidak segera menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda, kemampuan memelihara kesatuan militer Belanda hanya sampai akhir tahun 1947. Belanda tidak dapat terus-menerus berpangkal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang, tetapi harus melaju ke pelosok-pelosok Indonesia tempat perusahaan-perusahaan Belanda berada.¹⁷⁴⁾ Inilah sebenarnya maknanya, mengapa Belanda menyerbu Republik tanggal 21-7-1947 itu. Belanda mencari alasan dengan menuduh bahwa RI melanggar Persetujuan Linggarjati.

Betapapun besar manfaat Perundingan Linggarjati itu bagi strategi diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta, namun dengan diadakannya Persetujuan Linggarjati

¹⁷³⁾ Smit C., *De Dekolonisatie* . . . , halaman 23.

¹⁷³⁾ Smit C., *De Dekolonisatie* . . . , halaman 20-26.

itu, strategi Soekarno-Hatta belum terlaksana secara utuh. Strategi Soekarno-Hatta di dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda ialah melalui perundingan dengan Belanda, di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Padahal waktu diadakan Perjanjian Linggarjati Dewan Keamanan PBB belum campur tangan, hanya ditengahi oleh Lord Killearn, wakil Negara Inggris.

Belanda tetap memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB dikatakan bahwa persoalan Indonesia-Belanda adalah termasuk *domestic jurisdiction* Kerajaan Belanda, Dewan Keamanan PBB tidak perlu campur tangan. Belanda berkehendak jangan sampai Dewan Keamanan PBB mencampuri persoalan Indonesia-Belanda, sedangkan Pemerintah Republik menghendaki agar Dewan Keamanan PBB mengawasi persengketaan Indonesia-Belanda sebagai wasit.

Dengan adanya Agresi I tanggal 21-7-1947 itu Soekarno-Hatta memperoleh peluang emas untuk mendorong agar Dewan Keamanan PBB mencampuri persengketaan Indonesia-Belanda. Soekarno-Hatta waktu itu memerintahkan agar satuan militer, laskar rakyat dan rakyat secara bersama-sama melawan setiap serangan dari Belanda. Soekarno-Hatta memang di-dukung oleh rakyat. Perintah itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka terjadilah pertempuran yang sangat luas di wilayah Republik Indonesia. Kemudian timbul perang terbuka di Indonesia antara pasukan Belanda melawan pasukan dan rakyat Indonesia.

Maksud Soekarno-Hatta ini, untuk mendorong penggunaan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB oleh Belanda waktu itu ke arah pasal 39 Piagam PBB yang menyatakan: "Kalau terjadi persengketaan antara negara-negara dengan menggunakan kekuatan militer yang menurut penilaian Dewan Keamanan PBB hal demikian itu akan membahayakan perdamaian dunia, maka hal demikian menjadi persoalan internasional yang ditangani oleh Dewan Keamanan PBB". Perang terbuka yang terjadi akibat Agresi I tanggal 21-7-1947 itu mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB bersidang tanggal 31 Juli 1947 mereka membicarakan masalah pertempuran yang timbul di Indonesia. Pada waktu itu wakil dari Australia di Dewan Keamanan PBB menganjurkan agar soal Indonesia masuk acara sidang, Australia minta agar Dewan Keamanan PBB menghentikan pertempuran yang berkobar di Jawa dan Sumatra. Usul itu didukung oleh wakil India dan Uni Soviet.

Kolonel Hudgson wakil Australia menyatakan: “Pertempuran yang sedang berjalan di Indonesia bukan tindakan polisionil tapi merupakan perang yang sesungguhnya antara Belanda-Indonesia. Hudgson menyatakan bahwa Republik Indonesia merupakan suatu “Negara”. Republik Indonesia telah diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai pemerintah yang berkuasa *de facto* di Jawa, Madura, dan Sumatera. Pemerintah Republik Indonesia sudah mendapatkan pengakuan *de facto* dari beberapa negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, India, anggota-anggota dari Liga Arab dan Australia. Demikian juga dalam pasal 17 Persetujuan Linggarjati ditegaskan bahwa apabila timbul persengketaan yang tidak bisa diselesaikan para pihak, akan diserahkan kepada keputusan suatu arbitrage, kalau masih belum terselesaikan Belanda dan Indonesia akan memberi wewenang kepada Presiden Pengadilan Internasional untuk menyelesaikannya. Padahal menurut pasal 34 Statute of Court dinyatakan, *only states may be parties in cases before the court.*¹⁷⁵⁾ Jika dilihat dari pasal ini jelas bahwa Pemerintah Belanda sendiri telah mengakui negara Republik Indonesia secara *de facto*. Jelas pulalah bahwa pertempuran yang terjadi di Indonesia itu adalah pertempuran antara dua negara. Perang antara Indonesia-Belanda. Di dalam pasal 39 jis 41 dan 42 Piagam PBB pertempuran yang demikian itu sudah membahayakan perdamaian Dunia. Pertempuran yang terjadi di Indonesia itu menjadi wewenang Dewan Keamanan PBB penyelesaiannya”. Demikianlah pernyataan Hudgson wakil, dari Australia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap.¹⁷⁶⁾ Pernyataan Hudgson itu didukung oleh Mr. Sen, wakil dari India, Faris El Khouri, wakil Siria dan Gromyko, wakil Uni Soviet.

Pembahasan masalah Indonesia di Dewan Keamanan PBB berjalan alot. Berkali-kali diadakan sidang untuk itu. Akhirnya Dewan Keamanan PBB mengambil sikap untuk campur tangan di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda karena dinilai hal itu sudah membahayakan perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB berusaha menyelesaikan persengketaan itu dengan jalan damai. Untuk itu dibentuklah “Komisi jasa-jasa baik”

¹⁷⁵⁾ Telders, *United Nations Textbook . . .*, halaman 212.

¹⁷⁶⁾ Mohamad Roem, *Diplomasi: ujung tombak perjuangan RI . . .*, halaman 22, 23, 24.

atau “*Komisi tiga negara*” oleh Dewan Keamanan PBB. Komisi itu terdiri atas Belgia, Australia dan Amerika Serikat. “Komisi jasa-jasa baik” ini bertugas mengawasi perundingan Indonesia-Belanda berikutnya yaitu Perundingan Renville yang menghasilkan Persetujuan Renville. Sebelum terlaksana Perjanjian Renville, Komisi Tiga Negara ini mengawasi gencatan senjata. Ternyata gencatan senjata ini susah dicapai karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Persetujuan Renville baru ditandatangani tanggal 12 Januari 1948. Dengan demikian strategi Soekarno-Hatta dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda, melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB terlaksana secara utuh, sedangkan strategi pemerintah Belanda dengan memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB mengalami kegagalan.

Adanya campur tangan Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda untuk memperoleh pengakuan kedaulatan, makin terlihat adanya harapan yang jelas.

Walaupun Persetujuan Linggarjati dibubarkan oleh Pemerintah Belanda, tetapi negara-negara yang telah mengakui RI secara *de facto* tidak menarik pengakuan itu. Bahkan setelah Belanda membubarkan Persetujuan Linggarjati dan mengadakan Agresi I pada tanggal 21-7-1947 Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda menjadi kewenangan Dewan Keamanan PBB penanganannya.

Pelaksanaan dari Persetujuan Renville ini sangat alot. Belanda sengaja mengulur waktu, karena Belanda sebenarnya tidak berniat menyelesaikannya. pembicaraan tentang pelaksanaan “Persetujuan Renville” ini diadakan selama satu tahun, tetapi tanpa hasil.

Di sisi lain sejak datangnya *Muso* dan *Soeripno* pada pertengahan 1948 di Indonesia dari Uni Soviet, pergerakan komunis di Indonesia meningkat. Hal ini dipergunakan oleh Belanda. Belanda menuduh bahwa TNI sudah dipengaruhi komunis dan menentang Persetujuan Renville. Belanda yang memang tidak ada niat untuk melaksanakan Persetujuan Renville, mendapat alasan bahwa TNI menentang Renville.

Pada tanggal 18 September 1948 meletus pemberontakan PKI Muso di Madiun. Soekarno-Hatta berhasil menumpas pemberontakan PKI Madiun dalam tempo ± 3 bulan.

Akibat dari pemberontakan PKI Muso itu, situasi perekonomian dan militer Indonesia sangat lemah. Hal demikian itu dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda sebaik-baiknya, yang memang sejak semula pemerintah Belanda bermaksud menyerbu Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi II, menyerbu wilayah Republik dan berhasil menduduki Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan beberapa Menteri ditangkap oleh Belanda, sedangkan Jendral Soedirman memimpin gerilya di desa-desa. Pada akhir Desember 1948, Dewan Keamanan PBB bersidang di Paris. Mereka membahas penyerbuan Belanda (Agresi II) tanggal 19-12-1948. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisikan, supaya kedua belah pihak menghentikan tembak-menembak dan mengadakan seruan agar para pemimpin RI yang ditangkap Belanda segera dibebaskan. Belanda sebenarnya tidak mau menerima resolusi Dewan Keamanan PBB itu, tetapi karena ditekan oleh Amerika Serikat maka terpaksa menerimanya. Untuk mengelakkan resolusi Dewan Keamanan PBB itu, wakil tertinggi Ratu Belanda, Dr. Beel yang waktu itu telah menggantikan tugas-tugas dari van Mook mencoba mendekati Majelis Permusyawaratan Federal, BFO, (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) untuk mengadakan konferensi di Den Haag tanpa mengikutsertakan Republik Indonesia. Di sana akan dilaksanakan penyerahan kedaulatan Negara Indonesia Serikat kepada BFO (Majelis Permusyawaratan Federal). Dr. Beel mempunyai rencana mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tanpa ikut sertanya Republik Indonesia.¹⁷⁷⁾ Pada saat yang segenting itu sebagian dari kaum federalis di bawah pimpinan Anak Agung Gde Agung, menyatakan ketidaksediaannya untuk mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tanpa ikut sertanya Republik Indonesia. Dengan demikian macetlah rencana Dr. Beel itu.

Dalam pada itu Dewan Keamanan PBB tidak tinggal diam. Pada tanggal 23 Maret 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disebut *the Canadian Ruling*. Resolusi itu disebut demikian sebab yang mengusulkan adalah wakil dari Canada, di mana Amerika Serikat juga memainkan peranan yang sangat besar. Resolusi itu berisikan, bahwa pemerintah Republik Indonesia harus dikembalikan dahulu ke Yogyakarta. Sesudah dikeluarkan perintah untuk berhenti tembak-menembak, negara RI agar ikut serta di dalam

¹⁷⁷⁾ Mohamad Roem, *Diplomasi: ujung tombak perjuangan RI . . .*, halaman 10.

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk menerima penyerahan atau pengakuan kedaulatan yang diperpendek waktunya, tanpa masa peralihan. Apa yang dicapai melalui the Canadian Ruling ini adalah bahwa rencana Dr. Beel yang bermaksud mengucilkan Republik Indonesia dan menyerahkan kedaulatan dengan meniadakan waktu transisi, menjadi pelaksanaan penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat tanpa masa transisi. Inilah sebenarnya inti *pernyataan van Royen-Roem*, atau *van Royen-Roem Statement*. Roem-Royen Statement ini bukan persetujuan yang berbentuk satu, melainkan terdiri atas dua keterangan yang berbeda, yang masing-masing diucapkan oleh Ketua delegasi, yakni untuk Indonesia, Mohammad Roem, untuk Belanda, van Royen. Pernyataan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949. Pernyataan Ketua delegasi Indonesia, Mohammad Roem adalah sebagai berikut:

“sebagai Ketua delegasi Republik Indonesia, saya diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi (*persoonlijk*), sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 dan petunjuk pelaksanaannya tanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tercapainya:

- pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
- bekerja sama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban, dan
- turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tiada bersyarat.”

Sedangkan pernyataan Ketua delegasi Belanda, van Royen adalah sebagai berikut:

“Delegasi Belanda diberi kuasa untuk menyatakan, bahwa berhubung dengan adanya kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Muhammad Roem, ia menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Delegasi Belanda selanjutnya menyetujui pembentukan sebuah panitia bersama, di bawah pengawasan UNCI (United Nations Commission for Indonesia).¹⁷⁸⁾

¹⁷⁸⁾ Mohamad Roem, *Diplomasi: ujung tombak perjuangan RI . . .*, halaman 10-14.

Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara penyerahan atau pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat, di Amsterdam dan di Jakarta dalam waktu yang bersamaan.

Apa yang diterangkan di muka, bahwa prospek pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Negara Indonesia menjadi semakin terang, sudah terbukti. Yang dimaksud pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia adalah kepada negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

*Signifikansi Perjanjian Linggarjati terhadap pengakuan
kedaulatan negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda*

Soekarno-Hatta meletakkan strategi dasar bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui diplomasi, di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Strategi dasar ini dimaksudkan, agar upaya pemerintah RI mempertahankan eksistensi negara proklamasi dapat berhasil. Tidak lama setelah diproklamasikan negara Republik Indonesia bangsa Indonesia langsung berhadapan dengan musuh, yakni pemerintah Belanda yang akan menghancurkan, untuk melanjutkan penjajahan atas Indonesia.

Soekarno-Hatta yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat berkehendak mempertahankan eksistensi negara proklamasi melalui diplomasi dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di masyarakat internasional utamanya Dewan Keamanan PBB. Di dalam operasionalnya, Soekarno-Hatta memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada negara-negara Rimland, perang dingin, dan PBB.

Di dalam upaya mengadakan perundingan dengan Belanda mendapat hambatan karena Belanda tidak bersedia berunding dengan Soekarno-Hatta dengan menuduh RI adalah fasis. Untuk menghilangkan hambatan itu, ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 dengan tiga maklumat politik pelaksanaannya itu. Maksudnya akan mengubah bentuk pemerintah RI menjadi demokrasi Parlemerter yang menganut multi-partai sistem sehingga tuduhan Belanda bahwa negara RI adalah fasis menjadi tidak relevan. Dengan diubahnya bentuk pemerintahan itu, Belanda mulai memperhatikan

desakan Inggris dan Amerika Serikat untuk berunding dengan Indonesia. Waktu itu komandan SEAC, Lord Louis Mountbatten berusaha keras agar sebelum AFNEI meninggalkan Indonesia harus sudah ada persetujuan Indonesia-Belanda. Hal demikian ini bisa terjadi karena pada waktu itu yang memerintah Inggris dari partai buruh sedangkan partainya Churchill kalah dalam pemilihan.

Partai buruh memberi perhatian terhadap bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan mereka. Itulah sebabnya upaya Belanda untuk memanfaatkan tentara sekutu (AFNEI) guna menegakkan penjajahan atas Indonesia selalu gagal.

Dengan ditetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X dapat terlaksanalah perundingan Indonesia-Belanda. Perundingan itu diadakan di Linggarjati. Oleh karena itu dinamakan "Perundingan Linggarjati" yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati, yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dengan demikian Belanda telah mengakui negara RI secara *de facto*. Selain itu, Belanda telah melepaskan Indonesia kaitannya dengan pasal 1 Groundwet Belanda (pasal 6 Persetujuan Linggarjati). Negara RI berdiri tegak ditengah-tengah masyarakat Internasional. Negara RI eksis di dunia internasional. Banyak negara-negara di dunia mengakui secara *de facto* terhadap RI, Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, Mesir, Siria dan yang lainnya. Walaupun kemudian Belanda tidak mengakui persetujuan Linggarjati dan mengadakan Agresi I tanggal 21-7-1947, tetapi pengakuan-pengakuan di atas itu tidak dicabut oleh negara-negara yang mengakuinya. Dengan Agresi I oleh Belanda itu, malahan simpati negara-negara di dunia terhadap negara RI makin meluas. Bahkan, dengan Agresi I oleh Belanda itu, persoalan Indonesia-Belanda ditangani oleh Dewan Keamanan PBB. Hal ini terjadi atas usul negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB waktu itu, utamanya Australia. Wakil Australia di Dewan Keamanan PBB Hudgson berusaha keras agar pertempuran yang terjadi di Indonesia dinilai sebagai pertempuran antara dua negara yakni Indonesia-Belanda. Pertempuran itu oleh wakil Belanda disebut tindakan polisionil, bukan perang. Tetapi, Hudgson berpendapat bahwa yang terjadi di Indonesia waktu itu adalah perang antara Negara RI dengan Belanda. Hal yang demikian dinilai oleh Australia sebagai sesuatu yang membahayakan perdamaian dunia. Berdasar pasal 39 Piagam PBB hal demikian menjadi wewenang Dewan

Keamanan PBB untuk menangani penyelesaiannya (Hudgson). Kemudian, usul Australia ini didukung oleh negara-negara lain dan diputuskan bahwa permasalahan di Indonesia ditangani oleh Dewan Keamanan PBB. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi jasa-jasa baik terdiri atas wakil-wakil Belgia, Australia dan Amerika Serikat, disebut juga, "Komisi Tiga Negara". Komisi ini bertugas mengawasi gencatan senjata untuk kemudian mengawasi perundingan Indonesia-Belanda lebih lanjut, yakni perundingan Renville. Australia sungguh-sungguh membantu negara RI, hal ini dapat terjadi karena waktu itu yang memegang pemerintahan di negara Australia adalah juga partai buruh. Mereka bersimpati terhadap negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Indonesia ini. Bahkan waktu itu kapal-kapal Belanda yang berlabuh dikota-kota Australia diboikot oleh para buruh. Hal ini dibiarkan saja oleh pemerintah Australia. Dengan Agresi I oleh Belanda tanggal 21-7-1947 itu kedudukan RI secara politis di dunia internasional makin kuat, sebaliknya Belanda menderita kerugian yang besar secara politis terkucil dari sesama negara Rimland.

Dengan adanya aksi Agresi I tanggal 21-7-1947 itu Dewan Keamanan PBB mulai menangani persengketaan Indonesia-Belanda. Membentuk komisi tiga negara yang diberi tugas. untuk mengawasi gencatan senjata di Indonesia, untuk kemudian mengawasi pelaksanaan perundingan Indonesia-Belanda berikutnya ialah perundingan Renville yang menghasilkan "Persetujuan Renville" yang ditandatangani tanggal 12 Januari 1948. Pelaksanaan persetujuan Renville sangat alot. Pelaksanaan persetujuan Renville ini dirundingkan oleh delegasi RI dan Belanda selama ± setahun, tetapi tidak ada hasilnya. Memang Belanda tidak ada niat melaksanakannya. Belanda menunggu saat yang baik untuk kemudian menyerbu wilayah RI dan masuk ke Yogyakarta dengan harapan kalau seluruh wilayah RI telah dikuasai oleh Belanda, Pemerintah Republik Indonesia menjadi tidak berfungsi. Dengan demikian pengakuan Belanda adanya kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera pada pasal 1 Persetujuan Linggarjati menjadi hapus karena hukum. Kemudian Belanda melanjutkan menjajah Indonesia. Itulah rencana Belanda waktu itu.

Oleh karena itu Belanda mengulur waktu. Pelaksanaan Persetujuan Renville, ditanganinya dengan bertele-tele. Secara kebetulan sejak datangnya Musa dan Soeripno dari Uni Soviet di Indonesia kira-kira pertengahan tahun 1948 itu, Partai Komunis Indonesia meningkat. Peningkatan itu memuncak pada bulan September 1948. Musa mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan PKI dapat ditumpas oleh Soekarno-Hatta dalam waktu singkat \pm 3 bulan. Tetapi setelah itu kondisi ekonomi dan militer Indonesia sangat lemah. Situasi demikian dimanfaatkan oleh Belanda dengan sebaik-baiknya. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengadakan Agresi II. Belanda menyerbu wilayah Republik Indonesia dan berhasil menduduki seluruh kota di Jawa dan Sumatera termasuk Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan beberapa orang menteri ditangkap Belanda, sedangkan Jenderal Soedirman ditugasi memimpin gerilya di desa-desa.

Pada akhir Desember 1948 Dewan Keamanan PBB bersidang di Paris, mengeluarkan resolusi yang berisi, perintah penghentian tembak-menembak dan menyerukan agar para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda segera dibebaskan. Belanda sebenarnya tidak mau menerima resolusi itu, tetapi ditekan oleh Amerika Serikat, Belanda terpaksa menerimanya. Mengapa Amerika Serikat bersikeras agar para tawanan dibebaskan? Hal ini disebabkan bahwa Soekarno-Hatta ternyata bukan Komunis, keduanya adalah nasionalis yang tangguh. Terbukti telah menumpas pemberontakan komunis di Madiun dalam tempo singkat. Amerika Serikat sejak semula memberi simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, dengan maksud untuk memperkuat negara-negara Rimland. Itulah sebabnya Amerika Serikat tidak membantu upaya Belanda untuk meneruskan penjajahan di Indonesia, malahan membantu Republik Indonesia.

Untuk mengingkari resolusi Dewan Keamanan PBB itu, Dr. Beel yang waktu itu sudah menggantikan van Mook, berupaya mendekati majelis permusyawaratan federal (BFO) untuk mengadakan konferensi di Den Haag, tanpa mengikut sertakan Indonesia. Untung kaum federalis pimpinan Anak Agung Gde Agung keberatan untuk mendirikan negara Indonesia Serikat tanpa Republik Indonesia. Oleh karena itu upaya Beel ini macet. Atas kejadian itu Dewan Keamanan PBB pada 23 Maret 1949 mengeluarkan resolusi sebagai pedoman pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB bulan Desember 1948.

Isi pokoknya bahwa pemerintah Republik Indonesia dikembalikan dahulu ke Yogyakarta. Sesudah itu dikeluarkan perintah oleh Indonesia untuk berhenti tembak-menembak, kemudian negara RI ikut serta di dalam perundingan meja bundar (KMB) di Den Haag. KMB dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 dan selesai tanggal 2 Nopember 1949. Sebagai hasil dari KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pada tanggal 27 Desember 1949 itu diadakan upacara pengakuan kedaulatan kepada negara RIS di Amsterdam dan di Jakarta dalam waktu yang bersamaan.

Di dalam perkembangan berikutnya pada tanggal 15 Agustus 1950, negara RIS ini diubah menjadi “negara Republik Indonesia Kesatuan” yang tidak lain adalah “negara Proklamasi”.

Strategi dasar Soekarno-Hatta berhasil dengan sukses dalam upaya mempertahankan eksistensi negara Proklamasi, negara Republik Indonesia, dengan menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui diplomasi, melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Diplomasi itu di dalam negeri ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat atau dengan perkataan lain, eksistensi negara proklamasi, negara Republik Indonesia, dapat ditegakkan dengan kekuatan diplomasi yang didukung oleh kekuatan tritunggal, pemerintah, militer dan rakyat.

Memperhatikan uraian Bab III di atas kaitannya dengan permasalahan kedua dan ketiga di dalam penelitian ini dapat disimpulkan seperti di bawah ini:

Peneliti berangkat dari suatu kerangka dasar pemikiran, bahwa suatu peristiwa seperti penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu, merupakan interaksi antara konteks dan pemrakarsa serta peran tokoh tertentu. Konteks yang dimaksud adalah konteks politik domestik dan internasional, dan konteks ekonomi domestik dan internasional, sedangkan prakarsa dan peran tokoh, adalah latar belakang pribadi yang memprakarsai dan berperan di dalam panggung politik. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan Maklumat Wakil Presiden RI No. X terhadap perjanjian Linggarjati, peneliti berangkat dari kerangka dasar pemikiran yang menyatakan bahwa, kemunculan

suatu peristiwa seperti penetapan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu dapat dipahami dari maksud dan tujuan atau makna peristiwa dimaksud. Dalam hal ini maksud dan tujuan yang hendak dilihat ialah kaitan antara maksud dan tujuan peristiwa itu terhadap perjanjian Linggarjati. Apakah perjanjian Linggarjati itu merupakan tujuan ditetapkannya maklumat No. X itu. Apakah ditetapkannya maklumat Wakil Presiden No. X itu dengan tujuan agar bisa diselenggarakan perundingan Indonesia-Belanda, yakni perundingan Linggarjati?

Ditetapkannya maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya itu dimaksudkan untuk mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 untuk kemudian mengubah bentuk pemerintahan demokrasi presidensial pada UUD 1945 menjadi bentuk pemerintahan demokrasi parlementair yang menganut multi partai sistem. Dan semua ini dimaksudkan agar membuka kemungkinan untuk bisa berunding dengan Belanda. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk propaganda di masyarakat internasional, bahwa pemerintah RI fasis, dan Soekarno-Hatta kolaborator dengan Jepang. Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, demikian pendapat Belanda. Hal demikian itu merupakan hambatan terhadap strategi Soekarno-Hatta yang ingin menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB.

Dengan ditetapkan maklumat Wakil Presiden No. X beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya, maka pada tanggal 11-11-1945 Pemerintah Indonesia berubah menjadi demokrasi parlementair dan menganut multi partai sistem. Maka tuduhan Belanda menjadi tidak relevan karenanya. Pada tanggal 14-11-1945 dibentuk kabinet parlementer pertama di Indonesia, Sjahrir sebagai Perdana Menteri, Inggris (AFNEI) dan Amerika Serikat terus mendesak Belanda dan Indonesia agar mengadakan perundingan. Sebelum tentara serikat ditarik dari Indonesia supaya sudah ada dokumen persetujuan antara Indonesia-Belanda. Tindakan Inggris dan Amerika Serikat ini demi terlaksananya perdamaian di kawasan negara-negara Rimland, termasuk Indonesia.

Dalam pada itu, parlemen Belanda (*Staten Generaal*), yang dibentuk tahun 1937 pada tanggal 17 Mei 1945 dibenahi, diadakan perubahan-perubahan disesuaikan dengan

perkembangan, maka Pemerintah Belanda juga dirubah, lahirlah kabinet Beel dengan menteri jajahan Jonkman. Kabinet Beel mulai menyadari bahwa desakan Inggris dan Amerika Serikat agar mengadakan perundingan dengan Indonesia, perlu diperhatikan. Belanda memerlukan bantuan keuangan dari Amerika Serikat, dan simpati terhadap Republik Indonesia dari masyarakat internasional makin meluas, kapal-kapal Belanda selalu diboikot oleh buruh Australia dan lain-lain negara. Karena itu pada bulan Juli 1946 kabinet Beel membentuk suatu badan kenegaraan dengan sebutan "Komisi Jendral" yang diketuai oleh Schermerhorn mantan Perdana Menteri Belanda. Komisi Jendral ini ditugasi untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Pada 14 September 1946 Komisi Jendral tiba di Jakarta untuk memulai perundingan dengan Indonesia. Belanda tetap tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, tetapi semenjak 14-11-1946 kekuasaan eksekutif RI dipegang oleh Perdana Menteri Sjahrir. Belanda bisa mengadakan perundingan dengan Sutan Sjahrir. Setelah diadakan persetujuan gencatan senjata, maka perundingan pendahuluan Indonesia-Belanda dimulai di Jakarta. Timbul persoalan baru, delegasi Belanda (Komisi Jendral) tidak mau berunding di Yogya, sedangkan Soekarno-Hatta tidak mau berunding di daerah pendudukan Belanda. Walaupun dapat mengadakan perundingan pendahuluan, tetapi Sjahrir tidak dapat memutuskan sendiri mengenai soal-soal yang prinsip, jadi mesti memerlukan kehadiran Soekarno-Hatta. Perlu mencari tempat perundingan yang memungkinkan, Komisi Jendral dan juga Soekarno-Hatta bisa hadir. Tempat itu adalah di Linggarjati dekat Cirebon. Komisi Jendral bisa tidur di Kapal. Siang perundingan, malam kembali ke kapal.¹⁷⁹⁾ Terjadilah perundingan antara Indonesia-Belanda, ialah "perundingan Linggarjati" yang nantinya menghasilkan "persetujuan Linggarjati". Pertanyaan di atas sudah dapat dijawab, yakni pertanyaan, apakah ditetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X itu dengan tujuan agar bisa diselenggarakan perundingan Linggarjati? Dengan ditetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X. tanggal 16-10-1945 dan tiga maklumat pelaksanaannya itu dengan tujuan merubah bentuk pemerintahan RI dari demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementair yang menganut multi partai sistem, tujuan berikutnya

¹⁷⁹⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo. . . , halaman 119.

agar dimungkinkan untuk mengadakan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Perundingan itu adalah perundingan "Linggarjati". Dengan demikian ditetapkannya Maklumat No. X itu dengan tujuan agar dapat diadakan perundingan Linggarjati. Pertanyaan di atas telah terjawab, yakni dengan ditetapkannya Maklumat No. X itu dengan tujuan agar bisa mengadakan perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati menghasilkan persetujuan Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Di dalam persetujuan Linggarjati itu, pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara serikat atau tentara Belanda berangsur-angsur dan dengan bekerja sama antara kedua belah pihak dimasukkan ke dalam daerah Republik (Pasal 1).

Menurut tafsiran pemerintah RI sejak ditandatanganinya persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947 Negara RI telah diakui secara *de facto* oleh pemerintah Belanda, walaupun waktu itu RI baru menguasai Jawa, Madura dan Sumatra. Jadi pemerintah RI eksis di dunia internasional, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di masyarakat internasional.

Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia mengirimkan pejabat-pejabatnya keluar negeri utamanya ke negara-negara Asia-Afrika. Pada bulan Juni 1947 Inggris, Amerika Serikat, Australia, China, India, Mesir, Suriah dan Iran telah mengakui Republik Indonesia secara *de facto*, malahan Mesir mengakui secara *de iure*. Hal demikian ini bisa terjadi karena pemerintah Republik mengadakan penafsiran terhadap persetujuan Linggarjati berdasarkan teori pengakuan dua tingkat, yakni pengakuan *de facto* dan *de iure*, sebagaimana yang lazim berlaku di dunia internasional (di dalam hukum internasional).

Di sisi lain pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu dilanda kekalutan ekonomi-keuangan, bermaksud menyerbu wilayah Republik utamanya daerah-daerah di mana perusahaan-perusahaan Belanda berlokasi. Dalih untuk menyerbu itu wilayah RI dengan menuduh bahwa Republik melanggar persetujuan Linggarjati. Menurut Pemerintah Belanda, pihaknya belum pernah dan tidak akan mengakui negara Republik Indonesia secara *de facto*. Yang diakui pemerintah Belanda di dalam persetujuan Linggarjati adalah kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah RI atas Jawa, Madura, Sumatra. Belanda tidak pernah

mengakui negara Republik secara *de facto*, demikian menurut Belanda. Hal ini bisa terjadi karena Belanda menafsirkan persetujuan Linggarjati berdasar teori pengakuan tiga tingkat, pengakuan kenyataan kekuasaan *de facto*, pemerintah, pengakuan *de facto* dan pengakuan *de iure*. Pengakuan pemerintah Belanda di dalam persetujuan Linggarjati adalah pengakuan tingkat pertama, pengakuan kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah RI. Bahkan pengakuan ini akan “hapus karena hukum” kalau pada satu saat pemerintah Republik tidak berfungsi lagi. Tindakan pemerintah RI yang berhubungan langsung ke negara-negara Asia-Afrika itu, melanggar persetujuan Linggarjati (demikian sikap Belanda). Itulah sebabnya maka pada tanggal 21-7-1947 pemerintah Belanda melaksanakan Agresi I menyerbu ke seluruh front di Jawa dan Sumatra. Serangan itu dilawan dengan gigih oleh tentara Republik bersama rakyat di seluruh front di Jawa dan Sumatra. Pecahlah pertempuran yang sangat luas di Indonesia. Pemerintah RI dengan sengaja melawan serangan demi serangan dari Belanda. Dengan maksud agar di Indonesia pecah pertempuran yang dahsyat, dengan harapan agar Dewan Keamanan PBB menilai pertempuran di Indonesia itu membahayakan perdamaian Dunia. Kalau sudah terjadi demikian, berdasarkan pasal 39 Piagam PBB persoalan Indonesia-Belanda menjadi kewenangan Dewan Keamanan PBB penanganannya. Harapan itu berhasil, karena kemudian Dewan Keamanan PBB menilai, pertempuran di Indonesia membahayakan keamanan dan perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB membahasnya, kemudian memerintahkan kepada Belanda dan Indonesia agar menghentikan pertempuran. Kemudian Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah badan internasional disebut “Komisi Jasa-jasa Baik”, terdiri dari tiga negara, Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Tugas “komisi jasa-jasa baik” ini akan mengawasi perundingan Indonesia-Belanda berikutnya. Mulai saat itu penyelesaian persoalan Indonesia-Belanda menjadi kewenangan Dewan Keamanan PBB penanganannya. Strategi Belanda yang memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB mengalami kegagalan. Pertempuran di Indonesia sangat meluas. Dengan meluasnya pertempuran itu, sudah menyentuh pasal 39 Piagam PBB yang menyatakan bahwa suatu persengketaan antara dua negara, yang menurut penilaian Dewan Keamanan PBB membahayakan perdamaian Dunia menjadi kewenangan Dewan Keamanan PBB penanganannya. Peran militer yang didukung oleh rakyat Indonesia sangat besar,

mampu melawan serangan demi serangan dari Belanda yang berarti menunjang upaya diplomasi Soekarno-Hatta. Berhasilah strategi Soekarno-Hatta di dalam mempertahankan eksistensi negara Proklamasi melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Pemerintah RI memperoleh keuntungan yang sangat besar di dalam Agresi I oleh Belanda ini. Walaupun secara teritorial RI rugi karena sebagian daerahnya diduduki oleh Belanda, tetapi secara politis negara RI untung, terutama dari sudut politik internasional karena persoalan Indonesia-Belanda sudah ditangani oleh Dewan Keamanan PBB. Persetujuan Linggarjati telah digagalkan oleh Belanda dengan Agresi I itu, tetapi berpangkal dari persetujuan Linggarjati itu perundingan Indonesia-Belanda bisa diteruskan di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Perundingan itu kemudian diteruskan, ialah perundingan Renville. Pada tahun 1948 timbul pemberontakan komunis di Madiun. Pemerintah RI berhasil menumpas pemberontakan itu dalam tempo singkat, tetapi akibatnya kekuatan negara RI sangat lemah, hal ini dimanfaatkan oleh Belanda dengan mengadakan Agresi II tanggal 19 Desember 1948. Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Berarti persetujuan Renville gagal, perundingan diteruskan di negeri Belanda ialah Konferensi Meja Bundar (KMB).

Hasil KMB yang penting bahwa Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia (RIS), dan pada tanggal 15-8-1950 RIS dirubah menjadi negara Republik Kesatuan. Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta berhasil mempertahankan eksistensi Negara Proklamasi, Negara Republik Indonesia.

Sebagai simpulan dapatlah dikemukakan: "Bahwa negara Proklamasi Negara Republik Indonesia dapat ditegakkan eksistensinya dengan kekuasaan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh rakyat Indonesia". Atau "Bahwa Negara Proklamasi Negara Republik Indonesia dapat dipertahankan eksistensinya melalui kekuatan diplomasi yang didukung oleh kekuatan tritunggal, (pemerintah, militer dan rakyat)".

Secara epistemologis bahwa berkaitan dengan penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu penggunaan teori pengakuan tiga tingkat ajaran FranÇois tidak didukung oleh fakta, tidak dibenarkan oleh masyarakat internasional utamanya Dewan Keamanan PBB, sedangkan

penggunaan teori pengakuan dua tingkat ajaran Starke didukung oleh fakta, didukung oleh masyarakat internasional utamanya Dewan Keamanan PBB. Strategi Soekarno-Hatta yang menggunakan teori pengakuan dua tingkat dibenarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan perkataan lain “bahwa penggunaan teori pengakuan tiga tingkat ajaran FranÇois ditolak dan tidak dibenarkan, sedangkan penggunaan teori pengakuan dua tingkat ajaran Starke dinyatakan diterima dan dibenarkan”.

BAB IV
SIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

BAB IV

SIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

Pengantar

Di dalam Bab IV ini akan di sajikan simpulan-simpulan dari penelitian ini, untuk kemudian diabstraksikan (*diabstraheer*) sebagai simpulan akhir dari disertasi ini. Simpulan akhir ini merupakan “temuan baru” di dalam penelitian ini. Kemudian, dijelaskan implikasi teoritiknya dari “temuan baru” ini. Temuan baru itu akan disumbangkan untuk ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik kenegaraan, khususnya dalam proses pembentukan negara. Untuk mempertajam temuan ini perlu di bandingkan dengan temuan ilmuwan lain dalam penelitian yang sejenis atau yang mirip dengan penelitian ini. Perlu dijelaskan pula bagaimana berlakunya “temuan baru” itu. Terakhir, apakah ada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang perlu diadakan penelitian lebih lanjut atau tidak. Demikianlah pengantar Bab IV ini. Uraian selanjutnya seperti di bawah ini.

Simpulan

Pertama, mengenai permasalahan:

“Konteks ekonomi-politik domestik dan internasional macam apa dan latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh pemrakarsa dan berperan macam apa yang mendorong munculnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 itu?”

Konteks ekonomi domestik cenderung lemah, Indonesia baru saja dijajah Jepang selama 3½ tahun. Jepang mengambil dan melemahkan kekuatan ekonomi Indonesia guna membiayai peperangan Asia Pasifik. Dan masa-masa sebelumnya dijajah Belanda ratusan tahun lamanya. Itulah sebabnya pada waktu menghadapi persengketaan dengan Belanda tahun 1945-1947 konteks ekonomi domestik juga cenderung lemah.

Konteks politik domestik juga cenderung lemah. Bangsa Indonesia baru saja merdeka, kecakapan mengelola negara, bidang sosial, politik dan ekonomi dalam kondisi

rendah. Kekuatan dari bangsa Indonesia adalah persatuan rakyat, TKR dan laskar rakyat di bawah pimpinan Soekarno-Hatta yang bertekad bulat mempertahankan eksistensi negara proklamasi.

Konteks ekonomi internasional dapat dikemukakan bahwa perekonomian negara-negara Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin pasca Perang Dunia II adalah lemah, karena adanya kerusakan-kerusakan akibat perang. Perekonomian kerajaan Belanda lemah, waktu perang negeri Belanda diduduki Jerman, Pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris. Sedangkan Indonesia diduduki Jepang. Hanya negara Amerika Serikat yang perekonomiannya masih baik, karena waktu Perang Dunia II, tidak secara langsung dilanda peperangan. Amerika Serikat berperang di negara lain, maka dari itu pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat membentuk badan yang mengelola dana bantuan yang terkenal dengan nama Marshall-plan, untuk memberi bantuan ke negara-negara Eropa, Afrika, Asia yang rusak karena peperangan. Pemerintah Belanda juga sangat tergantung kepada Amerika Serikat, karena memerlukan bantuan keuangan dari negara besar itu.

Konteks politik internasional dapat dikemukakan bahwa negara-negara sekutu sambil menyelesaikan peperangan melawan negara-negara Tripartite pact (Jerman, Italia, dan Jepang) menyempatkan waktu untuk menetapkan norma-norma hukum internasional dan merintis berdirinya badan internasional yang bakal mengatur politik dan perdamaian dunia masa pasca perang. Pada tanggal 14 Agustus 1941 telah ditetapkan norma universal yakni The Atlantic Charter. Norma universal ini dapat dimanfaatkan bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan negara mereka. Norma universal ini nantinya dimasukan dala pasal 1 ayat 2 piagam PBB. Perintisan pembentukan organisasi internasional dimulai tanggal 1 Januari 1942 dengan Declaration by United Nations, tanggal 30 Oktober 1943 Moscow declaration on General Security, tanggal 1 Desember 1943 Teheran Declaration, bulan Agustus 1944 s.d. September 1944 Dumbarton Oaks Conference, Februari 1945 diadakan Yalta Conference, membicarakan rencana pembentukan badan dunia, *general international organization*, diteruskan dengan pembentukan PBB dalam San Francisco Conference bulan April s.d. Juni 1945.

Di dalam San Francisco Conference Juni 1945 dibentuk badan dunia yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Organization*. Juga ditetapkan norma-norma Hukum Internasional yang tersirat di dalam pasal-pasal Piagam PBB, *the Charter of United Nations*. Dengan berdirinya PBB dan ditetapkannya norma-norma hukum internasional pada piagam PBB ini, terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya. Pasca Perang Dunia II, masyarakat dunia dilanda oleh perang dingin, yakni pertentangan antara negara-negara Heartland pimpinan Uni Soviet dan negara-negara Rimland pimpinan Amerika Serikat. Di dalam situasi internasional yang demikian itu juga terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan mereka. Bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta dalam upaya mempertahankan eksistensi negara proklamasi juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam masyarakat internasional yakni Dewan Keamanan PBB dan perang dingin. Baik Heartland maupun Rimland kedua-duanya ingin menarik Indonesia dalam pengaruhnya. Waktu itu Soekarno-Hatta memanfaatkan kekuatan-kekuatan dari negara-negara Rimland dalam hal ini Amerika Serikat dan Inggris.

Latar Belakang para tokoh:

Soekarno

Waktu kecil Soekarno bergaul dengan anak-anak yang melarat. Bergaul dengan massa. Soekarno menyatakan bahwa calon pemimpin rakyat harus berada dikalangan rakyat, bukan di luarnya. Sejak usia muda berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, menurutnya untuk menumbangkan imperialisme Belanda harus mempersatukan rakyat melarat Indonesia, atau mengadakan kekuatan, *macht-vorming*, baru kemudian dipergunakan kekuatan itu, *macht-aanwending*. Pada tahun 1927 Soekarno mendirikan suatu partai massa yakni PNI. Soekarno dibuang di Ende oleh Belanda.

Hatta

Waktu kecil Hatta kurang bergaul dengan anak-anak kebanyakan. Dari ibu kandung Hatta hanya mempunyai seorang kakak perempuan. Hatta umur 7 tahun, ibunya meninggal, ayahnya kawin lagi mempunyai 5 orang anak semuanya wanita, jadi Hatta adalah satu-satunya anak laki-laki dikeluarganya. Hatta berpandangan jauh ke depan, disiplin, tertib, pernah hidup di Eropa beberapa tahun lamanya. Hatta menghendaki adanya partai kader bukan partai massa seperti Soekarno. Hatta dibuang ke Tanah Merah kemudian dipindah ke Banda Neira Ambon.

Sjahrir

Sjahrir lahir dari keluarga terpandang di Minangkabau. Namun Sjahrir tidak berwatak feodalis malahan hidup merakyat, akrab dengan rakyat kebanyakan. Sejak sekolah di AMS Bandung, Sjahrir menunjukkan kepandaiannya, disenangi guru-guru dan teman-temannya. Sjahrir memimpin kelompok kesenian yakni sandiwara dengan nama "*Patriae Scientiaeque*" (PSQ). Sering pentas toneel (sandiwara) isinya "pembelaan terhadap tanah air". Sjahrir senang bergaul dengan pelajar-pelajar putri bangsa Barat, sering dansa bersama. Sjahrir mempunyai hubungan baik dengan orang baik dengan orang-orang Belanda dan Inggris, menghendaki penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui diplomasi. Sjahrir tidak pandai bergaul dengan massa. Di bidang kepartaian menghendaki partai kader bukan partai massa seperti Soekarno. Sjahrir dibuang di tanah merah kemudian dipindah ke Banda Neira.

Ketiga tokoh ini semenjak muda memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, walaupun caranya berbeda yang satu dengan yang lain. Pada jaman pendudukan Jepang tahun 1942 Soekarno, Hatta, dan Sjahrir mengadakan kesepakatan dalam menghadapi pendudukan Jepang itu, Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Sjahrir memimpin gerakan di bawah tanah. Soekarno-Hatta sebagai dwi tunggal.

Sewaktu menghadapi penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda tahun 1945-1947 Soekarno, Hatta, dan Sjahrir melihat konteks politik ekonomi domestik ada tendensi

lemah, sedangkan pada konteks ekonomi politik internasional ada peluang yang dapat dimanfaatkan di dalam rangka mempertahankan eksistensi negara proklamasi. Soekarno-Hatta meletakkan strategi dasar penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Soekarno, Hatta, dan Sjahrir berani memanfaatkan peluang-peluang itu dalam rangka mempertahankan eksistensi negara proklamasi. Malahan sewaktu menghadapi sikap Belanda yang tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, dengan pandangan yang tajam jauh ke depan Soekarno-Hatta mengubah bentuk pemerintahan RI menjadi demokrasi parlementer, multi partai sistem dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat pelaksanaannya itu. Hal itu untuk menghapus tuduhan Belanda bahwa negara RI adalah fasis, dan bentukan Jepang. Sebagai tindak lanjutnya Soekarno-Hatta memanfaatkan negara-negara Rimland yakni Inggris dan Amerika Serikat, dengan maksud agar kedua negara besar itu mendesak Dewan Keamanan PBB supaya menangani penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda dan mendesak pemerintah Belanda agar mengakui kedaulatan negara Indonesia. Karena Belanda sangat membutuhkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, maka desakan itu akhirnya memaksa sehingga akhirnya Belanda bersedia berunding dengan RI. Terjadilah perundingan Indonesia-Belanda. Jadi yang mendorong munculnya Maklumat Wakil Presiden No. X *"kehendak Soekarno, Hatta dan Sjahrir untuk membuka kemungkinan mengadakan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB"*.

Sebagai temuan pertama, dikemukakan:

“bahwa Soekarno-Hatta dibantu oleh Sjahrir menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Oktober 1945 adalah untuk membuka kemungkinan diadakannya perundingan Indonesia-Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB.

Kedua, mengenai permasalahan:

“Apa makna Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga Maklumat pelaksanaannya itu terhadap Perjanjian Linggarjati?”

Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 itu pada dasarnya berisi perubahan pasal IV aturan peralihan UUD 1945 yang semula berbunyi sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk berdasarkan UUD ini segala kekuasaannya dilakukan oleh Presiden dengan bantuan KNIP menjadi, sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk berdasarkan UUD ini KNIP disertai tugas kekuasaan legislatif dan turut serta menetapkan GBHN. Dan karena gentingnya keadaan maka pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh sebuah badan pekerja yakni BPKNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP. Kemudian ditetapkan tiga maklumat politik pelaksanaannya.

Tujuan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden RI No. X dan ketiga maklumat pelaksanaannya itu, untuk membuka kemungkinan untuk mengadakan perundingan dengan Belanda. Sebagaimana diterangkan terdahulu bahwa strategi Soekarno-Hatta dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan Indonesia Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Upaya mengadakan perundingan itu terhambat oleh sikap Pemerintah Belanda yang tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta dengan menuduh bahwa negara RI adalah fasis. Soekarno-Hatta mempunyai pandangan yang jauh ke depan, menghadapi hambatan perundingan itu maka ditetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan ketiga Maklumat politik pelaksanaannya itu untuk mengubah bentuk pemerintah RI menjadi demokrasi parlementair dengan multi partai sistem, sehingga tuduhan Belanda bahwa negara RI adalah fasis menjadi tidak relevan. Akhirnya Belanda terpaksa menuruti desakan Amerika Serikat dan Inggris untuk berunding dengan Indonesia. Terjadilah perundingan Indonesia Belanda di Linggarjati yang telah menghasilkan persetujuan Linggarjati.

Sebagai temuan kedua dikemukakan:

“Secara axiologis bahwa Pemerintah Belanda terpaksa bersedia berunding dengan RI dalam perjanjian Linggarjati karena tekanan Inggris dan Amerika Serikat, ditunjang oleh Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya”.

Ketiga, mengenai permasalahan:

“Apa makna persetujuan Linggarjati terhadap prospek pengakuan Kedaulatan Negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda?”

Pertanyaan dalam permasalahan ketiga tersebut dapat disederhanakan dengan pertanyaan berikut, “Apa konsekuensi persetujuan Linggarjati bagi upaya mempertahankan eksistensi negara proklamasi, Negara Republik Indonesia?”

Di muka telah dijelaskan bahwa penggunaan teori pengakuan dua tingkat yang diutarakan oleh JG Starke¹⁸⁰⁾ adalah sesuai dengan kenyataan yang terjadi, didukung oleh fakta. Sebagai contohnya, pemerintah RI menafsirkan pengakuan oleh Belanda sebagaimana tertera dalam pasal 1 persetujuan Linggarjati, menggunakan teori pengakuan dua tingkat yakni pengakuan *de facto* dan *de iure* tesis Starke. Sebagai konsekuensinya pemerintah RI beranggapan bahwa pemerintah Belanda telah mengakui negara RI secara *de facto*. Dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati, pemerintah RI langsung berhubungan dengan Mesir, India dan negara-negara lain. Negara RI telah diakui secara *de facto* oleh Mesir, India, Inggris dan Amerika Serikat, Australia dan negara-negara lainnya. Sewaktu pemerintah Belanda menyatakan tidak berlakunya persetujuan Linggarjati dan mengadakan Agresi I tanggal 21-7-1947, Dewan Keamanan PBB justru menangani penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda, dalam perjanjian Renville dan KMB dimana hasil KMB ini pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia (RI). Sebagai simpulan, penggunaan teori pengakuan dua tingkat dibenarkan oleh dunia internasional utamanya Dewan Keamanan PBB, didukung oleh fakta.

Berkaitan dengan prospek pengakuan Belanda terhadap kedaulatan negara Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pemerintah Belanda menafsirkan pengakuan kekuasaan *de facto* pemerintah RI pasal 1 persetujuan Linggarjati menggunakan teori pengakuan tiga tingkat sebagaimana diutarakan oleh JPA François,¹⁸¹⁾ yakni pengakuan kekuasaan *de facto* pemerintah, pengakuan *de facto* negara dan pengakuan *de iure*.

¹⁸⁰⁾ Starke JG, *An Introduction to International Law*, . . . , halaman 120

¹⁸¹⁾ François JPA, *Grondlijnen van het volkenrecht* . . . , halaman 107

Sebagai konsekuensinya dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati tanggal 25-3-1947, Kerajaan Belanda tetap menganggap kedaulatan atas wilayah Indonesia. Belanda mengaku tidak pernah dan tidak akan pernah mengakui negara RI secara de facto. Itulah sebabnya, ketika Belanda mengetahui bahwa pemerintah RI berhubungan langsung dengan negara-negara lain, seperti Mesir, India, Iran, Australia dan yang lain, sangat marah. Belanda menyatakan tidak berlakunya persetujuan Linggarjati dan mengadakan apa yang disebut aksi polisionil tanggal 21 Juli 1947. Sejak semula Belanda tidak menghendaki persetujuan Linggarjati berjalan sukses. Siasat Belanda, dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati, akan meneruskan membentuk negara kecil-kecil guna menghimpit wilayah RI. Juga berupaya menjepit sampai habis wilayah RI melalui peperangan. Belanda merencanakan memduduki Yogyakarta, dengan tujuan agar Pemerintah RI menjadi tidak berfungsi lagi. Memang menurut ajaran François, bahwa pengakuan kekuasaan de facto pemerintah akan tetap berlangsung selama pemerintah yang diakui itu tetap berfungsi. Tetapi kalau pada suatu saat pemerintah yang diakui itu tidak berfungsi, misalnya seluruh wilayahnya diduduki oleh musuh, maka pengakuan demikian hapus karena hukum. Inilah yang diupayakan oleh Belanda, setelah ditandatanganinya persetujuan Linggarjati.

Pemerintah RI melawan tindakan Belanda itu dengan kekuatan militer bersama rakyat, menurutnya tindakan itu bukan aksi polisionil tapi dianggap sebagai tindakan Agresi dari suatu negara terhadap negara RI, tindakan Belanda itu dianggap sebagai Agresi I oleh Belanda terhadap negara RI, maka terjadilah peperangan terbuka antara Belanda dan Indonesia. Di seluruh wilayah Jawa, Madura dan Sumatra berkobar pertempuran dahsyat.

Dewan Keamanan PBB turun tangan, karena menurutnya tindakan Belanda itu bukan aksi polisionil, tetapi merupakan perang antara dua negara. Hal yang demikian dinilai oleh Dewan Keamanan PBB sebagai membahayakan perdamaian dunia.

Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar diadakan gencatan senjata. Untuk itu dibentuklah Komisi Jasa-jasa Baik terdiri dari tiga negara, Belgia, Australia dan Amerika Serikat, disebut pula Komisi Tiga Negara. Tugas Komisi Tiga Negara ini mewakili Dewan

itu dibentuklah Komisi Jasa-jasa Baik terdiri dari tiga negara, Belgia, Australia dan Amerika Serikat, disebut pula Komisi Tiga Negara. Tugas Komisi Tiga Negara ini mewakili Dewan Keamanan PBB mengawasi gencatan senjata, untuk kemudian mengawasi perundingan Indonesia-Belanda yakni perundingan Renville yang menghasilkan persetujuan Renville.

Persetujuan Renville ini dilanggar lagi oleh Belanda dengan mengadakan Agresi II tanggal 19-12-1948, Yogyakarta diduduki, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan beberapa menteri ditangkap oleh Belanda. Sampai di sini Belanda menafsirkan bahwa pengakuan Belanda atas kekuasaan de facto pemerintah RI pada pasal 1 persetujuan Linggarjati hapus karena hukum, akan tetapi siasat Belanda ini tidak dibenarkan oleh masyarakat internasional.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya agar Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan ke Yogyakarta. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta untuk kemudian diadakan perundingan lebih lanjut. Terjadilah perundingan Indonesia-Belanda disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) di negeri Belanda. Kemudian Dewan Keamanan PBB membentuk badan internasional ialah UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) yang bertugas mengawasi Konferensi Meja Bundar itu.

Hasil dari KMB itu, pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia yakni negara RIS. Perkembangan berikutnya negara RIS ini pada tanggal 15 Agustus 1950 dilebur oleh Soekarno-Hatta menjadi negara Republik Indonesia Kesatuan yang tidak lain adalah negara proklamasi, negara Republik Indonesia.

Sebagai temuan ketiga dikemukakan:

Pertama:

"Secara ontologis bahwa eksistensi negara Proklamasi berhasil dipertahankan melalui kekuatan Diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh rakyat"

Dengan perkataan lain:

"Bahwa eksistensi Negara Proklamasi berhasil dipertahankan melalui kekuatan diplomasi yang didukung oleh kekuatan Tritunggal (Pemerintah RI, Militer dan Rakyat)".

teori pengakuan tiga tingkat tesis Francois tidak dibenarkan oleh masyarakat internasional utamanya Dewan Keamanan PBB, jadi tidak didukung oleh fakta.

Dengan perkataan lain, peneliti menyatakan bahwa teori pengakuan tiga tingkat tesis Francois adalah salah. Sedangkan teori pengakuan dua tingkat tesis Starke adalah benar.

Implikasi teoritiknya

Implikasi teoritik terhadap temuan pertama:

Temuan pertama ialah:

“Bahwa Soekarno-Hattadibantu oleh Sjahrir, menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Oktober 1945 adalah untuk membuka kemungkinan diadakannya perundingan Indonesia-Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB”.

Apa dan bagaimana pendapat ilmuwan lain terhadap “temuan pertama” dari penelitian ini?

Pertama : George McTurnan Kahin¹⁸²⁾ menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 1945 terjadi peristiwa penting, dimana Wakil Presiden Hatta setelah mengadakan pembicaraan dalam rapat lengkap KNIP, dengan mengatas namakan Presiden Soekarno dan dirinya sendiri menetapkan suatu “*decree*” yang isinya memberi kekuasaan legislatif kepada KNIP. Tujuan berikutnya akan mengubah pemerintah Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat posisi negara RI di dunia internasional dan membuka kemungkinan diadakannya perundingan antara Indonesia-Belanda. Yang dimaksud “*decree*” oleh Kahin adalah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945. Pernyataan penulis bahwa ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden No. X untuk membuka kemungkinan mengadakan perundingan Indonesia-Belanda, melengkapi pernyataan Kahin itu.

¹⁸²⁾ Kahin, George McTurnan, *Nasionalism and Revolution in Indonesia* . . . , halaman 140.

Kedua : Ben Anderson¹⁸³⁾ mengatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 1945 Sutan Sjahrir membuat perbuatan terbukanya yang pertama. Pada hari itu membuat petisi yang ditandatangani lima puluh anggota KNIP ditujukan kepada Soekarno-Hatta mendesak supaya kata-kata kunci “*dengan bantuan*” secara eksplisit ditafsirkan untuk memberi kepada KNIP status MPR. Kemudian di dalam rapat KNIP tanggal 16-10-1945 Hatta membacakan proklamasi X dimaksudkan untuk membuka lebar-lebar upaya Indonesia berdiplomasi di dunia internasional.

Yang dimaksud “proklamasi X” oleh Anderson adalah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 itu. Pernyataan peneliti, bahwa penetapan Maklumat Wakil Presiden No. X beserta ketiga maklumat pelaksanaannya itu untuk membuka kemungkinan mengadakan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB, atau berdiplomasi di dunia internasional, melengkapi pernyataan Anderson tersebut.

Ketiga : Anthony JS Reid¹⁸⁴⁾ menyatakan, bahwa setelah pendaratan tentara Sekutu tanggal 30 September 1945 diadakan perubahan pimpinan Republik. Sjahrir mulai mendemokrasikan Pemerintah RI. Hal ini terjadi dalam rapat KNIP tanggal 16-10-1945, dimana pada akhir rapat KNIP itu Wakil Presiden Hatta membacakan “proklamasi” yang isinya memberikan kepada KNIP suatu kekuasaan legislatif. Dan karena pentingnya keadaan, kewenangan baru KNIP itu dijalankan oleh BPKNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP. Pada tanggal 30 Oktober 1945 BPKNIP mengusulkan kepada Presiden supaya dibentuk partai-partai politik, usul itu empat hari kemudian yaitu tanggal 3 November 1945 disahkan oleh Presiden, dimana partai-partai itu harus mempersiapkan pemilihan umum bulan Januari 1949. Pemilu itu telah dijanjikan dalam “*manifesto politik*” tanggal 1-11-1945, yang merupakan pernyataan resmi yang paling jelas tentang posisi Republik

¹⁸³⁾ Anderson Ben, *Java in time of Revolution occupation and Resistance* . . . , halaman 200-207

¹⁸⁴⁾ Anthony JS Reid, *The Indoesian National Revolution*, Longman 1974. Alih bahasa oleh Pericles Katopo, *Revolusi Nasional Indonesia*, Pustaka Harapan, Jakarta 1966, halaman 120-122.

terhadap dunia luar. Dengan bertumpu kepada Piagam Atlantik, manifesto-politik ini menolak klaim Belanda apapun, atas kedaulatan yang legal. Namun manifesto itu menunjukkan sikap sangat liberal terhadap modal dan personalia Belanda. Republik akan menanggung semua hutang Hindia Belanda dan akan mengembalikan seluruh harta benda milik orang asing. Dalam upaya membentuk pemerintahan demokrasi parlementer pada tanggal 11-11-1945 BPKNIP telah mengumumkan bahwa Presiden telah menerima usulnya agar para menteri bertanggung jawab kepada badan perwakilan dalam hal ini KNIP.

Ketiga pihak yang terlibat dalam perencanaan ini adalah Soekarno, Hatta dan Sjahrir bersama kaum cendekiawan muda anti fasis. Walaupun Sjahrir berkuasa melalui perjuangan, Sjahrir segera di-indentifikasi dengan diplomasi.

Yang dimaksud Anthony Reid dengan kata "proklamasi" adalah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945. Sedangkan yang dimaksud "manifesto politik" adalah Maklumat Pemerintah RI tanggal 1-11-1945 tentang haluan politik Negara Republik Indonesia. Pernyataan terakhir bahwa Sjahrir diidentifikasi dengan diplomasi, maksudnya, semua itu dilakukan untuk membuka perundingan Indonesia-Belanda, untuk membuka kemungkinan berdiplomasi di dunia internasional.

Pernyataan peneliti bahwa ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden No. X beserta tiga maklumat pelaksanaannya itu dengan maksud membuka kemungkinan untuk dapat berunding dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB, dalam upaya melaksanakan strategi dasar yang ditetapkan oleh Soekarno-Hatta dalam rangka mempertahankan eksistensi Negara Proklamasi, adalah melengkapi pernyataan Reid tersebut.

Keempat : Pamoe Rahardjo¹⁸⁵⁾ menyatakan, ketika Bung Karno membentuk kabinet Presidental I, Sjahrir tidak diikuti-sertakan dalam kabinet tapi diberi jabatan sebagai ketua KNIP. Sjahrir tentu tidak puas sebagai pembantu. Diaturinya supaya para pendukungnya menuntut diubahnya KNIP menjadi Badan Legislatif, tujuannya supaya KNIP dapat mengubah UUD 1945 yang hanya mengenal Kabinet Presidental menjadi kabinet Parlementer.

¹⁸⁵⁾ Pamoe Raharjo, *Gerilya dan Diplomasi*, Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Jakarta, Desember 1996, halaman 276-306.

Presiden hanya sebagai simbol negara saja. Pada tanggal 7 Oktober 1945 Sjahrir mengumpulkan lima puluh tanda tangan anggota KNIP mengajukan petisi kepada Presiden agar mengadakan sidang pleno KNIP, menetapkan status KNIP menjadi Badan Legislatif. Wakil Presiden segera menyatakan setuju. Dengan menggunakan kesempatan yang baik ini, Sutan Sjahrir mendesak Wakil Presiden mengeluarkan apa yang kemudian dikenal dengan Maklumat Negara No. X tanggal 16 Oktober 1945, mengubah status KNIP menjadi lembaga legislatif dan sekaligus membentuk Badan Pekerja KNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP, bukan lagi kepada Presiden.

Pada tanggal 18 Oktober 1945 BPKNIP bersidang menyusun Maklumat Politik Pemerintah yang resmi diumumkan tanggal 1 Nopember 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden. Dalam Maklumat politik itu ditegaskan bahwa bentuk politik dalam dan luar negeri yang menurut penciptanya menunjukkan bahwa RI sekarang (waktu itu) baru benar-benar sebagai sebuah negara.

Semuanya itu disodorkan kepada Bung Karno dalam keadaan siap pakai. Jadi Bung Karno tidak dimintai pertimbangan lagi. Semua ini sesuai dengan konsepsi Sjahrir. Partai tunggal PNI yang didirikan tanggal 23 Agustus 1945 dengan ketuanya Soekarno, Wakil ketua Moch. Hatta dibubarkan dan langsung diserukan kepada masyarakat untuk beramai-ramai membentuk partainya masing-masing. Padahal partai tunggal yang disetujui bersama dimaksudkan agar rakyat Indonesia tidak pecah-belah dalam berbagai partai. Jika keadaan sudah baik barulah partai-partai dibangun.

Sutan Sjahrir yang tadinya menjauh dengan Soekarno-Hatta yang tidak setuju Proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta, lewat Maklumat Negara RI No. X tanggal 16-10-1945 itu, anggapan itu ditelannya untuk menjadikan dirinya tokoh penting di Negara RI. Proklamasi yang tadinya dianggap berbau Jepang, menjadi hilang baunya. Meskipun dicaci maki demikian hebat, Bung Karno tidak berbuat sesuatu untuk menggagalkan *Coup d'etat Sutan Sjahrir*, karena Hatta sudah merestuinnya, menjaga jangan sampai Dwi tunggal Soekarno-Hatta pecah. Ia tidak menentang arus meskipun disadari telah terjadi pengkhianatan terhadap UUD 1945.

Kabinet presidentil diganti dengan kabinet Parlementer. Sjahrir ditunjuk menjadi formatir. Terbentuklah kabinet parlementer. Kabinet ini tidak lagi bertanggung-jawab kepada Presiden melainkan kepada BPKNIP yang didominasi oleh Partai Sosialis.

Sjahrir segera memberi isyarat bahwa ia bersedia berkompromi dengan Belanda. Politik pemerintah Sjahrir sebetulnya politik bangkrut yang tidak membawa Indonesia ke kemerdekaan, tetapi kembali ke penjajahan. Mereka berunding dengan Belanda tidak didasari pemikiran merdeka 100% tapi kompromi yang akan menjual bangsa Indonesia dan melikuidasi Tentara Nasional Indonesia.

Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin merupakan dwi tunggal yang akan menyingkirkan Bung Karno. Dengan Maklumat Negara RI No. X mereka untuk sementara masih memakai Bung Karno sebagai Presiden, tapi setelah itu akan melemparkannya jauh-jauh. Apa pertimbangan Bung Karno? Bukankah ketika Sjahrir sebagai formatir menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri Kabinet Parlementer I dengan menerjang UUD 1945, Presiden Soekarno tidak melantik kabinetnya hanya diumumkan lewat radio.

Sewaktu Sjahrir diculik, Bung Karno yang menyelamatkannya. Waktu terjadi peristiwa Surabaya Jendral Philip Christison minta bantuan Bung Karno menghentikan pertempuran. Kekuatan de facto RI di Jawa dan Sumatra dicoba hancurkan oleh Belanda dengan Agresi militernya tapi semuanya gagal. Kekuatan 60-70 juta rakyat Indonesia jauh mengungguli kekuatan persenjataan Belanda.

Maka diselenggarakanlah perundingan Linggarjati yang hanya berakhir dengan Agresi militer Belanda pertama 21-7-1947 dimana Belanda berhasil menguasai 3/4 Pulau Jawa.

Demikianlah ungkapan Pramoe Rahardjo di dalam bukunya itu.

Menanggapi ungkapan di atas itu peneliti menyatakan bahwa seluruh isi ungkapan itu tidak sesuai dengan "temuan baru" di dalam disertasi ini. Ungkapan di atas itu merupakan data-data yang tidak didasari dengan analisa yang rasional. Dan kadang-kadang data-data itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal itu terjadi karena Pramoe Rahardjo kelihatan sekali tidak memahami secara baik, strategi dasar penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda dari Soekarno-Hatta dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Proklamasi

waktu itu. Tidak dibedakannya antara strategi dan taktik atau siasat Soekarno-Hatta dalam menghadapi Belanda waktu itu. Seperti misalnya, disebutkannya Maklumat Negara RI No. X tanggal 16-10-1945. Itu bukan Maklumat Negara No. X tetapi Maklumat Wakil Presiden RI No. X, juga tidak diuraikan lebih lanjut apa Maklumat No. X itu, mengapa pemerintah menetapkan Maklumat No. X itu untuk apa Maklumat No. X itu ditetapkan apa makna Maklumat itu terhadap diperolehnya pengakuan Kedaulatan Negara Indonesia oleh pemerintah Belanda. Bagaimana cara Soekarno-Hatta berdiplomasi di dunia internasional yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh rakyat waktu itu. Karena tidak dipahaminya strategi dasar Soekarno-Hatta termaksud, maka substansi seluruh ungkapan di atas tidak bisa dilihat. Substansinya tentang apa ungkapan itu, tidak nampak.

Peneliti mencoba memberi gambaran apa makna ungkapan itu, dan apa substansinya. Peneliti menduga apa yang dimaksud dengan ungkapan di atas adalah serangkaian peristiwa seperti di bawah ini: Bahwa bangsa Indonesia telah lama sekali mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Cita-cita luhur itu belum tercapai sampai dengan terjadinya Perang Dunia II. Pada pasca Perang Dunia II di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, ada *vacuum of power*. Soekarno-Hatta memanfaatkan situasi itu dan mendasarkan pada prinsip III Atlantic Charter, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945. Gema proklamasi itu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta bertekad mempertahankan negara Proklamasi tersebut. Di sisi lain, pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu berada di Australia, tidak mengakui proklamasi tersebut, dan berniat menghancurkan negara baru itu melalui peperangan. Alasan Belanda bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah termasuk wilayah Kerajaan Belanda berdasarkan pasal 1 Grandwet.

Maka persengketaan Indonesia-Belanda tidak dapat dielakkan. Pertanyaan yang timbul, bagaimana cara penyelesaian persengketaan termaksud? Pemerintah Belanda menginginkan penyelesaian persengketaan itu melalui peperangan.

Di sisi lain, Soekarno-Hatta adalah tokoh pemimpin yang mempunyai pandangan sangat tajam, mempunyai pandangan jauh ke depan. Utamanya Soekarno adalah tokoh

yang mampu memanfaatkan peluang-peluang itu. Soekarno-Hatta melihat konteks ekonomi-politik domestik cenderung lemah, di sisi lain melihat konteks ekonomi politik internasional terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mempertahankan eksistensi negara proklamasi. Oleh karena itu Soekarno-Hatta meletakkan strategi dasar penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Menurut Soekarno-Hatta strategi inilah yang dapat dilakukan dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda dalam rangka mempertahankan keberadaan negara proklamasi. Penghalang apapun yang akan terjadi akan dihilangkan untuk tujuan yang lebih besar ialah tetap berdirinya negara Proklamasi.

Di dalam operasionalnya, Soekarno-Hatta menghendaki mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yang waktu itu dimanfaatkan oleh Belanda menuduh RI fasis, karena di sana ada sentralisasi kekuasaan ditangan Presiden. Karenannya Belanda tidak mau berunding dengan negara fasis, Guna menangkal hambatan perundingan ini pada tanggal 16-10-1945 Soekarno-Hatta menetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X . Hanya saja Soekarno meminta kepada Hatta yang memimpin sidang itu, Kemudian Maklumat Wakil Presiden RI No. X ini dilengkapi dengan Maklumat politik pelaksanaannya yakni Maklumat tanggal 1-11-1945 tentang haluan politik negara RI, malahan Maklumat ini draftnya disusun oleh Soekarno,¹⁸⁶⁾ kemudian Maklumat tanggal 3-11-1945 tentang izin mendirikan partai politik dan pengumuman BPKNIP No. 5 tanggal 11-11-1945 tentang pertanggungjawab menteri kepada badan legislatif dalam hal ini KNIP. Bentuk pemerintah RI berubah menjadi kabinet parlementer yang menganut multi partai sistem. Belanda tidak bisa lagi menuduh bahwa RI adalah fasis.

Di dalam operasionalnya, Soekarno-Hatta memanfaatkan partai sosialis, yakni Sjahrir. Sjahrir waktu itu mempunyai hubungan baik dengan orang-orang AFNEI (Inggris), sosialis Inggris ketemu dengan sosialis Indonesia. Orang Inggris mendesak Sjahrir supaya mengubah bentuk pemerintahan Indonesia agar ada Perdana Menteri seperti Inggris. Itulah sebabnya mengapa pada tanggal 7 Oktober 1945 Sjahrir mengajukan petisi tersebut.

¹⁸⁶⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan DR. H. Roeslan Abdoelgani . . . , halaman 77.

Isi petisi itu sesuai dengan strategi Soekarno-Hatta. Maka dari itu Hatta langsung setuju saja. Soekarno juga setuju.

Soekarno-Hatta pintar, Soekarno menyatakan kepada Hatta, "Biar orang-orang PSI kita masukkan saja dalam pemerintah, utamanya Sjahrir. Nantinya kita tugas melaksanakan perundingan dengan Belanda".¹⁸⁷⁾ Karena itulah Sjahrir yang ingin menjadi Perdana Menteri, disetujui oleh Soekarno-Hatta.

Setelah Belanda terus didesak oleh Inggris dan Amerika Serikat, akhirnya terpaksa mau berunding dengan Indonesia. Alasan bahwa RI adalah fasis, sudah tidak ada lagi. Terjadilah perundingan Linggarjati. Berpangkal dari persetujuan Linggarjati dimungkinkan terjadinya perundingan Renville kemudian KMB di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Sebagai hasil KMB pada 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda, mengakui kedaulatan negara RIS. Negara RIS ini pada 15-8-1950 dilebur menjadi Negara RI Kesatuan yang tidak lain adalah negara Proklamasi.

Secara epistemologis strategi Soekarno-Hatta itu berhasil secara gemilang. Akan tetapi karena strategi Soekarno-Hatta itu sangat tinggi tingkat rasionalnya, dan sebagai hasil pandangan yang sangat jauh kedepan, menjangkau masa depan bangsa dan negara, banyak sekali orang-orang Indonesia yang tidak mampu memahaminya secara baik, sehingga tidak paham benar atas strategi mulia itu. Dan sebagai konsekwensinya mereka menentang perundingan itu. Banyak tokoh-tokoh yang tidak mampu memahami strategi itu dan menentangnya, termasuk tokoh ini adalah Pramoe Rahardjo ini. Bukan itu saja, tokoh-tokoh anggota KNIP sewaktu membahas penandatanganan persetujuan Linggarjati di Malang tanggal 25 Februari 1947 secara aklamasi menolak untuk menyetujui Linggarjati. Baru setelah Soekarno mutung pulang ke Yogya, dan Hatta diminta untuk menghadapi sidang KNIP itu, dengan memberi alternatif, apakah KNIP menerima Keppres No. 6/1946 atau Presiden dan Wakil Presiden mundur. Barulah seluruh KNIP menyetujui persetujuan Linggarjati.

Demikianlah dugaan peneliti mengenai makna ungkapan tersebut di atas. Kalau dugaan ini benar. Ungkapan Pramoe Rahardjo tersebut mudah diluruskan: "Sjahrir

¹⁸⁷⁾ Lampiran II, *Hasil Penelitian dengan Wawancara Khusus*, Wawancara dengan DR. H. Roeslan Abdoelgani . . . , halaman 72.

mengubah KNIP menjadi badan legislatif tujuannya agar KNIP dapat mengubah UUD 1945". Yang ingin mengubah pasal IV Aturan Peralihan UUD itu bukan saja hanya Sjahrir, tetapi Soekarno-Hatta, dalam rangka melaksanakan strateginya itu. Juga ungkapan: "semuanya disodorkan kepada Bung Karno dalam keadaan siap pakai, jadi Bung Karno tidak diminta pertimbangan lagi". Ungkapan itu tidak benar. Soekarno tidak mungkin mau didikte oleh Sjahrir. Waktu akan proklamasi saja Bung Karno didesak pemuda asuhan Sjahrir tidak mau apalagi setelah jadi Presiden. Bung Karno bukan didikte oleh Sjahrir, tetapi Sjahrirlah yang ditugasi oleh Bung Karno agar melakukan diplomasi. Nah untuk membuka kemungkinan diplomasi Soekarno-Hatta menetapkan Maklumat RI No. X yang pada hakekatnya mengubah UUD, ini untuk menyukseskan strategi Soekarno-Hatta itu.

Juga mengenai ungkapan: "Dengan Maklumat Negara No. X Sjahrir untuk sementara masih memakai Bung Karno sebagai Presiden, tetapi setelah itu akan melemparkannya jauh-jauh". Ungkapan ini juga tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah mampu Sjahrir melemparkan Soekarno jauh-jauh. Sjahrir tidak didukung oleh rakyat, sebaliknya Soekarno didukung oleh rakyat. Selain itu di dalam kenyataan bukanlah Sjahrir mendikte Soekarno, tetapi sebaliknya Sjahrir diikutkan dalam pemerintahan RI yang akan diberi tugas oleh Soekarno-Hatta mengadakan perundingan dengan Belanda, dalam rangka mensukseskan strategi dasar Soekarno-Hatta tersebut di atas.

Juga mengenai ungkapan: "Partai tunggal PNI yang didirikan tanggal 23 Agustus 1945 dengan ketuanya Soekarno dan wakil ketua Moch. Hatta dibubarkan dan oleh Sjahrir langsung diserukan kepada masyarakat untuk beramai-ramai membentuk partainya masing-masing".

Ungkapan ini semuanya tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam sejarah perjuangan kenegaraan Indonesia tidak ada pembentukan PNI tanggal 23 Agustus 1945 itu yang ada adalah PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 memerintahkan kepada rakyat agar membentuk PNI,¹⁸⁸⁾ namun sewaktu sedang memprosesnya, ditunda pembentukan PNI

¹⁸⁸⁾ Koenodriprodjo, *Himpunan UU, Penetapan, Peraturan Pemerintah RI 1945 . . .*, halaman 117

itu dengan Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945¹⁸⁹⁾ dan akhirnya tidak ada pembentukan PNI berdasarkan ketetapan PPKI tanggal 22-8-1945 itu. PNI tidak jadi dibentuk, dengan sendirinya belum ada ketuanya, apa yang diketuai. Jadi ungkapan bahwa Bung Karno ketua PNI dan Hatta wakil ketua itu tidak sesuai dengan kenyataan. Baru nantinya setelah ditetapkan Maklumat Pemerintah tanggal 3-11-1945 tentang partai politik,¹⁹⁰⁾ dibentuklah PNI dan partai-partai yang lain. Jadi pembentukan partai-partai itu bukannya “Sjahrir menyerukan kepada masyarakat untuk ramai-ramai mendirikan partai masing-masing”, tetapi berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3-11-1945.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti menyatakan bahwa buku *Gerilya dan Diplomasi* ini, kiranya dapat disempurnakan di sana-sini dengan memperhatikan “temuan baru” di dalam penelitian ini. Peneliti berpendapat dengan diterbitkannya buku tersebut sangat berguna bagi ilmu pengetahuan.

Kelima: YB Soedarmanto¹⁹¹⁾ menyatakan:

Perbuatan dan tindakan masyarakat yang dijalankan pada masa kini menjadi kehadiran “pahlawan” bermakna seperti diungkapkan oleh Chairil Anwar, “Kaulah yang tentukan nilai-tulang-tulang” tindakan memberi nilai itu berlangsung dalam gerak masyarakat melihat keadaan dan permasalahan pada masa sekarang. Hasil penglihatan itu menimbulkan kesadaran menghargai jasa dan pengorbanan orang lain. Kesadaran itu sering disebut sebagai kesadaran kultural.

Ada dua aspek yang berkaitan dengan kesadaran itu:

Pertama:

Adanya keseimbangan antara perjuangan seorang pahlawan dengan perjuangan masyarakat sekarang. Permasalahan itu dapat berwujud pada penerusan idealisme seorang pahlawan, seperti nasionalisme dalam bidang ekonomi dan keprihatinan terhadap perang kaya-miskin.

¹⁸⁹⁾ Koenodriprodjo, *Himpunan . . .*, halaman 46

¹⁹⁰⁾ Koenodriprodjo, *Himpunan . . .*, halaman 117, lihat pada Berita RI Th. I No. I

¹⁹¹⁾ Soedarmanto YB., *Jejak-jejak Pahlawan* (Dari Sultan Agung hingga Syekh Yusuf), PT Grasido, Jakarta, 1996, halaman viii, ix, x.

Kedua:

Kesadaran kultural juga menyangkut kepekaan masyarakat akan nilai kemanusiaan yang menurut istilah Peter L. Berger disebut sebagai “biaya manusiawi”. Masyarakat sering lebih melihat *hasil* dari pada *prosesnya*. Bila orang melihat candi Borobudur, orang dapat terpukau akan kemegahan bangunan itu. Namun orang sering melupakan proses pembuatannya. Beberapa tukang memeras keringat, bahkan ada yang mati waktu candi dibangun. Pengangkutan batu-batu raksasa pasti memakan korban. Pemahaman ini bukan untuk menjadikan orang pesimistis dalam melihat kehidupan tetapi peka terhadap jasa, jerih payah dan pengorbanan orang lain. Demikian penjelasan YB Soedarmanto.

Menanggapi pernyataan itu peneliti merasa kekurangan di dalam menilai latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik para tokoh. Peneliti hanya melihat aspek pertama dan tidak memperhatikan aspek kedua. Peneliti menyanjung-sanjung peran tokoh tapi kurang menyadari proses terjadinya jasa yang diberikan para tokoh itu kepada masyarakat. Dengan menyadari kekurangan ini peneliti menyatakan bahwa hasil pembahasan latar belakang pribadi mengenai pengalaman politik tokoh-tokoh dalam penelitian ini merupakan pelengkap terhadap pernyataan tersebut di atas.

Simpulan:

Kahin menyatakan: pada tanggal 16-10-1945 Hatta menetapkan “decree” yang memberi kekuasaan legislatif kepada KNIP, bertujuan mengubah Pemerintah RI, untuk membuka kemungkinan diadakannya perundingan Indonesia-Belanda.

Peneliti menyatakan: bahwa ditetapkannya maklumat wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 untuk membuka kemungkinan mengadakan perundingan Indonesia-Belanda.

Anderson menyatakan: Hatta membacakan proklamasi X dengan maksud untuk membuka lebar-lebar upaya Indonesia berdiplomasi di dunia internasional.

Peneliti menyatakan: bahwa ditetapkannya maklumat Wakil Presiden RI No. X beserta ketiga maklumat politik pelaksanaannya itu, untuk membuka kemungkinan diadakannya perundingan dengan Belanda.

Reid menyatakan: bahwa pada akhir rapat KNIP tanggal 16-10-1945 Hatta membacakan proklamasi yang isinya memberikan kepada KNIP kekuasaan legislatif. Pada tanggal 30-10-1945 BPKNIP mengusulkan pembentukan partai-partai. Pada tanggal 1-11-1945 dikeluarkan manifesto politik. Dalam upaya membentuk pemerintahan demokrasi pada tanggal 11-11-1945 BPKNIP mengumumkan para menteri bertanggung jawab kepada KNIP. Ketiga pihak yang terlibat dalam perencanaan ini adalah, Soekarno, Hatta dan Sjahrir. Dan Sjahrir segera diidentifikasi dengan diplomasi.

Peneliti menyatakan: bahwa ditetapkannya maklumat Wakil Presiden No. X beserta ketiga maklumat politik pelaksanaannya itu dengan maksud membuka kemungkinan untuk dapat berunding dengan Belanda.

Jadi “temuan pertama” ini melengkapi pernyataan, Kahin, Anderson, Reid, Pramoe Rahardjo dan YB Soedarmanto.

Implikasi teoritik terhadap temuan kedua:

Temuan kedua ialah:

"Bahwa Pemerintah Belanda terpaksa bersedia berunding dengan RI di dalam Perjanjian Linggarjati karena tekanan Inggris dan Amerika Serikat, ditunjang oleh Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Oktober 1945 beserta tiga maklumat politik pelaksanaannya".

Apa pendapat ilmuwan lain tentang Maklumat Wakil Presiden No. X kaitannya dengan perjanjian Linggarjati dan teori pengakuan itu?

Para ilmuwan yang membahas pertumbuhan kenegaraan Indonesia kurun waktu 1945-1947, tidak ada yang membahas maklumat Wakil Presiden No. X kaitannya dengan perjanjiannya dengan perjanjian Linggarjati. Juga tidak ada yang membahas penggunaan teori “pengakuan” oleh pihak-pihak di dalam pelaksanaan Persetujuan Linggarjati. Para ilmuwan seperti: Anthony J S Reid,¹⁹²⁾ Ben Anderson,¹⁹³⁾ George McTurnan Kahin¹⁹⁴⁾,

¹⁹²⁾ Anthony J S Reid, *The Indonesia National Revolution . . .*, halaman 120-122.

¹⁹³⁾ Anderson Ben, *Java in time of Revolution occupation and Resistance . . .*, halaman 200-207.

¹⁹⁴⁾ Kahin, George McTurnan, *Nasionalism and Revolution in Indonesia . . .*, halaman 150.

Tobing KML,¹⁹⁵⁾ C Smit,¹⁹⁶⁾ Rosihan Anwar,¹⁹⁷⁾ Ide Anak Agung Gde Agung,¹⁹⁸⁾ Robert Bridson Cribb,¹⁹⁹⁾ Koestiniyati Mochtar,²⁰⁰⁾ Mochamad Roem,²⁰¹⁾ Manai Sophiaan,²⁰²⁾ tidak ada yang membahas Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan Persetujuan Linggarjati, juga tidak membahas persetujuan Linggarjati kaitannya dengan penggunaan teori “pengakuan” oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan persetujuan Linggarjati termaksud.

Jadi sepengetahuan peneliti “temuan kedua” ini boleh dikatakan baru, karena ternyata belum ada peneliti atau penulis lain yang membahas hal tersebut.

Implikasi teoritik terhadap temuan ketiga:

Temuan ketiga ialah:

Pertama:

"Bahwa eksistensi Negara Proklamasi berhasil dipertahankan melalui kekuatan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan dikukung oleh rakyat".

Dengan perkataan lain "bahwa eksistensi Negara Proklamasi berhasil dipertahankan melalui kekuatan diplomasi yang didukung oleh kekuatan Tritunggal (Pemerintah RI, Militer dan Rakyat)".

¹⁹⁵⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* . . . , halaman 24-34

¹⁹⁶⁾ Smit C, *De kolonisatie van Indonesia* . . . , halaman 11-55.

¹⁹⁷⁾ Rosihan Anwar, *Soebadio Sastrosatomo Pengemban misi politik* . . . , halaman 87.

¹⁹⁸⁾ Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggarjati prolog dan epilog* . . . halaman 8-53, 146-208.

¹⁹⁹⁾ Cribb Robert Bridson, *Jakarta in the Revolution 1945-1949* . . . , halaman 40-55

²⁰⁰⁾ Koestiniyati Mochtar, *Memoar Perjuangan Republik Indonesia Seputar Jaman Singapura* . . . , halaman 18

²⁰¹⁾ Mochamad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI* . . . , halaman 3-17.

²²²⁾ Manai Sophiaan, *Apa Masih Ingat* . . . , halaman 65, 83, dan 153.

Kedua:

"Bahwa di dalam pelaksanaan persetujuan Linggarjati pemanfaatan teori pengakuan tiga tingkat tesis Francois tidak dibenarkan oleh masyarakat internasional utamanya Dewan Keamanan PBB, sedangkan pemanfaatan teori pengakuan dua tingkat tesis Starke dibenarkan oleh masyarakat internasional. Peneliti berpendapat "bahwa teori pengakuan tiga tingkat tesis Francois adalah salah, sedangkan teori pengakuan dua tingkat tesis Francois adalah benar".

Temuan ketiga yang pertama:

"Bahwa dengan ditetapkan maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 dimungkinkan terlaksananya Perjanjian Linggarjati yang menghasilkan "Persetujuan Linggarjati". Berpangkal dari Persetujuan Linggarjati dimungkinkan untuk mengadakan perundingan Indonesia-Belanda lebih lanjut di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Perundingan dimaksud adalah Perundingan Renville menghasilkan Persetujuan Renville, disusul perundingan berikutnya ialah Konferensi Meja Bundar (KMB) di negeri Belanda. Hasil KMB bahwa pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 15 Agustus 1950 negara RIS dilebur menjadi negara Republik Indonesia Kesatuan yang tidak lain adalah negara Proklamasi".

Sebagai simpulan:

"Bahwa eksistensi negara Republik Indonesia dapat dipertahankan berdasar kekuatan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh kekuatan rakyat" atau dengan perkataan lain: "Bahwa eksistensi negara Republik Indonesia dapat dipertahankan berdasarkan kekuatan diplomasi yang didukung oleh kekuatan "tritunggal pemerintah, militer, dan rakyat" dapat ditarik simpulan lebih lanjut: "Bahwa kekuatan negara Republik Indonesia terletak pada kekuatan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat".

Hal tersebut di atas merupakan simpulan akhir dari penelitian ini, merupakan "temuan baru" yang diabstraksikan dari konsep-konsep yang didapatkan dari seluruh isi disertasi ini.

Temuan baru ini oleh peneliti akan disumbangkan kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan politik kenegaraan utamanya dalam proses pembentukan kenegaraan. Semoga sumbangan teori baru ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada masa-masa mendatang.

*Apa dan bagaimana pendapat ilmuwan lain
tentang temuan baru tersebut:*

Pertama: KML Tobing²⁰³⁾ menyatakan bahwa campur tangan dunia luar terhadap masalah Indonesia tidak dikehendaki oleh massa. Sewaktu Sjahrir berupaya keras agar persetujuan Linggarjati diterima, mula-mula orang-orang Kalimantan, Sulawesi dan Maluku menuduh Sjahrir mengkhianati proklamasi. Namun setelah mendengar penjelasan dari Soekarno-Hatta mereka rela menunggu perkembangan.

Ungkapan KML Tobing tersebut membuktikan bahwa Soekarno-Hatta dalam mengupayakan diplomasi di dunia internasional benar-benar didukung oleh rakyat.

Kedua: C. Smit²⁰⁴⁾ menyatakan bahwa tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk badan internasional dengan nama "komisi jasa-jasa baik" yang terdiri dari wakil-wakil Belgia, Australia dan Amerika Serikat. Tugas badan baru itu untuk membantu kedua belah pihak menemukan suatu dasar baru bagi perundingan-perundingan dan akhirnya untuk menghentikan persengketaan antara Indonesia-Belanda. Ungkapan peneliti dalam temuan ketiga yang menyatakan: bahwa temuan baru ini merupakan hasil penelitian dari strategi Soekarno-Hatta, di dalam rangka mempertahankan eksistensi negara RI, Soekarno-Hatta dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Dibentuknya "komisi jasa-jasa baik" oleh Dewan Keamanan PBB membuktikan bahwa mulai saat itu persengketaan Indonesia-Belanda penyelesaiannya ditangani oleh Dewan Keamanan

²⁰³⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* . . . , halaman 191

²⁰⁴⁾ Smit C, *De Dekolonisatie van Indonesia* . . . , halaman 27.

PBB. Dengan demikian strategi dasar Soekarno-Hatta terlaksana secara utuh. Perkembangan selanjutnya diadakan perjanjian Renville di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB dalam hal ini oleh “komisi jasa-jasa baik”. Pada 19 Desember 1948 Belanda mengadakan Agresi II, Yogyakarta diduduki, Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa Menteri ditawan oleh Belanda. Dewan Keamanan PBB memerintahkan kepada Belanda agar Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta kemudian diadakan konferensi meja bundar (KMB) di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB dalam hal ini UNCI. Hasil KMB itu, Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dilebur menjadi negara Republik Indonesia Kesatuan (negara Proklamasi), ungkapan peneliti ini melengkapi pernyataan C Smit tersebut.

Ketiga: Rosihan Anwar²⁰⁵⁾ menyatakan, betapa hebatnya Soekarno, ternyata waktu pertempuran di Semarang, Ambarawa dan Surabaya bulan Nopember 1945 Tentara Inggris minta perantaraan Soekarno untuk menghentikan pertempuran. Soekarno bicara: “stop, pertempuran stop.” dan rakyat mentaatinya. Begitu besar pengaruh Soekarno terhadap rakyat Indonesia. Menurut penilaian Inggris dan Prancis di Dewan Keamanan PBB Soekarno tetap besar peranannya (laporan Soedarpo). Ungkapan ini memperkuat “*temuan baru*” bahwa Soekarno-Hatta menjalankan diplomasi didukung oleh rakyat.

Keempat: PRS Mani²⁰⁶⁾ menyatakan bahwa RI saat itu hanya memiliki sedikit sumber daya, setelah tiga tahun terakhir masa pendudukan Jepang yang telah mengoyahkan perekonomian Indonesia, sungguh merupakan prestasi luar biasa bagi para pemimpinnya mampu mempertahankan roda negara selama empat tahun dalam menghadapi dua kali sebulan Belanda dan perang ekonomi menghadapi blokade oleh Belanda. Soekarno tetap memelihara semangat revolusioner rakyat. Hatta bekerja keras menghadapi masalah sehari-hari yang menyangkut makanan dan keperluan esensiil. Ungkapan peneliti di dalam “*temuan*

²⁰⁵⁾ Rosihan Anwar, *Soebadio Sastrosatomo Pengemban misi Politik . . .*, halaman 161-162.

²⁰⁶⁾ Mani PRS, *The Story of Indonesian Revolution 1945-1950 . . .*, halaman 183.

baru” dalam disertasi ini, bahwa Soekarno-Hatta sejak usia muda sampai masa kemerdekaan berupaya keras untuk memerdekakan bangsanya. Dengan adanya hubungan dwitunggal Soekarno-Hatta yang sangat harmonis ditunjang oleh kekuatan rakyatnya berhasil mempertahankan eksistensi negara RI berdasar kekuatan diplomasi, hal ini melengkapi pernyataan PRS Mani tersebut.

Kelima: Jenderal Soedirman²⁰⁷⁾ di dalam menyambut tahun baru tanggal 1 Januari 1947 menyatakan bahwa perjuangan harus dilangsungkan terus. Kesatuan nasional harus dikoordinasikan. Bahan makan dikirim sebanyak-banyaknya ke garis depan. Semua gerakan nasional harus dilakukan dalam formasi pasukan, bukan perorangan. Gerakan militer Belanda sudah membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah cukup sabar, sudah banyak tipu dan muslihat dari pihak tentara Belanda yang dihadapi oleh Pemerintah RI. Ungkapan ini memperkuat “temuan baru”, makna pernyataan Soedirman itu bahwa tentara RI bersama rakyat menyelamatkan kedaulatan RI dengan segala kekuatan yang ada dan siap bertempur apabila Belanda menyerang wilayah RI. Dengan pernyataan ini membuktikan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta ditunjang oleh militer dan didukung oleh seluruh rakyat.

Keenam: Jenderal Soeharto Presiden RI,²⁰⁸⁾ waktu membuka musyawarah besar nasional angkatan 1945 di auditorium deparpostel Jakarta hari Selasa tanggal 10-12-1996 menyatakan bahwa generasi 45 sering dikritik, karena kurang menghargai peran diplomasi dan terlalu mementingkan peran perjuangan bersenjata. Kita tidak dapat menyesalkan timbulnya kesan itu, karena memang peran perjuangan bersenjata dalam kemerdekaan kita tidak kecil. Namun juga tidak boleh dikecilkan peran para pejuang nasional yang bergerak dalam bidang diplomasi. Merekalah yang berhasil menggalang dukungan pendapat umum dunia,

²⁰⁷⁾ Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati* halaman 21.

²⁰⁸⁾ Jenderal Soeharto Presiden RI, *Pidato beliau dimusyawarah Besar Nasional Angkatan 1945 di Jakarta tanggal 10 Desember 1996*. Dimuat pada *Harian Kompas* hari Rabu tanggal 11-12-1996, halaman 1 kolom 1.

yang juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk merumuskan penyelesaian mendasar dari konflik kita dengan bekas penjajah. Demi kebenaran sejarah memang sudah saatnya hal itu diluruskan kembali. Dengan jujur kita perlu mengakui bahwa diplomasi maupun perjuangan bersenjata mempunyai andil masing-masing dalam keseluruhan perjuangan kemerdekaan kita. Kaum muda kita akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap, jika kedua sisi perjuangan nasional ini diungkapkan secara seimbang kepada mereka. Ungkapan ini hampir sama atau mirip dengan pendapat akhir atau temuan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa eksistensi negara proklamasi dapat ditegakkan dengan kekuatan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Temuan ketiga yang kedua:

Makna Maklumat Wakil Presiden No. X terhadap perjanjian Linggarjati ialah: "Bahwa dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden No. X beserta ketiga maklumat pelaksanaannya itu memungkinkan sikap Belanda terpaksa menuruti desakan Amerika Serikat untuk bersedia berunding dengan Indonesia. Maka terjadilah perundingan Indonesia-Belanda Linggarjati. Dengan demikian, terjadinya perjanjian Linggarjati karena adanya tekanan dari Inggris dan Amerika Serikat ditunjang oleh Maklumat Wakil Presiden No. X beserta ketiga maklumat politik pelaksanaannya".

Persetujuan Linggarjati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Namun pelaksanaan Persetujuan Linggarjati menimbulkan kesulitan baru, disebabkan karena antara pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia menafsirkan makna "pengakuan" pasal 1 Persetujuan itu berbeda yang satu dengan yang lain. Pemerintah Belanda menafsirkannya berdasarkan teori pengakuan tiga tingkat seperti tesis Francois, sedangkan pemerintah RI menafsirkannya berdasarkan teori pengakuan dua tingkat dari Starke.

Implikasi teoritik terhadap penggunaan teori pengakuan tiga tingkat yang dikemukakan Francois, ternyata tidak didukung oleh fakta, tidak dibenarkan oleh masyarakat internasional khususnya Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan pengalaman pemerintah RI sewaktu berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sampai diperolehnya "pengakuan" kedaulatan negara RIS dari pemerintah Belanda, ternyata tesis

Francois tidak didukung oleh fakta. Sedangkan tesis Starke yang mengemukakan teori pengakuan dua tingkat (de facto dan de iure) didukung oleh fakta dibenarkan oleh masyarakat internasional khususnya Dewan Keamanan PBB.

Keterbatasan Studi

Peneliti menegaskan bahwa berlakunya temuan baru ini terdapat keterbatasan studi. Dengan perkataan lain berlakunya temuan baru ini bersifat tentatif. Sebagaimana Karl R Popper²⁰⁹⁾ menyatakan, dengan metode induksi menyarankan agar setiap proposisi dipandang sebagai hipotesis yang tentatif, yang terus menerus dapat diuji dengan falsifikasinya. Teori falsifikasi atau Error Elimination Popper menegaskan bahwa jumlah ilmu pengetahuan yang besar tidak banyak manfaatnya bagi perkembangan ilmu, karena setiap ilmu khususnya ilmu sosial (sudah barang tentu termasuk ilmu politik hubungan internasional) hanya bersifat hipotetis yang selalu mengandung kemungkinan adanya kesalahan, yang bisa diupayakan hanya mengurangi kadar kesalahan sejauh mungkin. Menurut Popper suatu teori bersifat tentatif.

Juga Edmund Husserl²¹⁰⁾ seorang ahli filsafat fenomenologik menyatakan, “bahwa kepedulian utama pandangan fenomenologik terletak pada “pemahaman” perilaku manusia dari kerangka acuan perilaku itu sendiri, menyelidiki bagaimana dunia ini dialami, sehingga kenyataan yang dianggap penting ialah apa yang dibayangkan, yakni subyektivitas dari perilaku manusia yang bertindak dengan tujuan tertentu. Teori sebagai hasil pemahaman demikian bersifat tentatif”. (Husserl)

²⁰⁹⁾ Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science* . . . , halaman 637.

²¹⁰⁾ Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science* . . . , halaman 612.

Demikian juga Max Weber²¹¹⁾ menyatakan, “menolak penjelasan suatu fenomena yang berdasarkan fenomena yang mendahuluinya sebagai mata rantai causalitas”. Oleh karena itu Webber menawarkan metode *vestehen* memahami atas substansi yang dihadapi, berusaha memahami makna (*meaning*) yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Weber menawarkan, bahwa penelitian ilmu sosial sebaiknya menggunakan metode *vestehen* memahami makna fenomena yang diteliti, sehingga tidaklah mungkin dipisahkan antara penelitian dan obyek yang diteliti. Suatu teori baru yang diperoleh melalui metode demikian, tidaklah berlaku absolut atau mutlak melainkan bersifat tentatif. (Weber)

Demikian pula Thomas S. Kuhn²¹²⁾ menyatakan, “bahwa paradigma merupakan pandangan mendasar mengenai apa yang menjadi persoalan pokok ilmu, tetapi pengertian paradigma itu harus secara revolusioner, maksudnya kalau suatu paradigma tidak dapat memecahkan persoalan ilmu, hal itu akan bersifat patologis, karenanya secara revolusioner harus diadakan paradigma tandingan di dalam memecahkan masalah tersebut. Menurut Kuhn bahwa suatu teori itu berlakunya bersifat tentatif”.

Di dalam disertasi ini peneliti mempergunakan metode *vestehen* berupaya memahami makna (*meaning*) daripada fenomena yang diteliti, jadi antara peneliti dan yang diteliti tidak dipisahkan. Peneliti sejak awal mencoba memahami makna dokumen-dokumen yang dipilih dan yang relevan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara khusus dengan para pelaku sejarah yang sekarang ini masih ada, khususnya Bapak DR. H. Roeslan Abdoelgani, Bapak Soebadio Sastrosatomo dan yang lainnya. Hasil wawancara khusus ini oleh peneliti dipahami, apa makna serangkaian hasil wawancara itu. Jadi peneliti sependapat dengan Karl R Popper, Weber, Husserl dan Kuhn, bahwa suatu teori baru itu berlakunya tentatif. Demikian pula hasil temuan di dalam disertasi ini berlakunya dinyatakan bersifat tentatif oleh peneliti.

211) Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science . . .*, halaman 615.

212) Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science . . .*, halaman 615.

Implikasi Praktis

Kontribusi temuan baru ini terhadap:

a. **Kajian terhadap proses pembentukan Negara**

Di muka telah dijelaskan bahwa temuan baru atau teori baru ini oleh peneliti disumbangkan untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik kenegaraan utamanya tentang proses pembentukan negara. Semoga sumbangan “temuan baru” ini berguna bagi perkembangan ilmu politik kenegaraan pada waktu yang akan datang. Di dalam aplikasinya, semoga “temuan baru” ini bermanfaat bagi para pengelola negara Republik Indonesia dalam rangka membesarkan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini.

Sekali lagi peneliti menegaskan dalam upaya memperbesar negara RI pada masa sekarang dan masa yang akan datang hendaknya diperhatikan temuan pertama, kedua dan ketiga di dalam Disertasi ini.

Sebagai contoh, peristiwa kenegaraan masih dalam permasalahan ialah, penyatuan Timor Timur ke dalam wilayah negara RI. Kalau peristiwa itu diamati secara saksama, bahwa terhadap penyatuan Timor Timur ini, dukungan pemerintah bagus, dukungan militer bagus, dukungan rakyat bagus, tetapi faktor diplomasi kurang ada kesesuaian.

Dan ternyata masih terdapat hambatan-hambatan sampai sekarang ini. APakah persoalan Timor Timur akan selesai tahun ini, atau dua tahun lagi, apakah sepuluh tahun lagi, belum bisa ditentukan sekarang. Semoga persoalan Timor Timur ini dapat diselesaikan di dalam tempo secepatnya. Amin.

b. **Kajian terhadap Kurikulum SMU**

Kurikulum Pendidikan Sejarah untuk Sekolah Menengah Umum perlu mendapat perhatian.

Peneliti bukan pakar ilmu pendidikan, namun dengan segala kerendahan hati berharap, apabila temuan baru ini diterima dibenarkan, mungkin dapat dipertimbangkan buku-buku sejarah pada sekolah-sekolah di Indonesia dapat disempurnakan sesuai dengan temuan baru ini.

Peneliti telah memeriksa buku-buku sejarah untuk SMU terbitan Yudhistira tahun 1996 halaman 138-139. Di dalam buku itu diuraikan peristiwa-peristiwa kenegaraan tahun 1945-1947 secara kurang jelas dan banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagai acuan peneliti menunjukkan data-data di bawah ini:

Tim Sejarah,²¹³⁾ dalam buku sejarah 3 SMU menyebutkan, untuk menghindari anggapan bahwa Pemerintahan Indonesia bersifat diktator dan dalam rangka memperoleh pengakuan kedaulatan maka Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidential menjadi parlementer. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sebagai PM dijabat oleh Sutan Sjahrir. Ungkapan ini tidak sesuai dengan “temuan baru” dari disertasi ini. Juga tidak memenuhi syarat-syarat analisa secara rasional dan tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam sejarah kenegaraan Indonesia tidak pernah ada maklumat pemerintah bertanggal 14 Nopember 1945 yang isinya mengubah bentuk pemerintahan RI, penulis menduga bahwa yang dimaksud oleh Tim Sejarah 3 SMU ini adalah Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 tentang perubahan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, dan memberi status KNIP sebagai badan legislatif dan turut serta menetapkan GBHN. Memang Maklumat Wakil Presiden No. X itu ditetapkan guna membuka kemungkinan untuk dapat berunding dengan Belanda. Untuk dapat berdiplomasi di dunia internasional. Untuk keperluan itu, maka tujuan pertama ditetapkannya Maklumat No. X itu akan mengubah bentuk pemerintahan RI dari demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer yang menganut multi partai sistem, tujuan berikutnya untuk mendesak Pemerintah Belanda agar bersedia berunding dengan RI. Agar dapat mengubah Pemerintah RI, maka ditetapkan tiga maklumat politik pelaksanaannya, yakni maklumat politik tanggal 11-11-1945, tentang haluan politik Pemerintah RI, maklumat politik tanggal 3-11-1945 tentang pementukan partai-partai politik dan pengumuman BPKNIP No. 5 tanggal 11-11-1945 tentang adanya pertanggungjawaban para menteri kepada badan legislatif dalam hal ini

²¹³⁾ Tim Sejarah, *Sejarah 3 SMU*, penerbit Yudhistira, Jakarta, 1996, halaman 9.

KNIP. Jadi maklumat No. X beserta tiga maklumat politik pelaksanaan itu adalah dasar hukum untuk mengubah bentuk Pemerintah RI menjadi demokrasi parlementer dengan multi partai sistem itu. Hal ini dimaksudkan untuk menangkal tuduhan Belanda waktu itu bahwa negara RI adalah fasis. Sebagai pelaksanaannya maka pada tanggal 14 Nopember 1945 itu dibentuk kabinet parlementer pertama dan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama, jadi tidak ada maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang isinya mengubah bentuk Pemerintah RI itu.

Tim Sejarah,²¹⁴⁾ menyebutkan bahwa “Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 berpusat di Jakarta dimaksudkan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. *Presiden Soekarno memberikan amanatnya pada pelantikan KNIP bertempat di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1945.* Sebagai ketua KNIP Kasman Singodimedjo, para wakilnya Mr. Latuharhary, Sutardjo Kartadikusumo, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan rapat KNIP di Balai Muslimin Indonesia Jakarta, yang dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua. Rapat itu dihadiri kira-kira 120 orang anggota dari berbagai daerah di Jawa disaksikan juga oleh Wakil Presiden dan para Menteri. Ketua memperingatkan kepada hadirin bahwa Panglima Tentara Sekutu telah mengumumkan berlakunya *Negara dalam keadaan bahaya.* Hal itu berarti bahwa para pemimpin harus bersikap dan bertindak lebih revolusioner.

Pidato penting yang mendapatkan perhatian besar ialah Menteri Amir Syarifuddin yang menganjurkan agar dibentuk Badan pekerja KNIP sebagai badan untuk sementara menjalankan kekuasaan sebelum terbentuknya MPR. Hal ini disetujui oleh wakil presiden, yang segera mengeluarkan sebuah maklumat.

Maklumat Presiden Republik Indonesia

Sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk, kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional menurut Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bersama Dewan Pekerja yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat.

²¹⁴⁾ Tim Sejarah, *Sejarah 2 SMU*, penerbit Yudhistira, Jakarta, 1996, halaman 138-139

Menimbang

Bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggungjawab tentang nasib bangsa Indonesia di sebelah pemerintah. Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat.

Memutuskan

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan Legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional.

Jakarta, 16 Oktober 1945

Wakil Presiden Republik Indonesia

Moh Hatta.

Dengan demikian, keputusan itu telah menetapkan bahwa KNIP mengambil sebagian kekuasaan yang sementara itu ada pada tangan presiden. KNIP semula hanya merupakan badan pemusatan kehendak rakyat dan cita-cita, mengobarkan semangat untuk membantu pelaksanaan pemindahan kekuasaan ke tangan republik. Sekarang kekuasaan badan itu bertambah dengan turut bertanggungjawab dalam menetapkan haluan politik negara. (Demikianlah ungkapan dalam buku termaksud)

Apa yang ditulis pada halaman 138 sampai 139 Sejarah 2 SMU di atas tidak sesuai dengan “temuan baru” dari disertasi ini. Juga rasionalitas analisisnya tidak tampak dan terdapat beberapa kekeliruan, seperti kata-kata “KNIP dibentuk tanggal 22 Agustus 1945”, ini tidak benar, karena KNIP dibentuk oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 (lihat Koenodiprojo, himpunan UU, Peraturan, Penetapan Pemerintah RI 1945 halaman 123). Penulis menduga pelajar se-Indonesia tidak bisa memahami makna tulisan itu secara baik, karena penyajiannya kurang benar, tidak didasari analisa yang rasional. Seperti misalnya ungkapan pada halaman 138, mengenai maklumat Presiden Republik Indonesia seperti ini: “tentang usul supaya sebelum MPR dan DPR dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan KNIP, hendaknya dikerjakan oleh KNIP dan supaya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah “badan bersama Dewan Pekerja” yang bertanggung jawab kepada KNIP”. (Demikian di tulis dalam buku termaksud).

Menurut peneliti uraian di atas itu benar-benar tidak bisa dimengerti, apa yang dimaksud “*dijalankan oleh sebuah badan bersama Dewan Pekerja*” itu? kiranya para pelajar kita akan lebih mengerti kalau maklumat itu ditulis sesuai teks aslinya; karena disajikan secara kurang jelas, maka substansinya menjadi tidak jelas.

Peneliti menduga bahwa yang dimaksudkan oleh Tim Sejarah 2 SMU tersebut adalah serangkaian peristiwa di bawah ini.

Bahwa bangsa Indonesia mencita-citakan kemerdekaan tanah air mereka berpuluh-puluh tahun lamanya. Hal demikian diungkapkan pula dalam pembukaan UUD 1945 alinea II. Dan cita-cita mulia itu belum tercapai sampai pecahnya Perang Dunia II tahun 1939. Pada akhirnya Perang Dunia II, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan “*vacuum of power*”. Jepang sudah menyerah kepada sekutu sedangkan tentara sekutu yang menangani tentara Jepang di Indonesia belum sampai di Indonesia. Waktu itu pada masyarakat internasional sudah ada norma hukum internasional yang universal yakni the Atlantic Charter 1941, yang menyatakan bahwa setiap bangsa di dunia ini berhak untuk menentukan nasib sendiri, self determination. Berpegang pada prinsip III Atlantic Charter dan adanya *vacuum of power*, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, akan tetapi Pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu berada dipengasingan di Australia, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Menurutny seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Kerajaan Belanda, berdasarkan pasal 1 Grondwet Belanda. Dan bertekad akan menghancurkan negara baru itu dengan kekuatan militer. Di sisi lain bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta bertekad akan mempertahankan negara proklamasi, maka dari itu terjadinya persengketaan Indonesia-Belanda tidak bisa diingkari lagi, mengenai cara penyelesaian persengketaan itu dari pihak Belanda menghendaki melalui kekuatan senjata, melalui peperangan. Dari pihak Indonesia, Soekarno, Hatta dan Sjahrir pemimpin bangsa Indonesia, mempunyai pandangan jauh ke depan, mampu melihat adanya peluang-peluang dan berani memanfaatkan peluang-peluang itu di dalam upaya mempertahankan eksistensi negara RI. Para tokoh tersebut utamanya Soekarno-Hatta melihat konteks ekonomi politik domestik cenderung lemah, di sisi lain konteks ekonomi politik internasional terlihat adanya peluang utamanya PBB,

perang dingin dan Dewan Keamanan PBB, maka dari itu Soekarno-Hatta di dalam rangka mempertahankan eksistensi negara proklamasi, meletakkan strategi dasar di dalam menyelesaikan persengketaan Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB.

Namun upaya Soekarno-Hatta termaksud ada hambatan karena Belanda tidak bersedia berunding dengan Indonesia dengan menuduh bahwa RI adalah negara fasis. Belanda memanfaatkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, di sana ada pemusatan kekuasaan ditangan Presiden Soekarno. Soekarno-Hatta bermaksud mengubah isi pasal IV Aturan Peralihan itu. Kebetulan sekali waktu itu Sjahrir yang mempunyai yang mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Inggris dan Belanda, didesak oleh orang Inggris mengapa Pemerintah Indonesia tidak Perdana Menteri seperti di Inggris. Atas desakan itu Sjahrir mengadakan petisi di KNIP ditandatangani lima puluh orang anggota KNIP mendesak kepada Presiden agar sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada KNIP diberi kekuasaan legislatif. Petisi ini cocok dengan rencana Soekarno-Hatta, waktu membicarakan petisi tersebut Soekarno minta agar Hatta memimpin sidang KNIP tanggal 16-10-1945. Dan petisi itu langsung disetujui oleh Hatta, dan sebagai langkah lebih lanjut, ditetapkan Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 yang isinya, sebelum MPR dan DPR dibentuk, KNIP diberi kekuasaan legislatif dan turut menentukan GBHN.

Karena gentingnya keadaan dibentuklah Badan Pekerja KNIP atau BPKNIP dan kekuasaan KNIP sehari-hari dilakukan BPKNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP. Sesudah itu ditetapkan maklumat politik pelaksanaannya yakni maklumat politik tanggal 1-11-1945 mengenai haluan politik negara, maklumat politik tanggal 3-11-1945 tentang berdirinya partai-partai politik, kemudian pada tanggal 11-11-1945 berdasarkan pengumuman BPKNIP No. 5, maka mulai hari itu para menteri bertanggung jawab kepada badan perwakilan dalam hal ini KNIP. Berubahlah bentuk Pemerintah RI dari demokrasi presidensial menjadi demokrasi dengan multi partai sistem. Upaya ini untuk menangkai tuduhan Belanda bahwa negara RI adalah fasis. Pada tanggal 14-11-1945 dibentuk kabinet parlementer pertama dan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan demikian tuduhan

Belanda bahwa RI adalah fasis, menjadi tidak relevan lagi. Di sisi lain Inggris dan Amerika terus mendesak agar Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Belanda sangat memerlukan bantuan keuangan dari Amerika Serikat. Alasan Belanda bahwa RI adalah fasis sudah tidak relevan, maka dari itu akhirnya Belanda terpaksa menuruti desakan Inggris dan Amerika Serikat, terjadilah perundingan Indonesia-Belanda Linggarjati yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947.

Berpangkal dari Persetujuan Linggarjati terjadilah perundingan berikutnya yakni Renville dan KMB semuanya di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Hasil KMB ini pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara RIS. Kemudian oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dilebur menjadi negara RI kesatuan, tidak lain adalah negara proklamasi.

Inilah dugaan peneliti, substansi yang dimaksud oleh Tim Sejarah 2 SMU pada halaman 138 dan 139 tersebut. Hanya saja penyajiannya kurang jelas sehingga substansinya tidak kelihatan. Kalau Tim Sejarah 2 SMU sendiri ragu akan substansi sebenarnya apa yang ditulis, bagaimana pelajar sekolah menengah seluruh Indonesia bisa memahami isi tulisan itu? dimohon Tim Sejarah 2 SMU menjawabnya sendiri.

Masalah lain yang perlu diteliti

Di dalam disertasi ini peneliti melakukan penelitian mengenai perkembangan negara Republik Indonesia kurun waktu 1945-1947. Kalau kadang-kadang peneliti menyebutkan peristiwa-peristiwa kenegaraan Indonesia sekitar tahun 1948 dan 1949 itu hanya sekilas terlalu dangkal, yakni dalam membahas prospek perolehan pengakuan kedaulatan negara RIS dari Pemerintah Belanda yang terkait dengan penelitian ini. Menurut peneliti masih ada permasalahan yang perlu diteliti, yakni peristiwa sekitar terjadinya perjanjian Renville dan khususnya mengenai konferensi meja bundar (KMB) yang hasilnya sangat penting bagi pertumbuhan kenegaraan Republik Indonesia. Yakni mengenai pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat, yang kemudian negara RIS ini pada tanggal 15-8-1950 dilebur menjadi negara Republik Indonesia Kesatuan, yang hakikatnya adalah negara proklamasi, negara Republik Indonesia.

Menurut peneliti masih memerlukan dua penelitian lagi, yakni peristiwa kenegaraan sekitar persetujuan Linggarjati sampai persetujuan Renville dan sekitar persetujuan Renville sampai KMB yang menghasilkan pengakuan kedaulatan negara RIS kemudian dileburnya RIS menjadi negara RI kesatuan.

Dalam hal ini peneliti menawarkan permasalahan penelitian lebih lanjut yang pertama dan kedua seperti di bawah ini.

Pertama: Kaitan antara persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947 dengan persetujuan Renville 12 Januari 1949 dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tahun 1947-1948 (Suatu studi tentang strategi Pemerintah Republik Indonesia mengaitkan kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-bangsa (Dewan Keamanan PBB) dalam masalah Indonesia-Belanda untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan).

Kedua: Kaitan antara persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947, persetujuan Renville tanggal 12 Januari 1949 dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 2 November 1949 dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia tahun 1947-1949. (Suatu studi tentang campur tangan Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-bangsa (Dewan Keamanan PBB) terhadap masalah Indonesia-Belanda untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda tanggal 27 Desember 1949).

Demikianlah permasalahan yang ditawarkan oleh peneliti, sudah barang tentu masalah yang ditawarkan ini tidak mengikat, terserah kepada peminat yang ingin mengadakan penelitian masalah tersebut.

Sampai di sini peneliti menutup uraian dalam disertasi ini. Semoga “temuan baru” dalam disertasi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik kenegaraan Indonesia. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adams Cindy, *Soekarno an autobiography as told to Cindy Adams*, (New York: The BOBBS-MERRILL Company Inc. 1965), Alih bahasa oleh Major Abdul Bar Salim, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1965).
- Abdul Irsan, *Kapita Selekta Permasalahan Asia*, (LIPI, 1988).
- Abdurrachman, *Pengantar Sejarah Jawa Timur*, (Percetakan Automatic than Sun, Sumenep)
- Abdurrachman, *Pancasila (Beberapa catatan mengenai Pancasila dan dihubungkan dengan Filsafat Orang Jawa)*, (Percetakan Offset Matahari, Sumenep, 1984).
- Achmad Sanusi, *Perkembangan Sistem Pemerintahan R.I. 1945-1958*, (Penerbit: Universitas Padjajaran, Bandung, 1958).
- Agger, Ben, *Cultural Studies as Critical Theory*, (Washington D.C.: The Falmer Press, 1991).
- Allison, Graham T., *Essence of Decision, Explaining The Cuban Missile Crisis*, (Boston: Boston Little Brown, 1971).
- Anderson, Benedict R O G, *Java in a Time of Revolution, occupation and resistance, 1944-1946*, (Cornell: Cornell University Press, 1972), Alih bahasa oleh Jaman Rumbo, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).
- Anderson, Benedict R O G, *Imagined Communities (Reflections on the Origin and Spread of Nationalism)*, (London-New York: Verco, 1991).
- Babbie, Earl R., *The Practice of Social Research*, (California: Wadsworth Publishing Company Inc.).
- van Apeldoorn L J., *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*. (NV Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1951).
- van Baal J, *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Anthropologi Budaya Bangsa Tahun 1970*, (PT Gramedia, Jakarta, 1988).
- van Babbie, Earl R, *The Practice of Social Research*. (Penerbit Wadsworth Publishing Company Inc., Belmont, California).
- Back Jame A and Champion Dean J, *Methods and Issue in Social Research*, (Alih bahasa, E Koeswara (*Metode dan Masalah Penelitian Sosial*), PT. Eresco, Bandung, 1992).

- Bailey, Kenneth D, *Methods of Social Research*, The Free Press, New York, 1987.
- Bellefroid Ms JHP, *Inleiding tot de Recht-Wetenschap in Nederland*, Dekker en Van De Vegt N.V. Nijmegen, 1952.
- Bennet A. Le Ray, *International Organization*, Prentice-Hall-Inc., Englewood Cliffs, 1980.
- Berger, Peter L, *Pyramids of Sacrifice (Political ethis and Social Change)* Anchon Press, New York, 1976 Alih bahasa oleh A. Rachman Tolleng *Piramida Korban Manusia* LP3ES, Jakarta, 1982.
- Berger, Peter L, *Invitation to Sociology, a Humanistic Perspective*. Alih bahasa oleh Daniel Dhakidae Sarana Aksara, Jakarta, 1985.
- Berger, Peter L, *The Capitalist Revolution*, (New York: Basic, Books Inc., 1986), Alih bahasa oleh Mohamad Oemar, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Berger, Peter L, *Sociology Re-interpreted*, Alih bahasa oleh Herry Joediono (LP3ES, 1985).
- Bernard Delfgaauw, *De Wijsbegeerte van de 20, Eeuw*, (Wereldvenster/Baarn, 1972), Alih bahasa oleh Soedjono Soemargono, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1987).
- Bhenyamin Hoessein, *Format Politik Orde Baru*, (Widya Graha, LIPI, 1994)
- Blaisdell Donald C, *International Organization*, (The Ronald Press Company, New York, 1966)
- Boodley John H, *Victims of Progress*. (The Benjamin, Cummings Publishing Company Inc, Massachusetts, 1982).
- Bodgan Robert C and S Knopp Biklen, *Quantitative Research for Education (an introduction to theory and methode)*, (Allyn and Bacon Inc, Boston, London, 1982).
- Boerman WE and Visscher J, *Wis-en Natuurkunde aardrijkskunde*. (P Noordhoff N.V., Groningen, 1948).
- Bonger WA, *Problem der Demokatie (een Sociologische en sychologische Studie)* Alih bahasa Sitorus L.M *Masalah-masalah Demokrasi (Suatu tudi sosiologis dan spikologis)* (Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1952).
- Bottomore TB . *Karl Marx* (McGraw-Hill Book Company, New York, 1964).
- Brierly JI, *Law of Nations*. (Clarendon Press, Oxford, 1955).
- Caplin William D, *Introduction to International Politics*, Alih bahasa oleh Marsades Marbun, (Bandung: Sinar Harapan, 1992).
- Casson Ronald W, "*Language, Cultural and Cognition*" (Anthropological Perspective) (Macmillan, New York, 1981).
- Chambliss Williams J (Editor), *Sociological Reading in the Conflic Perspective* (Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1973).

- Charles A McChelland, *Theory and International System*, Alih bahasa oleh Mien Joebhaar dan Ishak Zahir., (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Chirstopher Lloyd, *Social theory and political System*, Alih bahasa oleh Mien Joebhaar dan Ishak Zahir (C.V. Rajawali, Jakarta, 1986).
- CISS, Analisis, *Hubungan Internasional dalam dasawarsa 1990-an*, (Center for Strategic and International Studies, 1989).
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*. (Basic Book Inc., 1974), Alih bahasa oleh Francisco Budi Hardiman, *Tafsir Kebudayaan*, (Kanisius, 1992).
- Commissaries Aug CJ, "*Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis*" (*eerste-en tveede deel*), (L.C.G. Malberg 'S-Hertogenbosch, 1948).
- Craib Ian, *Modern Social Theory from Parsons to Habermas*, Alih bahasa oleh Paul S Baut T Effendi, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Cribb Robert Bridson, *Jakarta in Revolution, Occupation and Resistence 1945-1949*, Alih bahasa oleh Hasan Basri, *Gejala Revolusi di Jakarta 1945-1949*, (Jakarta: Grafiti, 1990).
- C S I S, *Hubungan Internasional dalam dasawarsa 1990'an*, (CSIS, Jakarta, 1990)
- C S I S, *Peace and the Security in the Atlantic and Pasific Regions*, (Center for Strategic and International Studiess, Jakarta, 1983).
- Dahlan Nasution, "*Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*", (Jakarta: CV Remadja Karya, 1984).
- Dahrendorf Ralf, *Class and Class Conflic in Industrial Society*, Alih bahasa oleh Ali Mandan, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- David Easton, *The ANalysis of Political Structure*, (Routlege, New York, 1990).
- De Jong L, *Het Koninkrijk der Nederlanden de tweede Wereldoorlog 1939-1945*, (Rijks-Instituut voor oorlog Dokoementatie, Den Haag, 1985) Alih bahasa oleh DR. Arifin Bey, (CV. Radjawali, Jakarta, 1986).
- David Easton, *The Analysis of Political Structure*, (Routledge, New York, 1990).
- De Jong L, *Het Koninkrijk der Nederlanden de tweede Weredoorlog 1939-1945*, (Rijks-Instituut voor oorlog Dokoementatie, Den Haag, 1985) Alih bahasa oleh DR. Arifin Bey, (Kesaint Blanc, Jakarta, 1987).
- Departemen Penerangan RI, *Manifesto Politik RI 17 Agustus 1949*, (Departemen Penerangan RI., 1959).
- Department of States, *Disarmement the Intensified Effort*, (U.S. Government Printing Office, 1958).

- van Der Pot CW, *Handbook van het Nederlandse Staats Recht*, (AWNV, 1940).
- van Der Weij PA, *Grote Filosofen over de mens*, (Erven. J. Bijleved, Utrecht, 1972) Alih bahasa oleh K. Bertens, *Filosuf-Filosuf Besar Tentang Manusia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1972).
- Deutsch Karl W, *The Analysis of International Relations*, (Englewood Cliffs-New York: Prentice-Hall, 1988).
- Djalinus Syah, *Mengenal Asean dan Negara-Negara Anggautanya*, (PT. Kreasi Jaya Utama, Jakarta, 1988).
- Dougherty Jame/Pfaltzgraff J R Robert L , *Theories of International Relations*, (J.B. Lippincott Company, 1971).
- Duverger Maurice, *Party Politics and Pressure Groups*, Alih bahasa oleh Laila Hasyim, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981).
- Dyvendak JPH, *Inleiding tot de Ethnologie van de Indonesische Archipel*,(J.B. Walters, Groningen, 1946).
- Engelbrecht, EML, *De Wetboeken Wetten en verordeningen beneven de Voorlopiege Grondwet va de Republik Indoneie*, (A.W. Sijt Hoff's uitgeverij N.V., Leiden, 1954).
- Epping A OF M , *Filsafat Ensie (Eerste Nederlandse Systematicsch ingerichte encyclopaedie)*, (Jakarta: Jemnas, 1983).
- Evan Luard, *The United Nations (How it Works and What It Does)*, (New York: St. Martin's Press, 1979).
- Feith Herbert, *Dynamics of Guiding Democracy*, (Human Relations Area Press, 1963) Alih bahasa oleh Pustaka Sinar Harapan, *Soekarno, Militer dan Demokrasi Terpimpin*, (Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, (Kanisius, Yogyakarta, 1990).
- François J P A, *Grondlijnen van Het volkenrecht*, (Zwolle: N.V. Uitgevers Maatschappy W.E.J. Tjeenk Willink, 1954).
- François Raillon, *Indonesia Tahun 2000 (Tantangan Teknologi & Industri)* Alih bahasa oleh Nasir Tamara (PT. Karya UniPress, Jakarta, 1990).
- Garson David G, *Politics Science Methods*, (Holbrook Press Inc. Boston, 1987)
- Gerald M Meier, *Politics and Policy Making in Developing Coutries (Perspective on the new Political Economy)*, (I.C.S. Press, San Francisco, California, 1991).
- Giddens Anthony, *Capitalism and Modern Social Theory (An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber)*, (New York: Cambridge University Press, 1986).

- Giddens Anthony and David Held, *Classes, Power and Conflict*, Alih bahasa dan ditafsirkan kembali oleh: Soerjono Soekamto, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987).
- Giddens Anthony and Jonathan H Turner, *Social Theory Today*, (California: Standford University Press, 1987).
- Gordon Scott, "*The History and Philosophy of Social Science*", (London-New York: Routledge, 1991).
- Green Robert W, *Protestanism, Capitalism and Social Science (The Weber Thesis Contraversy)*, (Toronto-London: D.C. Heath and Company, 1973).
- Gorbachev Mikhail, *Perestroika, New Thinking for Our Country and the World*, Alih bahasa oleh Boesoni Sondakh, *Perestroika.*, (Jakarta: PT. GAP, 1987).
- Grondwet v.h. Koninkrijk der Nederlanden 1992*, (Boekh. VH. GEBR. Belifante, N.V.'S-Gravenhage).
- Hadari Nawani H, *Metodologi Penelitian bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985).
- Harry Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983).
- Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Bina Cipta, 1984).
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, (Kanisius, 1980).
- Hidayat Mukmin, *Peran serta Angkatan Bersenjata R.I. dalam merumuskan dan melaksanakan Politik luar negeri Indonesia*, (Yogyakarta, Pasca Sarjana UGM, 1988).
- Holsti KJ, *International Politics*, (Engelwood Clifts New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1983).
- Holsti KJ, *Why Nations Realign Foreign Policy Restructuring in thee Postwar World*, (London: George Allen & Unwin, 1982).
- Hornby AS, *Oxford Advenced Learner's Dictionary of current English*, (Oxford University Press, 1963).
- Hotman M Siahaan, *Pengantar Ke arah Sejarah dan teori Sosiologi*.
- Hugo Sinzheimer, *De Taak der Rechts-sociologie*, (HD. Tjeenk Willink and Zoon N.V., Haarlem, 1935).
- Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggarjati, Prolog dan Epilog*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara bekerja sama dengan Sebelas Maret Univesity Press, 1995).
- Idris A Kesuma, *Politik Internasional dan Sistem Analisis*, (Karangan Khusus, Jakarta, 1988).
- Ihromi, *Materi Pokok Logika*, (Karonika Universitas Terbuka, Jakarta, 1987).

- Isaac Sephen, *Handbook in Research and Evaluation*, (San Diego, California, 1971).
- Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru*, Jakarta, 1987).
- Isywara F, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bina Cipta, Bandung).
- Jacobsen and Lipman, "*Political Scince*", (New York: Barnes and Noble Inc., 1952).
- Jame A Black, *Methods and Issue in Social Research*, Alih bahasa oleh E. Koeswara, Dira Salam dan Alfin Ruzhendi, (Jakarta: Eresco, 1992).
- John Ingelson, *Jalan ke Pengasingan (Pergerakan Nasional Indonesia) 1927-1934*, (LP3ES, 1988)
- John Lofland, Liyn H. Lofland, *A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, (California: Wadsworth Publishing Company Adivision of Wadworth Inc., 1984).
- John Naisbitt, *Global Paradox*, Alih bahasa oleh Budijanto, (Jakarta: Bina Aksara, 1994).
- Johnson Doyle Paul, *Sociological theory*, Alih bahasa oleh Robert M.Z. Lawang, Teori Sosiologi, Klasik dan Modern, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981).
- Jones Daniel, *English Prounouncing Dictinary*, (London: J.M. Dent and Sons Ltd., 1950).
- Jong L, *Het Konikrijk den Nederlanden de Tweede Wereldoorlog 1939-1945*, (Den Haag: Rijks Instituut van oorlog Documentatie)
- Kahin, George McTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1963).
- van Kan J, *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, (De Ervan F. Bohn N.V Haalem, 1951).
- Kan Po, *(Majalah Pemerintah Jepang di Indonesia) tahun 1944 (2604)*, Sendenbu (Departmen Penerangan jaman Jepang).
- Kansil CST, *Hukum antara Tata Pemerintahan (Comparative Government)*, (Jakarta: Erlangga, 1978).
- Kansil CST, dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1988).
- Klentjes Ph, *Staats-instellingen van Nederlands Indie*, (Amsterdam, J.H. de Bussy, 1924).
- Koenen MJ-J Endepols, *Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal*, (Batavia: Bij J.B. Wortels uitgevers maatschappij N.V. Groningen, April, 1942).
- Koentjoroningrat, *Metode Anthropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan Universitas P.T., 1958).
- Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan, Pemerintah Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: S.K. Seno, 1951).
- Koestiniyati Mochtar (penyunting), *Memoar Pejuang Politik Republik Indonesia Seputar "Zaman Singapura": 1945-1950*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992).

- Komite Nasional Indonesia Pusat, *"Negara Republik Indonesia"*, (Jakarta: Mutiara, 1979).
- Kranenburg R, *Inleiding in het Nederlandse administratief recht*, (H.D. Tjeenk Wilink and Zoon N.V., Haarlem, 1955).
- Kranenburg R, *De Grondslagen der Rechtwetenschap*, (H.D. Tjeenk Wilink and Zoon N.V., Haarlem, 1952).
- Kuhn Thomas S, *The Structure of Scientific Revolutions*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1989), Alih bahasa oleh Tjun Surjaman, *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, (Jakarta: Remaja Karya C.V., 1989).
- Laski Harold J, *The States in Theory and Practice*, (George Allen Unwin, 1934).
- Laski Harold J, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yayasan Pembangunan, 1952).
- Lerner Daniel, *The Passing of Traditional Society, Modernizing the middle East*, (The Free Press a Corporation, 1958).
- LIPI, *Kapita Selekta Permasalahan Asean*, (LIPI, Jakarta, 1989).
- Liston Robert A, *The United States and the Soviet Union*, (Parent's Magazine Press, New York, 1970).
- Logemann J.H.A, *Het Staats-recht van Indonesie*, (N.V. Uitgeverij W Van Hoeve'S-Gravenhage, 1954).
- Lovell John, *Foreign Policy in Perspective*, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970).
- Lysen A, *Individu en Gemeenschap*, (Prentice Hall International Inc., New Jersey, 1989).
- Macridis Roy C (Editor), *Foreign Policy in World Politics: State and Regions*, (New York: Prentice Hall International Inc., 1989).
- Makarand Paranjape, *Dekolonisasi dan Pembangunan, Hind Svaraj yang direvisi (terjemahan)*, (New Delhi-London: Publications, 1993).
- Maleong Lexy J, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rasdakarya, 1991).
- Manai Sophiaan, *Kehormatan Bagi yang Berhak, Bung Karno tidak terlibat G 30 S/ PKI*, (Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994).
- Manai Sophiaan, *Apa yang masih ingat*, (Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1991).
- Mangkoebomi, *Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia*, (Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1989).
- Manheim Jarol Band Richard C Rich, *Research Methods in Political Science*, (Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, London, 1981).

- Mani P.R.S., *The Story of Indonesian Revolution 1945-1950 (terjemahan Lany Kristono)*, (PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989).
- Mangandaralam Sjahbuddin, *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir*, (Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1987).
- Mangandaralam Sjahbuddin, *Apa dan Siapa Bung Hatta*, (Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1988).
- Mansfiels Don L and Buckley Gary J., *Conflict in American Foreign Policy the Issues Dibated*, (Prentice-Hall. Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1985).
- Mathisen Trigve, *Methodology in the Study of International Relations*, (Oslo: Oslo University Press, Oslo, 1959).
- Mehden Fred R Van Der, *Politics of the Developing Nations (Ahli bahasa : S. Simamora)*, (PT. Melton Putra, Jakarta, 1987).
- Moch. Said Maj, *Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat Jilid I + II*, (Permata, Surabaya, 1961).
- Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989).
- Mohtar Mas'oe'd, *Teori dan Metodologi hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Social, Universitas Gajah Mada, 1988).
- Molenaar A.N., *Arbeids-recht*, (N.V. Uitgevers-maatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1953).
- Morghenthau Hans J, *Politics Among Nations (The Struggle for Power and Peace)*, (New York: Alferd A. Knopf, 1964).
- Morstein Marx Fritz (editor), *Foreign Governments (the dynamics of politics Abroads)*, (New York: Prentice-Hall Inc., 1952).
- Muhadjir Noeng, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992).
- Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia*, (Yayasan Prapanca, Jakarta).
- Nasution AH, *Memenuhi Panggilan Tugas*, (Jakarta: CV. Hajimasagung, 1983).
- Nico Schulte Nordholt, *Ojo Dumeh (Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan)*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987).
- Ong Hok Hamm, *Runtuhnya Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987).
- Oppehein L, *International Law*, (London: Longmas, Green and Co., 1952).
- Osman Raliby, *Documenta Historica*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953).
- Parsons Talcott, *Fungsionalisme Imperatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).

- Patton Michael Quinn, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, (London: Sage Publications Inc., 1990).
- Peursen CA. Van (J Drost), *Susunan Ilmu Pengetahuan*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993).
- Poelje van G.A., *Hand en Leerboek der Bestuurwetenschpppen (algemene inleiding tot de bestuur-kunde)*, (Alpen aan den Rijn, N. Samson NV., 1953).
- Polak MV, *Schets vet het Amerikaanse Uni-staats-recht*, (Universitaire Press, Leiden, 1951).
- Poloma Margaret M, "*Contenporary Sociological Theory*", Alih bahasa oleh Yasogama, "*Sosiologi Kontemporer*", (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).
- Popper Karl R (Alfons Taryadi), "*Epistemologi Pemecahan Masalah*", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989).
- Prajudi Admosuddirdjo S., *Dasar-dasar Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, Jakarta 1989).
- Pramoe Rahardjo, *Gerilya dan Diplomasi*, (Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1996).
- Pringgodigdo AG, *Perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer*, (Yogyakarta: Yayasan Fonds University Negeri Gajah Mada).
- Pringgodigdo AK., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Dian Rakyat, Jakarta, 1991).
- Ramelan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).
- Rapar JH, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1986).
- Rapar JH, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1986).
- Rapar JH, *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989).
- Rapar JH, *Filsafat Politik Agustinus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).
- Reid Anthony JS, *The Indonesian National Revolution*, Longman, 1974. Alih bahasa oleh Pericles G. Katappo, *Revolusi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1966).
- Ritzer George (editor), *Frontiers of Social Theory the New Syntheses*, (Colombia University Press, New York, 1990).
- Ritzer George, *Contemporary Sociological Theory*, (Alfred A. Knopf, New York, 1988).
- Riza Sihbudi M, Hamdar Basyar Happy Bone Zulkarnain, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, (Jakarta: PT. Eresco, 1993).

- Robinson James & Richard C Snyder, *Decision Making in International Politic International*, (New York: Holt Rinehart & Winston, 1965).
- Roeslan Abdoelgani, *Indonesia dan Percaturan Politik Internasional*, (Yayasan Keluarga Bhakti, Surabaya, 1993).
- Roeslan Abdoelgani, *The Bandung Conection*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980).
- Roeslan Abdoelgani, *Pengamanan Idiologi Pancasila Terhadap Idiologi-Idiologi Besar di Dunia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1979).
- Rosen Steven J & Johns Walter S, *The Logic of International Relations*, (Massachusetts: Winthrop Publishers Inc., 1980).
- Sabine Geroge H, *A History of Political Theory*, (Henry Holt and Company Inc., New York, 1950).
- Sanderson Stephen K, *Macrosociology*, (Ahli bahasa oleh Farid Wajidi dan S. Menno), (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993).
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional (dari Kolonoalisme sampai Nasionalisme)*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992).
- Sayidiman Suryahadiprodo, *Menghadapi tantangan masa depan*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987).
- Saxe Commins & Robert N Linscott, *The World's Great Thinker, Man and The State: The Political Philosophers*, (New York: Modern Pocket Library, 1947).
- Schimidt Christian-Hauer, *Gorbachev The Path to Power*, (London: Pan Books, 1986).
- Seiji Naya, Miquel urrutia, Shelly Mark and Alfredo Fruents, *Lessons in Development (a comparative study of Asia and Latin America)*, (Maryland: International Center for Economic Growth, 1989).
- Sihombing, Frans Bona, *Ilmu Politik Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Simon Herbert, *Administrative Behavior*, (Free Press, New York, 1957).
- Simorangkir J.C.T. dan B. Mang Reng Say, *Tata Negara Indonesia*, (Erlangga, Jakarta, 1957).
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, (PT. Gramedia, Jakarta, 1983).
- Siregar Amir Effendi, *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, (PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991).
- Smith C, *De Dekolonisatie van Indonesie*, (Den Haag: H.D. Tjeenk Willink NV, 1976), alih bahasa oleh Redaksi PA, (Jakarta: Daya Sarana, 1986).
- Snyder Richard C, HW Bruk and Burton Sapin, *Decision Making as an Approach to The Study International Politics*, (New York: Foreign Decision Making, 1962).

- Soebantardjo, "*Sari Sejarah*" (*Jilid I dan II*), (Yogyakarta: BOKRI, 1954).
- Soedarmanto YB, *Jejak-jejak Pahlawan*, (Jakarta: Grasindo, 1996).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Liberty, Yogyakarta, 1985).
- Soekarno, *Lahirnya Pancasila*, (Jakarta: Usaha Penerbitan Guntur, 1949).
- Soekarno, *Sarinah*, (Panitia Penerbitan Buku-buku Presiden Soekarno, 1963).
- Soekarno, *Dari Proklamasi sampai Takem*, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1963).
- Soekarno, *Jalannya Revolusi Kita*, (Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Penerbit Di bawah bendera Revolusi, 1959).
- Soekarno, *Pancasila sebagai Dasar Negara (Kursus-Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara Jakarta, 20-5-1958; 5-6-1958; 16-6-1958; 22-7-1958; 3-9-1958 dan 21-2-1959)*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1959).
- Soekarno, *Pembebasan Irian Barat*, (Departemen Penerangan R.I., 1962).
- Soekarno, *Indonesia Menggugat*, (Jakarta: CV. Masagung, 1993).
- Soekarno, *Genta Suara Revolusi Indonesia (Gesuri)*, (Yayasan Prapantja, Jakarta, 1964).
- Soekarno, *Penemuan Kembali Revolusi Kita 17-8-1959*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Tahun Kemenangan (Takem)*, (Yayasan Prapantja, Jakarta, 1964).
- Soekarno, *Membangun Dunia Kembali (Pidato di PBB tanggal 30 September 1960)*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Susunan Negara Kita*, (Jembatan, Jakarta, 1950).
- Soemaryono E, *Hermeneutik, sebuah metode Filsafat*, (Kanisius, 1993)
- Soepardi Sariohartono, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Usaha Nasional, Surabaya, 1993).
- Soerjono Soekanto, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1988).
- Soetomo di bawah Pengawasan AG Pringgodigdo, *Himpunan Peraturan Penjelmaan Negara Kesatuan RI*, (Jakarta: UP Indonesia, 1953).
- Soetrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Andi Offset, Yogyakarta, 1973).
- Soltou Roger A, *An Introduction to Politics*, (Longmas Green and Co., London, 1952).
- Starke JG, *An Introduction to International Law*, (London: Butter Worth & Co (Publishess) LTD, 1945).

- Strauss, Anselm L, *Basics of Qualitative Research*, (California: Sage Publications Inc., 1990).
- Strong CF, *Modern Political Constituons*, (Sidgwick and Jackson Limited London, 1952).
- Sullivan Michael P, *International Relations theory and Evidence*, (New Jersey: Prentice Cliffs, 1976).
- Sumardjono Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Tulisan Bersifat Elementer*, (UGM, 1989).
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (UI. Press, 1990).
- Suria Sumantri Jujun S., *Ilmu Dasar Prospek*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992).
- Suria Sumantri Jujun S., *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, (Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Susanto Tirta Projo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (PT. Pembangunan Jakarta, 1960).
- Susanto Dwi dan Zainuddin Djafar (editor), *Perubahan Politik di Negara-negara Eropa Timur*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990).
- Suwandi Wiriadmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1988).
- Telders, *United Nations Text Book*, (Leiden: University Press, 1950).
- Ter Har B. Bzn., *Beginzelen En Stelsel Van Het Adat-Recht*, (J.B. Wolters Groningen, 1950).
- Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (PT. Eresco, 1993).
- The Liang Gie, *Ilmu Politik (Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Methodologi 1. 2)*, (Fisipol UGM, 1969).
- Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Linggarjati*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986).
- Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Renville*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986).
- Tucker, Robert C, *Marx-Engels Readers*, (London: W.W. Nortons Company New York, 1978).
- UU 1945, *Rekomendasi, Kantor Wilayah Deppen Propinsi Jawa Timur No 23/PP/III/1978 Tanggal 10 Maret 1978*, (Surabaya: AMIN, 1978).
- Manheim Jarol Band Richard C Rich, *Research Methods in Political Science*, (Englewood Cliffs-London: Prentice-Hall Inc., 1981).

- Mani PRS, *The Story of Indonesian Revolution 1945-1950 (terjemahan Lany Kristono)*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989).
- Mansfiels Don L. and Buckley Gary J., *Conflict in American Foreign Policy The Issues Dibated*, (Englewood Cliffs-New Jersey: Prentice-Hall. Inc, 1985).
- Mathisen Trigve, *Methodology in the Study of International Relations*, (Oslo: Oslo University Press, Oslo, 1959).
- Mehden Fred R Van Der, *Politics of the Developing Nations*, Alih bahasa oleh S. Simamora, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1987).
- Moch. Said Maj, *Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat jilid I & II*, (Surabaya: Permata, 1961).
- Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989).
- Mohtar Mas'oed, *Teori dan Metodologi hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Social, Universitas Gajah Mada, 1988).
- Molenaar AN, *Arbeids-recht*, (Zwolle: N.V. Uitgevers-maatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink, 1953).
- Morghenthau Hans J, *Politics Among Nations (The Struggle for Power and Peace)*, (New York: Alferd A. Knopf, 1964).
- Morstein Marx Fritz (editor), *Foreign Governments (the dynamics of politics Abroads)*, (New York: Prentice-Hall Inc., 1952).
- Muhadjir Noeng, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992).
- Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Prapanca).
- Nasution AH, *Memenuhi Panggilan Tugas*, (Jakarta: CV. Hajimasagung, 1983).
- Nico Schulte Nordholt, *Ojo Dumeh (Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- Ong Hok Hamm, *Runtuhnya Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987).
- Oppehein L, *International Law*, (London: Longmas, Green and Co., 1952).
- Osman Raliby, *Documenta Historica*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953).
- Parsons Talcott, *Fungsionalisme Imperatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Patton Michael Quinn, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, (London: Sage Publications Inc., 1990).
- Peursen CA van (J Drost), "Susunan Ilmu Pengetahuan", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).

- Poelje van GA, *Hand en leerboek der Bestuurwetenschpppen (algemene inleiding tot de bestuur-kunde)*, (Alphen aan den Rijn, N. Samson NV., 1953).
- Polak M V, *Schets van het Amerikaanse Uni-staats-recht*, (Leiden: Universitaire Press, 1951).
- Poloma Margaret M, "*Contemporary Sociological Theory*", Alih bahasa oleh Yasogama, "*Sosiologi Kontemporer*", (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).
- Popper Karl R (Alfons Taryadi), "*Epistemologi Pemecahan Masalah*", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989).
- Prajudi Admosudirdjo S, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
- Pramoe Rahardjo, *Gerilya dan Diplomasi*, (Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1996).
- Pringodigdo AG, *Perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer*, (Yogyakarta: Yayasan Fonds University Negeri Gajah Mada).
- Pringgodigdo AK, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991).
- Ramelan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).
- Rapar JH, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1986).
- Rapar JH, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1986).
- Rapar JH, *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989).
- Rapar JH, *Filsafat Politik Agustinus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).
- Reid Anthony JS, *The Indonesian National Revolution*, Longman, 1974. Alih bahasa oleh Pericles G. Katappo, *Revolusi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1966).
- Ritzer George (editor), *Frontiers of Social Theory the New Syntheses*, (New York: Columbia University Press, 1990).
- Ritzer George, *Contemporary Sociological Theory*, (New York: Alfred A. Knopf, 1988).
- Riza Sihbudi M, Hamdar Basyar Happy Bone Zulkarnain, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, (Jakarta: PT. Eresco, 1993).
- Robinson James & Richard C Snyder, *Decision Making in International Politic International*, (New York: Holt Rinehart & Winston, 1965).
- Roeslan Abdoelgani, "*Indonesia dan Percaturan Politik Internasional*", (Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti, 1993).
- Roeslan Abdoelgani, *The Bandung Connection*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980).

- Roeslan Abdoelgani, *Pengamanan Idiologi Pancasila Terhadap Idiologi-Idiologi Besar di Dunia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1979).
- Rosen Steven J & Johns Walter S, *The Logic of International Relations*, (Massachusetts: Winthrop Publishers Inc., 1980).
- Sabine Geroge H, *A History of Political Theory*, (New York: Henry Holt and Company Inc., 1950, alih bahasa oleh Soewarno Hadiatmodjo, *Teori-Teori Politik*, (Jakarta: Bina Cipta, 1981).
- Sanderson Stephen K, *Macrosociology*, alih bahasa, Farid Wajidi dan S. Menno, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional (dari Kolonialisme sampai Nasionalisme)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Sayidiman Suryahadiprodjo, *Menghadapi tantangan masa depan*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987).
- Saxe Commins & Robert N Linscott, *The World's Great Thinker, Man and The State: The Political Philosophers*, (New York: Modern Pocket Library, 1947).
- Schimidt Christian-Hauer, *Gorbachev The Path to Power*, (London: Pan Books, 1986).
- Seiji Naya, Miquel urrutia, Shelly Mark and Alfredo Fruents, *Lessons in Development (a comparative study of Asia and Latin America)*, (Maryland: International Center for Economic Growth, 1989).
- Sihombing, Frans Bona, *Ilmu Politik Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Simon Herbert, *Administrative Behavior*, (New York: Free Press, 1957).
- Simorangkir JCT dan B Mang Reng Say, *Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1960).
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983).
- Siregar Amir Effendi, *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991).
- Smith C, *De Dekolonisatie van Indonesie*, (Den Haag: H.D. Tjeenk Willink NV, 1976), alih bahasa oleh Redaksi PA, (Jakarta: Daya Sarana, 1986).
- Snyder Richard C, HW Bruk and Burton Sapin, *Decision Making as an Approach to The Study International Politics*, (New York: Foreign Decision Making, 1962).
- Soebantardjo, "Sari Sejarah" (Jilid I dan II), (Yogyakarta: BOKRI, 1954).
- Soedarmanto YB, *Jejak-jejak Pahlawan*, (Jakarta: Grasindo, 1996).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Soekarno, *Lahirnya Pancasila*, (Jakarta: Usaha Penerbitan Guntur, 1949).

- Soekarno, *Sarinah*, (Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Presiden Soekarno, 1963).
- Soekarno, *Dari Proklamasi sampai Takem*, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1963).
- Soekarno, *Jalannya Revolusi Kita (Pidato 17-8-1960)*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Penerbit Di bawah bendera Revolusi, 1959).
- Soekarno, *Pancasila sebagai Dasar Negara (Kursus-Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara Jakarta, 20-5-1958; 5-6-1958; 16-6-1958; 22-7-1958; 3-9-1958 dan 21-2-1959)*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1959).
- Soekarno, *Pembebasan Irian Barat*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1962).
- Soekarno, *Indonesia Menggugat*, (Jakarta: CV. Masagung, 1993).
- Soekarno, *Genta Suara Revolusi Indonesia (Gesuri)*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Penemuan Kembali Revolusi Kita 17-8-1959*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional (Resapim)*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Tahun Kemenangan (Takem)*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Membangun Dunia Kembali (Pidato di PBB tanggal 30 September 1960)*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).
- Soekarno, *Susunan Negara Kita*, (Jakarta: Jembatan, 1950).
- Soemaryono E., *Hermenuetik, sebuah metode Filsafat*, (Jakarta: Kanisius, 1993).
- Soepardi Sariohartono, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993).
- Soerjono Soekanto, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).
- Soetomo di bawah Pengawasan AG Pringgodigdo, *Himpunan Peraturan Penjelmaan Negara Kesatuan RI*, (Jakarta: UP Indonesia, 1953).
- Soetrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1973).
- Soltou Roger A, *An Introduction to Politics*, (London: Longmas Green and Co., 1952).
- Starke JG, *An Introduction to International Law*, (London: Butter Worth & Co (Publishess) LTD, 1945).
- Strauss, Anselm L, *Basics of Qualititative Research*, (California: Sage Publications Inc., 1990).

- Strong CF, *Modern Political Constitutions*, (London: Sidgwick and Jackson Limited, 1952).
- Sullivan Michael P, *International Relations theory and Evidence*, (New Jersey: Prentice Cliffs, 1976).
- Sumardjono Maria SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Tulisan Bersifat Elementer*, (Yogyakarta: UGM, 1989).
- Sumaryo Suryokusuma, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: U I Press, 1990).
- Suria Sumantri Jujun S, *Ilmu Dalam Prospek*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).
- Suria Sumantri Jujun S, "*Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Susanto Tirto Projo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1960).
- Suwandi Wiriatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1988).
- Telders, *United Nations Text Book*, (Leiden: University Press, 1950).
- Ter Haar B. Bzn., *Beginzelen En Stelsel Van Het Adat-Recht*, (J.B. Wolters Groningen, 1950).
- Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Jakarta: PT Eresco, 1993).
- The Liang Gie, *Ilmu Politik (Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Methodologi 1, 2)*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1969).
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1978).
- Tim Redaksi Majalah Driyarkara. (Pengantar, Franz Magnis Suseno SJ), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Tjipta Lesmana, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*, (Erwin-Rika Press, 1992).
- Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Linggarjati*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986).
- Tobing KML, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Renville*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986).
- Tucker, Robert C, *Marx-Engels Readers*, (London: W.W. Nortons Company New York, 1978).
- Utrecht Ernest, *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, (Bandung: Sumur, 1962).
- UUD 1945, *Rekomendasi, Kantor Wilayah Deppen Propinsi Jawa Timur No 23/PP/III/1978 Tanggal 10 Maret 1978*, (Surabaya: AMIN, 1978).

- Veeger KJ, *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990).
- Verhaak C (Harjono Imam), *"Filsafat Ilmu Pengetahuan"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989).
- Wajong J, *Administrasi Keuangan Daerah*, (Jakarta: "Panca Setia" Kebajoran Baru, 1962).
- Waluyo Ratan, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Birokrasi Terhadap Efektivitas Waskat*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM, 1989).
- Warshay Leon H, *The Current State of Sociological Theory (A Critical Interpretation)*, (New York: David Mckay Company Inc., 1975).
- Weiner Myron & Samuel P Huntington, *Understanding of Political Development*, (Boston: Little, Brown and Company, 1987).
- Wijaya AW, *Indonesia, Asia Afrika, Non-Blok Politik Bebas Aktif*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- William Domhoff G and Hoyt B Ballard, *C. Wright Mills and The Power Elite*, (Boston: Beacon Press, 1971).
- Zainudin Muhamad, *Metodologi Penelitian 1988*,

LAMPIRAN



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

HASIL PENELITIAN STUDI DOKUMEN

LAMPIRAN II

HASIL PENELITIAN DENGAN WAWANCARA KHUSUS

LAMPIRAN III

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENELITIAN STUDI DOKUMEN

LAMPIRAN IV

BAGAN DESERTASI

LAMPIRAN I

HASIL PENELITIAN STUDI DOKUMEN

LAMPIRAN I

HASIL PENELITIAN STUDI DOKUMEN

(Dengan mengadakan seleksi dokumen,
mencari makna (meaning) dari
masing-masing dokumen, mengadakan
seleksi coding dan coaxial coding)



OLEH :
SOEPARDI SARIOHARTONO, DRS.

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

DAFTAR ISI

	Halaman
METODE PENELITIAN KUALITATIF	1
a. Pengumpulan Dokumen-dokumen yang Relevan dalam Penelitian ini	2
b. Tehnik Analisa Dokumen dengan analisis "isi" Content Analysist	4
- Seleksi Dokumen	4
- Mencari Makna, Meaning dari masing-masing Dokumen	16
- Mengadakan Selektif Coding dan Coaxial Coding	47

METODA PENELITIAN KUALITATIF
(dalam operasionalnya)

Sebagaimana dijelaskan pada metoda penelitian pada Bab I Disertasi ini, bahwa peneliti akan menyajikan tiga hal penting di dalam metode penelitian ini, yakni: mengupayakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian ini atau dokumen-dokumen yang berkaitan atau relevan di dalam penelitian ini, menyajikan teknik analisa dokumen-dokumen (dengan mengadakan seleksi dokumen, mencari makna (meaning) dari dokumen, mengadakan seleksi (coding dan coaxial coding) dan mengadakan wawancara khusus dengan tokoh-tokoh yang sekarang ini masih ada, satu dengan lain hal guna lebih meningkatkan atau mempertajam kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini.

Maka dari itu metode penelitian kualitatif di dalam operasionalnya ini, dengan tahapan-tahapan seperti di bawah ini :

a. Pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan di dalam penelitian ini.

Untuk mencari dokumen-dokumen yang relevan di dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan sejumlah dokumen, diantaranya ialah Grondwet V.H. Gerbr. Belintante, NV-s-Gravenhage tahun 1922. Dokumen-dokumen yang diambil dari "United Nations Textbook" compiled by the "Professor Telders" Study Group for International Law at Leyden University, Penerbit Universitaire Pers Leiden tahun 1950 ialah : Declaration of Principle Known as the Atlantic Charter, tahun 1941, Declaration by United Nations 1942, Yalta Conference tahun 1945, The San Francisco Conference 1945 tentang pembentukan PBB, the United Nations Organization, dan penetapan Piagam PBB, Charter of United Nations. Dokumen-dokumen dari buku "Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1945, yang dihimupun oleh Koesnodiprodjo, Penerbit : S.K. "Seno" Jakarta tahun 1951 ialah : Proklamasi kemerdekaan tanggal 17-8-1945, Pembukaan UUD 1945, Penetapan PPKI tanggal 22-8-1945 tentang, komite Nasional dan Partai Nasional, Maklumat Pemerintah tanggal 30-8-1945 tentang, penundaan kegiatan gerakan persiapan Partai Nasional Indonesia, Maklumat Wakil Presiden RI No. X Tanggal 16-10-1945 tentang perubahan KNIP dari badan pembantu Presiden, menjadi badan legeslatif dan turut menetapkan GBHN dan pembentukan BPKNIP, Maklumat politik pemerintah RI tanggal 1-11-1945 tentang, haluan Pemerintah Republik

Indonesia yang telah disetujui BPKNIP. Pengumuman BPKNIP No. 3 tanggal 30 Oktober 1945 tentang, usul BPKNIP kepada Presiden agar rakyat diizinkan mendirikan Partai Politik, Maklumat pemerintah RI tanggal 3-11-1945 tentang, Pembentukan Partai Politik, Pengumuman BPKNIP No. 5 tentang pertanggung jawaban para menteri kepada badan legeslatif (KNIP), Maklumat Pemerintah tanggal 13-11-1945 tentang, peristiwa Surabaya tanggal 10 November 1945, Maklumat Pemerintah RI tanggal 28 Desember 1945 tentang kewajiban tentara Inggris di Indonesia dan buku Donald C. Blaisdell "International Organization", Penerbit the Ronal Press Company, New York 1946 dan Harian Kompas 11-12-1996.

b. Tehnik Analisa Dokumen dengan analisis "isi"
Content Analysist.

(Mengadakan Seleksi dokumen, mencari makna, meaning dari masing-masing dokumen, mengadakan selektif coding dan coaxial coding).

"Seleksi Dokumen"

Untuk mencari validitas dari masing-masing dokumen itu, maka diadakan seleksi dokumen.

Setelah terkumpul sejumlah dokumen-dokumen, untuk memperoleh fakta sejarah yang akurat, komprehensif dan objektif, maka peneliti mengadakan seleksi dokumen-dokumen itu. Seleksi dokumen ini dengan mengkajinya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu :

Apakah data itu berdasar sumber informasinya, apakah data primer atau data sekunder, pengarangnya apakah orang-orang yang mengetahui secara baik terhadap peristiwa itu, dengan kata lain bagaimana status penulis dan penerbit itu, apakah oleh perorangan, apakah suatu organisasi atau suatu lembaga resmi Pemerintah. Bagaimana struktur dari dokumen itu ? Peneliti di dalam mengadakan pemahaman suatu dokumen atau suatu buku, selalu hati-hati, buku itu ditulis untuk tujuan apa ? Apakah untuk konsumsi publik apakah konsumsi masyarakat

ilmiah ? Peneliti selalu bertindak hati-hati, apakah penulisnya itu berwenang atau tidak? Kalau dokumen termaksud dipergunakan sebagai sampling, bias atau tidak. Kadang-kadang terjadi peristiwa, suatu dokumen dijadikan sampling ternyata dokumen itu tidak akurat karena penulisnya tidak berwenang menulisnya sehingga setelah digunakan untuk sampling bias karenanya. Suatu dokumen dapat dinyatakan valid atau validitasnya dapat dipertanggung jawabkan, manakala setelah dikaji dengan kriteria-kriteria di atas memenuhi persyaratan tersebut Hasil kajian dokumen-dokumen tersebut di atas adalah seperti di bawah ini :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nama Dokumen	Primer/ Sekunder	Pengarang/ Penerbit	Maksud Penulisan	Status penulis/ Penerbit	Struktur nya	Apakah penulis berwenang	Apakah sampling-nya bias	Apakah dokumen itu Valid
1	Grondwet wh. Koninkrijk der-Nederlanden tahun 1992 Boadzij 1 ¹⁾	Sekunder	Penerbit Boekh v.h. Gebruik belinfante N.V. 's-Gravenhage tahun 1922	Konsumsi masyarakat Ilmiah dan Populair	Penerbit : N.V. Penetapan oleh Pemerintah Belanda dan Staten Generaal Parlement Belanda	Buku Ilmiah	Berwenang : Wet ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Parlemen Belanda	Tidak bias : Penerbit, mengutip persis wet yang ditetapkan oleh Lembaga Kenegaraan Belanda	valid

1) Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden blazij 1, Penerbit : Boekh v.h. Gebr. Belintante NV 'sGravenhage 1922.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Declaration of Principle Known as the Atlantic Charter. August 1941 Diambil dari : "The United Nations Textbook" Page 11 compiled by the "Professor Telders" Study Groups of International Law at Lieden. Penerbit : Universitaire Press Leiden 1950. 2)	Sekunder	Penulis : Dihimpun oleh : Professor Telders Study Group Leiden. Kata Pengantar oleh : Manley D. Hadson mantan Hakim dari Permanent Court of Justice.	Konsumsi masyarakat Ilmiah	Penerbit : Universitaire Press Leiden Dihimpun dari Text resmi sesuai aslinya.	Buku Ilmiah	Penulis : menghimpun data dari proses pembentukan PBB. Diberi pengantar oleh Hakim Permanent Court of Justice.	Tidak bias : Dihimpun oleh ahli Hukum International sesuai text aslinya.	v a l i d

2) Telders, United Nations Textbook, page 12.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Declaratio by United Nations. Dilaksanakan di Washington tanggal 1-1-1942 <u>tentang</u> : Peletakan dasar perjuangan terhadap musuh (Tripartite Pact). <u>Diambil dari</u> : The United Nations Textbook. Telders ³⁾	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Valid

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Yalta (Crimea) Conference tanggal 11 Februari 1945 <u>tentang</u> : Penyusunan materi Pembentukan PBB, dalam San Fransisco Conference mendatang . <u>Dari</u> : The United Nations Textbook ⁴⁾	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Valid

3) Telders, United Nations Textbook, page 12.

4) Telders, United Nations Textbook, page 12.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	The San Fansisco Conference tanggal : 25 April 1945 sampai dengan 26 Juni 1945. <u>Isi :</u> Pembentukan PBB dan Perumusan Piagam PBB. Piagam PBB ditandatangani di San Francisco tanggal 26 Juni 1945. Mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945. =Diambil dari : United Nations Textbook, Telders 5)	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Valid

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Piagam PBB, <u>The Charter of United Nations.</u> <u>Diambil dari :</u> "The United Nations Textbook". 6)	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Idem No.2	Valid

5) Telders, United Nations Textbook, page 12.

6) Telders, United Nations Textbook, page 12.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Diambil dari Berita R.I. tahun II nomor 7 halaman : 45 kolom 1 juga dari : Koesnodiprodjo halaman: 1 ⁷⁾	Sekunder	Dihimpun Oleh Koesnodiprodjo dengan mengambil macam - macam Maklumat, Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh Badan Kenegaraan waktu itu. Hal ini dibenarkan oleh : Professor Soepomo di dalam kata pengantar.	Konsumsi masyarakat ilmiah juga umum.	Data-data diambil persis dari Maklumat -maklumat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Kenegaraan R.I. tahun 1945.	Buku Ilmiah	Berwenang : Pembuat Berita R.I. adalah Lembaga Kenegaraan yang berwenang untuk itu	Tidak bias : Karena dihimpun persis dari Berita R.I. dan Ketetapan-ketetapan Lembaga Kenegaraan R.I. yang lainnya.	v a l i d

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pembukaan UUD 45 (Berita R.I. tahun II nomor 7 halaman 45 kolom 1. Koesnodiprodjo halaman 2. ⁸⁾	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

7) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 1.

8) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	UUD 45 (Berita R.I. tahun II halaman 46 kolom 2 Koesnodiprodjo halaman : 3. 9)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Penetapan PPKI tanggal : 22-8-1945 <u>tentang</u> : I. Komite Nasional II. Partai Nasional In - donesia. III. Badan Penolong Korban Perang. Koesnodiprodjo Halaman : 117. 10)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 31 Agustus 1945 <u>tentang</u> : Penundaan Kegiatan Per- siapan Pembentukan PNI. Koesnodiprodjo halaman : 55. 11)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

- 9) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 3.
10) Koesnodiprodjo, Himpunana, halaman 117.
11) Koesnodiprodjo, Himpunana, halaman 55.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 tentang : Pemberian kekuasaan Legislatif kepada KNIP. Berita R.I. tahun II nomor I halaman 10. Koesnodiprodjo halaman : 58. 12)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Maklumat Politik Pemerintah R.I. tanggal : 1-11-1945. tentang : Haluan dari Pemerintah R.I. tanggal 1-11-1945 Berita R.I. tahun I halaman 2. Koesnodiprodjo halaman: 70. 13)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

12) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 58.

13) Koesnodiprodjo, Himpunana, halaman 70.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pengumuman BPKNIP No. 3 <u>tentang</u> : Usul BPKNIP kepada Pre- siden agar rakyat di- izinkan mendirikan Par- tai Politik Berita R.I. tahun I halaman 14 kolom 3. Koesnodiprodjo halaman : 136. 14)	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Valid

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 3-11-1945 <u>tentang</u> : Pembentukan Partai Politik Berita R.I. tahun I halaman 3 kolom 4. Koesnodiprodjo halaman : 76. 15)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

14) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 136.

15) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 76.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Pengumuman BPKNIP tanggal 11-11-1945 <u>tentang :</u> Pertanggungjawaban Menteri kepada badan Legislatif (K N I P). Berita R.I. tahun I halaman 4 kolom 4. Koesnodiprodjo, halaman 139. 16)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 13-11-1945 <u>tentang :</u> Peristiwa Surabaya tanggal 10-11-1945. Berita R.I. tahun I no.2 halaman 9 kolom 3,4. Koesnodiprodjo, halaman 77. 17)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

16) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 139.

17) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 77.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 28-12-1945 tentang : Kewajiban Tentara Inggris di Indonesia. Berita R.I. tahun II no. 4 dan 5 halaman 19 kolom 2. Koesnodiprodjo, halaman 85. 18)	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Idem No.7	Valid

18) Koesnodiprodjo, Himpunan, halaman 85.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	<u>Buku</u> : The International Organization : = Donald C. Blaisdell. = The City Collage of the city University of New York. (19)	Sekunder	Blaisdell, adalah pelaku, dan proses penentuan tahun 1945	Konsumsi masyarakat	Ditulis oleh perorangan	Buku ilmiah	Berwening : Donald C. Blaisdell adalah : 1. Seorang Professor Ilmu Politik pada City Collage dari University New York. 2. Blaisdell pernah mewakili USA di dalam "The Planning and Organization" dari PRR. 3. Pernah mewakili USA dalam General Assembly dari PRR pada tahun 1948. 4. Pernah mewakili USA dalam European office of U.N. pada tahun 1951-1952. 5. Pernah menjadi wakil ketua dari Permanent Mission of USA to International Organization pada tahun 1952-1953. 6. Blaisdell pernah memberi kuliah di University of Wisconsin, University of Illinois dan University of Florida.	Tidak bias : Buku ini ditulis oleh	valid

19) Blaisdell Donald C., International Organization, Penerbit : The Ronald Company, New York, 1966.

Setelah diadakan seleksi dokumen tersebut di atas, peneliti memperoleh 19 (sembilan belas) buah dokumen yang semua sudah valid. Artinya validitas ke-sembilan belas dokumen tersebut sudah bisa dipertanggungjawabkan.

"Mencari Makna, Meaning
dari Masing-masing Dokumen"

Sampailah pada tahapan untuk mencari makna, meaning dari dokumen-dokumen itu, untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

Tahapan mencari makna, meaning dari sembilan belas dokumen termaksud seperti di bawah ini :

1	2	3	4
No.	Nama Dokumen	Validasi Dokumen	Apa Makna (Meaning) dari Dokumen tersebut
1	<p>Grondwet v.h. Koninkrijk der Nederlanden, th.1922 <u>artikel 1 Grondwet</u> : Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied, van Nederland, Nederland Indie (Indonesia), Suriname, en Curaçao.</p>	valid	<p>Penyelesaian persengketaan Indonesia - Belanda waktu itu, belum selesai tuntas, selama Belanda belum mengakui kedaulatan negara Indonesia. Pengakuan demikian terkandung arti bahwa Belanda telah melepaskan Indonesia kaitannya dengan artikel 1 Grondwet. <u>Sehingga berbunyi</u> : Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Suriname en Curaçao. Namun perjuangan ke arah ini harus melalui kekuatan diplomasi dengan memanfaatkan negara-negara Besar, Amerika Serikat, Inggris. Dimaksudkan untuk menekan Belanda agar mengakui kedaulatan negara Indonesia.</p> <p>Persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu tidak mungkin dapat diselesaikan tuntas melalui kekuatan militer saja, tetapi juga melalui diplomasi. Akan tetapi memang, diplomasi tanpa ditunjang kekuatan militer tidak akan berhasil. Kekuatan militer dapat menunjang Diplomasi manakala didukung oleh seluruh rakyat. Soekarno-Hatta melaksanakan diplomasi berhasil gemilang, karena ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung seluruh rakyat, atau didukung oleh kekuatan "tritunggal", (Pemerintah R.I., Militer dan seluruh Rakyat Indonesia). Hasil diplomasi itu ialah diakuinya Negara R.I.S. pada tanggal 27-12-1949 oleh Pemerintah Belanda.</p> <p>Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 Negara R.I.S. dilebur menjadi Negara Republik Kesatuan Berarti Eksistensi Negara R.I. berhasil dipertahankan.</p>

1	2	3	4 (makna dokumen)
2	<p>Declaration of Principle Kown as The Atlantic Charter, August 14, 1941</p> <p><u>Diambil dari :</u></p> <p>The United Nations Textbook, Professor Telders page 11. Penerbit : Universitaire Press Leiden 1950.</p>	valid	<p>The President of U.S.A. Roosevelt and The Prime Minister, Mr. Churchill, representing His Majesty's Government of the United Kingdom being met together, deem it right to make know on certain common principle in the national policies for their respective countries on with their hopes for a better future for the world known as Atlantic Charter.</p> <p>The Atlantic Charter terdiri dari 8 prinsip tapi yang penting untuk negar-negara bekas jajahan seperti Indonesia, adalah prinsip ke 3 mengenai self determination yang menyatakan : (Churchill dan Roosevelt) akan menghormati hak-hak untuk setiap bangsa di dunia ini untuk menentukan nasibnya sendiri dan memilih bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang mereka kehendaki. Juga akan menghormati kedaulatan tiap-tiap negara.</p> <p>Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945, para pemimpin Indonesia Soekarno Hatta juga memanfaatkan peluang yang terdapat pada Atlantic Charter ini. Dengan memanfaatkan peluang Atlantic Charter dan peluang adanya situasi vacuum of power waktu itu, maka Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat terlaksana dengan lancar.</p>

1	2	3	4 (makna dokumen)
3	<p>Declaration by United Nations tanggal 1-1-1942</p> <p><u>Diambil dari :</u></p> <p>"The United Nations Textbook" Telders, page 12.</p>	valid	<p>a. Declaration by United Nations ini diselenggarakan di Washington tanggal 1-1-1942. Dikuti oleh 26 negara, Inggris, Amerika Serikat, Soviet dan yang lain.</p> <p>Para wakil pemerintah peserta Declaration ini sebelum menandatangani terlebih dahulu menyatakan setuju keseluruhan prinsip-prinsip dari pada The Atlantic Charter. Sehingga seluruh keputusan Declaration ini dijiwai oleh prinsip-prinsip Atlantic Charter.</p> <p>b. Sampai bulan Maret 1945 ada 21 negara yang turut serta menjadi pihak dari Declaration ini. Pada April 1945 ada 3 (tiga) negara lagi turut sebagai peserta Declaration ini. Pada April 1945 peserta Declaration ini adalah $26+21+3=50$ negara peserta declaration ini. Dan 50 (lima puluh) negara inilah yang nantinya mengadakan San Fransisco Conference untuk membentuk PBB dan menetapkan Piagam PBB.</p> <p>c. PBB ini menjamin perdamaian dunia. Dan didalam Piagam PBB tersirat sejumlah norma-norma yang merupakan rambu-rambu di dalam hukum Internasional yang harus ditaati negara-negara di Dunia agar tercapai Perdamaian Dunia.</p> <p>d. PBB ini sangat menguntungkan Indonesia di dalam berdiplomasi dalam rangka mengupayakan agar Belanda mengakui kedaulatan Negara Indonesia.</p> <p>Sedangkan Piagam PBB merupakan rambu-rambu Hukum Internasional, yang selalu ditaati para Pemimpin Indonesia di dalam berdiplomasi.</p>

1	2	3	4 (makna dokumen)
4	<p>Yalta (Crimea) Conference 11 Februari 1945. tentang : Penyusunan Materi persiapan Pembentukan PBB. Diambil dari : The United Nations Text-book. Telders : page 15.</p>	valid	<p>a. Peserta Conference ini : Amerika Serikat, Inggris, China dan Uni Soviet. Bahwa para peserta Conference bermaksud akan mendirikan Perserikatan Bangsa Bangsa <u>the General International Organization</u>, untuk menjamin keamanan dan perdamaian Dunia pada masa mendatang. Menghindarkan adanya <u>agression</u> dan bagaimana membangun kerja sama Internasional di bidang politik, ekonomi dan sosial di antara negara-negara yang rakyatnya cinta damai. Dan semua peserta menghendaki akan membentuk PBB di dalam San Fransisco Conference, tanggal 25 April 1945.</p> <p>b. Para peserta menyetujui bahwa 5 (lima) negara yakni, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet dan China, bakal menduduki anggota tetap dari DK PBB.</p> <p>c. Uni Soviet bakal memerankan peranan penting di dalam percaturan internasional, masa yang akan datang, waktu itu.</p> <p>d. Pembentukan PBB diadakan di San Fransisco Conference, Amerika Serikat. Karena di dalam PD II Amerika Serikat tidak dilanda peperangan secara langsung. Amerika berperang di - negara-negara lain. Pasca PD II Amerika tidak mengalami kerusakan, perekonomiannya sangat baik. Sebaliknya negara-negara Eropa, Asia, Afrika dan negara lain, pasca PD II mengalami kerusakan-kerusakan akibat perang. Perekonomian negara-negara ini kalut. Hampir semuanya memerlukan bantuan keuangan dari negara lain. Untuk ini, waktu itu Amerika Serikat mengadakan rencana pola bantuan untuk negara-negara di dunia yang rusak karena perang. Terkenal dengan nama "Marshall-Plan". Banyak negara-negara yang memanfaatkan "Marshall-Plan" itu Pengaruh Amerika Serikat meluas ke seluruh dunia karenanya. Uni Soviet menjadi curiga. Untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat itu, Uni Soviet mempengaruhi negara-negara Eropa Timur, Korea</p>

Vietnam dan lain-lain. Secara geopolitis Uni Soviet mempengaruhi Heartland. Berpangkal dari Heartland ini Uni Soviet memperluas pengaruh Komunisme ke negara-negara lain di Dunia ini.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat waktu itu mempengaruhi negara-negara pantai atau Rimland. Berpangkal dari Rimland ini negara-negara Barat berupaya membendung upaya Uni Soviet tersebut di atas.

Terjadilah perang dingin mulai ± tahun 1946 sampai tahun 1990.

e. Situasi Internasional demikian inilah yang di hadapi oleh para Pemimpin Indonesia, Soekarno Hatta sewaktu melaksanakan politik diplomasi tahun 1945-1947. Indonesia berada dalam lingkup pengaruh Amerika Serikat. Inggris, Australia dan Perancis di Vietnam.

Di dalam mengadakan diplomasi, Soekarno-Hatta waktu itu memanfaatkan peluang yang berada di negara-negara Rimland.

Soekarno-Hatta memanfaatkan pengaruh Amerika Serikat dan Inggris terhadap negeri Belanda. Dengan maksud agar kedua negara besar itu menekan Belanda untuk bersedia berunding dan kemudian supaya Belanda bersedia mengakui kedaulatan Negara Indonesia.

1	2	3	4 (makna dokumen)
5	<p>San Francisco Conference tanggal 25 April 1945 sampai dengan 26 Juni 1945.</p> <p><u>tentang</u> : Pembentukan PBB dan penetapan Piagam PBB.</p> <p><u>Diambil dari</u> : The United Nations Textbook Telders, page 16.</p>	valid	<p>a. San Fransisco Conference ini adalah suatu Konferensi Internasional yang khusus diadakan untuk membentuk secara resmi Organisasi Dunia yang diberi nama Perserikatan Bangsa-Bangsa, <u>The United Nations Organization</u>. Materi organisasi Dunia ini telah dibicarakan di dalam serentetetan perjanjian Internasional mulai The Atlantic Charter 14 Agustus 1941, Declaration by United Nations 1-1-1942 Moscow Declaration on General Security 30-10-1943, Teheran Declaration tanggal 1 Desember 1943, Dumbarton Oaks Proposal, Augt- Sept 1944, Yalta Conference 11-11-1945 sampai Konferensi San Francisco 25 April - 26 Juni 1942 itu. Didalam San Francisco Conference ini juga ditetapkan Piagam PBB, <u>Charter of UN</u>, yang berisikan norma-norma Hukum Internasional, merupakan rambu-rambu Hukum Internasional yang harus ditaati seluruh bangsa-bangsa di dunia demi tercapainya perdamaian dunia.</p> <p>b. Setelah mengalami peperangan mulai 1939 maka bangsa-bangsa di dunia berhasil membentuk Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bakal menjamin terlaksananya Keamanan dan Perdamaian Dunia ini untuk masa datang. PBB ini sebagai badan pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa dibentuk tahun 1920 pasca P.D. I, yang tidak berhasil menggalang Perdamaian Dunia karena meletusnya P.D. II pada tahun 1939.</p> <p>c. Dibentuknya PBB ini sangat herfaedah bagi bangsa-bangsa di dunia, yang waktu itu dalam keadaan tidak menentu dan mengalami kerusakan yang hebat akibat peperangan. Hampir seluruh bangsa di Eropa, Asia, Afrika dan Amerika Latin mengalami kesulitan ekonomi dan keuangan akibat kerusakan karena perang waktu itu. Jadi PBB yang baru dibentuk itu menghadapi tugas yang berat, menangani pembangunan masyarakat dunia yang mengalami kerusakan serius itu.</p> <p>d. Bagi bangsa-bangsa bekas tanah jajahan seperti Indonesia dan Bangsa-bangsa Asia-Afrika umumnya, lahirnya PBB ini merupakan peluang yang sangat besar sekali, di dalam upaya bangsa-bangsa itu memperjuangkan Kemerdekaan bangsanya. persengketaan yang timbul antar bangsa-bangsa tanah jajahan dengan negara induknya, bisa diselesaikan melalui perundingan di bawah pengawasan DK PBB sebagai wasitnya.</p>

		<p>e. Cita-cita Bangsa Indonesia untuk merdeka dapat terlaksana dengan memanfaatkan peluang the Atlantic Charter dan adanya vacuum of power waktu itu.</p> <p>Sedangkan upaya untuk mempertahankan eksistensi negara baru itu (negara R.I.), dapat dilaksanakan sesuai rambu-rambu Hukum Internasional yang tersirat dalam pasal-pasal penting Piagam PBB. Yakni dengan melalui diplomasi yang di tunjang dengan kekuatan militer dan didukung oleh rakyat. Sesuai dengan strategi Soekarno-Hatta dalam mempertahankan eksistensi Negara R.I. yang baru diproklamirkan itu.</p>
--	--	---

1	2	3	4 (makna dokumen)
6	<p>Piagam PBB, <u>Charter of United Nations</u> Dijambil dari : The United Nations Text-book. Telders page 21.</p>	valid	<p>a. Pasal-pasal yang penting dari piagam PBB :</p> <p><u>Pasal 1 ayat 2</u> : Bahwa PBB akan meningkatkan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi rakyat, dan mengambil langkah yang diperlukan guna menjamin perdamaian umum (universal peace) (prinsip self determination).</p> <p><u>Pasal 2 ayat 3</u> : Setiap anggota PBB di dalam menyelesaikan persengketaan yang timbul, ditempuh dengan jalan damai. dengan cara demikian tidak akan membahayakan perdamaian dunia.</p> <p><u>Pasal 2 ayat 4</u> : Setiap anggota PBB akan mengusahakan "tidak akan menggunakan kekuatan senjata" di dalam menyatukan teritorinya, dan di dalam perjuangan kemerdekaan. Semuanya akan dilakukan sesuai dengan Piagam PBB.</p> <p><u>Pasal 2 ayat 7</u> : PBB tidak akan mencampuri urusan dalam negeri, (domestic jurisdiction) negara-negara. Tetapi hal ini tidak berlaku dalam hal penggunaan kekuasaan pada Chapter VII pasal 39 Piagam PBB.</p> <p><u>Pasal 39</u> : DK PBB akan campur tangan dalam hal pelaksanaan domestic jurisdiction, kalau menurut DK PBB dipandang membahayakan perdamaian dunia. Inilah rambu-rambu dalam hukum Internasional yang seharusnya ditaati oleh semua bangsa di dunia ini.</p> <p>b. Para pemimpin Indonesia Soekarno-Hatta dalam mengadakan diplomasi selalu mengambil langkah yang sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas, karenanya Indonesia banyak mendapat simpati dari negara-negara di Dunia Internasional.</p> <p>c. Setiap diserang oleh Belanda, Militer dan rakyat Indonesia membalas menyerang. Dengan maksud agar di Indonesia pecah pertempuran yang hebat. Dengan harapan agar DK PBB melihat adanya pertempuran di Indonesia membahayakan perdamaian Dunia. Untuk kemudian DK PBB campur tangan di dalam persengketaan Indonesia-Belanda. Hal ini sesuai dengan strategi Soekarno Hatta. Mempertahankan eksistensi R.I. melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan DK. PBB. Maksud ini tercapai sewaktu menghadapi Agresi I oleh Belanda tanggal 21-7-1947.</p>

1	2	3	4 (makna dokumen)
7	<p>Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 - 8 - 1945</p> <p><u>Diambil dari:</u> -Berita R.I. tahun II nomor 7 halaman 4 kolom 1 -Koesnodipro-djo, halaman I, <u>Penerbit:</u> S.K. Seno Jakarta, 1951.</p>	valid	<p>a. <u>Teks Proklamasi :</u></p> <p style="text-align: center;">Proklamasi</p> <p>Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan : Kemerdekaan Indonesia.</p> <p>Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia</p> <p style="text-align: right;">Soekarno - Hatta</p> <p>b. <u>Makna dari teks Proklamasi :</u></p> <p>- Proklamasi dilaksanakan di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta jam 11.30. (jam Nippon) atau jam 9.30.</p> <p><u>=Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia :</u></p> <p>Hal ini mengundang arti, bahwa mulai hari itu, Bangsa Indonesia tidak mengakui kekuasaan negara asing maupun di atas Indonesia. Termasuk kekuasaan Belanda, mulai hari itu, detik itu tidak diakui oleh Indonesia.</p> <p>Mulai hari itu jam itu Bangsa Indonesia berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.</p> <p>Mulai hari itu seluruh Rakyat Indonesia siap mempertahankan eksistensi negara Proklamasi, kalau ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri.</p> <p><u>=Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan :</u></p> <p>Pemindahan kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kantor-kantor, jawatan-jawatan dan lain-lainnya yang waktu itu dikuasai oleh Jepang, dipindahkan kedalam kekuasaan Indonesia.</p>

=dan lain-lain :

Yang dimaksud dalam hal ini adalah, penetapan UUD negara, Pembentukan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah dengan segala alat perlengkapannya dan sebagainya.

=dengan cara seksama dalam tempoh sesingkat-singkatnya :

- dengan cara seksama ;

Maksudnya pemindahan kekuasaan dan sebagainya itu, akan dilaksanakan dengan cara damai, tidak akan benturan dengan Jepang yang masih ada di Indonesia.

- dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya

Maksudnya mengenai, Penetapan UUD, Pembentukan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan segala alat perlengkapannya, akan dilaksanakan secepatnya, sebelum Tentara Sekutu, Tentara Inggris datang di Indonesia. Maka dari itu pada tanggal 18-8-145 PPKI telah menetapkan UUD, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (membentuk Pemerintah R.I.) dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Dengan ditetapkan UUD maka dapat diketahui, bahwa negara Proklamasi adalah Negara Republik Indonesia Kesatuan, terdapat pembagian kekuasaan negara, MPR, DPR dan Presiden sebagai Pemerintah.

- Mengapa harus secepatnya ?

Karena sebelum Tentara Inggris, AFNEI, berangkat ke Indonesia, Belanda telah mengadakan perjanjian dengan Inggris terkenal dengan perjanjian "Charquer" yang isinya, di dalam tugasnya di Indonesia, Inggris hanya akan mengakui kekuasaan Belanda atas Indonesia.

- Soekarno-Hatta tanggap atas hal ini. Diupayakan agar sebelum Tentara Inggris datang di Indonesia, telah berdiri Negara Republik Indonesia dengan segala alat perlengkapannya.

- Sikap Soekarno-Hatta ini sangat menguntungkan Indonesia, sewaktu Afnei akan mendarat di Indonesia, Chrisison, komandan Afnei di Singapura mengakui "keberadaan" eksistensi Pemerintah R.I. secara de facto. Hal ini disambut baik oleh Pemerintah R.I.

1	2	3	4 (makna dokumen)
8	Pembukaan UUD 45 <u>Diambil dari :</u> -Berita R.I. tahun II nomor 7 halaman 45 kolom 1 -Koesnodipro-djo, halaman II.	valid	<p>a. Pembukaan UUD 45 merupakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, yang berisikan, pandangan bangsa dan negara Indonesia secara kefilksafatan, dasar negara dan mengapa Bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan, apa tujuannya. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa (self-determination), penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa perjuangan Kemerdekaan Indonesia telah sampai pada waktu yang tepat untuk menghantarkan rakyat Indonesia ke alam kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Atas Rakmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan Kemerdekaannya.</p> <p>b. Proklamasi Kemerdekaan adalah kehendak seluruh Rakyat, kemudian dari pada itu dibentuklah Pemerintah Negara Indonesia yang bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> = Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, = Memajukan kesejahteraan umum, = Mencerdaskan kehidupan Bangsa, = Ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> - Kemerdekaan - Perdamaian abadi - Keadilan Sosial. <p>Inilah tugas Pemerintah Negara Indonesia ke dalam negeri dan ke luar dalam masyarakat Internasional. Tugas ini sudah jelas sekali.</p> <p>Untuk kemudian disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu UUD Indonesia, dalam Negara Republik Indonesia dan berkedaulatan Rakyat berdasar pada Pancasila.</p> <p>c. Salah satu tugas Pemerintah R.I. adalah <u>ikut serta melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial.</u></p> <p>Ketentuan ini menjadi dasar, upaya Soekarno-Hatta di dalam mengadakan diplomasi di Dunia Internasional utamanya dengan PBB di dalam rangka mempertahankan eksistensi Negara R.I. waktu itu.</p>

		<p>d. Soekarno-Hatta, melihat konteks domestik di bidang ekonomi dan militer ada tendensi lemah, disisi lain Soekarno-Hatta melihat adanya peluang-peluang di Dunia Internasional waktu itu yang menguntungkan, maka berdasar pertimbangan di atas itu mengambil strategi diplomasi di Dunia Internasional, yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh Rakyat. Dengan perkataan lain, mengambil strategi diplomasi yang didukung oleh kekuatan tritunggal, (Pemerintah militer dan seluruh rakyat). Utamanya memanfaatkan peluang di DK PBB dalam rangka mempertahankan eksistensi negara R.I.</p>
--	--	--

1	2	3	4 (makna dokumen)
9	<p>UUD 45.</p> <p><u>Diambil dari :</u> =Berita R.I. tahun II nomor 7 halaman 46 kolom 2 =Koesnodipro-djo, halaman 3.</p>	valid	<p>a. Draft rancangan UUD ini dahulu disusun oleh Panitia Kecil dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia heranggotakan 3 (tiga) orang, Soekarno, Prof. Soepomo dan Moch. Yamin. Ditetapkan sebagai rancangan UUD oleh Badan tersebut pada 16-7-1945. Ditetapkan sebagai UUD negara R.I. oleh PPKI pada tanggal 18-8-1945, (dengan diberi Pembukaan Piagam Jakarta).</p> <p>b. UUD 45 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> = Pembukaan (ini diambil dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945). = Batang Tubuh (pasal 1 - 37). = Aturan Peralihan (pasal I, II, III, IV). = Aturan Tambahan. <p>- <u>Pembukaan UUD'45 :</u> Di dalam alinea empat Pembukaan UUD'45 dinyatakan : "Kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan <u>ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial</u>". Pernyataan terakhir ini merupakan landasan upaya Soekarno-Hatta di dalam melaksanakan diplomasi di dunia Internasional utamanya dengan PBB. Selama mengadakan perundingan dengan Belanda, Soekarno-Hatta selalu berpegang pada landasan pokok, yakni : Pembukaan UUD'45 ini, pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 3 dan 4 Piagam PBB.</p> <p>- <u>Batang Tubuh UUD'45</u> Berisikan pasal 1 - 37 UUD'45.</p> <p>- <u>Aturan Peralihan I, II, III, IV UUD'45</u> Dari Aturan Peralihan ini yang terkait erat dengan penelitian ini adalah pasal IV.</p> <p>c. Aturan Peralihan pasal IV menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum MPR, DPR dibentuk berdasarkan UUD ini, maka kekuasaannya dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Menurut kata-katanya pasal IV Aturan Peralihan ini mengandung arti adanya pemusatan kekuasaan Negara ditangan Presiden.

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">-Pasal IV ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk propaganda di Dunia Internasional bahwa negara R.I. adalah fasis. Belanda tidak mau berunding dengan negara fasis.-Hal ini merupakan hambatan bagi strategi Soekarno-Hatta, untuk berunding dengan Belanda dibawah pengawasan DK PBB.-Hambatan ini dihilangkan oleh Soekarno-Hatta dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945, isinya ialah merubah pasal IV Aturan Peralihan UUD ini, dimana KNIP disertai tugas Legislatif, semua ini dilakukan untuk membuka kemungkinan bisa berunding dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. |
|--|--|---|

1	2	3	4 (makna dokumen)
10	Ketetapan PPKI tanggal 22 - 8 - 1945 tentang : I. Komite Nasional. II. Partai Nasional Indonesia (P N I). III. Badan Penolong korban perang Diambil dari : Koesnodiprodjo halaman 117.	valid	<p>a. <u>Komite Nasional, KNI.</u> KNI adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan Kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat. = Usaha Komite Nasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan, "kebangsaan", yang bulat dan erat. - membantu menentrankan rakyat dan menjaga keselamatan umum. - membantu Pimpinan di dalam melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia. <p>b. <u>Partai Nasional Indonesia, PNI.</u> = Tujuan PNI, Negara Republik Indonesia yang berdaulat adil dan makmur berdasarkan Kedaulatan Rakyat. = Usaha untuk mencapai tujuan itu :</p> <ul style="list-style-type: none"> = Memperkuat persatuan bangsa dan negara. = Memperbesar rasa cinta, setia dan hakti kepada tanah air. = Mengikhtiarkan program ekonomi dan sosial seperti dibawah ini : -Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas gotong royong. (Prinsip ini nantinya masuk pasal 33 ayat 1 UUD, asas gotong royong diganti dengan asas kekeluargaan). -Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (Ini nantinya masuk pasal 33 ayat 2 UUD 45). -Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. (Ini nantinya masuk pasal 33 ayat 3 UUD 45). -Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (Ini nantinya masuk pasal 34 UUD 45). -Hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Ini nantinya masuk pasal 27 ayat 2 UUD 45). <p>c. Membantu tercapainya keadilan sosial dan perikemanusiaan dengan jalan perdamaian Internasional. (Ini nantinya masuk Pembukaan UUD 45 alenia 4).</p>

=Kalau diamati secara seksama, meskipun ketetapan ini dilakukan oleh PPKI, namun dapat dilihat maknanya bahwa konseptor ketetapan ini adalah Soekarno.

Sebagaimana diketahui konseptor UUD 45 ini dahulu juga Soekarno sewaktu menjabat Ketua Panitia Kecil, Hukum Dasar yang dibantu oleh Prof. Soepomo dan Moch. Yamin, namun dapat dilihat bahwa peran Soepomo dan Yamin adalah bidang hukum, sedang substansi UUD adalah konsep Soekarno. Juga yang mendirikan PNI pada tahun 1927 juga Soekarno.

Kalau diamati cermat lagi, program ekonomi dan sosial dari PNI tersebut di atas, adalah merupakan rambu-rambu bagi Pemerintah dan bangsa Indonesia di dalam mengelola bidang ekonomi dan sosial negara Republik Indonesia masa datang (waktu itu). Dan rambu-rambu itu kita rasakan amat penting sampai sekarang ini, karena rambu-rambu bidang ekonomi sosial itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal penting UUD 45.

=Juga kalau diamati cermat huruf c. di atas, "membantu tercapainya keadilan sosial dan perikemanusiaan dengan jalan perdamaian Internasional"

Asas ini juga konsep dari Soekarno. asas ini nantinya masuk Pembukaan UUD 45 alenia 4. "Ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan Keadilan Sosial.

Soekarno-Hatta di dalam menegakkan eksistensi Negara Proklamasi juga tetap berdasarkan asas perdamaian, yakni berunding dengan Belanda dibawah pengawasan DK PBB.

1	2	3	4 (makna dokumen)
11	<p>Maklumat Pemerintah R.I. tanggal : 31 Agustus 1945</p> <p><u>tentang :</u> Penundaan usaha pembentukan PNI.</p> <p><u>Diambil dari :</u> Koesnodiprodjo halaman 46.</p>	valid	<p><u>Penundaan gerakan dan persiapan pembentukan Partai Nasional Indonesia dan mengalihkan Kegiatan itu ke KNIP.</u></p> <p>Mengenai Ketetapan PPKI tanggal 22-8-1945 khususnya mengenai pembentukan PNI, Bung Hatta sebagai Dwi Tunggal, memperingatkan kepada Bung Karno bahwa upaya mendirikan PNI, walaupun maksudnya baik, tetapi ada kelemahan-kelemahan, yakni akan dimanfaatkan Belanda guna menjelek-jelekan Indonesia di Dunia Internasional.²⁰⁾ Atas peringatan ini Soekarno setuju, kemudian diambil kebijaksanaan sebagai berikut :</p> <p>= Ditetapkan Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 31-8-1945 yang isi pokoknya "berhubung dengan maha pentingnya KNIP untuk memusatkan segala tindakan dan susunan persatuan rakyat, makagerakan dan persiapan mendirikan PNI untuk sementara waktu ditunda. Dan segala aktivitas diarahkan kepada KNIP". Waktu itu KNIP diperbolehkan mengadakan rapat-rapat sampai ke desa-desa dan sebagainya.</p> <p>= Dan peringatan Hatta ternyata benar, walaupun di dalam kenyataannya belum pernah dibentuk PNI berdasarkan keputusan PPKI tanggal 22-8-1945 itu, tetapi hal ini dimanfaatkan oleh Belanda, menuduh negara R.I. adalah fasis. Belanda propaganda di Dunia Internasional, di Negara Indonesia ada pemusatan kekuasaan negara di tangan Presiden, (pasal IV Aturan Peralihan UUD) dan dibentuk 1 (satu) partai yakni PNI. Hal ini merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa negara R.I. memang fasis. Demikianlah tuduhan Belanda kepada Indonesia.</p>

20) Wawancara dengan DR. H. Roeslan Abdulgani tanggal 15-1-1996.

1	2	3	4 (makna dokumen)
12	<p>Maklumat Wakil Presiden R.I. No. X. tanggal 16 - 10 - 1945</p> <p><u>tentang</u> : Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).</p> <p><u>Diambil dari</u> : = Berita R.I. nomor 2 halaman 10 kolom 3 = Koesnodiprodjo, halaman 58.</p>	valid	<p>a. Strategi dasar dari Soekarno-Hatta di dalam menegakkan eksistensi Negara Republik Indonesia waktu itu, ialah melalui berunding dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB.</p> <p>= Tetapi upaya untuk berunding dengan Belanda itu ada hambatan. Karena Belanda memanfaatkan peluang pasal IV Aturan Peralihan UUD, menuduh negara R.I. adalah fasis, ternyata ada sentralisasi kekuasaan negara di tangan Presiden. Belanda tidak bersedia berunding dengan negara fasis (R.I.).</p> <p>= Untuk menghilangkan hambatan itu, Soekarno-Hatta bermaksud akan merubah isi dari pasal IV Aturan Peralihan UUD itu.</p> <p>= Kebetulan sekali waktu itu, Sjahrir yang mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Inggris yang datang di Indonesia, mendapat desakan dari Inggris agar bentuk Pemerintah Indonesia dirubah, agar ada Perdana Menteri. Sebab pemerintah yang sekarang sepertinya adalah buatan Jepang. Sesudah itu Sjahrir membicarakannya dengan Soebadio sastrosatomo.²¹⁾</p> <p><u>Sjahrir</u> : Soekarno memang kolaborator tetapi saya tidak mau mengganti Soekarno. Sebab Soekarno adalah R.I. dan R.I. adalah Soekarno. Sjahrir mau menjadi Perdana Menteri, tetapi bagaimana mengubah system Pemerintahan ini, yang berwenang merubah adalah MPR dan MPR belum ada.</p> <p><u>Soebadio, Soepeno, Sukarmin</u> : KNIP saja dijadikan MPR. Sjahrir setuju.</p> <p>= Atas desakan ini Sjahrir mempelopori mengadakan "petisi" di KNIP, yang ditanda tangani oleh 50 (lima puluh) anggota KNIP, mendesak Presiden, agar sebelum MPR, DPR dibentuk, KNIP disertai tugas legislatif.</p>

21) Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo tanggal 9 Maret 1996 di Jakarta.

= Petisi itu dibicarakan di dalam rapat KNIP pada tanggal 16-10-1945 di Jakarta. Waktu itu Soekarno berada di luar kota. Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden DR. Moch. Hatta. 22) Soekarno sudah setuju apa yang akan diputuskan oleh Hatta. Di dalam rapat itu Hatta menetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 yang isinya, merubah pasal IV Aturan Peralihan UUD 45 yakni sebelum MPR, DPR dibentuk berdasarkan UUD ini, maka KNIP diberi kekuasaan legislatif dan turut menetapkan GBHN, juga dibentuk Badan Pekerja KNIP, BPKNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP.

h. Penetapan Maklumat Wakil Presiden No. X ini, dimaksudkan untuk dimungkinkannya membuka perundingan dengan Belanda.

c. Soekarno-Hatta juga menyetujui Sjahrir menjadi Perdana Menteri pada 14-11-1945.

22) Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo, 9-3-1996 dan dengan Bapak DR. H Roeslan Abdulgani tanggal 15-1-1996.

1	2	3	4 (makna dokumen)
13	<p>Maklumat politik Pemerintah R.I. tanggal 1 - 11 - 1945</p> <p><u>tentang</u> : Haluan dari Politik Pemerintah R.I. yang telah diketujui oleh B.P.K.N.I.P.</p> <p><u>Diambil dari</u> : = Berita R.I. tahun 1 nomor 1 halaman 2 kolom 3 dan 4. = Koesnodipro-djo, halaman 70.</p>	valid	<p>a. Maklumat Politik tanggal 1-11-1945 sebagai Maklumat pelaksanaan dari pada Maklumat Wakil Presiden R.I. No. X tanggal 16-10-1945. Dimaksudkan untuk menangkis, <u>mengcounter</u>, upaya Belanda yang selalu menyuarakan di dunia internasional bahwa Negara R.I. adalah fasis.</p> <p>b. Isi pokok Maklumat Politik tanggal 1-11-1945 ini merupakan pernyataan Bangsa dan Negara Indonesia <u>keluar dan ke dalam</u> negeri. Draft Maklumat Politik tanggal 1-11-1945 ini ditulis atau disusun oleh Ir. Soekarno.²³⁾</p> <p>= <u>Ke luar negeri</u> :</p> <p>Karena masyarakat Internasional waktu itu mulai melihat dan memperhatikan Negara dan Bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, maka Pemerintah R.I. merasa perlu menyatakan sikap negara dan bangsa Indonesia. Bangsa dan Negara Indonesia tidak membenci orang-orang asing, juga tidak membenci orang-orang Belanda.</p> <p>Indonesia hanya berkehendak untuk dibiarkan merdeka mengurus rumah tangga sendiri. Bangsa Indonesia tidak ingin menggunakan kekerasan. Kalau di Indonesia ada kekerasan semata-mata karena orang-orang Belanda menyerangnya, ingin kembali menjajah Indonesia.</p> <p>Kalau dibiarkan merdeka kekayaan yang melimpah di negara Indonesia masih mungkin dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Belanda.</p> <p>Tetapi semua itu hanya akan dapat dimulai jikalau pertentangan Indonesia-Belanda dapat diselesaikan dengan "<u>pengakuan recognition</u>", terhadap negara dan Pemerintah R.I. yang telah dipilih oleh bangsa Indonesia.</p> <p>Dengan pengakuan Kemerdekaan itu, Indonesia akan menanggung segala apa yang patut ditanggung oleh Bangsa Indonesia menurut kedudukan Indonesia.</p> <p>Segala hutang Hindia Belanda sebelum penyerahan Jepang, dan patut menjadi tanggungan Indonesia, diakui sebagai hutang Indonesia.</p>

23) Hasil Wawancara khusus dengan DR. H. Roeslan Abdulgani tanggal 15-1-1996.

Segala milik bangsa asing selain yang diperlukan oleh Negara R.I. sendiri, dikembalikan kepada yang berhak dan yang diambil oleh negara akan dihayar kerugian dengan seadil-adilnya.

Negara Indonesia akan mengusahakan persahabatan dengan negara-negara tetangga dengan bangsa-bangsa seluruh dunia.

Negara dan bangsa Indonesia akan menjadi anggota PBB, United Nations Organization, dan menyetujui benar-benar, maksud dari pada Piagam PBB, Charter of United Nations.

Pernyataan Negara dan Bangsa Indonesia ini bukan omong kosong, Soekarno-Hatta di dalam mengadakan diplomasi selalu berpegang pada rambu-rambu Hukum Internasional yang tersirat di dalam pasal-pasal Piagam PBB.

= ke dalam negeri :

Di dalam negeri Negara dan Bangsa Indonesia akan melaksanakan system Demokrasi yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Sedikit hari lagi (waktu itu) akan diadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia cita-cita dan dasar kerakyatan, benar-benar dasar dan pedoman masyarakat dan Negara Indonesia.

c. Inilah pernyataan resmi Negara dan Bangsa Indonesia, yang ditujukan utamanya kepada Bangsa-bangsa di seluruh Dunia. Guna menjelaskan bahwa sikap dan tujuan Bangsa Indonesia, tidak seperti apa yang dipropagandakan Belanda di Dunia Internasional selama ini (waktu itu).

1	2	3	4 (makna dokumen)
14	Pengumuman BP-KNIP No. 3 tanggal 30-10-1945 tentang : <u>Usul BPKNIP</u> kepada Presiden supaya rakyat diizinkan mendirikan Partai Politik <u>Diambil dari :</u> = Berita R.I. tahun I No. I halaman 4 kolom 3. = Koesnodiprodjo halaman 136	valid	a. Pengumuman BPKNIP ini berkaitan pula dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 yang pada pokoknya akan merubah bentuk pemerintah R.I. Demokrasi Presidensial menjadi Demokrasi Parlementair dengan multi-partai-sistem. Hal ini dikehendaki pula oleh Soekarno-Hatta, guna membuka kemungkinan untuk bisa berunding dengan Belanda dibawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. b. Hal ini dilakukan Soekarno-Hatta agar strategi Pemerintah R.I. untuk berunding dengan Belanda bisa terlaksana. c. Pengumuman BPKNIP No. 3 ini ditandatangani oleh ketua BPKNIP Sutan Sjahrir pada tanggal 30-10-1945.

1	2	3	4 (makna dokumen)
15	<p>Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 3 - 11 - 1945</p> <p><u>tentang</u> : Pembentukan Partai-Partai Politik</p> <p><u>Diambil dari</u> : = Berita R.I. tahun II nomor 1 halaman 3 kolom 4. = Koesnodiprodjo, halaman 76.</p>	valid	<p>a. Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 3-11-1945 ini adalah juga Maklumat pelaksanaan dari pada Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16-10-1945.</p> <p>Tujuan pokok adalah merubah bentuk Pemerintah R.I. menjadi Demokrasi Parlemtair Multi Partai sistem. Untuk meng-counter propaganda Belanda selama ini (waktu itu).</p> <p>b. Kalau hal ini dikaitkan dengan ketetapan PPKI tentang pembentukan PNI, perlu diketahui bahwa ketetapan PPKI tersebut ditunda pelaksanaannya dengan Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 31-8-1945. Di dalam kenyataannya tidak terjadi pembentukan PNI berdasar ketetapan PPKI tanggal 22-8-1945 itu. Kalau kemudian lahir PNI, itu mendasarkan Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 3-11-1945 ini.</p> <p>c. Oleh karena usulan pembentukan Partai Politik sebagai diusulkan oleh BPKNIP tanggal 30-10-1945 itu sesuai dengan strategi untuk merubah bentuk Pemerintah Indonesia, maka usul itu disetujui oleh Presiden R.I.. Sebagai tindak lanjut ditetapkan Maklumat Pemerintah tanggal 3-11-1945 itu. Maka tumbuhlah Partai Politik yang banyak. Indonesia benar-benar menganut multi partai sistim.</p> <p>d. Disisi lain dengan dibentuknya partai-partai itu, dampaknya ke dalam negeri tidak baik. Perkembangan kenegaraan dan masyarakat Indonesia antara 3-11-1945 sampai 5 Juli 1959 tidak menguntungkan. Pertentangan antar partai yang satu dengan yang partai yang lain berlanjut serius. Waktu diadakan Pemilihan Umum 1955 diikuti ± 40 partai politik. Persatuan bangsa waktu itu sangat rawan. Pemerintah selalu tidak stabil. Rupanya inilah pembelian mahal yang harus dikorbankan guna memungkinkan Indonesia bisa berunding dengan Belanda, guna kepentingan yang lebih besar, agar berhasil mempertahankan eksistensi Negara Proklamasi, Negara Republik Indonesia.</p>

1	2	3	4 (makna dokumen)
16	<p>Pengumuman BPKNIP No. 5 tanggal 11 - 11 - 1945</p> <p><u>tentang</u> : Pertanggung jawaban Menteri kepada Badan Legislatif.</p> <p><u>Diambil dari</u> : = Berita R.I. tahun I No. I halaman 4 kolom 4. = Koesnodipro-djo, halaman 139.</p>	valid	<p>a. Soekarno-Hatta memang menghendaki agar Pemerintah R.I. waktu itu dirubah menjadi Demokrasi Parlemntair dengan Multi Partai Sistim. Semuanya itu guna memungkinkan perundingan dengan Belanda dan menyesuaikan dengan kehendak Tentara Inggris, (AFNEI). Dan untuk meng-counter propaganda Belanda bahwa Negara R.I. adalah Fasis.</p> <p>b. Pengumuman BPKNI tanggal 11-11-1945 ini juga merupakan pelaksanaan dari pada Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945.</p> <p>Pengumuman BPKNIP tanggal 11-11-1945 berisikan usul kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanya pertanggung jawaban para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat dalam hal ini KNIP. Usul itu diterima oleh Presiden. Maka dari itu mulai tanggal 11-11-1945 itu para Menteri bertanggung jawab kepada KNIP.</p> <p>c. Maka berubahlah bentuk Pemerintahan R.I. dari Demokrasi Presidensial menjadi Demokrasi Parlemntair yang Multi Partai Sistim. Berawal dari Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 beserta Maklumat-maklumat pelaksanaannya tercapai strategi Soekarno-Hatta untuk merubah pasal IV Aturan Peralihan UUD, semuanya itu dilakukan guna membuka jalan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB</p> <p>d. Waktu itu keinginan Sjahrir untuk menjadi Perdana Menteri juga dikabulkan oleh Presiden. Maka berdirilah Kabinet II pada tanggal 14-11-1845 dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Karena Sjahrir ini dekat hubungannya dengan baik dengan Inggris maupun dengan Belanda. Perdana Menteri Sjahrir ini nantinya akan ditugasi oleh Presiden untuk mengadakan perundingan dengan Belanda.</p> <p>Waktu itu Soekarno menyatakan kepada Hatta : "Sjahrir biar turut serta dalam Pemerintahan, nanti ditugasi mengadakan Perundingan dengan Belanda".²⁴⁾</p>

24) Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo tanggal 9-3-1996 dan dengan Bapak DR. H. Roeslan Abdulgani tanggal 15-1-1996.

1	2	3	4 (makna dokumen)
17	<p>Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 13 - 11 - 1945</p> <p><u>tentang :</u> Peristiwa Surabaya tanggal 10 - 11 - 1945</p> <p><u>Diambil dari :</u> = Berita R.I. tahun I No.2 halaman 9 kolom 3 dan 4 = Koesnodiprodjo, halaman 77.</p>	valid	<p>a. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta tanggal 17-8-1945 ternyata didukung oleh seluruh Rakyat. Rakyat secara spontan bersikap mempertahankan keberadaan Negara Proklamasi. Peristiwa di Semarang, Ambarawa dan utamanya di Surabaya adalah merupakan indikator kuat akan hal itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Drg. Moestopo, Komandan Sektor Utara (Perak) waktu itu sewaktu Inggris mendarat, seperti dibawah ini :</p> <p>"Bahwa Sikap rakyat Surabaya menentang Tentara Inggris, ini bisa terjadisecara massal karena rakyat berpendapat, bahwa Tentara Inggris mendukung gerakan Tentara Belanda yang akan menjajah Indonesia kembali. Hal ini berarti menghilangkan kenyataan dikuasainya Surabaya oleh Pemerintah RI. dalam hal ini Walikota Radjimin Nasution dan Residennya Sudirman. Dalam pertempuran Surabaya ini Rakyat secara spontan melawan Tentara Inggris dan Belanda. Karena Rakyat menyadari bahwa kedatangan Tentara Inggris yang diboncengi Belanda merupakan ancaman bagi keberadaan Pemerintah R.I. di Surabaya. Di dalam peristiwa Surabaya ini Jendral Mallaby terbunuh karena gerakan rakyat secara spontan tanpa komando".²⁵⁾</p> <p>b. Di dalam Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 13-11-1945 itu antara lain dinyatakan, bahwa dengan kematian Mallaby Pemerintah R.I. mengusulkan kepada Tentara Inggris agar hal itu diselesaikan dengan jalan damai, tetapi sayang Tentara Inggris tidak memperhatikannya, malah memberi ultimatum kepada Arek-arek Suroboyo. Syarat-syarat yang dituntut di dalam ultimatum itu tidak mungkin dipenuhi oleh Bangsa yang menghormati dirinya. Rakyat Surabaya tidak mau memenuhi ultimatum itu dan melawan serangan Tentara Inggris dan Belanda dengan alat apa saja.</p> <p>Pada tanggal 10-11-1945 jam 13.00 Tentara Inggris menggempur kota Surabaya dari laut dan udara. Seluruh rakyat melawannya tanpa takut resiko apapun. (waktu itu peneliti berdomisili di Surabaya).</p>

25) Wawancara dengan Prof. Drg Moestopo tanggal 10-11-1953.

c. Dari keseluruhan isi Maklumat tanggal 13-11-1945 itu terbukti untuk kesekian kalinya menunjukkan bahwa strategi Soekarno-Hatta tetap melalui jalan perdamaian. Segala persoalan mengenai hubungan internasional diselesaikan melalui jalan damai, melalui perundingan dibawah pengawasan DK PBB, sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB.

Di dalam Maklumat Pemerintah tanggal 13-11-1945 itu dinyatakan :

- Pemerintah R.I. baik secara resmi maupun dengan cara lain telah berkali-kali menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan segala hal yang berkenaan dengan pendudukan Tentara Sekutu dengan jalan damai
- Pemerintah telah pula memerintahkan kepada segenap pegawai untuk membantu Tentara Sekutu (Tentara Inggris).
- Kesanggupan akan jalan damai ini telah pula dibuktikan dengan nyata dalam peristiwa Surabaya tanggal 28, 29 Oktober 1945, Magelang 29, 30 Oktober 1945, yang telah dapat dihentikan peristiwa-peristiwa itu oleh Presiden Soekarno.
- Dengan kematian Jendral Mallaby, pemerintah mengusulkan kepada Tentara Inggris agar hal itu diselesaikan dengan jalan damai.
- Tapi sayang Tentara Inggris tidak mengindahkan usul itu, malah memberi ultimatum kepada Arek-arek Surabaya.
- Syarat-syarat di dalam ultimatum, tidak mungkin dipenuhi oleh bangsa yang menghormati dirinya. Rakyat Surabaya tidak mau menuruti ultimatum itu.
- Inggris pada tanggal 10-11-1945 jam 13.00. menggempur kota Surabaya dari laut, udara. Putra-putri Surabaya melawan serentak tanpa hitung resiko apa yang akan dialami nya, dengan segala senjata yang ada.
- Bahwa perbuatan Tentara Inggris melukai perasaan perikemanusiaan, yang dibuktikan banyaknya korban, wanita dan anak-anak kecil.
- Pemerintah menganjutkan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mengirim segala bantuan ke Surabaya, menunjukkan solidaritas.
- Rakyat Indonesia mendasarkan perjuangan atas kekuatan sendiri.

d. Walaupun peristiwa Surabaya menelan korban rakyat dalam jumlah besar, disisi lain peristiwa Surabaya mempunyai dampak di dunia internasional, utamanya di DK PBB di London. Bahwa tindakan Tentara Inggris di Surabaya itu mendapat reaksi dari berbagai Wakil Negara anggota PBB.

= Statement Wakil Ukraina : bahwa situasi di Indonesia dengan digunakan Tentara Inggris dalam aksi militer terhadap perjuangan Kemerdekaan Indonesia, dimana tentara Jepang juga dipergunakan demikian, maka wakil dari Ukraina mengusulkan agar dihentuk suatu komisi yang terdiri dari wakil-wakil Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Inggris dan Belanda untuk meneliti situasi onthe spot untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada DK PBB, sebagai bahan penanganan lebih lanjut. Dmitri Manuilsky wakil Ukraina tidak bisa menerima laporan Bevin wakil dari Inggris mengenai peristiwa Surabaya. Demikianlah hal ini diuraikan di dalam buku Osman Raliby. 26)

= Reaksi Mesir.

Setelah mendengar keterangan dari Wakil-wakil Ukraina, Inggris, Belanda dan Uni Soviet tentang penggunaan Tentara Inggris untuk melawan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Surabaya, menyatakan, haruslah difahami benar-benar bahwa Tentara Sekutu (Inggris) tidak diperbolehkan dipakai terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia. Tugas pokok adalah memulangkan Tentara Jepang dan pembebasan tawanan-tawanan. (Osman Raliby). 27)

e. Ternyata kepahlawan Arek-arek Surabaya menembus dan mencuat keluar negeri sampai DK PBB di London.

Malah Tentara Inggris kemudian menyadari kesalahannya dan mundur dari persoalan Surabaya, kemudian menekan Belanda agar mengadakan perundingan dengan Pemerintah R.I. dalam rangka penyelesaian persengketaan kedua negara, Belanda-Indonesia.

Ternyata kepahlawanan rakyat Indonesia yang ditandai adanya Pertempuran Surabaya itu, menembus dan mencuat ke luar sampai Dunia Internasional, yakni DK PBB yang mempermasalahkan Indonesia di DK PBB London, sekitar akhir Desember 1945 dan Permulaan tahun 1946. Juga mampu merubah pemikiran para

26) Osman Raliby, Documenta Historica, halaman 595.
Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta, 1953.

27) Osman Raliby, Documenta Historica,
halaman 594.

Pemimpin Inggris, bahwa tindakan Tentara Inggris di Surabaya adalah tindakan yang keliru. Walaupun pernyataan ini tidak pernah dinyatakan secara formal, tetapi hal itu dapat dilihat di dalam Maklumat yang disampaikan oleh Jendral Sir Phillip Christison tanggal 26 Desember 1945 yang diulas oleh Kementerian Penerangan R.I. sebagai berikut : Maklumat yang dikeluarkan oleh Jendral Sir Phillip Christison tgl. 26-12-1945 adalah penjelasan tepat, yang sesuai dengan keterangan resmi dari State Department Amerika Serikat, bahwa menurut keputusan Amerika Serikat dan Inggris, Tentara Inggris dalam lingkungan sekutu hanya mengenai pemindahan Tentara Jepang dan mengurus kaum tawanan.

Tentara Sekutu tidak berpolitik dan tidak menjalankan politik, sebab urusan politik di Indonesia adalah urusan Belanda dan Indonesia.²⁸⁾ Makna dari keputusan Christison tanggal 26-12-1945 ini secara tidak langsung, merupakan pengakuan bahwa tindakan Tentara Inggris di Surabaya adalah keliru, dan permintaan maaf oleh Tentara Inggris kepada bangsa Indonesia dan kepada masyarakat Internasional utamanya DK PBB.

f. Dengan peristiwa Surabaya ini, strategi Soekarno-Hatta pertahankan eksistensi Negara Proklamasi dengan mengandalkan kekuatan diplomasi yang ditunjang kekuatan militer yang didukung oleh seluruh Rakyat atau sikap Soekarno yang mengandalkan kekuatan diplomasi yang didukung oleh "tritunggal" (Pemerintah, Militer dan Rakyat) itu adalah merupakan strategi yang bisa dipertanggungjawabkan.

28) Koesnadiprojo, Himpunan, hal 85.

1	2	3	4 (makna dokumen)
18	<p>Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 28 - 12 - 1945</p> <p><u>tentang</u> : Kewajiban tentara Inggris Di Indonesia</p> <p><u>Diambil dari</u> : = Berita R.I. nomor 4 dan kolom 2. = Koesnodipro-djo, halaman 85.</p>	valid	<p>a. Isi pokok dari Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 28-12-1945 adalah :</p> <p>= Maklumat yang dikeluarkan oleh Jendral Sir Philip Christison tanggal 26-12-1945 adalah penjelasan yang tepat, dan sesuai dengan keterangan resmi State Departement Amerika Serikat bahwa Tentara Inggris menurut keputusan Amerika Serikat dan Inggris dalam lingkungan sekutu, hanya mengenai pemindahan Jepang, melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan. Tentara sekutu tidak berpolitik. Sebab urusan politik semata-mata adalah urusan Indonesia-Belanda.</p> <p>= Yang menjadi urusan bagi Tentara Sekutu bersama-sama bangsa Indonesia adalah, menjamin ketentraman dan keamanan, yang waktu itu sangat terganggu di beberapa kota di Jawa Barat, karena tindakan Provokasi N.I.C.A. yang selalu dilawan oleh bangsa Indonesia.</p> <p>b. Pernyataan Jendral Sir Philip Christison tanggal 29-12-1945 itu adalah, bahwa setelah Tentara Inggris bertempur melawan Arek-arek Surabaya ternyata berubah pikiran. Pernyataan ini, walaupun tidak terang-terangan, Tentara Inggris mengakui kekeliruannya terhadap rakyat kota Surabaya.</p> <p>c. Dengan peristiwa Surabaya ternyata perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia di kenal di dunia Internasional khususnya di PBB di London. Hal demikian menunjang usaha Soekarno-Hatta untuk melakukan diplomasi, berunding dengan Belanda di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB.</p> <p>Peristiwa Surabaya adalah suatu indikasi bahwa Proklamasi Kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta, benar-benar ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat.</p>

1	2	3	4 (makna dokumen)
19	<p>International Organization <u>Penulis :</u> Donald C Blaisdell The City Collage of City University, New York <u>Penerbit :</u> The Ronald Press Company New York 1966</p>	valid	<p>a. Di dalam mengenal mekanisme PBB utamanya Dewan Keamanan PBB yang selalu menjadi tumpuan Bangsa Indonesia di dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda, kiranya perlu dibaca buku dari Blaisdell ini. Di dalam buku itu diuraikan pertumbuhan organisasi Internasional PBB itu beserta fungsi masing-masing organ daripada PBB itu.</p> <p>b. Ada 6 (enam) organ pokok atau principal organ dari pada PBB itu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang Umum PBB (General Assembly) - Dewan Keamanan PBB (The Security Council) - Dewan ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) - Dewan Perwalian (Trusteeship Council) - Mahkamah Internasional (The International Court of Justice). - Sekretariat PBB (Secretariat). <p>Diantara 6 (enam) organ pokok PBB yang sangat relevan dan berkaitan dengan perjuangan Kemerdekaan Indonesia adalah DK PBB (The Security Council). Kepada badan inilah Indonesia selalu mengupayakan agar Dewan Keamanan PBB ini mencampuri upaya penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu sebagai badan pengawas.</p> <p>c. Tugas utama PBB adalah untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia dan tugas ini, yakni kewenangan memelihara keamanan dan perdamaian dunia ini diletakkan pada Dewan Keamanan PBB tersebut.</p> <p>Dewan Keamanan PBB inilah yang memegang kekuasaan dan berwenang mengambil keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan perdamaian Dunia.</p> <p>Oleh karena tugas Dewan Keamanan PBB ini sangat luas maka kadang-kadang Dewan Keamanan PBB ini membentuk organ tambahan atau <u>The Subsidiary Organ</u>, seperti halnya untuk Indonesia pernah dibentuk Komisi Tiga Negara, untuk mengawasi perundingan Renville dan UNCI, (<u>United Nation Commission to Indonesia</u>) mengawasi perundingan KMB.</p>

"Mengadakan Selektif Coding dan Coaxial Coding"

Yang disebut selektif Coding adalah, setelah peneliti membaca serangkaian catatan-catatan itu, konsep apa yang selalu muncul di dalam catatan-catatan itu lalu diberi code tertentu, misalnya "meaning" dengan kode "mn", Atlantic Charter dengan kode (AC). Demikian juga sekumpulan dokumen lain, kejadian apa yang selalu muncul diberi kode sendiri-sendiri.

Selektif "coding" ini guna menghasilkan kriteria-kriteria atau kategori-kategori, skala klasifikasi dari variabel-variabel, di dalam penelitian itu.

Coaxial Coding atau Axial Coding, setelah memberi kode-kode pada "meaning" dan "role" lalu membuat matrik. Jadi Coaxial Coding adalah membaca dan melihat matrik yang dibuat yang menghubungkan dua variabel. Di dalam membaca matrik itu, disana didapat crossing antara dua variabel, meaning dan role yang dapat dihasilkan proposisi-proposisi tertentu.

Yang dimaksud dengan meaning adalah makna dari dokumen yang dipergunakannya, atau kejadian-kejadian tertentu, ini dicari apa makna daripada dokumen atau kejadiann-kejadian itu.

Yang disebut "Role" adalah suatu kejadian tertentu yang terjadi satu kali, tetapi dampak kejadian itu sampai waktu yang panjang, dan pengaruh kejadian itu masih tetap menonjol dalam waktu kemudian.

Selektif Coding dan Coaxial Coding di dalam operasionalnya seperti di bawah ini :

	Dokumen - dokumen dan kejadian - kejadian	Kode	Makna, meaning
1	"The Atlantic Charter 14 Agustus 1941 (Telders, page 11).	AC	Bahwa Semua bangsa-bangsa di Dunia berhak memilih bentuk negara, bentuk pemerintahan yang mereka kehendaki.
2	Sikap Belanda menghadapi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia selalu berpegang <u>Status-quo anbebellum</u>	Sa	Belanda tidak mau mengakui keberadaan Negara Proklamasi, selalu bersikap dan melihat keadaan Indonesia seperti pada waktu Jepang belum menyerang Indonesia pada tahun 1942. Ini berarti Belanda ingin melanjutkan penjajahan atas Indonesia.
3	Maklumat Pemerintah R.I. tanggal 13-11-1945. <u>Tentang</u> : Peristiwa Surabaya tanggal 10-11-1945. <u>Diambil dari</u> : = Berita R.I. tahun I nomor 2 halaman 9 kolom 3 dan 4. = Koesnodiprodjo, halaman 77.	Fs	Proklamasi 17 Agustus 1945 ternyata didukung oleh seluruh rakyat secara spontan. Seperti halnya peristiwa Surabaya yang sangat menonjol itu. Dengan kematian Jendral Mallaby, Inggris memberi ultimatum Arek-arek Surabaya supaya menyerah. Ultimatum itu tidak digubris sampai tanggal 10-11-1945 rakyat tetap melawan. Dampak kepahlawanan Arek-arek Surabaya ini, mencuat ke Dunia Internasional utamanya DK PBB di London. Wakil Ukraina Dmitri Manuilsky tidak bisa menerima digunakannya Tentara Inggris (Sekutu) untuk memerangi bangsa Indonesia. Juga Mesir juga menyatakan di DK PBB London itu, bahwa Tentara Inggris tidak boleh untuk memerangi bangsa Indonesia.

			Ternyata mulai 11 Febuari 1946 revolusi dan negara baru Republik Indonesia sudah " <u>dikenal</u> " oleh bangsa-bangsa di Dunia, sebagai akibat mencuatnya kepahlawanan Surabaya di DK PBB London waktu itu.
4	Soekarno-Hatta di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda bersedia berunding dengan Belanda, sesuai kehendak Afnei, Inggris dan Amerika Serikat dan sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Dan memang strategi penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda melalui jalan diplomasi di bawah pengawasan DK PBB.	Dp	Soekarno-Hatta mengadakan perundingan dengan Belanda, dibawah pengawasan Inggris dan Amerika Serikat sudah terkandung arti, keberadaan Negara R. I. telah diakui oleh Inggris, Amerika Serikat dan Belanda. Maka dari itu Soekarno-Hatta selalu berupaya dapat berunding dengan Belanda, di bawah pengawasan DK PBB. Soekarno - Hatta mengandalkan kekuatan " <u>Diplomasi</u> " yang didukung oleh kekuatan tunggal (pemerintah, militer dan rakyat) di dalam mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia waktu itu. Yakni supaya Belanda mengakui kedaulatan Negara R.I.
5	Soekarno-Hatta di dalam melaksanakan diplomasi waktu itu memanfaatkan negara-negara Rimland utamanya Amerika Serikat dan Inggris. Karena kedua negara itu sangat berpengaruh di DK PBB waktu itu.	DK	Dengan memanfaatkan peluang yang ada pada negara-negara Rimland utamanya Amerika Serikat dan Inggris, Soekarno-Hatta mempunyai tujuan yang lebih tinggi yakni agar Amerika Serikat dan Inggris mengarahkan " <u>DK PBB</u> " supaya menaruh perhatian terhadap penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda. Inggris dan Amerika Serikat juga memerlukan peran negara Indonesia guna memperkuat Rimland. Dengan demikian maksud Indonesia untuk berdiplomasi di bawah pengawasan DK PBB bisa tercapai.

6	<p>Menghadapi sikap Belanda selalu menolak untuk berunding dengan Indonesia, maka Soekarno-Hatta dalam rangka mempertahankan eksistensi R.I. waktu itu selalu berupaya mendekati Inggris dan Amerika Serikat.</p>	Mia	<p>Di dalam suasana perang dingin waktu itu, Amerika Serikat dan Inggris pimpinan negara Rimland selalu memperhatikan Indonesia jangan sampai ditarik ke negara Haertland (komunis). Pimpinan negara-negara Rimland memerlukan Indonesia untuk memperkuat negara-negara Rimland. Maka itu waktu Belanda selalu menolak untuk berunding dengan Indonesia, baik Inggris maupun Amerika Serikat selalu "<u>mendesak</u>" Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Dan akhirnya Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia.</p>
7	<p><u>Maklumat Wakil Presiden R.I. No. X tanggal 16 - 10 - 1945.</u></p> <p><u>Diambil dari :</u> = Berita R.I. tahun I nomor 2 halaman 10 kolom 3 = Koesnodiprodjo, halaman 58.</p>	Mx	<p>Pasal IV Aturan Peralihan UUD 45 waktu itu dimanfaatkan oleh Belanda, karena ada pemusatan kekuasaan negara di tangan Presiden, maka Belanda menuduh R.I. negara fasis, tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta. Ini merupakan hambatan perundingan.</p> <p>Soekarno-Hatta bermaksud merubah bentuk pemerintahan Demokrasi Presidensial menjadi Demokrasi Parlementair, Multi Partai System. Maka dari itu dalam sidang KNIP tanggal 16-10-1945 Wakil Presiden menerima baik usul petisi dari KNIP dan ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 yang isinya merubah isi pasal IV Aturan Peralihan UUD 45 dan membentuk pemerintah demokrasi parlementair.</p>
8	<p>Tujuan pokok Diplomasasi yang dilakukan oleh Soekarno - Hatta adalah agar Negara R.I. mendapat "<u>pengakuan</u>" dari Belanda.</p>	P	<p>Soekarno-Hatta melakukan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB, mempunyai tujuan sangat penting, ialah agar Belanda mengakui Kedaulatan Negara Indonesia. Upaya mempertahankan eksistensi Negara Proklamasi belum berhasil tuntas sebelum Belanda mengakui kedaulatan Negara Indonesia, sebab sewaktu Negara R.I. diproklamkan tanggal 17-8-1945, wilayah Indonesia, menurut Ketata-negaraan Belanda masih terikat dengan artikel 1 Grondwet. Dengan "<u>pengakuan</u>" demikian terkandung arti, bahwa Belanda telah mengubah artikel 1 Grondwet, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Suriname end Caraçao, Indonesia telah lepas dari ikatan artikel 1 Grondwet.</p>

R O L E

No.	R o l e	Kode
1	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945. Koesnodiprodjo, halaman 1.	Pk
2	Pemerintah R.I., militer dan Rakyat Indonesia begitu Negara R.I. diproklamirkan secara bersama-sama siap " <u>mempertahankan</u> " Negara Proklamasi.	PMR
3	Peristiwa Surabaya 10 - 11 - 1945, suatu bukti Negara Proklamasi didukung oleh seluruh Rakyat.	Nv10
4	Soekarno-Hatta dalam penyelesaian persengketaan Indonesia - Belanda, melihat " <u>konteks domestik</u> " ada tendensi melemah, disisi lain melihat peluang-peluang di dunia Internasional, utamanya DK PBB, kemudian mengambil strategi melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan DK PBB.	KD
5	Soekarno-Hatta di dalam diplomasi, berupaya memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada negara-negara Besar, Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara yang sangat berpengaruh dalam DK PBB, sebagai pimpinan negara <u>Rimland</u> .	RL

6	Mula-mula Belanda " <u>tidak mau berunding</u> " dengan R.I., Soekarno-Hatta, karena menurutnya Negara R.I. adalah fasis, terdapat sentralisasi kekuasaan negara di tangan Presiden (pasal IV Aturan Peralihan UUD 45).	tdb
7	Perundingan Linggarjati menghasilkan Persetujuan Linggarjati 25 maret 1947.	PLJ
8	<u>Diplomasi</u> yang dilakukan oleh Soekarno waktu itu ditunjang oleh <u>kekuatan militer</u> dan <u>didukung</u> oleh seluruh Rakyat Indonesia.	Dmr

Setelah disajikan makna, meaning dari dokumen-dokumen dan kejadian-kejadian tersebut di atas, peneliti membuat matrik dari sejumlah variabel tersebut di atas seperti di bawah ini :

Meaning

	AC	Sa	Ps	Dp	Dk	Mia	Mx	P
R	a							
O		b						
L			c					
E				d				
					e			
						f		
							g	
								h

Dengan Matrik di atas, kemudian diadakan axial coding atau coaxial coding, yakni dengan membaca dan melihat matrik di atas itu, maka terlihatlah adanya hubungan dua variabel. Di dalam matrik itu didapati crossing antara dua variabel, variabel meaning dan variabel role, dan masing-masing crossing dapat dihasilkan proporsi-proporsi seperti dibawah ini :

Proposisi-proposisi hasil dari Matrik

- a. Dengan menggunakan peluang prinsip III Atlantik Charter, memungkinkan bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dengan lancar dan selamat.
-
- b. Disebabkan karena Belanda tetap berpegang pada prinsip Status-quo Antebellum, sedangkan Bangsa Indonesia bersikap tetap mempertahankan keberadaan Negara R.I., persengketaan Indonesia - Belanda tidak bisa dielakkan.
-
- c. Berkat kepahlawanan Arek-arek Surabaya bulan November 1945, maka perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dikenal di dunia Internasional utamanya di DK PBB di London waktu itu.
-
- d. Karena konteks domestik politik, ekonomi, militer, ada tendensi melemah maka para pemimpin Indonesia menempuh jalan diplomasi, dengan memanfaatkan peluang-peluang di dunia Internasional utamanya DK PBB.
-

e. Karena para pemimpin Indonesia memanfaatkan peluang-peluang pada Negara-negara Rimland maka persoalan Indonesia - Belanda kemudian menjadi kewenangan Dewan Keamanan PBB penanganannya. DK PBB menjadi wasit antara Indonesia - Belanda.

f. Belanda mula-mula tidak mau berunding dengan Indonesia, karena para pemimpin Indonesia selalu mengadakan pendekatan dengan Amerika Serikat dan Inggris, maka atas desakan Inggris dan Amerika Serikat akhirnya Belanda bersedia berunding dengan Indonesia.

g. Berpangkal dari Maklumat Wakil Presiden R.I. No. X tgl. 16-10-1945 dimungkinkan perundingan antara Indonesia - Belanda yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947.

h. Karena para pemimpin Indonesia mengadakan diplomasi di dunia internasional dengan ditunjang oleh Kekuatan Militer dan didukung oleh Seluruh Rakyat, maka akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Negara Indonesia.

LAMPIRAN II

**HASIL PENELITIAN DENGAN
WAWANCARA KHUSUS**

LAMPIRAN II

**HASIL PENELITIAN DENGAN
WAWANCARA KHUSUS**

(Wawancara Khusus dengan :

- DR. H. Roeslan Abdoelgani tanggal 15-1-1996,
- Soebadio Sastrosatomo tanggal 9-3-1996,
- Manai Sophiaan tanggal 12-3-1996,
- DR. (Jendral Purn.) A.H. Nasution tanggal 9-3-1996,
- Ibu Soepeni tanggal 13-3-1996,
- Prof. DR. I Nyoman Dekker tanggal 4-4-1996)



OLEH :

SOEPARDI SARIOHARTONO, DRS

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

Hasil Penelitian Dengan Wawancara Khusus



Oleh :
Soepardi Sariohartono
Pasca Sarjana Unair 1995

**Program Studi Ilmu Sosial S3
Jurusan Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Nim : 09931166 D**

DAFTAR ISI

	Halaman
I Wawancara dengan :	
Bp. DR. H. Roeslan Abdoelgani Tgl. 15-1-1996 di Hotel ELMI Surabaya	56
II Wawancara dengan :	
Bp. Soebadio Sastrosatomo pada Tgl. 9-3-1996 di Jl. Guntur No. 49 Jakarta	101
III Wawancara dengan :	
Bp. Manai Sophiaan pada Tgl. 12-3-1996 di Jl. Wijaya Kusuma IV/No. 35 A Jakarta	135
IV Wawancara dengan :	
Bp. DR. (Jendral Purn.) A.H. Nasution pada Tgl. 9-3-1996 di Jakarta (Peneliti dihimbau mengambil data dari tulisan beliau)	158
V Wawancara dengan :	
Ibu Soepeni pada Tgl. 13-3-1996 di Jakarta .	188
VI Wawancara dengan :	
Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker pada Tgl. 4-4-1996 di Jl. Serakarta No. 1 Malang	197
VII Catatan-catatan Peneliti sewaktu menjadi Ma- hasiswa Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada (tahun 1952-1958)	215

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak DR. H. Roeslan Abdoelgani

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak DR. H. Roeslan Abdoelgani
Usia 85 Tahun.

Pelaku Sejarah pada tahun 1945 - 1947 dan sesudahnya.
Mantan Menteri Luar Negeri, pembantu Dekat Soekarno-Hatta
waktu itu.

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin 15 Januari 1996 di
Hotel Elmi Surabaya. Jam 18.45 - 19.45.

Bapak DR. H. Roeslan Abdoelgani sekarang ini adalah
Penasehat BP7 Pusat di Jakarta.

WAWANCARA KHUSUS

Yang diwawancarai :

N a m a : DR. Roeslan Abdoelgani
Jabatan dahulu : Menteri Penerangan
A l a m a t : BP7 Pusat Jl. Proklamasi no. 56 Jakarta
telp : K/31503317

Mahasiswa :

N a m a : Soepardi Sriohartono
Bidang Studi : Ilmu Sosial (S3), Pasca Sarjana UNAIR
Surabaya
Jurusan : Ilmu Politik Hubungan Internasional
No. Mhs. : 0999311466D
Hari/tanggal : Wawancara : Senin, Tgl 15-1-1996
Jam 18.45 - 19.45
Tempat : Wawancara : Hotel Elmi Surabaya

Hasil Wawancara :

Direkam.

Surabaya, 15 Januari 1996
Yang diwawancarai

ttd

(DR. H. Roeslan Abdoelgani)

WAWANCARA KHUSUS

Yang diwawancarai :

N a m a : DR. Roeslan Abdulgani
J a b a t a n : dahulu: Menteri Penerangan.
A l a m a t : BP7 Pusat Jl. Proklamasi no 56 Jakarta
telp: K/31503317

Mahasiswa :

N a m a : Soepardi Sariohartono
Bidang Studi : Ilmu Sosial (S3), Pasca Sarjana UNAIR Surabaya
Jurusan : Ilmu Politik Hubungan Internasional
No. Mhs. : 099311466D
Hari/tanggal : Wawancara : Senin, 15-1-1996 jam 18.45-19.45.
Tempat : Wawancara : Hotel Elmi Surabaya

Hasil Wawancara :

Ditukam.

Surabaya 15 Jan. 1996

Yang diwawancarai

Htd

(DR. H. Roeslan Abdulgani)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. DIHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 ☎ (031) 510076, 5350170 FAX. (031) 510076

Nomor : 2672 /PT.03.H4.PPg/N/1995
Lamp :
Hal : Izin untuk melaksanakan penelitian

17 Oktober 1995

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Jawa Timur
U.p. Direktorat Sosial Politik
Jl. Pemuda No. 5
Surabaya.

Buna penulisan penelitian untuk Disertasi peserta program
Doktor angkatan tahun 1993/1994 Program Pascasarjana
Universitas Airlangga,

nama : Soepardi Sarioharto, Drs.
nim : 099311466 / D
judul : MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X
TANGGAL 16 OKTOBER 1945 DAN MAKLUMAT
POLITIK PEMERINTAH R.I. TANGGAL 1
NOVEMBER 1945, SEBAGAI TITIK TOLAK
DIPLOMASI INDONESIA DIDALAM MENGADAKAN
PERJANJIAN LINGGAR JATI.

pembimbing ketua : Prof.Dr.Idris.A.Kesuma

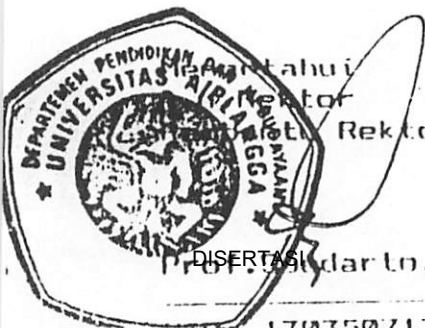
maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan
rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk :

I. Mengadakan wawan cara khusus dengan para tokoh yang
sekarang masih ada antara lain :

1. Dr.H.Roeslan Abdoelgani di Jakarta.
2. Mr.Soenarjo, mantan Menteri Perdagangan di Jakarta.
3. H.A.H.Nasution Mantan Kepala Staf A.D. di Jakarta.
4. B.M.Diah Mantan Menteri Penerangan di Jakarta.
5. Manai Sophiaan, Pejoang di Jakarta dan yang lainnya.

II. Menemui Pimpinan Perpustakaan Negara dan Perpustakaan yang
lain di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Kota-kota lainnya.

Demikian dan atas bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



DISERTASIKAN OLEH: Soepardi Sarioharto, dr, KAWAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. D SOEPARDI SARIOHARTO DR.

IP. DEPUSTAKA UNIVERSITAS JAWA TIMUR
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PEMUDA NO. 8 TELP. 43020 - 45673
SURABAYA

Surabaya 14 NOPEMBER 1995

Nomor : 072/5973/303/1995

Sampiran :

Perihal : Penelitian / Survey /
Research.

Kepada :

- Yth. 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DI J A K A R T A
2. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
DI Y O G Y A K A R T A
3. GUBERNUR KDH TK I JAWA BARAT
DI B A H D U N G

U. P. KADIT SOSPOL.

Menunjuk Surat DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR.

tanggal : 17 OKTOBER 1995
nomor : 2672/PT.03.H4.PP/H/1995.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SOEPARDI SARIOHARTONO, Drs.
Alamat : d/a JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA.
Pekerjaan : PROGRAM PASCASARJANA UNAIR
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945
DAN MAKLUMAT POLITIK TANGGAL 1 NOPEMBER 1945 SEBAGAI TITIK
TOLAK DIPLOMASI INDONESIA DI DALAM MENGADAKAN PERJANJIAN -
LINGGARJATI ".

Waktu : 3 (TIGA) BULAN.

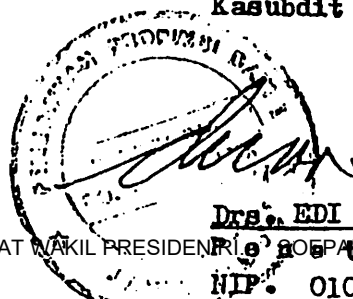
Lokasi : D K I , D I Y , JAWA BARAT.

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
didaerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik
u.b
Kasubdit Tibum



Dr. EDI PURWINARTO

SOEPARDI SARIOHARTONO

NIP. 010077471

REMBUSAN :

1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
3. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Jatim

4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Sdr. DIRJEN SOSPOL, DEP DAGRI JAKARTA.

KAITAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN

DATA HASIL PENELITIAN DENGAN
WAWANCARA KHUSUS

I. Dengan Bapak Dr. H. Roeslan Abdulgani

A. Proses upaya pendekatan

1. Izin penelitian

- a. Surat pengantar dari Bapak Direktur Pasca Sarjana Unair, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim Tanggal 17 Oktober 1995 no. 2672/P.T.03.H4.PPs/N/1995.
- b. Surat dari Gubernur K D H Tingkat I Jawa Timur dalam hal ini, Kepala Direktorat Sosial Politik, ditujukan kepada, Gubernur K D H khusus Ibukota Jakarta Raya, tanggal 14 Nopember 1995 no. 072/5973/303/1995.
- c. Pada tanggal 1 Desember 1995 peneliti mengajukan permohonan wawancara kepada Bapak Dr. H. Roeslan Abdulgani ke Jakarta, disertai satu berkas pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini.
- d. Pada pertengahan bulan Desember 1995, mendapat jawaban secara lisan, melalui Ibu Rohana S.H. Asisten Pribadi Bapak Roeslan Abdulgani; bahwa peneliti akan dipanggil kemudian, supaya menunggu saja.

- e. Pada tanggal 15 Januari 1996, pada waktu Bapak Dr. H. Roeslan Abdulgani kebetulan di Surabaya, peneliti dipanggil lewat Ibu Mangapul Silalai, yang kemudian telepon, bahwa peneliti ditunggu jam 18.30 di Hotel Elmi Surabaya.
- f. Peneliti datang tepat waktu, wawancara dimulai jam 18.45 berakhir jam 19.45 bertempat di Hotel Elmi Surabaya.

B. Pertanyaan yang diajukan :

1. Mohon Petunjuk :

Bagaimana pendapat Bapak tentang Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, mengenai pengaruhnya terhadap upaya mempertahankan eksistensi R I waktu itu ?

2. Mohon Petunjuk :

Bagaimana kaitan antara Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945 terhadap Perjanjian Linggarjati.

3. Mohon Petunjuk :

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pendapat di bawah ini :

"Bahwa eksistensi negara RI dahulu itu dapat ditegakkan berdasar kekuatan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia".

4. Mohon Petunjuk :

Bagaimana pendapat Bapak, mengenai "Penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda pada tahun 1945-1947". Bung Karno dan Bung Hatta, terlihat cenderung melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB.

Apakah upaya demikian merupakan jalan yang paling tepat pada waktu itu ?

5. Mohon Petunjuk :

Apakah Bapak mengetahui, bahwa Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Sjahrir waktu itu, "yakin", bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda yang secepatnya dan efisien "hanya dengan melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB, dan dengan keyakinan itu segala jalan ditempuh guna membuka kemungkinan perundingan itu ?

6. Mohon Petunjuk :

Seberapa besar peran Bung Karno, Bung Hatta waktu itu, yakni sewaktu mempertahankan eksistensi negara RI yang akan dihancurkan secara militer oleh Belanda ?

Barangkali ada contoh-contoh yang penting !

7. Mohon Petunjuk :

Pada waktu itu (1945-1947) sudah mulai terjadi perang dingin, antara Blok Kapitalis pimpinan Amerika Serikat (Rimland) dan Blok Komunis pimpinan Uni Soviet (Heartland).

Para pemimpin Indonesia waktu melakukan diplomasi di dalam rangka mempertahankan eksistensi RI kelihatannya cenderung memanfaatkan pengaruh kekuatan Rimland (Amerika Serikat dan Negara-negara Barat).

Apa keuntungannya bagi perjuangan Indonesia di dunia internasional waktu itu, langkah demikian itu ?

8. Mohon Petunjuk :

Sewaktu rapat KNIP tanggal 28 Pebruari 1947 di Malang, Presiden Soekarno menetapkan Kepres No. 6 tahun 1947 tentang penambahan keanggotaan KNIP waktu itu.

Apakah keuntungannya bagi perjuangan RI waktu itu, pengaruh Kepres No. 6 tahun 1947 itu ?

Mungkin Bapak berkenan menjelaskan bagaimana situasi rapat KNIP di Malang itu ?

9. Mohon Petunjuk :

Kiranya Bapak berkenan memberi gambaran sidang KNIP tanggal 28 Pebruari 1947 di Malang, mengenai hal sebagai berikut :

Seberapa jauh pengaruh kepemimpinan Soekarno Hatta waktu itu di dalam upaya mencapai kesepakatan agar KNIP bisa menerima persetujuan Linggarjati, karena semula KNIP menolaknya.

10. Mohon Petunjuk :

Apakah Bapak mengetahui waktu itu "bahwa Soekarno Hatta "yakin" bahwa gagalnya penandatanganan Linggarjati berarti gagal pula upaya Pemerintah Indonesia berdiplomasi di dunia internasional", dan gagalnya penandatanganan Linggarjati berarti gagal pula, upaya pemerintah mempertahankan eksistensi negara RI dengan waktu yang singkat dan efisien.

11. Mohon Petunjuk :

Faktor apa yang menyebabkan Pemerintah Belanda terpaksa menuruti desakan SEAC, AFNEI (Inggris) dan Amerika Serikat, untuk berunding dengan negara RI padahal mula-mula Belanda tidak mau berunding dengan Indonesia.

12. Mohon Petunjuk :

Pada tanggal 16-10-1945 Pemerintah RI menetapkan "Maklumat Wakil Presiden RI No. X", yang Maklumat No. X ini hakekatnya merubah UUD 1945 secara operasionalnya. Dan eksekusi Maklumat ini di dalam negeri sangat jelek, yakni mengakibatkan Pemerintah RI tidak stabil.

Apakah ditetapkannya Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 ini dimaksudkan agar terbuka kemungkinan negara RI bisa mengadakan perundingan dengan Belanda ?

13. Mohon Petunjuk :

Sewaktu ditetapkan Maklumat No. X, Bung Karno tidak di Jakarta. Tetapi setelah beliau kembali ke Jakarta, ke-lihatannya Bung Karno langsung menyetujui tindakan ke-negaraan yang sangat penting itu, yakni Wakil beliau (Bung Hatta) menetapkan Maklumat No. X.

Apakah Bapak mengetahui dan membenarkan, suatu pendapat sebagai berikut :

Secara formal Hatta memang Wakil Presiden. Tetapi secara sosiologis Soekarno Hatta adalah pemimpin bangsa Indonesia, ditinjau dari sini kedudukan Soekarno Hatta sederajat. Dan pernah ada konsensus antara Dwitunggal Soekarno-Hatta, manakala Soekarno pada suatu saat mengambil tindakan kenegaraan yang penting Bung Hatta akan menyetujui tindakan itu. Dan sebaliknya, manakala Bung Hatta pada suatu saat (Bung Karno tidak berada di Ibukota) melakukan tindakan kenegaraan yang penting Bung Karno akan menyetujuinya.

Mohon pendapat dari Bapak.

14. Mohon Petunjuk :

AFNEI (Inggris) dan Amerika Serikat waktu itu selalu mendesak Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia.

Faktor apa yang mendorong Pimpinan Rimland ini menghendaki agar Belanda mau berunding dengan Indonesia waktu itu.

15. Mohon Petunjuk :

Mengapa waktu pemerintah RI berusaha berunding, kelompok Tan Malaka dan PKI selalu menentangnya, dan menghendaki terus perang melawan Belanda.

Apakah tindakan ini ada kaitannya dengan kepentingan Heartland.

C. Hasil wawancara diambil dari rekaman

Dr. Roeslan : Sdr. Soepardi ya ?

Peneliti : Ya Pak ! inggih pak !

Dr. Roeslan : Pertanyaan-pertanyaan sdr. yang saya baca, yang perlu sdr. perhatikan adalah situasi pada waktu itu misalnya pertanyaan ini :

Bagaimana pendapat Bapak tentang Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 kaitannya dengan upaya mempertahankan eksistensi negara RI waktu itu ?

Ini harus sdr. lihat, waktu itu ada Maklumat Pemerintah tanggal 3-11-1945, ada Maklumat

Wakil Presiden. Anehnya, ada Maklumat Pemerintah ada Maklumat Wakil Presiden.

La ini, ada Maklumat Pemerintah tanggal 1-11-1945 yakni Maklumat Politik, dsb, dsb.

Tapi kalau Maklumat Wakil Presiden ini sebelumnya ada usul dari KNIP yang dipelopori Sjahrir, mengusulkan agar KNIP sekarang ini katanya, sebelum terbentuknya MPR. DPR. DPA. agar KNIP diberi kekuasaan legislatif.

Ini usul dari KNIP waktu itu, kita mesti melihat pertimbangan Politik, mengapa demikian. Jadi ada dua hal sebenarnya, sebelum MPR, DPR dibentuk supaya KNIP disertai kekuasaan legislatif, juga turut serta melaksanakan GBHN. Dan juga menyetujui pekerjaan KNIP sehari-hari diserahkan kepada Badan Pekerja KNIP atau BPKNIP.

Ini sekitar 14 Oktober 1945 situasi tidak menentu. Ada Kabinet Presiden. Tetapi waktu tentara Inggris datang di Indonesia. Tentara Inggris melihat sistem Kabinet Presidensiil sebagai buatan Jepang. Itulah sebabnya KNIP ingin, menghapuskan Kabinet Presidensiil itu. Kabinet Presiden dirubah menjadi Kabinet parle-

mentair. Ini terjadi sekitar September, Oktober 1945. Nah, pada sidang lengkap KNIP I tanggal 16 Oktober 1945 diputuskan, KNIP mendapatkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bung Hatta waktu itu menjawab : ya saya setuju akan hal ini. Tapi KNIP sehari-hari harus ada yang bertugas, maka dibentuklah BPKNIP.

Jadi sebenarnya UUD 45 itu dirubah dari Demokrasi Presidensiil, menjadi Kabinet Parlementair. Terus tanggal 3 Nopember 1945, ini kelanjutannya, Pemerintah menyatakan bahwa rakyat mempunyai kebebasan untuk membentuk partai politik. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai, dengan begitu rakyat bisa dipimpin ke jalan yang teratur sesuai dengan aliran-aliran yang ada di dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum berlangsungnya pemilihan anggota DPR. La ini, dengan Maklumat tanggal 16-10-1945 dan Maklumat tanggal 3-11-1945 ini garis konstitusional berubah sebetulnya, ini UUD dirubah.

Nah, kemudian timbul pertempuran di Surabaya pada tanggal 10-11-1945. Kemudian ditengah-

tengah pertempuran itu, di Jakarta Sjahrir minta menjadi Perdana Menteri. Ini tanggal 14-11-1945 ya.

Sistem Kabinet Presiden diganti Kabinet bertanggung jawab. Nah sejak itu Kabinet Soekarno mundur diganti Kabinet Sjahrir. Nah ini susunan Kabinet Sjahrir yang saya beri tanda merah-merah ini (sambil menunjukkan daftar nama-nama Kabinet Sjahrir). Yang saya tunjukkan ini dokumen yang lama, tidak akan keliru. (Dr. Roeslan)

Susunan Kabinet Presiden tanggal 19 Agustus 1945 itu adalah sebagai berikut :

Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah

Menteri Luar Negeri : Mr.A. Soebardjo

Menteri Kehakiman : Prof.Mr.Dr. Soepomo

dan seterusnya.

Baru tanggal 14-11-1945 diganti Perdana Menteri Sjahrir.

Jadi peristiwa 16-10-1945 itu merupakan langkah pertama untuk menuju ini (Kabinet parlementair). Maka dari itu waktu itu ada tuduhan. Sjahrir mengadakan Coup d'Etat. Kalau sdr. baca bukunya Pak Soebardjo, beliau berkata :

"ini Coup d'Etat. Jadi ini suatu rangkaian antara peristiwa 16 Oktober 1945 dengan 14 Nopember 1945 ini. Waktu itu Surabaya Pertempuran. Kita di Jakarta tidak tahu kalau di Surabaya ada pertempuran. Mendengarnya karena yang menjadi Menteri Kemakmuran (Kabinet Sjahrir) adalah Ir. Darmawan Mangunkoesoemo. Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan itu di sini, di Surabaya. Ini tengah-tengah pertempuran Ir. Darmawan menjadi menteri mesti ke Jakarta. Nah Sjahrir minta tolong tentara Inggris supaya Ir. Darmawan dibawa ke Jakarta. Dari daerah Niemandland. Baliwerti, Darmawan akan dinaikkan pesawat terbang untuk dibawa ke Jakarta, tapi orang-orang Surabaya tidak mau. Darmawan dibawa naik mobil dibawa ke Jombang, malah ditembaki Inggris waktu itu. Justru orang Surabaya dijadikan menteri kita kaget waktu itu. Disini kelihatan sebenarnya apa yang diperbuat tanggal 16-10-1945 itu atas desakan Inggris, karena menurut Inggris Kabinet Soekarno adalah bikinan Jepang, ngerti ? (peneliti : ya pak).

Jadi untuk menghilangkan kesan bahwa Kabinet Soekarno adalah buatan Jepang. Hatta yang waktu itu sendirian (Bung Karno di luar kota), membuat Maklumat Wakil Presiden itu. Jadi kalau saudara tanya hubungan Presiden dan Wakil Presiden waktu itu, adalah "dwi tunggal".

Peneliti : Apakah ada konsensus antara Presiden dan Wakil Presiden, kalau Bung Karno mengambil tindakan Hatta setuju dan sebaliknya, Pak ?

Dr. Roeslan : Memang demikian, ada konsensus itu. Jadi memang ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden itu untuk menjaga, menghilangkan tuduhan. bahwa Pemerintah RI itu buatan Jepang. Seandainya yang datang kemari tentara Amerika, tentunya lain. Amerika mengerti adanya Kabinet Presiden itu seperti di Amerika.

Tapi yang kemari adalah Inggris. Waktu itu Partai Sosialis, baru menang. Pemerintahan Inggris Parlementair, Partai Sosialis (maksudnya partai buruh), baru menang. Churchill kalah. Kanservatif kalah. Dus Sosialis Inggris bisa ketemu dengan sosialis Indonesia

(Sjahrir). Inggris percaya pada Sjahrir, karena Sjahrir tidak pernah kerjasama dengan Jepang.

Bung Karno dan Bung Hatta mengerti akan hal ini, untuk dapat mengadakan diplomasi dengan dunia internasional, beliau berdua berkata : Biarlah Sjahrir yang maju. Maka dari itu dibiarkan, Sjahrir dan Amir Sjarifudin membentuk Kabinet ke II.

Kabinet ke II sebagai berikut :

- Menteri Luar Negeri : Sutan Sjahrir
- Menteri Dalam Negeri : Sutan Sjahrir
- Perdana Menteri : Sutan Sjahrir
- Menteri Penerangan : Amir Sjarifudin
(yang baru keluar dari penjara, yang pakai celana pendek).
- Menteri Perburuhan : Abdul Karim, (ini bapaknya Dr. Firman, yang mengobati mata saya baru-baru ini (Pak Roeslan).
- Menteri Kesehatan : Darmo Setiawan (dulu officier van gezondheid jaman Belanda, satu-satunya orang Indonesia, yang menjadi opsir kesehatan).
- Menteri Sosial : Aji Darmo (orang partai sosialis).

- Menteri Kehakiman : Mr. Soewandi (saudaranya pak Suwirjo).
- Menteri Pengajaran : Dr.T.G. Gunung Moe-
lia (yang sekarang ada toko buku Gunung
Mulia itu).
- Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Putuhena (Pega-
wai Belanda).
- Menteri Kemakmuran : Ir. Darmawan Mangun-
kusuma (ini orang pembela orang-orang Indo-
nesia, dia turut gerakan di bawah tanah).
Sjahrir mengetahui hal ini, lalu dibawa ke
Jakarta itu.
- Menteri Negara : Rosidi (ini semua
bukan orang pergerakan) tidak ada dalam
Kabinet Sjahrir ini orang perjuangan.

Peneliti : Tapi ini nanti arahnya kan ke diplomasi ya pak. Penelitian saya ini yang penting diplo-
masinya, Pak!

Dr. Roeslan : Sdr. Soepardi harus melihat ya, bahwa Sjahrir ini berpikir : kalau saya bisa mendekati Inggris nanti saya bisa menghadapi Belanda. Waktu itu Belanda belum masuk Indonesia, masih kacau, masih di luar Indonesia. Nopember, Desember 1945, Belanda belum datang, yang

datang kecil-kecil, seperti Van Mook, Van Der Plas dan lain-lain yang kecil-kecil itu.

Inggris itu tidak mengira kalau orang Indonesia berani perang yang begitu hebat. Pertempuran Surabaya membuka pikiran orang Inggris, Tentara Inggris membuat laporan ke Pemerintah Inggris menyatakan sebagai berikut: "The Republic has been proclaimed, but we never thought that the Indonesian people would like to fight to be dead" Dia tahu ada proklamasi tapi tidak mengira bahwa orang-orang Republik berniat bertempur sampai berani mati. Itulah kemudian bulan Desember Inggris mundur bilang pada Belanda, kamu harus membuka perundingan dengan Republik. Jadi sangat besar pengaruh pertempuran Surabaya itu, sehingga merubah pikiran orang-orang Inggris.

Bulan Oktober 1945 itu, kita ini dianggap orang-orang Jepang semua, kecuali orang PSI.

Bung Karno, Bung Hatta pinter, diajak orang-orang PSI itu dalam pemerintahan sampai Desember itu.

Pebruari 1946 Bung Karno, Bung Hatta hijrah ke Yogya. Sjahrir di Jakarta. Sjahrir

berunding dengan Inggris, orang-orang Inggris bilang kamu harus berunding dengan orang-orang Belanda. Mula-mula Sjahrir berunding dengan Van Mook dan lain-lain. Tapi sebenarnya Sjahrir tidak bisa membuat keputusan, karena bosnya berada di Yogya, yakni Bung Karno. Rakyat bergolak semua di belakang Bung Karno Bung Hatta bukan di belakang Sjahrir. Maka dari itu sesekali ia harus ke Yogya. Inggris lama-lama mengerti, dia bilang pada Sjahrir. "kamu mesti bicara dengan Soekarno Hatta" bosmu itu !

Sekarang saya lanjutkan ya, pertanyaan ini. apa kaitannya Maklumat No. X terhadap perjanjian Linggarjati ?

Itu lebih jauh lagi. Belanda mula-mula tidak mau bicara dengan Soekarno Hatta. Baru mau bicara setelah bentuk Pemerintahan dirubah menjadi Demokrasi Parlemtair. Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno, tapi dengan Sjahrir bisa.

Maklumat itu bukan nomor sepuluh tapi nomor X. Sejarahnya begini ya : yang mimpin sidang KNIP itu Bung Hatta, (Bung Karno di

luar kota). Setelah Maklumat X disetujui, perlu nomor. Hatta bertanya kepada itu lo Gafur Pringgodigdo. Dia tidak bawa bukunya, kemudian Bung Hatta bilang, ya sudah diberi No. X saja, nanti kalau sudah ketemu nomornya diganti. Tapi selanjutnya nomor tidak diganti, tetap no. X saja.

Terus, ya, pertanyaan di bawah ini :

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak terhadap ungkapan di bawah ini :

Bahwa eksistensi negara RI dahulu itu dapat ditegakkan berdasar kekuatan diplomasi yang ditunjang kekuatan militer dan didukung seluruh rakyat ?

Dr. Roeslan : Ya, memang benar demikian.

Waktu itu diplomasi masih lemah, yang kuat adalah pergolakan rakyat. Maka itu Sjahrir diculik ta, karena rakyat mengira bahwa Sjahrir itu bisa mengambil keputusan-keputusan. Tetapi seandainya tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta, tidak bisa berbuat apa-apa. Sjahrir itu. Inggris dan Belanda juga mengira Sjahrir itu bisa memberi keputusan-keputusan sebab di mata Belanda dan Inggris, Sjahrir adalah non

kolaborator, sedang Soekarno Hatta kerjasama dengan Jepang. Akan tetapi realitanya Soekarno didukung oleh seluruh rakyat. Maka itu Sjahrir tidak bisa membuat keputusan apa-apa.

Sekarang pertanyaan no. 5 ya.

Apakah Bapak mengetahui bahwa, Bung Karno dan Bung Hatta itu "yakin" bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda dapat diselesaikan dalam tempo yang relatif singkat dan efisien, hanya "dengan melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan PBB dan dengan keyakinan itu, segala jalan ditempuh guna membuka kemungkinan perundingan itu".

(Dr. Roeslan) Memang betul. Hal ini harus sdr. hubungkan dengan Maklumat 1 Nopember 1945.

Maklumat itu Bung Karno yang membuatnya. Tapi disuruh laksanakan Bung Hatta. Di dalam Maklumat tanggal 1-11-1945 itu digambarkan bahwa kita itu akan masuk PBB. Dan segala perundingan nanti dijalankan dengan PBB. Ini. 1 Nopember 1945 lo, sebelum Kabinet Sjahrir. Sebelum Kabinet Sjahrir sudah dibuat jalan oleh Bung Karno Bung hatta bagaimana agar RI dapat berunding dengan Belanda di bawah pengawasan PBB.

Peneliti : Jadi Bung Karno Bung Hatta "yakin" bahwa penyelesaian dengan berunding itu yang paling baik dalam upaya menyelamatkan negara RI begitu ya Pak ?

Dr. Roeslan : Ya benar.

Bung Karno Bung Hatta itu selalu memperhatikan perjuangan tentara dan rakyat itu, Sjahrir kurang memperhatikannya. Maka diculik itu kan karena itu.

Peneliti : Sewaktu ditetapkan Maklumat No. X, Bung Karno tidak ada di Jakarta, tetapi setelah kembali ke Jakarta "kelihatannya" Bung Karno terus setuju saja ya Pak ?

Dr. Roeslan : Bukan kelihatannya, memang Bung Karno setuju Maklumat X itu, karena keyakinan itu tadi. Waktu itu sdr. perhatikan hubungan Presiden dengan Wakil Presiden, itu tidak seperti sekarang. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden waktu itu sama-sama terikat di dalam perjuangan. Lihat sekarang Soeharto dengan Tri, lain ! Itu dulu kan bekas ajudannya. Mengerti ya ? (Peneliti. ya Pak).

Situasi waktu dulu itu kita tidak bisa melepaskan dua tokoh tua Soekarno-Hatta.

Sewaktu menetapkan Maklumat No. X memang Bung Karno berada di luar kota tetapi Bung Karno menyetujui tindakan Hatta itu, Bung Hatta sebelum mengambil tindakan itu sudah ada kontak dengan Bung Karno.

Sudah, Bung Hatta yang maju, kata Bung Karno waktu itu.

Peneliti : Sekarang no 8 Pak, itu penting mengenai rapat KNIP di Malang.

Dr. Roeslan : Kembali lagi ya ? (Peneliti : ya Pak).

O, ya betul ada Penpres no. 6/1946. Kalau tidak ada Penpres itu, Linggarjati tidak bisa diterima waktu itu.

Waktu itu Masyumi dan PNI yang paling tidak menyetujui Linggarjati.

Tapi Sjahrir waktu itu mengambil orang-orang Masyumi yang pro Sjahrir, juga orang-orang PNI yang pro Sjahrir.

Dus. Sjahrir itu memecah gitu lo.

Siapa dari Masyumi yang senang dengan Sjahrir, yaitu Pak Natsir. Sebenarnya Pimpinan Masyumi keberatan. Natsir tidak disenangi pimpinan Masyumi waktu itu.

Siapa yang disenangi Sjahrir dari orang-orang PNI ? yaitu Lukman Hakim.

Orang-orang itu ya, walaupun Natsir setuju Linggarjati, Loekman Hakim setuju Linggarjati tetapi pimpinan Masyumi dan PNI tidak setuju Linggarjati. Orang-orang Belanda bertanya, bagaimana ini ? Kan orang-orang itu wakil-wakil Masyumi dan PNI ?

Belanda sebenarnya di dalam hatinya tidak setuju dengan Linggarjati itu.

Di satu pihak Sjahrir menghendaki diterimanya Linggarjati, yang di lain pihak, sebenarnya Linggarjati merugikan Belanda. Jadi Belanda melihat perpecahan itu senang, memang Belanda menginginkan supaya Linggarjati itu gagal.

Soekarno, Hatta mengerti akan hal ini, nah Sjahrir saja biar terus maju, kata Bung Karno, sebab kalau sampai Linggarjati gagal, apa yang terjadi, mesti kembali pertempuran lagi. Pertempuran akan terjadi dimana-mana. Nah kalau ada Linggarjati, bisa ada adem pause begitu lo : Bisa bernapas sedikit begitu lo, mengerti ? (Peneliti : ya Pak).

Waktu pemerintah RI mulai mengadakan penerangan di daerah-daerah mengenai Linggarjati itu, pada waktu itu Penerangan dipimpin oleh Soebandrio, dia mengatakan kepada rakyat. "Kalau Linggarjati diterima, kita nanti bisa mengganti kita punya takeyari (bambu runcing) itu dengan senjata. Kita nanti mendapat senjata dari Belanda (Soebandrio)".

Dr. Roeslan : Ini kita menipu, biar rakyat mau menerima Linggarjati.

Saya sendiri (Dr. Roeslan), juga sering memberi penerangan di daerah-daerah mengenai Linggarjati ini, tapi saya tidak mampu, karena selalu dibantah oleh orang-orang itu. Sudah saya jelaskan, Linggarjati itu, begini, begini dan seterusnya. Tetapi saya selalu dibantah mengenai pasal 8 Linggarjati itu. Berkatalah mereka itu : Begini Pak, lihat itu pasal 8, yang menyatakan, bahwa bakal ada Uni antara Indonesia-Belanda, dimana di atas uni itu berdiri Ratu Belanda.

Saya terangkan begini (Dr. Roeslan) : Saudara-saudara kita nanti, kalau sudah diakui de facto oleh Belanda, itu hebat lo. daerah-

daerah lain akan menyatu dengan kita. Tapi mereka menjawab : lagi. Lihat Pak itu pasal 8. menerangkan bahwa di atas Uni duduklah raja Belanda, coba perhatikan Pak, ini Indonesia. ini Presiden RI, Presiden RI nantinya duduk di bawah Rok-nya Ratu Belanda. Masa Presiden kok duduk di bawah Rok, Pak ! Katik Rok-nya, Ratu Belanda. Jadi Roknya Ratu Juliana nanti nutupi Presiden kita, Bung karno. Tidak mau pak. tidak mau. Waktu Soebandrio ke Malang juga ditentang, tidak setuju Linggarjati. apa gelem Roknya Juliana nutupi Bung Karno. Saya mengalami itu semua, (Dr. Roeslan).

Jadi Linggarjati akan gagal kalau sampai dibawa ke KNIP. Soalnya, sekarang bagaimana supaya Linggarjati bisa diterima KNIP.

Nah, anggota KNIP ditambahi (Dr. Roeslan) melalui Penpres no. 6/1946 itu, gitu lo, yakni peraturan tentang susunan KNIP, tambahan anggota KNIP. Cara penambahan itu diatur Sjahrir begini lo :

Masyumi, tadinya 25 orang ditambah, menjadi 35 orang, sing dilebokno iku masyumi yang pro Natsir, koncone diceluki kabeh (Dr. Roeslan).

Masjumi = 35 ditambah 25

PBI = 6 ditambah 29

Parkindo = 4 tetap 4

PKRI = 2 ditambah 33

PKI = 33 diturunkan menjadi 2 Tapi ditambah dalam golongan-golongan. tambahannya saja 40 orang.

Akhirnya = Masyumi menjadi 40, tapi diantara 40 itu yang lebih banyak adalah orang-orang yang pro Natsir.

PNI = 45 tetap 45, pinter Sjahrir. PNI tidak ditambah.

PSI = naik menjadi 35 orang.

PKI & PBI = dinaikkan menjadi 35 orang.

(Sjahrir kan kerjasama dengan PKI waktu itu).

Parkindo = menjadi 8 orang

Tambahan itu semua dimasukkan dalam Penpres no. 6/1946 itu, lalu dibawa ke Malang.

Di Malang itu pengaturan begini :

Di tengah-tengah persidangan itu duduk anggota-anggota KNIP yang lama. Nah, oleh Bung Karno dan Bung Hatta orang-orang yang telah diangkat dalam Penpres itu disuruh masuk persidangan, di pinggir-pinggir begitu.

Jadi gini lo, di tengah-tengah duduk KNIP lama, di pinggir-pinggir duduk atau berdiri orang-orang yang sudah diangkat berdasar Penpres no. 6/1946 tapi belum disetujui oleh KNIP lama, negerti ya ? (Peneliti : ya Pak mengerti).

Dan tambahan itu tidak disetujui oleh KNIP lama.

Jadi kalau seandainya sistem, Penpres no. 6/1946 itu mesti gagal. Nah, kalau Penpres 6/1946 gagal, Linggarjati gagal. Mengerti ya (Peneliti : ya Pak mengerti). Karena KNIP secara aklamasi menolak Penpres no. 6/1946. Bung Karno marah. Sebab menurut Bung Karno. Bung Hatta Linggarjati ini "harus" diterima. Kalau tidak, kita bertempur lagi. kalau sampai Linggarjati gagal Londo seneng to ? (ya Pak: peneliti).

Tapi kemudian, setelah berunding dengan Bung Hatta, Bung Karno bilang sama Bung Hatta. "Saya mogok dan akan pulang ke Yogya. Kamu yang bicara sekarang. La itu, Bung Hatta lalu berpidato di muka sidang dengan tangan mengepal-gepal, jadi pidato sambil meremas-

remas tangannya karena Geram, begini pidatonya : Itu tanggal berapa, 28 ya. (Dr. Roeslan berhenti sambil melihat-lihat dokumen-dokumen yang di mukanya) Sidang malam kapan ?

(peneliti : Tgl 28 Febuari 1947 Pak)

Dr. Roeslan : La, ini apa. Tidak itu tanggal 25 Februari 1947 sampai 6 Maret 1947.

Jadi begini pidato Hatta waktu itu. me-nanting para anggota KNIP, ini disampaikan oleh Bung Hatta, Kalau sidang ini tidak menerima Penpres No. 6/46 ini, pilihlah Presiden dan Wakil Presiden lain, yang bukan Soekarno Hatta.

Mendengar ucapan itu, kaget kabeh. Anggota yang sudah diangkat dengan Penpres tapi belum disetujui oleh KNIP, itu rame. KNIP lama bengok-bengok, tidak setuju, tidak setuju. Tapi calon anggauta yang dengan Penpres juga bengok-bengok, itu lo Soepeno yang mimpin bengok-bengok, mereka bilang kita mesti menerima Penpres, menerima Linggarjati. Lainnya (anggota lama) tidak bisa, tidak bisa.

Jadi kalau distem Penpres No. 6/46 pasti gagal, jadi tambahan anggauta yang ditetapkan Presiden itu akan ditolak oleh KNIP lama.

Lalu Bung Karno mogok pulang ke Yogya itu, yang disitu tinggal bung Hatta.

Nah Bung Hatta bilang "Bung karno sudah pulang, saya dan Bung Karno sepakat. sekarang terserah saudara-saudara. Kalau tidak terima Penpres No. 6/46 ini, pilihlah Presiden dan Wakil Presiden lain yang bukan Soekarno Hatta".

Wah tepuk tangan ramai, sing tepuk tangan itu sing durung anggota ini.

Akhirnya Penpres disetujui. Lalu KNIP lama bilang, ya kalau begitu kami juga setuju. Nah, anggota yang dipinggir tadi, kabeh melebu. Nah Anggota KNIP yang terdiri sekian ratus anggota, sekarang menjadi sekian ratus lebih banyak. Nah Diantara keputusan malang adalah :

- Menerima Kepres No. 6/1946
- Memberikan kepercayaan kepd pemerintah untuk menjalankan perundingan
- Menyetujui Linggarjati.

Nah, bagaimana tentang perundingan ? Sjahrir kan diculik, tapi sudah dilepaskan.

Bagaimana Linggarjati ?

Linggarjati diterima. Waduh. Londo Nggeblak
(Dr. Roeslan)

Peneliti : Sekarang lain pak. Sudah lengkap sekali dan terima kasih, pak.

Dr. Roeslan : Linggarjati ini, Kemudian dibawa ke Parlemen Belanda. Ini ngerti Rohana ? (Rohana SH adalah sekretaris pribadi Dr. Roeslan).

Parlemen Belanda terpaksa menerima. Ia terus diadakan penanda tangan. Tapi dalam pelaksanaannya londo iku curang. Lalu timbul aksi militer pertama itu, Belanda menuduh Indonesia melanggar perjanjian Linggarjati itu. Nah. tanggal 21-7-47 kita diserang itu. Waktu ini Sjahrir sudah tidak jadi Perdana Menteri lagi. Terus Sjahrir dikirim ke New Dehli.

Linggarjati gagal karena aksi militer I itu, lalu ganti Renville, Datanglah Muso. Ini perang dingin sudah mulai, Muso menganjurkan tolak ini, tolak itu. Kemudian terjadi peristiwa Madiun itu. Kemudian Kabinet Amir Sjariffudin jatuh, datanglah Bung Hatta dan menjadi Perdana Menteri. Terus mengadakan perundingan. Sedang ada perundingan, Madiun Brontak.

Terus Aksi militer kedua, Sjahrir sudah diluar negeri, jadi peran Sjahrir disini sudah hilang.

Kemudian datanglah Bung Karno dengan trace barunya, yakni waktu, KMB diterima. nah, KMB ini di Jakarta dibahas lagi. Dalam pembahasan itu PSI tidak setuju KMB itu. Hatta bertanya, Ini aneh orang-orang PSI ini kalau yang menandatangani bukan Sjahrir orang-orang PSI kok menolak. Jadi politiknya PSI itu ternyata tidak beres, (Dr. Roeslan) Tapi mereka erat sekali dengan Inggris dan Belanda, ya karena sama-sama PSI-nya itu. mengerti ya, sudah cukup ?

Peneliti : Sudah cukup sekali pak, terima kasih.

Wawancara ini dimulai jam 19.45 selesai jam 20.45.

D. Data-data penting yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Dr. H. Roeslan Abdulgani

1. Inggris (AFNEI) tidak begitu senang dengan adanya kabinet Presidensial di Indonesia waktu itu. Hal ini disebabkan karena, mereka sudah terbiasa dalam pemerintahan Parle-
menter di Inggris. Disana ada Perdana Menteri di Indone-
sia tidak ada. Selain itu orang Inggris ini mempunyai

kesan bahwa kabinet Presidensial itu sepertinya buatan Jepang. Dan didalam kabinet itu banyak orang-orang yang dahulu kolaborator dengan Jepang. Maka dari itu AFNEI menekan Sjahrir supaya bentuk pemerintahan Indonesia diganti dengan kabinet Parlementer, seperti di Inggris, dan supaya orang-orang kolaborator dengan Jepang itu dikurangi.

2. Sjahrir adalah orang non-Colaborator dengan Jepang. Dan beliu dekat, baik dengan Inggris maupun dengan Belanda. Malahan Isteri Sjahrir adalah orang Belanda. Sjahrir kemudian mempelopori mengadakan petisi di KNIP. Pada tanggal 9 Oktober 1945 KNIP mengajukan usul kepada Presiden agar KNIP waktu itu, diberi kekuasaan Legeslatif sebelum MPR, DPR dibentuk berdasarkan UUD 1945 ini.
3. Soekarno Hatta berkeyakinan bahwa persengketaan Indonesia Belanda dapat diselesaikan dalam tempo yang relatif singkat dan efisien "hanya" dengan melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan DK PBB.

Maka dari itu sewaktu KNIP mengusulkan perubahan status KNIP, Soekarno Hatta setuju. Hanya saja waktu itu Hatta yang maju. Usul itu dibicarakan di dalam sidang KNIP tanggal 16 Oktober 1945, berhasil menetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945. Malahan Soekarno Hatta menghendaki Sutan Sjahrir berperan di dalam

diplomasi di dunia Internasional utamanya melaksanakan perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan PBB itu.

4. Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16-10-1945 disusul dengan tiga maklumat pelaksanaannya, maka berubahlah kabinet Presidensial berdasar UUD 45 menjadi kabinet Parlementer dengan multi-partai sistem. Sekarang Perdana Menteri yang berperan.
5. UUD 45 dirubah demi terlaksananya diplomasi. Ini semua diupayakan dalam rangka menegakkan eksistensi negara RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu.
6. Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Oktober 1945 ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan bahwa pemerintah RI itu buatan Jepang. Memang kenyataannya, demokrasi Presidensial dalam UUD'45 ada kelemahannya, ada pemusatan kekuasaan negara ditangan Presiden, berdasar pasal IV aturan Peralihan UUD'45. Malahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda, menuduh bahwa negara RI itu katanya buatan Jepang dan Fasis.
7. Waktu itu partai buruh Inggris (partai sosialis Inggris) menguasai pemerintahan di Inggris. Bertemulah golongan sosialis Inggris dengan sosialis Indonesia yakni Sutan Sjahrir. Bung Karno dan Bung Hatta mengerti akan hal ini. Maka dari itu dibiarkan saja Sutan Sjahrir dan Amir Sjariffudin membentuk kabinet II tanggal 14-11-1945.

Soekarno Hatta pinter, ajak saja orang-orang PSI didalam Pemerintahan. Semua ini untuk memudahkan upaya perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan DK PBB.

8. Pada tanggal 10-11-1945 meletuslah pertempuran di Surabaya. Pertempuran Surabaya ini mempengaruhi dunia Internasional utamanya DK PBB. Tentara Inggris melaporkan kepada pemerintahannya perihal pertempuran Surabaya itu. Di dalam laporan itu dinyatakan, "The Republic has been proclaim, but we never though that the Indonesian people would like to fight to be dead"

Republik Indonesia sudah diproklamasikan, tetapi kita (AFNEI) tidak menduga, bahwa rakyat indonesia tidak hanya berani memproklamasikan negara RI. Tetapi bersedia bertempur sampai mati untuk republik. Desember Inggris mundur, bilang dengan belanda, "Kamu harus berunding dengan Indonesia"

9. Tetapi Belanda mula-mula tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta, dengan alasan kata mereka, Pemerintah RI buatan Jepang, RI adalah fasis, Soekarno Hatta adalah kolabarator.

Baru setelah bentuk pemerintahan R.I. diubah. Belanda bersedia berbicara dengan P.M. Sutan Sjahrir.

10. Data dari pertanyaan-pertanyaan secara langsung

a. Bagaimana pendapat bapak mengenai ungkapan di bawah ini ?

"Bahwa eksistensi negara RI dahulu itu dapat ditegakkan berdasarkan kekuatan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat."

Jawab Dr. Roeslan : Ya, memang benar demikian.

b. Apakah bapak mengetahui waktu itu, bahwa Soekarno Hatta "yakin" bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda dapat diselesaikan dalam tempo yang relatif singkat dan efisien "hanya" dengan melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan DK PBB. Dengan keyakinan itu segala jalan ditempuh untuk memungkinkan perundingan.

Jawab Dr. Roeslan : Ya memang betul begitu.

Hal ini saudara hubungkan dengan Maklumat politik tanggal 1-11-1945. Maklumat itu Bung Karno yang membuat, hanya disuruh laksanakan Bung Hatta. Dalam Maklumat ini digambarkan bahwa R.I. akan menjadi anggota PBB. Ini tanggal 1 November 1945, belum kabinet Sjahrir.

c. Pertanyaan :

Jadi Soekarno Hatta "yakin" bahwa penyelesaian sengketa Indonesia Belanda, dengan cara berunding yang paling baik, dalam rangka menyelamatkan negara R.I.. begitu pak ?

Jawab Dr. Roeslan : Ya benar begitu.

d. Pertanyaan :

"Sewaktu ditetapkan Maaklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16-10-1945 Bung Karno tidak ada di Jakarta "kelihatannya" Bung Karno terus setuju saja pak ?
Bagaimana ?

Jawab Dr. Roeslan :

Bukan "kelihatannya", memang Bung Karno setuju Maklumat itu, karena keyakinannya itu tadi. Mengenai hal ini Bung Hatta sudah kontak sebelumnya dengan Bung Karno. Mengenai hal ini, saudara harus hubungkan kerja sama Presiden dan Wakil Presiden waktu itu. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden waktu itu sama-sama terikat di dalam suatu perjuangan, menyelamatkan negara R.I. tidak seperti sekarang ini. Waktu menetapkan Maklumat X itu Hatta mudah kontak dengan Soekarno. Bung Karno "bilang : sudah Bung Hatta saja yang maju".

e. Pertanyaan :

Bagaimana tentang rapat KNIP di Malang pada tanggal 28 Februari 1947 itu pak ?.

Jawab Dr. Roeslan :

O ya, begini ya, Linggarjati tidak bisa diterima oleh KNIP. Sebab Masyuni dan PNI menolaknya. Maka dari itu oleh Soekarno Hatta, anggota KNIP itu ditambah dengan Penetapan Presiden No. 6/1946 tentang penambahan anggota

KNIP. Siapa saja yang dimasukkan Penpres No. 6/1946 itu ? Sjahrir mengatur, dicari orang-orang yang sekiranya menerima Linggarjati sesuai policy umum Soekarno Hatta. Misalnya, Sjahrir mengambil orang-orang Masyumi yang setuju Linggarjati yakni Natsir. Dan mengambil orang-orang PNI yang setuju Linggarjati yakni Loekman Hakim. Orang-orang Masyumi yang pro Natsir dan orang-orang PNI yang pro Loekman Hakim, dimasukkan dalam Penpres 6/46 itu. PSI ditambah, dan PKI ditambah. Pokoknya orang-orang yang masuk dalam daftar Penpres 6/46 itu, orang-orang yang setuju Linggarjati.

Tetapi celakanya KNIP juga menolak Penpres 6/1947 itu. Soekarno Hatta marah. Sebab menurut Soekarno Hatta Linggarjati harus diterima. Ini langkah awal diplomasi yang sangat penting. Setelah berunding dengan Hatta, Soekarno, terus marah dan pulang ke Yogya. Hatta disuruh selesaikan, akhirnya Hatta berpidato :

"Sekarang terserah sidang, Apakah menerima Penprs 6/46 ataukah memilih Presiden dan Wakil Presiden lain, yang bukan Soekarno Hatta.

Mendengar pidato Hatta itu, mereka kaget semua. seperti kehilangan arah. Disisi lain, para calon anggota baru Penpres 6/46, yang waktu itu hadir dipinggir-pinggir persidangan, sorak ramai, dengan teriak-teriak "terima

Penpres, terima Penpres".

KNIP lama akhirnya bicara juga dengan suara rendah. "Ya sudah, kami juga terima Penpres itu Penpres 6/46.

Keputusan rapat KNIP di Malang adalah :

1. Menerima Penpres 6/1946
2. Menerima Linggarjati
3. Secara aklamasi memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan perundangan
"Londo nggeblag" (Dr. Roeslan)

E. Makna (meaning) dari keseluruhan data tersebut di atas

Soekarno yakin semakin-yakinnya bahwa persengketaan Indonesia Belanda harus diselesaikan melalui jalan diplomasi. Diplomasi tanpa kekuatan militer tidak akan berhasil. hanya kekuatan militer saja tanpa dukungn rakyat juga tidak akan berhasil dengan baik. Pertanyaan yang timbul, Mengapa Soekarno Hatta semenjak permulaan revolusi Indonesia, menghendaki diplomasi ?

Soekarno Hatta sebagai pemimpin Indonesia berupaya menyelamatkan R.I, dari gangguan dari dalam dan dari luar negeri. Pertanyaan kedua, kekuatan apa yang dimiliki oleh Soekarno Hatta di dalam perjuangan itu ?

Soekarno Hatta mempunyai kekuatan raksasa yakni rakyat yang bersatu padu, satu tekad, untuk membela negara R.I..

bernaung dibawah pimpinan Soekarno Hatta. Juga adanya Bhayangkara kekuatan militer yang juga setia kepada Komando Soekarno Hatta. Kekuatan ini harus dipelihara, jangan sampai melemah. Agar kekuatan itu tidak melemah, maka penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda harus dilakukan dalam tempo yang relatif pendek dan efisien. Hal ini bisa dicapai manakala penyelesaian itu ditempuh melalui diplomasi ditunjang oleh kekuatan militer didukung oleh seluruh rakyat.

Disisi lain Indonesia diproklamasikan atas kehendak seluruh rakyat dengan memanfaatkan prinsip Atlantic Charter dan adanya Facuum of power di Indonesia waktu itu, negara R.I. adalah eksis di tengah-tengah masyarakat internasional secara sah waktu itu.

Akan tetapi menurut versi Belanda Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tidak sah. Sebab menurutnya seluruh Indonesia adalah wilayah kerajaan Belanda berdasarkan artikel Grondwet yang berbunyi : Het koninkrijk der Nederlanden omvat het grongebied van, Nederlands. Nederlands Indie (Indonesia), Suriname en suraÇao. Waktu proklamasi itu dilaksanakan, pemerintah Belanda ada, yakni pemerintah Hindia Belanda yang berada di Australia. Maka dari itu Belanda bermaksud akan menghancurkan negara R.I. dengan kekuatan militer.

Sikap Belanda yang demikian merupakan hambatan yang sangat besar, bagi upaya Indonesia mempertahankan eksistensi negara R.I. waktu itu. Para pemimpin Indonesia harus berupaya menghilangkan hambatan itu. Kewajiban para pemimpin Indonesia sangat berat, yakni mengambil langkah, agar Belanda dengan kemauan sendiri, mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia.

Pengakuan kedaulatan, atau pemulihan kedaulatan Indonesia oleh Belanda terkandung arti, Belanda mengubah artikel 1, Grondwed, sehingga berbunyi, " Het koninkrijk der Nederlanden omvat het grond-gebied van, Nederlands. Suriname en SuraÇao. Mengupayakan hal itu, tidak mungkin, Indonesia menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda hanya melalui kekuatan militer saja, mesti harus melalui kekuatan diplomasi. Akan tetapi diplomasi tanpa ditunjang oleh kekuatan militer akan tidak ada artinya. Kekuatan militer bisa digalang sehebat-hebatnya manakala didukung oleh seluruh rakyat.

Itulah sebabnya Soekarno Hatta bertekad mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia waktu itu dengan melalui perundingan yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat. Atau dengan kata lain, melalui diplomasi yang didukung oleh kekuatan tritunggal (Pemerintah, Militer, dan Rakyat): Tujuan pokok dari perundingan

ialah untuk mengupayakan agar Belanda dengan kemauan sendiri mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan inilah yang menjadi tujuan pokok dari diplomasi itu.

Itulah sebabnya waktu rapat KNIP di Malang tanggal 28-2-1947 Soekarno Hatta berkemauan keras agar Linggarjati diterima oleh KNIP. Untuk itu dikeluarkanlah Penpres 6/46 tentang penambahan anggota KNIP. Dan waktu KNIP menolak Penpres 6/46, Soekarno Hatta memberi alternatif kepada sidang KNIP, apakah menerima Penpres 6/46 ataukah memilih Presiden dan Wakil Presiden lain yang bukan Soekarno Hatta.

Mendengar hal itu seluruh anggota KNIP lama maupun yang baru sempat terkejut, bingung tanpa arah. Tapi dalam tempo singkat mereka bersatu padu, menerima Penpres 6/46. Berdiri dibelakang Soekarno Hatta, memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk meneruskan perundingan dan menerima Linggarjati. Kita mengetahui betapa besar kharisma Soekarno Hatta, waktu itu. Bermodalkan Linggarjati maka perundingan demi perundingan diteruskan, dibawah pengawasan DK PBB.

Peran militer waktu itu sangat besar, hal itu memperlancar perundingan. Waktu itu Belanda memanfaatkan pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, bahwa persoalan Indonesia-Belanda adalah persoalan dalam negeri Belanda, dunia internasional tidak perlu ikut campur tangan.

Militer Indonesia pimpinan Jenderal Soedirman di bawah wibawa Soekarno Hatta mengalihkan hal itu, ditariknya ke

Pasal 39 Piagam PBB yang menyatakan bahwa persengketaan antara anggota-anggota PBB, yang persengketaan itu menjurus terganggunya perdamaian dunia, maka penyelesaian persengketaan itu menjadi wewenang DK PBB (Pasal 39).

Itulah sebabnya, didalam agresi I, tgl. 21-7-1947 setiap serangan dari Belanda dilawan oleh militer didukung oleh seluruh rakyat.

Di Indonesia terjadi pertempuran dimana-mana. terus-menerus. Akhirnya menjadi perhatian DK PBB, sebab pertempuran yang terjadi di Indonesia dipandang mengganggu perdamaian dunia. Maka harus diselesaikan dengan perundingan dengan pengawasan DK PBB.

Dan tercapailah strategi Soekarno Hatta menyelesaikan persengketaan itu melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan D.K. PBB.

Catatan :

Persetujuan Linggarjati sebagai modal awal diplomasi selanjutnya. Setelah Linggarjati gagal karena agresi I oleh Belanda tanggal 21-7-1947, dilanjutkan dengan perjanjian Renville. Setelah agresi II oleh Belanda tanggal 19 Desember 1948, diadakan perjanjian KMB antara bulan Juli 1949 sampai November 1949. Sebagai hasilnya pada tanggal 27

Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan (memulihkan) Kedaulatan RIS.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden dan Wakil Presiden RIS Soekarno Hatta mengadakan perubahan di dalam negeri, negara RIS dilebur dan dirubah menjadi negara R.I. kesatuan berdasarkan UUDS 1950.

Tercapailah strategi Soekarno Hatta menegakkan eksistensi negara Republik Indonesia kesatuan melalui kekuatan diplomasi yang ditunjang oleh kekuatan militer dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, atau didukung oleh kekuatan tritunggal (Pemerintah, Militer dan seluruh Rakyat).

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo
Umur 81 tahun

Pelaku Sejarah pada Tahun 1945 - 1947 dan sesudahnya.
Mantan anggota KNIP Tahun 1945, Pembantu dekat Bapak
Sutan Sjahrir waktu itu.

Wawancara dilaksanakan dirumah beliau. Jl. Guntur 49
Jakarta, pada hari Sabtu Tanggal 9 Maret 1996 mulai jam
11.00 - 12.00.

Bapak Soebadio Sastrosatomo dan Soepeno yang menyusun
Draft PenPres No. 6/1946 yang nantinya dibahas dalam
Rapat KNIP di Malang tanggal 23 Februari 1947 di Malang.

WAWANCARA KHUSUS

Yang diwawancarai :

Nama : Bp. SOEBADIO SASTROSATOMO,
Jabatan : ~~Anggota~~ KNIP th 1995
Alamat : Jl. Guntur no 49 Jakarta
Telp (021) 8303489.

Mahasiswa :

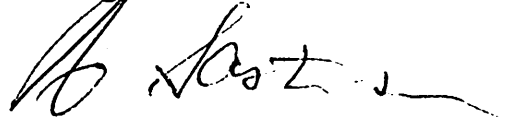
Nama : Soepardi Sariohartono
Bidang Studi : Ilmu Sosial (S3), Pasca Sarjana UNAIR Surabaya
Jurusan : Ilmu Politik Hubungan Internasional
No. Mhs. : 0993114669
Hari/tanggal : Wawancara : Sabtu 4 9 - 3 - 1996 jam 11.00 - 12.00
Tempat : Wawancara : Jl. Guntur no 49 Jakarta

Hasil Wawancara :

dalam rekaman

Jakarta, Maret 1996

Yang diwawancarai



(SOEBADIO SASTROSATOMO)

IP. DEBUSTAKAAN UINTEGRASIPRABAWA TIMUR
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BRAWIJAYA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 - 45673
SURABAYA

Surabaya 14 NOPEMBER 1995

nomor : 072/5973/303/1995

ampiran :
Perihal : Penelitian / Survey /
Research.

Kepada :

- Yth. 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DI JAKARTA
2. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEW
YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA
3. GUBERNUR KDH TK I JAWA BARAT
DI BANDUNG

U.P. KADIT SOSPOL.

Menunjuk Surat DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR.

tanggal : 17 OKTOBER 1995
nomor : 2672/PT.03.H4.PPs/H/1995.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SOEPARDI SARIOHARTONO, Drs.
Alamat : d/a JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA.
Pekerjaan : PROGRAM PASCASARJANA UNAIR
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945
DAN MAKLUMAT POLITIK TANGGAL 1 NOPEMBER 1945 SEBAGAI TITIK
TOLAK DIPLOMASI INDONESIA DI DALAM MENGADAKAN PERJANJIAN -
LINGGARJATI ".

Waktu : 3 (TIGA) BULAN.

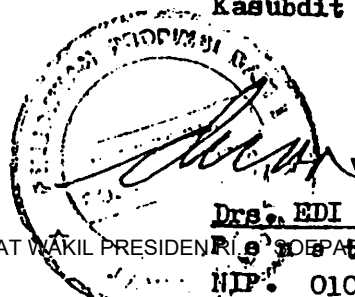
Lokasi : DKI , DIY , JAWA BARAT.

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
did daerah setempat.

Demikian, harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik
u**b**
Kasubdit Tibum



REMBUSAN :

1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
3. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Jatim
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Sdr. DIREKTUR SOSPOL, DEP DAGRI JAKARTA.
- KAITAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945
DAN MAKLUMAT POLITIK TANGGAL 1 NOPEMBER 1945 SEBAGAI TITIK TOLAK
DIPLOMASI INDONESIA DI DALAM MENGADAKAN PERJANJIAN - LINGGARJATI "
- Des. EDI PURWINARTO
NIP. 010077471



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. DIHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 ☎ (031) 510076, 5350170 FAX. (031) 510076

Nomor : 2672 /PT.03.114.PP4/N/1975
 Lamp :
 Hal : Izin untuk melaksanakan penelitian

17 Oktober 1975

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 Propinsi Jawa Timur
 U.p. Direktorat Sosial Politik
 Jl. Pemuda No. 5
 Surabaya.

Guna penulisan penelitian untuk Disertasi peserta program
 Doktor angkatan tahun 1973/1974 Program Pascasarjana
 Universitas Airlangga,

nama : Soepardi Sariohartono, Drs.
 nim : 097311466 / D
 judul : MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X
 TANGGAL 16 OKTOBER 1945 DAN MAKLUMAT
 POLITIK PEMERINTAH R.I. TANGGAL 1
 NOVEMBER 1945, SEBAGAI TITIK TOLAK
 DIPLOMASI INDONESIA DIDALAM MENGADAKAN
 PERJANJIAN LINGGAR JATI.

pembimbing ketua : Prof.Dr.Idris.A.Kesuma

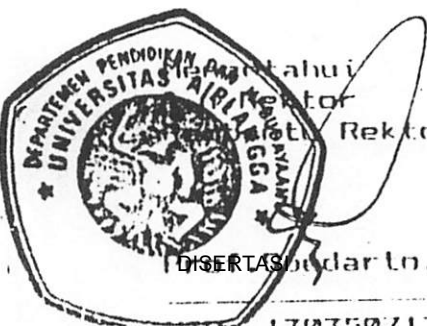
maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan
 rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk :

I. Mengadakan wawan cara khusus dengan para tokoh yang
 sekarang masih ada antara lain :

1. Dr.H.Roeslan Abdoelgani di Jakarta.
2. Mr.Soenarjo, mantan Menteri Perdagangan di Jakarta.
3. H.A.H.Nasution Mantan Kepala Staf A.D. di Jakarta.
4. B.M.Diah Mantan Menteri Penerangan di Jakarta.
5. Manai Sophiaan, Pejoang di Jakarta dan yang lainnya.

II. Menemui Pimpinan Perpustakaan Negara dan Perpustakaan yang
 lain di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Kota-kota lainnya.

Demikian dan atas bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani oleh
 Kepala Kantor
 Rektor I,



Ditandatangani oleh
 Direktur,

DISERTASIONDARLO, dr KAITAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. - SOEPARDI SARIOHARTONO dr.

II. HASIL WAWANCARA KHUSUS
DENGAN BAPAK SOEBADIO SASTROSATOMO
ANGGOTA KNIP TAHUN 1945 PEMBANTU TERDEKAT
DARI SUTAN SJAHRIR WAKTU ITU
DIAMBIL DARI REKAMAN

A. Prosesnya.

Pada tanggal 29 Januari 1996 peneliti kirim surat ke Jakarta mohon waktu kepada Bapak Soebadio (81 th.) untuk berwawancara.

Pada tanggal 8 Maret 1996, peneliti dipanggil supaya menemui beliau hari Sabtu tanggal 9 Maret 1996 jam 10.00 WIB. Peneliti ke Jakarta dan mengadakan wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo, di rumah beliau, jalan Guntur No. 49 Jakarta, dimulai jam 11.00 - 12.00.

B. Hasil Wawancara Diambil dari Rekaman

Peneliti : Selamat siang Pak Soebadio. saya mohon keterangan, bagaimana terjadinya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 dahulu itu Pak ?

Bp. Soebadio : Asal mulanya ini sebenarnya dari testamen tentang Bung Karno.

Peneliti : Maklumat X itu ada kaitannya dengan testamennya Bung Karno ya Pak ?

Bp. Soebadio : Asal mulanya. Sebab Bung Karno ini di mata Belanda adalah Kolaborator. di mata Belanda. Memang begitu kenyataannya kolaborator dengan Jepang sama Hatta, dua-duanya. Ada testamen kalau Soekarno Hatta tidak dapat menjalankan tugasnya, karena segala sesuatu, tugas itu diserahkan (dalam testamen itu) kepada 4 (empat) orang. Tadinya pada satu orang, atas fikirannya Soebardjo.

Peneliti : Satu orang itu siapa Pak ?

Bp. Soebadio : Tan Malaka. Nah, Hatta dengar, kok Tan Malaka, mengapa kok tidak ditambah Sjahrir. Lalu ditambah Sjahrir. Lo, kok dua-duanya orang Minangkabau ?

Nah Sjahrir ini yang melengkapinya menjadi 4 (empat) orang itu, yakni Wongsonegoro dan Iwa Koesoema Soemantri (dari Jawa).

Ini asal mulanya. Jadi untuk menggantikan Soekarno Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden kalau ada sesuatu. Sebab kemungkinan

si Van der Plas minta sama Christison supaya nangkep Soekarno, Hatta, dituduh penjahat perang.

Tapi Sjahrir bilang, kita orang 4 (empat) ini belum pernah bertemu, kok mau ambil oper kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.

Lalu kita fikirkan (Soebadio), Sjahrir tidak mau. Sebab menurut Sjahrir, Republik tanpa Soekarno - Hatta tidak bisa.

Soekarno - Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden memang, unfavourable sebab keduanya kolaborator dengan Jepang.

Sjahrir bilang saya (Soebadio), kita tidak bisa mengganti Soekarno Hatta. Sebab zonder Soekarno - Hatta tidak ada Republik. Siapa yang kenal Sjahrir, siapa yang kenal Tan Malaka ?

Nah, sebelum ini, Tan Malaka bertemu dengan Sjahrir. Sjahrir bilang kepada Tan Malaka "Kalau kamu mencari 10% saja populair-mu dibanding Soekarno, saya pertimbangkan untuk mengganti Soekarno Hatta". Lalu Tan Malaka pergi ke Surabaya, ditangkap sama pemuda. Yang membebaskan Tan Malaka itu Djohan

Sarosa. Jadi Tan Malaka ini dikenalpun tidak oleh rakyat apalagi 10%. Nah, lalu bagaimana? Sjahrir bilang tidak mau menggantikan Soekarno Hatta. Waktu itu, Belanda mendesavoueer pertemuan-pertemuan Van Mook sama Soekarno, disavoueer (tidak diakui) oleh Logeman, sebab ini Kolaborator, kita (Belanda) tidak mau berunding dengan Kolaborator. Ini kita (Soebadio) semua tahu. Jadi bagaimana menyelamatkan R.I. ini. Sjahrir bukan kolaborator, di mata Belanda, Sjahrir bersih. Jadi kita mau merubah sistem Pemerintahan Presidensiil menjadi sistem Parlementer. Sjahrir ngomong sama kita (Soebadio dkk.), saya mau menjadi Perdana Menteri. Tapi bagaimana mengubah sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer. Padahal yang menentukan UUD itu MPR. Padahal MPR-nya belum ada. Yang ada KNIP.

KNIP itu pembantu eksekutif yakni Presiden. Atas usaha saya (Soebadio), Soepeno, Sakirman dan lain-lain, supaya KNIP ini dijadikan MPR. Nah itu lahirnya Maklumat X tanggal 16-10-1945 itu. Saya waktu itu belum anggauta KNIP

sebab semua para anggotanya orang-orang ko-laborator Jepang, saya (Soebadio) tidak mau. KNIP itu masa peralihan jadi tidak mau kita (Soebadio dkk.). Tapi ini situasinya mende-sak. Jadi saya menjadi KNIP, sesudah rapat tanggal 16 Oktober 1945 itu. Yang paling aktif mengerjakan proses lahirnya Maklumat X itu adalah mbakyu Mangoen Sarkoro.

Jadi lucunya itu yang bergerak ini mbakyu Mangoen Sarkoro, Mangoen Sarkoro, Sakirman. Soepeno. Semua sudah menjadi anggota KNIP. Saya (Soebadio) yang belum. Nah, pada 16 Oktober itu Soekarni menemui Sjahrir, bilang "Bung Sjahrir mau diangkat menjadi Ketua KNIP, sekaligus Ketua BPKNIP". Tapi janji Sjahrir kepada saya (Soebadio) "Dia akan jadi Perdana Menteri". Kok sekarang saya kembali lagi pada permintaan anak-anak muda, untuk jadi Ketua KNIP, dia menolak. Alasan Sjahrir, kalau saya jadi Ketua KNIP saya menentukan politik, nanti dipakai oleh pemuda-pemuda itu, dia tidak mau. Kata Sjahrir, saya ini bukan buruh politik, saya ini politikus. Pernyataan Sjahrir ini sekarang saya pertajam (Soebadio), bukan buruh politik. Nah, dia

ngomong sama saya, perkara keadaan ini. Nah saya ngomong, orang-orang itu sudah menjadi anggauta KNIP, Badan Penyelidik segala macam. Sebab kita tidak mau jadi Badan Penyelidik segala macam, sebab kita mengadakan non-korporator dengan Jepang. Jadi kita bekerja di bawah tanah, jadi kita tidak setuju dengan adanya Badan Penyelidik, segala macam. Tetapi kenyataannya kita (Soebadio dkk) yang mendesak Soekarno Hatta untuk menyatakan Proklamasi, justru kita (Badio dkk.), sebab ada "power vacuum". Si sekutu yang menang belum mendarat, si Jepang yang menguasai di sini sudah kalah. Ini waktu yang paling bagus. Di sini ada power vacuum, dalam power vacuum itu muncul kekuatan kita sendiri. Jadi di mata kita, R.I. ini bukan buatan Jepang. Yang membuat ini kita sendiri, para pemuda asuhan Sjahrir. Berani mendengarkan radio luar negeri, dengan resiko yang macam-macam. Kita minta Proklamasi, Soekarno tidak percaya bahwa Jepang sudah menyerah. Sjahrir menawarkan mengajak Soekarno ke Kenpeitai waktu itu. Sebab Sjahrir sudah

tahu kalau Jepang bakal menyerah. Yakni sewaktu Konferensi Yalta, di Eropa perang sudah selesai. Dalam Yalta Konferensi, sekutu memberi ultimatum kepada Jepang.

Dan si Soviet membuka front kedua menyerbu ke Asia, mau ke Jepang. Tadinya hanya di Eropa. Ini mesti tahu latar belakang ini. Ini bukan soal janji Jepang, bukan apa. situasi yang menentukan bukan janji. Nah kalau orang Jawa percaya betul pada "Djojobojo". Kalau ada "wong kuning" masuk Indonesia "ing kono wong Jowo bakal merdika". Tapi kita (Soebadio dkk.) para demokraten bukan percaya pada "jongko Djojobojo" ini tapi percaya, setelah Perang Dunia II ada power vacuum, jadi de einde van de Pasific - Oorlog bakal ada power vacuum. Ini pandangan demokraten. Si "Djawa" tidak, kedatangan Jepang dipandang sebagai realisasi ramalan "Djojobojo". Nah saya ini sekarang, dulu juga, saya ini (Soebadio) Jawa, dus percaya kepada ramalan "Djojobojo", tapi saya ini demokrat mengikuti produk alam yang modern. Jadi saya ini sebagai orang Jowo tetep Jowo.

sebagai orang modern tetap orang modern, "Jowo sing modern". Jadi percaya ramalan "Djojobojo", tapi dalam situasi begini "Djojobojo" tidak tahu bakal ada Pasifik - Oorlog, yang dia tahu, dia bilang "Nek didu-duki wong kuning (Jepang) sak-umur jagung. Jawa bakal merdiko". Ini saya cerita panjang lebar begini supaya background lebih penting dari pada janji-janji itu. Sekarang ini saya (Soebadio), mengantisipasi post Soeharto periode. Perang dingin telah selesai ada semacam power vacuum, perang dingin sudah selesai. Uni Soviet sudah tidak ada. Jadi tidak ada polarisasi. Kita sejak dulu tidak ada polarisasi. Kita (Soebadio) tidak suka polarisasi tidak ikut kiri tidak ikut kanan. Ini satu-satunya grup kita (Soebadio). Dari orang yang ikut revolusi, yang masih hidup adalah saya, baik yang tua maupun yang muda. De founding vaders terang sudah tidak ada. Anak-anak muda yang rame-rame, si Soekarni. Chaerul Saleh, Adam Malik semua sudah tidak ada. Saya diparingi Sing Agawe Urip, isih urip, ingetannya isih tajam. Saya punya

kewajiban untuk memberi sesuatu yang orang ingin tahu. Saya tidak mau berkomplot, yang penting saya ingin menyelamatkan R.I.

Peneliti : Apa bisa saya bertanya lagi Pak ? Apakah Bapak mengetahui, bahwa Soekarno Hatta itu berkeyakinan bahwa penyelamatan R.I. harus melalui perundingan dengan Belanda, atau melalui diplomasi ?

Bp. Soebadio : Saya cerita ya, Sjahrir ini bukan wong Jowo, tapi yang melaksanakan ajaran Sosro Kartono, malahan Sjahrir ini, ingin "nglurug tanpo bolo" itu artinya diplomasi. "Digdoyo tanpo aji" itu artinya kita bersatu dengan Tuhan. Nek wis "digdoyo tanpo aji" kita sudah tidak bisa disantet, wong kita sudah manunggaling kawula lan Gusti.

Sjahrir berbeda dengan Tan Malaka. Tan Malaka "pengusir", mengusir Belanda (perang). Kalau Sjahrir ingin berunding, dengan ini rakyat tidak jadi korban, kalau perang rakyat jadi korban, makanya "nglurug tanpo bolo" artinya diplomasi.

Peneliti : Bung Karno Hatta kan setuju dengan diplomasi ya Pak ?

Bp. Soebadio : O, setuju banget. Mulakno badan yang dibentuk namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Setelah Belanda (Nica) mau menyerbu, BKR menjadi TKR. Kono nganakke tentara, kene ya mengadakan, dari BKR menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), kemudian TNI. Jadi mula-mula kita tidak mau perang.

Peneliti : Bung Karno setuju ada diplomasi ya Pak ?

Bp. Soebadio : Setuju sekali. Nah, oleh sebab itu, karena Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta karena keduanya kolaborator, Belanda setuju ngomong dengan Sjahrir. Tapi Sjahrir tidak bakal bisa berdiplomasi kalau tidak direstui Soekarno. Orang-orang sekarang bilang Sjahrir lain dengan Soekarno. Ini tidak bener, bikinan orang-orang itu mau bonceng Soekarno melawan Sjahrir. Sedangkan Sjahrir dengan Soekarno waktu itu "satu" dan minta berunding dengan Belanda.

Ini saya cerita lagi ya.

Waktu rapat KNIP di Malang, ini penting juga. Rapat KNIP di Malang itu, anggauta KNIP diperluas, diperbanyak, dengan Keputusan Presiden No. 6/1946 yang nyusun perluasan ang-

gauta KNIP itu, yang nyusun saya (Soebadio), sama Soepeno almarhum. Ya, yang berkepentingan Linggarjati diterima Sjahrir yang membela Hatta, dengan bicara : Kalau KNIP tidak mau terima Penetapan Presiden No. 6/th 1946, supaya memilih Presiden dan Wakil Presiden orang lain. Jadi ini, kok saya guyon sama orang-orang itu, Hatta itu ngejek saya "dictum U is waarheid" (tulisan you menjadi kebenaran), yang menjadikan dictum waarheid adalah Hatta. Dictum saya menjadi waarheid (kebenaran) karena Hatta. Itu buktinya Rapat KNIP di Malang yang jadi Perdana Menteri. Sjahrir, yang menjadi Presiden, Soekarno, yang nyusun saya sama Soepeno, yang melawan adalah orang-orang di Badan Pekerja KNIP yang tidak cocok fikirannya Sjahrir ini. Sebab fikiran kita (Soebadio) ini, sosialis ini. kekuatannya golongan itu ialah Petani, Pemuda, dan Buruh. Nah sekarang ini corporate-state, fascis. Kita dulu kekuatannya Petani, Pemuda, Buruh dan juga intelektual. Beda dengan sekarang, sekarang ini corporate-state, fascis sekarang ini. Dari sudut UUD-

nya, dari sudut prakteknya juga begitu. Kalau saya ngomong keadaan sekarang, Pemilihan Umum adalah lembaga demokrasi, tapi dalam pemilihan umum ini tidak ada rakyat mengambang, jadi bukan pemilihan umum, rakyat yang mestinya memilih dilarang memilih. Jadi mengadakan lembaga demokrasi untuk membunuh demokrasi (Soebadio). Sekarang ini ada DPR untuk membunuh fungsi DPR.

Sekarang soal Linggarjati ya.

Linggarjati ini bedanya dengan Renville dan KMB, dalam Linggarjati Sjahrir mewakili seluruh Indonesia tapi, mengakui hanya berkuasa di Jawa dan Sumatra. Seperti kata orang, Sjahrir hanya mewakili Jawa dan Sumatra, itu tidak betul. Orang-orang ini tidak baca isi Linggarjati. Nah untuk memperkuat ini, ada pasal arbitrage, jadi itu "een volkrechtelijke - overeenkomst" (perjanjian dalam Hukum Internasional). Sedangkan Renville, sudah bukan, sebab di sini "de R.I. maar is een deel staat" (R.I. hanya negara bagian), sedang Linggarjati "is een sovereign-state" (negara berdaulat), hanya berkuasa di een

deel van Indonesie Jawa dan Sumatra. Jadi waktu Renville hanya deel-staat, Negara Bagian. Ini bedanya Linggarjati dan Renville. Ini jahatnya Anak Agung Gde Agung, jahat dia itu, dia mendudukkan R.I. yang sudah sovereign menjadi "negara bagian" di dalam Renville.

Buktinya apa, waktu aksi militer pertama wij (kita) dipanggil ke U.N. (PBB), yang ngomong Sjahrir lagi, si Belanda membawa Nadjamudin, waktu itu mewakili Indonesia juga. Nadjamudin itu dulu Perdana Menteri. Nah Nadjamudin karena menyaingi Sjahrir dijatuhkan oleh Belanda, diganti Anak Agung Gde Agung. dituduh korupsi soal tekstil. Ini buat Agung tidak enak betul dia, wong menjadi anggauta PSI liwat saya (Soebadio) kok tegel-tegele. R.I. dijadikan deel-staat (negara bagian).

Tapi pinternya Anak Agung Gde Agung ini waktu aksi militer kedua, dia meletakkan jabatan. Padahal dia ikut ngapusi kita, bahwa katanya tidak akan ada aksi militer kedua, ternyata ada. Waktu itu saya menjadi delegasi R.I. ke Makasar, karena diundang oleh NIT. Waktu itu

kita percaya waktu di Jakarta, bahwa tidak akan ada aksi militer kedua. Bung Hatta juga percaya tidak akan ada aksi militer kedua, sebab waktu itu Graham masih di Kaliurang. Kita diundang ke NIT. Padahal Agung mengerti kalau bakal ada aksi militer kedua. Dia malah membantunya.

Baru-baru ini saya bilang kepada Agung di Lippi "het is een geweten vraagd, heb U mee gewerkt om ons praten, dat er geen tweede militaire aksi is ? I kan niet zeggen ons. Hij is mee gewerkt, hij mee gewerkt". (Agung saya bertanya, kamu ikut menentukan kan, sedang dalam pembicaraan kita waktu itu kamu bilang tidak akan ada militer aksi kedua ? Kamu turut menentukan, ya).

Peneliti : Linggarjati itu kalau begitu kan pangkal berhasilnya upaya Soekarno-Hatta mempertahankan eksistensi negara Proklamasi ya pak ?

Bp. Soebadio : O, ini satu faktor lagi, yang kuasa di South East Asia Command adalah Lord Louis Mountbatten. Lord Louis Mountbatten khawatir kalau revolusi Indonesia ini menyeberang ke Vaste-land, Malaysia, Burma, India. Jadi dia

ini "De dekolonisator Wordt Louis Mountbatten" yang jadi korban sebenarnya Belanda, dipaksakan oleh Louis Mountbatten supaya berunding dengan Sjahrir. Dengan begitu yang mengadakan dekolonisasi di Nederland-Indie sebenarnya Lord Louis Mountbatten, memaksakan untuk berunding.

Selama dia masih berkuasa di South East Asia Command, sebelum mereka mundur, supaya sudah ada persetujuan antara Belanda dan Indonesia. Yang dibelakang soal ini adalah Inggris, yang maju Lord Louis Mountbatten. Kemudian juga India tapi yang nomor satu Inggris.

Nah, dalam berunding itu si Bung Karno tidak mau ke daerah pendudukan, Si Belanda tidak mau ke Yogyakarta. Lah yang mempunyai pikiran untuk berunding di Linggarjati itu menurut isteri saya (Maria Ulfah) dia. Sebab dia bilang, kalau Belanda tidak mau tinggal di daerah Republik, dia boleh tidur di kapal Belanda, perundingannya di Linggarjati. Tiap hari habis berunding pulang ke laut. Yang mau tidur di Linggarjati adalah Lord Killern. Jadi mengapa di Linggarjati karena Bung Karno

tidak mau ke daerah pendudukan, Belanda tidak mau ke Yogya, dipikirkan tempat perundingan di Linggarjati.

Nah, ini temen-temen saya, si Darpo, si Lubis ini membujuk Hatta supaya mau hadir ke Linggarjati. Si Darpo membujuk Bung Karno supaya hadir ke Linggarjati. Yang mengutus ini si Sjahrir untuk menemui Presiden. Maksud Sjahrir, kalau Soekarno Hatta sudah menemui Inggris di Linggarjati Belanda mau apa ?

Jadi si Belanda yang mula-mula akan menangkap Soekarno Hatta karena di tuduh War Criminal. kalau Inggris sudah mau mengakui Soekarno Hatta, Belanda mau apa lagi. La ini hasil kepintaran kita (Soebadio dkk) ini, kepintaran Sjahrir ini.

Orang-orang nasionalis formil menuduh Sjahrir pengkianat, karena Belanda hanya mengakui Jawa Sumatra saja. Bukan begitu, sebenarnya meliputi seluruh Indonesia, hanya mengakui berkuasa atas Jawa dan Sumatra. Ini artinya Linggarjati.

Orang sekarang, terutama si Anak Agung Gde Agung dia yang dipegangnya Renville, kita (Badio) Linggarjati. Pinternya Agung, setelah aksi militer kedua, dia berhenti. Pura-pura tidak setuju Bung Karno ditangkap dsb. Sebenarnya Agung setuju, saya punya bukti tertulis (Soebadio). Jadi tidak bisa menolak.

Peneliti : Waktu penetapan Maklumat No. X waktu itu, Bung Karno kan tidak di Jakarta. Tapi setelah Bung Karno kembali ke Jakarta. Bung Karno langsung menyetujui tindakan Hatta. Ini bagaimana menurut Bapak ?

Bp. Soebadio : Ini berkaitan dengan soal sejarah pada jaman Belanda. Waktu ini Soekarno tidak ada yang ada Hatta. Jadi Maklumat X yang tanda tangan Hatta, Maklumat 1 Nopember 1945 yang tanda tangan Hatta. Soekarno di mana ? Ini berkaitan dengan sejarah. Waktu Soekarno dari Sukamiskin, dia akan dibuang. Dalam hal ini, sebagai orang Jawa lagi ya. ini yang kasih nasehat adalah Sosrokartono. Sosrokartono tahu kita perlukan Soekarno pada waktunya. Kalau Soekarno di buang ke Digul tidak kuat dia. Jadi waktu dari Sukamiskin

di buang ke Endeh, dan dapat toelage (tunjangan) sedang Sjahrir dan Hatta dibuang ke Digul tidak dapat toelage (tunjangan). Nah kemudian waktu Sjahrir dan Hatta pindah ke Bandanaria dapat toelage seperti Soekarno juga. Jadi ini saya punya keyakinan. Soekarno ini yang membesarkan 2 (dua) orang. Pakubuwono X dan Sosrokartono. Malah nek kandane wong djowo sakjane Soekarno itu putrane mangkoeboewono X. Soekarno dari Sukamiskin, kirim surat pada Pemerintah Hindia-Belanda, dia tidak akan ikut politik lagi. Surat ini yang nulis bukan Soekarno, tapi Sosrokartono. Ini ya orang yang bisa merumuskan begini hanya saya. Orang lain tidak tahu. Ini filsafat jawa lagi ya, filsafat jawa ini kan tidak istimewa "Mengayahi Bawono" tidak ada kekuasaan. Ini saya bilang, data si Soekarno. Jadi Soekarno ini memelihara Natuur (alam) sedang orang lain itu yang disoalkan kekuasaan. Kalau Soekarno, dengan kekuasaan tapi dengan melayani natuur, tidak menentang natuur. Ini semua saya rumuskan disini. "Soekarno adalah

Indonesia, Indonesia adalah Soekarno". Kembali pada background-nya, yang menulis surat kepada Pemerintah Hindia-Belanda itu Sosrokartono, supaya pada waktunya Soekarno Seger. Ini betul, waktu Proklamasi dia "seger" yang menyelamatkan Soekarno dari tekanan Belanda adalah kita (Bp Soebadio dkk). Yang mencari Soekarno ke Sukabumi itu Darpo sama Soedjatmoko. Dia berada di suatu tempat di Sukabumi, ini Jawa lagi ya, Soekarno ini sebenarnya hubungan dengan "Ratu Kidul". Dia selalu di Karangawu di Jawa Barat. Ada hal yang penting lagi. Perkembangan sejarah R.I. itu banyak di manipulasi oleh Yamin. Yamin itu nulis peristiwa-peristiwa segala macam itu, notulennya dari Pringgodigdo. Waktu Soepomo menjadi duta besar di London, ini notulen Pringgodigdo ini dipinjam mau dicetak di London. Kemudian Pringgodigdo meninggal barang-barang ini diambil oleh Yamin. Jadi Yamin ini yang kasih interpretasi Pancasila UUD 45 segala macam yang buat Yamin. Tapi notulennya Pringgodigdo. Keterangan dalam bukunya Yamin, itu dari notulennya Pringgodigdo.

Peneliti : Saya ini bekas mahasiswanya Bp Pringgodigdo itu Pak.

Bp. Soebadio : O, ya ! Baik kalau begitu. AG. Pringgodigdo sebenarnya kalah pinter dengan adiknya Karim Pringgodigdo. Tapi praktek AG. Pringgodigdo dalam komisi Visman dia sekretaris. Badan Penyelidik dia sekretaris. Kemudian jadi dosen di Gajah Mada kemudian di Erlangga. Dengan saya (Bp Soebadio) sobat kental dia. Waktu mempersiapkan segala sesuatu menghadapi aksi militer kedua bersama saya di Sumatra. Kalau ada agresi kedua kita sudah prepair, sudah siap. Itu saya dengan AG. Pringgodigdo yang tugas di Sumatra.

Wawancara berlangsung jam 11.00 sampai 12.00 tgl 9 Maret 1996 hari Sabtu di Jalan Guntur 49 Jakarta.

C. Data-data Penting yang Peneliti peroleh dari Wawancara dengan Bapak Soebadio Sastrosatomo

1. Dimata Belanda, Soekarno Hatta adalah penjahat perang, Kolaborator dengan Jepang. Hal ini diantisipasi oleh beberapa orang terkemuka waktu itu. Kemungkinan Van der Plas minta bantuan Christison agar menangkap Soekarno

Hatta. Kalau terjadi demikian, siapa yang akan menggantikannya. Kemudian dibuat testamen, yang bakal mengganti Soekarno Hatta adalah Tan Malaka, Sjahrir, Wongsonegoro dan Iwa Koesoema Soemantri. Atas testamen ini Sjahrir mengadakan reaksi. Keempat orang ini kan belum bertemu. Kok mau oper pimpinan negara.

Sjahrir kemudian menolaknya. Menurut Sjahrir R.I. tanpa Soekarno Hatta adalah tidak bisa. Sjahrir bilang kepada Soebadio, kita tidak bisa mengganti Soekarno Hatta. Sebab tanpa Soekarno Hatta tidak ada Republik.

Data : Jadi seluruh rakyat termasuk Sutan Sjahrir secara bulat mendukung kekuasaan Soekarno Hatta. Sjahrir tidak mau mengganti Soekarno Hatta.

2. Pada waktu itu Belanda men-desavoueer (tidak mengakui) pertemuan-pertemuan Van Mook dan Soekarno. Menteri tanah jajahan Logeman selalu men-desavoueer pertemuan itu. Sebab Soekarno Hatta Kolaborator. Belanda tidak mau berunding dengan Kolaborator.

Data : Bahwa pada permulaannya Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta.

3. Sjahrir dimata Belanda bukan Kolaborator dimata Belanda Sjahrir ini bersih.

Data : Hubungan Sjahrir dengan Belanda dan juga dengan Inggris, adalah baik. Ada kemungkinan bisa ditugasi oleh

Soekarno Hatta untuk menjalankan perundingan dengan Belanda.

4. Sjahrir menyatakan kepada Soebadio bahwa dia bersedia menjadi Perdana Menteri. Tetapi bagaimana caranya mengubah system Presidensiil menjadi system Parlemtair. Ada usul dari Soebadio, Sakirman, dan Soepomo supaya KNIP dijadikan MPR. Soebadio waktu itu belum menjadi anggota KNIP. Untuk tujuan itu maka di persiapkan Diktum Maklumat No. X oleh Soebadio, Mangoen Sarkoro, Ibu Mangoen Sarkoro dan Soepeno. Semua sudah menjadi anggota KNI kecuali Soebadio, sebab mula-mula Soebadio tidak mau, tapi karena keadaan mendesak maka sejak ditetapkannya Maklumat No. X beliau menjadi anggota KNIP.

Data : Sjahrir merasa bersih, hubungannya dengan Belanda dan Inggris tidak ada masalah. Di sisi lain beliau tidak mampu berdiplomasi atas namanya sendiri.

Beliau mengagumi kharisma Soekarno Hatta maka beliau ingin menjadi Perdana Menteri. Soekarno Hatta mempunyai strategi pokok, bahwa penyelesaian persengketaan Indone-sia-Belanda ditempuh melalui diplomasi dibawah pengawasan PBB.

Untuk itu Soekarno Hatta malahan mendorong kehendak Sjahrir menjadi Perdana Menteri, nantinya ditugasi melaksanakan perundingan dengan Belanda.

5. Bahwa pada 15 Agustus 1945 di Indonesia terjadi "Power Vacuum" Sekutu yang menang perang belum mendarat, Jepang yang menguasai Indonesia sudah kalah. Ini situasi paling bagus untuk memproklamasikan Kemerdekaan.

Data : Soekarno Hatta memproklamasikan Kemerdekaan tgl 17-8-1945 ditunjang oleh situasi Vacuum of power waktu itu.

6. Pandangan Sjahrir berbeda dengan Tan Malaka.

Tan Malaka ini "Pengusir", artinya mengusir Belanda dari Indonesia, jadi menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui peperangan.

Kalau Sjahrir ingin berunding, dengan cara ini rakyat tidak menjadi korban, kalau melakukan perang rakyat jadi korban. Maka dari itu Sjahrir menghendaki "ngulurug tanpo bolo" artinya berdiplomasi.

Pendapat Sjahrir waktu itu menghendaki berunding dengan Belanda. Sikap begini cocok dengan strategi Soekarno-Hatta. Bahwa Soekarno Hatta sadar benar bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda yang paling baik adalah melalui diplomasi dibawah pengawasan PBB.

Maka dari itu Soekarno Hatta mendorong Sjahrir supaya menjadi Perdana Menteri, untuk kemudian ditugasi melaksanakan perundingan dengan Belanda dibawah restu Soekarno Hatta.

Peneliti : Apakah Soekarno setuju dengan diplomasi itu Pak ?

Bp. Soebadio : O, Setuju banget. Nah, karena Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta, karena keduanya adalah Kolaborator, (dimata Belanda), maka waktu itu Belanda setuju kalau ngomong dengan Sjahrir. Tetapi Sjahrir tidak bakal bisa berdiplomasi kalau tidak direstui Soekarno Hatta. Sjahrir waktu itu "Satu" dengan Soekarno Hatta, dan menghendaki berunding dengan Belanda.

Data : Soekarno Hatta tetap ber-strategi bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan DK. PBB. Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta. Tapi Belanda mau ngomong kalau dengan Sutan Sjahrir.

Sjahrir tidak bakal bisa bersiplomasi kalau tidak direstui Soekarno Hatta. Sjahrir berkeinginan menjadi Perdana Menteri. Tetapi UUD harus dirubah.

Untuk kepentingan yang lebih besar itu. Soekarno Hatta setuju ditetapkan Maklumat Wakil Presiden R.I. No. X tgl. 16-10-1945

yang isinya merubah pasal IV Peralihan UUD 45. Dan setuju Sjahrir menjadi Perdana Menteri yang bakal ditugasi melakukan perundingan dengan Belanda di bawah restu Soekarno Hatta.

Peneliti : Soal Rapat KNIP di Malang Tgl 28 Februari 1947.

Bp. Soebadio : Rapat KNIP di Malang ini penting juga dalam rapat ini anggota KNIP diperluas. ditambah dengan Penetapan Presiden No. 6/th 1946. Yang menyusun perluasan KNIP itu saya (soebadio) dan Soepeno. Yang berkepentingan agar persetujuan Linggarjati diterima oleh KNIP, adalah Sjahrir yang membela Hatta. Dengan berpidato di muka sidang, kalau Pen Pres No. 6/th 1946 ditolak oleh KNIP, diper-silahkan memilih Presiden dan Wakil Presiden lain, yang bukan Soekarno Hatta. Hatta se-ring guyon sama saya (Soebadio) "Dictum U is Waarheid" yang menjadikan dictum saya waarheid ya Hatta. Sesudah rapat KNIP di Malang yang menjadi Perdana Menteri adalah Sjahrir, yang menjadi Presiden tetap Soekarno yang menyusun perluasan anggota KNIP adalah saya (Soebadio) dengan Soepeno.

Data : Bahwa Soekarno-Hatta berkeyakinan bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda harus melalui perundingan di bawah pengawasan DK PBB. Untuk tujuan ini, apapun hambatannya dihilangkan. Pasal IV Aturan Peralihan UUD dirubah dengan Maklumat No. X Tgl 16-10-1945. Persetujuan Linggarjati harus diterima oleh Indonesia. KNIP yang menentang Linggarjati disuruh memilih menerima Linggarjati atau memilih Presiden dan Wakil Presiden yang bukan Soekarno Hatta. Dan dengan pernyataan itu seluruh anggota KNIP lama dan baru, aklamasi, menerima Linggarjati dan menyetujui Pemerintah melanjutkan perundingan. Disini dapat diyakini, begitu besar pengaruh Soekarno Hatta terhadap rakyat. Seluruh rakyat mendukung sepenuhnya terhadap Soekarno Hatta.

Bp. Soebadio : Sekarang mengenai Linggarjati. Linggarjati itu beda dengan Renville dan KMB. Dalam Linggarjati ini Sjahrir mewakili seluruh Indonesia, tapi hanya berkuasa di Jawa Madura dan Sumatra. Sedangkan menurut Renville "Indonesia merupakan negara bagian

saja". Ini akal-akalan Anak Agung Gde Agung.
Data : Bahwa Persetujuan Linggarjati merupakan modal awal yang sangat penting untuk meneruskan perundingan-perundingan selanjutnya dalam rangka mempertahankan eksistensi negara R.I. sampai akhirnya Belanda mengakui kedaulatan negara R.I.S. pada 27 Desember 1949. Yang kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 negara R.I.S. dirubah menjadi negara R.I. Kesatuan, dan berdiri tegak sampai sekarang.

Peneliti : Kalau begitu Linggarjati kan pangkal berhasilnya kemerdekaan R.I. bisa dipertahankan ya Pak ?

Bp. Soebadio : O, ya. Ini ada satu faktor lagi ya. Lord Louis Mountbatten. Commandan SEAC itu khawatir kalau peperangan di Indonesia waktu itu merambat ke Vaste-Land, seperti India, Malaya dan sebagainya itu, jadi untuk Indonesia, "dekolonialisator wordt Louis Mountbatten". Yang menjadi korban sebenarnya Belanda. Dipaksa oleh Mountbatten supaya berunding dengan Indonesia, dengan Sjahrir. Selama SEAC masih kuasa di Indonesia agar sudah ada persetujuan antara Belanda dan Indonesia. Di

belakang ini semua adalah Pemerintah Inggris. yang mendesak supaya Belanda berunding dengan Indonesia.

Data : Lahirnya persetujuan Linggarjati antara lain, karena desakan Inggris dan kemudian Amerika.

D. Makna (meaning) Dari Keseluruhan Data Tersebut Di Atas

Bahwa di dalam memproklamkan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu, Soekarno Hatta atas nama Bangsa Indonesia memanfaatkan vacuum of power, (5) waktu itu. Tetapi Belanda tidak mengakui negara baru itu, karena menurutnya, Indonesia adalah wilayah Kerajaan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda masih eksis walaupun berkedudukan di Australia waktu itu.

Persengketaan Indonesia Belanda tidak terhindarkan.

Soekarno Hatta didukung oleh seluruh rakyat termasuk Sutan Sjahrir mendukungnya, tidak mau diajak Tan Malaka menggantikan kedudukan Soekarno Hatta.

Di dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda, strategi Soekarno Hatta, ialah melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK. PRB (6). Namun pada permulaannya Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta (2). Karena Soekarno Hatta kolaborator dengan Jepang.

Sjahrir non-kolaborator, di mata Belanda Sjahrir bersih. Hubungan Sjahrir dengan Belanda dan juga dengan Inggris baik, tidak ada masalah.

Karena desakan SEAC, Sjahrir berupaya mengganti bentuk Pemerintahan Presidensial menjadi Kabinet Parlementair. Dengan jalan mengusulkan kepada Presiden, agar KNIP diberi tugas legislatif.

Hatta dan Soekarno setuju, maka ditetapkan maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. UUD 45 pasal IV. Aturan Peralihan dirubah demi untuk bisa membuka perundingan. Sutan Sjahrir ingin menjadi Perdana Menteri. Soekarno Hatta mendorongnya, karena akan ditugasi melaksanakan perundingan. Sjahrir berbeda dengan Tan Malaka, yang ingin menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda melalui peperangan. Sedangkan Sjahrir ingin mengadakan perundingan, supaya rakyat tidak menjadi korban (6). Hal ini dimanfaatkan oleh Soekarno Hatta, di dorong supaya menjadi Perdana Menteri akan ditugasi melaksanakan diplomasi. Sjahrir pun merasa tidak mampu berunding tanpa restu dari Soekarno Hatta. Menurut Sjahrir Republik adalah Soekarno Hatta. Dan Soekarno Hatta adalah Republik.

Betapa besar kharisma Soekarno Hatta di mata rakyat Indonesia, tercermin di dalam rapat KNIP di Malang tanggal 28 Febuari 1947. Seluruh anggauta KNIP yang lama, menentang

Linggarjati, setelah Soekarno Hatta akan mundur, seluruh KNIP yang lama dan baru, mentaati kehendak Soekarno Hatta yakni menerima Linggarjati.

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak Manai Sophiaan

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak Manai Sophiaan
Umur 81 Tahun

Pelaku Sejarah, pada Tahun 1945 - 1947 dan sesudahnya.
Mantan anggota KNIP Tahun 1945, Mantan Duta Besar R.I.
di Moscow.

Wawancara dilaksanakan dirumah beliau, di jalan Taman
Wijaya Kusuma IV/No. 35 A (Komplek Dep. Kesehatan)
Jakarta pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 1996 jam 10.30
- 11.30.

Bapak Manai Sophiaan turut Rapat KNIP di Malang bulan
Februari 1947 waktu akan penandatanganan Persetujuan
Linggarjati.

WAWANCARA KHUSUS

118

Yang diwawancarai :

Nama : Bp. Manai Sophiaan
 Jabatan : Anggota KNIP M 1948
 Alamat : Taman Wijaya Kusuma IV/No 35A
 (Komplek Dep. Kesehatan) Jakarta 17690647.

Mahasiswa :

Nama : Soepardi Sariohartono
 Bidang Studi : Ilmu Sosial (S3), Pasca Sarjana UNAIR Surabaya
 Jurusan : Ilmu Politik Hubungan Internasional
 No. Mhs. : 0993114669
 Hari/tanggal : Wawancara : Selasa tg 12-3-1996 jam 10.30 - 11.30
 Tempat : Wawancara : Taman Wijaya Kusuma
 IV/No 35A Jakarta.

Hasil Wawancara :

di rekaman

Jakarta 12 Maret 1996

Yang diwawancarai

ttd

(Bp. Manai Sophiaan)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
 PROGRAM PASCASARJANA

JL. DIHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 ☎ (031) 510076, 5350170 FAX. (031) 510076

Nomor : 2672 /PT.03.H4.PPs/N/1995
 Lamp :
 Hal : Izin untuk melaksanakan penelitian

17 Oktober 1995

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 Propinsi Jawa Timur
 U.p. Direktorat Sosial Politik
 Jl. Pemuda No. 5
 Surabaya.

Guna penulisan penelitian untuk Disertasi peserta program
 Doktor angkatan tahun 1993/1994 Program Pascasarjana
 Universitas Airlangga,

nama : Soepardi Sariohartono, Drs.
 nim : 097311466 / D
 judul : MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X
 TANGGAL 16 OKTOBER 1945 DAN MAKLUMAT
 POLITIK PEMERINTAH R.I. TANGGAL 1
 NOVEMBER 1945, SEBAGAI TITIK TOLAK
 DIPLOMASI INDONESIA DIDALAM MENGADAKAN
 PERJANJIAN LINGGAR JATI.

pembimbing ketua : Prof.Dr.Idris.A.Kesuma

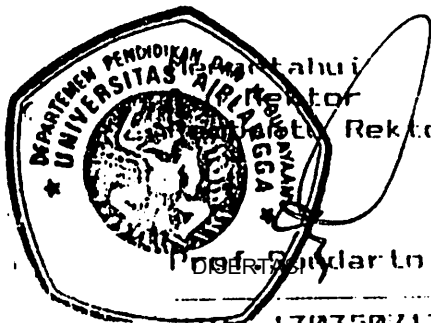
maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan
 rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk :

I. Mengadakan wawan cara khusus dengan para tokoh yang
 sekarang masih ada antara lain :

1. Dr.H.Roeslan Abdoelgani di Jakarta.
2. Mr.Soenarjo, mantan Menteri Perdagangan di Jakarta.
3. H.A.H.Nasution Mantan Kepala Staf A.D. di Jakarta.
4. B.M.Diah Mantan Menteri Penerangan di Jakarta.
5. Manai Sophiaan, Pejoang di Jakarta dan yang lainnya.

II. Menemui Pimpinan Perpustakaan Negara dan Perpustakaan yang
 lain di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Kota-kota lainnya.

Demikian dan atas bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Soedarso, dr. DIMAN, Ph.D



Dr. H. Soedjono, dr.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 - 45673
SURABAYA

Surabaya 14 NOPEMBER 1995

Nomor : 072/5973/303/1995

Lampiran :

Perihal : Penelitian / Survey /
Research.

Kepada :

- Yth. 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DI JAKARTA
2. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA
3. GUBERNUR KDH TK I JAWA BARAT
DI BANDUNG

U.P. KADIT SOSPOL.

Menunjuk Surat DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR.

tanggal : 17 OKTOBER 1995

nomor : 2672/PT.03.H4.PP/N/1995.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SOEPARDI SARIOHARTONO, Drs.
Alamat : d/a JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA.
Pekerjaan : PROGRAM PASCASARJANA UNAIR
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945
DAN MAKLUMAT POLITIK TANGGAL 1 NOPEMBER 1945 SEBAGAI TITIK
TOLAK DIPLOMASI INDONESIA DI DALAM MENGADAKAN PERJANJIAN -
LINGGARJATI ".

Waktu : 3 (TIGA) BULAN.

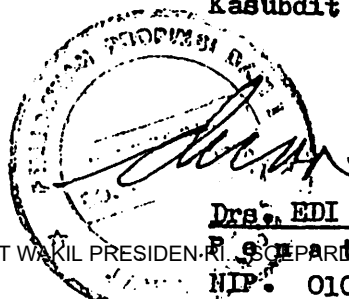
Lokasi : DKI, DIY, JAWA BARAT.

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
didaerah setempat.

Demikian. harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik
u**b**
Kasubdit Tibum



REMBUSAN :

1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
3. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Jatim
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Sdr. DIRJEN SOSPOL, DEP DAGRI JAKARTA.

KAITAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. SOEPARDI SARIOHARTONO

NIP. 010077471

III. Hasil Wawancara Khusus Dengan Bapak Manai Sophiaan
Anggauta KNIP tahun 1945, Duta Besar di Uni Soviet.
(Pelaksana Sejarah tahun 1945 - 1947). Diambil dari
Rekaman.

A. Prosesnya.

Pada tanggal 29 Januari 1996 Peneliti kirim surat ke Jakarta, mohon waktu kepada Bapak Manai Sophiaan (81 tahun) untuk berwawancara.

Tanggal 9 Maret 1996 mendapat jawaban agar menemui beliau hari selasa tanggal 12 Maret 1996 jam 10.00 pagi. Tanggal 9 Maret 1996 itu Peneliti sudah berada di Jakarta.

Hari selasa tanggal 12 Maret 1996 Peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Manai Sophiaan, di rumah beliau jalan Taman Wijaya Kusuma IV/no. 35A Jakarta, mulai jam 10.30 Wib.

B. Hasil Wawancara Diambil Dari Rekaman.

Peneliti : Selamat siang Pak ?

Saya mau bertanya, peran Bung Karno pada permulaan revolusi 1945 itu seberapa jauh Pak ?

Bapak Manai Sophiaan : Bung Karno tidak berperan mulai 1945 saja tapi sebelumnya. Sebelumnya di dalam pergerakan nasional beliau sudah mencita-

citakan Indonesia merdeka. Waktu datangnya Jepang, orang Jepang mendatangi Soekarno di Padang, adalah orang Jepang yang bernama Takeyata. Bung Karno diharap mau bicara dengan Panglima orang Jepang.

Orang Jepang minta agar Soekarno membantu Jepang. Bung Karno bilang : kalau untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia saya bersedia.

Mulai itu saja sudah mulai di-intel. kebebasan Soekarno. Maunya Jepang, harus membantu Jepang dulu, baru nanti bicara kemerdekaan.

Bung Karno bilang : "Yang penting Indonesia merdeka dulu. Yang lain-lain, apa saya harus mati dalam keadaan sekarang ini, tidak peduli."

Kemudian hari saya (Manai Sophiaan) datang kepada Bung Karno, tahun 1943 belum proklamasi. Saya tanya pada Bung Karno, apa yang kita perbuat sekarang ini.

Bung Karno bilang : perbuatlah segalanya untuk Indonesia merdeka. Jadi kalau orang Jepang akan kerjasama ya boleh kerjasama.

tapi jangan lupa untuk Indonesia merdeka. Jadi apa saja you kerjakan pada waktu ini. jaman Jepang itu tujuannya paling utama ialah Indonesia merdeka. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, begitu. Ada orang akan revolusi, waktu Jepang kalah, Bung Karno bilang : saya setuju saja, tapi kalau kalian bikin revolusi ya silakan jangan saya. Dan para pemuda itu tidak berani juga, mereka itu hanya bisa ngomong, bergerak sendiri tidak berani, maka pemuda-pemuda itu lalu menculik Soekarno ke Rengkas Dengklok, dengan alasan katanya besok bakal terjadi pemberontakkan melawan Jepang, tapi nyatanya besoknya, ya tidak ada apa-apa di Jakarta. Yang dimaksud kelompok pemuda-pemuda itu adalah kelompok Sjahrir. Maka tanggal 16 Agustus 1945 sore Soekarno Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Waktu kembali itu Soekarno dibawa ke rumah Maeda. Maksud Bung Karno kesana, akan ambil jalan damai, mau bicara dengan Panglima Jepang yang ada disini. Disitu Bung Karno ingin mengadakan rapat dengan utusan-utusan yang datang dari daerah-daerah itu, para anggauta Dokuritzu itu.

Tapi Panglima Jepang tidak mau, harus diusahakan sendiri, bagaimana caranya. Kemudian lalu dengan bantuan Maeda. Beliau ini seorang angkatan laut Jepang yang pro dengan Kemerdekaan Indonesia. Dia sarankan, agar sekarang juga kalau ingin merdeka.

Saya (Manai Sophiaan) baca dari sumber lain ya. Katanya malam itu Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke Panglima, (Saikoosikikan) mau mengadakan gerakan secara legal. Tapi panglima tidak mau, dia bilang : saya harus serahkan kekuasaan ini kepada Sekutu. Sekarang ini kita dalam keadaan statusquo. Lantas Bung Karno pulang ke rumah Maeda. Jangan rapat ya, tapi minum teh bersama, di rumahnya Maeda. Di rumah Maeda itu Bung Karno berhasil mengundang semua orang-orang yang berada di Hotel De Sein waktu itu. Dan malam itulah direncanakan Proklamasi.

Mengenai ini banyak cerita di sana-sini siapa-siapa yang hadir disitu. Tapi pokoknya malam itu disusunlah rencana Proklamasi.

Habis dari situ Bung Karno pulang ke rumah, lantas besuk paginya itu diadakan proklamasi.

Bung Karno sudah ada di sana Bung Hatta belum ada. Baru kemudian Bung Hatta datang. Sjahrir tidak datang ke sana. Lalu diadakanlah proklamasi.

Peneliti : Indonesia akhirnya konflik dengan Belanda. Yang saya tanyakan, apakah Bung Karno yakin bahwa penyelesaiannya yang paling baik adalah melalui diplomasi ? Lalu keluar maklumat No. X itu Pak ?

Bapak Manai Sophiaan : Mengenai maklumat No. X itu ceritanya begini. Pada waktu itu, orang Belanda percaya pada Bung Sjahrir.

Sjahrir ini dianggap orang baik, dia pernah tinggal di negeri Belanda. Kalau istrinya orang Belanda, itu sudah lama tidak ada di Indonesia. Waktu itu orang melihat kalau dengan Sjahrir, itu dipercaya oleh orang-orang Belanda. Waktu itu, ada pembicaraan antara Bung Karno dan Bung Hatta, mengenai Sjahrir. Bung Hatta yang menangani, Bung Karno keluar kata : nah Bung Hatta yang memimpin sidang KNIP, lantas keluar Maklumat No. X itu.

Karena Bung Karno Bung Hatta dianggap oleh Belanda, kolaborator dengan Jepang. Belanda

tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta. Pokoknya Bung Sjahrir berunding dengan Belanda masih bisa.

Tapi setelah Belanda melihat pengaruhnya Bung Karno apa yang terjadi di Semarang, di Surabaya, Belanda mulai pendiriannya lain. Malah Inggris sama Belanda berubah fikirannya itu. Bung Karno ini punya pengaruh yang besar. Belanda dan Inggris, mulai menyetujui perundingan tetapi mereka percaya kepada Sjahrir. Sjahrir mulai mengadakan perundingan. Bung Karno juga memperbolehkan Sjahrir berunding. Walaupun partai-partai politik menentang. Masyumi, PNI menentang Linggarjati itu. Waktu itu PSI lama, PSI lama itu kan terdiri dari Partai Buruh, PKI, dari FBI, lain dengan PSI baru, masih mengerjakan Linggarjati.

Peneliti : Tapi waktu akan menanda tangani Linggarjati KNIP kan tidak setuju ya Pak ?

Bapak Manai Sophiaan : KNIP tidak setuju, sudah diputuskan. saya turut memutuskan itu. Waktu rapat di Malang saya ikut itu. Di Malang itu kan KNIP itu diperbaharui dengan peraturan nomor enam itu. Itu KNIP ditambah.

Tapi tambahan itu lebih banyak diberikan kepada yang pro Sjahrir, yang pro perundingan. Masyumi, PNI ditambah juga. Kita tidak setuju perundingan. Masyumi juga tidak setuju. Lantas setelah Bung Karno bicarabicara dengan Bung Hatta, kemudian Bung Hatta pidato waktu itu, kalau tidak setuju dengan ini carilah pemimpin yang lain. Bung Karno sama Bung Hatta akan turun.

Itu dia, karena begitu tidak diadakan pemungutan suara lagi. Langsung semuanya setuju perundingan.

Peneliti : Kalau demikian pengaruh Soekarno Hatta itu begitu besar ya Pak ?. KNIP yang semula dilanda oleh pendapat yang berbeda-beda bisa langsung bersatu, karena kharisma Soekarno ya Pak ?. PNI juga manut Pak ?

Bapak Manai Sophiaan : Ya memang begitu. Walaupun dalam badan pekerja sudah ditolak Linggarjati itu. semua anggauta, bilang ya biarkan saja deh !

Peneliti : Sesudah penandatanganan Linggarjati, peran Sjahrir apa masih besar Pak ?

Bapak Manai Sophiaan : Tidak, sudah tidak berperan lagi. Peran Sjahrir hanya sampai Linggarjati itu saja.

Peneliti : Kalau begitu, Bung Karno kan ikut menghendaki
toh Pak, ditanda tangannya Linggarjati itu ?

Bapak Manai Sophiaan : Ya, ikut mendorong, agar semua setuju
Linggarjati itu. Soekarno Hatta ikut mendo-
rong keras supaya Linggarjati ditanda
tangani.

Peneliti : Kalau demikian, Soekarno Hatta sangat setuju
Linggarjati karena menurut beliau, penyele-
saan persengketaan Indonesia Belanda, akan
berhasil dengan baik, kalau melalui perunding-
an di bawah pengawasan PBB, begitu ya Pak ?

Bapak Manai Sophiaan : Ya, ya memang begitu. Bung Karno
menghindari supaya tidak terus-menerus ter-
jadi pertempuran.

Peneliti : Apa benar Pak, waktu itu Inggris mulai men-
dorong supaya Belanda mengadakan perundingan
dengan Indonesia ?

Bapak Manai Sophiaan : Ya betul, malah tidak hanya Inggris
yang menekan Belanda supaya mau berunding
dengan Indonesia, tapi juga Amerika Serikat.

Peneliti : Peran Sjahrir itu menonjol hanya waktu perun-
dingan Linggarjati saja ya Pak ?

Bapak Manai Sophiaan : Ya, memang begitu. malahan Sjahrir
ini kalau dibanding dengan Bung Karno dia itu

tidak ada pengaruh terhadap rakyat. Yang punya pengaruh itu Bung Karno. Bung Hatta sendiri agak tidak begitu besar pengaruhnya. Jadi sebenarnya yang sangat besar pengaruhnya itu adalah Bung Karno.

Sjahrir ini ditugasi oleh Bung Karno, jadi dia berunding itu atas perintah Bung Karno. Jadi berperan sebagai pelaksana, bukan yang berinisiatif.

Sjahrir itu ditugasi begitu karena dia yang bisa diterima oleh Belanda.

Wawancara selesai jam 11.30 Wib.

C. Data-data penting yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Bapak Manai Sophiaan (pelaku sejarah tahun 1945 - 1947).

1. Bung Karno mencita-citakan kemerdekaan jauh sebelum proklamasi. Waktu Jepang datang, didatangi orang Jepang, minta bantuan Soekarno.

Jawabnya : Kalau bicara masalah kemerdekaan o.k.

Pada tahun 1943 waktu Jepang, Bung Karno berpendirian.

jaman Jepang dipergunakan sebaik-baiknya untuk upayakan kemerdekaan Indonesia.

Data : Soekarno adalah agen yang memproduksi struktur. Menentukan masa depan bangsa Indonesia.

2. Tanggal 16 Agustus 1945 sore Bung Karno Bung Hatta rapat di rumah Maeda merencanakan proklamasi besok paginya.

Data : Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, setelah diperhitungkan secara akurat untung dan ruginya bagi bangsa Indonesia.

3. Sebelum rapat di rumah Maeda tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno menemui Saikoo-Sikikan, melapor akan mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari daerah-daerah guna membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan. Tetapi panglima militer Jepang tidak setuju, dia berpegang pada statusquo, akan menyerahkan Indonesia kepada sekutu.

Data : Soekarno adalah seorang demokrat yang tangguh. Di dalam situasi apapun ingin menegakkan demokrasi.

4. Orang Belanda percaya pada Sjahrir, karena beliau lama di negeri Belanda. Pokoknya banyak orang melihat, kalau Sjahrir yang berunding dengan Belanda, masih bisa. Belanda mula-mula tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, karena kedua-duanya adalah kolaborator. Kalau dengan Sjahrir bisa. Tapi karena melihat pengaruh Soekarno di Semarang, Surabaya dan Ambarawa dan lain-lain peristiwa, maka Belanda mulai berpendirian lain.

Data : Dengan adanya, peristiwa Semarang, Ambarawa dan Surabaya, merubah jalan pikiran Belanda dan Inggris. Bahwa perundingan antara Belanda-Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan wibawa Soekarno Hatta.

Sjahrir hanya merupakan petugas di dalam perundingan. tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan mesti dari Soekarno-Hatta.

5. Bung Karno mendorong agar Sjahrir melaksanakan perundingan, karena Sjahrir dekat dengan Belanda dan Inggris.

Data : Soekarno Hatta yakin bahwa penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda, yang sebaik-baiknya adalah melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan PBB. Walaupun waktu itu PNI dan Masyumi menentanginya.

6. Didalam rapat KNIP di Malang anggauta KNIP ditambah anggautanya dengan PenPres no. 6/1946. KNIP menolak Linggarjati juga menolak PenPres no. 6/1946. Tapi setelah Hatta dan Soekarno bersepakat, agar Hatta pidato di muka sidang, kalau menolak PenPres no. 6/1946 Soekarno-Hatta akan mundur, maka seluruh anggauta KNIP lama dan baru menyetujui Linggarjati dan mendukung pemerintah untuk meneruskan perundingan.

Data : Soekarno-Hatta waktu itu benar-benar agen yang mampu memproduksi struktur, mampu mempersatukan bangsa. mampu memberikan obor kepada rakyat didalam situasi yang sangat kritis.

Soekarno-Hatta mampu mengarahkan bangsa Indonesia bergerak menuju ke mahligai kebahagiaan bersama dalam Indonesia merdeka, Indonesia merdeka yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Karena kharisma beliau adalah bangsa Indonesia diantar kearah kemerdekaan yang abadi.

7. Soekarno-Hatta berkeyakinan bahwa persengketaan Indonesia-Belanda bisa diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya dan secara efisien, hanya dengan melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan Dewan Keamanan PBB.

Maka Linggarjati dipandang oleh beliau berdua sebagai modal awal untuk mengupayakan ditegakkannya eksistensi negara R.I.. Linggarjati harus diterima oleh KNIP. Didalam kenyataannya ditolak oleh KNIP yang lama. Diupayakan ditambah anggota dengan PenPres no. 6/1946, tetapi PenPres juga ditolak. Maka Soekarno-Hatta yang mengetahui bahwa seluruh rakyat Indonesia berdiri dibelakang beliau berdua memberi alternatif kepada KNIP dan berhasil.

Data : Soekarno-Hatta tidak saja merupakan agen yang memproduksi struktur melainkan juga mampu mengarahkan bangsa Indonesia agar bersatu-padu menuju ke struktur baru itu yakni Indonesia merdeka yang jaya. Beliau berdua juga berani bertindak dengan resiko apapun guna mengarahkan bangsanya mengikuti struktur baru menurut konsep

Soekarno-Hatta, yakni eksisnya negara Republik Indonesia merdeka.

Dan Rakyat Indonesia benar-benar mentaati dan mendukung policy Soekarno-Hatta waktu itu.

8. Sjahrir melaksanakan perundingan dengan Belanda dengan restu Bung Karno, sebab yang berpengaruh adalah Bung Karno. Malahan Bung Hatta saja bilang bahwa hanya Soekarno orang satu-satunya yang bisa mengarahkan revolusi waktu itu. Sjahrir pengaruhnya pada rakyat sangat kecil.
- Data : Soekarno-Hatta adalah tokoh yang mempunyai pengaruh besar sekali terhadap rakyat. Karena Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta, maka beliau berdua menugaskan Sjahrir untuk melaksanakan perundingan. Jadi Sjahrir itu hanya petugas, pimpinan umum dalam perundingan itu adalah Soekarno-Hatta. Policy umum dipegang oleh Soekarno-Hatta, yang menugaskan Sjahrir untuk melaksanakan perundingan, karena Sjahrir yang dipercayai oleh Belanda.

D. Makna (meaning) dari data-data tersebut diatas

Bung Karno mencita-citakan Indonesia merdeka sejak masa pergerakan jaman Belanda. Waktu Jepang datang, sewaktu didatangi orang jepang untuk berbicara dengan komandan ten-

tara jepang, Bung Karno bertanya, bicara untuk apa kalau bicara soal kemerdekaan Indonesia, O.K.

Bung Karno ingin memanfaatkan jaman Jepang untuk Indonesia merdeka, atas desakan para pemuda agar herevolusi melawan Jepang. Bung Karno tidak setuju, sebab akibatnya akan fatal. Barang siapa tidak setia kepada Jepang, dibunuh dengan sangat kejam. Itulah sebabnya Soekarno-Hatta pada jaman Jepang ber-strategi kerja sama dengan Jepang, tapi semuanya dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka.

Waktu Jepang menyerah tanggal 15-8-1945 Bung Karno-Bung Hatta, mempersiapkan proklamasi kemerdekaan di rumah Maeda. Maksud Bung Karno semula akan bicara dengan Saikoo Sikikan, akan mengadakan rapat dengan utusan-utusan dari daerah untuk membicarakan kemerdekaan. Saikoo Sikikan tidak bisa, Saya pegang statusquo, Saya akan serahkan kekuasaan Indonesia kepada sekutu. Bung Karno lalu pulang dan rapat di rumah Maeda itu. Bung Karno adalah seorang demokrat yang teguh.

Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17-8-1945 dengan selamat. Tetapi begitu negara R.I. diproklamasikan, langsung berhadapan dengan musuh yakni Belanda yang akan menyerang negara baru itu. Karena Bung Karno-Bung Hatta adalah seorang demokrat, menghadapi persengketaan Indonesia-Belanda pun tetap berjiwa demokratis.

Persengketaan Indonesia-Belanda memang tidak bisa dielakkan. Didalam menghadapi persengketaan Indonesia-Belanda, konsep Soekarno-Hatta ialah melalui perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan DK PBB.

Soekarno-Hatta sebagai pemimpin Bangsa Indonesia mengambil langkah yang tepat dalam rangka mempertahankan eksistensi negara proklamasi. Strategi Soekarno-Hatta tetap, yakni menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda melalui jalan perundingan dengan Belanda. Tetapi strategi Soekarno-Hatta ini dihambat oleh sikap Belanda yang tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta. Karena soal kolaborator. Soekarno-Hatta tetap mencari jalan agar strategi perundingan dengan Belanda bisa telaksana.

Pada waktu itu, kebetulan sekali, Sutan Sjahrir, yang ditekan oleh Inggris (AFNEI) agar merubah sistem pemerintah Presidensial menjadi kabinet Parlementair. Waktu itu Sjahrir dipercayai oleh Belanda dan Inggris, maka Sjahrir mempelopori gerakan di KNIP waktu itu, untuk mengadakan petisi, diajukan kepada Soekarno Hatta, agar sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk berdasarkan UUD ini, agar KNIP diberi kekuasaan legislatif. Dan Sjahrir berkeinginan menjadi Perdana Menteri.

Situasi ini dimanfaatkan oleh Soekarno Hatta. usul KNIP, petisi itu disetujui oleh Soekarno Hatta, maka dalam

sidang KNIP tanggal 16-10-1945 di Jakarta, ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden no X tanggal 16-10-1945 yang isinya, merubah status KNIP dari badan pembantu presiden, menjadi badan legislatif dan turut melaksanakan GBHN. Kemudian disusul dengan ketiga maklumat politik pelaksanaannya, dan berubahlah Kabinet Presidensial menjadi Parlementer. Sjahrir ingin menjadi perdana menteri. Karena Belanda dan AFNEI (Inggris) mengetahui pengaruh Soekarno di dalam pertempuran Semarang, Ambarawa dan Surabaya, maka Inggris menekan Belanda agar berunding dengan Indonesia. Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta, tetapi bersedia berunding dengan Sutan Sjahrir.

Situasi yang menguntungkan ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Soekarno Hatta mendorong Sjahrir untuk turut tampil dalam pemerintahan, malahan disetujui merubah UUD 45 dengan Maklumat X dan menyetujui Sjahrir menjadi Perdana Menteri, yang nantinya akan ditugasi untuk melaksanakan perundingan dengan Belanda. Maka terjadilah perundingan Indonesia Belanda, terkenal dengan nama "Peretujuan Linggarjati". Sjahrir sebagai delegasi Indonesia, atas instruksi dari Soekarno Hatta.

Peretujuan Linggarjati ini merupakan modal awal guna mengadakan diplomasi di bawah pengawasan PBB.

Soekarno Hatta mempertaruhkan Linggarjati ini diterima, walaupun waktu itu KNIP menentanginya.

Soekarno-Hatta bersikeras agar KNIP menyetujui Linggarjati. Karena KNIP lama menentang Linggarjati, maka anggauta KNIP ditambah dengan PenPres no 6/1946. Tetapi PenPres no.6/1946 itupun ditolak oleh KNIP. Soekarno-Hatta sadar sesadar-sadarnya bahwa gagalnya Linggarjati adalah gagal pulalah strategi diplomasi dalam rangka mempertahankan eksistensi negara Proklamasi negara R.I.

Maka waktu rapat di Malang tanggal 28-2-1947 Soekarno-Hatta memberi alternatif pada KNIP "Apakah KNIP menyetujui PenPres no. 6/1946 ataupun KNIP memilih Presiden dan Wakil Presiden yang bukan Soekarno Hatta".

Sebagai akibatnya, seluruh KNIP lama dan baru menyetujui PenPres no. 6/1946 menyetujui Linggarjati, berdiri dibelakang pemerintah (Soekarno-Hatta) menyetujui perundingan selanjutnya.

Demikian besar pengaruh Soekarno-Hatta waktu itu dan waktu sekarang, juga mampu mempersatukan rakyat di dalam situasi kritis itu.

Catatan :

1. Linggarjati ditandatangani tanggal 25 maret 1947, nantinya tanggal 21 Juli 1947 Belanda menggempur Indonesia di dalam Aksi Militer I. Tentara dan rakyat Indonesia

melawan serangan demi serangan dari Belanda, diseluruh front. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat di Indonesia. DK-PBB melihat pertempuran di Indonesia ini mengganggu perdamaian dunia, maka dari itu DK-PBB campur tangan di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda.

2. Perundingan berikutnya diadakan di kapal Renville dibawah pengawasan DK-PBB. Tercapailah strategi Soekarno-Hatta, menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda melalui perundingan dibawah pengawasan DK-PBB.
3. Perundingan demi perundingaan masih diteruskan, disusul adanya pemberontakan PKI di Madiun ± September 1948. Pemerintah R.I. mampu menumpas gerakan PKI Madiuan dalam tempo ± 3 bulan. Tetapi setelah PKI berhasil ditumpas, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerbu wilayah R.I. di dalam aksi militer ke II.
4. DK-PBB membentuk UNCI yang ditugasi mengawasi perundingan Indonesia-Belanda di negari Belanda (KMB). Sebagai hasil dari KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RIS. Ini mengandung arti, Belanda telah melepaskan Indonesia, kaitannya dengan pasal 1 Grondwet-Belanda, berarti Belanda melepaskan Indonesia sebagai tanah jajahan kerajaan Belanda.

5. Pada tanggal 15 Agustus 1950, negara RIS dilebur dirubah menjadi negara Republik Indonesia negara Kesatuan, sampai sekarang.

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak DR. (Jendral Purn) A.H. Nasution.

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak DR. (Jendral Purn) A.H. Nasution.

Pelaku Sejarah pada Tahun 1945 - 1947 dan sesudahnya. Bapak DR. (Jendral Purn) A.H. Nasution. Pelaku sejarah dibidang militer. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat.

Konsultasi dilakukan pada 9 Maret 1996. di jalan Tengku Umar No. 40 Jakarta. Dalam konsultasi itu, peneliti diharap membaca buku-buku beliau. Disitu peneliti akan memperoleh informasi mengenai peran dan pendapat beliau lebih lengkap.

Peneliti melaksanakan petunjuk beliau, dan peneliti memperoleh data-data yang penting dari buku beliau itu.

Bapak DR. (Jendral Purn) A.H. Nasution adalah seorang Jendral yang juga pendidik, beliau lulusan H.I.K. (Sekolah Guru) dan pernah menjadi guru.

WAWANCARA KHUSUS

148

Yang diwawancarai :

Nama : DR. A. H. NASUTION
 Jabatan : ~
 Alamat : Jl. Tengku-Umar no 40 Jakarta.
 Telp 310 8070

Mahasiswa :

Nama : Soepardi Sariohartono
 Bidang Studi : Ilmu Sosial (S3), Pasca Sarjana UNAIR Surabaya
 Jurusan : Ilmu Politik Hubungan Internasional
 No. Mhs. : 0993114669
 Hari/tanggal : Wawancara : - 9 - Maret 1996.
 Tempat : Wawancara : Jl. Tengku Umar no 40 Jakarta

Hasil Wawancara :

Atas petunjuk Bp DR A H NASUTION
 Peneliti mengambil data wawancara
 dari Buku 2 Bp DR A H. Nasution.

Jakarta... 9 Maret 1996

Yang diwawancarai

ttd.

(DR. A. H. NASUTION)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. DIHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 ☎ (031) 510076, 5350170 FAX. (031) 510076

Nomor : 2672 /PT.03.II4.PP6/N/1995
 Lamp :
 Hal : Izin untuk melaksanakan penelitian

17 Oktober 1995

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 Propinsi Jawa Timur
 U.p. Direktorat Sosial Politik
 Jl. Pemuda No. 5
 Surabaya.

Guna penulisan penelitian untuk Disertasi peserta program
 Doktor angkatan tahun 1993/1994 Program Pascasarjana
 Universitas Airlangga,

nama : Soepardi Sarihartono, Drs.
 nim : 099311466 / D
 judul : MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X
 TANGGAL 16 OKTOBER 1945 DAN MAKLUMAT
 POLITIK PEMERINTAH R.I. TANGGAL 1
 NOVEMBER 1945, SEBAGAI TITIK TOLAK
 DIPLOMASI INDONESIA DIDALAM MENGADAKAN
 PERJANJIAN LINGGAR JATI.

pembimbing ketua : Prof. Dr. Idris. A. Kesuma

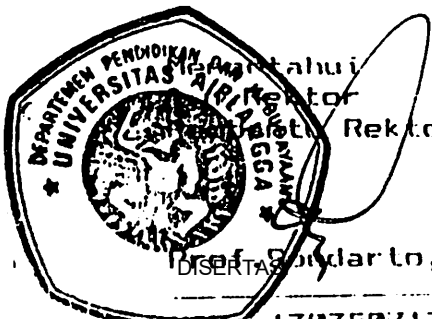
maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan
 rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk :

I. Mengadakan wawan cara khusus dengan para tokoh yang
 sekarang masih ada antara lain :

1. Dr. H. Roeslan Abdoelgani di Jakarta.
2. Mr. Soenarjo, mantan Menteri Perdagangan di Jakarta.
3. H. A. H. Nasution Mantan Kepala Staf A. D. di Jakarta.
4. B. M. Diah Mantan Menteri Penerangan di Jakarta.
5. Manai Sophiaan, Pejoang di Jakarta dan yang lainnya.

II. Menemui Pimpinan Perpustakaan Negara dan Perpustakaan yang
 lain di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Kota-kota lainnya.

Demikian dan atas bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Soedarso, dr. D. I. M. Ph. D.



Prof. Dr. H. Soedijono, dr.

IB. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIR JAWA TIMUR
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 - 45673
SURABAYA

Surabaya 14 NOPEMBER 1995

Nomor : 072/5973/303/1995

Lampiran :

Perihal : Penelitian / Survey /
Research.

Kepada :

- Yth. 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DI JAKARTA
2. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA
3. GUBERNUR KDH TK I JAWA BARAT
DI BANDUNG

U.P. KADIT SOSPOL.

Menunjuk Surat DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR.

tanggal : 17 OKTOBER 1995

nomor : 2672/PT.03.H4.PP8/N/1995.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SOEPARDI SARIOHARTONO, Drs.

Alamat : d/a JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA.

Pekerjaan : PROGRAM PASCASARJANA UNAIR

Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945
DAN MAKLUMAT POLITIK TANGGAL 1 NOPEMBER 1945 SEBAGAI TITIK
TOLAK DIPLOMASI INDONESIA DI DALAM MENGADAKAN PERJANJIAN -
LINGGARJATI ".

Waktu : 3 (TIGA) BULAN.

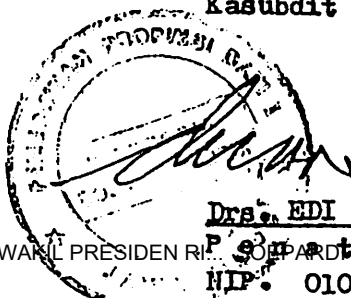
Lokasi : DKI, DIY, JAWA BARAT.

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
didaerah setempat.

Demikian. harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik
u/b
Kasubdit Tibum



Drs. EDI PURWINARTO

P. SOEPARDI SARIOHARTONO

NIP. 010077471

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
3. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Jatim
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Sdr. DIREKTORAT SOSPOL. DEP DAGRI JAKARTA.

KAITAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN RI. SOEPARDI SARIOHARTONO

HASIL PENELITIAN DENGAN WAWANCARA KHUSUS

IV. DENGAN BAPAK DR. A.H. NASUTION PENGUASA DI BIDANG MILITER, TERMASUK PELAKU PENTING DI DALAM REVOLUSI TAHUN 1945-1947, MALAHAN BERLANJUT PADA TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA.

A. Proses Upaya Pendekatan

1. Dengan surat dari Bapak Direktur Pasca Sarjana Unair tanggal 17-10-1995 No. 2672/P.T.03.HY.PPs/N/1995 dan surat pengantar dari Gubernur Kdh Tk. I Jawa Timur yang ditujukan pada Gubernur Kdh Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tanggal 14 November 1995 No. 072/5973/303/1995, Peneliti pada tanggal 29 Januari 1996 mengajukan permohonan waktu untuk wawancara khusus kepada Bapak DR. A.H. Nasution, disertai satu berkas pertanyaan yang relevan dengan Penelitian ini, dialamatkan ke rumah beliau Jl. Tengku Umar No. 40 Jakarta Telpon No. 3108070.
2. Karena lama tidak ada kabar, maka pada tanggal 28 Febuari 1996, Peneliti menghubungi beliau dengan telpon. mendapat jawaban bahwa surat itu belum sampai.
3. Tanggal 29 Febuari 1996, peneliti mengirim ulang surat yang sama. Tanggal 4 Maret 1996 Peneliti menghubungi lagi, mendapat jawaban bahwa surat sudah sampai Jakarta.

4. Tanggal 9 Maret 1996 Peneliti pergi ke Jakarta.
5. Tanggal 11 Maret 1996 Peneliti konsultasi dengan beliau:

Bapak DR. A.H. Nasution menghimbau kepada Peneliti untuk mendapatkan informasi tentang peran dan pendapat Bp. DR. A.H. Nasution mengenai kejadian-kejadian kenegaraan tahun 1945-1947, supaya Peneliti membaca buku-buku beliau. Itu lebih jelas dan lebih lengkap.

Atas himbauan di atas, Peneliti mengambil data ini dari buku-buku Bapak DR. A.H. Nasution yang berjudul "Memenuhi Panggilan Tugas" Jilid I, II, III.

B. Hasil Penelitian diambil dari buku-buku karya tulisan Bp. DR. A.H. Nasution.

Atas anjuran Bapak DR. A.H. Nasution, Peneliti mengambil data-data dari buku tulisan beliau.

a. Hari-hari sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945

Keyakinan kebangsaan pada rakyat Indonesia, yang berkembang pesat sejak kebangunan nasional awal abad 20 ini, di pulau Jawa dipupuk pula oleh cerita Jayabaya, yang diartikan bahwa Jepang hanya sebentar saja berkuasa di Indonesia. "Seumur Jagung" berkuasa.

Perkembangan berikutnya, keadaan umum yang sangat menekan di segala bidang kehidupan rakyat, serta kemandangan untuk bertindak baik dalam arti semangat berorganisasi dan latihan, waktu itu mendapat situasi yang sangat tepat. Yakni adanya kekosongan semangat tentara Jepang dan adanya kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Karena waktu itu Sekutu belum mendarat.²⁹⁾

Hal ini disebabkan karena Sekutu yang bertugas di Indonesia kekurangan pasukan.

Belanda sendiri belum tersedia tentaranya, kecuali hanya beberapa kompi di Morotai. Indonesia masuk daerah pendudukan Inggris. Akan tetapi tentara Inggris yang baru saja melakukan Perang Dunia II, maka semangat mereka lemah. Mereka lelah dan ingin pulang ke tempat mereka masing-masing.

Juga pasukan India dan Pakistan yang menyertai tentara Inggris, mendekati saat kemerdekaan negara masing-masing, maka kebanyakan mereka bersimpati kepada perjuangan Indonesia.

Di dalam situasi kekosongan kekuasaan itu, maka Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia

29) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 1 hal. 116. Penerbit : C.V. Haji Massagung, Jakarta 1989

pada tanggal 17-8-1945. Sesudah itu di mana-mana rakyat langsung dengan spontanitas merebut kekuasaan dan menyatakan bahwa setiap bangunan dan harta penguasa menjadi "Milik Republik".

Barisan-barisan pemuda yang telah dilatih di kantor-kantor, pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan dan lain-lain, menjadi kekuatan fisik dalam mempertahankan negara proklamasi, yang telah diproklamasikan oleh Soekarno Hatta. Mereka menurunkan bendera Jepang di mana-mana dan mengibarkan bendera merah putih. Menyingkirkan pejabat-pejabat Jepang dan mendudukkan pejabat senior Indonesia di kursi pimpinan.

Soekarno Hatta cepat meresmikan UUD 45. menyusun kabinet, mengangkat para Gubernur dan lain-lain pejabat daerah. Menginstruksikan adanya kegiatan rakyat yang teratur dalam wadah KNI (Komite Nasional Indonesia), dan BKR (Badan Keamanan Rakyat).³⁰⁾

Pada tanggal 18-8-1945 rapat PPKI ditetapkanlah UUD 45, memilih Presiden dan Wakil Presiden. dan membentuk KNIP sebagai pembantu presiden yakni untuk keorganisasian gerakan rakyat dan untuk keamanan rakyat atas dasar swadaya dengan demokratisasi struktur politik.

30) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas
hal. 166.

Pada situasi yang genting itu "badan-badan rakyat" inilah yang bertindak melaksanakan isi proklamasi. mengoper kekuasaan, menurut tempat, membentuk badan-badan yang diperlukan dan sebagainya.

Disayangkan waktu itu tidak segera diadakan tindakan militer. Semestinya PETA dan HEIHO segera ditetapkan sebagai Tentara Nasional Indonesia.

Dalam pidato-pidato Presiden dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya selalu menekankan "disiplin nasional". "perjuangan diplomasi" dan "jangan bertindak sendiri-sendiri".

Maka logislah bahwa Jendral Mac. Arthur dan Laksamana Louis Mountbatten segera memerintahkan kepada Panglima-Panglima Jepang untuk menjamin timbang terima serta peralatan yang utuh.

Pihak Belanda segera mengusahakan dan memperoleh jaminan-jaminan dari Pemerintah Inggris di London, untuk terjaminnya "pengoperan Indonesia" dan untuk ikut sertanya NICA (Netherland Indie Civil Administration) dengan tentara Sekutu. Sedangkan para interniran Belanda segera menyusun dan mempersenjatai diri, yang secara diam-diam mendahului pemulihan kekuasaan Belanda di Indonesia.³¹⁾

31) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas hal. 118.

Pada umumnya keadaan itu berlaku pada waktu sebelum Tentara Inggris mendarat di kota-kota besar di Jawa. Dalam keadaan vacuum yang strategis itu, Pimpinan Nasional kita memanfaatkan sepenuhnya waktu itu di bidang "politik" dan "administrasi" tapi tidak memanfaatkan di bidang militer. Terbukti dalam kabinet I, kursi Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan tetap lowong sampai Oktober 1945. Pada hal waktu itu terdapat 55 batalion PETA di Jawa.³²⁾

Karena bidang militer tidak diperhatikan waktu itu, maka di bidang kepemudaan dibentuklah organisasi pemuda. Pemuda R.I. (PRI) di Surabaya, Jakarta dan kota-kota lain. Sangat disayangkan bahwa organisasi pemuda ini dioper oleh satu golongan saja yakni Pemuda Sosialis Indonesia (Persindo). Setelah itu timbul badan-badan bersenjata seperti Barisan API, Pasukan Istimewa, Pemberontak dan lain sebagainya.

Di sisi lain dapat dicatat bahwa keadaan internasional setelah proklamasi ternyata pada umumnya adalah positif bagi Republik Indonesia. Bukan saja karena telah adanya Piagam Atlantic, Atlantic Charter mengenai self

32) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas halaman 120.

determination yang telah diikrarkan oleh Amerika dan Inggris, melainkan pula sikap Amerika, Inggris dan Australia yang pihak militernya terlibat dalam masalah Indonesia, sikap negara-negara tersebut menguntungkan pihak Indonesia. Seperti misalnya, Belanda harus menghilangkan tanda-tanda kendaraan yang berasal dari Amerika, yang digunakan di Indonesia. Militer Belanda bekas tawanan yang dilatih oleh Amerika di Filipina, diharuskan mengembalikan semua peralatan yang telah ada pada mereka. Pula Amerika Serikat membatalkan kontrak penjualan 25.000 pucuk senjata yang berada di gudang-gudang Irian Timur. Juga Amerika Serikat melarang Mountbatten menggunakan kapal-kapal Amerika untuk mengangkut pasukan dan peralatan Tentara Belanda yang menuju ke Indonesia.³³⁾

Inggris pun (dengan pemerintahan Partai Buruhnya) condong menyokong negara Republik Indonesia. Begitu pula Australia, yang dipimpin oleh Partai Buruh, menyokong perjuangan R.I. Bahkan Pemerintah Australia waktu itu membiarkan saja kapal-kapal Belanda yang diboikot oleh buruh-buruh Australia di pelabuhan-pelabuhannya. Dan Belanda waktu itu sangat tergantung pada Australia.

33) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas halaman 125.

Inggris dan Amerika. Sebagian kekuatan militer Belanda datang dari Australia. Pasukan-pasukan Belanda di Eropa Barat, termasuk negeri Belanda, sangat memerlukan bantuan dari Amerika (Marshall Plan).

Jika hal-hal tersebut di atas dialami, maka memanglah dapat dimengerti bahwa Diplomasi amatlah penting bagi perjuangan R.I. yang mengupayakan pengakuan, recognition oleh negara-negara di dunia internasional.³⁴⁾

Inggris dalam upaya menjaga perdamaian di Libia, Afrika Utara sampai Pasific Barat mengalami kesulitan karena kekurangan pasukan-pasukan. Maka dari itu Inggris berupaya membatasi beban militernya, menurut tempat dan waktu, walaupun Inggris tetap mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia.

Tentara Jepang tidak bisa diandalkan, karena mereka seakan-akan "tidak berjiwa" setelah kapitulasi. Belanda sendiri memerlukan waktu dan "dana" untuk menyusun kekuatan militer. Dan memang pihak Inggris menjamin akan menjaga status quo sampai Belanda mempunyai cukup pasukan.

Dalam pada itu Inggris pun menyuruh Belanda supaya berunding dengan Indonesia, dengan R.I.

34) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas hal. 126.

Tetapi para pembesar R.I. di mata Van Mook di-pandang sekedar sebagai "boneka-boneka" dan kolaborator-kolaborator Jepang. Maka dari itu pada tahap permulaan Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta, kolaborator-kolaborator Jepang itu. Malahan Gubernur Jendral Tjarda van Starckenborg staatshouder, menuntut pulih lebih dulu keadaan sebelum perang, barulah berbicara tentang pemberian secara berangsur-angsur pemerintahan sendiri.

Memperhatikan uraian di atas, memang sejak semula sejarah nasional kita itu dari waktu ke waktu menghadapi masalah-masalah dan tantangan-tantangan terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Sehingga diperlukan visi dan identifikasi persoalan untuk mencari jalan keluar atau menentukan rumusan dan pembahasan menyeluruh yang oleh rakyat banyak di indentifikasikan sebagai cetusan dan rumusan harapannya, sehingga didukung dengan spontan.³⁵⁾

b. Masa-masa setelah Inggris mendarat.

Pada tanggal 29 September 1945 "Afnei" mendarat di kota-kota besar di Indonesia.

Pada tanggal 28 September 1945 Panglima Besar Jendral Christison menyatakan di Jakarta, bahwa beliau

 35) A.H. Nasition, Memenuhi Panggilan Tugas
 hal. 126.

akan minta pejabat-pejabat R.I. untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan akan mempertanggungjawabkannya atas pemerintahan di daerah-daerah yang dikontrol oleh R.I.

Atas pernyataan Jendral Christison ini pemerintah negeri Belanda dan juga Van Mook mengadakan reaksi keras. Sebab dengan pernyataan itu berarti terkandung arti bahwa tentara sekutu mengakui negara R.I. secara de facto.³⁶⁾

Di mata Den Haag, R.I. adalah bikinan Jepang, yang fasis militeris. Dan Logeman bekas guru besar di Recht Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta, tidak bersedia urusan dengan Presiden Soekarno, yang dianggap tokoh kolaborator, seperti tokoh-tokoh NAZI Belanda, juga mestinya dihukum. Tokoh sipil orang Hindia Belanda telah biasa melihat pergerakan nasional di Indonesia dan meremehkannya, pergerakan itu tidak ada apa-apanya.

Dalam menghadapi desakan dari Panglima Besar Inggris, agar Belanda berunding dengan Republik. Van Mook menjawab "tidak".

Menteri Logeman pada 5 Oktober 1945 dalam pidato radio juga menolak untuk berunding dengan Republik. Menurutnya mengadakan perundingan dengan gerakan Soekarno adalah "onwaardig" (tidak bermartabat) dan "onvruchtbaar" (tidak ada gunanya).

36) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas
hal. 128.

Di dalam surat-suratnya kepada menteri-menteri Belanda, Logeman mengatakan, bahwa bagaimanapun, tidak bisa diakui pemerintah Soekarno itu. Dan tidak boleh diadakan kontak dengan pribadi Soekarno. Katanya kontak demikian akan melanggar kehormatan suatu pemerintahan.

Semua ini berkaitan dengan tuduhan kolaborasi dengan fasis militer Jepang. Memang waktu itu rakyat Belanda sedang obsesi terhadap orang-orang yang telah berkolaborasi dengan tentara pendudukan, Nazi Hitler yang telah begitu sadis menindas di negeri Belanda. Juga Perdana Menteri Drees (Partai Buruh) menyatakan tidak bisa berbicara dengan Soekarno.

Begitu dangkal pandangan mereka terhadap pembentukan negara R.I., atas kemerdekaan Indonesia.

Maka Panglima Tertinggi Mountbatten menegaskan di Singapura kepada Van der Plas yang menghadap waktu itu, kalau Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno, maka beliau akan memerintahkan Panglima Besar Christison untuk melakukannya. Dan kalau kelak Belanda mendapat kesulitan akibat sikapnya sendiri maka Inggris tidak akan membantunya.³⁷⁾

³⁷⁾ A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas hal. 130.

Maka pada tanggal 9 Oktober 1945 Kolonel Abdulkadir mengusulkan agar Van Mook bertemu dengan Bung Karno. Tetapi Den Haag segera menolaknya dan melarang pertemuan itu. Van Mook menyatakan bahwa tidak boleh ditutup kemungkinan untuk bertemu dengan Soekarno.

Dalam pada itu pada tanggal 22 Oktober 1945 Menteri Logeman mengawatkan bahwa "Opini umum di Holland tidak setuju adanya pertemuan dengan kolaborator-kolaborator penting itu".

Pada 28 Oktober 1945 Van Mook mengawatkan bahwa, tidak mungkin menghindari pertemuan dengan Soekarno apabila ia akan bertemu dengan kaum nasionalis. Adalah kesalahan teknis dengan memusatkan tembakan kepada Soekarno sebagai "penjahat perang". Hal ini menyebabkan banyak orang nasionalis menjadi anti Belanda, karena garis perjuangan mereka adalah sama dengan Soekarno.

Kembali Menteri Logeman dalam kawatnya tanggal 1 November 1945 melarang hal demikian.

Rapat kabinet tanggal 4 November 1945 mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina supaya memanggil kembali Van Mook. Tetapi Duta Besar Belanda di London mengingatkan besarnya resiko dalam aspek diplomasi. Dan Ratu juga menolaknya.

Di negeri Belanda, ternyata waktu itu ada pertentangan-pertentangan antara Van Mook dengan Den Haag dan antara Gubernur Jendral Starckenborg dengan Menteri

Logeman.⁴ Namun semua itu mempunyai sikap sama yakni bahwa penjajahan atas Indonesia harus diteruskan. "Indie verloren ramspoed geboren" (Indonesia terlepas dan malapetaka lahir).³⁸⁾

Para pembesar Pemerintah Belanda memandang sangat rendah, adanya proklamasi kemerdekaan 17-8-1945 oleh Soekarno Hatta, mereka memandang Soekarno Hatta adalah orang-orang yang tidak bermartabat, orang-orang kolaborator, penjahat perang, maka dari itu mereka tidak mau bicara dengan Soekarno Hatta.

Malahan Laksamana Helfrich (Belanda) mengingatkan kepada Louis Mountbatten agar tidak berunding dengan Republik. Mountbatten mengingatkan kepada Helfrich, bahwa di Birma justru terjamin ketertiban dengan bekerja sama dengan Aung San.³⁹⁾

Belanda memandang ringan, adanya pergerakan untuk merdeka bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu sedang sibuk-sibuknya para pemuda bergerak merebut kantor-kantor dan sebagainya, pada tanggal 31 Agustus 1945 pesawat B-25 Belanda menyebarkan surat selebaran di kota-kota besar Indonesia yang isinya.

38) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas
hal. 131.

39) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas
hal. 140.

bahwa pemerintah Hindia Belanda akan segera kembali ke Indonesia.

Hal ini membakar emosi para pemuda, kemudian gerakan anti Belanda di Indonesia, sangatlah meluas.⁴⁰⁾ Maka dari itu sewaktu tentara Inggris mendarat di kota besar di Indonesia, pihak Indonesia minta kepada Panglima Militer Inggris, bahwa pendaratan tentara harus tidak ada orang-orang Belanda yang turut serta. Rakyat Indonesia sangatlah membenci Belanda.

Menjelang pendaratan tentara Sekutu di Surabaya, oleh Kol. DR. Moestopo mengajukan syarat, bahwa tentara Inggris hanya boleh menduduki Surabaya sebatas Prapat Kurung, dan tidak ada orang-orang Belanda yang membonceng tentara Sekutu.

Waktu Brigade Mallaby mendarat di Surabaya, disuruhnya Gubernur Suryo dan Kol. DR. Moestopo menghadapnya. Tetapi Kol. DR. Moestopo menolaknya, dan melarang tentara Inggris mendarat tanpa izin.⁴¹⁾

Kolonel Fugh kemudian menemui Gubernur Suryo di Hotel Oranye, di sana Mallaby menjelaskan missinya, bahwa tidak akan melucuti lasjkar-lasjkar dan TKR. Namun pada

40) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas
hal. 144.

41) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas
hal. 162.

akhir Oktober Panglima Divisi XXIII Hawthorn, menyebarkan surat selebaran agar semua senjata yang ada di pihak Indonesia segera diserahkan kepada tentara Inggris dan siapa yang kedapatan senjata akan ditembak. Sudah barang tentu hal ini menimbulkan kemarahan para pemuda dan TKR. mereka kemudian anti Inggris, dan pertempuran-pertempuran melawan Inggris terjadi di semua front. Dan dalam pertempuran itu Mallaby hilang (meninggal). Inggris memberi ultimatum kepada pihak Indonesia. Terjadilah peristiwa 10 November yang sangat dahsyat itu sebagai unjuk rasa bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan akan dipertahankan dengan korban berapapun.

Justru dalam situasi yang demikian itu pada akhir Oktober Van Mook mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno, di mana antara lain, Belanda menuntut semua pengacau dihukum, dan semua milik Belanda harap dikembalikan nantinya. Tapi kemudian Pemerintah Belanda melarang pertemuan yang demikian itu.

Pada waktu itu pertempuran meletus di Magelang, Bandung dan kota-kota lain.

Tentara Inggris tidak cukup kuat menghadapi pergolakan massa, orang-orang Indonesia menentang kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia. Rakyat Indonesia bersikap mempertahankan negara R.I. dengan pengorbanan apapun. Di pulau Jawa saja diperkirakan ada 100.000 sampai

400.000 orang Indonesia yang bersenjata. Kenyataannya mereka sudah dilatih dan diperlengkapi sebagai kekuatan militer.

Taktik yang dipergunakan oleh Indonesia adalah sama dengan taktik Jepang. Inggris tidak menyangka bahwa setiap saat lebih dari 25.000 orang dapat dihimpun untuk menyerang Batavia dan Surabaya.

Bahkan untuk kedua penyerangan tersebut mungkin terjadi secara serempak dan kemungkinan akan dibentuk kekuatan yang lebih besar. Seperti terjadi di Surabaya, sekitar 15.000 orang tentara Indonesia dengan didukung oleh massa yang diperkirakan lebih 100.000 orang, bersenjatakan, mulai dari pistol, pedang, busur dan panah sampai belati dan tombak.

Christison sudah mencoba mengumpulkan mereka, tidak dapat dihubungi tanpa syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi.

Dalam hal demikian itu tentara Belanda ternyata tidak banyak gunanya, kecuali untuk menjaga toko, rumah dan lainnya, mereka tidak mempunyai fighting value. Apabila terjadi peristiwa sekecilpun mereka lari minta perlindungan tentara Inggris.

Pada awal 1946 Christison pulang ke Inggris diganti oleh Letnan Jendral Staphord.

Belanda tidak senang dengan Christison, karena tidak mau menduduki pedalaman dan tidak mengizinkan tentara Belanda masuk sebelum ada persetujuan politik Indonesia-Belanda.

Dengan terjadinya pertempuran-pertempuran akibat Sekutu mengupayakan evakuasi 72.000 tentara Jepang di Jawa-Bali dan banyak lagi interniran dapatlah dipahami diplomasi PM Sjahrir dan Soekarno Hatta yang ingin bekerja sama dengan Inggris dalam tugas-tugas Sekutu tadi, bahkan Resimen Tangerang digunakan untuk membantu tugas tentara Sekutu itu.⁴²⁾

C. Data-data yang peneliti peroleh dari penelitian dari buku-buku karya tulis Bp. DR. A.H. Nasution.

1. Keyakinan kebangsaan pada rakyat Indonesia sejak Kebangkitan Nasional, di Jawa dengan sugesti jangka "Djaja-baja", raja kuning sak umure jagung, berkembang dalam kehidupan yang serba sulit, serta kematangannya untuk bertindak, semangat, organisasi dan latihan waktu itu mendapat waktu tepat, yakni dengan adanya kekosongan kekuasaan.

 42) A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas
 hal. 166.

Data : Kehendak untuk merdeka berasal dari seluruh rakyat Indonesia. Habis Jepang menyerah terjadi vacuum of power. Dalam vacuum of power itulah keinginan seluruh rakyat tersebut di atas dapat di-realiseer. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17-8-1945 memanfaatkan peluang di situasi vacuum of power tersebut.

2. Sesudah proklamasi itu, di mana-mana rakyat langsung dengan spontan merebut kekuasaan dan menyatakan bahwa seluruh bangunan serta keuangan penguasa adalah milik republik.

Data : Proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno Hatta yang mengatas namakan rakyat, ternyata didukung oleh seluruh rakyat.

3. Soekarno Hatta cepat menetapkan UUD 45 dan membentuk pemerintahan. Pada 18-8-1945 PPKI bersidang menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pemerintah), juga membentuk KNI. Semua ini untuk keorganisasian gerakan rakyat atas dasar swadaya dengan demokratisasi struktur politik.

Data : Tindakan cepat dan tepat oleh Soekarno Hatta ini dimaksud agar nanti kalau tentara Sekutu datang di Indonesia, maka disini sudah ada negara R.I. ada pemerintahan lengkap dengan alat perlengkapannya. Hal ini penting agar NICA (Belanda) tidak akan berhasil memulih-

kan kekuasaannya de facto di Indonesia. Juga seandainya Belanda memanfaatkan tentara Sekutu (Inggris) untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, Inggris akan konsultasi, karena disini sudah ada negara, dan pemerintahan yakni negara R.I.

4. Situasi internasional, setelah proklamasi ternyata pada umumnya positif, menguntungkan negara R.I. sebagai misalnya adanya Piagam Atlantic, Atlantic Charter merupakan peluang yang baik bagi bangsa Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Bukan itu saja, sikap Amerika Serikat, Inggris dan Australia, yang militernya terlibat dalam masalah Indonesia, menguntungkan R.I. seperti halnya :

- Belanda harus menghilangkan tanda-tanda kendaraan dari Amerika, yang dipergunakan di Indonesia.
- Bekas tawanan Belanda yang dilatih Amerika di Filipina, diwajibkan mengembalikan semua peralatan militernya kepada Amerika.
- Amerika membatalkan penjualan senjata kepada Belanda sebanyak 25.000 pucuk senjata.
- Amerika melarang Mountbatten menggunakan kapal perang Amerika untuk mengangkut peralatan pasukan Belanda ke Indonesia.

Inggris pun (dengan pemerintahan partai buruhnya) condong menyokong pemerintahan negara Republik Indonesia. Australia yang dipimpin oleh partai buruh, menyokong perjuangan R.I. Pemerintah Australia membiarkan saja waktu itu, kapal-kapal Belanda yang diboikot buruh-buruh Australia di pelabuhan-pelabuhan mereka.

Data : Bangsa Indonesia waktu memproklamasikan kemerdekaan R.I. memanfaatkan prinsip, "self determination" prinsip ke III dari pada Atlantic Charter.

Sewaktu bangsa Indonesia mempertahankan eksistensi kemerdekaan R.I. mendapat keuntungan yang sangat besar, dengan memanfaatkan peluang yang baik, yakni baik Inggris maupun Australia, pemerintah mereka dipegang oleh Partai Buruh yang simpati terhadap bangsa-bangsa tanah jajahan yang memperjuangkan kemerdekaan.

Amerika Serikat ingin menarik Indonesia kelompok Rimland, untuk itu membantu perjuangan negara R.I.

Padahal waktu itu Belanda sangat tergantung dengan Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Belanda perlu bantuan Amerika (Marshall Plan).

5. Jika hal tersebut no. 4 di atas didalami maknanya, memanglah dapat mengerti diplomasi amatlah penting bagi perjuangan negara R.I. yang mengupayakan untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara dunia internasional.

Data : Bahwa dalam upaya mempertahankan eksistensi negara R.I. waktu itu, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan dalam negeri (militer) tetapi harus juga dengan diplomasi. Sudah barang tentu harus ditunjang kekuatan militer dan didukung oleh rakyat. Dengan perkataan lain harus juga dengan diplomasi yang didukung oleh kekuatan tritunggal (Pemerintah, Militer, dan Rakyat).

6. Di mata Van Mook, pembesar-pembesar R.I. dipandang sekedar sebagai "boneka-boneka", kolaborator-kolaborator. Tidak mau bicara dengan Soekarno Hatta. Malah Gubernur Jendral Tjarda Van Starckenborg Staatshonder menuntut kembalinya dulu keadaan sebelum perang, barulah berbicara tentang pemberian-pemberian pemerintahan sendiri. Tetapi tentara Belanda waktu itu tidak berarti, hanya sekedar untuk jaga toko dan rumah. Tentara Jepang sudah seperti tidak berjiwa, tidak bisa diandalkan, maka dari itu Inggris menyuruh Belanda berunding dengan Indonesia.

Data : Soekarno Hatta bersedia berunding dengan Belanda. Tetapi Belanda mula-mula tidak mau berunding dengan Indonesia.

Inggris sebagai penanggung jawab keamanan dan perdamaian Asia Tenggara, memerintahkan Belanda berunding dengan Indonesia.

7. Pada tanggal 29 September 1945 Panglima Besar Jendral Christison menyatakan di Jakarta bahwa beliau akan minta pejabat-pejabat R.I. untuk membantu pelaksanaan tugasnya di Indonesia, dan mengontrol pemerintahan di daerah-daerah R.I.

Belanda mereaksi sangat keras atas pernyataan itu. Itu berarti Inggris mengakui R.I. secara de facto.

Menteri Logeman tidak bersedia berurusan dengan Soekarno, tokoh kolaborator. Desakan Panglima Besar Inggris agar Belanda berunding dengan Republik, ditolaknya.

Maka dari itu Panglima Tertinggi Mountbatten menegaskan di Singapura, kalau Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno maka beliau akan memerintahkan kepada Panglima Besar Christison untuk melaksanakannya. Dan kalau kelak Belanda mendapat kesulitan akibat sikapnya sendiri Inggris tidak akan membantunya.

Data : Belanda mula-mula memang tidak mau berunding dengan Indonesia sebagai akibatnya dikucilkan oleh sesama negara Rimland utamanya oleh Inggris. Oleh sesama negara Rimland, Belanda tidak disenangi karena policynya terhadap Indonesia telah bertentangan dengan rambu-rambu hukum internasional, yakni pasal-pasal penting Piagam PBB.

Sebaliknya Indonesia, perjuangan untuk mempertahankan eksistensi negara R.I. selalu menyesuaikan dengan pasal-pasal penting Piagam PBB. Soekarno Hatta menghendaki berunding dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB. Maka dari itu banyak negara di dunia utamanya Amerika Serikat dan Inggris bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

8. Pada tanggal 28 Oktober 1945 Van Mook mengawatkan kepada Pemerintah Belanda, bahwa tidak mungkin dihindarkan pertemuan dengan Soekarno, kalau tidak demikian, kaum nasionalis Indonesia akan bersikap anti Belanda.

Menteri Logeman dalam kawatnya tanggal 1 November 1945 melarang usul Van Mook tersebut.

Rapat Kabinet Belanda tanggal 4 November 1945 mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina, agar memanggil kembali Van Mook. Tapi Ratu menolaknya.

Malahan Laksamana Helfrich (Belanda) mengingatkan Mounbatten agar tidak berunding dengan Soekarno.

Pada tanggal 31 Agustus 1945 pesawat B-25 Belanda menyebarkan surat-surat selebaran yang isinya, bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan segera kembali ke Indonesia.

Hal ini menyebabkan emosi pemuda-pemuda dan langsung mengadakan gerakan anti Belanda.

Waktu Sekutu akan mendarat di Surabaya, Pemerintah Indonesia memberi syarat, Sekutu boleh mendarat asal tidak membawa orang Belanda.

Inggris kurang bijaksana, mengabaikan tuntutan Indonesia. Meletuslah pertempuran Surabaya, di mana Mallaby hilang (meninggal). Terjadilah peristiwa 10 November 1945.

Data : Belanda terlalu memandang rendah peran Soekarno Hatta yang didukung oleh militer dan rakyat. Dipandang-nya Soekarno Hatta sebagai pejabat perang. Sehingga Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta. Tetapi karena Inggris dan Amerika Serikat terus mendesaknya akhirnya Belanda bersedia berunding, karena kekuatan militer Belanda di Indonesia tidak kuat, dan Belanda sangat tergantung dengan Amerika Serikat.

D. Makna dari data-data di atas.

Soekarno Hatta memproklamasikan Indonesia Merdeka dengan mengatas namakan seluruh rakyat, memanfaatkan prinsip self determination dalam The Atlantic Charter, dan Vacuum of Power di Indonesia waktu itu.

Reaksi pihak Belanda sangat kuat, karena akan mengembalikan penjajahan atas Indonesia.

Sebelum tentara Sekutu datang di Indonesia Soekarno Hatta dengan cepat dan tepat, mendorong ditetapkannya UUD'45, Oleh PPKI, di bentuk Pemerintah dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dan membentuk KNIP sebagai pembantu Presiden.

Sesudah Proklamasi itu para pemuda di bawah koordinasi T.K.R. bergerak mengambil alih kantor-kantor Pemerintah Jepang. Jadi Proklamasi benar-benar di dukung oleh rakyat.

Namun begitu negara R.I. berdiri di tengah-tengah dunia internasioanal, langsung menghadapi musuh, yakni Pemerintah Belanda yang akan menghancurkan negara R.I. dengan kekuatan militer.

Soekarno Hatta dengan menyadari keadaan bangsa dan negara, waktu itu, menetapkan strategi pokok dalam penyelesaian persengkokolan Indonesia-Belanda, melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK. PBB.

Negara R.I. mendasarkan perjuangan pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, bahwa persengketaan antara negara-negara diselesaikan dengan jalan damai, melalui perundingan.

Juga berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang menyatakan bahwa hubungan antara negara-negara tidak dengan kekerasan.

Kalau di Indonesia ada pertempuran semata-mata diserang oleh Belanda. Namun Belanda tidak mau berunding

dengan Soekarno Hatta yang dipandang sebagai penjahat perang.

Sikap Belanda yang bertentangan dengan rambu-rambu Hukum Internasional itu ditentang oleh negara-negara sekutunya, utamanya Inggris dan Amerika Serikat, demi untuk kepentingan yang lebih besar, yakni keamanan dan perdamaian Asia Tenggara.

Belanda di paksa untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Maka berlangsunglah Perundingan Indonesia Belanda, yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947. Disusul dengan Perjanjian Renville, kemudian KMB, dan pada tanggal 27-12-1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Hasil Wawancara Khusus
dengan Ibu Soepeni

Hasil Wawancara Khusus
dengan Ibu Soepeni

Mantan anggota DPR, Deputy Menteri Luar Negeri,
bidang Organisasi Internasional dan Peserikatan Bangsa-
Bangsa.

Wawancara dilaksanakan di rumah beliau, di Jalan
Sriwijaya II/No. 19 Jakarta. Pada hari Rabu Tanggal 13
Maret 1996 jam 16.30 - 17.20.

WAWANCARA KHUSUS

Yang diwawancarai :

Nama : Ibu SOEPENI
Jabatan : Anggota DPR, Deputy Menteri, Bidang
Alamat : Jl. Sriwijaya II/No 19 Jakarta Selatan
Telp (021) 7220017

organisasi Internasional dan PBB.

Mahasiswa :

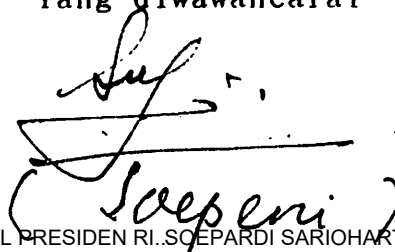
Nama : Soepardi Sariohartono
Bidang Studi : Ilmu Sosial (S3), Pasca Sarjana UNAIR Surabaya
Jurusan : Ilmu Politik Hubungan Internasional
No. Mhs. : 0993114669
Hari/tanggal : Wawancara : Rabu, 13-3-96 jam 16.30-17.20
Tempat : Wawancara : Jl Sriwijaya II/No 19 Jakarta.

Hasil Wawancara :

direkam

Jakarta, 13 Maret, 1996

Yang diwawancarai


(Soepeni)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
 PROGRAM PASCASARJANA

JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 ☎ (031) 510076, 5350170 FAX. (031) 510076

Nomor : 2672 /PT.03.114.PP6/N/1995
 Lamp :
 Hal : Izin untuk melaksanakan penelitian

17 Oktober 1995

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 Propinsi Jawa Timur
 U.p. Direktorat Sosial Politik
 Jl. Pemuda No. 5
 Surabaya.

Guna penulisan penelitian untuk Disertasi peserta program
 Doktor angkatan tahun 1993/1994 Program Pascasarjana
 Universitas Airlangga,

nama : Soepardi Sariohartono, Drs.
 nim : 099311466 / D
 judul : MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X
 TANGGAL 16 OKTOBER 1945 DAN MAKLUMAT
 POLITIK PEMERINTAH R.I. TANGGAL 1
 NOVEMBER 1945, SEBAGAI TITIK TOLAK
 DIPLOMASI INDONESIA DIDALAM MENGADAKAN
 PERJANJIAN LINGGAR JATI.

pembimbing ketua : Prof.Dr.Idris.A.Kesuma

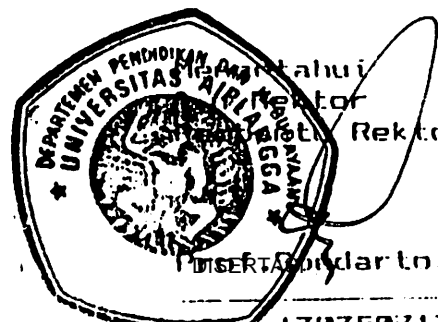
maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan
 rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk :

I. Mengadakan wawan cara khusus dengan para tokoh yang
 sekarang masih ada antara lain :

1. Dr.H.Roeslan Abdoelgani di Jakarta.
2. Mr.Soenarjo, mantan Menteri Perdagangan di Jakarta.
3. H.A.H.Nasution Mantan Kepala Staf A.D. di Jakarta.
4. B.M.Diah Mantan Menteri Penerangan di Jakarta.
5. Manai Sophiaan, Pejoang di Jakarta dan yang lainnya.

II. Menemui Pimpinan Perpustakaan Negara dan Perpustakaan yang
 lain di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Kota-kota lainnya.

Demikian dan alas bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani oleh
 Kepala Kantor
 Rektor I,



Ditandatangani oleh
 Direktur,

Disertasi oleh, dr. SOEPARDI SARIOHARTONO, dr. H. Soedjono, dr.

IP. DEPUSTAKAN WYNGKAT AIR JAWA TIMUR
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 - 45673
SURABAYA

Surabaya 14 NOPEMBER 1995

nomor : 072/5973/303/1995

impian :

rihal : Penelitian / Survey /
Research.

Kepada :

- Yth. 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DI JAKARTA
2. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEW
YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA
3. GUBERNUR KDH TK I JAWA BARAT
DI BANDUNG

U.P. KADIT SOSPOL.

Menunjuk Surat DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR.

tanggal : 17 OKTOBER 1995
nomor : 2672/PT.03.H4.PP/N/1995.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SOEPARDI SARIOHARTONO, Drs.
Alamat : d/a JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA.
Pekerjaan : PROGRAM PASCASARJANA UNAIR
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945
DAN MAKLUMAT POLITIK TANGGAL 1 NOPEMBER 1945 SEBAGAI TITIK
TOLAK DIPLOMASI INDONESIA DI DALAM MENGADAKAN PERJANJIAN -
LINGGARJATI ".

Waktu : 3 (TIGA) BULAN.

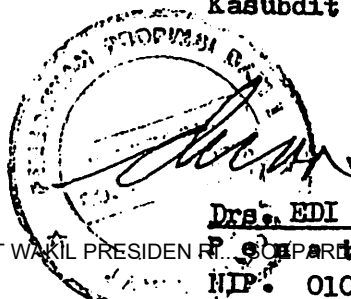
Lokasi : DKI, DIY, JAWA BARAT.

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
did daerah setempat.

Demikian. harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik
u.b
Kasubdit Tibum



Drs. EDI PURWINARTO

KAITAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R. SOEPARDI SARIOHARTONO
NIP. 010077471

EMBUSAN :

- th. 1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
3. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Jatim
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Sdr. DIRJEN SOSPOL, DEP DAGRI JAKARTA.

Bung Karno selalu berpikir bahwa rakyat seluruhnya harus melawan penjajahan. caranya semua jalan akan ditempuh, antara lain, di bidang internasional karena kemerdekaan itu harus diakui secara internasional. di bidang internasional mesti melalui diplomasi. dan lewat PBB.

Tapi Bung Karno tidak hanya mengandalkan diplomasi semata-mata, tapi kekuatan rakyat di dalam negeri yang banyak itu harus bersama-sama melawan penjajahan.

Waktu kita mengadakan proklamasi itu kan mengandalkan kekuatan seluruh rakyat. TNI kan belum ada.

Lebih dulu ada Badan Keamanan Rakyat (BKR) lalu menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) baru nantinya menjadi TNI.

Sebelum menyatakan merdeka, kita kan sudah menghadapi lawan, yakni NICA yang akan menguasai Indonesia.

Peneliti : Belanda mula-mula kan tidak mau berunding dengan Indonesia. Mengapa kemudian bersedia berunding Bu ?

Ibu Soepeni : Kita kan kirim delegasi ke India waktu itu. usaha ini supaya mendapat perhatian dari PBB. Mula-mula PBB kan belum menaruh perhatian terhadap Indonesia.

Dalam konferensi di India, itu diusulkan persoalan Indonesia supaya masuk agenda persidangan PBB. Juga waktu itu Indonesia diakui oleh Mesir.

Tadinya Belanda itu akan ndompleng Inggris untuk menguasai Indonesia, ternyata tidak bisa, Inggris pun kemudian mundur. tidak sanggup menghadapi perlawanan rakyat. titik beratnya harus perlawanan rakyat. TNI belum ada.

Sesudah itu Belanda masuk, tentu dilawan. setelah terjadi perlawanan, terjadi pertempuran, ada negara-negara yang menganjurkan supaya diadakan perundingan.

Peneliti : Peran partai-partai waktu revolusi bagaimana Bu ?

Ibu Soepeni : Bung Karno kan menghendaki adanya satu partai, Partai Kebangsaan, bukan PNI. Tapi kalau begitu, Bung Hatta dan Bung Sjahrir khawatir nanti dianggap Indonesia ini negara

Totaliter. Lantas dengan Maklumat November 1945 itu didirikan partai-partai yang banyak. Itu maksudnya. Tapi akibatnya terus partai-partai tidak karuan itu.

Orang sekarang kan menjelek-jelekkan Bung Karno waktu terjadi Multi Partai. Pada hal Bung Karno sendiri tidak menghendaki adanya partai yang banyak itu.

Kabinet waktu itu dirubah menjadi Kabinet Parlementair.

Tapi walaupun Kabinet Parlementair Bung Karno tetap berperan di dalam pemerintahan waktu itu.

Wawancara ditutup jam 17.00.

C. Data yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Soepeni

1. Bahwa Dwi Tunggal Soekarno Hatta itulah yang dipercaya rakyat untuk memimpin revolusi dalam rangka mempertahankan eksistensi negara R.I.
2. Bahwa seluruh rakyat mendukung Soekarno Hatta secara mutlak.

3. R.I. begitu diproklamasikan langsung berhadapan dengan musuh, yakni Belanda yang ingin kembali menjajah lagi.
4. R.I. mengirim delegasi ke konferensi di India dan Indonesia diakui oleh Mesir.
5. Belanda mau ndompleng Inggris menguasai Indonesia, tapi tidak bisa karena dilawan oleh rakyat.
6. Bung Karno menghendaki ada satu partai yakni Partai Kebangsaan.
Sjahrir mengawatirkan nanti Indonesia dituduh negara totaliter, lalu dibentuk partai yang banyak itu.
7. Kemudian Kabinet Presidensial dirubah menjadi parlementair.
8. Belanda mengakui, kedaulatan Indonesia, kemudian negara-negara internasional turut mengakuinya.

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak Prof. DR. I. Nyoman Dekker

Hasil Wawancara Khusus
dengan Bapak Prof. DR. I. Nyoman Dekker

Bapak Prof. DR. I. Nyoman Dekker oleh peneliti dipandang sebagai ahli Sejarah Budaya tidak dipandang sebagai pelaku sejarah.

Lulusan PTPG (IKIP) Bandung Jurusan Sejarah Budaya. Pada Tahun 1969 memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Pada Tahun 1979 mendapat Gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Sekarang Guru Besar di IKIP Malang.

Beliau sangat faham mengenai peristiwa-peristiwa kenegaraan pada Tahun 1945 - 1947.

Wawancara dilaksanakan di rumah beliau Jl. Serakarta No. 1 Malang. Pada hari Kamis Tanggal 4 April 1996 jam 08.30 - 09.25.

WAWANCARA KHUSUS

Yang diwawancarai :

Nama : Bp Prof Dr. I. Nyoman Dekker
Jabatan : ahli sejarah budaya FKIP, PTPG
Alamat : Jl. Surakarta no 1 Malang Bandung
Telp (0-341) 551688

Mahasiswa :

Nama : Soepardi Sariohartono
Bidang Studi : Ilmu Sosial (S3), Pasca Sarjana UNAIR Surabaya
Jurusan : Ilmu Politik Hubungan Internasional
No. Mhs. : 0993114669
Hari/tanggal : Wawancara : Kamis, 4 April 1996
Tempat : Wawancara : di Jl. Surakarta no 1 Malang
jam 8.30 - 9.25.

Hasil Wawancara :

Direkam.

Suryana Ah 1969
Bravija
Dr Jln 1th 2
cuba 79

Malang 4 April 1996

Yang diwawancarai
(Signature)

(Prof. Dr. I. Nyoman Dekker)

Catatan : (dari Bapak Prof DR. I Nyoman Dekker).

1. Setelah PD II selesai :

- a. Internasional : perang dingin, Amerika Serikat, Eropa Barat, Uni Soviet.
- b. Geopolitis Indonesia pengaruh AS dkk. Untuk dimanfaatkan keadaan obyektif ini.
- c. Isyu besar disamping perang dingin juga masalah kolaborator. Di Indonesia tampil yang dikenal anti Jepang sehingga pendekatan perundingan dapat dimulai.

2. Di Indonesia : Kekuatan bersenjata dan diplomasi.

- a. Pendirian TNI
- b. Th 1947, 1948, 1949 : Linggarjati, Renville, KMB
- c. Kekuatan partai : Sosialis (PKI ikut didalamnya), PNI, Masyumi. Kemudian setelah Renville (ada PSI -- PKI)
- d. Linggarjati : PS -- opsisi Masyumi -- PNI dkk
- e. Kekuatan bersenjata berdiri di belakang.

3. Perjanjian Linggarjati

- a. Sidang KNIP di Malang, tambah anggauta KNIP agar Linggarjati goal. Ancaman Hatta, diterima Linggarjati
- b. Soekarno Hatta : Dwitunggal, formal ada hirarki, politik psikologis sejajar.
Pendirian Hatta merupakan kebijakan dwi tunggal (Sumatra -- Jawa).

4. Maklumat No X

- a. Dimungkinkan tampilnya yang non-kerjasama dengan Jepang
- b. Resiko kabinet parlementer -- kurang stabil
- c. Opsisi dapat distuktif.

5. Maklumat 1 November 1945

- a. Evolusi yang menghendaki perubahan cepat tetapi mengakui HAM, termasuk perusahaan asing.
- b. GBHN masa lampau
Negara-negara AS dkk, memaklumi pendirian negara baru terhadap perusahaan asing.
- c. Memudahkan diterimanya model perundingan.

6. MURBA -- PKI

- a. musuh bebuyutan - berontak terus sampai musuh keluar dari Indonesia. Perusahaan asing dirampas.
- b. PKI semula setuju Linggarjati. Gagal di Renville lalu opsisi terhadap Hatta.
- c. PKI memberontak di Madiun, Murba ikut mengutuk pemberontakan itu.

7. Soekarno - Hatta selama revolusi

- a. Sejak semula setuju diplomasi
- b. Linggarjati gagal. Renville gagal, KMB berhasil (Hatta)
- c. Keadaan genting tampil Soekarno-Hatta, waktu penculikan Sjahrir, pemberontakan Madiun, goalnya Linggarjati

HASIL PENELITIAN DENGAN WAWANCARA KHUSUS

VI. Dengan Bapak Prof. DR. I Nyoman Dekker. Ahli Sejarah Budaya, dalam peristiwa kenegaraan tahun 1945 - 1947. Pendidikan S1 di PTPG (IKIP) Bandung, Sarjana Hukum dari Unibraw tahun 1979. Beliau bukan pelaku sejarah, tetapi termasuk generasi agak muda, Ahli Sejarah Budaya.

A. Proses Upaya Pendekatan

tanggal 18 Maret 1996, Peneliti konsultasi dengan Bapak Drs. Soedarmo, Rektor IPTN Malang, mohon bantuan agar di kenalkan dengan Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker.

Tanggal 20 Maret 1996 Bp. Drs. Soedarmo memberi kabar, sudah di hubungkan dengan beliau dan Peneliti supaya berhubungan langsung dengan beliau lewat telepon No. (0341) 551688.

Hari itu juga Peneliti menghubungi Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker. Mendapat jawaban bahwa beliau menyediakan waktu dalam bulan April 1996, karena akhir Maret 1996 ada tugas di Bali.

Hari Jum'at tanggal 22 Maret 1996 Peneliti mengirim surat kepada Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker disertai satu berkas pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini.

Tanggal 1 April 1996 Peneliti menghubungi beliau lewat telepon. Beliau mengharap agar Peneliti menghadap hari Kamis tanggal 4 April 1996 jam 08.30 pagi.

Hari Kamis tanggal 4 April 1996 Peneliti menghadap beliau di jalan Surakarta No. 1 Malang. wawancara dimulai jam 08.45 WIB.

B. Hasil Wawancara Khusus diambil dari Rekaman.

Peneliti : Selamat pagi Pak ! Saya mau ngrepoti Bapak. mengadakan wawancara mengenai soal-soal kejadian-kejadian kenegaraan antara tahun 1945-1947.

Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker : Yang anda tanyakan itu kan revolusi kita tahun 1945, maksudnya kan diplomasi kan ? Revolusi Indonesia 1945 itu tidak hanya menggunakan kekuatan militer saja tapi juga menempuh jalan diplomasi didunia Internasional. Ini maksudnya supaya revolusi itu bisa di selesaikan dalam tempo yang relatif singkat dan effesien. Sehingga sehabis revolusi, dana dan tenaga kita bisa dipergunakan untuk membangun. Kalau revolusi itu berlangsung lama, akan menguras habis

dana dan tenaga, mana yang untuk membangun ? Revolusi kita itu relatif singkat waktunya sehingga tersisa dana dan tenaga untuk membangun.

Lain lagi revolusi di Vietnam. Lamanya ± 30 (tiga puluh) tahun, jadi menguras dana dan tenaga. Akibatnya ketika mau membangun Vietnam sulit.

Pada waktu revolusi, kalau kita ambil dari pertanyaan anda tentang diplomasi, pada waktu revolusi dulu. Kedua-duanya sangat diperlukan, kekuatan bersenjata dan diplomasi. Tidak bisa dengan salah satu saja. Diplomasi saja atau kekuatan bersenjata saja. Diplomasi bisa berhasil kalau ditunjang oleh kekuatan bersenjata. Diplomasi bisa kuat kalau dukungan kekuatan bersenjata juga kuat. Kekuatan bersenjata itu kan saluran dalam negeri. Saluran di luar negeri itu memang, ya diplomasi itu.

Kalau kita lihat geopolitis, pada waktu revolusi itu, ada pertentangan di dunia Internasional, yakni antara Komunis dan Kapitalis. Indonesia waktu itu ada dalam ruang lingkup

negara-negara Amerika Serikat dan Inggris. Inggris ikut campur karena ada problem di Asia Tenggara. Belanda ada problem di Indonesia. Sedangkan Inggris ada problem di India Malaya dan lainnya. Amerika Serikat rencana juga menangani Indonesia Filipina. walaupun kemudian dioper oleh Inggris. Jadi Indonesia waktu itu sebenarnya masih berada di tengah-tengah lingkup kekuasaan Inggris. Amerika Serikat, Australia dan Perancis yang ada di Vietnam. Komunis RRC, tapi ini kan baru ada pada tahun 1949.

Nah di dalam geopolitis yang demikian itu kita manfaatkan kekuatan yang besar yakni Amerika Serikat yang anti Komunis dan Inggris yang juga anti Komunis dalam perang dingin itu. Hanya Belanda pada dasarnya akan menguasai Indonesia lagi.

Pada tahun 1945 itu mula-mula kita memanfaatkan kekuasaan Inggris. Karena Inggris waktu itu menjaga stabilitas di India Malaya dan Australia jangan sampai terjadi kekacauan besar di sini. Inggris sangat memperhatikan Indonesia karena berpengalaman di Surabaya

yang terjadi kekerasan yang hebat dan Inggris menyadari bahwa Indonesia ada kekuatan yang besar, ada negara R.I. dengan Soekarno sebagai Presidennya malah Soekarno Hatta merupakan dwi tunggal yang kuat. Dwi tunggal ini kuat karena ada dua pulau yang besar. Soekarno mewakili pulau Jawa, Hatta mewakili pulau Sumatra.

Memang secara formal, ada Presiden dan Wakil Presiden, tetapi secara politis psychologis kedua tokoh itu sejajar. Maka dari itu seluruh rakyat bisa di persatukan oleh dua tokoh ini.

Peneliti : Sekarang pertanyaan Pak ! Apakah Bapak mengetahui, bahwa Soekarno Hatta dulu itu yakin, mengenai penyelesaian persengketaan Indonesia Belanda, jalan paling baik adalah melalui diplomasi, perundingan di bawah pengawasan DK PBB Pak ?

Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker : Tapi lebih dulu kita berjuang melawan Belanda. Baru kemudian ada upaya penyelesaian melalui diplomasi. Tapi Belanda selalu menutupi jangan sampai masalah Indonesia terbuka di masyarakat interna-

sioanl, apalagi ke PBB ini. Belanda selalu berusaha menghindari perundingan.

Indonesia berpendapat, kalau militer saja tidak mungkin bisa mengalahkan Belanda. Kekuatan bersenjata memang perlu tetapi diplomasi juga sangat perlu. Memang yang dipentingkan kemudian, diplomasi ini, sampai adanya KMB. Jadi diplomasi dapat menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda waktu itu.

Peneliti : Pak, saya ini mempunyai keyakinan bahwa negara R.I. dulu itu, bisa diselamatkan eksistensi negara R.I. melalui kekuatan diplomasi yang ditunjang kekuatan militer dan di dukung semua rakyat. Apa benar pendapat saya ini Pak ?

Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker : Ya benar demikian. Hanya yang dimaksud dukungan rakyat, sebenarnya tidak seluruhnya. Sebab ada kelompok-kelompok rakyat yang waktu itu bekerja sama dengan Belanda, misalnya di Indonesia Timur. Tetapi kalau di dukung sebagian besar rakyat memang ya benar.

Peneliti : Pertanyaan terakhir Pak ! Menurut pendapat Bapak bagaimana, apakah Soekarno Hatta,

"yakin" bahwa cara mempertahankan eksistensi negara R.I. yang terbaik adalah melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK. PBB.

Untuk mencapai tujuan itu, apapun di tempuh. antara lain dengan merubah UUD 45 (pasal IV Aturan Peralihan) dengan menetapkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945.

Tindakan demikian itu diambil, agar ada kemungkinan untuk berunding dengan Belanda, yang waktu itu kebetulan sekali ada petisi dari KNIP yang di pelopori Sjahrir agar KNIP di rubah menjadi Badan Legistif. Dan Soekarno Hatta mendorongnya, sehingga dapat di tetapkan Maklumat No. X itu ?

Dan berpangkal dari Maklumat No. X itu dimungkinkan terjadinya perundingan Linggarjati. Bagaimana Pak ?

Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker : Begini ya, Maklumat No. X kan tahun 1945, sedang Linggarjati kan tahun 1946. Jadi Maklumat No. X ini sebenarnya ada dua hal :

1. Ketika itu ada masalah. kolaborator-kolaborator itu. Dengan demikian Sekutu yang

datang ke Indonesia selalu menyebut-nyebut, Republik Indonesia ini buatan Jepang, karena Soekarno Hatta sebagai kolaborator.

2. Ada pemikiran dari sekelompok orang-orang agar Pemerintah R.I. itu bersifat demokratis. Untuk mengungkap pada dunia bahwa Indonesia benar-benar Negara Demokrasi. Sebab Perang Dunia II adalah perang antara fisme melawan demokrasi. Dan pihak demokrasi yang menang, dan fasisme kalah. kan begitu.

Guna menyesuaikan dengan situasi Internasional masa itu, ada usul agar bentuk pemerintahan dirubah menjadi Demokrasi Parlementair. Dan benar, kemudian dibentuk Kabinet Parlemitter di mana Sutan Sjahrir menjadi Perdana Menteri.

Nah, sekarang kalau Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta yang dituduh kolaborator olehnya, tidak ada masalah. kan Belanda bisa berunding dengan P.M. Sjahrir.

Itulah mengapa diadakan Maklumat Wakil Presiden No. X itu.

Wawancara di tutup jam 09.25 WIB.

C. Data Yang Peneliti Peroleh Dari Wawancara Dengan Bp. Prof. DR. I Nyoman Dekker.

1. Revolusi di Indonesia dahulu itu terlaksana dalam tempo yang relatif singkat $\pm 4 \frac{1}{2}$ tahun. Hal ini sangat positif bagi perkembangan berikutnya. Revolusi itu kalau berjalan singkat, bangsa Indonesia mempunyai sisa dana dan tenaga untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Berbeda dengan revolusi Vietnam misalnya, berlangsung sampai ± 30 tahun. Hal demikian akan menguras habis tenaga dan dana bangsa, sehingga menghambat pembangunan berikutnya.

Revolusi Indonesia terlaksana relatif singkat, berkat kebijaksanaan pimpinan revolusi waktu itu, menggunakan kekuatan bersenjata dan kekuatan diplomasi secara bersama-sama. Kekuatan bersenjata jalur dalam negeri sedangkan diplomasi jalur luar negeri.

Data : Revolusi Indonesia mengandalkan kekuatan diplomasi yang ditunjang dengan kekuatan militer dan didukung oleh rakyat. Dan revolusi ini ternyata berlangsung relatif singkat, menghemat tenaga dan dana. Sehingga dapat digunakan untuk pembangunan.

2. Revolusi Indonesia terjadi, dimana di dunia Internasional ada pertentangan antara blok Komunis pimpinan Uni Soviet dan blok Kapitalis pimpinan Amerika Serikat atau Negara-Negara Barat.

Secara geopolitis, Indonesia waktu itu termasuk lingkup kekuatan Negara-negara Barat : yakni Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Perancis di Vietnam. Nah dalam lingkungan geopolitik yang demikian, bangsa Indonesia waktu itu memanfaatkan peluang yang ada di lingkup Negara-negara Barat itu.

Data : Di dalam revolusi itu para pemimpin revolusi memanfaatkan peluang yang ada pada negara-negara Rimland (Inggris, Amerika, Perancis, Australia).

3. Inggris menaruh perhatian pada negara-R.I. karena mempunyai pengalaman di Surabaya, di mana kekuatan rakyat sangat hebat, di dalam usaha mereka mempertahankan negara R.I.

Inggris menyadari bahwa di Indonesia ada kekuatan besar di bawah pimpinan Soekarno Hatta yang merupakan dwitunggal.

Data : Peristiwa Surabaya 10-11-1945 mempunyai pengaruh yang sangat besar, terhadap pandangan negara-negara barat terhadap bangsa dan negara Indonesia. Tidak lagi merendahkan upaya bangsa Indonesia di dalam mempertahankan negara Proklamasi, negara Republik Indonesia.

4. Di dalam Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 ada dua hal. pertama, waktu itu ada masalah kolaborator, sehingga Inggris dan Belanda memandang bahwa negara R.I. adalah buatan Jepang. Karena Soekarno Hatta kolaborator dengan Jepang. Kedua, habis perang Dunia II terbukti kelompok demokrasi menang, dan kelompok fasis kalah.

Untuk menyesuaikan dengan situasi Internasional yang demikian itu, ada usul dari sekelompok anggota KNIP agar bentuk Pemerintahan R.I. dirubah, dari Demokrasi Presidensial menjadi Demokrasi Parlementer. Itu terlaksana waktu Sutan Sjahrir menjadi Perdana Menteri tanggal 14-11-1945.

Data : Bahwa Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 merupakan ketetapan yang mempunyai dampak positif di dunia Internasional, sebab dengan Maklumat No. X, di mungkinkan adanya perundingan Indonesia Belanda.

D. Makna dari Data-data tersebut di atas.

Pimpinan Revolusi Indonesia waktu bertindak tepat dan benar, menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB.

Soekarno Hatta memimpin revolusi Indonesia secara benar, sehingga revolusi Indonesia terlaksana relatif dalam waktu pendek.

Strategi Soekarno Hatta, bahwa eksistensi negara R.I. dapat di pertahankan melalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB di pegang teguh, dan disiplin. Sewaktu mula-mula Belanda tidak mau berunding dengan Indonesia, para Pemimpin R.I. Soekarno Hatta berupaya keras menyingkirkan hambatan diplomasi itu. Yakni menetapkan Maklumat No. X tanggal 16-10-1945 guna merubah bentuk Pemerintahan Demokrasi Presidensial dalam UUD 45 menjadi Demokrasi Parlementer sehingga, perundingan bisa di laksanakan. Belanda yang tidak mau berunding dengan Soekarno Hatta, dapat melaksanakan perundingan itu dengan Perdana Menteri Sjahrir.

Perundingan Indonesia Belanda ini dalam perkembangannya menghasilkan persetujuan Linggarjati, sebagai modal awal untuk mengadakan perundingan berikutnya, sampai pada 27-12-1949 Belanda mengakui Kedaulatan Negara Indonesia.

Catatan-Catatan Peneliti
Sewaktu Menjadi Mahasiswa Fakultas Sosial
Politik Universitas Gajah Mada

Catatan-Catatan Peneliti
Sewaktu Menjadi Mahasiswa Fakultas Sosial
Politik Universitas Gajah Mada
(Tahun 1952 - 1958)

Peneliti lulus Sarjana Sosial Politik UGM Tanggal 24 Desember 1958.

Peneliti adalah mahasiswa dari Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo waktu itu.

Peneliti senang mendalami peristiwa-peristiwa kenegaraan.

Tertarik pada Role (Kejadian satu kali tapi mempunyai Pengaruh yang luas dan panjang) dalam Sejarah Kenegaraan R.I. utamanya, Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16-10-1945. Karena peristiwa ini hakekatnya mengubah UUD 1945.

VII. Catatan-Catatan Peneliti Sewaktu Menjadi Mahasiswa Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada

(TAHUN 1952 - 1958)

1. Pertanyaan Kepada : Prof. Mr. AG. Pringgodigdo

Waktu Kuliah Hukum Tata Negara hari Senin tanggal 6 September 1954. Sehabis kuliah, peneliti menghadap beliau, dan mengajukan pertanyaan :

Peneliti : Mengapa Prof. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16-10-1945 disebut Maklumat X ?

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo : Di dalam rapat KNIP tanggal 16-10-1945 saya hadir, sewaktu DR Moh Hatta menanyakan nomor surat, saya jawab lupa ! saya sebagai Sekretaris Negara waktu itu, mengerti bahwa Maklumat yang akan di tetapkan itu, pada dasarnya mengubah UUD 45 pada hal Bung Karno waktu itu tidak ada di Jakarta. Maksud saya, agar masalah-masalah itu di bahas lain hari kalau Bung Karno sudah ada di Jakarta, sambil menunggu nomornya.

Tetapi Bung Hatta waktu itu mengatakan "Ya sudah memakai No. X saja nanti kalau nomor

sudah ketemu di ganti dengan nomor baru" kenyataannya sampai hari ini nomor tetap dengan No. X.

Kenyataan pula, setelah Bung Karno berada di Jakarta lagi, beliau juga setuju Maklumat No. X itu.

2. Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Prof. Mr. Soehardi, Guru Besar UGM Mata Kuliah : Hukum Internasional.

Waktu kuliah Hukum Internasional hari Sabtu tanggal 3 September 1955. Selesai kuliah, peneliti bertanya kepada Prof. Mr. Soehardi. Peneliti adalah mahasiswa beliau.

Pertanyaan :

Tujuan pokok, Pemerintah R.I. mengadakan perundingan dengan Belanda yang menghasilkan persetujuan Linggarjati itu apa Prof. ?

Prof. Mr. Soehardi :

Negara R.I. di proklamasikan tanggal 17-8-1945. Menurut adat kebiasaan Hukum Internasional (custuomaryrule), suatu negara baru itu harus diakui oleh negara lain di dalam

masyarakat internasional. Hal ini guna memudahkan kalau ada suatu negara akan berhubungan dengan negara baru itu.

Demikian pula negara R.I. waktu itu. Lebih-lebih Indonesia ini bekas jajahan Belanda. Para pemimpin negara R.I. berupaya agar R.I. diakui oleh Pemerintah Belanda, bekas negara induk. Sudah barang tentu juga oleh negara-negara yang lainnya. Untuk inilah maka diadakan perundingan-perundingan dengan Belanda yang menghasilkan persetujuan Linggarjati itu. Kan saudara tahu, perundingan berikutnya adalah persetujuan Renville kemudian persetujuan KMB.

Dan di dalam persetujuan KMB itu Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia (RIS) pada 27 Desember 1949.

Kembali pada pengakuan atau recognition tadi, di dalam persetujuan Linggarjati itu Belanda mengetrapkan teori pengakuan yang di ajarkan oleh François, seperti kita bicarakan dalam kuliah tadi itu.

Menurut François dalam bukunya "De Grondlijnen Van het Volkenrecht" menyatakan ada tiga tingkat pengakuan yakni :

1. Pengakuan kenyataan adanya suatu pemerintah (erkenning als feitelijkeregering).
2. Pengakuan de facto.
3. Pengakuan de iure.

Didalam persetujuan Linggarjati, Belanda menggunakan yang nomor 1, yang diakui oleh Belanda, adalah de facto adanya

Pemerintah R.I. atas Jawa dan Sumatra. Coba saudara lihat text persetujuan Linggarjati itu.

Selama Pemerintah R.I. masih ada, masih menguasai daerah yang diakui itu (Jawa Sumatra). pengakuan itu tetap berlaku. Tetapi nantinya kalau pemerintah R.I. sudah tidak menguasai wilayah yang diakui itu, maka pengakuan hapus karena hukum. Belanda tidak lagi mengakui adanya negara R.I. Itulah sebabnya, sehabis Linggarjati di tanda tangani tanggal 25-3-1947 Belanda terus berupaya menyerbu wilayah R.I. dengan segala alasan. Maksudnya agar Pemerintah R.I. tidak ada. Lalu Belanda menguasai seluruh Indonesia. Maka dari itu, sewaktu Yogya diduduki oleh Belanda bulan Desember 1948 itu, Presiden Soekarno membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, di mana Mr. Safrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Pejabat Presiden R.I. malahan kalau Safrudin gagal, menunjuk dr. Soedarsono yang waktu itu di India.

Ini maksudnya biar Pemerintah R.I. tetap eksis.

Soekarno di tawan di Parapat. Waktu itu Belanda memberi keterangan kepada masyarakat se dunia, bahwa Presiden Soekarno sudah tidak berfungsi.

Tetapi Soekarno di Parapat memberi sanggahan, menyatakan bahwa Pemerintah R.I. masih eksis, dan Presiden masih berfungsi.

Untungnya UNCI waktu itu membenarkan bahwa Pemerintah R.I. masih eksis.

Saudara tahu, bahwa François waktu itu adalah Penasehat Pemerintah Schermerhorn.

Peneliti waktu itu bertanya lagi yang lain :

Prof. sekarang mengenai peristiwa Surabaya.

Waktu itu Jendral Mallaby kan di bunuh rakyat. Apakah yang membunuh itu di hukum Prof., menurut Hukum Internasional ?

Prof. Mr. Soehardi :

Mengenai hal ini ada teori yang disebut, Levee en Masse (lave ang masse). Kejadian penembakan oleh seseorang tidak bisa di tuntutan kalau suatu negara terjepit. Lebih-lebih kalau penembakan itu tidak atas perintah atasannya.

Peristiwa Jembatan Merah Surabaya, Mallaby terbunuh oleh rakyat yang terdesak dan tidak diperintah oleh atasannya.

Peristiwa Surabaya ini termasuk Levee en Masse. menurut Hukum Internasional penembak itu tidak bisa di tuntutan. Jadi terbunuhnya Mallaby dibenarkan Hukum Internasional, termasuk Levee en Masse.

3. Pertanyaan Kepada Prof. dr. Moestopo.

Pada hari Selasa tanggal 10-11-1953 waktu peringatan Hari Pahlawan di Balai Pemda Surabaya, dimana peneliti hadir sebagai mahasiswa waktu itu, sempat bertemu dengan Bp. Prof. dr. Moestopo pelaku peristiwa pendaratan tentara Sekutu di Tanjung Perak. Beliau waktu itu adalah Komandan wilayah utara.

Peneliti bertanya kepada beliau waktu itu :

Gerakan massa yang menentang kedatangan tentara Inggris tahun 1945 itu bagaimana Prof. ? Prof. kan pimpinan disana. Malah memberi tempat tentara Inggris dengan batas Prapat Kurung ?

Jawab Prof. dr. Moestopo :

Sikap rakyat menentang kedatangan tentara Inggris ini, bisa terjadi secara massal, karena rakyat berpendapat bahwa tentara Inggris mendukung gerakan tentara Belanda yang akan mengembalikan Indonesia di bawah tangan Belanda lagi. Hal ini berarti menghilangkan kenyataan dikuasainya Surabaya ini oleh Pemerintah R.I. dalam hal ini oleh Walikota Surabaya Radjamin Nasution, Residennya Soedirman.

Di dalam pertempuran Surabaya waktu itu rakyat secara spontan melawan tentara Inggris dan Belanda, menggunakan senjata apa saja yang ada. Karena rakyat menyadari, kedatangan tentara Inggris yang diboncengi tentara Belanda waktu

itu, merupakan ancaman bagi keberadaan Pemerintah R.I. di Surabaya.

Peneliti waktu itu bertanya :

Apa Inggris benar membawa tentara Belanda Prof. ? Waktu itu saya berada di Surabaya Prof., memang benar saya mendengar kabar Belanda masuk Surabaya, dengan badan mereka di cat hitam, biar di kira Gurka, apa itu benar Prof. ?

Prof. dr. Moetopo :

Itu benar, saya kan sudah melarang tentara Inggris agar tidak ada tentara Belanda yang turut mendarat. Tapi nyata-nyatanya ada, malah dengan memakai cat segala.

Saya teruskan ya :

Waktu itu Inggris menggempur Surabaya dengan senjata berat dan kapal terbang, dan meriam ditembakkan dari laut.

Peneliti waktu itu :

Benar Prof., saya di Surabaya waktu itu. Serangan mulai jam 13.00 siang tanggal 10-11-1945. Surabaya seperti neraka. Di hujani peluru dari laut dan udara.

Tapi rakyat tidak ada yang lari, saya sendiri waktu itu jadi Barisan Pemuda disitu Prof., bagaimana matinya Mallaby itu ?

Prof. dr. Moestopo :

Itu kan terjadi sebelum 10 November 1945. Terbunuhnya Mallaby itu tanggal 29-10-1945. Hal itu terjadi karena

gerakkan massa rakyat secara spontan menentang tentara Inggris di Surabaya. Karena rakyat berpendapat bahwa Inggris masuk Surabaya membawa Belanda-Belanda itu.

Pembunuhan itu murni dilakukan oleh massa rakyat, yang tidak diperintah oleh atasannya.

Sebelumnya kan sudah ada perjanjian yang tidak tertulis antara pimpinan Indonesia (dan massa rakyat itu) dengan pimpinan tentara Inggris (Mallaby) itu bahwa Indonesia dan Inggris, bersama-sama untuk menjaga perdamaian antara Indonesia dan tentara Inggris.

Tapi Mallaby mendahului menembak diarahkan kepada massa rakyat itu, dari Gedung Internatio (sekarang Rajawali Jembatan Merah).

Ternyata hal ini ada salah paham tentara Inggris yang ada di Gedung Internatio dengan Head Quarter yang di gedung Stanvac, Mallaby yang sedang di kerumuni massa rakyat itu ada perintah dari Gedung Stanvac "tembak".

Pada hal tadinya kan sudah ada janji bersama, tidak akan terjadi tembak-menembak. Rakyat di tembak dengan baby-mortier, rakyat terdesak, maka tanpa ada perintah rakyat menembaki tentara Inggris dan Mallaby mati di situ.

Jadi peristiwa itu termasuk *levee en masse*.

Melihat kejadian-kejadian itu membuktikan bahwa rakyat memang mendukung negara Proklamasi secara bulat, dengan semboyan "Merdeka atau Mati".

Kesimpulan hasil studi dokumen dengan content analysis dan dengan wawancara khusus.

Dari keseluruhan isi Hasil Penelitian, baik hasil penelitian study dokumen, dengan content analisis maupun hasil penelitian wawancara khusus yang dilakukan oleh peneliti, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan seperti di bawah ini :

a. Bangsa Indonesia telah lama menghendaki Kemerdekaan :

Sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan UUD 45 alinea dua, bahwa telah bertahun-tahun lamanya bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan. Perjuangan demi Perjuangan telah dilakukan, tetapi selalu tidak berhasil. Sebagaimana dikenal dalam sejarah Indonesia, banyak para pemimpin yang mencoba memperjuangkan kemerdekaan seperti : Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tjik Ditiro, Hasanudin, Patimura dan masih banyak lagi. Mereka ini semua mencoba mengakhiri penjajahan di Indonesia tetapi belum berhasil.

Mengapa perjuangan demi perjuangan masa itu tidak berhasil. Karena perjuangan-perjuangan itu bersifat kedaerahan.

Selain itu perjuangan itu dilakukan oleh bangsa Indonesia berhadapan langsung dengan Belanda, tidak ada pihak lain sebagai penengah atau sebagai wasit.

Situasi pasca perang Dunia II sangat menguntungkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta telah berhasil mempersatukan seluruh rakyat Indonesia di bawah pimpinannya. Perjuangan Kemerdekaan waktu itu tidak lagi bersifat kedaerahan akan tetapi sudah merupakan perjuangan nasional. Soekarno-Hatta berhasil menggerakkan seluruh Rakyat secara bersama-sama melawan kekuasaan Belanda. Dapat dikatakan situasi domestik lebih mantap dibanding perjuangan kemerdekaan sebelumnya.

Disisi lain kondisi situasi Internasional juga menunjang perjuangan kemerdekaan itu. Soekarno-Hatta dapat memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam konteks ekonomi dan politik internasional waktu itu.

Waktu itu terjadi vacuum of power di Indonesia. Antara tanggal 15-8-1945 sampai 17-8-1945 terjadi vacuum of power itu. Walaupun tentara Jepang masih lengkap tapi sudah tidak ada semangat bertempur, semenjak Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15-8-1945. Sedangkan tentara yang bakal memulangkan Tentara Jepang belum sampai di Indonesia. Situasi ini merupakan peluang emas bagi Bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia.

Disisi lain pada 14-8-1941 telah dicetuskan oleh Roosevelt dan Churchill apa yang disebut prinsip-prinsip Atlantic Charter. Di dalam prinsip III dari Atlantic Charter itu menyatakan, bahwa mereka (Roosevelt dan Churchill) akan menghormati hak untuk tiap-tiap bangsa di dunia ini, untuk menentukan nasib sendiri dan memilih bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang ia kehendaki. Dan akan menghormati kedaulatan tiap-tiap negara (Prinsip Self Determination). Kemudian prinsip-prinsip the Atlantic Charter ini diterima oleh bangsa-bangsa pemenang Perang Dunia II.

Bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta memanfaatkan kedua peluang itu, yakni Vacuum of power dan Atlantic Charter, pada tanggal 17-8-1945 berhasil memproklamakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan selamat. Mulai hari itu detik itu Bangsa Indonesia hidup dalam alam kemerdekaan. Bangsa Indonesia mulai detik itu hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain di Dunia Internasional. Mulai detik itu Bangsa Indonesia tidak mengakui kekuasaan asing negara manapun atas Indonesia, termasuk kekuasaan Belanda. Mulai detik itu Bangsa Indonesia berdiri tegak ditengah-tengah masyarakat Internasional.

Mulai detik itu tugas Bangsa Indonesia yang bersatu padu dibawah pimpinan Soekarno-Hatta, adalah, bagaimana cara

mempertahankan eksistensi negara baru, Negara R.I. itu terhadap gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam pada itu Bangsa Indonesia dibawah pimpinan Soekarno siap mempertahankan eksistensi negara baru itu.

b. Negara R.I. begitu lahir langsung menghadapi musuh :

Sewaktu negara R.I. diproklamasikan 17-8-1945, wilayah Indonesia masih terkait isi pasal 1 Grondwet Belanda yang mengatakan, bahwa kerajaan Belanda meliputi wilayah-wilayah, negeri Belanda, Indonesia, Suriname dan Curaçao. Didalam mempertahankan eksistensi negara R.I. waktu itu, harus di-upayakan agar Pemerintah Belanda mengakui "Kedaulatan" negara Indonesia. Pengakuan demikian, terkandung arti, bahwa Belanda telah merubah isi dari pasal 1 Grondwet, sehingga berbunyi : Kerajaan Belanda meliputi wilayah-wilayah negeri Belanda, Suriname dan Curaçao. Selama Belanda belum mengakui "Kedaulatan" negara Indonesia selama itu pula, upaya Bangsa Indonesia untuk mempertahankan eksistensi negara R.I adalah belum tuntas. Karena ditinjau dari sudut Ketata negaraan Belanda, Indonesia masih tetap merupakan wilayah negeri Belanda. Dan Belanda akan mempertahankannya bila perlu melalui kekuatan militer.

Di dalam upaya ini, tidak boleh tidak mesti melalui jalan diplomasi. Namun diplomasi tidak mungkin berhasil kalau tidak ditunjang dengan kekuatan militer. Dan kekuatan militer akan berhasil dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan diplomasi, manakala didukung oleh seluruh Rakyat.

c. Berbeda dengan perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebelum PD II, maka perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi negara R.I. yang lahir setelah PD II, terdapat suatu Badan Internasional yang dapat bertindak sebagai wasit (diluar Indonesia dan Belanda) yakni PBB.

Perang dunia II adalah perang antara The United Nations (sekutu) melawan negara-negara fasis Jerman, Itali, Jepang (Tripartite Pact). Badan Internasional sebelumnya, the League of Nations, gagal karena tidak berhasil memelihara perdamaian Dunia.

Negara-negara Sekutu yang dipelopori Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet dan China, sambil menyelesaikan peperangan, telah merintis untuk membentuk Badan Internasional baru sebagai pengganti The League of Nations yang telah gagal itu. Maksudnya adalah membentuk wadah kerjasama internasional antara bangsa-bangsa di dunia. Dan badan

internasional baru itu, ditugasi memelihara Perdamaian Dunia masa datang.

Melalui serentetan perjanjian internasional, yakni mulai dari The Atlantic Charter 4 Agustus 1941, Declaration by United Nations, 1 Januari 1942, Moscow Declaration on General Security 30 Oktober 1943, Teheran Declaration 1 Desember 1943, Dumbarton Oaks Conference bulan Agustus sampai September 1944, Yalta Conference 11 Februari 1945, maka pada 25 April 1945 sampai dengan 26 Juni 1945 diadakan konferensi Internasional di San Francisco, dalam rangka membentuk Badan Internasional tersebut.

Di dalam konferensi Internasional San Francisco, dibentuklah suatu Badan internasional baru dengan nama, Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) (The United Nations Organization). Juga ditetapkan Piagam PBB (The Charter of United Nations).

PBB bertugas memelihara keamanan dan perdamaian Dunia, dalam hal ini oleh DK PBB. Sedang didalam Piagam PBB berisikan rambu-rambu Hukum Internasional yang harus ditaati oleh negara-negara anggota di dalam upaya mencapai Keamanan dan Perdamaian dunia termaksud.

Situasi internasional demikian sangat menunjang upaya bangsa Indonesia di dalam mempertahankan eksistensi negara R.I., negara Proklamasi.

d. Perjuangan Bangsa Indonesia dan negara R.I. dalam upaya mempertahankan eksistensi negara R.I. di dalam pelaksanaannya.

Belanda tidak mengakui keberadaan negara R.I., negara Proklamasi, tetap bersikap status quo antebellum. Tetap menuntut bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah Kerajaan Belanda (berdasarkan pasal 1 Grondwet Belanda). Bangsa Indonesia tetap berpendirian, bahwa negara R.I. adalah negara Indonesia merdeka, dan Bangsa Indonesia semenjak Proklamasi tidak lagi mengakui kekuasaan asing manapun atas Indonesia. Termasuk Kekuasaan Belanda.

Atas kenyataan diatas maka persengketaan antara Indonesia-Belanda tidak bisa dielakkan.

Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana cara penyelesaian persengketaan tersebut ?

Pemerintah Belanda menghendaki penyelesaian melalui kekuatan militer, ingin menghancurkan negara R.I. dengan peperangan. Dan memanfaatkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Selalu menyatakan didunia Internasional bahwa persoalan Indonesia-Belanda adalah persoalan kerajaan Belanda, adalah domestic jurisdiction kerajaan Belanda, PBB tidak perlu mencampurinya. Belanda selalu menutup agar masalah Indonesia-Belanda tidak dibicarakan didalam sidang-sidang DK. PBB.

Soekarno-Hatta Presiden R.I. dan sebagai pemimpin Rakyat Indonesia dengan memperhatikan konteks ekonomi domestic terlihat lemah, demikian pula keadaan militer. Karena Indonesia baru saja dijajah oleh Belanda dan Jepang sekian tahun lamanya.

Di sisi lain Soekarno memperhatikan adanya peluang-peluang yang ada dalam konteks politik dan ekonomi Internasional, yang dapat dimanfaatkan didalam mempertahankan eksistensi negara R.I.

Maka dari itu Soekarno Hatta meletakkan Strategi dasar, didalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda itu, malalui perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan DK PBB, melalui diplomasi didunia Internasional dibawah pengawasan DK. PBB.

Soekarno-Hatta memanfaatkan Badan Internasional yang dibentuk oleh negara-negara Sekutu di San Francisco ialah PBB. Soekarno-Hatta memanfaatkan PBB sebagai wasit di dalam penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda waktu itu.

Namun didalam upaya mengadakan perundingan itu ada hambatan, karena Belanda memanfaatkan pasal IV aturan Peralihan UUD 45, yakni adanya pemusatan kekuasaan ditangan Presiden, dan menuduh negara R.I. dan Soekarno-Hatta adalah fasis. Belanda tidak bersedia berunding dengan negara fasis.

Untuk menghilangkan hambatan itu, Soekarno-Hatta menetapkan maklumat Wakil Presiden No. X tgl 16-10-1945. disusul dengan tiga Maklumat Politik pelaksanaannya. Isi pokok dari keseluruhan maklumat-maklumat itu adalah untuk merubah system Pemerintah R.I. yang waktu itu menganut system Demokrasi Presidensial, menjadi system Demokrasi Parlemen dengan multi partai system, sehingga tuduhan Belanda menjadi tidak relevan karenanya. Tujuan pokok semuanya itu untuk membuka kemungkinan untuk bisa berunding dengan Belanda di bawah pengawasan DK. PBB.

Negara Proklamasi di bawah pimpinan Soekarno-Hatta didukung oleh seluruh rakyat secara bulat, dan rakyat secara spontan berniat mempertahankannya. Hal ini dibuktikan meletusnya pertempuran Surabaya bulan Oktober-November 1945.

Peristiwa Surabaya ini mempunyai dampak dunia Internasional, utamanya pada DK. PBB. Ternyata Kepahlawanan Rakyat Surabaya itu menembus dan mencuat keluar negeri sampai DK. PBB.

Wakil Ukraina Dmitri Manuilsky menolak dipergunakannya Tentara Inggris untuk memerangi pergerakan rakyat Indonesia.

Setelah menghadapi perlawanan Rakyat di Surabaya. Inggris berubah pikiran mundur dari persoalan Surabaya, dan mendesak Belanda agar berunding dengan Indonesia juga Amerika Serikat mendesak agar Belanda berunding dengan Indonesia, demi kepentingan Rim-land.

Atas desakan dari negara-negara Besar itu, akhirnya Belanda bersedia berunding. Terjadilah perundingan Linggarjati yang menghasilkan Persetujuan Linggarjati ditandatangani tanggal 25 Maret 1946.

Persetujuan Linggarjati merupakan modal awal yang sangat penting bagi perkembangan Negara Republik Indonesia. Karena merupakan modal awal untuk perundingan lebih lanjut.

Sebagai catatan bahwa perundingan berikutnya adalah perundingan Renville, kemudian K.M.B.

Sebagai hasil perundingan K.M.B. ini pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda mengakui Kedaulatan Negara Indonesia Serikat, R.I.S..

Dan pada tanggal 15 Agustus 1950 Negara R.I.S. ini dilebur menjadi Negara Republik Indonesia Kesatuan.

Soekarno-Hatta mengadakan diplomasi yang ditunjang oleh militer dan didukung oleh seluruh Rakyat, berhasil mempertahankan eksistensi Negara Proklamasi, Negara Republik Indonesia, suatu Negara Kesatuan.

Kesimpulan hasil studi Dokumen dengan Content Analysis dan wawancara khusus seperti di bawah ini :

"Bahwa negara Proklamasi, negara Republik Indonesia dapat ditegakkan eksistensinya dengan Kekuatan Diplomasi yang ditunjang oleh Kekuatan Militer dan didukung oleh seluruh Rakyat Indonesia". Atau dengan perkataan lain,

bahwa Negara Proklamasi negara Republik Indonesia dapat ditegakkan eksistensinya dengan kekuatan diplomasi yang disukung oleh kekuatan tritunggal (Pemerintah, Militer dan seluruh Rakyat).

LAMPIRAN III

**DOKUMEN-DOKUMEN
YANG DIPERGUNAKAN
DALAM PENELITIAN
STUDI DOKUMEN**

LAMPIRAN III

**DOKUMEN-DOKUMEN
YANG DIPERGUNAKAN
DALAM PENELITIAN
STUDI DOKUMEN
DENGAN (CONTENT ANALYSIS)**



**OLEH :
SOEPADI SARIOHARTONO**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

I

GRONDWET

VOOR HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1922

EERSTE HOOFDSTUK.

VAN HET RIJK EN ZIJNE INWONERS 1).

Artikel 1.

Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao.

1917. *Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied in Europa, benevens de koloniën en bezittingen in andere werelddeelen.*

1887. Art. 1 = art. 1, 1917.

1848. Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat in Europa uit de tegenwoordige provincien: Noordbrabant, Gelderland, Zuidholland, Noordholland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe en het Hertogdom Limburg, behoudens de betrekkingen van het Hertogdom Limburg, met uitzondering der vestingen Maastricht en Venlo en van hare kringen, tot het Duitsche verbond.

1840. *Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de volgende provincien: Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-*

(1) Dit opschrift luidde in de Grondwetten van 1840 en 1815: *Van het Rijk en deszelfs inwoners.*

II

II. DECLARATION OF PRINCIPLES KNOWN AS THE ATLANTIC CHARTER

(AUG. 14, 1941)

The President of the United States of America and the Prime Minister, Mr. CHURCHILL, representing His Majesty's Government in the United Kingdom, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world.

First, Their countries seek no aggrandizement, territorial or other. *Second*, They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned. *Third*, They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them. *Fourth*, They will endeavour with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity. *Fifth*, They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field, with the object of securing for all improved labour standards, economic advancement and social security. *Sixth*, After the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want. *Seventh*, Such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance. *Eighth*, They believe that all of the nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons, must come to the abandonment of the use of force. Since no future peace can be maintained if land, sea or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten, aggression outside of their frontiers, they believe, pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that the disarmament of such nations is essential.



III. DECLARATION BY UNITED NATIONS

(JAN. 1, 1942)

The Governments signatory hereto,

Having subscribed to a common program of purposes and principles embodied in the Joint Declaration of the President of the United States of America and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dated August 14, 1941, known as the Atlantic Charter,

Being convinced that complete victory over their enemies is essential to defend life, liberty, independence and religious freedom, and to preserve human rights and justice in their own lands as well as in other lands, and that they are now engaged in a common struggle against savage and brutal forces seeking to subjugate the world,

Declare:

1. Each Government pledges itself to employ its full resources, military or economic, against those members of the Tripartite Pact and its adherents with which such government is at war.

2. Each Government pledges itself to co-operate with the Governments signatory hereto and not to make a separate armistice or peace with the enemies.

The foregoing declaration may be adhered to by other nations which are, or which may be, rendering material assistance and contributions in the struggle for victory over Hitlerism.

Done at Washington, January first, 1942.

The original signatories of the Declaration were:

United Kingdom	Guatemala
United States	Haiti
U.S.S.R.	Honduras
China	India
Australia	Luxemburg
Belgium	Netherlands
Canada	New Zealand
Costa Rica	Nicaragua
Cuba	Norway
Czechoslovakia	Panama
Dominican Republic	Poland
El Salvador	South Africa
Greece	Yugoslavia

In addition to the original 26 signatories, 21 nations adhered to the Declaration:

Mexico	— June 5, 1942	Peru	— Feb. 11, 1945
Philippines	— June 10, 1942	Chile	— Feb. 12, 1945
Ethiopia	— July 28, 1942	Paraguay	— Feb. 12, 1945
Iraq	— Jan. 16, 1943	Venezuela	— Feb. 16, 1945
Brazil	— Feb. 8, 1943	Uruguay	— Feb. 23, 1945
Bolivia	— April 27, 1943	Turkey	— Feb. 24, 1945
Iran	— Sept. 10, 1943	Egypt	— Feb. 27, 1945
Colombia	— Dec. 22, 1943	Saudi Arabia	— March 1, 1945
Liberia	— Feb. 26, 1944	Syria	— March 1, 1945
France	— Dec. 26, 1944	Lebanon	— March 1, 1945
Ecuador	— Feb. 7, 1945		

IV

YALTA CONFERENCE

VII. YALTA (CRIMEA) CONFERENCE

(FEB., 1945)

A. *Report of the conference* (Feb. 11, 1945) Part. IV:

We are resolved upon the earliest possible establishment with our allies of a general international organization to maintain peace and security. We believe that this is essential, both to prevent aggression and to remove the political, economic and social causes of war through the close and continuing collaboration of all peace-loving peoples.

The foundations were laid at Dumbarton Oaks. On the important question of voting procedure, however, agreement was not there reached. The present Conference had been able to resolve this difficulty.

We have agreed that a conference of United Nations should be called to meet at San Francisco in the United States on April 25, 1945, to prepare the charter of such an organization, along the lines in the informal conversations at Dumbarton Oaks.

The Government of China and the provisional Government of France will be immediately consulted to sponsor invitations to the conference jointly with the Governments of the United States, Great Britain and the U.S.S.R. As soon as the consultation with China and France has been completed, the text of the proposal on voting procedure will be made public.

B. *Protocol of the proceedings of the conference* (Issued on March 24, 1945)

I. World Organization.

It was decided:

1. that a United Nations Conference on the proposed world organization should be summoned
2. the nations to be invited to the conference should be:
 - a. the United Nations as they existed on the 8th February, 1945, and
 - b. such of the Associated Nations as have declared war on the common enemy by the 1st March, 1945. When the Conference on World Organization is held, the delegates of the United Kingdom and the United States of America will support a proposal to admit to original membership two Soviet Socialist Republics i.e. the Ukraine and Byelo-Russia.

II. Territorial Trusteeship.

It was agreed that the five nations which will have permanent seats on the Security Council should consult each other prior to the United Nations Conference on the question of territorial trusteeship.

The acceptance of this recommendation is subject to its being made clear that territorial trusteeship will only apply to *a.* existing mandates of the League of Nations; *b.* territories detached from the enemy as a result of the present war; *c.* any other territory which might voluntarily be placed under trusteeship; and *d.* no discussion of actual territories is contemplated at the forthcoming United Nations conference or in the preliminary consultations, and it will be a matter for subsequent agreement which territories within the above categories will be placed under trusteeship.

III.

VIII. THE SAN FRANCISCO CONFERENCE

(APRIL 25—JUNE 26, 1945)

A. *Poland and France at San Francisco* (Foreign Office News Department, March 5, 1945, No. 27).

In regard to Poland . . . the position is, that at the Crimea Conference it was agreed that a Polish Government of National Unity is to be established through a reorganization on a broader democratic basis of the Polish Government now functioning in Poland with the inclusion of democratic leaders of Poland itself and from Poles abroad. It was also agreed that when this new Polish Provisional Government of National Unity had been properly formed in accordance with the steps outlined at the Conference diplomatic relations with it would be established by the Governments of the U.S., Great Britain and the Soviet Union. It is hoped that this projected Polish Provisional Government of National Unity will have been formed and diplomatic relations with it established by the major nations by the time the San Francisco Conference meets on April 25. If so an invitation to attend the Conference will be sent.

(France). Consultations in regard to the sponsoring of the invitations to San Francisco were held with respectively China and France. The Government of the Republic of China agreed to join in sponsoring the invitations. The Provisional Government of the French Republic agreed to participate in the Conference, but after consultation with the sponsoring governments the Provisional Government, which did not participate in the Dumbarton Oaks Conversations, is not sponsoring the invitation.

B. *Terms of the invitation to San Francisco* (March 6, 1945)

The Government of the U.S. of America, on behalf of itself and of the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the U.S.S.R. and the Republic of China,

16

invites the Government of . . . to send representatives to a conference of the United Nations, to be held on April 25, 1945, at San Francisco in the U.S.A., to prepare a charter for a general international organization for the maintenance of international peace and security.

The above-named Governments suggest that the Conference consider as affording a basis for such a charter, the proposals for the establishment of a general international organization which were made public last October as a result of the Dumbarton Oaks Conference, and which have now been supplemented by the following provisions for Section C of Chapter VI: . . . (= now article 27, Charter).

. . . In the event that the Government of . . . desires, in advance of the Conference to present views or comments concerning the proposals, the Government of the U.S.A. will be pleased to transmit such views and comments to the other participating Governments.

C. *51 United Nations*

Invited to the Conference were 50 Nations:

46 signatories of the United Nations Declaration of Jan. 1, 1942 (see above under III).

(Poland could not be invited as a recognized Polish Government of National Unity was not constituted until after the Conference; however a place was reserved for Poland's signature as Original Member);


Argentina, the Byelo-Russian S.S.R. and the Ukrainian S.S.R. were admitted on April 30;

Denmark was invited after its liberation, on June 5.

New Members: cf. note on Art. 3 of the Charter.

D. *Signature and coming into force of the Charter*

26 June 1945: signature at San Francisco.

24 October 1945: Protocol of Deposit of Ratifications, signed by Secretary of State James F. Byrnes, declares the fulfilment of the Charter. 

E. *The three documents adopted at San Francisco*
 1. The Charter of the United Nations, p. 21.
 2. The Statute of the World Court, p. 205.
 3. Agreement establishing the Preparatory Commission of the United Nations, p. 18.

VI

CHARTER OF THE UNITED NATIONS AND RELEVANT DOCUMENTS

We the peoples of the United Nations

Determined

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

And for these ends

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples.

Have resolved to combine our efforts to accomplish these aims

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

21

CHAPTER VII

ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION

Art. 39. The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

See Sec. C. Res. of June 27, 1950, noting that the attack on South Korea constituted a breach of the peace; that the North Korean authorities had failed to obey the Council's cease-fire order of June 23, 1950 (adopted by 9 votes to none, with Yugoslavia abstaining and the U.S.S.R. absent); that urgent military measures were required to restore international peace, and recommending that the Members "furnish such assistance to the Republic of South Korea as may be necessary to repel the armed attack and to restore international peace and

VI

2

PURPOSES AND PRINCIPLES

Art. 1. The purposes of the United Nations are:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

Ref.: para. 2. See Draft Declaration on Rights and Duties of States, Annex 1, p. 23.

Ref.: para. 3. See Universal Declaration of Human Rights, Chapter X, Annex 5, p. 144.

Art. 2. The Organization and its Members, in pursuit ^{kejar} of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice are not endangered.
4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

VII

PROKLAMASI*

KAMI BANGSA INDONESIA
DENGAN INI MENJATAKAN

Kemerdekaan Indonesia !!!

Hal-hal yang mengenai pemerintahan
kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam
tempo yang sesingkat-singkatnya.

DJAKARTA, 17 AGUSTUS 1945

Atas nama bangsa Indonesia:

SOEKARNO-HATTA

* Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 halaman 45 kolom 1.
Diproklamkan pada djam 11.30 (djam Nippon) di Pergangsaan Timur,
No. 56 Djakarta.

VIII

Pembukaan*

(Undang² Dasar Negara Republik Indonesia).

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang² Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

* Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 halaman 45 kolom 1.

IX

Undang-Undang Dasar*

B A B I.

BENTUK DAN KEDAULATAN.

Pasal 1.

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

B A B II.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT.

Pasal 2.

- (1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-Daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
- (3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

B A B III.

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA.

Pasal 4.

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5.

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

* Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 halaman 46 kolom 2.

IX 2

Pasal 6.

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara jang terbanjak.

Pasal 7.

Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 8.

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjabannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunja.

Pasal 9.

Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

„Demi Allah, saya bersumpah akan menenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Djandji Presiden (Wakil Presiden):

„Saya berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 10.

Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain.

Pasal 12.

Presiden menjatakan keadaan bahaya. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.

IX

3

Pasal 13.

- (1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
- (2) Presiden menerima Duta Negara lain.

Pasal 14.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15.

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

B A B IV.

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

Pasal 16.

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.

B A B V.

KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 17.

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
- (2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-Menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

B A B VI.

PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 18.

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.

B A B VII.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 19.

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

IX 4

Pasal 20.

- (1) Tiap-tiap Undang-Undang menghenclaki .persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2) Djika sesuatu rantjangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

Pasal 21.

- (1) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan rantjangan Undang-Undang.
- (2) Djika rantjangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

Pasal 22.

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
- (3) Djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

B A B VIII.

HAL KEUANGAN.

Pasal 23.

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.
- (2) Segala padjak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.
- (3) Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Hal keuangan Negara selandjutnja diatur dengan Undang-Undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung djawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

~~IX~~ 5

BAB IX.

KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24.

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 25.

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

BAB X.

WARGA NEGARA.

Pasal 26.

- (1) Jang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
- (2) Syarat-syarat jang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 27.

- (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wadajib mendjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja..
- (2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

BAB XI.

AGAMA.

Pasal 29.

- (1) NEGARA berdasar atas KE-TUHANAN JANG MAHA ESA.
- (2) NEGARA mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.

IX 6

PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 30.

- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wadajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
- (2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang.

B A B XIII.

PENDIDIKAN.

Pasal 31.

- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 32.

Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia.

B A B XIV.

KESEDJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 33.

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

Pasal 34.

Fakir miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

B A B XV.

BENDERA DAN BAHASA.

Pasal 35.

Bendera Negara Indonesia ialah SANG MERAH PUTIH.

Pasal 36.

Bahasa Negara ialah BAHASA INDONESIA.

IX 7

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR. 7

Pasal 57.

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada djumlah anggauta jang hadir.

ATURAN PERALIHAN.

Pasal I.

Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II.

Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berisku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III.

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV.

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN.

- (1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.



1

Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia

KOMITE NASIONAL. PARTIJ NASIONAL INDONESIA. BADAN PENOLONG KELUARGA KORBAN PERANG. BADAN KEAMANAN RAKJAT. Penetapan Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia tentang pembentukan Komite Nasional di seluruh Indonesia, gerakan Partij Nasional Indonesia, Badan Penolong Korban Perang dan Badan Keamanan Rakjat.

Dalam rapat tanggal 22 Agustus 1945 Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan soal-soal:

1. Komite Nasional.
2. Partij Nasional Indonesia dan
3. Badan Keamanan

seperti berikut :

I. KOMITE NASIONAL.

1. Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dengan pusatnja di Djakarta.
2. Komite Nasional adalah pendjelmaan kebulatan tudjuan dan tjita-tjita Bangsa Indonesia untuk menjelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakjat.
3. Usaha Komite Nasional ialah :
 - a. Menjatakan keamanan rakjat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka ;
 - b. Mempersatukan rakjat dari segala lapisan dan djabat. supaya terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat ;
 - c. Membantu menenteramkan rakjat dan turut mendjaga keselamatan umum ;
 - d. Membantu penimpin dalam menjelenggarakan tjita-tjita Bangsa Indonesia. dan didaerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesediahteraan umum.
4. Komite Nasional di Pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite-Komite Nasional didaerah. Dimana perlu, didaerah didirikan pusat daerah, jaitu untuk : Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Ketjil.
5. Komite Nasional dipusat, dipusat daerah dan didaerah dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang anggota pengurus, yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional. Buat pertama kali Ketua Pusat Daerah ditetapkan oleh Pemimpin Besar Ir. Sukarno.

X

2

II. PARTISIPASI INDONESIA.

1. Gerakan ini bernama Partij Nasional Indonesia, jang berkedudukan ditempat Pengurus Besarnja.
2. Tudjuan Partij ialah : Negara Republik Indonesia jang berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan kedaulatan Rakjat.
3. Usaha untuk mentjapai tudjuan itu ialah :
 - a. Memperkuat persatuan Bangsa dan Negara ;
 - b. Memperbesar rasa tjinta, setia dan bakti kepada Tanah-Air ;
 - c. Mengichtiarkan program ekonomi dan sosial seperti dibawah ini :
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas gotong rojong.
 1. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ;
 2. Bumi dan air dan kekayaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.
 3. Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.
 4. Hak tiap-tiap Warga Negara atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.
 - d. Membantu tertjapainja keadilan sosial dan perikemanusiaan dengan djalan perdamaian Internasional.
4. Jang boleh mendjadi anggota Partij ialah orang Indonesia jang berumur 18 tahun keatas.
5. Pimpinan Partij terdiri dari pada :
 - a. Pengurus Besar.
 - b. Pengurus Daerah.
 - c. Pengurus Tjabang.
 Pimpinan diatas langsung memimpin pimpinan dibawahnja.
6. Keuangan partij terdapat dari iuran anggautanja dan pendapatan lain-lain.
7. Buat pertama kali Ketua dan Ketua Muda Pengurus Daerah ditetapkan oleh Ir. Sukarno.

III. BADAN PENOLONG KELUARGA KORBAN PERANG.

Pendahuluan.

Dimasa sekarang ini maka sangatlah perlu mengadakan satu Badan jang dapat mendjaminkan kepada Rakjat jang menderita akibat peperangan pertolongan dan bantuan.

Pertolongan dan bantuan ini hendaknja setjara lahir dan bathin, maka itu pada tanggal 20 Agustus 1945 berdirilah dikota Djakarta suatu Badan jang diberi nama

„BADAN PENOLONG KELUARGA KORBAN PERANG”.

Dalam garis-garis besarnja akan ditetapkan Anggaran Dasar dan Chususnja akan tetapi jang penting harus dipentingkan dahulu, maka itu ada satu Bagian jang sekarang djuga sudah dapat dengan segera bekerdja jaitu :

XI

Maklumat Pemerintah

PARTIJ NASIONAL INDONESIA.
KOMITE NASIONAL. BENDERA
NASIONAL. Penundaan aktiviteit
gerakan Partij Nasional Indonesia
untuk mentjurahkan segala tenaga
kepada Komite Nasional; pengibaran
Bendera Nasional; penggantian pe-
kik perdjongan „Hidup” dengan
salam Nasional „Merdeka”.

Atas perintah Paduka Jang Mulia Presiden diumumkan
sebagai berikut:

I. **PARTAI NASIONAL INDONESIA.**

Berhubung dengan maha-pentingnja kedudukan dan arti
Komite Nasional untuk memusatkan segala tindakan dan
susunan persatuan rakjat, maka gerakan dan persiapan
Partai Nasional Indonesia untuk sementara waktu ditunda
dan segala aktiviteit harus ditjurahkan kedalam Komite
Nasional.

Komite Nasional ini hendaklah diperhebat sampai kedesa-
desa. Komite Nasional boleh mengadakan rapat-rapat
umum dan sebagainya.

II. **PERKIBARAN BENDERA:**

Mulai tanggal 1 bulan 9, diperintahkan, Bendera Nasional
SANG MERAH PUTIH dikibarkan terus diseluruh Indo-
nesia.

III. **SALAM NASIONAL:**

Mulai tanggal 1 bulan 9 ditetapkan bagi seluruh bangsa
Indonesia waktu bertemu dimana-mana sadja saling
menghormat dengan utjapan: MERDEKA!!!

PENGGANTIAN PEKIK PERDJOANGAN.

Berhubung dengan penetapan Salam Nasional untuk
seluruh rakjat Indonesia, maka Markas Besar Barisan
Pelopor memerintahkan kepada seluruh barisan, bahwa
mulai tanggal 1 bulan 9 pekik perdjongan „HIDUP” di-
ganti dengan Salam Nasional „MERDEKA”.

Djakarta, 31 Agustus 1945.

XII

1

D: Maklumat Wakil President No. X

KOMITE NASIONAL PUSAT
Pemberian kekuasaan legislatief
kepada Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SESUDAH MENDENGAR pemitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannya jang hingga sekarang didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat;

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;

MENIMBANG selandjutnja bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat;

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudjuai bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.

- Berita Republik Indonesia Tahun I No. 2 halaman 10 kolom 3 Nomer hai jang sebetulnja ada riwayatnja adalah No. X, bukannya No. 10, seperti seringkali dimuat dalam surat-surat resmi. Didalam usulnja Rapat Komite Nasional pada tg. 16/10-45 ada ketentuan, bahwa nama badan itu adalah "Dewan Pekerdja" (Working Committee), sedang Mr. Amir Sjarifudin dan Sutan Sjahrir disertai memilih anggotaa dan memben-tuk Dewan Pekerdja tersebut.

XII

2

Pendjelasan Maklumat Wakil Presiden No X*

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewadajiban dan kekuasaan Badan Pekerdja Komite Nasional, yang dibentuk oleh Rakjat pada tanggal 16/17 Oktober 1945 berhubung dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut:

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara dan mengingat gentingnja keadaan, pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerdjakan oleh sebuah Badan Pekerdja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekerdja berkewadajiban dan berhak:

- a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Ini berarti, bahwa Badan Pekerdja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Badan Pekerdja tidak berhak dalam kebijaksanaan (dagelijks beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata-mata.
- b. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala matjam urusan Pemerintahan. Jang mendjalankan Undang-Undang ini ialah Pemerintah, artinya: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai yang dibawahnja.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewadajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanja Badan Pekerdja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (uitvoering).

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden).

Kewadajiban dan kekuasaan Badan Pekerdja yang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat belum terbentuk dengan tjara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Djakarta, 20 Oktober 1945.

* BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL

K E T U A,
S J A H R I R.

P E N U L I S,
S O E W A N D I.

* Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4.

Maklumat Politik*

POLITIK PEMERINTAH Haluan dari Politik Pemerintah Republik Indonesia, yang telah disetujui oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.

Setelah lebih dari dua hulan lamaanja kita dengan berbagai-bagai djalan menjatakan hendak hidup sebagai bangsa yang merdeka, pada saat kita menghadapi suasana baru didalam perjuangan kemerdekaan kita, pada saat dunia mendekati kita untuk memandang lebih teliti diri dan pendirian kita, perlu kita maju kemuka dengan wajah yang bersih dan dada terbuka, menundjukkan kebenaran kita yang tidak sadsja berdasarkan keadilan dan peri-kemanusiaan melainkan pasti djuga berdasarkan atas akal serta perhitungan yang sehat.

Setelah Pemerintah Belanda di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942 menjerah kepada militer Djepang, di Bandung dengan hampir sama sekali tiada mengadakan perlawanan, maka tinggallah bangsa kita yang tidak bersendjata mendjadi umpan militerisme Djepang yang keras dan kedjam itu. Tiga setengah tahun lamaanja rakyat kita menderita paksaan dan kakedjaman Djepang, seperti belum pernah dialaminja didjaman pendjadian Belanda berpuluh tahun yang terkemudian. Seluruh rakyat kita diperbuat seolah-olah barang yang murah yang diboroskan didalam peperangan. Dari rakyat dijelata yang diperbudak dengan kerdja paksa dan hasil buminja dirampas, sampai ke kaum terpeladjar yang dipaksa berdjuta dan menipu rakyat, merasai genggaman militerismenja. Kesengsaraan rakyat kita lahir dan batin didalam tiga setengah tahun ini boleh dikatakan tak berbatas. Seluruh rakyat kita dipaksa berbaris dan tahu menerima perintah setjara militer. Kepintaran militer inilah yang ditinggalkan oleh pendjadjah Djepang sebagai djedjak didalam djiwa rakyat dan terutama didalam djiwa pemuda kita.

Tanggungjawab pendjadjahan Belanda dalam hal ini adalah bahwa bangsa kita yang berdjumlah 70.000.000 djiwa setelah berabad "dididik" oleh Belanda, pada tanggal 9 Maret 1942 diserahkan kepada militerisme Djepang didalam segala-galanja tidak berdjaja untuk menghadapi kekuasaan dan kekerasan serta tipu muslihat propaganda Djepang, oleh karena rakyat kita belum pernah dipertjajai bersendjata serta tidak pula dipertjajai perlengkapan inteleknja yang tjukup, untuk dapat menghadapi sendiri perputaran sedjarah seperti terdjadi pada tanggal 9 Maret 1942 itu.

BELADJAR MENGHARGAI DIRI SENDIRI.

Tetapi didalam kesulitan yang sebesar-besarnja itu rakyat kita beladjar membanding pendjadjahan Belanda dengan sebenarnja, segala kekurangan tak pernah terasa setadjam dan

* Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 2 kolom 3/4.

XIII 2

sedjelas, ketika rakjat ditinggalkannya dengan tjara jang diperlihatkannya itu. Njata benar kelenahan dan kekosongan perumahan pendjadjahan Belanda.

Maka pada saat itu timbullah pada rakjat kita kesedaran baru, perasaan kebangsaan jang lebih tajam dan pada diwaktu jang lalu. Perasaan itu dipertadjam lagi oleh propaganda ke-Asiaan Djepang. Kekerasan jang dilakukan Djepang tidak menghambat tumbuhnja kesadaran kebangsaan Indonesia. Selama tiga setengah tahun pendjadjahan Djepang seluruh Negara serta perusahaann-perusahaan jang dahulu dipimpin oleh orang Belanda, didjalankan oleh orang Indonesia, diawasi oleh orang Djepang, jang biasanja njata tidak tjapak.

Didalam kekedjaman dan kekerasan pendjadjahan Djepang itu rakjat dan bangsa kita beladjar menghargai dirinja sendiri, mempertadjam kesedaran kebangsaannya terhadap Djepang dan djuga terhadap bangsa asing lainnja. Berdjuta-djuta djiwa rakjat kita melajang, serta seluruh bangsa sengsara selama tiga setengah tahun oleh karena kekedjaman Djepang, akan tetapi djuga oleh karena kesalahan Belanda jang mengurbankan kita kepada kekerasan Djepang itu dengan tidak memungkinkan kita mempunyai alat pertahanan jang diperlukan.

Oleh karena itu maka sebenarnya pihak Belanda pada butinja tidak berhak untuk menjalahkan orang-orang jang diserahkan pada kekedjaman Djepang itu, dengan tuduhan bekerdja bersama dengan Djepang, sedangkan orang Belanda sendiri, didalam keadaan jang sama, umumnya lebih suka lagi melajani Djepang. Selain dari pada itu memang pula pembangunan perasaan kebangsaan kita itu ada djuga jang merupakan perlawanan terhadap kekerasan Djepang, setjara gelap dan djuga pemberontakan, sabotage dan lain-lain seperti dapat dibuktikan oleh ribuan orang gerakan kiri kita jang dihukum, disiksa, dibunuh dan diburu.

Buktinja adalah pemberontakan di Tasikmalaja, di Indramaju, di Blitar, di Sumatra, di Borneo Barat d.l.l.

Sebagian lain dari kaum nasionalis kita jang menjelenggarakan kesedaran kebangsaan dengan djalan jang sjah, terpaksa bekerdja bersama dengan pihak Djepang, ikut berbaris serta berteriak didalam barisan-barisan Djepang jang dibentuknja untuk keperluan perangnja.

Bagaimana kerasnja arus kebangsaan itu dapat pula dilihat pada golongan kaum nasionalis jang bekerdja bersama dengan Djepang itu, jang selamanja mempertahankan tjita-tjita kerakjatannya, meskipun dipaksa berbaris didalam barisan totaliter Djepang. Hal ini dapat dibuktikan oleh Undang-Undang Dasar jang njata benar dimaksudkan supaya berdasar kerakjatan, meskipun ia dirantjang oleh mereka didalam djaman pendjadjahan Djepang. Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, 1945 kesedaran kebangsaan Indonesia memuntjak mendjadi kemauan bangsa jang bulat untuk mewujudkan kedaulatannya. Seluruh rakjat kita masuk tertarik kedalam gelombang kebangsaan jang besar itu.

XIII 3

BAGAIMANA DENGAN BELANDA?

Penjerahan Djepang kepada Sekutu telah pula bermula. Bagi dunia, terutama bagi pihak yang telah mendirikan susunan United Nations di San Francisco timbul soal bagaimana hendak menempatkan kedaulatan. Negeri Belanda yang diakuinja itu pada bangsa Indonesia yang telah menjatakan kedaulatannya sendiri.

Pada Konperensi-konperensi internasional pihak Belanda selalu mengemukakan, bahwa bangsa Indonesia sangat tjinta kepada pemerintah Belanda, yang katanja bukan pemerintah djadjaan. Akan tetapi njata sekarang pada dunia, bahwa djika Belanda hendak kembali mendjadi pemerintah di Indonesia lebih dahulu kemauan rakjat Indonesia yang sekarang telah dua bulan lamanja dinjatakan pada dunia dengan berbagai djalan, harus dihantjurkan dengan kekerasan, sehingga akan terdjadi pengurbanan djiwa yang tak ketjil djumlahnja. Njata bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia tidak akan dapat diwudjudkan, djika tidak dengan memperkosa maksud perdjandjian Atlantic Charter serta perdjandjian United Nations di San Francisco.

Sebenarnya pihak Belanda yang dengan begitu mudah menjerahkan nasib bangsa kita kepada kekerasan Djepang sekali-kali moreel tidak berhak lagi untuk kembali begitu sadja di Indonesia, seolah-olah tidak terdjadi apa-apa sedjak tahun 1942, serta pula seakan-akan ia tidak bersalah apa-apa dan segala harus kembali mendjadi keadaan sebelum petjah perang.

Kehendak Belanda ini bertentangan dengan segala perasaan keadilan dan djika dibenarkan tentu harus didjalankan dengan perkosaan segala perasaan keadilan dan kemanusiaan. Menurut dasar-dasar Charter San Francisco, maka Negara yang diberi tanggung djawab atas bangsa yang belum merdeka itu tidak mungkin mendjalankan tanggung djawabnja dengan memperkosa dasar-dasar-Charter United Nations, itu sendiri.

Lebih lagi terasa kepintjangan keadaan ini, djika dilihat, bahwa pihak Belanda sama sekali tidak mempunjai djawab yang pantas terhadap kesulitan yang dihadapinja itu. Hingga sekarang belu: sedikit djuga terjata, bahwa yang dikehendaki oleh Belanda itu lain dari pada pengembalian pendjadjahannya yang lama, meskipun ia mengumumkan keterangan Ratu Wilhelmina yang diutjapkan pada tahun 1942. Untuk memaksakan tjara pemerintahan yang dimaksudkan oleh Belanda itu, ia tak mampu berbuat lain dari pada mengharap akan dapat menggunakan kekuatan militer Sekutu yang datang memperlutjuti sendjata Djepang di Indonesia, sebagai alat untuk dapat melemahkan atau menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya sendiri terhadap Pemerintahan yang hendak dipaksakan oleh pihak Belanda atas dirinja.

Akan tetapi, dengan semangat kebangsaan kita yang menjala njala, pasti pemerintahan Belanda itu, meskipun memakai kekerasan militer yang modern, tidak akan dapat mentjegah

XIII 4

bangsa kita untuk mempunyai Pemerintah yang dipilihnya sendiri.

Selama dunia tak mengetahui lain jalan untuk memcauhi kewadajibannya terhadap anggapan kedaulatan Belanda atas Indonesia itu, dari pada menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. selama itu pula dunia tentu tidak akan dapat manfaat yang semestinya dari kekajaan Negeri dan Bangsa Indonesia.

Hal ini terlebih-lebih akan menjedihkan terhadap Negara Negara tetangga Indonesia, terutama Australia, Filipina dan Amerika Serikat.

Terlebih-lebih Amerika Serikat yang oleh seluruh Asia dan terutama oleh Indonesia diharapkan akan dapat memberi pertolongan yang sebesar-besarnya dikemudian hari, didalam usaha bangsa Indonesia memajukan negaranya serta penghidupan rakyatnya.

Umpamanya dengan pertolongan industri besar Amerika serta kredit Amerika dan pembelian barang mentahnya yang banjak itu.

SIKAP BANGSA KITA!

Kita orang Indonesia didalam usaha hendak menjempurnakan kedudukan bangsa kita, tidak perlu menggunakan kekerasan. Djika ada kekerasan terdjadi ialah ta' lain oleh karena pihak Belanda memerlukan memakai kekerasan terhadap bangsa kita supaya dapat memaksakan kehendaknya atas kita.

Dipihak kita tidak ada keinginan untuk memaksa bangsa lain, kita hanya berkehendak diberi kemerdekaan, dibiarkan menjempurnakan susunan negara kita sendiri.

KITA MENGETAHUI BAHWA KEDUDUKAN NEGERI KITA MELETAKKAN SATU TANGGUNG DJAWAB JANG RESAR DIBAHU KITA TERHADAP KELUARGA DUNIA. KITA TIDAK MEMBENTJI BANGSA ASING, DJUGA TIDAK BENTJI KEPADA BANGSA BELANDA. APALAGI ORANG INDO, AMBON ATAU MENADO JANG SEBENARNJA BANGSA KITA DJUGA. MALAHAN KITA MENGETAHUI DAN MENGERTI BENAR BAHWA UNTUK KEPERLUAN NEGERI DAN BANGSA KITA DIDALAM BEBERAPA TAHUN JANG AKAN DATANG INI, KITA AKAN MEMERLUKAN PERTOLONGAN BANGSA ASING DIDALAM PEMBANGUNAN NEGERI KITA BERUPA KAUM TEKNIK, DAN KAUM TERPELADJAR, PUN DJUGA KAPITAL ASING.

DIDALAM MEMENUHI KEPERLUAN ITU KITA TIDAK AKAN MENGHINDARKAN KENJATAAN BAHWA ORANG JANG BERBAHASA BELANDA JAITU ORANG BELANDA. MUNGKIN AKAN LEBIH BANJAK DIPERGUNAKAN OLEH KARENA MEREKA TELAH ADA DISINI DAN LEBIH BIASA AKAN KEADAAN DISINI. SEHINGGA PENGLAKSANAAN KEMERDEKAAN KITA ITU BELUM PERLU BERARTI KERUGIAN BESAR UNTUK PIHAK BELANDA.

XIII 5

DJIKA DIUKUR DENGAN UANG ATAU DJIWA, AKAN TETAPI TENTU SEKALI BERARTI PERUBAHAN JANG SEBESAR-BESARNJA DIDALAM KEDUDUKAN POLITIK-NJA.

KITA yakin bahwa ~~tanpa~~ kita jang kaja-raja ini djika diusahakan dengan ~~sesungguhja~~ untuk meninggikan derajat perhidupan bangsa kita serta dunia umumnya, akan masih banjak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Australia dan Philipina untuk turut dalam pembangunan Negara dan Bangsa kita.

Akan tetapi sekalian itu hanja akan dapat dimulai djikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, jaitu dengan pengakuan Negara dan Pemerintahn jang telah kita pilih. Bukan sadja kita dan barangkali pihak Belanda berkepentingan dengan lekasnja terlaksananja hal ini, akan tetapi seluruh dunia jang menunggu-nunggu sumbangan tanah bangsa Indonesia terhadap kekurangan jang ada didunia sekarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala jang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala hutang Hindia Belanda sebelum penjerahan Djepang dan patut mendjadi tanggungan kita, kita akui sebagai hutang kita.

Segala milik bangsa asing selain dari pada jang diperlukan oleh Negara kita untuk diusahakan oleh Negara sendiri, dikembalikan pada jang berhak, serta jang diambil oleh Negara akan dibayar kerugiannya dengan seadil-adilnja.

Sedjadar dengan usaha persahabatan kita dengan tetangga kita serta dengan seluruh dunia, kita tidak sadja akan ber-ichtiar mendjadi suatu anggauta United Nations menjtudjui benar-benar maksud Charter United Nations, akan tetapi didalam Negeri kita akan melaksanakan kedaulatan rakjat kita dengan aturan kewargaan jang akan lekas membuat semua golongan Indo Asia dan Eropah mendjadi orang Indonesia sedjati, mendjadi patriot dan demokrat Indonesia.

Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita, tjita-tjita dan dasar kerakjatan itu benar-benar dasar dan pedoman perhidupan masyarakat dan Negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu Pemerintah akan berganti dan Undang-Undang Dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakjat kita jang terbanjak.

Terhadap rakjat dan penduduk umumnya, kita akan mendjalkan suatu rentjana kemakmuran jang besar jang mungkin memerlukan banjak kredit dari luar negeri dan djuga banjak hasil industri Amerika Serikat, Australia dan lain-lain Negeri jang berdagang dengan Negeri kita. Tiap-tiap penduduk ditanggung keselamatannya didalam berusaha, djika tidak melanggar aturan negeri, meskipun ia orang Belanda.

XIII 6

PERTIMBANGAN BAGI BELANDA.

BAGI BANGSA DAN RAKJAT BELANDA MEMANG SEHARUSNJA MENDJADI PERTIMBANGAN JANG SUNG-GUH-SUNGGUH: APAKAH IA AKAN MENURUT NAFSU SEGOLONGAN KETIL KAUM KAPITAL DAN PENDJADJAH JANG PEMANDANGANNJA TERUTAMA DIPENGA RUHI OLEH KEPENTINGANNJA SENDIRI DAN DENGAN ITU AKAN MENGORBANKAN BERIEU DJIWA PEMUDA SERTA BANJAK TENAGA BANGSA BELANDA, DIDALAM ICHTIAR JANG BEGITU BESAR RISIKONJA, JAITU MENAKLUKKAN KEMBALI BANGSA INDONESIA JANG TELAH BERDIRI, ATAU APAKAH IA AKAN MENERIMA DAN MENJESUAIKAN DIRINJA DENGAN PERDJALANAN SEDJARAH, MENTJARI DJALAN DAMAI SUPAJA KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN BANGSA BELANDA JANG BEGITU BESAR DI INDONESIA INI DAPAT DISELENGGARAKAN SELANDJUTNJA, SUPAJA PUTERA-PUTERANJA DAN KETURUNANNJA JANG BERADA DISINI DAPAT PULA HIDUP DENGAN SELAMAT DIDALAM USAHA MENTJARI NAFKAHNJA.

Sedjak kita akan mendapat kesempatan jang sepenuhnya untuk memberikan seluruh tenaga kita pada pembangunan rakjat dan bangsa kita, dengan setjepat-tjepatnja kita berusaha melaksanakan hak-hak rakjat kita jang sesungguhnya sesuai dengan tjita-tjita United Nations, jaitu tidak sadja mendjadi rakjat jang merdeka menjatakan pikirannja, merdeka memilih kejakinan dan agamanja, bebas dari sewenang-wenang dan kekuatan, bebas dari kekurangan, melainkan djuga mendjadi rakjat jang sehat dan tjerdas karena adanja pengawasan ke sehatan dan pendidikan jang : odern untuk seluruh rakjat kita dan untuk segala lapisan penduduk.

Selaras dengan itu perhubungan kita dengan Dunia luar tidak sadja lagi akan terbatas pada pertukaran barang dan orang, akan tetapi lambat laun mendjadi pertukaran ilmu dan kebudajaan, terutama dengan tetangga-tetangga kita, lebih-lebih dengan bangsa jang sedarah dengan kita seperti bangsa Filipina. Kita pasti akan sanggup memberi sumbangan jang bagus kepada kebudajaan dunia, djika kita telah mendapat kesempatan sepenuh-penuhnja sebagai bangsa jang sedjadjar kedudukannja dengan bangsa-bangsa lain didunia.

Djakarta, tanggal 1 Nopember 1945.

WAKIL PRESIDEN,

MOHAMAD HATTA.

XIV 1

Pengumuman Badan Pekeraja

~~No. 3~~

~~PARTAI POLITIK.~~ Hal Badan Pekeraja memadjukan usul kepada Presiden supaya rakjat diberi kesempatan seluas-luasnja untuk mendirikan partai-partai politik.

Oleh Badan Pekeraja telah dibitjarkan soal mendorong dan memimpin rakjat kita dalam perdjuaan kemerdekaan jang masih belum selesai ini setelah sifat Komite Nasional berubah supaya disamping Pemerintah rakjat-pun terus berdjoang dengan pimpinan jang teratur.

Kesimpulan pembitjaraan itu dapat diterangkan seperti berikut :

Berdirinja Komite Nasional mula-mula disertai dengan pembentukan suatu partai ialah Partai Nasional Indonesia. Keduaduanja dengan maksud jang sama jaitu mempertahankan kemerdekaan Negara kita. Oleh karena pada waktu itu persatuan segala aliran dan lapisan masjarakat jang diperlukan, dan Komite Nasionallah jang terajata dapat memenuhi keperluan tersebut, sedang sebaliknya pendirian Partai Nasional mungkin akan menimbulkan berdirinja partai-partai lain, jang berarti mungkin melemahkan persatuan jang dibutuhkan pada waktu itu. maka buat sementara dihentikanlah usaha pembentukan partai.

Dalam waktu dua bulan semendjak berdirinja Republik kita, sudah ternjata benar-benar komite² itu memenuhi kewadajibannya sebagai badan jang harus mempertahankan kemerdekaan dan membantu Pemerintah, jang mula-mula belum terbentuk dan belum dapat bekerdja dengan seksama.

Dalam pada itu setelah bangsa kita bekerdja dan berdjoang dua bulan lamanja, kekuasaan sipil seluruhnja dapat dimiliki oleh Pemerintah kita dan mulanja berputarlah roda pemerintahan dengan njata.

Dengan keadaan itu, setelah berusaha supaya tiap-tiap urusan Negara djangan lagi diurus oleh Komite Nasional, tetapi oleh badan pemerintahan jang bersangkutan, sampailah waktunja Komite Nasional berganti sifat. Maka rapat Komite Nasional Pusat tanggal 16-17 Oktober itulah jang berubah sifat Komite Nasional mendjadi Badan Perwakilan Rakjat.

Dengan berputarnja roda pemerintahan itu belum pula berarti habis soal perdjuaan kemerdekaan kita oleh karena itu jang mendjadi soal ialah tjuranja berdjoang mempertahankan kemerdekaan.

Maka sesuai dengan Undang² Dasar kita jang memuat petunjuk adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul,

* Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 4 kolom 3.

XIV 2

Badan Pekerja beranggapan bahwa sekarang sudah tiba saatnya untuk mengusahakan pergerakan rakyat dengan seksama.

Hanya yang menjadi pertanyaan ialah: Baik diadakan satu partai sadijakah atau dibiarkan tumbuh beberapa partai menurut tjiarak dan aliran yang hidup dalam masyarakat kita?

Karena kita menjiundjung azas demokrasi, tentu tidak dapat kita hanya membolehkan satu partai sadija yang berdiri. Dan lagi dengan adanya partai² itu bagi kita mudah untuk menaksir kekuatan perdjjuangan kita dan bagi Pemerintahpun mudah djuga untuk minta tanggung djawab kepada pemimpin² barisan perdjjuangan.

• Maka kesimpulan Badan Pekerja tidak lain ialah: Pembentukan partai-partai sekarang boleh dimulai dengan leluasa asal sadija pembentukan itu pada azasnya dengan restriksi memperkuat perdjjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan serta mendjamin keamanan masyarakat yang kini pada beberapa tempat amat terganggu.

Berhubung dengan kesimpulan ini, maka oleh Badan Pekerja telah diusulkan kepada Pemerintah supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai² politik dengan restriksi, bahwa partai² itu hendaknja memperkuat perdjjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masyarakat.

Djakarta, 30-10-1945

BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL.

KETUA,
St. SAHRIR.

PENULIS,
SOEWANDI.

• Periksalah halaman 76.

XVXV Maklumat Pemerintah*

~~REKORSAHIBITUNG~~ Andjuran Pemerintah tentang pembentukan partij-partij politik.

Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partij-partij politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa:

1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik, karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpn jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partij-partij itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.

Djakarta, ~~15~~ September 1945

WAKIL PRESIDEN,
MOHAMAD HATTA.

* Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4.

XVI

Pengumuman Badan Pekeraja

No. 5

MENTERI TANGGUNG JAWAB
MENTERI Usul Badan Pekeraja
 yang telah disetujui oleh Pemerint-
 ah. tentang pertanggung-jawab
 Menteri kepada Badan Perwakilan
 Rakjat.

Supaja lebih tegas adanja kedaulatan rakjat dalam susunan Pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah, Badan Pekeraja dalam rapatnja telah membitjarakan soal pertanggung-jawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat (menurut susunan sementara kepada Komite Nasional Pusat).

Seperti diketahui, maka dalam Undang-Undang Dasar kita tidak terdapat pasal, baik yang mewadjiakan maupun yang melarang para Menteri bertanggung jawab. Pada lain pihak pertanggung-jawab Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat itu adalah sesuatu dialan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat. Maka berdasarkan alasan tersebut, Badan Pekeraja mengusulkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanja pertanggung-jawab itu dalam susunan Pemerintahan. Presiden menerima baik usul Badan Pekeraja, hingga dengan persetujuan tadi dimulzi adanja pertanggung-jawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Djakarta ~~1957~~ November 1957
 BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL.

KETUA,
 S. SIAHRIP.

PENULIS,
 SOEWANDI.

* Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 4 kolom 1.

XVIIMaklumat Pemerintah*

PERISTIWA SURABAJA. Andjuran Pemerintah supaja seluruh rakjat mengirim bantuan ke Surabaya untuk menundjukkan solidariteit.

1. Pemerintah Republik Indonesia baik dengan resmi maupun dengan tjara lain telah berkali-kali menjatakan kesanggupannya untuk menjelesaikan segala hal jang berkenaan dengan pendudukan Balateutera Sekutu dengan djalan damai.
2. Lain dari pada itu Pemerintah telah pula memerintahkan kepada segenap pegawaija untuk membantu tentera Sekutu.
3. Kesanggupan akan djalan damai ini telah pula dibuktikan dengan njata dalam peristiwa Surabaya (28/29 Oktober 1945) dan Magelang (29/30 Oktober 1945) jang telah dapat dihentikan dengan damai oleh Pre. iden kita.
4. Berhubung dengan keniatian Brigadier Djenderal Mallaby, jang sudah sangat kita sesalkan, Pemerintah kita telah mengusulkan kepada tentera Inggeris supaja hal itu diselesaikan dengan djalan damai.
5. Pihak Inggeris tak mengindahkan usul tsb. dan mengumumkan antjaman-antjaman jang disusul oleh ultimatum kepada kota Surabaya.
6. Sjarat-sjarat ultimatum tersebut sungguh berat dan tidak mungkin dipenuhi oleh bangsa jang menghormati dirinja.
7. Sebagai landjutan ultimatum itu tentera Inggeris telah memilih djalan kekerasan berupa pemboman dari laut dan udara dan tembakan-tembakan meriam besar, seakan-akan penduduk Surabaya berada dalam perang dengan Inggeris.
8. Bahwa perbuatan tentera Inggeris itu melukai perasaan peri-kemanusiaan jang dibuktikan oleh banjaknya korban antara penduduk jang tak bersalah dengan tidak mengindahkan perempuan atau kanak-kanak.
9. Pemerintah mengandjurkan kepada seluruh rakjat Indonesia supaja mengirim segala matjam bantuan ke Surabaya misalnja Angkatan Palang Merah, makanan, obat-obat dsb. Dengan djalan demikian dapatlah kita menundjukkan solidariteit kita dengan saudara-saudara kita di Surabaya.
10. Tetap kita mesti mendjaga supaja perdjjuangan kita berdasarkan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Hendaklah negara kita jang merdeka berdjjuang dengan tidak memaknai pertolongan dari orang Djepang, sekalipun kita ditawarkan pertolongan itu.
11. Seluruh rakjat Indonesia!
Marilah kita menundjukkan solidariteit kita jang njata kepada rakjat Surabaya.

Djakarta, 13 Nopember 1945.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

* Berita Republik Indonesia Tahun I No. 2 halaman 9 kolom 3/4.

XVIII

Maklumat Pemerintah*

TENTARA INGGERIS. KEWADJIBAN. Kewadajiban Tentara Inggeris adalah mengurus pemindahan Djepang, sehingga tidak boleh menjampuri politik.

1. Maklumat jang dikeluarkan oleh Letnan Djenderal Sir Philip Christison kemarin itu tanggal 26 bulan 12 tahun 1945 adalah pendjelasan jang tepat dan jang sesuai dengan keterangan resmi dari State Departement U.S.A., jaitu bahwa tentara Inggeris menurut keputusan Amerika — Inggeris didalam lingkungan United Nations hanja mengenai pemindahan Djepang, memperlutjuti sendjata Djepang dan mengurus kaum tawanan dan interniran. Tentara Sekutu tidak berpolitik dan tidak mendjalankan politik, sebab urusan politik ialah semata-mata urusan Indonesia — Belanda.
2. Jang mendjadi persoalan bagi tentara pendudukan bersama sama bangsa Indonesia ialah mendjamin ketenteraman dan keamanan jang terganggu sangat di beberapa kota di Djawa-B: rat oleh tindakan provokasi N.I.C.A. jang tepat dibalas oleh bangsa kita.
3. Kita bersedia bekerdja bersama-sama atas dasar keadilan mempertjepatkan usaha tentera Inggeris jang diwadjibkan kepadanya oleh United Nations dan turut mendjamin keamanan umum di daerah jang diduduki oleh Serikat. Dari pihak Pemerintah Indonesia dikemukakan, bahwa sebahagian besar gangguan keamanan itu disebabkan oleh teroris Belanda jang tidak bertanggung djawab seperti berkali-kali telah terbukti pada waktu belakangan ini, misalnja dengan pertjobaan membunuh orang Pemerintah Indonesia. **

Djakarta, 28 Desember 1945.

KEMENTERIAN PENERANGAN.

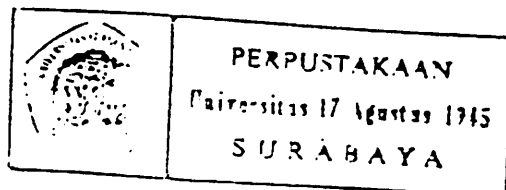
* Berita Republik Indonesia Tahun II No. 4-5 halaman 19 kolom 2.
** Pertjobaan pembunuhan Sutan Sjahrir (Perdana Menteri) pada tanggal 26 Desember 1945 oleh pihak Nica.

XIX 1

INTERNATIONAL ORGANIZATION

LEMBAGA INDONESIA-AMERIKA
LIBRARY
SURABAJA

DONALD C. BLAISDELL
The City College of
The City University of New York



THE RONALD PRESS COMPANY · NEW YORK

DONALD C. BLAISDELL, Ph.D., Columbia University, is Professor of Political Science at The City College of The City University of New York. During his service with the Department of State, Dr. Blaisdell was associated with the planning and organization of the United Nations in its early stages. Later, he was principal executive officer of the United States delegation to the United Nations General Assembly (Paris, 1948), representative of the Department of State at the European Office of the United Nations and other organizations (1951-1952), and Deputy Chief of the Permanent Mission of the United States to International Organizations, Geneva (1952-1953). Among the institutions at which Dr. Blaisdell has taught are the University of Wisconsin, the University of Illinois, and the University of Florida.

Organs of the United Nations

Six principal organs are established for the United Nations by the Charter (Article 7). They are:

1. A General Assembly
2. A Security Council
3. An Economic and Social Council
4. A Trusteeship Council
5. An International Court of Justice
6. A Secretariat

In the same article of the Charter, provision is made for establishing "such subsidiary organs as may be found necessary."

The General Assembly. The United Nations General Assembly is composed of all the members, each of whom is authorized to have not more than five representatives.

The Security Council. Originally eleven members of the United Nations made up the Security Council, divided into two classes, permanent members and other members. The permanent members are named in the Charter (Article 23). They are the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America. The other members are elected by the General Assembly. Retiring non-permanent members are not eligible for immediate re-election. In performing its electoral function the General Assembly is supposed to pay particular attention to

Original Members of the United Nations

Argentine Republic	El Salvador	Norway
Australia	Ethiopia	Panama
Belgium	France	Paraguay
Bolivia	Greece	Peru
Brazil	Guatemala	Philippine Republic
Byelorussian Soviet Socialist Republic	Haiti	Poland ¹
Canada	Honduras	Saudi Arabia
Chile	India	Syria ²
China	Iran	Turkey
Colombia	Iraq	Ukrainian Soviet Socialist Republic
Costa Rica	Lebanon	Union of South Africa
Cuba	Liberia	Union of Soviet Socialist Republics
Czechoslovakia	Luxembourg	United Kingdom
Denmark	Mexico	United States
Dominican Republic	Netherlands	Uruguay
Ecuador	New Zealand	Venezuela
Egypt	Nicaragua	Yugoslavia

¹ Admitted October 24, 1945.

² Surrendered seat when absorbed by the United Arab Republic; resumed, October 13, 1961.

RABU, 11 DESEMBER 1996

Presiden Soeharto : Bermanfaat, Perubahan Sosial yang Direncanakan

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menegaskan, pengalaman menunjukkan bahwa perubahan sosial yang diselenggarakan secara terencana, memberi manfaat lebih besar bagi bangsa dan negara secara menyeluruh dibandingkan dengan perubahan yang dilakukan melalui gejala-gejalak, betapa pun kecilnya gojalak-gejalak itu.

"Kita tidak menyetujui sikap pihak mana pun yang berkehendak melakukan penekanan dengan cara yang tidak demokratis untuk memaksakan kehendaknya," demikian kata Kepala Negara ketika membuka Musyawarah Besar Nasional Angkatan '45 di Auditorium Depar-

postel, Jakarta, hari Selasa kemarin (10/12).

Dalam acara ini, Presiden didampingi Wakil Presiden Try Sutrisno, Mendagri Yogie SM, Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja dan Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 H Suroono. Hadir pula antara lain Menko Kesra Azwar Anas, Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, Menneg Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, Meneg UPW Ny Mien Sugandhi, Menpen H Harmoko dan mantan Kabulog Bustanil Arifin. Mubes Nasional Angkatan 45 ke-10 ini akan berlangsung dari tanggal 9 sampai 13 Desember 1996.

Masyarakat terbuka

Dalam kesempatan ini Kepala Negara menekankan agar terus mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat terbuka. "Kita melancarkan upaya-upaya untuk menyebarkan, memantau dan mengkaji pelaksanaan hak asasi manusia yang sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila," demikian Kepala Negara.

"Kita terus berusaha untuk makin memantapkan kehidupan demokrasi, khususnya demokrasi yang disemangati oleh moral Pancasila," lanjut Presiden.

Menurut Presiden, kehidupan demokrasi memang memerlukan kesabaran. Untuk memecahkan suatu masalah, kata Presiden, banyak alternatif yang dapat dipilih. "Adalah jelas, bahwa tidak ada penyelesaian yang mutlak benar atau mutlak salah. Yang kita perlukan adalah rumusan penyelesaian yang kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama pula. Karena itu, kita bukan saja harus bersedia mendengarkan pendapat orang lain, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan yang meyakinkan orang lain terhadap pendapat tadi," demikian teguh Presiden.

(Bersambung ke hlm. 15 kol. 1-6)

Bermanfaat —

Kepala Negara sebelumnya mengatakan, selain telah memberikan dukungan kekuatan dan kredibilitas bagi perjuangan di masa lampau, generasi pembebas Indonesia juga telah berhasil membangun dan membangkitkan kekuatan-kekuatan nasional yang akan melanjutkan perjuangan di masa datang.

Kekuatan-kekuatan nasional baru ini, kata Presiden, telah giat dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan-keamanan. Dalam banyak hal, lanjut Kepala Negara, mereka ini bahkan lebih terdidik, lebih terlatih dan lebih profesional.

"Semangat kebangsaan mereka cukup kukuh, walaupun pelaksanaananya perlu disesuaikan dengan kondisi globalisasi dewasa ini. Karena itu, kita merasa yakin bahwa momentum per-

(Sambungan dari halaman 1)

juangan nasional kita akan dapat terpelihara dalam waktu yang panjang ke masa depan," kata Presiden.

Namun, Presiden mengatakan, perlu disadari bahwa abad ke-21 yang akan datang mempunyai banyak perbedaan dengan abad ke-20 yang akan segera lewat. Bagaimana wujudnya yang pasti masih belum tampak jelas. "Masih banyak pembenahan yang harus kita lakukan untuk mengambil manfaat sebaik-baiknya dari perkembangan masa datang," kata Presiden.

Selain itu, kata Kepala Negara, juga masih banyak pembenahan yang harus dilakukan, agar tatanan baru yang akan terbentuk nanti tidak membawa kerugian yang besar terhadap bidang-bidang yang belum sepe-nuhnya siap. "Untuk itu, kita te-

rus mendorong agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang terbuka. Kita melancarkan upaya-upaya untuk menyebarkan, memantau dan mengkaji pelaksanaan hak asasi manusia, yang sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila," kata Presiden.

Di bagian lain, Presiden memaparkan, Generasi 45 sering dikritik karena kurang menghargai peranan diplomasi dan terlalu mementingkan peranan perjuangan bersenjata. "Kita tidak dapat menyalahkan timbulnya kesan itu, karena memang peranan perjuangan bersenjata dalam kemerdekaan kita tidak kecil," kata Presiden.

Namun, kata Kepala Negara, juga tidak boleh dikecilkan peranan para pejuang nasional yang bergerak dalam bidang diplomasi. "Mereka telah berhasil menggaling dukungan

pendapat umum dunia, yang juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk merumuskan penyelesaian mendasar dari konflik kita dengan negara bekas penjajah," kata Presiden.

"Demi kebenaran sejarah, memang sudah saatnya hal itu kita luruskan kembali. Dengan jujur kita perlu mengakui bahwa diplomasi maupun perjuangan bersenjata mempunyai andil masing-masing dalam keseluruhan perjuangan kemerdekaan kita. Kaum muda kita akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap, jika kedua sisi perjuangan nasional ini kita sajikan secara seimbang kepada mereka," anjur Presiden.

Satu-satunya asas

Ketua Umum DHN Angkatan '45, H Suroono mengatakan, Angkatan 45 sungguh berbahagia karena masalah yang sangat rawan telah dapat dilampaui de-

ngan tuntas, yakni penegasan semua pihak bahwa Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemudian, lanjut Suroono, diperkukuh dengan penegasan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan merupakan pengamalan Pancasila. "Penegasan tersebut telah memperlancar proses pelestarian jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 kepada generasi yang lebih muda, agar nilai-nilai perjuangan dapat menjadi landasan, kekuatan dan daya dorong bagi perjuangan bangsa kita selanjutnya, yaitu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan," tuturnya.

Di akhir upacara pembukaan ini digelar koor yang mengumandangkan lagu-lagu perjuangan dari masa lalu, antara lain *Sepasang Mata Bola*. Beberapa hadirin yang sebagian be-

air mata dan memberi tepuk tangan ketika lagu itu dikumandangkan oleh paduan suara Deparpostel. "Lagu itu sering saya nyanyikan dulu ketika di masa perjuangan, saya tertawa ketika mengendangnya tadi, dulu saya sering ke daerah pedalaman dengan gerbong kereta api...sekarang banyak kaum muda yang tidak tahu lagi soal perjuangan masa lalu," demikian komentar Ny Yos Masdani, seorang pejuang yang juga saksi mata upacara Sumpah Pemuda di Jakarta 28 Oktober 1928, yang hadir dalam acara ini.

Wanita berkalung putih yang merayakan usia ke-86 hari Jumat 29 November 1996 itu nampak berpakaian rapih. Ia mengatakan sampai sekarang masih mengajar di dua perguruan tinggi dan membuka biro konsultasi. "Tapi honorarium yang saya terima tidak cukup untuk bayar bajaj," ujarnya. (osd/rie)

LAMPIRAN IV

BAGAN DESERTASI

LAMPIRAN IV

BAGAN DESERTASI

KAITAN ANTARA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN R.I. No. X 16-10-1945 DENGAN PERJAN JIAN LINGGARJATI DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1945-1947

(SUATU STUDI TENTANG INTERAKSI KONTEKS EKONOMI-POLITIK DOMESTIK DAN INTERNASIONAL DENGAN DIPLOMASI UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN DUNIA INTERNASIONAL)



**OLEH :
SOEPARDI SARIOHARTONO, DR.S.**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**